RKPD
KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2023

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2023

WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja PD.

BAB II

RKPD

Pasal 2

RKPD Tahun 2023 dijadikan sebagai:

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja PD tahun 2023; dan
b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta PPAS Daerah sebagai penyusunan rancangan APBD Tahun 2023.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2023 memuat:
   a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
   b. prioritas pembangunan Daerah;
   c. rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun; dan
   d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah.

(2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

BAB I	PENDAHULUAN;
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
BAB III	GAMBARAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
BAB VII	PENUTUP.

(3) RKPD tahun 2023 berpedoman pada rencana kerja pemerintah tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023.

(4) Rincian RKPD tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

BAB IV
PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

(1) Perubahan RKPD hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
   a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
   b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

(2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA serta rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Wali Kota dengan Ketua DPRD.

(3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

(4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah Daerah ditetapkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 25 Juli 2022
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 25 Juli 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

DAFTAR ISI

BAB I

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... - 7 -

1.1. Latar Belakang ..... - 7 -

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... - 8 -

1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... - 11 -

1.4. Maksud dan Tujuan ..... - 11 -

1.5. Sistematika Penulisan ..... - 12 -

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... - 1 -

2.1. Kondisi Umum Daerah ..... - 1 -

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... - 22 -

2.3. Aspek Pelayanan Umum ..... - 42 -

2.4. Aspek Daya Saing Daerah ..... - 125 -

2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ..... - 142 -

2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah ..... - 223 -

2.7. Inovasi Daerah ..... - 236 -

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ..... - 241 -

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... - 241 -

3.2. Kinerja Pelaksanaan APBD ..... - 247 -

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... - 251 -

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... - 260 -

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... - 260 -

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah ..... - 268 -

4.3. Inovasi Daerah ..... - 285 -

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... - 291 -

5.1 Usulan langsung Masyarakat ..... - 291 -

5.2 Pokok Pikiran DPRD ..... - 297 -

5.3 Kerangka Pendanaan ..... - 331 -

5.4 Rencana Program ..... - 332 -

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... - 671 -

6.1 Indikator Kinerja Utama. ..... - 671 -

6.2 Indikator Kinerja Kunci. ..... - 672 -

6.3 Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2023. ..... - 690 -

BAB VII

PENUTUP .....- 696 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Balikpapan ..... - 2 -
Gambar 2.2 Peta Posisi Strategis Kota Balikpapan Sebagai Penyangga IKN..... - 3 -
Gambar 2.3 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Historikal 1991-2020 ..... - 3 -
Gambar 2.4 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Model CSIRO RCP45 2021-2050 ..... - 3 -
Gambar 2.5 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Model MIROC RCP45 Periode 2021-2050 ..... - 4 -
Gambar 2.6 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Musiman Historikal 1991-2020 ..... - 4 -
Gambar 2.7 Peta Suhu Kota Balikpapan Tahunan Historikal 1991-2020..... - 4 -
Gambar 2.8 Peta Suhu Kota Balikpapan Tahunan Model CSIRO RCP45 2021-2050 ..... - 4 -
Gambar 2.9 Peta Suhu Kota Balikpapan Tahunan Model MIROC RCP45 2021-2050 ..... - 5 -
Gambar 2.10 Peta DAS Kota Balikpapan ..... - 6 -
Gambar 2.11 Peta Ketinggian Kota Balikpapan..... - 6 -
Gambar 2.12 Peta Kelerengan Kota Balikpapan ..... - 8 -
Gambar 2.13 Peta Penggunaan Lahan Kota Balikpapan..... - 10 -
Gambar 2.14 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Industri Kota Balikpapan ..... - 15 -
Gambar 2.15 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara..... - 16 -
Gambar 2.16 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Timur ..... - 16 -
Gambar 2.17 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan..... - 16 -
Gambar 2.18 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat..... - 16 -
Gambar 2.19 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Tengah ..... - 17 -
Gambar 2.20 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Kota ..... - 17 -
Gambar 2.21 Peta Indeks Bahaya Banjir Kota Balikpapan (Baseline 1991-2020 dan Proyeksi 2021-2050) ..... - 18 -
Gambar 2.22 Peta Indeks Bahaya Tanah Longsor Kota Balikpapan (Baseline 1991-2020 dan Proyeksi 2021-2050) ..... - 19 -
Gambar 2.23 Peta Indeks Bahaya Kekeringan Kota Balikpapan ..... - 19 -
Gambar 2.24 Diagram Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2021 ..... - 21 -

Gambar 2.25 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 (%) ..... - 25 -
Gambar 2.26 PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah) ..... - 26 -
Gambar 2.27 Distribusi Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi Kalimantan Timur ..... - 27 -
Gambar 2.28 Perbandingan Inflasi Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional ..... - 28 -
Gambar 2.29 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 29 -
Gambar 2.30 Perbandingan Jumlah &Persentase Penduduk Miskin (P0) menurut Kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Banjarmasin Tahun 2017-2021- 30 -
Gambar 2.31 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks dan Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2017-2021 ..... - 30 -
Gambar 2.32 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ..... - 31 -
Gambar 2.33 Peta Sebaran Penduduk Miskin Kota Balikpapan..... - 31 -
Gambar 2.34 Perbandingan Indeks Gini Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional ..... - 33 -
Gambar 2.35 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan IPM (%) Kota Balikpapan Tahun 2017-2021..... - 33 -
Gambar 2.36 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ..... - 33 -
Gambar 2.37 Perbandingan IPM Kota Balikpapan dengan Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Makassar, Banjarmasin, Semarang dan Nasional Tahun 2017-2021 ..... - 34 -
Gambar 2.38 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 34 -
Gambar 2.39 RLS Kota Balikpapan Menurut Gender Tahun 2016-2020 ..... - 35 -
Gambar 2.40 RLS Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, 2021 ..... - 35 -
Gambar 2.41 Harapan Lama Sekolah Kota Balikpapan Tahun 2017-2021..... - 35 -
Gambar 2.42 HLS Kota Balikpapan Menurut Gender Tahun 2016-2020 ..... - 36 -
Gambar 2.43 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ..... - 36 -
Gambar 2.44 Angka Harapan Hidup (Tahun) Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 - 37 -
Gambar 2.45 Angka Harapan Hidup Kota Balikpapan Menurut Gender Tahun 2016-2020..... - 37 -
Gambar 2.46 Angka Harapan Hidup (Tahun) se-Kalimantan Timur Tahun 2021 . - 38 -
Gambar 2.47 Pengeluaran Per Kapita Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2020..... - 38 -
Gambar 2.48 Pengeluaran Per Kapita Kota Balikpapan Menurut Gender Tahun 2016-2020..... - 39 -

Gambar 2.49 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ..... - 39 -
Gambar 2.50 Angka Partisipasi Kasar Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020..... - 43 -
Gambar 2.51 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020 ..... - 44 -
Gambar 2.52 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Balikpapan Tahun 2017–2021 ..... - 44 -
Gambar 2.53 Angka Putus Sekolah Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2021 ..... - 45 -
Gambar 2.54 Persentase Sekolah Pendidikan dengan Kondisi Bangunan Baik Di Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2021 ..... - 45 -
Gambar 2.56 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit Di Kota Balikpapan tahun 2017-2021..... - 47 -
Gambar 2.55 Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang Terakreditasi Nasional Di Kota Balikpapan tahun 2017-2021 ..... - 47 -
Gambar 2.57 Persentase Akreditasi Puskesmas Kota Balikpapan..... - 48 -
Gambar 2.58 Persentase Ketersediaan SDM Tenaga Kesehatan di Puskesmasdan Rumah Sakit Kota Balikpapan tahun 2017-2021 ..... - 49 -
Gambar 2.59 Indeks Kepuasan Infrastruktur Dasar (IKLI) tahun 2017 - 2021 .... - 56 -
Gambar 2.60 Persentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik dan Titik Banjir di Kota Balikpapan tahun 2016-2020 ..... - 57 -
Gambar 2.61 Peta Sebaran Titik Banjir Kota Balikpapan Tahun 2020..... - 58 -
Gambar 2.62 Rata-Rata Volume Sampah Harian Ke TPAS Manggar Kota Balikpapan Tahun 2017-2021..... - 60 -
Gambar 2.63 Indeks Pembangunan Gender Kota Balikpapan Tahun 2016–2020 - 75 -
Gambar 2.64 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia Tahun 2016 – 2020..... - 76 -
Gambar 2.65 Capaian Persentase Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan terhadap Anak..... - 78 -
Gambar 2.66 Indeks IKA, IKLH, IKL dan IKU Tahun 2017 - 2021..... - 85 -
Gambar 2.67 Persentase Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 87 -
Gambar 2.68 Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021..... - 90 -
Gambar 2.69 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021..... - 91 -
Gambar 2.70 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Urusan Penanaman Modal di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 104 -
Gambar 2.71 Jumlah Objek Wisata di Kota Balikpapan Menurut Jenisnya Tahun 2021..... - 112 -
Gambar 2.72 Sub Sektor Ekonomi Kreatif Kota Balikpapan ..... - 117 -
Gambar 2.73 Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tanaman Perkebunan dan Ternak (Ribu Ton) di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 118 -

Gambar 2.74 Mini Market dan Toko Tradisional yang Belum Memiliki Izin Tahun 2020 ..... - 120 -
Gambar 2.75 Rekapitulasi Capaian Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 1 Hasil RKPD Kota alikpapan Tahun 2021 Semester II... - 143 -
Gambar 2.76 Rekapitulasi Capaian Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 2 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II - 150 -
Gambar 2.77 Rekapitulasi Capaian Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 3 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II - 154 -
Gambar 2.78 Rekapitulasi Capaian Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 4 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II - 157 -
Gambar 2.79 Rekapitulasi Capaian Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 5 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II - 164 -
Gambar 2.80 Rekapitulasi Capaian Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 6 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II - 173 -
Gambar 2.81 Rekapitulasi Capaian Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II ... - 180 -
Gambar 2.82 Rekapitulasi Capaian Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 8 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II - 184 -
Gambar 2.83 Rekapitulasi Capaian Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 9 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II - 190 -
Gambar 2.84 Rekapitulasi Capaian Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 10 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II..... - 204 -
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan Tahun 2018-2020 ..... - 244 -
Gambar 3.2 Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 248 -
Gambar 3.3 Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020..... - 250 -
Gambar 3.4 Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 250 -
Gambar 3.5 Kontribusi Pendapatan Daerah 2019-2021 ..... - 254 -
Gambar 4.1 Tujuan dan Sasaran Misi 1 ..... - 261 -
Gambar 4.2 Tujuan dan Sasaran Misi 2 ..... - 262 -
Gambar 4.3 Tujuan dan Sasaran Misi 3 ..... - 263 -
Gambar 4.4 Tujuan dan Sasaran Misi 4 ..... - 263 -
Gambar 4.5 Tujuan dan Sasaran Misi 5 ..... - 264 -
Gambar 4.6 Target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2023 ..... - 269 -
Gambar 4.7 7 (Tujuh) Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2023..... - 269 -
Gambar 4.8 Target Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 ..... - 273 -
Gambar 4.9 6 (enam) prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023..... - 273 -
Gambar 4.10 6 (enam) prioritas Pembangunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026..... - 275 -

Gambar 4.11 Target Makro Pembangunan Kota Balikpapan tahun 2023 ..... - 275 -
Gambar 4.12 Fokus Pembangunan Kota Balikpapan tahun 2023..... - 276 -
Gambar 4.13 Fokus Pembangunan Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik ..... - 276 -
Gambar 4.14 Fokus Pembangunan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing ..... - 278 -
Gambar 4.15 Fokus Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Dasar..... - 279 -
Gambar 4.16 Fokus Pembangunan Penguatan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Investasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat . - 280 -

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan Kota Balikpapan ..... - 2 -
Tabel 2.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Balikpapan ..... - 5 -
Tabel 2.3 Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Topografi (Ketinggian) - 6 -
Tabel 2.4 Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan ..... - 7 -
Tabel 2.5 Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Kota Balikpapan 2012-2032 ..... - 9 -
Tabel 2.6 Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kota Balikpapan ..... - 14 -
Tabel 2.7 Jumlah Bencana yang Terjadi di Kota Balikpapan Menurut Jenis Bencana Tahun 2017-2021 ..... - 17 -
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk pada Setiap Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2021 ..... - 20 -
Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2021 ..... - 21 -
Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2021 ..... - 22 -
Tabel 2.11 Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2020 (miliar rupiah) - 23 -
Tabel 2.12 Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (miliar rupiah) - 24 -
Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Persen)..... - 24 -
Tabel 2.14 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 26 -
Tabel 2.15 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2017-2021 ..... - 27 -
Tabel 2.16 Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2017 – 2021 ..... - 32 -
Tabel 2.17 Ormas dan Paguyuban Kota Balikpapan 2023 ..... - 40 -
Tabel 2.18 Jumlah Sanggar Seni Tahun 2022 Kota Balikpapan 2023 ..... - 41 -
Tabel 2.19 Data Fasilitas Umum Olahraga Di Kota Balikpapan ..... - 41 -
Tabel 2.20 Cabang Olahraga di Kota Balikpapan ..... - 42 -
Tabel 2.21 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru di Kota Balikpapan Tahun 2021 .. - 42 -
Tabel 2.22 Rasio Guru terhadap Murid di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021.... - 43 -
Tabel 2.23 Pencapaian Indikator SPM Urusan Pendidikan Tahun 2020-2021 ..... - 46 -
Tabel 2.24 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan Tahun 2021 ..... - 47 -
Tabel 2.25 Angka Kematian Ibu Tahun 2017-2021 ..... - 51 -
Tabel 2.26 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA) di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 51 -
Tabel 2.27 Pencapaian Indikator SPM Urusan Kesehatan Tahun 2020-2021 ..... - 52 -
Tabel 2.28 Angka Penderita Penyakit HIV dan AIDS, Demam Berdarah, dan TBC Tahun 2017-2021 ..... - 54 -

Tabel 2.29 Cakupan Kelurahan Siaga dan UKBM Aktif Di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 55 -
Tabel 2.30 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Balikpapan (km) Tahun 2017-2021 ..... - 56 -
Tabel 2.31 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kota Balikpapan (km) Tahun 2017-2021 ..... - 56 -
Tabel 2.32 Tingkat Kualitas Trotoar dan Jalan di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 ..... - 57 -
Tabel 2.33 Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 57 -
Tabel 2.34 kondisi drainase di Kota Balikpapan Tahun 2021 ..... - 58 -
Tabel 2.35 Luas Genangan Banjir di Kota Balikpapan Tahun 2018-2021 ..... - 58 -
Tabel 2.36 Sumber Air Baku Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 59 -
Tabel 2.37 Perkembangan Pelayanan Air Minum Perpipaan PTMB Tahun 2017-2021 ..... - 59 -
Tabel 2.38 Layanan Jaringan Air Minum Perpipaan di Kota Balikpapan ..... - 60 -
Tabel 2.39 Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah Di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 61 -
Tabel 2.40 Sarana dan Prasarana Persampahan Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 61 -
Tabel 2.41 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Kota Balikpapan 2017 – 2021 ..... - 62 -
Tabel 2.42 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2017-2021 ..... - 63 -
Tabel 2.43 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kota Balikpapan Tahun 2021..... - 63 -
Tabel 2.44 Capaian Penurunan Backlog Perumahan..... - 63 -
Tabel 2.45 Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Baseline Tahun 2014... - 64 -
Tabel 2.46 Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Baseline Tahun 2020... - 65 -
Tabel 2.47 Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran yang Dilaporkan di Kota Balikpapan Menurut Jenisnya, 2017-2021 ..... - 65 -
Tabel 2.48 Angka Kriminalitas dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017-2021 - 66 -
Tabel 2.49 Cakupan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 67 -
Tabel 2.50 Cakupan Penegakan Perda dan Perkada dan Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan Di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 68 -
Tabel 2.51 Capaian Kinerja Layanan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kota Balikpapan Tahun 2017 - 2021..... - 69 -
Tabel 2.52 Capaian Kinerja Layanan SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2017 - 2021 ..... - 71 -
Tabel 2.53 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2017-2021 ..... - 71 -
Tabel 2.54 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dan Belum Ditempatkan

Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 ..... - 72 -
Tabel 2.55 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kota Balikpapan 2017 – 2020 ..... - 74 -
Tabel 2.56 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kota Balikpapan dan .. - 76 -
Tabel 2.57 Indikator IDG Kota Balikpapan tahun 2017-2021 ..... - 77 -
Tabel 2.58 Jumlah Kasus Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan..... - 77 -
Tabel 2.59 Laporan Jenis Kasus Kekerasan Terhadap Anak..... - 78 -
Tabel 2.60 Capaian Kinerja Layanan SPM Bidang Urusan Pangan Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2021..... - 79 -
Tabel 2.61 Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Kota Balikpapan Tahun 2017-2021. - 80 -
Tabel 2.62 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2021 ..... - 81 -
Tabel 2.63 Kebutuhan Lahan Pembangunan Waduk Teritib, Embung Aji Raden dan ITK ..... - 82 -
Tabel 2.64 Persentase Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga Tahun 2017-2021..... - 89 -
Tabel 2.65 Jumlah Penduduk Wajib KTP dan Memiliki e-KTP Tahun 2017 – 2021 ..... - 90 -
Tabel 2.66 Data Kepemilikan Akta Kelahiran Untuk Penduduk Usia Anak Tahun 2017 – 2021 ..... - 91 -
Tabel 2.67 Cakupan Penerbitan Akta Kematian dan Kartu Identitas Anak di Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2021..... - 92 -
Tabel 2.68 Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2021..... - 92 -
Tabel 2.69 Dana Swadaya Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 93 -
Tabel 2.70 Jumlah Akseptor KB Aktif Menurut Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021..... - 94 -
Tabel 2.71 Persentase Pasangan Usia Subur dan Akseptor Keluarga Berencana Tahun 2017 - 2021..... - 94 -
Tabel 2.72 Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKota Balikpapan Tahun 2017-2021..... - 96 -
Tabel 2.73 Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit) Di Kota Balikpapan Tahun 2021 ..... - 97 -
Tabel 2.74 Perbandingan Angkutan Kota terhadap Jumlah Kendaraan Tahun 2017-2021..... - 97 -
Tabel 2.75 Jumlah Fasilitas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2017-2021 ..... - 98 -
Tabel 2.76 Data Menara Telekomunikasi Kota Balikpapan Tahun 2017-2020... - 99 -
Tabel 2.77 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2021..... - 100 -

Tabel 2.78 Jumlah Koperasi Aktif Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 100 -
Tabel 2.79 Jumlah UMKM di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 101 -
Tabel 2.80 Perkembangan UMKM Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 101 -
Tabel 2.81 Capaian Kinerja Urusan Koperasi UMKM 2017-2021 ..... - 101 -
Tabel 2.82 Realisasi Investasi Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 102 -
Tabel 2.83 Realisasi Investasi Menurut Sektor Usaha Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 (juta rupiah) ..... - 103 -
Tabel 2.84 Capaian Kinerja Pengelolaan Perizinan Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 104 -
Tabel 2.85 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 2017-2021 . - 105 -
Tabel 2.86 Ketersediaan Dokumen Statistik di Kota Balikpapan 2017 – 2021 . - 106 -
Tabel 2.87 Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2017-2021 ..... - 107 -
Tabel 2.88 Prestasi di Bidang Seni, Budaya, dan Keagamaan ..... - 108 -
Tabel 2.89 Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi ..... - 108 -
Tabel 2.90 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2017-2021 ..... - 110 -
Tabel 2.91 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan 2017-2021 ..... - 111 -
Tabel 2.92 Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 – 2021 ..... - 112 -
Tabel 2.93 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB ..... - 112 -
Tabel 2.94 Objek dan Nama Tempat Wisata di Kota Balikpapan ..... - 113 -
Tabel 2.95 Arah Strategi Pengembangan Pariwisata Berdasarkan SDG's ..... - 115 -
Tabel 2.96 Capaian Kinerja Sektor Pariwisata Tahun 2017 – 2021 ..... - 116 -
Tabel 2.97 Luas Panen Padi dan Palawija (Ha) di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 117 -
Tabel 2.98 Produksi Panen Padi dan Palawija (Ton) di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 117 -
Tabel 2.99 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2017 – 2021 ..... - 119 -
Tabel 2.100 Sarana Perdagangan di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 119 -
Tabel 2.101 Jumlah Kios dan Pedagang Kaki Lima di Kota Balikpapan Tahun 2021 ..... - 119 -
Tabel 2.102 Realisasi Ekspor dan Impor Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 .... - 120 -
Tabel 2.103 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kota Balikpapan 2017 – 2021 ..... - 121 -
Tabel 2.104 Jumlah Usaha Kecil yang Mendapat Sertifikasi Kompetensi di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 121 -
Tabel 2.105 Jumlah Usaha Non-Kecil yang Mendapat Sertifikasi Kompetensi di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 121 -
Tabel 2.106 Perkembangan Sektor Perindustrian Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2021 ..... - 122 -
Tabel 2.107 Perkembangan Kelompok Industri Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 123 -
Tabel 2.108 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian 2017-2021 ..... - 124 -

Tabel 2.109 Proyeksi Kebutuhan Lahan dan Jumlah Kawasan Industri Baru Tahun 2015-2035 ..... - 124 -
Tabel 2.110 Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 125 -
Tabel 2.111 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2017-2021 ..... - 126 -
Tabel 2.112 Pertumbuhan Penumpang Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 126 -
Tabel 2.113 Arus Penumpang Turun dan Naik Angkutan Laut di Pelabuhan Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 126 -
Tabel 2.114 Penilaian Kesesuaian Rencana Pola Ruang dan Tutupan Lahan .... - 127 -
Tabel 2.115 Infrastruktur Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 127 -
Tabel 2.116 Konsumen Air Bersih di Kota Balikpapan Tahun 2021 ..... - 128 -
Tabel 2.117 Jumlah Pelanggan Listrik Berdasarkan Kelompok Tarif Tahun 2017-2021 ..... - 128 -
Tabel 2.118 Kondisi Penyediaan Listrik di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 . - 129 -
Tabel 2.119 Realisasi Investasi Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 129 -
Tabel 2.120 Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran yang Dilaporkan Menurut Jenisnya Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2021 ..... - 129 -
Tabel 2.121 Jumlah Tempat Usaha, Tempat Tinggal, dan Lain-lain yang Mengurus Izin di DPMPT Kota Balikpapan Tahun 2017-2021..... - 131 -
Tabel 2.122 Capaian Tingkat Pengembangan ASN Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 ..... - 133 -
Tabel 2.123 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Balikpapan ..... - 134 -
Tabel 2.124 Capaian Sasaran 1 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II ..... - 143 -
Tabel 2.125 Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran 1 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II..... - 145 -
Tabel 2.126 Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Sasaran 1 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II..... - 146 -
Tabel 2.127 Kesesuaian Tingkat Capaian Kinerja Sasaran I Terhadap RPJMD Tahun 2021..... - 149 -
Tabel 2.128 Capaian Sasaran 2 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II ..... - 150 -
Tabel 2.129 Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran 2 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II..... - 151 -
Tabel 2.130 Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Sasaran 2 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II..... - 151 -
Tabel 2.131 Kesesuaian Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 2 Terhadap RPJMD Tahun 2021..... - 154 -
Tabel 2.132 Capaian Sasaran 3 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021

Semester II ..... - 154 -
Tabel 2.133 Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran 3 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II ..... - 155 -
Tabel 2.134 Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Sasaran 3 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II ..... - 155 -
Tabel 2.135 Kesesuaian Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 3 Terhadap RPJMD Tahun 2021 ..... - 157 -
Tabel 2.136 Capaian Sasaran 4 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II ..... - 157 -
Tabel 2.137 Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran 4 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II ..... - 158 -
Tabel 2.138 Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran 4 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II ..... - 159 -
Tabel 2.139 Kesesuaian Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 4 Terhadap RPJMD Tahun 2021 ..... - 163 -
Tabel 2.140 Capaian Sasaran 5 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II ..... - 164 -
Tabel 2.141 Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran 5 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II ..... - 165 -
Tabel 2.142 Capaian Kinerja Kegiatam Pendukung Sasaran 5 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II ..... - 167 -
Tabel 2.143 Kesesuaian Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 5 Terhadap RPJMD Tahun 2021 ..... - 172 -
Tabel 2.144 Capaian Sasaran 6 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II ..... - 173 -
Tabel 2.145 Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran 6 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II ..... - 174 -
Tabel 2.146 Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Sasaran 6 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II ..... - 175 -
Tabel 2.147 Kesesuaian Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 6 Terhadap RPJMD Tahun 2021 ..... - 179 -
Tabel 2.148 Capaian Sasaran 7 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II ..... - 180 -
Tabel 2.149 Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran 7 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II ..... - 181 -
Tabel 2.150 Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Sasaran 7 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II ..... - 181 -
Tabel 2.151 Kesesuaian Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 7 Terhadap RPJMD Tahun 2021 ..... - 183 -
Tabel 2.152 Capaian Sasaran 8 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II ..... - 183 -

Tabel 2.153 Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran 8 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II ..... - 185 -
Tabel 2.154 Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Sasaran 8 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II ..... - 186 -
Tabel 2.155 Kesesuaian Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 8 Terhadap RPJMD Tahun 2021 ..... - 189 -
Tabel 2.156 Capaian Sasaran 9 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II ..... - 190 -
Tabel 2.157 Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran 9 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II ..... - 191 -
Tabel 2.158 Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Sasaran 9 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II ..... - 192 -
Tabel 2.159 Kesesuaian Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 9 Terhadap RPJMD Tahun 2021 ..... - 202 -
Tabel 2.160 Capaian Sasaran 10 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II ..... - 203 -
Tabel 2.161 Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran 10 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II ..... - 205 -
Tabel 2.162 Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Sasaran 10 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II ..... - 208 -
Tabel 2.163 Kesesuaian Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 10 Terhadap RPJMD Tahun 2021 ..... - 221 -
Tabel 2.164 Permasalahan Pembangunan Daerah ..... - 223 -
Tabel 2.165 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ..... - 225 -
Tabel 2.166 Inovasi Daerah yang Telah Dilaksanakan ..... - 236 -
Tabel 3.1 Target Indikator Makro Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2021 ..... - 245 -
Tabel 3.2 Persandingan Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2023 ... - 245 -
Tabel 3.3 Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 247 -
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 248 -
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 ..... - 249 -
Tabel 3.6 Realisasi Pendapatan Tahun 2019 – 2021 ..... - 252 -
Tabel 3.7 Target Pendapatan Tahun 2022 – 2023 ..... - 252 -
Tabel 3.8 Realisasi Belanja Tahun 2019 - 2021 ..... - 255 -
Tabel 3.9 Target Belanja Tahun 2022–2023 ..... - 255 -
Tabel 3.10 Alokasi Belanja Mandatory Tahun 2023* ..... - 256 -
Tabel 3.11 Realisasi Pembiayaan Tahun 2019-2021 ..... - 257 -
Tabel 3.12 Target Pembiayaan Tahun 2022–2023 ..... - 257 -

Tabel 3.13 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Balikpapan ..... - 258 -
Tabel 3.14 Rencana Pembangunan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah ..... - 259 -
Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Balikpapan tahun 2023 ..... - 265 -
Tabel 4.2 Penjabaran Arah Kebijakan RKP 2023 ..... - 270 -
Tabel 4.3 Arah Kebijakan dan Lokus Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2023 ..... - 273 -
Tabel 4.4 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan 2023..... - 274 -
Tabel 4.5 Dukungan Program Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Balikpapan..... - 284 -
Tabel 5.1 Usulan Langsung Masyarakat Tahun 2023 Kota Balikpapan..... - 291 -
Tabel 5.2 Pokok Pikiran DPRD Tahun 2023 Kota Balikpapan..... - 298 -
Tabel 5.3 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2023..... - 331 -
Tabel 5.4 Indikasi Rencana Kebutuhan Pendanaan Program Prioritas Kota Balikpapan Tahun 2023..... - 333 -
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kota Balikpapan Tahun 2023 ..... - 671 -
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Kunci Kota Balikpapan Tahun 2023 ..... - 672 -
Tabel 6.3 Kinerja Bidang Urusan di dalam Pedoman Penyusunan RKPD 2023 - 690 -
Tabel 6.4 Penyandingan Hal Khusus dalam Pedoman Penyusunan RKPD 2023 dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023 ..... - 692 -

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan pembangunan sebagaimana tercantum pada Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal inilah yang dijadikan acuan dalam merencanakan pembangunan di Indonesia, baik dalam lingkup nasional maupun lingkup daerah. Oleh karena itu, tujuan pembangunan di Kota Balikpapan dalam lingkup kerangka NKRI berpedoman pada Pembukaan UUD 1945 tersebut.

Pasca pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2020, Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk menjabarkan RPJMD dalam periode per tahun diperlukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang selanjutnya disebut RKPD. RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pada Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja, dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke-dua pada periode RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Penyusunan RKPD menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah

yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi hingga nasional.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada subtansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Penyusunan dokumen rancangan awal RKPD 2023 ini mengacu pada Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu: persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

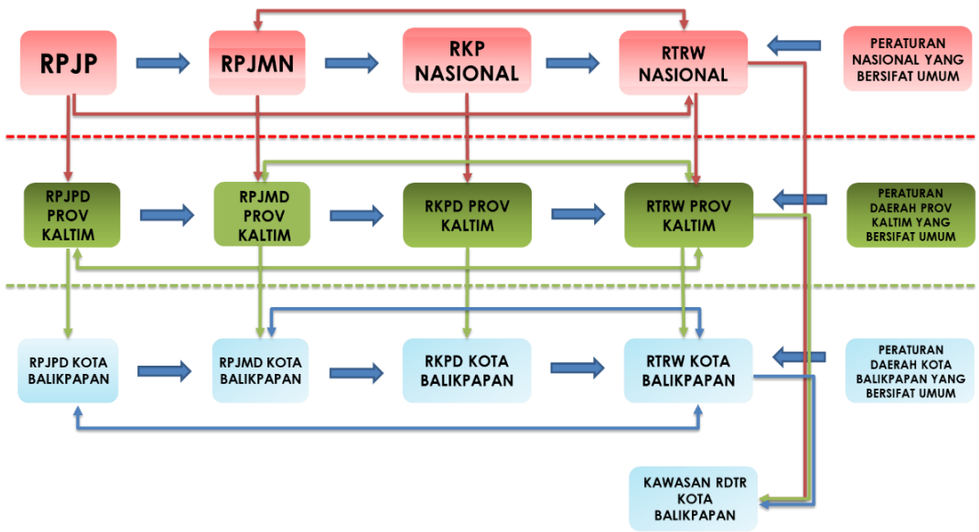
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
27. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
28. Peraturan Menteri Dalam Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036;
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
38. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
39. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;
40. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;

41. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2041.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi, RKPD Kota Balikpapan perlu untuk mengacu dan mempertimbangkan substansi dari dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar proses perumusan pembangunan sesuai dengan keseluruhan perencanaan pembangunan baik di tingkat, daerah, provinsi, dan nasional.



Gambar 1.1 HubunganAntarDokumenPerencanaan

Sumber: Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 juga harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral nasional maupun daerah, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, serta Strategi nasionalPencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025. Selanjutnya dokumen perencanaan multi sektor di tingkat Kota Balikpapan yang terkait dengan RKPD tahun 2023 antara lain: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun2012-2032, *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah (SIDa); Rencana Aksi Daerah Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah; Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, serta dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /*Sustainable Development Goals* (SDGs) Kota Balikpapam. Sinkronisasi antar dokumen dilakukan dalam rangka pencapaian tema pembangunan di tahun 2023.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023 dimaksudkan:

1. Sebagai arah pembangunan tahunan Kota Balikpapan pada tahun 2023;
2. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait

lainnya, untuk mewujudkan citacita dan tujuan pembangunan daerah Kota Balikpapan pada tahun 2023 sesuai RPJMD periode tahun 2021-2026;

3. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi dan program Wali Kota Balikpapan;
4. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan prioritas pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi msyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
5. Sebagai acuan dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS, beserta RAPBD tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah:

1. Menyediakan satu acuan bagi seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2023;
2. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2023;
3. Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
4. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipastif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan serta menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Kota Balikpapan;

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan rincian sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Kota Balikpapan merupakan sebuah kota di Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959. Kota Balikpapan memiliki wilayah yang berbukit-bukit dengan sedikit daerah landai di sekitar aliran sungai dan pesisir pantai. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kota Balikpapan dipimpin oleh seorang Wali Kota dengan didampingi seorang Wakil Wali Kota. Kota Balikpapan merupakan jumlah penduduk terbesar ketiga setelah Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartenegara. Jumlah penduduk Kota Balikpapan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2021 sebanyak 659.287. Kondisi umum Kota Balikpapan dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi di Kota Balikpapan menggambarkan karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan, gambaran kondisi demografi mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kota Balikpapan.

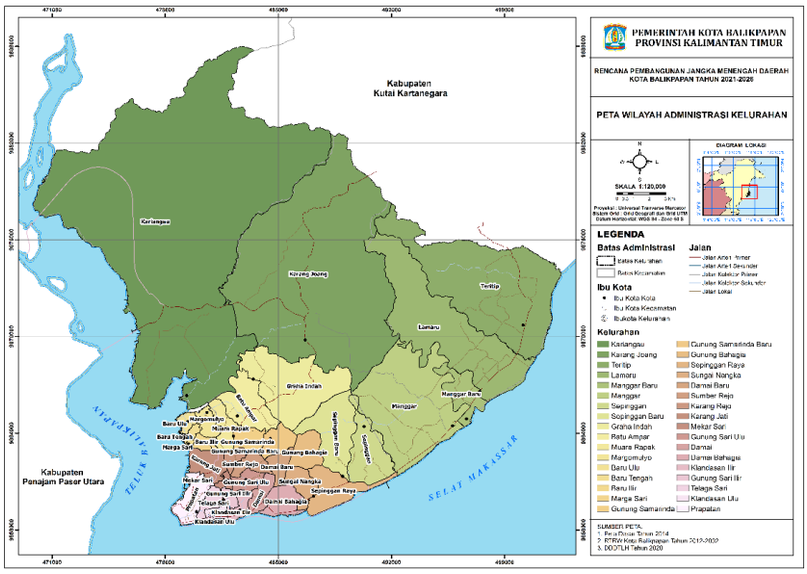
2.1.1.1. Karakteristik Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara administratif luas keseluruhan Kota Balikpapan adalah 51.101,24 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996, Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Namun sejak dikeluarkannya Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan, kini Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Balikpapan
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

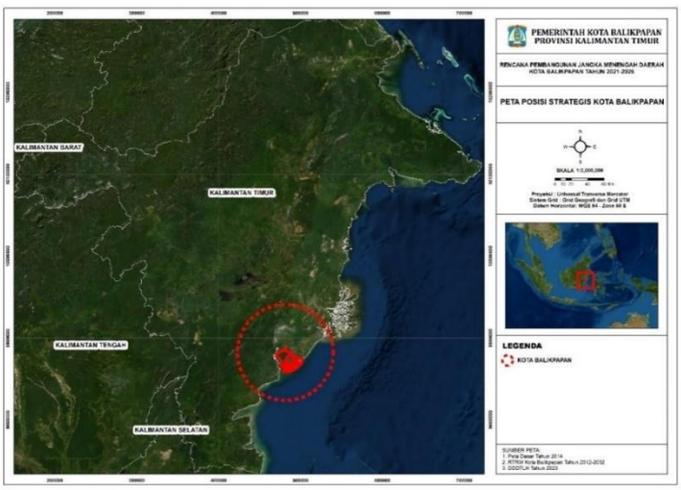
Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan Kota Balikpapan

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
Kecamatan Balikpapan Selatan		3.880,97
1	Damai Baru	215,53
2	Damai Bahagia	375,63
3	Sepinggan Baru	1.063,70
4	Sungai Nangka	319,95
5	Sepinggan Raya	662,58
6	Gunung Bahagia	373,86
7	Sepinggan	869,72
Kecamatan Balikpapan Kota		1.109,82
1	Prapatan	442,47
2	Telaga Sari	176,39
3	Klandasan Ulu	106,97
4	Klandasan Ilir	161,67
5	Damai	222,31
Kecamatan Balikpapan Timur		11.915,52
1	Manggar	3.303,73
2	Manggar Baru	521,35
3	Lamaru	3.607,02
4	Teritip	4.483,42
Kecamatan Balikpapan Tengah		1.082,58
1	Gunung Sari Ilir	108,51
2	Gunung Sari Ulu	205,61
3	Mekar Sari	72,37
4	Karang Rejo	121,90
5	Sumber Rejo	216,10
6	Karang Jati	358,10
Kecamatan Balikpapan Barat		19.288,02
1	Baru Ilir	71,31
2	Margo Mulyo	197,07
3	Marga Sari	56,94
4	Baru Tengah	91,25
5	Baru Ulu	121,21
6	Kariangau	18.750,25
Kecamatan Balikpapan Utara		13.824,34
1	Gunung Samarinda	266,42
2	Muara Rapak	316,71
3	Batu Ampar	780,04
4	Karang Joang	10.232,37
5	Gunung Samarinda Baru	266,42
6	Graha Indah	1.924,59
Total Luas		51.101,24

Sumber: Rencana Detail Tata RuangKota Balikpapan Tahun 2021-2041

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kota Balikpapan terletak pada posisi 116,5°-117,0° Bujur Timur dan diantara 1,0°-1,5° Lintang Selatan. Secara geografis, Kota Balikpapan terletak di bagian timur Pulau Kalimantan serta berbatasan langsung dengan Teluk Balikpapan dan Selat Makassar. Posisi Kota Balikpapan yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar menjadi nilai lebih tersendiri kaitannya dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Kota Balikpapan sendiri disiapkan sebagai *Buffer Zone* (Zona Penyangga) bagi IKN baru yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara karena berbatasan secara langsung.

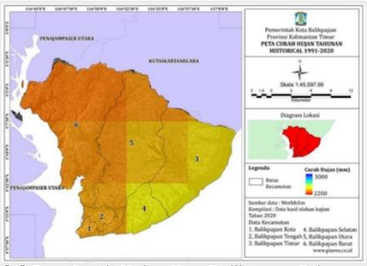


Gambar 2.2 Peta Posisi Strategis Kota Balikpapan Sebagai Penyangga IKN
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

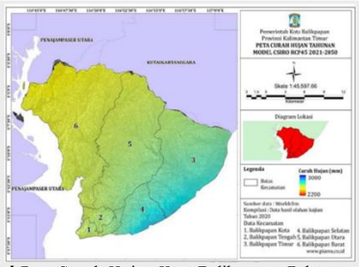
c. Iklim

1. Curah Hujan Kota Balikpapan

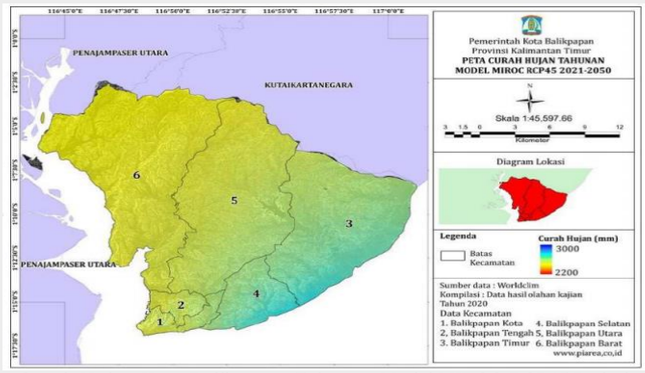
Curah hujan tahunan Kota Balikpapan historikal 1991-2020 memiliki rentang dari 2200 mm hingga 2400 mm yang ditunjukkan dengan sebaran warna kuning hingga merah pada Gambar 2.3. Pola sebaran curah hujan tahunan historikal tersebut dari hulu ke hilir menunjukkan peningkatan. Hal ini ditandai dengan sebaran warna kuning berada pada daerah pesisir dan sebaran warna jingga hingga merah berada di daerah perbukitan Kota Balikpapan (Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara). Curah hujan Kota Balikpapan diproyeksikan mengalami peningkatan secara merata dimasa depan dalam rentang 2500-2800 mm dengan sebaran pola tinggi hujan tetap, hal ini ditunjukkan pada Gambar 2.4 dan Gambar 2.5.



Gambar 2.3 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Historikal 1991-2020
Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

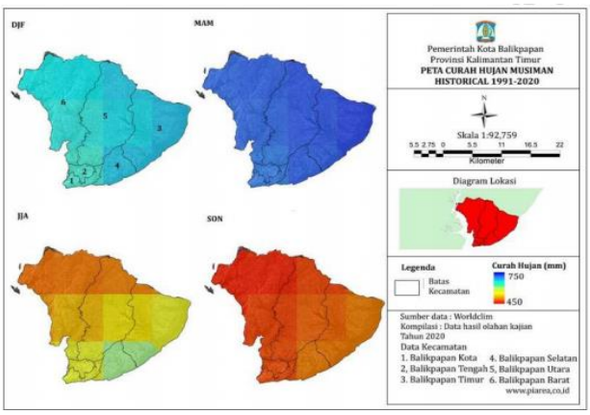


Gambar 2.4 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Model CSIRO RCP452021-2050
Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.



Gambar 2.5 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Model MIROC RCP45 Periode 2021-2050
Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

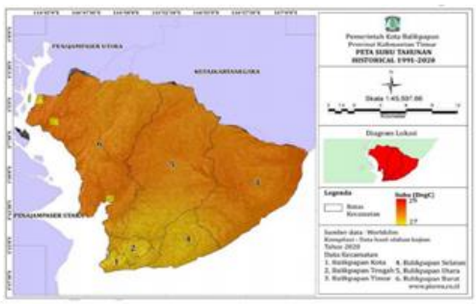
Berdasarkan Gambar 2.6, curah hujan musiman Kota Balikpapan berada dikisaran 750 – 450 mm. Curah hujan tertinggi historikal tahun 1991- 2020 terdapat pada bulan MAM (Maret, April dan Mei) yang ditunjukkan dengan warna yang lebih biru dibandingkan dengan bulannya lainnya. Curah hujan musiman pada bulan SON (September, Oktober, dan November) lebih rendah dibandingkan dengan bulan lainnya ditunjukkan dengan warna yang semakin merah. Hal ini menunjukkan puncak musim hujan Kota Balikpapan berada pada musim MAM dan puncak musim kemarau pada musim SON.



Gambar 2.6 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Musiman Historikal 1991-2020
Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

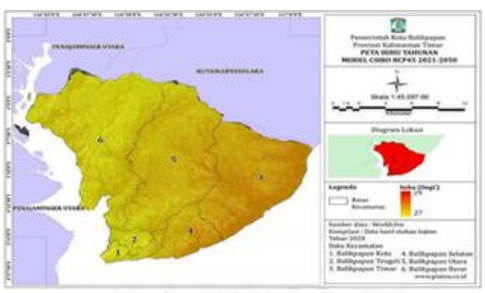
2. Suhu Kota Balikpapan

Sebaran suhu Kota Balikpapan berada dikisaran 27°C hingga 29°C, warna semakin merah menunjukkan suhu yang semakin tinggi, sedangkan warna kuning menunjukkan suhu yang semakin rendah.



Gambar 2.7 SEQ Gambar_2. * ARABIC 7 Peta Suhu Kota Balikpapan Tahunan Historikal 1991-2020

Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Tengah, dan Kecamatan Balikpapan Selatan memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya.



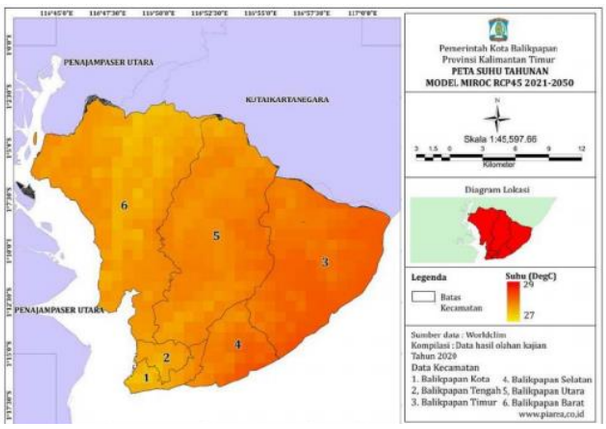
Gambar 2.8 SEQ Gambar_2. * ARABIC 8 Peta Suhu Kota Balikpapan Tahunan Model CSIRO RCP45 2021-

Sebaran suhu udara dengan model CSIRO (*Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization*) menunjukkan pada tahun 2021-2050 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan sebaran suhu 1991- 2020. Sedangkan,

sebaran suhu udara model MIROC (*Model for Interdisciplinary Research on Climate*) tahun 2021-2050 tidak terdapat perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan sebaran suhu 1991-2020.

d. Hidrologi

Balikpapan termasuk dalam WS strategis nasional Mahakam mencakup 32 Daerah Aliran Sungai (DAS). Potensi hidrologi yang terdapat di Kota Balikpapan meliputi air tanah dan air permukaan (sungai). Potensi air tanah di Kota Balikpapan termasuk dalam klasifikasi cukup baik. Sesuai dengan kondisi topografi dan fisiografi wilayah yang berbukit, menyebabkan pola aliran air tanah yang terbentuk mengalir dari arah wilayah bagian utara menuju ke arah wilayah bagian selatan kota. Adanya keterbatasan penyediaan air bersih PDAM meyebabkan banyak penduduk yang memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Berikut dibawah ini DAS di Kota Balikpapan sebagai berikut.



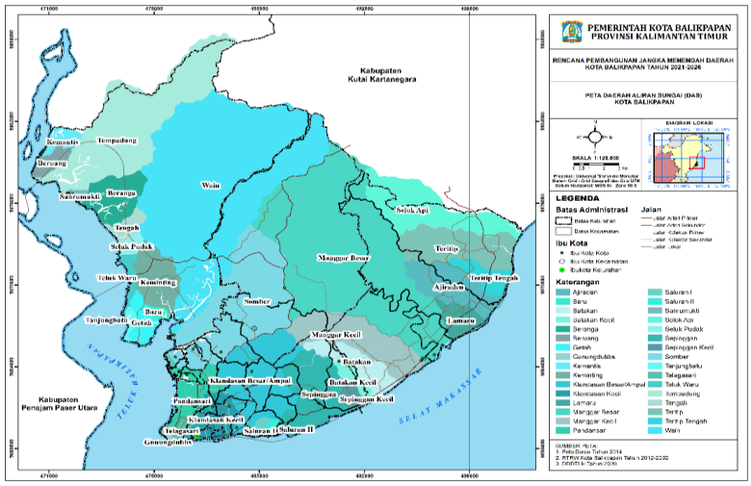
Gambar 2.9 SEQ Gambar_2. * ARABIC 9 Peta Suhu Kota Balikpapan Tahunan Model MIROC

Tabel 2.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Balikpapan

No.	Nama DAS	Luas DAS (Ha)	No.	Nama DAS	Luas DAS (Ha)
1	Gunung Dubbs	42.05	17	Teluk Waru	479.71
2	Klandasan Besar/Ampal	4894.65	18	Tempadung	6571.97
3	Klandasan Kecil	1328.52	19	Tengah	657.52
4	Pandansari	1795.77	20	Wain	25349.31
5	Saluran I	245.83	21	Ajiraden	2806.05
6	Telagasari	210.75	22	Batakan	1866.75
7	Baru	221.12	23	Batakan Kecil	623.73
8	Beranga	2064.17	24	Lamaru	1075.14
9	Beruang	634.21	25	Manggar Besar	19752.86
10	Getah	887.38	26	Manggar Kecil	3998.02
11	Kemantis	641.42	27	Selok Api	3209.32
12	Keminting	2171.84	28	Sepinggan	3801.39
13	Sanrumukti	160.81	29	Teritip	3649.82
14	Seluk Pudak	374.54	30	Teritip Tengah	1061.29
15	Somber	8619.13	31	Saluran II	251.97
16	Tanjungbatu	236.02	32	Sepinggan Kecil	494.57

Sumber: DPPR Kota Balikpapan, 2021

Berikut merupakan visualisasi dari kondisi ketinggian Kota Balikpapan dalam bentuk peta ketinggian.



Gambar 2.10 Peta DAS Kota Balikpapan
Sumber: DDDTLH, Tahun 2020

e. Topografi

Secara umum Kota Balikpapan berada pada ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Klasifikasi terbesar yaitu berada pada ketinggian 20-100 mdpl dengan luas 26.090,57 ha atau 51,06 % dari luas wilayah, ketinggian >10-20 mdpl seluas 18.030,67 ha atau 35,28 % dari luas wilayah dan ketinggian 0-10 mdpl seluas 6.980 Ha atau 13,66 % dari luas wilayah. Berikut tabel luas wilayah Kota Balikpapan dirinci menurut topografi (ketinggian).

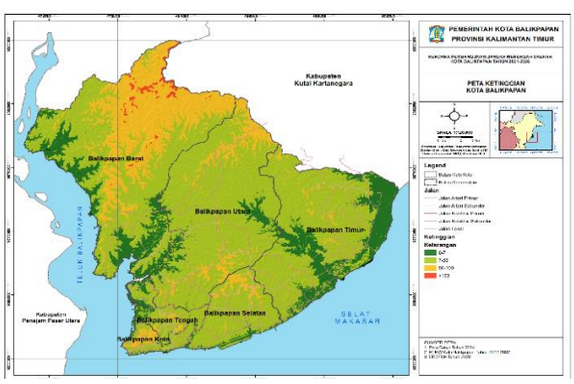
Tabel 2.3 Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Topografi (Ketinggian)

No	Ketinggian (mdpl)	Luas Wilayah	
		(Ha)	(%)
1.	0-10	6.980,00	13,66
2.	>10-20	18.030,67	35,28
3.	>20-100	26.090,57	51,06
Jumlah		51.101,24	100

Sumber: DPPR Kota Balikpapan, 2021

Untuk mengetahui kondisi ketinggian Kota Balikpapan berikut merupakan visualisasi dari kondisi ketinggian Kota Balikpapan dalam bentuk peta ketinggian.

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari 85% kawasan perbukitan dengan jenis tanah podsolik merah kuning yang memiliki karakter topsoil tipis, struktur tanah mudah tererosi. Sedangkan 15% lainnya merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan dengan jenis tanah umumnya adalah alluvial.



Gambar 2.11 SEQ Gambar_2. * ARABIC 11
Peta Ketinggian Kota Balikpapan
Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Dari sisi topografis sebagian besar wilayah Kota Balikpapan berada pada kemiringan lereng antara 15-40% yaitu seluas seluas 21.305,57 Ha atau 41,69%

dari luas wilayah keseluruhan. Tabel 2.4 berikut ini menunjukkan rincian luas wilayah Kota Balikpapan berdasarkan kelerengan.

Tabel 2.4 Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan

No	Kelas Lereng	Luas Wilayah	
	(%)	(Ha)	(%)
1	0-2	7.050,00	13,80
2	> 2-15	3.325,00	6.51
3	> 15-40	21.305,57	41,69
4	> 40	19.420,67	38
Jumlah		51.101,24	100

Sumber:DPPR Kota Balikpapan, 2021

f. Geologi

Jenis tanah yang ada di Kota Balikpapan terbagi menjadi 5 (lima) jenis yang diantaranya adalah aluvial, marin, fluvio marin, volkan, tektonik/ struktural. Adapun di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai masing-masing jenis tanah yang ada di Kota Balikpapan.

- Tanah pada *Group Aluvial*

  Berdasarkan bentuk tanah, satuan tanah ini merupakan dataran aluvial yang dominan (50-75%), terjadi pada kelerengan 1-3% dengan bahan induk "Aluvium".

- Tanah pada Group Marin

  Bentukan lahannya berupa dataran pasang surut lumpur, mempunyai kelerengan < 1% dengan bahan induk aluvium. Jenis tanah ini umumnya terdapat disekitar Sungai Wain Besar dan Somber.

- Tanah pada Group Fluvio Marin

  Ada 2 (jenis tanah) pada group ini yaitu:

  1. Bentukan lahannya berupa dataran estuarin sepanjang muara sungai/pantai dengan kelerengan < 1% dan bahan induk aluvium. Tanah ini umumnya terdapat di kanan kiri sepanjang Sungai Manggar Besar.
  2. Bentukan lahannya berupa dataran fluvio marin dengan kelerengan <1% dan bahan induknya adalah aluvium. Jenis tanah ini terdapat di sepanjang pantai yang menghadap Selat Makassar.

- Tanah pada Group Volkan

  Bentukan lahannya berupa bahan induk volkan. Tanah pada group volkan setara dengan regosol. Tanah ini berada di pantai di Balikpapan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara.

- Tanah pada Group Tektonik/ Struktural

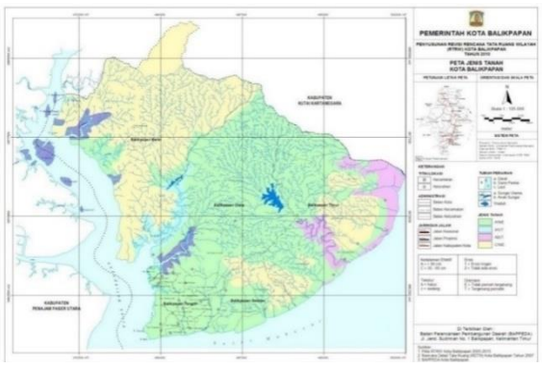
  Pada tanah group tektonik, jenis tanah di bagi menjadi menjadi 5 jenis, yaitu:

  1. Bentukan lahannya berupa dataran tektonik berombak agak tertoreh dengan bentuk relief berombak berkisar antara 3-8% dan bahan induknya batu liat dan batu pasir. Lokasi penyebarannya adalah di

pusat kota tepatnya Kecamatan Balikpapan Selatan, Tengah dan Barat yang berbatasan langsung dengan Teluk Balikpapan.

2. Bentukan lahannya berupa dataran tektonik bergelombang, agak tertoreh dan relief bergelombang berkisar antara 8-15%. Bahan induk batu liat dan batu gamping. Penyebarannya meliputi Kecamatan Balikpapan Utara seperti di Kelurahan Muara Rapak, Kelurahan Gunung Samarinda, Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Karang Joang.
3. Bentukan lahannya berupa dataran bergelombang cukup tertoreh dengan relief bergelombang 15-30% dan bahan induknya berupa batuliat dan batupasir. Penyebarannya disekitar Bangun Reksa, Karang Joang dan Manggar.
4. Bentukan lahannya berupa dataran tektonik bergelombang cukup tertoreh dengan relief berbukit kecil (15-30%) dengan bahan induk batuliat dan batupasir. Penyebarannya terutama di Kecamatan Balikpapan Barat dan sebagian kecil di Balikpapan Utara.

Bentukan lahannya berupa perbukitan paralel lipatan, sangat tertoreh dengan relief berbukit 15-30% dan bahan induknya berupa batu liat, batu pasir dan batu gamping. Penyebarannya di Karang Joang Km 15. Karena bahan induknya, adalah batu liat dan batu gamping maupun batupasir yang dominan, maka jenis tanah ini setara dengan jenis tanah Podsolik Merah Kuning.



Gambar 2.12 SEQ Gambar_2. * ARABIC 13
Peta Jenis Tanah Kota Balikpapan
Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

2.1.1.2. Penggunaan Lahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012–2032, rencana komposisi penggunaan lahan (darat dan laut) dengan total keseluruhan kawasan seluas 84.686,84 ha, meliputi kawasan lindung seluas 33.940,07 ha dan kawasan budidaya seluas 50.746,76 ha. Jika dirinci lebih lanjut, peruntukan kawasan lindung diarahkan untuk tersedianya kawasan hutan lindung yang terdiri dari kawasan hutang lindung, perluasan HLSW, dan *Buffer Zone* Hutan Lindung. Total luas lahan untuk kawasan lindung sebesar 19.194,08 ha atau 22,66% dari keseluruhan lahan di Kota Balikpapan. Adapun untuk kawasan budidaya peruntukan terbesarnya diarahkan untuk kawasan perikanan. Total luas lahan untuk kawasan perikanan sebesar 16.663,55 ha atau sekitar 19,68% dari keseluruhan lahan di Kota Balikpapan.

Salah satu peruntukan ruang pada kawasan perikanan adalah pengembangan kawasan minapolitan dengan luas sebesar 190,6 ha. Berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 10345-03/2012 ditetapkan bahwa Kawasan Minapolitan Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terletak di Kelurahan Manggar dan Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur. Adapun pusat minapolitan Kota Balikpapan berada pada PPI/TPI Manggar dan pembagian kawasannya ada 3 yaitu:

1. Kawasan Wisata Pantai Segara Sari, Manggar;
2. Perumahan Nelayan;
3. Kawasan Budidaya Tambak.

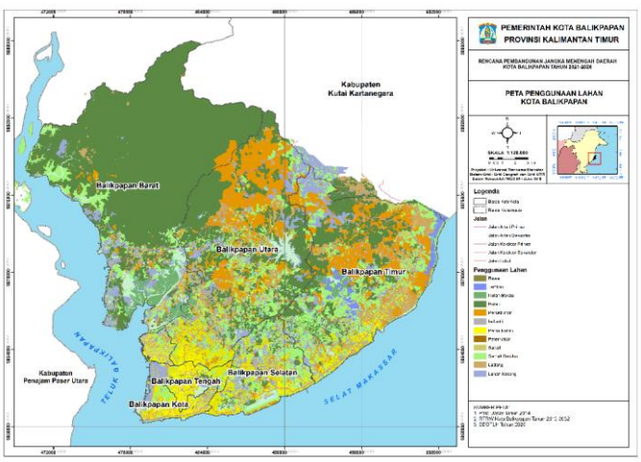
Tabel 2.6 Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Kota Balikpapan 2012-2032

No	PEMANFAATAN LAHAN	2012-2032		KETERANGAN
		LUAS (Ha)	%	
I. KAWASAN LINDUNG				
A.	Kawasan Hutan Lindung	19,194.08	22.66	
1	Kawasan Hutan Lindung	14781.80		
2	Perluasan HLSW	1402.39		
3	Buffer Zone Hutan Lindung	3009.89		
B.	Kawasan Perlindungan Bawahan	920.25	1.09	
1	Kawasan Resepan Air			
C.	Kawasan Perlindungan Setempat	6,531.18	7.71	
1	Kawasan Waduk dan Embung	1914.22		
2	Kawasan Sempadan Waduk dan Embung	1254.59		
3	Kawasan Sungai	672.39		
4	Kawasan Sempadan Sungai	144.48		
5	Kawasan Sempadan Pantai	317.76		
6	Kawasan Sempadan Jalan Tol	229.69		
7	Kawasan Hutan Bakau	1871.67		
8	Kawasan Buffer Zone (Peternakan, TPA, Sub Pusat Kota 2, KIKS)	126.40		
D.	Kawasan RTH Kota	529.78	0.63	
1	Kawasan Hutan Kota	226.53		
2	Kawasan RTH Kota (Makam, Lapangan, Taman)	303.26		
E.	Kawasan Suaka Alam, Pedestrian Alam dan Cagar Budaya	345.98	0.41	
1	Kawasan Agro Wisata	67.84		
2	Kawasan Kebun Raya	254.76		
3	Kawasan Wanawisata	19.16		
4	Kawasan Penangkaran Buaya	4.22		
F.	Kawasan Jalur Migrasi Satwa	196.50	0.23	
1	Kawasan Jalur Migrasi Satwa	196.5		
G.	Kawasan Konservasi Pesisir dan Laut	6,222.30	7.35	Wil. Pesisir dan Laut
1	Konservasi Pulau – Pulau Kecil	303.19		Wil. Pesisir dan Laut
2	Daerah Perlindungan Mangrove & Laut (DPML)	61.04		Wil. Pesisir dan Laut
3	Daerah Rawan Ranjau	5727.25		Wil. Pesisir dan Laut
4	Zona Terlarang	114.82		Wil. Pesisir dan Laut
5	Terumbu Karang dan Padang Lamun	16		Wil. Pesisir dan Laut
TOTAL KAWASAN LINDUNG		33,940.07	40.08	
II. KAWASAN BUDIDAYA				
A.	Kawasan Peruntukan Pertanian	3,531.36	4.17	
1	Kawasan Pertanian Tanaman Hortikultura	1.251.67		
2	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	145.45		
3	Kawasan Perkebunan	2076.17		
4	Kawasan Peternakan	58.06		

No	PEMANFAATAN LAHAN	2012-2032		KETERANGAN
		LUAS (Ha)	%	
B.	Kawasan Peruntukan Perikanan	16,663.55	19.68	
1	Kawasan Perikanan Darat	582.19		
2	Kawasan Minapolitan	190.56		
3	Kawasan Perikanan Budidaya Laut	3178.48		Wil. Pesisir dan Laut
4	Kawasan Perikanan Tangkap	12712.32		Wil. Pesisir dan Laut
C.	Kawasan Peruntukan Perumahan		12.87	
	Kawasan Perumahan	10902.02		
D.	Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa	2,523.58	2.98	
1	Kawasan Perdagangan dan Jasa	2523.58		
E.	Kawasan Peruntukan Perkantoran	56.14	0.07	
1	Kawasan Perkantoran	56.14		
F.	Kawasan Peruntukan Industri	5,107.86	6.03	
1	Industri Besar	4705.33		
2	Industri Sedang	379.33		
3	Industri Kecil	23.21		
G.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	449.40	0.53	
1	Kawasan Pariwisata	449.4		
H.	Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan	264.47	0.31	
1	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	264.47		
I.	Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum	10,821.83	12.78	
1	Kawasan Bandara	372.05		
2	Kawasan Pelabuhan	31.45		
3	Kawasan Terminal	9.40		
4	Kawasan Alur Kapal	10142.87		Wil. Pesisir dan Laut
5	Kawasan Fasilitas Pemerintah	215.49		
6	Kawasan TPA	18.17		
7	RSUD	0.93		
8	Kawasan Masjid Agung Balikpapan	0.94		
9	Kawasan Gereja	1.22		
10	Kawasan Dome	4.87		
11	Kawasan Stadion Olahraga	24.45		
J.	Kawasan Pendidikan	426.56	0.5	
1	Kawasan ITK	340.73		
2	Kawasan PONPES Syarif Hidayatullah	85.83		
Total Kawasan Budidaya		50,746.76	59.92	
Total Keseluruhan Kawasan		84,686.84	100	

Sumber: RTRW Kota Balikpapan 2012-2032

Berikut merupakan visualisasi dari kondisi penggunaan lahan Kota Balikpapan dalam bentuk peta penggunaan lahan.



Gambar 2.13 Peta Penggunaan Lahan Kota Balikpapan
Sumber : RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

2.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Balikpapan dilakukan melalui teknik kebijakan perwilayahan yang didasarkan atas efektivitas pembangunan di masing-masing wilayah untuk menyinkronkan pembangunan berbagai sektor andalan yang akan dikembangkan di Kota Balikpapan. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan masing-masing wilayah kota tidak saling tumpang tindih satu sama lain, sehingga potensi yang dimiliki masing-masing daerah dapat berkembang secara optimal dan terintegrasi. Pengembangan potensi secara spasial dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis kota. Kawasan strategis wilayah kota terdiri atas:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi

   Berupa kawasan strategis yang mendukung aktivitas perekonomian kota dan terletak di pusat kota. Kawasan Strategis untuk Kepentingan Ekonomi terdiri atas:

   1. Kawasan Kota Baru Karang Joang;
   2. Kawasan Industri Kariangau;
   3. Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru;
   4. Kawasan Reklamasi Pantai; dan
   5. Kawasan Kota Baru Teritip.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya

   Berupa kawasan yang dinilai strategis untuk mengembangkan potensi kegiatan budaya dan pariwisata. Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya terdiri atas:

   1. Kawasan permukiman nelayan Margasari di Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat; dan
   2. Kawasan pendidikan di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan

   Berupa kawasan strategis untuk kepentingan penyelamatan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup sebagai daya dukung lingkungan. Kawasan Strategis untuk Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan terdiri atas:

   1. Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat dan Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara; dan
   2. Kawasan hutan lindung Sungai Manggar di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, tujuan dan kebijakan ruang di Kota Balikpapan adalah pengembangan pusat pelayanan.

Guna mewujudkan penataan ruang Kota Balikpapan, maka diusahakan komoditi unggulan yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah, antara lain sebagai berikut:

1) Perikanan

Wilayah pesisir laut Kota Balikpapan menyimpan potensi sumber daya yang terbaharui *(renewable resources)*, khususnya potensi sumber daya perikanan. Selain itu, Kawasan pesisir dan laut juga memiliki potensi yang cukup besar untuk memainkan peran strategis dalam menopang dan membangun pondasi ekonomi kota yang kuat, antara lain sebagai investasi yang memiliki efisiensi dan daya serap tenaga kerja, serta sumber daya laut yang besar baik kuantitas maupun diversitas, bukan hanya di perairan Balikpapan, tetapi juga di perairan Selat Makasar. Produk perikanan dan kelautan juga memiliki prospek pasar yang baik dengan pangsa pasar yang terus meningkat dan memiliki daya saing yang tinggi sebagaimana dicerminkan dari bahan baku yang dimilikinya serta produksi yang dihasilkannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Timur 2021-2041, kebijakan dan strategi untuk mewujudkan tujuan RZWP3K terdiri atas kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Konservasi, kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum, kebijakan dan strategi pengembangan Alur Laut, serta kebijakan dan strategi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), yang dibagi menjadi Zona Inti, Zona Pemanfaatan Terbatas Dan Zona Lainnya yang Sesuai Dengan Peruntukan Kawasan. Kebijakan dan strategis rencana zonasi adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi ini terdiri dari Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil, Kawasan Konservasi Perairan, dan Kawasan Konservasi Maritim. Konservasi Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil yang dikelola berdasarkan rencana pengelolaan zonasi diantaranya, zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona lainnya yang menyesuaikan dengan pentukan kawasan, Konservasi Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil (KKP3K) ini salah satunya adalah KKP3K Teluk Balikpapan-Kabupaten Penajam Paser Utara.

b. Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum

Kawasan Pemanfaatan Umum meliputi sub zona Wisata Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KPU-2-P3KP) terdiri atas Pantai Manggar dan Pantai Lamaru. Adapun DLKr dan DLKp yang terdiri atas pelabuhan umum, Tersus dan STS (KPU-PL-DLK) melputi Pelabuhan Balikpapan dan Teluk

Balikpapan. KPU-PL-WKO di perairan terdiri atas PPI Manggar Baru, PPI Filial Klandasan dan PPI Kampung Baru Tengah. Sub Zona Minyak dan Gas Bumi (KPU-TB-MGB) ada pada Blok East Kalimantan di perairan Teluk Balikpapan sampai Selat Makassar Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan dan Blok Mahakam di perairan Teluk Balikpapan sampai Selat Makassar Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan. Pada zona perikanan budaya dalam sub zona Budidaya Laut (KPU-BD-BL) ada pada Teluk Balikpapan di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara serta Pantai Manggar dan Pantai Lamaru di Kecamatan Balikpapan Timur. Sedangkan pada zona perikanan tangkap dalam sub zona pelagis (KPU-PT0-P) meliputi Selat Makassar-Kota Balikpapan. Untuk zona bandar udara yaitu Bandar Udara Sepinggan yang terletak di Kecamatan Balikpapan Selatan. Zona jasa/perdagangan terdiri atas Coastal Road berada pada Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Kota.

c. Pengembangan Kawasan Alur Laut

Alokasi Ruang WP-3-K untuk kawasan Alur Laut terdiri atas migrasi biota yang selanjutnya disebut dengan AL-AMB, pipa/kabel bawah laut yang selanjutnya disebut dengan AL-APK, dan alur pelayaran yang selanjutnya disebut dengan AL-AP. Kawasan migrasi biota terdiri dari kawasan Migrasi penyu yang selanjutnya disebut dengan AL-AMB-MP dan kawasan Migrasi mamalia laut yang selanjutnya disebut dengan AL-AMB-MM. Selanjutnya pipa/kabel bawah laut yang terdiri atas kabel telekomunikasi yang selanjutnya di sebut dengan AL-APK-KT dan pipa gas dan minyak yang selanjutnya disebut dengan AL-APK-GM. Adapun alur pelayaran terdiri dari alur pelayaran dan perlintasan Internasional yang selanjutnya disebut dengan AL-AP-PI, alur pelayaran dan perlintasan Nasional yang selanjutnya disebut dengan AL-AP-PN, alur pelayaran dan perlintasan Regional yang selanjutnya disebut dengan AL-AP-PR, dan alur pelayaran dan perlintasan Khusus yang selanjutnya disebut dengan AL-AP-PK.

d. Pengembangan KSNT

Di Kota Balikpapan tidak terdapat alokasi ruang WP-3-K untuk kawasan KSNT, alokasi ini berada di perairan Pulau Sambit dan sekitarnya di Kabupaten Berau dengan kode KSNT PPKT-01 serta Pulau Maratua dan sekitarnya di Kabupaten Berau dengan kode KSNT PPKT-02.

2) Industri

Posisi strategis dan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Kota Balikpapan menjadikan visi pembangunan kota kedepan sebagai sentra jasa, perdagangan dan industri, sehingga pengembangan kota diarahkan kepada sektor-sektor ekonomi yang potensial dan mempunyai unggulan, termasuk

industri kecil/rumah tangga yang tersebar di beberapa wilayah Kota Balikpapan melalui pembangunan sarana dan prasarana pengadaan rumah produksi dan rumah tinggal. Selain itu, potensi kawasan industri Kota Balikpapan didukung oleh letak strategis yang berada pada ALKI II dan merupakan pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur serta wilayah Indonesia Bagian Timur. Dengan posisi tersebut Kota Balikpapan memiliki keunggulan kompetitif yakni sebagai alur lalu lintas kapal laut yang cukup padat sehingga potensial untuk mengembangkan industri maritim seperti *shipdocking* (dok perbaikan kapal), *sparepart* dibidang *marine, supply base* dan sebagainya.

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kota Balikpapan terdiri atas:

1. Subzona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
2. Subzona Kawasan Industri (KI); dan
3. Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM).

Subzona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri, dengan luas kurang lebih 294,47 Ha terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat (Kelurahan Baru Ilir, Kelurahan Margomulyo dan Kelurahan Kariangau), serta di Kecamatan Balikpapan Utara (Kelurahan Karang Joang). Subzona Kawasan Industri (KI) MERUPAKAN zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang, dengan luas kurang lebih 3740,46 Ha terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat (Kelurahan Kariangau, Kelurahan Karang Jati dan Kelurahan Prapatan). Sedangkan untuk Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) dengan luas kurang lebih 660,74 Ha terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat (Kelurahan Margomulyo) Kecamatan Balikpapan Utara (Kelurahan Karang Joang), Kecamatan Balikpapan Selatan (Kelurahan Sepinggan, kelurahan Sepinggan Raya) serta Kecamatan Balikpapan Timur (Kelurahan Manggar, Kelurahan Manggar Baru dan Kelurahan Teritip).

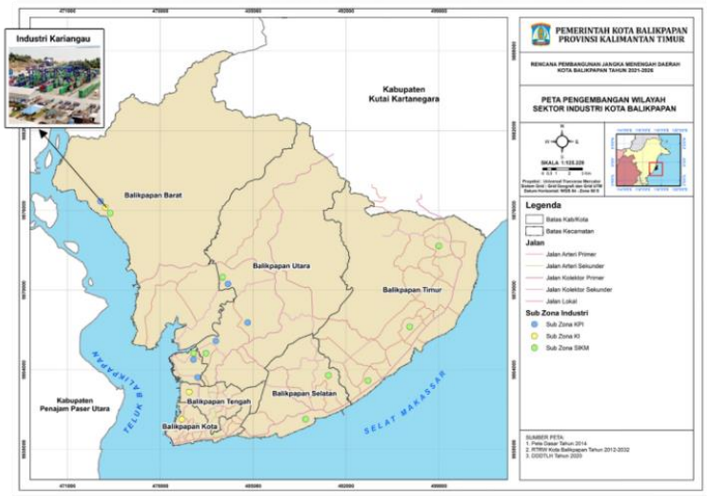
Tabel 2.7 Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kota Balikpapan

BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN (BWP)	RDTR KOTA BALIKPAPAN; ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)		
	SUBZONA KPI (Kawasan Peruntukan Industri) (Ha)	SUBZONA KI (Kawasan Peruntukan Industri) (Ha)	SUBZONA SIKM (Kawasan Peruntukan Industri) (Ha)
BWP I Balikpapan Barat	67,09 a. subzona Baru Ilir (I.A) terdapat di Blok I.A.2; b. subzona Kariangau (I.D) terdapat di Blok I.D.3; dan c. subzona Margomulyo (I.E) terdapat di Blok I.E.2.	3.337,76 (Sub BWP Kariangau)	300,04 a. sub BWP Kariangau (I.D) tersebar di Blok I.D.3. b. sub BWP Margomulyo (I.E) tersebar di blok I.E.5.
BWP II Balikpapan Utara	235,92 a. sub BWP Batu Ampra (II.A) Blok II.A.1 b. sub BWP Graha Indah (II.B) Blok II.B.1. c. sub BWP Karang Joang (II.E) Blok II.E.6	---	44,7 a. Sub BWP Karang Joang Blok II.E.6, b. sub BWP Muara Rapak (II.F) Blok II.F.1.
BWP III Balikpapan Tengah	---	248,98 Sub BWP Karang Jati (III.C), yaitu pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.	---

BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN (BWP)	RDTR KOTA BALIKPAPAN; ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)		
	SUBZONA KPI (Kawasan Peruntukan Industri) (Ha)	SUBZONA KI (Kawasan Peruntukan Industri) (Ha)	SUBZONA SIKM (Kawasan Peruntukan Industri) (Ha)
BWP IV Balikpapan Kota	---	193,91 sub BWP Prapatan (IV.D), meliputi Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3;	0,82 sub BWP Telaga Sari (IV.E), , Blok IV.E.2
BWP V Balikpapan Selatan	---	---	34,89 a. Sub BWP Sepinggan (V.D), berada di Blok V.D.2; dan b. Sub BWP Sepinggan Raya (V.F), berada di Blok V.F.2.
BWP VI Balikpapan Timur	---	---	287,47 a. Sub BWP Manggar (VI.B), berada di Blok VI.B.3 dan Blok VI.B.4; dan b. Sub Blok Manggar Baru (VI.C), berada di Blok VI.C.1. c. Sub Blok Teritip (VI.D), berada di Blok VI.D.1.
Total Luas @Subzona	303,01	3.780,65	667,92
TOTAL LUAS ZONA KPI	4.751,58		

Sumber:Rencana Detail Tata Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2041

Berikut adalah peta Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kota Balikpapan:



Gambar 2.14 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Industri Kota Balikpapan
Sumber: Rencana Detail Tata Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2041

3) Pertambangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 maka potensi bahan galian yang ada di Kota Balikpapan dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu potensi mineral non logam dan potensi batubara. Potensi mineral non logam yang ada di Balikpapan adalah batupasir kuarsa dan batulempung. Lokasi keterdapatan potensi mineral non logam terdapat di 4 (empat) wilayah kecamatan di Kota Balikpapan (Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan Timur, Balikpapan Utara dan Balikpapan Barat) memiliki pola sebagai berikut:

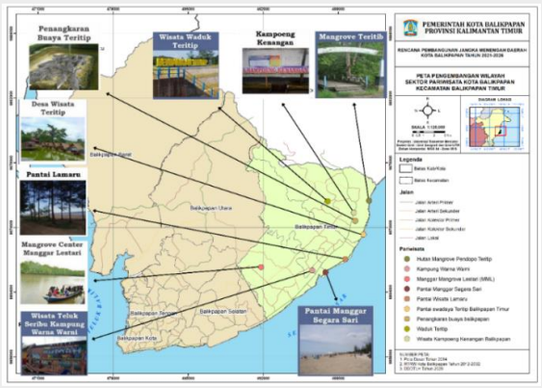
1) Berada pada lahan dengan bentuk relief/morfologi berupa perbukitan;
2) Jenis bahan galian batulempung meliputi Kecamatan Balikpapan Utara (Kelurahan Batu Ampar) dan Kecamatan Balikpapan Timur (Kelurahan Lamaru);
3) Jenis bahan galian pasir kuarsa meliputi Kecamatan Balikpapan Timur (Kelurahan Lamaru).

4) Pariwisata

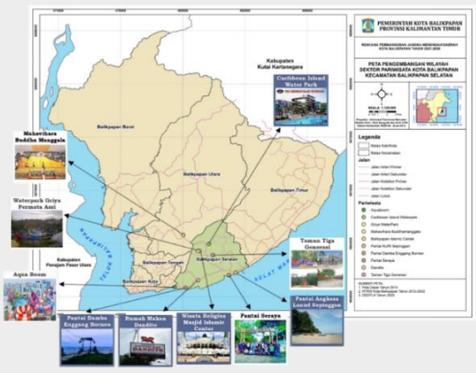
Dalam pengembangan sektor pariwisata Kota Balikpapan mempunyai cukup banyak potensi, mengingat topografi Kota Balikpapan yang didominasi oleh perbukitan dengan hutan yang cukup luas, menjadikan Kota Balikpapan sebagai tempat wisata hutan lindung dan kawasan cagar alam. Selain itu, Kota Balikpapan yang dikelilingi laut, juga menjadi objek yang menyajikan suguhan berbagai wisata pantai dan wilayah lainnya sebagian besar merupakan wisata alam buatan dan peninggalan sejarah. Berikut destinasi wisata di Kota Balikpapan pada setiap Kecamatan:



Gambar 2.15 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara



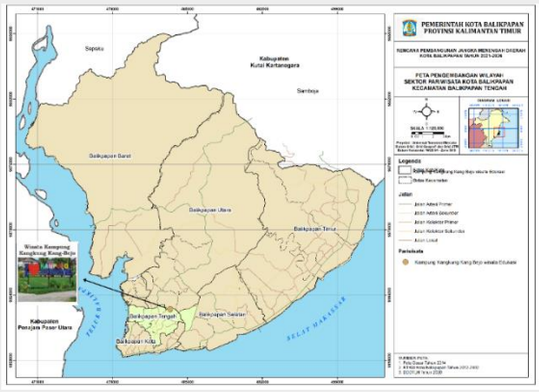
Gambar 2.16 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Timur



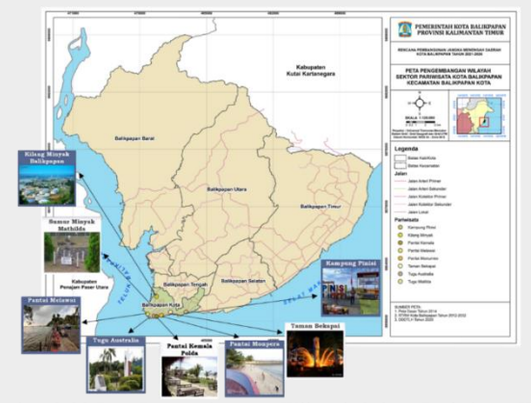
Gambar 2.17 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan



Gambar 2.18 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat



Gambar 2.19 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Tengah



Gambar 2.20 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Kota

Sumber: DPOP Kota Balikpapan, 2021

2.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Tahun 2019 menjadi tahun tertinggi angka bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Balikpapan yaitu sebanyak 125 kali. Angka ini melonjak drastis jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya terjadi 70 kali. Tingginya angka bencana kebakaran hutan & lahan ini tentu saja mengancam produktivitas lahan di Kota Balikpapan. Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tertulis bahwa kebakaran hutan/lahan termasuk dalam bencana alam dan non alam yang ditulis secara serangkai, sehingga kebakaran hutan dan lahan merupakan satu istilah yang tidak dipisahkan. Akan tetapi, pada tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan untuk kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan menjadi 29 kali pada tahun 2020 dan 16 kali pada tahun 2021.

Jenis bencana lainnya yang juga kerap terjadi adalah kebakaran pemukiman/gedung. Dari data BPBD, kejadian kebakaran pemukiman/gedung terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 39 kali terjadi kebakaran pemukiman/gedung, lalu meningkat tahun 2016 menjadi 44 kali. Hingga tahun 2019, kebakaran pemukiman/gedung di Kota Balikpapan sebanyak 51 kali. Adapun jumlah bencana yang terjadi di Kota Balikpapan sebagai berikut:

Tabel 2.8 Jumlah Bencana yang Terjadi di Kota Balikpapan Menurut Jenis Bencana Tahun 2017-2021

No	Jenis Bencana	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kebakaran hutan dan lahan	14	70	125	29	16
2	Kebakaran pemukiman/gedung	44	45	51	23	18
3	Banjir	89	13	24	83	38
4	Pergerakan tanah/longsor	70	46	29	38	61
5	Angin puting beliung	6	0	0	2	2
6	Gelombang pasang	0	0	0	1	1
7	Abrasi pantai	0	0	0	0	0
8	Orang tenggelam	25	24	19	10	0
9	Pohon tumbang	81	18	28	46	15
10	Semburan lumpur/gas	3	1	7	8	6
11	Penanganan gangguan hewan	84	72	194	151	160
Total		379	416	289	391	317

Sumber: BPBD Kota Balikpapan, 2021

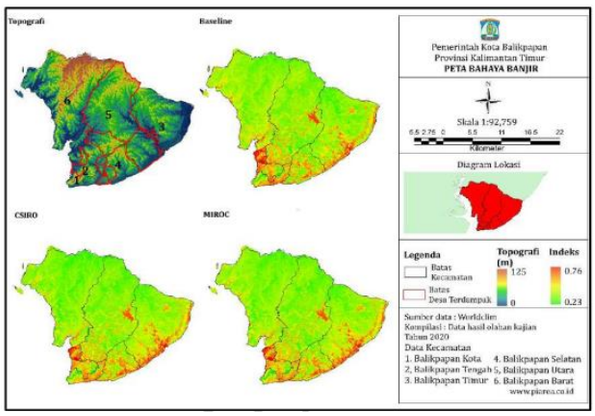
Berdasarkan data tersebut di atas dan berdasarkan hasil identifikasi kawasan rawan bencana, Wilayah Kota Balikpapan memiliki kerentanan terhadap bencana, diantaranya yaitu banjir, pergerakan tanah/longsor dan kekeringan dengan deskripsi sebagai berikut:

1. Banjir

Berdasarkan dokumen DIKPLHD Kota Balikpapan 2019, Kota Balikpapan memiliki rentang indeks bahaya banjir berkisar 0,23–0,76.

Adapun daerah dengan indeks bahaya banjir yang relatif tinggi adalah kawasan yang berada pada wilayah pesisir dan daerah aliran sungai serta tingkat okupansi lahan cukup tinggi yaitu daerah Balikpapan Tengah, Balikpapan Kota, Balikpapan Selatan dan Balikpapan Timur.

Selanjutnya di masa depan, berdasarkan model CSIRO menunjukkan tidak terjadi perubahan. Pada model MIROC terjadi peningkatan potensi bahaya di seluruh wilayah Kota Balikpapan terutama wilayah utara Kota Balikpapan. Faktor yang meningkatkan bahaya banjir di masa depan dikarenakan intensitas curah hujan tinggi pada bulan tertentu, yaitu bulan Desember, Januari, Maret dan April.

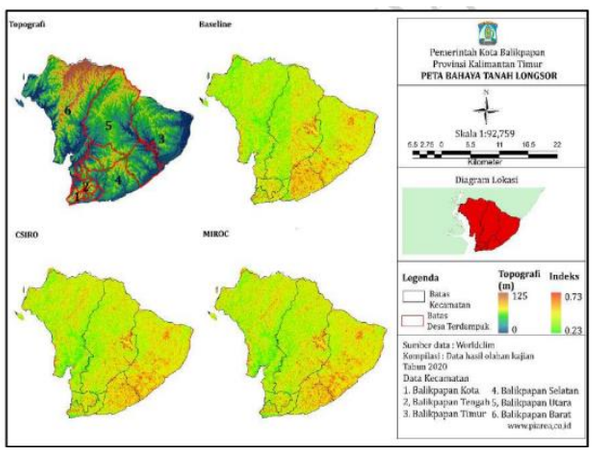


Gambar 2.21 SEQ Gambar_2. * ARABIC 22 Peta Indeks Bahaya Banjir Kota Balikpapan (Baseline 1991-2020 dan Proyeksi 2021-2050)
Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan 2019.

2. Pergerakan tanah/longsor

Struktur tanah di kota Balikpapan terdiri atas podsolik merah kuning, tanah alluvial, dan pasir kwarsa. Diantara ketiga jenis yang paling banyak terdapat di wilayah Kota Balikpapan adalah jenis tanah podsolik merah kuning yang mempunyai tingkat kesuburan yang rendah disebabkan karena lapisan topsoilnya yang tipis dan batuannya muda sehingga tanahnya bersifat labil dan terdapat pada daerah perbukitan yang mempunyai kemiringan di atas 15%.

Apabila curah hujannya tinggi akan mengakibatkan tanah tersebut merosot dan terkikis karena erosi. Dengan kondisi ini wilayah Balikpapan sangat rawan terhadap terjadinya longsor.

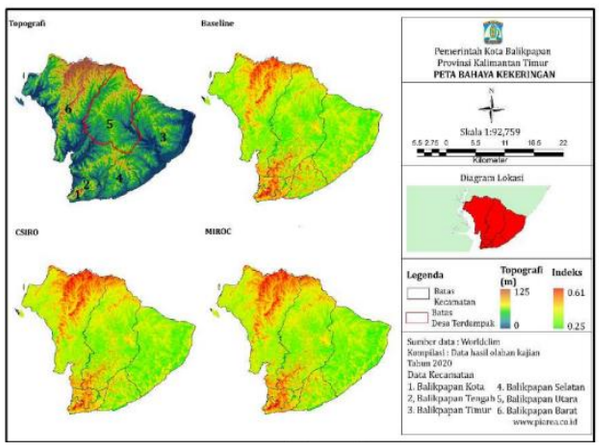


Gambar 2.22 SEQ Gambar_2. * ARABIC 23 Peta Indeks Bahaya Tanah Longsor Kota Balikpapan (Baseline 1991-2020 dan Proyeksi 2021-2050)

Jika dilakukan pemetaan bahaya tanah longsor menggunakan simulasi pemodelan CSIRO dan MIROC menunjukkan bahaya tanah longsor di wilayah Kota Balikpapan memiliki rentang indeks bahaya tanah longsor berkisar 0,23 – 0,73. Nilai bahaya tinggi berada di wilayah Balikpapan Timur dan Balikpapan Selatan. Kejadian bencana tanah longsor sangat rawan terjadi di

Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Utara mengingat kepadatan penduduk yang ada pada wilayah ini. Pemetaanbahaya di masa depan tidak mengalami perubahan yang signifikan, namun perlu menjadi perhatian terkait pembukaan lahan perumahan di daerah rawan tanah longsor yang berpotensi mengalami bahaya tanah longsor dengan nilai indeks tinggi.

3. Kekeringan



Gambar 2.23 SEQ Gambar_2. * ARABIC 24
Peta Indeks Bahaya Kekeringan Kota Balikpapan
Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan 2019

Berdasarkan dokumen hasil analisis wilayah Kota Balikpapan memiliki rentang indeks bahaya kekeringan berkisar 0,25–0,61 (DIKPLHD, 2019). Wilayah-wilayah yang memiliki tingkat risiko sebagian besar menyebar di Balikpapan Kota, Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan dan Balikpapan Utara. Indeks kategori tinggi mengalami peningkatan luasan wilayah di masa depan jika menggunakan model CSIRO namun mengalami penurunan pada model MIROC. Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan suhu udara yang berimplikasi pada naiknya nilai evapotranspirasi sehingga kondisi neraca air menjadi defisit terutama pada bulan dimusim kemarau (Juli, Agustus, dan September). Pengelolaan sumber daya air menjadi prioritas utama merespon informasi dampak perubahan iklim dimasa mendatang khususnya dalam rangka memenuhi ketersediaan air baku yang menjadi salah satu keterbatasan di Kota Balikpapan. Aksi adaptasi perlu dilakukan untuk mengurangi risiko dampak perubahan iklim terkait kekeringan.

2.1.1.5. Demografi

Secara administratif jumlah penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2021 sebanyak 695.287 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 355.848 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 339.439 jiwa berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan sebaran penduduk per kecamatan, Kecamatan Balikpapan Utara memiliki jumlah penduduk terbesar, yakni sebanyak 172.117 jiwa, sedangkan Kecamatan Balikpapan Kota memiliki jumlah penduduk terkecil yakni sebanyak 82.849 jiwa.

Kepadatan penduduk di Kota Balikpapan pada tahun 2021 mencapai 1.381 jiwa per km^2. Kecamatan Balikpapan Tengah menjadi menjadi Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi yaitu sebesar 9.931 jiwa per km^2. Cukup timpang apabila dibandingkan dengan Kecamatan Barat yang memiliki kepadatan penduduk terendah di Kota Balikpapan yakni hanya 521 jiwa per km^2. Secara

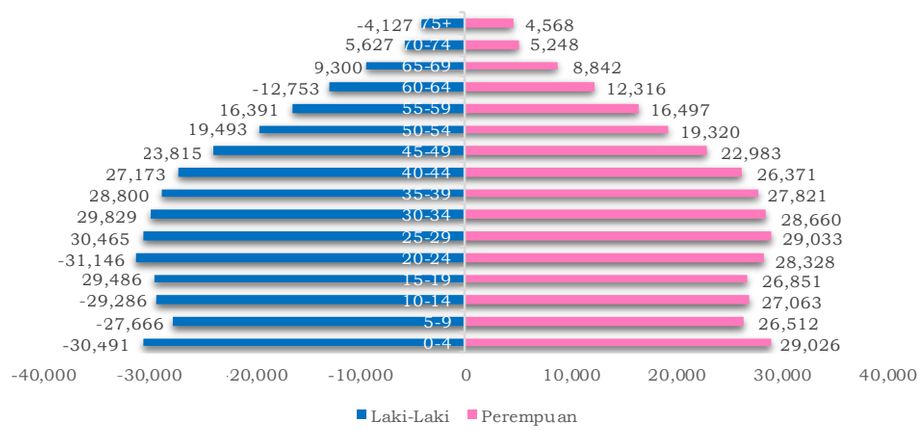
rinci, jumlah penduduk dengan data terpilah laki-laki dan perempuan terkait dengan *sex ratio* per wilayah serta kepadatan penduduk terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk pada Setiap Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (jiwa)		Jumlah (jiwa)	%	Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)
	Laki Laki	Perempuan				
Balikpapan Selatan	74.989	29.059	146.689	1.55	104.59	3.902
Balikpapan Kota	42.260	40.589	82.849	0.01	104.12	7.714
Balikpapan Timur	47.701	44.841	92.542	3.41	106.38	708
Balikpapan Utara	87.834	84.283	172.117	2.35	104.21	1.295
Balikpapan Tengah	54.368	52.592	106.960	0.01	103.38	9.931
Balikpapan Barat	48.696	45.434	94.130	0.01	107.18	521

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2022

Pada tahun 2021, komposisi penduduk di Kota Balikpapan berdasarkan usia didominasi oleh kelompok usia produktif dibandingkan dengan kelompok usia balita dan lansia, yaitu sebesar 86% dari total jumlah penduduk, lalu Kota Balikpapan didominasi oleh penduduk dengan jenis kelamin laki laki dibandingkan dengan perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin jika dilihat berdasarkan piramida penduduk adalah sebagai berikut.



Gambar 2.24 Diagram Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2021
Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kota Balikpapan dengan persentase penduduk Kota Balikpapan dengan persentase terbesar adalah SLTA/MA sederajat sebesar 30,622%, disusul dengan penduduk yang tidak/belum sekolah sebesar 25,913%. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi jumlahnya hanya sekitar 9.473%, yang terdiri dari Diploma I/II sebesar 0,186%, Diploma III sebesar 2,511 %, Strata I sebesar 6,446%, Strata II sebesar 0,321% dan Strata III sebesar 0,007 %. Berikut ini tabel penduduk Kota Balikpapan dirinci berdasarkan tingkat pendidikan formal.

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Belum Sekolah	182.460	25,913
2	Belum Tamat SD	55.783	7,922
3	Tamat SD	94.835	13,468
4	SLTP	88.717	12,599
5	SLTA	215.618	30,622
6	Diploma I/II	1.311	0,186
7	Diploma III	17.685	2,511
8	S-I	45.385	6,446
9	S-II	2.267	0,231
10	S-III	49	0,007

Sumber: Disdukcapil diolah, 2022

Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk Kota Balikpapan di dominasi oleh penduduk yang belum bekerja sebesar 45,828%, disusul dengan jumlah karyawan swasta sebesar 18,280%, sedangkan jenis mata pencaharian terendah adalah sebagai tukang sebesar 0,142%. Jumlah penduduk menurut mata pencahariannya secara lengkap dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2021

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Belum Bekerja	322.680	45,828
2	Karyawan Swasta	128.712	18,280
3	Pelajar/mahasiswa	116.472	16,541
4	Pekerjaan lain-lainnya	60.933	8,653
5	Buruh	29.519	4,192
6	Pedagang	10.072	1,430
7	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	8.596	1,220
8	TNI/Polri	6.705	0,952
9	Edukasi	5.932	0,842
10	Petani	5.422	0,770
11	Pensiun	4.065	0,577
12	Tenaga Medis	2.329	0,331
13	Profesi	1.668	0,237
14	Tukang	1.005	0,142

Sumber: Disdukcapil diolah, 2022

Berdasarkan tabel 2.11, pekerjaan yang menempati tingkat pertama yakni penduduk yang belum bekerja, ini dimungkinkan gaya hidup masyarakat Kota Balikpapan mempengaruhi pola pikir yakni pekerjaan yang lebih bergensi lebih banyak diminati sedangkan lapangan pekerjaan dibidang tersebut tidak

banyak/mencukupi untuk seluruh masyarakat di Kota Baikpapan, sehingga ada anggapan bahwa lebih baik menganggur daripada bekerja sebagai pekerja rendah seperti buruh/tukang. Sehingga pekerjaan buruh didominasi oleh masyarakat pendatang dari daerah lain di luar Kota Balikpapan.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata di berbagai bidang terutama bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta terpenuhinya kebutuhan fasilitas publik (infrastruktur). Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan (3) aspek kesejahteraan dengan fokus seni budaya dan olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar dan dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, struktur perekonomian, laju inflasi, kemiskinan, ketimpangan/indeks gini. Kinerja indikator-indikator tersebut sampai dengan tahun 2021 sesuai ketersediaan data adalah sebagai berikut:

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu. Perhitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar perhitungan).

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Tabel 2.12 Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2020 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	817,01	921,18	1.034,94	1.036,78	1.112,14
Pertambangan dan Penggalian	41,39	44,39	50,36	53,87	56,61
Industri Pengolahan	41.311,65	46.413,11	49.307,56	48.665,08	51.911,73

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Pengadaan Listrik dan Gas	77,94	83,68	91,96	99,05	103,74
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	72,81	76,63	81,21	86,41	88,81
Konstruksi	13.112,54	14.919,04	16.907,14	17.530,87	19.545,64
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.815,68	8.736,01	9.641,99	9.641,15	10.564,71
Transportasi dan Pergudangan	10.992,86	11.695,35	12.006,45	10.035,00	10.203,49
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.605,05	1.835,79	2.018,19	1.895,24	1.948,41
Informasi dan Komunikasi	2.853,19	3.053,81	3.333,44	3.630,37	3.937,48
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.295,83	3.587,74	3.803,84	3.887,88	4.190,93
Real Estat	1.801,34	1.958,73	2.008,82	1.986,62	1.990,02
Jasa Perusahaan	276,23	296,78	309,21	303,59	325,63
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.005,15	1.078,80	1.239,62	1.256,71	1.394,12
Jasa Pendidikan	1.373,53	1.576,61	1.720,82	1.933,50	1.995,44
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	567,24	616,43	655,33	866,40	977,13
Jasa Lainnya	697,10	805,29	927,68	930,24	972,46
Produk Domestik Regional Bruto	87.716,53	97.699,38	105.138,57	103.838,75	111.318,50

Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2022

Besarnya PDRB ADHB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2017 - 2021) mengalami peningkatan dari 87.716,53 milliar rupiah pada tahun 2017 menjadi 111.318,50 milliar rupiah di tahun 2021. Tiga Sektor PDRB ADHB terbesar di Kota Balikpapan disumbangkan berturut-turut oleh Kategori Industri Pengolahan/*Manufacturing* (rata-rata prosentase lima tahun terakhir sebesar 46,63%), Kontruksi (rata-rata prosentase lima tahun terakhir sebesar 17,56%), Perdagangan Besar dan; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Eceran (rata-rata prosentase lima tahun terakhir sebesar 9,49%).

Sedangkan untuk Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kota Balikpapan selama kurun waktu 2017 hingga 2021, mengalami trend peningkatan. Pada tahun 2017 sebesar Rp 76.032,06 Miliar menjadi Rp 86.796,97 Miliar pada tahun 2021. Kondisi ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi seluruh sektor lapangan usaha kecuali sektor Transportasi dan Pergudangan yang mengalami penurunan.

Tabel 2.13 Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	693,06	745,96	783,12	752,93	768,64
Pertambangan dan Penggalian	35,26	35,53	37,68	37,66	39,08
Industri Pengolahan	43.657,28	45.450,07	47.381,67	46.877,79	48.989,82
Pengadaan Listrik dan Gas	66,17	69,50	76,03	81,90	85,09
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	54,64	55,73	59,03	62,76	63,93
Konstruksi	8.943,48	9.510,13	10.497,73	10.879,17	11.644,02
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.155,72	6.561,79	6.970,88	6.883,02	7.246,93
Transportasi dan Pergudangan	5.978,04	6.277,04	6.277,66	5.460,99	5.523,55
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.108,89	1.240,28	1.341,58	1.206,93	1.230,15
Informasi dan Komunikasi	2.644,53	2.780,44	2.974,25	3.237,91	3.493,22
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.394,78	2.517,79	2.612,61	2.670,13	2.748,50
Real Estat	1.321,55	1.382,66	1.417,88	1.401,44	1.403,67
Jasa Perusahaan	198,59	207,53	214,75	207,17	215,29
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	894,68	940,40	994,20	939,94	954,81

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Jasa Pendidikan	1.008,51	1.087,88	1.137,68	1.195,36	1.208,43
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	385,00	409,28	433,10	552,15	611,16
Jasa Lainnya	491,88	535,10	583,57	563,46	570,68
Produk Domestik Regional Bruto	76.032,08	79.807,11	83.793,41	83.010,71	86.796,99

Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2022

Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan mengalami fluktuasi mengikuti siklus maintenance industri pengolahan minyak. Pada tahun 2016 tumbuh pada 4,92%, kemudian mengalami pertumbuhan melambat menjadi 3,84% pada tahun 2017. Kemudian tumbuh kembali menjadi 4,97% pada tahun 2018 dan mengalami pertumbuhan melambat kembali pada tahun 2019 menjadi 4,99% seiring dengan siklusnya. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga mencapai -0,93% yang dialami secara global, namun demikian berhasil tumbuh menjadi 4,56% di tahun 2021. Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.14 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Persen)

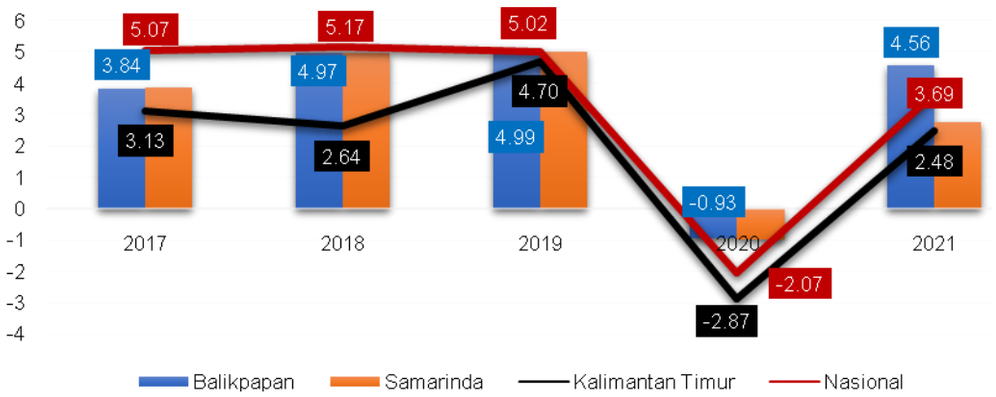
Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,13	7,63	4,98	-3,85	2,09
Pertambangan dan Penggalian	0,6	0,76	6,06	-0,07	3,77
Industri Pengolahan	3,56	4,11	4,25	-1,06	4,51
Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	5,03	9,4	7,73	3,89
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9,09	1,99	5,92	6,32	1,88
Konstruksi	3,21	6,34	10,38	3,63	7,03
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,25	6,6	6,23	-1,26	5,29
Transportasi dan Pergudangan	6,4	5	0,01	-13,01	1,15
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,87	11,85	8,17	-10,04	1,92
Informasi dan Komunikasi	7,96	5,14	6,97	8,86	7,89
Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,19	5,14	3,77	2,2	2,94
Real Estat	4,79	4,62	2,55	-1,16	0,16
Jasa Perusahaan	3,05	4,5	3,48	-3,53	3,92
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-10,16	5,11	5,72	-5,46	1,58
Jasa Pendidikan	7,06	7,87	4,58	5,07	1,09
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,53	6,3	5,82	27,49	10,69
Jasa Lainnya	7,23	8,79	9,06	-3,44	1,28
Produk Domestik Bruto	3,84	4,97	4,99	-0,93	4,56

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2022

Dari sisi sektoral (pengeluaran), sektor Industri Pengolahan dan Konstruksi mampu menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi Balikpapan tahun 2021, dimana sektor Industri Pengolahan ditopang oleh meningkatnya permintaan CPO di tengah harga yang cukup baik mendorong performa industri ini. Industri Pengolahan tercatat tumbuh sebesar 4,51% (yoy) setelah terkontraksi sebesar -1,06% (yoy) pada tahun 2020.

Sektor konstruksi tumbuh sebesar 7,03% (yoy) didorong dengan berlanjutnya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP), persiapan

pembangunan IKN, dan penyelesaian proyek-proyek strategis nasional. Perbaikan kinerja turut terjadi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di tengah relaksasi aktivitas ekonomi serta menguatnya permintaan domestik seiring pemulihan pasca Covid-19 dan tingginya cakupan vaksinasi. Sektor Transportasi dan Pergudangan juga berangsur meningkat meskipun relatif terbatas. Di sisi lain, sektor jasa kesehatan yang pada tahun 2020 tumbuh signifikan hingga 27,49% (yoy) mengalami perlambatan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 10,69% (yoy) seiring dengan kondisi pandemi yang kian membaik.



Gambar 2.25 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 (%)
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan dari tahun 2017 hingga 2020 mampu tumbuh positif di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur namun masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional kecuali pada tahun 2020 seiring dengan lemahnya permintaan domestik di tengah pandemi Covid-19. Sedangkan di tahun 2021 perekonomian Kota Balikpapan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan bahkan berada di atas Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.

2.2.1.2. PDRB per Kapita

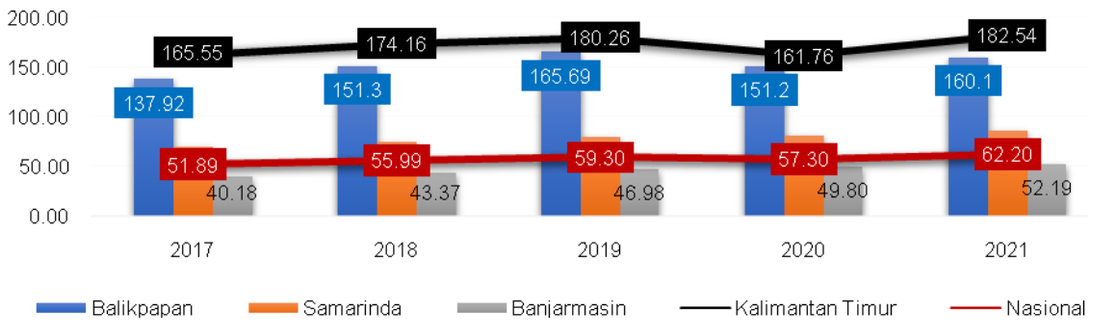
PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Balikpapan senantiasa mengalami trend kenaikan dari Rp 128,12 juta pada tahun 2016 menjadi Rp 165,69 juta pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 151,20 juta atau sebesar -8,75% apabila dibandingkan dengan tahun 2019.

Tabel 2.15 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai PDRB ADHB (Triliun Rupiah)	87,72	97,70	105,14	103,84	111,32
Nilai PDRB ADHK (Triliun Rupiah)	76,03	79,81	83,79	83,01	86,80
PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	137,92	151,30	165,69	151,20	160,10
PDRB Per Kapita ADHK (Juta Rupiah)	119,55	123,59	132,06	120,87	124,84
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (%)	3,84	4,97	4,99	-0,93	4,56
Jumlah Penduduk (Orang)	636.012	645.727	655.178	688.318	695.287

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2022

PDRB Per Kapita ADHB Kota Balikpapan pada tahun 2017 hingga tahun 2021 masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Kota Banjarmasin, Kota Samarinda dan Nasional, namun masih dibawah capaian provinsi Kalimantan Timur yang digambarkan pada grafik di bawah ini.



Gambar 2.26 PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)
Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2022

2.2.1.3. Struktur Perekonomian

Struktur Perekonomian Kota Balikpapan didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar 47,53% pada tahun 2016. Kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar 47,10% pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2018 menjadi 47,51%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 47,18% dan meningkat kembali pada tahun 2020 mejadi sebesar 47,28%.

Selain sektor industri pengolahan, struktur perekonomian Kota Balikpapan didorong oleh sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sisanya disumbang oleh lapangan usaha lainnya sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.16 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,93	0,94	0,98	1,00	1,00
Pertambangan dan Penggalian	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Industri Pengolahan	47,10	47,51	46,90	46,87	46,63
Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Konstruksi	14,95	15,27	16,08	16,88	17,56
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,91	8,94	9,17	9,28	9,49
Transportasi dan Pergudangan	12,53	11,97	11,42	9,66	9,17
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,83	1,88	1,92	1,83	1,75
Informasi dan Komunikasi	3,25	3,13	3,17	3,50	3,54
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,76	3,67	3,62	3,74	3,76
Real Estat	2,05	2,00	1,91	1,91	1,79
Jasa Perusahaan	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,15	1,10	1,18	1,21	1,25
Jasa Pendidikan	1,57	1,61	1,64	1,86	1,79
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,65	0,63	0,62	0,83	0,88
Jasa Lainnya	0,79	0,82	0,88	0,90	0,87
Produk Domestik Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2022

Jika dilihat berdasarkan kontribusi terhadap Perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur, menunjukkan bahwa Kota Balikpapan berkontribusi 16,01% kepada perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, terbesar ketiga setelah Kutai Kartanegara (25,50%) dan Kutai Timur (19,47%).

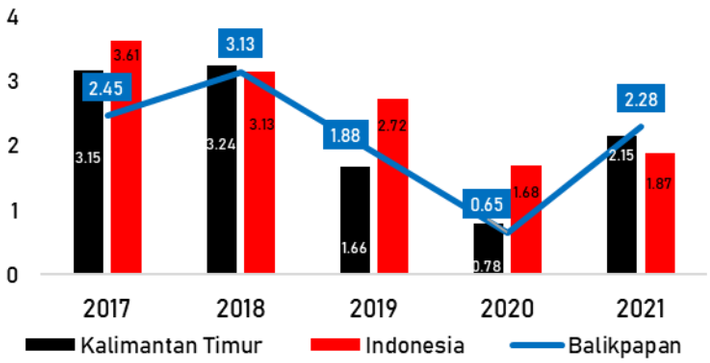


Gambar 2.27 Distribusi Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

2.2.1.4. Laju Inflasi

Realisasi inflasi IHK Kota Balikpapan sejak 207 terjaga dalam rentang target inflasi 3±1. Inflasi Kota Balikpapan pada tahun 2021 sebesar 2,28% mengalami kenaikan secara tahunan (lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 yang sebesar 0,65%) namun masih dalam rentang target. Sementara pada tahun 2019 inflasi Kota Balikpapan sebesar 1,88%. Pada tahun 2018 inflasi Kota Balikpapan tercatat pada 3,13% cenderung meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 2,45%. Secara keseluruhan mengalami kecenderungan penurunan namun masih terkendali oleh kinerja TPID Kota Balikpapan. Laju inflasi Kota Balikpapan lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 1,87% dan Provinsi sebesar 2,15%. Kelompok Kesehatan (4,27%), kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau (3,98%), serta kelompok Transportasi (3,94%) masih menjadi penyumbang terbesar inflasi Kota Balikpapan.



Gambar 2.28 Perbandingan Inflasi Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional
Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2022

Dinamika inflasi di Kota Balikpapan sendiri menunjukkan grafik yang cukup baik. Jika dibandingkan grafik capaian Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Hal ini dikarenakan keberhasilan pemerintah dalam menekan angka inflasi, beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan bersama

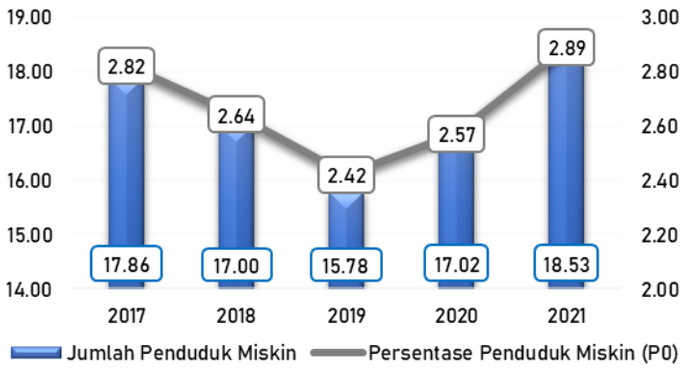
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan dalam menekan angka inflasi adalah:

1. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting secara rutin;
2. Menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga melalui Bazaar Ramadhan, sidak pasar dan Operasi Pasar; dan
3. Penyusunan Neraca Pangan.

Optimalisasi kegiatan *urban farming* yang melibatkan Bank Indonesia dan Tim Penggerak PKK melalui: Gerakan Wanita Matilda sebagai upaya untuk menopang kebutuhan pangan keluarga serta mengendalikan ekspektasi masyarakat melalui belanja bijak dan pengelolaan keuangan keluarga, program Pagar Mantap (Pangan Keluarga Mandiri Terpadu) untuk mendukunng pasokan sayur-sayuran di Kota Balikpapan dengan memaksimalkan lahan pekarangan di sekitar rumah untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian produktif serta BUDE (budidaya ikan lele dan kangkung di media ember) untuk meningkatkan produksi ikan lele sebagai substitusi ikan laut yang cenderung fluktuatif.

2.2.1.5. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kota Balikpapan pada tahun 2017 hingga tahun 2021 cenderung menurun. Pada tahun 2017 terdapat 2,82% atau sebanyak 17,86 ribu jiwa penduduk miskin dan mengalami penurunan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Namun pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 0,32% menjadi 18,53 ribu jiwa. Jika dirata-rata pada tahun 2017-2020, persentase penduduk miskin di Kota Balikpapan sebesar 2,67%.



Gambar 2.29 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Kota Balikpapan Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2022

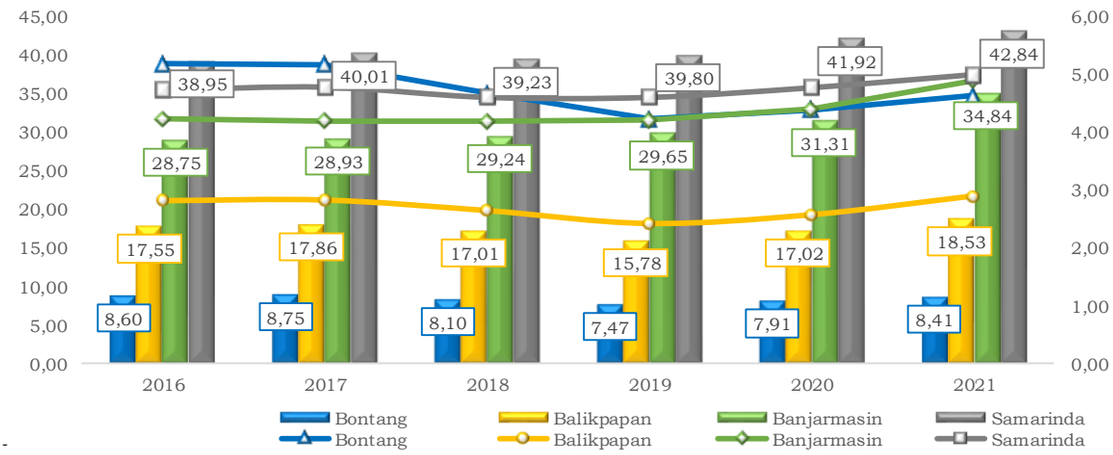
Untuk kedepan, usaha menurunkan angka kemiskinan daerah ini relatif lebih berat sebab kondisi perekonomian mengalami penurunan sebagai dampak pandemi Covid -19. Oleh karena itu, program program perlindungan sosial dan upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin tetap menjadi program prioritas untuk masyarakat miskin mampu bertahan ditengah pandemi Covid-19 dan pengentasan kemiskinan kedepan lebih mengarah kepada bantuan modal dan pembinaan yang mengarah pada peningkatan pendapatan rumah tangga miskin tersebut sesuai kondisi kegiatan ekonominya.

Pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan seluruh Kota di Provinsi Kalimantan Timur, persentase penduduk miskin Kota Balikpapan merupakan yang terkecil dan di bawah angka provinsi sebesar 2,89%. Sedangkan Kota Bontang dan

Kota Samarinda memiliki tingkat kemiskinan cukup rendah setelah Kota Balikpapan masing-masing sebesar 4,62% dan 4,99%. Jika dibandingkan dengan Kota Banjarmasin yang memiliki persentase penduduk miskin sebesar 4,89%, dapat dikatakan bahwa Kota Balikpapan dapat menanggulangi kemiskinan lebih baik dari pada kota tersebut.

Jika dilihat dari jumlah, penduduk miskin Kota Balikpapan masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Bontang, yakni penduduk miskin di Kota Balikpapan sebesar 18,53 ribu jiwa sedangkan Kota Bontang adalah 8,41 ribu jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kota Samarinda dan Kota Banjarmasin masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Balikpapan, yaitu masing-masing sebesar 42,84 ribu jiwa, dan 34,84 ribu jiwa.

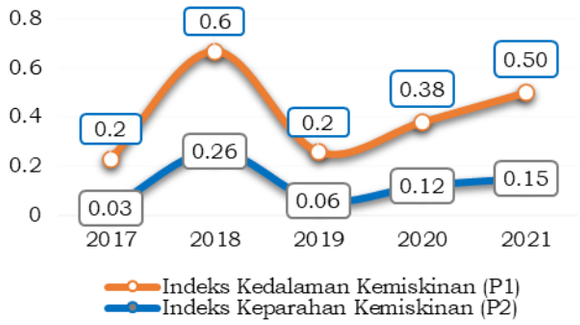
Berdasarkan grafik dibawah juga diketahui bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Balikpapan dan dibandingkan dengan Kota disekitarnya, berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin Kota Balikpapan mencapai 17,86 ribu jiwa dengan persentase 2,82%. Pada tahun 2018 hingga 2019, jumlah penduduk miskin Kota Balikpapan mengalami penurunan menjadi 15,78 ribu jiwa dengan persentase 2,42%. Namun pada tahun 2020 hingga 2021, angka ini kembali mengalami peningkatan menjadi 18,53 ribu jiwa dengan persentase 2,89%. Adapun sebaran kemiskinan per kecamatan pada Tahun 2021, Kecamatan Balikpapan Timur 2,14 ribu jiwa, Kecamatan Balikpapan Barat 2,35 ribu jiwa, Kecamatan Balikpapan Utara 4,11 ribu jiwa, Kecamatan Balikpapan Tengah 2,69 ribu jiwa, Kecamatan Balikpapan Selatan 3,56 ribu jiwa dan Kecamatan Balikpapan Kota 2,17 ribu jiwa.



Gambar 2.30 Perbandingan Jumlah &Persentase Penduduk Miskin (P0) menurut Kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Banjarmasin Tahun 2017-2021
Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2022

Indikator selanjutnya yang digunakan untuk mengukur kemiskinan yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) berfungsi untuk mengukur kesenjangan antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilainya maka semakin jauh di bawah rata-rata pengeluaran

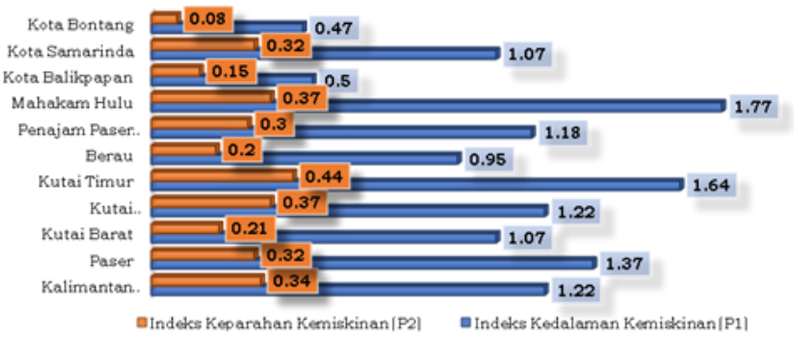
penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sebaliknya, jika angka indeks kemiskinannya semakin rendah maka semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks keparahan kemiskinan (P2) adalah indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.



Gambar 2.31 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks dan Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Nilai P1 dan P2 Kota Balikpapan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Tahun 2017 nilai P1 sebesar 0,23, di tahun 2018 naik cukup tinggi di angka 0,67, menurun di tahun 2019 menjadi 0,26, dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 menjadi 0,50. Rata-rata nilai P1 selama 5 tahun terakhir adalah 0,41. Meningkatnya nilai P1 di tahun 2021 menunjukkan semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Pola yang sama juga terlihat pada nilai P2, kenaikan nilai terjadi di tahun 2020 hingga 2021. Pada tahun 2019 penurunan nilai P2 cukup tinggi dari tahun 2018 sebesar 0,20 menjadi 0,06. Pada tahun 2020, terjadi kenaikan sebesar 0,06 menjadi 0,12 dan pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 0,03 menjadi 0,15. Rata-rata nilai P2 dari tahun 2017-2021 sebesar 0,12, rendahnya nilai P2 di Kota Balikpapan menunjukkan rendahnya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

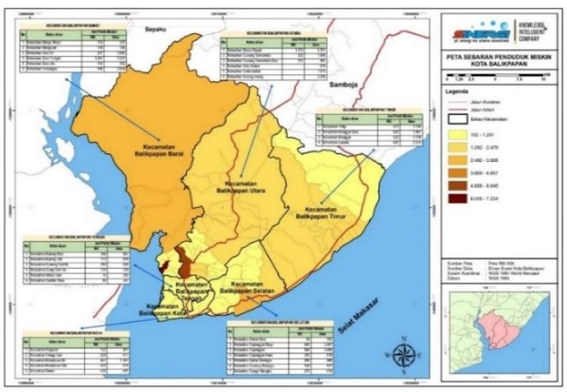
Nilai P1 dan P2 Kota Balikpapan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain keduanya memiliki nilai dibawah Provinsi Kalimantan Timur, namun masih berada di atas Kota Bontang dengan masing-masing nilai P1 sebesar 0,47 dan 0,08 untuk nilai P2. Sementara itu Kabupaten Mahakam Ulu menjadi daerah dengan nilai P1 tertinggi dan Kabupaten Kutai Timur menjadi daerah dengan nilai P2 tertinggi. Hal ini menunjukkan tingginya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin dan jauh di bawah rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.



Gambar 2.32 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Adapun sebaran jumlah penduduk miskin di Kota Balikpapan pada setiap Kecamatan/Kelurahan ditampilkan pada Gambar 2.33. Jumlah penduduk miskin tinggi terlihat pada warna yang lebih gelap dibandingkan daerah lainnya.

Dalam upaya penanggulangan selama ini, beberapa karakteristik dan permasalahan kemiskinan di Kota Balikpapan, diantaranya adalah: (a) rata-rata pendidikan penduduk miskin Kota Balikpapan hanya tamatan SD/SLTP sebesar 69,66%; (b) dari sisi tempat kelahiran, sebagian besar penduduk miskin berasal dari luar Kota Balikpapan yaitu sebesar 55,27%; (c) pemberdayaan masyarakat miskin belum dilakukan secara tuntas; (d) Permasalahan data penduduk miskin, termasuk permasalahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Program Keluarga Harapan (PKH); (e) penanganan kemiskinan belum dilakukan secara terintegrasi; dan (f) belum optimalnya monitoring dan evaluasi pihak terkait terhadap bantuan yang telah disalurkan.



Gambar 2.33 Peta Sebaran Penduduk Miskin Kota Balikpapan
Sumber: Dokumen Evaluasi Program Kemiskinan Kota Balikpapan, 2020

Permasalahan tersebut perlu ditangani secara konsisten dan terintegrasi dengan melibatkan segenap pemangku kemiskinan, apalagi tantangan penanggulangan kemiskinan saat ini dan kedepan semakin berat. Adanya pandemi covid-19 berdampak pada meningkatnya penduduk miskin, di sisi lain adanya rencana Kota Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) jika tidak diantisipasi secara bijak akan memunculkan kantong-kantong kemiskinan baru seiring meningkatnya jumlah penduduk ke daerah ini.

Menurunnya jumlah institusi ataupun lembaga sosial yang berfungsi untuk membantu Dinas Sosial berpengaruh terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Balikpapan. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, penyaluran jaminan sosial seperti akses kesehatan, pangan, dan lain-lain mengalami tren peningkatan. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan yang ditanggung Kota Balikpapan mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada tahun 2017 jumlahnya sebanyak 13.493 jiwa, angka ini meningkat menjadi 162.968 jiwa pada tahun 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh program subsidi iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja. Hal yang sama juga terjadi pada Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengalami peningkatan dua kali lipat. Pada tahun 2017, jumlah PKH sebanyak 3.630, angka ini meningkat menjadi 6.142 PKH pada tahun 2021.

Dengan adanya tren peningkatan penerima bantuan sosial, akan tetapi disisi lain jumlah lembaga sosial yang mengalami tren penurunan, akan

berpengaruh terhadap kinerja Dinas Sosial untuk menyalurkan berbagai jenis program bantuan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Balikpapan. Oleh Karenanya diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas institusi/lembaga sosial untuk membantu kinerja Dinas Sosial. Beberapa capaian kinerja program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan di Kota Balikpapan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah :

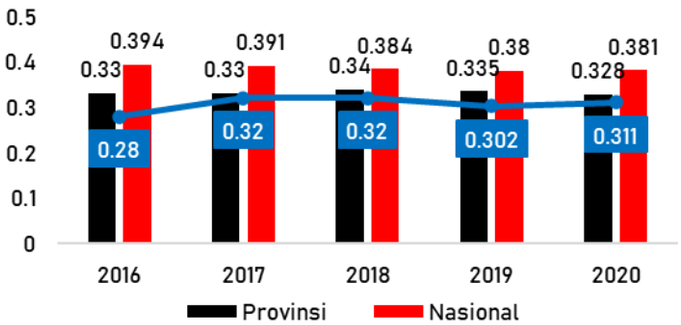
Tabel 2.17 Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	PBI Jamkesda (Jiwa)	13.493	16.166	16.405	17.854	162.968
2	PBI APBN (Jiwa)	97.221	97.839	93.147	89.186	73.792
3	Program Keluarga Harapan (Keluarga Sangat Miskin)	3.630	6.919	5.089	5.678	6.142
4	Raskin/Rastra/BPNT	9.563	9.563	10.047	9.877	29.797

Sumber : Dinas Sosial Kota Balikpapan, 2022

2.2.1.6. Ketimpangan/Indeks Gini

Pada tahun 2017 dan 2018, indeks gini Kota Balikpapan sebesar 0,32 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tergolong rendah. Selanjutnya pada tahun 2019, indeks gini mengalami penurunan menjadi 0,302. Namun, angka ini terus mengalami kenaikan hingga mencapai 0,325 pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, indeks gini Kota Balikpapan masih berada dibawah indeks Provinsi dan Nasional. Seperti pada tahun 2021, indeks gini Provinsi sebesar 0,331 dan Nasional sebesar 0,381, dimana keduanya berada diatas angka indeks gini Kota Balikpapan.

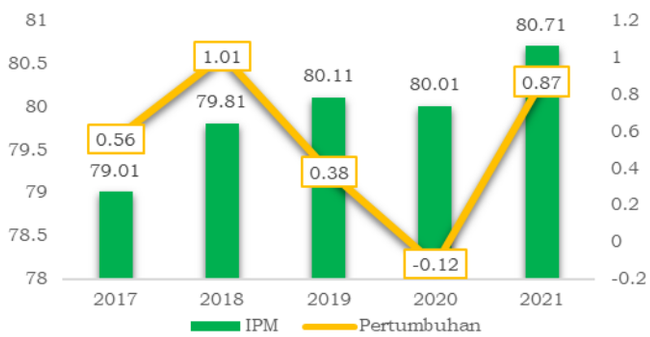


Gambar 2.34 Perbandingan Indeks Gini Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, diolah

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

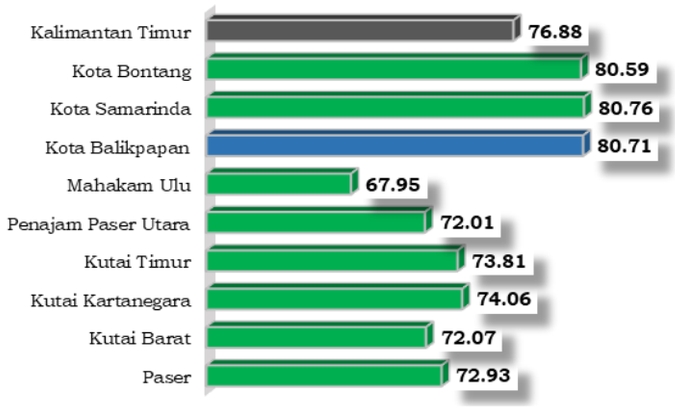
Secara umum, indeks pembangunan manusia Kota Balikpapan mengalami kemajuan selama periode 2017 hingga 2019. Pada tahun 2020, sebagai dampak dari pandemi covid-19, IPM Kota Balikpapan mengalami penurunan sebesar 0,10 persen, menjadi 80,01. Pada tahun 2021, seiring dengan berlangsungnya era *new normal* dan kondisi perekonomian di Kota Balikpapan yang cenderung membaik berdampak pada kembali meningkatnya capaian IPM Kota Balikpapan menjadi sebesar 80,71.



Gambar 2.35 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan IPM (%) Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2022

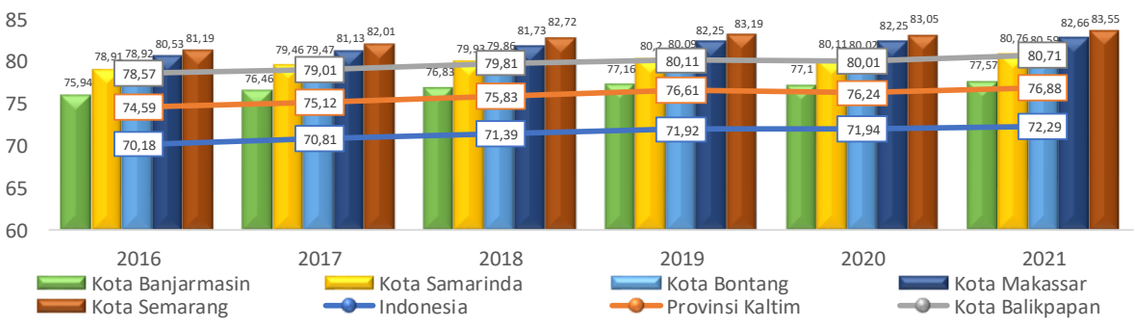
IPM Kota Balikpapan pada Tahun 2021 menempati urutan ke-2 tertinggi di bawah Kota Samarinda dengan IPM sebesar 80,76 serta berada di atas angka provinsi sebesar 76,88. Kabupaten Mahakam Ulu menjadi daerah dengan IPM terendah sebesar 67,95. Berdasarkan hal tersebut, tiga kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki kategori IPM tinggi, kemudian yang berada pada kategori menengah atas terdapat 6 Kabupaten. Sementara itu, Kabupaten Mahakam Ulu menjadi satu-satunya daerah dengan kategori IPM menengah bawah. Sehingga jika dilihat nilai IPM Provinsi Kalimantan Timur memiliki kategori menengah atas.



Gambar 2.36 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Berdasarkan skala pencapaian derajat pembangunan manusia, pada tahun 2021 ada tiga Kabupaten/Kota yang tahun ini memasuki kategori sangat tinggi yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang. Selebihnya untuk kabupaten di Kalimantan Timur berada pada kategori sedang.

Jika dibandingkan dengan IPM Nasional, capaian IPM Kota Balikpapan melampaui capaian IPM Nasional. Pada tahun 2017 misalnya, capaian IPM Nasional sebesar 70,81 sedangkan IPM Kota Balikpapan sebesar 79,01. Kedua capaian IPM baik Kota Balikpapan dan Nasional meningkat secara konsisten hingga tahun 2019. Tercatat pada tahun 2019, IPM Kota Balikpapan sebesar 80,11 sedangkan IPM Nasional sebesar 76,61. Walaupun IPM Kota Balikpapan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 80,01, namun masih melampaui capaian IPM Nasional sebesar 71,94. Seiring dengan berlangsungnya era *new normal*, kondisi perekonomian diseluruh kab/kota di Indonesia mengalami perbaikan, hal ini berdampak pada meningkatnya capaian IPM pada tahun 2021. Namun jika dilihat dari grafik, capaian IPM Kota Balikpapan masih berada dibawah capaian IPM Kota Semarang dan Kota Makassar.



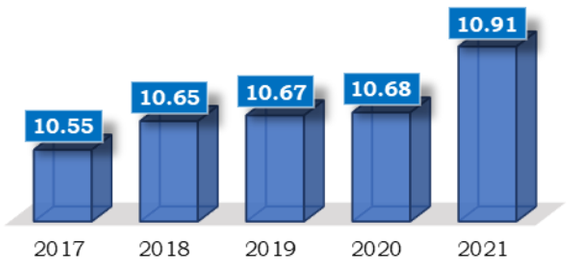
Gambar 2.37 Perbandingan IPM Kota Balikpapan dengan Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Makassar, Banjarmasin, Semarang dan Nasional Tahun 2017-2021

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2022

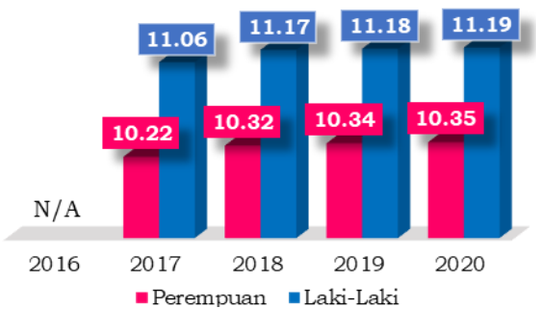
2.2.2.1 Pendidikan

a) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Capaian rata-rata lama sekolah terjadi peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2020 sebesar 10,68 naik 0,23 poin pada tahun 2021 menjadi 10,91. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan yang positif dan merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kota Balikpapan. Secara rata-rata penduduk di Kota Balikpapan telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas 2 SMA/sederajat.



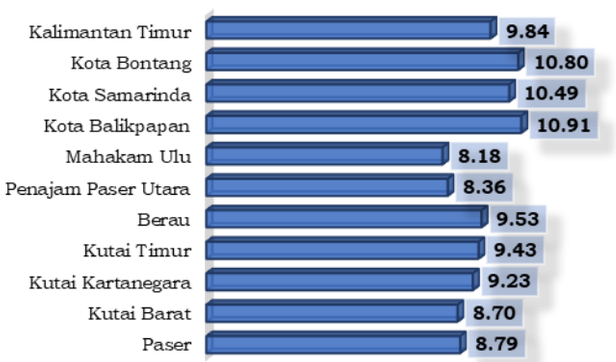
Gambar 2.38 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Balikpapan Tahun 2017-2021
Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2021



Gambar 2.39 RLS Kota Balikpapan Menurut Gender Tahun 2016-2020
Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2021

Berdasarkan gender, rata-rata lama sekolah laki-laki dan rata-rata lama sekolah perempuan mencapai angka masing-masing sebesar 11,19 tahun dan 10,35 tahun. Sejak tahun 2017, rata-rata lama sekolah laki-laki lebih lama daripada rata-rata lama sekolah perempuan. Pada tahun 2021, rata-rata lama pendidikan laki-laki lebih lama 0,67 tahun (sekitar 8 sampai 9 bulan) dibandingkan rata-rata lama pendidikan perempuan. Diharapkan pada periode selanjutnya lama sekolah perempuan semakin ditingkatkan sehingga perbedaan dengan lama sekolah laki-laki semakin berkurang dan setara.

Bila dilihat keadaan pada setiap kabupaten/kota, posisi rata-rata lama sekolah tertinggi tetap diraih oleh tiga kota. Peringkat pertama dicapai oleh Kota Balikpapan dengan rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas sebesar 10,91 tahun, posisi kedua Kota Bontang dengan rata-rata lama sekolah 10,80 tahun, dan urutan ketiga adalah Kota Samarinda dengan rata-rata lama sekolah 10,49 tahun. Perbedaan rata-rata lama sekolah antara wilayah kota dan wilayah kabupaten cukup berarti. Seperti yang terlihat pada penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu, tercatat rata-rata lama sekolah daerah ini yang terendah dari seluruh



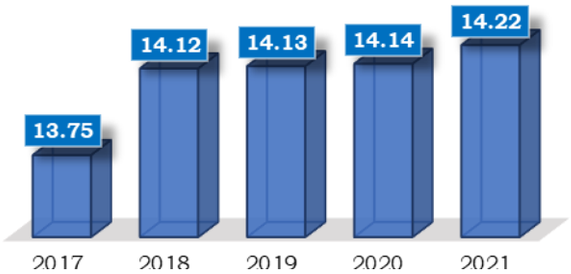
Gambar 2.40 RLS Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, 2021
Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2022

kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 8,18 tahun atau tertinggal sekitar dua tahun dari penduduk di wilayah kota. Hal ini disebabkan sarana dan prasarana di daerah kota lebih memadai dibandingkan dengan wilayah kabupaten, dan akses untuk mencapai tempat pendidikan juga lebih mudah.

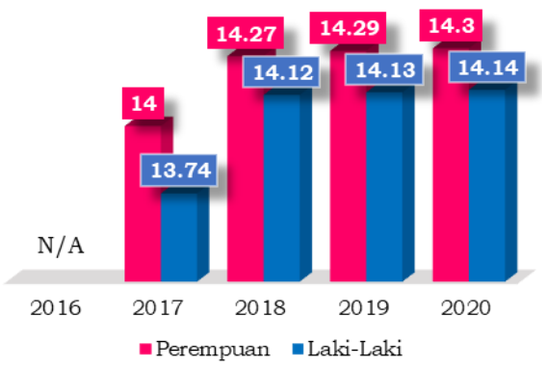
Capaian angka pendidikan Kota Balikpapan pada tahun 2021 adalah 10,91 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Kota Balikpapan menamatkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tidak tamat Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini patut diperhatikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan, sebab dengan perkembangan teknologi dan semakin ketatnya persaingan kerja maka penyiapan sumber daya mumpuni mutlak diperlukan. Salah satu ruang untuk dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut adalah pendidikan formal.

b) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka harapan lama (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Data harapan lama sekolah di Kota Balikpapan tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana gambar berikut.



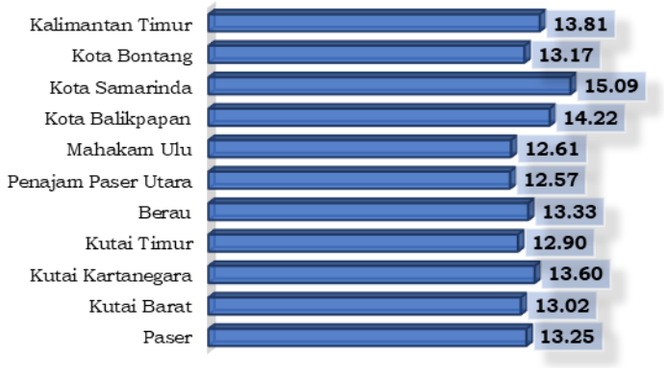
Gambar 2.41 Harapan Lama Sekolah Kota Balikpapan Tahun 2017-2021
Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2022



Gambar 2.42 HLS Kota Balikpapan Menurut Gender Tahun 2016-2020
Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2021

Berdasarkan gambar capaian harapan lama sekolah Kota Balikpapan tersebut, bahwa angka harapan sekolah penduduk Kota Balikpapan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 berada pada angka 14,14 mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 0,08 menjadi 14,22. Melihat angka harapan lama sekolah penduduk Kota Balikpapan sejak tahun 2017–2021 selalu diatas 12 tahun. Artinya, terdapat keinginan kuat anak-anak di Kota Balikpapan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di tingkat D3/S1. Jika dilihat berdasar gender, harapan lama sekolah perempuan adalah 14,31 tahun dan laki-laki adalah 14,22 tahun. Angka ini dapat diartikan bahwa penduduk usia 7 tahun keatas baik laki-laki maupun perempuan memiliki harapan lama sekolah sebesar 14 tahun.

Capaian angka harapan lama sekolah di Balikpapan menempati urutan ke-2 se Provinsi Kalimantan Timur setelah Kota Samarinda sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



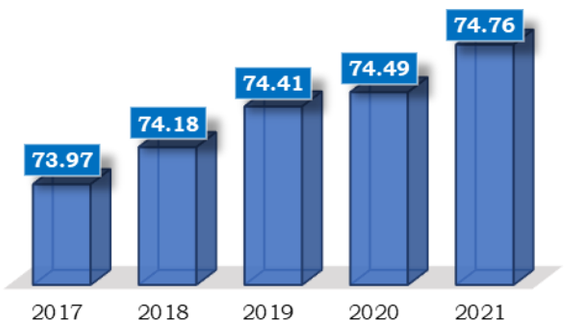
Gambar 2.43 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Saat mengaitkan antara rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, terdapat perbedaan kurang lebih 4 tahun antara angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah penduduk Kota Balikpapan adalah 10,91 tahun sedangkan harapan lama sekolah sebesar 14,22 tahun. Hal ini penting diperhatikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk menentukan berbagai kebijakan dan program pembangunan sumber daya manusia ke depan, khususnya dalam bidang pendidikan.

Salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Pada target 4b, dinyatakan bahwa memastikan semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses ke pengembangan anak usia dini yang setara, perawatan, dan pendidikan anak usia dini sehingga mereka siap untuk pendidikan dasar. Pada target ini, diharapkan angka kelulusan baik SD, SMP, maupun SMA ditingkatkan. Secara langsung, ketika target ini dicapai maka angka HLS dan RLS yang merupakan dua indikator penghitungan IPM akan ikut meningkat.

2.2.2.2 Kesehatan

a) Angka Harapan Hidup

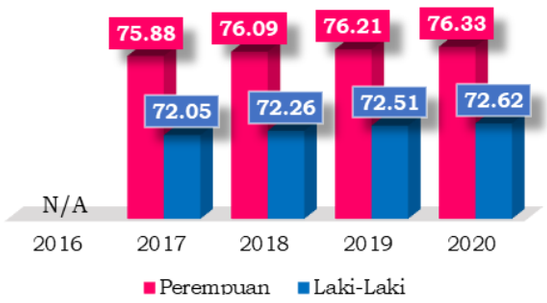


Gambar 2.44 Angka Harapan Hidup (Tahun) Kota Balikpapan Tahun 2017-2020
Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2022

Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Balikpapan yang merepresentasikan aspek kesehatan terus meningkat sejak tahun 2017. Semakin meningkatnya AHH di Kota Balikpapan mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Balikpapan semakin membaik, karena AHH merupakan salah satu tolok ukur untuk menilai derajat kesehatan masyarakat.

Realisasi capaian AHH Kota Balikpapan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hingga tahun 2021 AHH Kota Balikpapan mencapai 74,76. Hal ini menunjukkan bahwa harapan bayi yang baru lahir pada tahun 2021 dapat

bertahan hidup hingga usia 74,76 tahun. Seseorang yang dapat menikmati umur panjang selain dari upaya dari pribadi yang bersangkutan, juga diukur dari seberapa jauh upaya masyarakat atau pemerintah dengan penggunaan sumber daya yang tersedia mampu untuk memperpanjang umur penduduknya. Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya masyarakat perlu diarahkan pada pembinaan kesehatan agar warganya senantiasa berperilaku hidup sehat sehingga dapat menikmati umur panjang dan sehat.

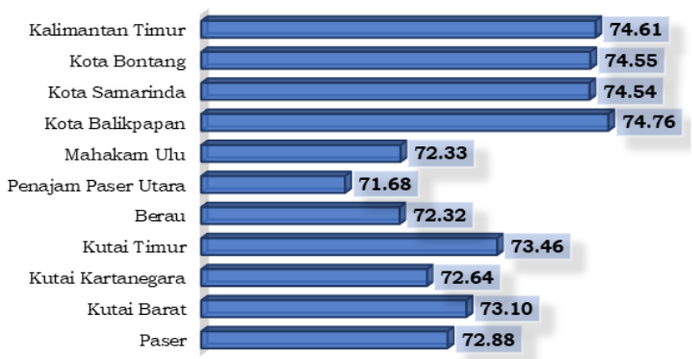


Gambar 2.45 Angka Harapan Hidup Kota Balikpapan Menurut Gender Tahun 2016-2020

Dalam pengukuran IPM, indikator kesehatan dipengaruhi oleh nilai minimum dan maksimum yang bisa dicapai. Nilai maksimum AHH laki-laki adalah 82,5 tahun sedangkan bagi perempuan 87,5 tahun. Adapun untuk nilai minimum AHH laki-laki dan perempuan masing-masing adalah 17,5 dan 22,5 tahun. Angka ini mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh UNDP. Pada tahun 2021, angka AHH laki-laki adalah 72,86 dan AHH perempuan adalah sebesar 76,55. Sejak tahun 2017, nilai AHH perempuan dan laki-laki mengalami peningkatan setiap tahunnya yang berarti bahwa tingkat kesejahteraan dan pembangunan perempuan dan laki-laki mengalami perbaikan. Peningkatan secara konsisten tiap tahunnya mengindikasikan bahwa sistem dan kebijakan kesehatan yang selama ini diterapkan memiliki korelasi yang positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, selisih AHH perempuan dan laki-laki di Kota Balikpapan setiap tahunnya mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa suatu saat nanti fenomena *female advantages* bisa jadi berkurang atau bahkan tidak muncul di Kota Balikpapan.

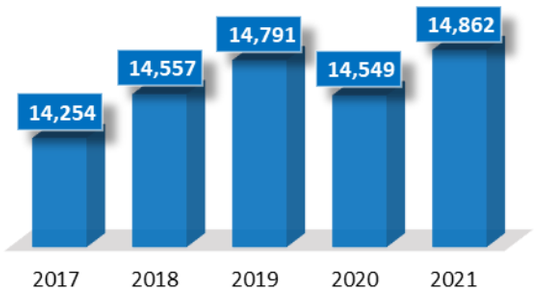
Angka harapan hidup saat lahir adalah salah satu indikator gambaran kesehatan masyarakat di suatu wilayah tertentu. AHH Kota Balikpapan masih lebih tinggi dari AHH provinsi Kalimantan Timur dengan selisih 0,15 poin. Tingginya AHH Kota Balikpapan disebabkan fasilitas kesehatan dan persentase penolong persalinan medis, jumlah dokter, persentase angka kesakitan, keadaan lingkungan perumahan dan penyediaan air bersih sudah semakin baik.



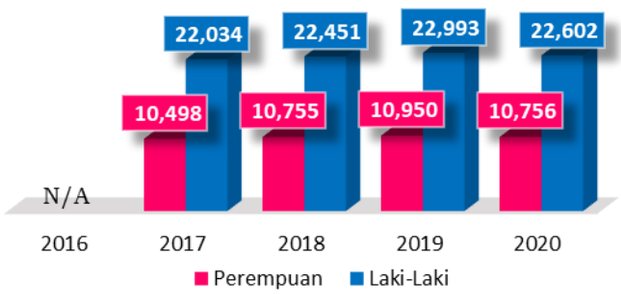
Gambar 2.46 Angka Harapan Hidup (Tahun) se-Kalimantan Timur Tahun 2021
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2022

2.2.2.3 Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita Kota Balikpapan terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2019, yaitu sebesar Rp14,254 juta pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp 14,791 juta pada 2019. Pada tahun 2020, terjadi penurunan menjadi sebesar Rp14,549 juta. Walaupun mengalami penurunan, pengeluaran perkapita Kota Balikpapan masih berada diatas pengeluaran per kapita Provinsi Kalimantan Timur, seperti pada tahun 2020 pengeluaran perkapita Provinsi sebesar Rp11,728 juta. Hal ini berarti, rata-rata pengeluaran penduduk di Kota Balikpapan selama setahun lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk di seluruh Provinsi Kalimantan Timur. Namun, pada tahun 2021, terjadi peningkatan pengeluaran perkapita menjadi sebesar Rp 14,862 juta, angka ini juga masih berada di atas Provinsi Kalimantan Timur.



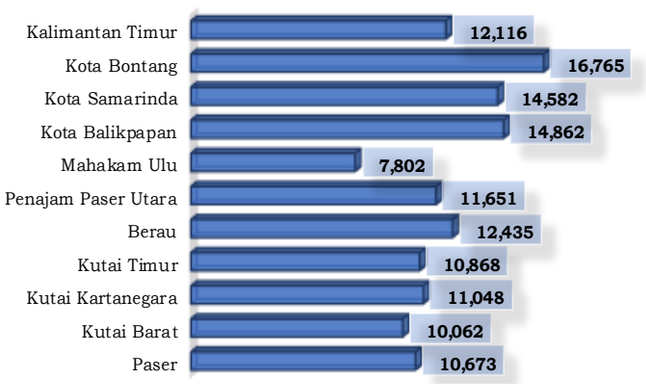
Gambar 2.47 Pengeluaran Per Kapita Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2020
Sumber: BPS diolah, 2021



Gambar 2.48 Pengeluaran Per Kapita Kota Balikpapan Menurut Gender Tahun 2016-2020
Sumber: BPS diolah,2021

Berdasarkan gender, dari tahun 2017 hingga 2021 pengeluaran per kapita laki-laki selama setahun lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan. Seperti pada tahun 2021, pengeluaran perkapita laki-laki sebesar Rp 23,073 juta per tahun, sedangkan untuk perempuan hanya sebesar Rp 10,953 juta per tahun.

Pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, pengeluaran per kapita Kota Balikpapan berada di peringkat kedua setelah Kota Bontang dengan pengeluaran per kapita sebesar Rp 16,765 juta. Sedangkan, Kabupaten Mahakam Ulu memiliki pengeluaran per kapita terendah yaitu sebesar Rp 7,802 juta.



Gambar 2.49 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus Seni Budaya dan Olahraga dilakukan dalam upaya meningkatkan dan melestarikan seni budaya dan olahraga. Balikpapan adalah suatu kota yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, etnik yang merupakan cerminan dari Indonesia yang majemuk. Secara garis besar ada lima budaya dasar suku bangsa asal Kalimantan yang disebut Rumpun Kalimantan, empat di antaranya terdapat di Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan yaitu: Banjar, Kutai, Dayak, Paser. Kemudian karena kemajuan kota Balikpapan sehingga banyak pendatang yaitu antara lain dari Jawa, Sulawesi, Madura. Berdasarkan asalnya, pendatang berasal dari pulau-pulau di sekitar seperti Jawa, Madura dan Sulawesi. Jumlah pendatang paling banyak berasal dari Jawa yakni sebanyak 30%, kemudian diikuti dengan Banjar dan Bugis masing-masing sebanyak 20%, Toraja sebanyak 11%, Madura sebanyak 8%, Buton sebanyak 7% dan Betawi sebanyak 4%. Besarnya jumlah pendatang di Kota Balikpapan telah membawa keberagaman etnis, sehingga Balikpapan dikenal sebagai kota yang heterogen, baik dari segi adat istiadat maupun agama. Namun demikian hal ini tidak menjadi kendala dalam mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Tercatat setidaknya 47 kelompok etnis/paguyuban yang ada di Balikpapan. Paguyuban ini berperan penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat, sehingga Balikpapan menjadi salah satu kota yang tidak pernah terjadi konflik dan aman dari kerusuhan suku, agama dan ras.

Tabel 2.18 Ormas dan Paguyuban Kota Balikpapan 2023

NO	ORMAS DAN PAGUYUBAN
1	Paguyuban Keluarga Besar Ngawi (PKBN)
2	Kerukunan Warga Sukoharjo Solo (KWSS) Balikpapan
3	Kerukunan Keluarga Buton (KKB)
4	Paguyuban Warga Ponorogo
5	Paguyuban Warga Asal Tulung Agung (PAWATA-BAKTI)
6	Paguyuban Keluarga Blitar (PKB) Baliklpapan
7	Paguyuban Sedulur Agung Madiun
8	Paguyuban Keluarga Ngapak Banyumasan (PANGABAN)
9	Kerukunan Keluarga Wasilomata Buton (KKWB)
10	Saroha
11	Kerukunan Warga Dayak Dusun Ma'anyan (DUSMA)
12	Ikatan Keluarga Maluku Tenggara (IKAMALRA)
13	Kerukunan Keluarga Sasak Lombok NTB (KKSL-NTB)
14	Paguyuban Rantau Jawa Barat Balikpapan (PRJJB)
15	Paguyuban Keluarga Besar Surabaya (PKBS)
16	Pasungkudan Ne Tonsea (PNT)
17	Himpunan Keluarga Besar Bulukumba (HKBB)
18	Lembaga Adat Paser Balikpapan (LAPB)
19	Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone (KKMB)
20	Forum Komunikasi Keluarga Jawa Timur (FKKJT)
21	Dp. Badan Silaturahmi Masyarakat Madura (BASMARA)
22	Dpd. Penggawa Adat Dayak Borneo Kota Balikpapan
23	Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat
24	Paguyuban Warga Boyolali
25	Ikatan Keluarga Madura (IKAMA)
26	Paguyuban Menak Sopal Trenggalek (PMS)
27	Ikatan Kerukunan Keluarga Muna (IKKM) Balikpapan
28	Persekutuan Dayak Bahau "Beraan Pare" Balikpapan
29	Himpunan Keluarga Maluku Utara "Moloko Kie Raha"
30	Paguyuban Joyoboyo Kediri Balikpapan
31	Ikatan Keluarga Manggarai (IKM)

NO	ORMAS DAN PAGUYUBAN
32	Kerukunan Keluarga Maluku Balikpapan (KKMB)
33	Keluarga Besar Arema Balikpapan
34	Forum Komunikasi Paguyuban Balikpapan
35	Lembaga Adat Paser Balikpapan (LAPB)
36	Pc.Pemuda Katolik Kota Balikpapan
37	Kerukunan Paguyuban Warga Lamongan Ronggo Hadi
38	Kerukunan Keluarga Luwu Palopo
39	Persekutuan Sangir Talaut (PST)
40	Paguyuban Seni Reog Singo Joyo Jati Kota Balikpapan
41	Kerukunan Bubuhan Banjar Kaltim (KBBKT)
42	Paguyuban Keluarga Ngayogyakarta Hadiningrat (PAKARYANING YOGYA)
43	Paguyuban Arema Balikpapan
44	Kerukunan Keluarga Minahasa Selatan (KKMS)
45	Ikatan Masyarakat Asal Mandailing Kota Balikpapan (IMAM)
46	Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo (KKIG)
47	Kerukunan Keluarga Turatea (KKT) Jeneponto

Sumber: Kesbangpol, diolah 2022

Selain Paguyuban terdapat Sanggar Seni yang berfungsi untuk melestarikan Seni Budaya yang ada di Kota Balikpapan

Tabel 2.19 Jumlah Sanggar Seni Tahun 2022 Kota Balikpapan 2023

NO	JENIS SANGGAR SENI	JUMLAH
1	Sanggar Tari Tradisional	77 Sanggar
2	Sanggar Kuda Lumping	32 Sanggar
3	Sanggar Musik Tradisional	17 Sanggar
4	Sanggar Musik Electone	46 Sanggar
5	Sanggar Musik Rohani	30 Sanggar

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diolah 2022

Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan social masyarakat sedangkan jumlah klub olahraga adalah perkumpulan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang olahraga bagi para anggotanya guna peningkatan prestasi maupun dengan tujuan lain yaitu menjaga kesehatan.

Untuk memenuhi kebutuhan akan sarana latihan dan pertandingan olahraga maka perlu adanya sarana gedung yang dapat dipergunakan untuk berbagai macam jenis olahraga. berikut daftar data Fasilitas Umum Olahraga di Kota Balikpapan:

Tabel 2.20 Data Fasilitas Umum Olahraga Di Kota Balikpapan

NO	NAMA	ALAMAT
1	Lapangan Tembak Raider	Jl. Mulawarman Kelurahan Manggar Balikpapan Timur
2	Gelora Patra Pertamina	Jl. Jendral Sudirman, Prapatan - Balikpapan
3	Gedung havindo	Jl. MT. Haryono, Damai - Balikpapan
4	Balikpapan Tennis Stadiom	Jl. Syarifuddin Yoes, Gunung Bahagia - Balikpapan
5	Pertamina Balikpapan Golf Club	Jl. Jendral Sudirman, Gn.Bahagia-Balikpapan
6	Waduk Manggar (Venues Dayung)	Jl. Mulawarman Kelurahan Lamaru - Manggar Balikpapan Timur
7	Gedung Olahraga Squash	Jl. Syarifuddin Yoes, Sepinggan - Balikpapan
8	Gedung Sepakbola Sudirman	Jl. Tanjung Pura, Prapatan-Balikpapan
9	PT. Inti Pratama (Lapanagan Golf)	Jl. Soekarno Hataa KM. 5,5 RT.21 Balikpapan
10	PT. Sinar Mas Wisesa (Bola Tennis)	Jl. MT. Haryono, Komperta Balikpapan Baru Rt. 15
11	CV. Wahana Griya Perdana (Bola Tennis)	Jl. Mulawarman No.51 Rt. 15 Balikpapan
12	Meteor 96 Sport	Jl. Ruhui Rahayu No, 75 Balikpapan

NO	NAMA	ALAMAT
13	Balikpapan Sport Center	Jl. MT. Haryono No. 17 Balikpapan
14	Planet Futsal PT. Kaltim Jaya Raga	Jl. Syarifuddin Yoes, Balikpapan
15	Stadion Persiba	Jl. Minas Kompleks Pertamina Parikesit
16	CV. Wahana Griya Perdana (Renang)	Jl. Mulawarman No. 51 Rt. 15
17	PT. Sinas mas Wisesa (Renang)	Jl. MT. Haryono, Kompleks Balikpapan Baru
18	Kolam Renang Benua Patra	Jl. Jendral Sudirman Kompleks Pertamina

Di Balikpapan terdapat beberapa cabang Olahraga yang didaftarkan ke Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisara antara lain:

Tabel 2.21 Cabang Olahraga di Kota Balikpapan

- Aeromodelling
- Amatir Mix Martial Art
- Angkat Berat
- Angkat Besi
- Anggar
- Arung Jeram
- Atletik
- Barongsai
- Basket
- Berkuda
- Billiard
- Binaraga
- Bola Tangan
- Bola Voli
- Bowling
- Bridge
- Bulutangkis
- Catur
- Cricket
- Dansa
- Dayung
- Drumband
- E-Sport
- Ferkushi(kurash) Beladiri
- Gate Ball
- Golf
- Gulat
- Hockey
- Judo
- Jujitsu
- Karate
- Kempo
- Kick Boxing
- Korf Ball
- Layar
- Menembak
- Muaythai
- Panahan
- Panjat Tebing
- Pentaque
- Renang
- Sambo
- Selam
- Senam
- Sepak Bola
- Sepak Takraw
- Sepatu Roda
- Sepeda
- Silat
- Ski Air
- Soft ball
- Soft Tennis
- Squash
- Taekwondo
- Tarung
- Tenis Lapangan
- Tenis Meja
- Tinju
- Woodball
- Wushu
- Yong Modo

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Pendidikan

a. Rasio Guru Murid

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota/Kabupaten mengelola memiliki kewenangan atas pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan usia dini, dan pendidikan non formal. Adapun kewenangan atas pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan kejuruan merupakan Pemerintah Provinsi. Pendidikan memegang perang penting dalam membentuk kualitas SDM. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam melihat kesungguhan pemerintah dalam upaya peningkatan SDM. Pada tahun 2021, Kota Balikpapan tercatat telah memiliki 214 Sekolah Dasar baik negeri dan swasta dengan jumlah murid dan jumlah guru masing-masing sebanyak 70.848 murid dan 3.495 guru. Jumlah Sekolah Menengah Pertama baik negeri dan swasta di Kota Balikpapan sebanyak 91, dengan 33.976 murid dan 1.816 guru. Dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 2.22 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru di Kota Balikpapan Tahun 2021

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
Sekolah Dasar (SD)	214	70.848	3.495
Negeri	136	51.444	2.466
Swasta	54	12.913	665
MI	24	6.491	364
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	91	33.976	1.816

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
Negeri	23	20.766	935
Swasta	53	9.869	570
MTs	15	3.341	311

Sumber: Disdikbud Kota Balikpapan, 2022

Rasio guru baik guru PNS maupun non PNS terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 jumlah murid sesuai jenjang pendidikan. Rasio guru terhadap murid di Kota Balikpapan pada tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23 Rasio Guru terhadap Murid di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

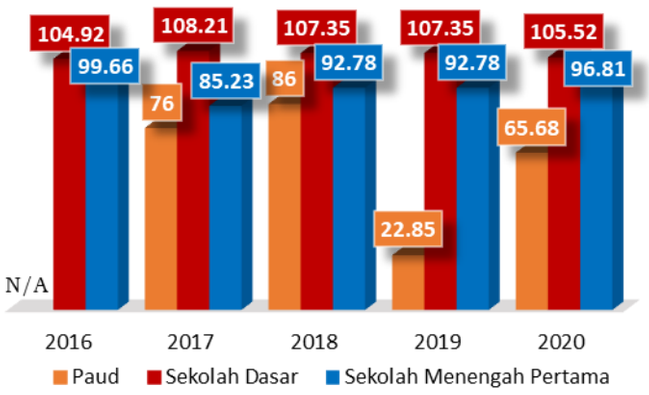
Jenjang Pendidikan	Rasio Guru terhadap Murid				
	2017	2018	2019	2020	2021
Paud	01:11	01:11	01:10	01:11	01:04
Sekolah Dasar	01:22	01:26	01:23	01:23	01:22
Sekolah Menengah Pertama	01:21	01:24	01:21	01:20	01:20

Sumber : Disdikbud Kota Balikpapan, 2022

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non-Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Pada tujuan ke 4 SDGs tentang pendidikan berkualitas, terdapat target Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Capaian APK tingkat PAUD Kota Balikpapan menunjukkan tingkat yang fluktuatif. Sempat menyentuh angka 76 pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan menjadi 86 pada tahun 2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 22,85. Hingga tahun 2020, APK PAUD kembali mengalami peningkatan menjadi 65,58.



Gambar 2.50 Angka Partisipasi Kasar Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021

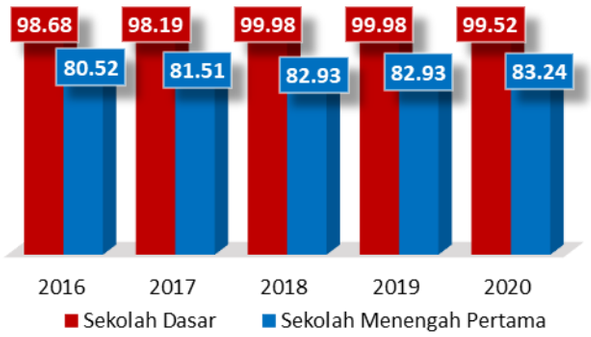
Sedangkan untuk capaian APK tingkat Sekolah Dasar Kota Balikpapan pada tahun 2017 sebesar 108,21, kemudian terus mengalami penurunan hingga mencapai 104,64 pada tahun 2021. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi APK adalah jumlah rasio guru terhadap murid dan ketersediaan ruang kelas pada jenjang SD terhadap jumlah penduduk jenjang usia SD.

Capaian angka partisipasi kasar tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Balikpapan menunjukkan tingkat yang fluktuatif. Pada tahun 2017, angka partisipasi kasar tingkat SMP sebesar 85,23. Kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai 96,81 pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021, angka ini kembali mengalami penurunan menjadi 95,49.

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Seperti halnya dengan APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar.

Berdasarkan Gambar 2.51, Angka partisipasi murni (APM) untuk tingkat SD pada tahun 2017 adalah 98,19, meningkat pada tahun 2018 menjadi 99,98 dan tidak mengalami perubahan hingga tahun 2019. Hingga tahun 2021, angka ini terus mengalami penurunan mencapai 99,49. APM SD lebih dipengaruhi oleh usia siswa baru yang mendaftar masih berusia dibawah 7 tahun dan jumlah siswa yang usianya di atas 12 tahun, sehingga mempengaruhi ketercapaian APM SD.



Gambar 2.51 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020
Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021

Pada jenjang SMP, angka partisipasi murni mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2017 sebesar 80,52 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 83,24 pada tahun 2020. Namun angka ini mengalami penurunan menjadi 83,16 pada tahun 2021. Belum tercapainya APM SMP dikarenakan masih terdapat siswa yang berusia di bawah 13 tahun dan siswa berusia 15 tahun telah mengenyam pendidikan SMA/Sederajat.

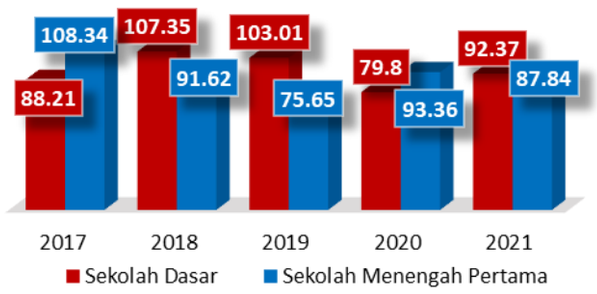
d. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian). Capaian APS Kota Balikpapan untuk jenjang pendidikan Sekolah

Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2017 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.

Berdasarkan Gambar 2.52, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk tingkat SD pada tahun 2017 adalah 88,21, meningkat menjadi 107,35 pada tahun 2018 dan mengalami penurunan hingga mencapai 79,8 pada tahun 2020. Penurunan disebabkan berbagai faktor antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan per kapita (kesejahteraan rumah tangga);
2. Tingkat melek huruf usia dewasa (pendidikan orang tua);
3. Jumlah sekolah yang tersedia dan tingkat urbanisasi penduduk.



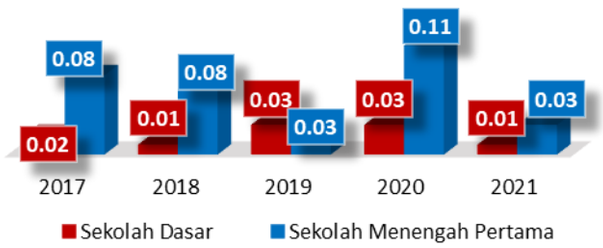
Gambar 2.52 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Balikpapan Tahun 2017–2021
Sumber: Disdikbud Kota Balikpapan, 2022

Namun, pada tahun 2021 APS tingkat SD kembali mengalami peningkatan menjadi 92,37.

e. Angka Pendidikan yang Ditamatkan dan Angka Putus Sekolah

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. APT Kota Balikpapan untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Angka putus sekolah di Kota Balikpapan untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2017 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.



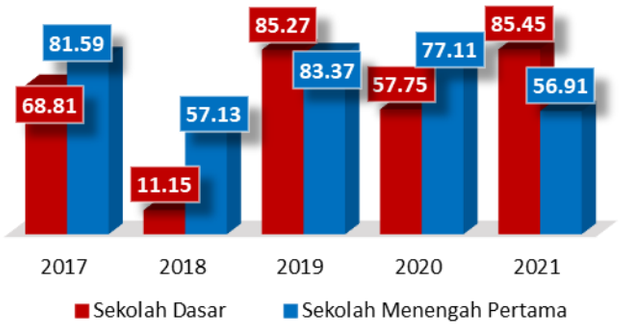
Gambar 2.53 Angka Putus Sekolah Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2021
Sumber: Disdikbud Kota Balikpapan, 2022

f. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Kondisi bangunan pada sekolah negeri baik pada tingkat SD atau SMP dengan kondisi bangunan baik mengalami penurunan setiap tahunnya, mengingat usia sekolah di kota Balikpapan rata-rata ± 20 Tahun, Pemerintah kota terus berupaya melakukan pemeliharaan dan melakukan penambahan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anggaran baik dari APBD maupun

APBN. Persentase sekolah pendidikan dengan kondisi bangunan baik di Kota Balikpapan pada tahun 2017 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut

Terkait dengan rasio daya tampung sekolah, khususnya pada sekolah negeri baik pada jenjang SD dan SMP setiap tahunnya terus mengalami permasalah tentang kemampuan untuk menampung semua penduduk usia SD dan SMP, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kota setiap tahun baik melalui penambahan ruang kegiatan belajar dan rencana pembangunan sekolah baru, akan tetapi laju urbanisasi penduduk ke Kota Balikpapan yang setiap tahun mencapai ± 4% menjadi tantangan tersediri bagi Pemerintah Kota dalam menyediakan sarana pendidikan bagi masyarakat kota Balikpapan.



Gambar 2.54 Persentase Sekolah Pendidikan dengan Kondisi Bangunan Baik Di Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2021
Sumber: Disdikbud Kota Balikpapan, 2022

g. Pelayanan Indikator SPM Pendidikan

Adapun pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada Urusan Pendidikan pada tahun 2020 dan 2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.24 Pencapaian Indikator SPM Urusan Pendidikan Tahun 2020-2021

No.	Indikator SPM	Tahun	
		2020	2021
1	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	33%	33%
	a. Jumlah Peserta Didik Usia 5-6 Tahun	12.080	8.655
	b. Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun	51.566	25.859
2	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	92%	82%
	a. Jumlah Peserta Didik Usia 7-15 Tahun	104.517	99.424
	b. Jumlah Penduduk Usia 7-15 Tahun	114.168	120.972
3	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	90%	90%
	a. Jumlah Peserta Didik Usia 7-18 Tahun	2.707	2.707
	b. Jumlah Penduduk Usia 7-18 Tahun	3.019	3.019

2.3.1.2. Kesehatan

a. Sarana pelayanan kesehatan

Dalam pembangunan bidang kesehatan di Kota Balikpapan telah tersedia layanan kesehatan mulai tingkat dasar dilaksanakan oleh Puskesmas sampai

dengan Rumah Sakit. Namun demikian, kendala infrastruktur dan sarana prasarana penunjang pembangunan kesehatan tersebut masih belum maksimal sehingga terjadi disparitas derajat kesehatan antar wilayah di Kota Balikpapan. Keberadaan rumah sakit di Kota Balikpapan terus ditopang dengan sarana kesehatan yang sudah lazim dikenal masyarakat, yaitu puskesmas dan puskesmas pembantu. Tercatat pada tahun 2020, di Kota Balikpapan terdapat 13 rumah sakit umum, 2 rumah sakit bersalin, dan 45 poliklinik yang ditunjang dengan 27 puskesmas yang tersebar di tiap kecamatan. Selain itu masih terdapat beberapa kecamatan yang masih di luar cakupan layanan khususnya pelayanan Kesehatan rujukan.

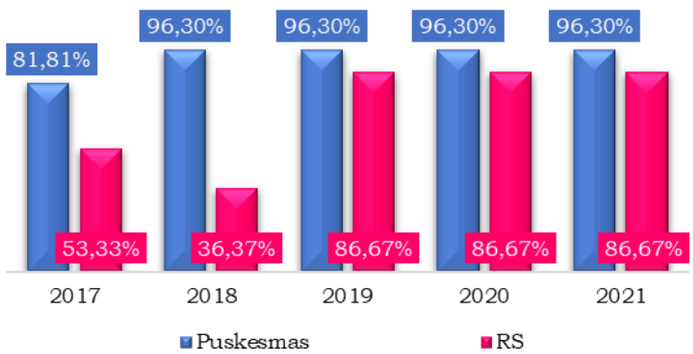
Selain dilihat dari kuantitasnya, penting juga untuk melihat kualitas sarana kesehatan. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kualitas sarana kesehatan adalah persentase puskesmas dan rumah sakit yang terakreditasi sesuai standarisasi yang ditetapkan secara nasional. Dilihat berdasarkan persentasenya, jumlah rumah sakit dan puskesmas yang telah terakreditasi terus mengalami grafik peningkatan setiap tahunnya, bahkan peningkatan persentasenya cukup signifikan.

Tabel 2.25 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan Tahun 2021

Fasilitas Kesehatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Kecamatan Balikpapan Timur	Kecamatan Balikpapan Utara	Kecamatan Balikpapan Tengah	Kecamatan Balikpapan Barat	Total
Rumah Sakit	6	4	1	1	2	0	14
Rumah Sakit Bersalin	0	0	0	0	1	1	2
Poliklinik	17	7	3	10	6	4	47
Puskesmas	2	4	4	5	6	6	27
Puskesmas Pembantu	2	0	3	5	0	2	12
Apotek	41	17	14	24	22	9	127

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2022

Pada tahun 2017 persentase puskesmas yang terakreditasi sebesar 81,81% dan rumah sakit dengan persentase sebesar 53,33%. Angka ini mengalami peningkatan untuk puskesmas menjadi sebesar 96,30% sedangkan untuk rumah sakit mengalami penurunan menjadi sebesar 36,37%. Pada tahun 2019, persentase puskesmas dan rumah sakit yang terakreditasi mengalami peningkatan masing-masing menjadi sebesar 96,30% dan 86,67%. Hingga tahun 2021, angka ini masih sama dengan tahun 2019.

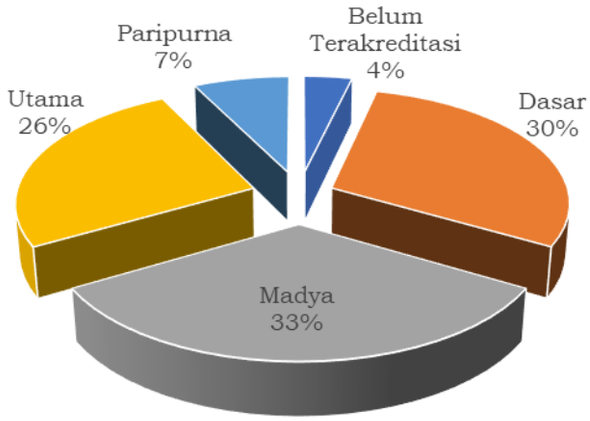


Gambar 2.55 Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang Terakreditasi Nasional Di Kota Balikpapan tahun 2017-2021

Sumber: Dinkes Kota Balikpapan, 2022

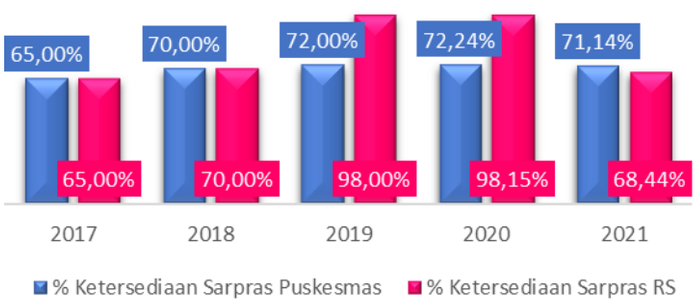
Secara keseluruhan, grafik peningkatan ini menunjukkan bahwa ada upaya perbaikan kualitas sarana layanan kesehatan yang berkorelasi baik dengan hasil penilaian akreditasi. Akan tetapi memang masih perlu diupayakan setiap sarana layanan kesehatan tersebut memiliki nilai akreditasi yang juga meningkat setiap tahunnya.

Adapun tingkatan akreditasi di Kota Balikpapan didominasi oleh puskesmas dengan tingkat akreditasi madya yaitu sebanyak 9 puskesmas atau sekitar 33%. Lalu diikuti oleh tingkat akreditasi dasar yaitu sebanyak 30%. Sedangkan puskesmas dengan akreditasi tertinggi yaitu paripurna hanya berjumlah dua puskesmas atau sekitar 7%. Untuk tingkat utama sebanyak 7 puskesmas atau sekitar 26%.Berdasarkan sarana dan prasarananya, indikator yang digunakan adalah persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang sudah mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2020 untuk puskesmas dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 untuk rumah sakit. Akan tetapi seiring dengan perkembangan dan peningkatan pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2021 yang mengatur standar rumah sakit mulai dari pengelompokan kelas Rumah Sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia. Sehingga pada tahun 2023 seluruh rumah sakit diminta melakukan redesign terkait dengan kondisi sarana dan prasarananya



Gambar 2.56 Persentase Akreditasi Puskesmas Kota Balikpapan
Sumber: Dinkes Kota Balikpapan, 2022

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan rumah sakit di Kota Balikpapan mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2017, baik rumah sakit maupun puskesmas memiliki persentase ketersediaan sarana dan prasarana sebesar 65%. Angka ini meningkat pada tahun 2018 menjadi 70% baik untuk rumah sakit maupun puskesmas. Hingga tahun 2020, persentase untuk rumah sakit lebih tinggi dibandingkan dengan persentase dari puskesmas.



Gambar 2.57 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit Di Kota Balikpapan tahun 2017-2021
Sumber: Dinkes Kota Balikpapan, 2022

Untuk rumah sakit persentase ketersediaannya mencapai 98,15% sedangkan untuk puskesmas masih di angka 72,24%. Namun angka ini mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021, terutama pada rumah sakit menjadi 68,44% dan 71,14% untuk puskesmas.

Salah satunya kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan adalah masih kurangnya upaya untuk menyesuaikan standar dan kebutuhan fasilitas kesehatan sesuai dengan regulasi terbaru. Beberapa Sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan belum sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan. Biasanya yang terjadi di Puskesmas adalah masih bergabung ruang perawatan dengan ruang administrasi, sehingga belum memenuhi standar akreditasi. Permasalahan lainnya adalah alat kesehatan di fasilitas kesehatan masih belum memadai, Persentase ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan) masih dibawah 60% di setiap puskesmas. Terkait dengan jangkauan operasional juga masih belum memadai untuk melayani seluruh wilayah di Kota Balikpapan. Kendaraan operasional untuk petugas di fasilitas kesehatan belum terpenuhi secara maksimal, misalnya kendaraan dinas operasional petugas. Hal ini menyulitkan ketika memberikan pelayanan kesehatan di lapangan.

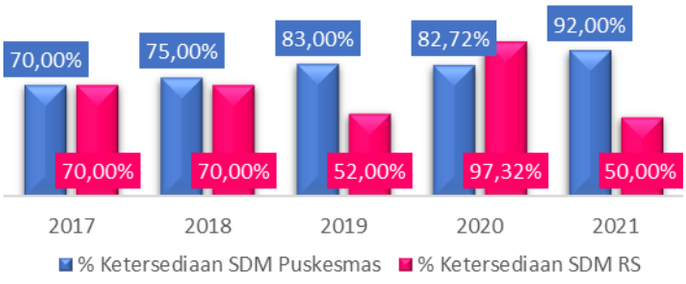
Selain itu, masih belum optimalnya kualitas sarana layanan kesehatan juga terlihat dari masih rendahnya penerapan teknologi untuk memudahkan pelayanan dan pengelolaan urusan kesehatan. Salah satu penghambatnya adalah keterbatasan pemenuhan fasilitas pendukung fasilitas kesehatan seperti kapasitas listrik dan jaringan internet menyulitkan beberapa fasilitas kesehatan ketika menggunakan beberapa aplikasi seperti pengisian di aplikasi Rainboot 4.0 untuk penyusunan perencanaan kebutuhan kesehatan.

Disamping keterbatasan fasilitas dasar yang disebutkan diatas, kendala lainnya adalah masih kurangnya fasilitas infrastruktur jaringan untuk penerapan teknologi seperti ketersediaan database kesehatan, server, dan lain-lain. Terkait SDM juga menjadi salah satu yang menjadi hambatan. Keterbatasan pengetahuan petugas dalam penggunaan aplikasi teknologi yang menyebabkan pemanfaatan IT menjadi tidak merata di beberapa fasilitas kesehatan yang ada. Ketiga hal ini menjadi kendala terbesar bagi Dinas Kesehatan untuk menerapkan sistem kesehatan yang berbasis teknologi.

b. Tenaga Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan SDM kesehatan. Untuk melihat tingkat ketersediaan SDM tenaga kesehatan di puskesmas mengacu pada regulasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014. Sumber Daya Manusia Puskesmas terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk

dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat I lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja.



Gambar 2.58 Persentase Ketersediaan SDM Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Kota Balikpapan tahun 2017-2021
Sumber: Dinkes Kota Balikpapan, 2022

Pada tahun 2017, realisasi ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit sebesar 70%. Realisasi tenaga kesehatan di rumah sakit mengalami stagnansi pada tahun 2018, namun pada puskesmas mengalami peningkatan menjadi 75%. Pada tahun 2019, realisasi tenaga kesehatan pada puskesmas terus mengalami peningkatan menjadi 83%, namun mengalami penurunan menjadi 82,72% pada tahun 2020 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 92% pada tahun 2021. Sedangkan untuk ketersediaan tenaga kesehatan di rumah sakit mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 52% dan mengalami peningkatan menjadi 97,32% pada tahun 2020, namun angka ini kembali mengalami penurunan menjadi 50% pada tahun 2021. Secara keseluruhan dilihat berdasarkan tenaga kesehatannya, Kota Balikpapan memiliki jumlah yang sudah cukup baik akan tetapi memang perlu untuk ditingkatkan khususnya untuk SDM kesehatan di rumah sakit.

Selain itu masalah lain yang dihadapi adalah jumlah SDM untuk puskesmas masih belum ideal karena terbitnya regulasi baru yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019.

Pada regulasi tersebut dijelaskan bahwa standar SDM untuk Puskesmas kawasan perkotaan non rawat inap persyaratan SDMnya bahwa jumlah minimal perawat 5 orang dan bidan 4 orang. Masih terdapat beberapa puskesmas hanya memiliki 2 bidan. Selain itu belum semua puskesmas memiliki apoteker. Tercatat baru 15 puskesmas yang memiliki apoteker. Persyaratan lainnya dari kementerian kesehatan adalah harus ada 2 tenaga Promosi Kesehatan (Promkes) setiap puskesmas. Kondisi saat ini hampir puskesmas belum memiliki promkes. Puskesmas di Balikpapan juga belum ada yang memiliki tenaga kesehatan lingkungan.

Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan primer ini mengakibatkan petugas melakukan rangkap jabatan yang berdampak pada kurang optimalnya kinerja Dinas Kesehatan. Selain itu, adanya rencana pembangunan Rumah Sakit di wilayah timur Kota Balikpapan masih perlu dikaji lagi terkait dengan kebutuhan SDM nya. Hal ini mengingat kondisi saat ini Kota Balikpapan masih kekurangan SDM khususnya di bidang kesehatan.

c. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Keberhasilan pelayanan kesehatan ibu ditunjukkan melalui indikator kunjungan pelayanan antenatal ibu hamil. Upaya kesehatan juga menyasar pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat terlihat dari proporsi persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan serta pemeriksaan pada saat hamil. Pemeriksaan ibu hamil bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu melalui deteksi dini permasalahan kehamilan untuk mencegah komplikasi kehamilan dan kelahiran.Angka Kematian Ibu tahun 2021 sebesar 178 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH). Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 73 per 100.000 KH. Capaian pada tahun 2021 juga menunjukkan bahwa pemerintah Kota Balikpapan belum berhasil menekan angka kematian ibu hamil setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan karena kesadaran ibu dalam pemeriksaan kehamilan pada fasilitas kesehatan mengalami penurunan akibat terjadinya pandemi covid-19.

Tabel 2.26 Angka Kematian Ibu Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Sasaran Ibu Hamil	Jumlah Kematian	
		Kematian	Per 100.000 KH
2017	13.812	10	78/100.000 KH
2018	13.675	9	72/100.000 KH
2019	13.575	8	64/100.000 KH
2020	13.461	9	73/100.000 KH
2021	10.999	18	178/100.000 KH

Sumber: Dinkes Kota Balikpapan, 2022

Angka kematian ibu mengalami kenaikan, akan tetapi upaya penanganan terkait kesehatan ibu hamil Salah satu penyebabnya adalah pengetahuan dan informasi terkait penanganan kondisi darurat terhadap ibu hamil yang masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah Ibu hamil belum semua mendapatkan ANC (*Antenatal Care*) terpadu. Kualitas dari ANC juga belum sesuai dengan standar sehingga informasi dan pengetahuan di dalamnya masih perlu ditingkatkan. Terkadang ibu hamil baru datang saat usia kandungan 6 bulan ke fasilitas Kesehatan dan terjadinya pandemic covid-19 menjadi salah satu penghambat bagi ibu hamil untuk dating ke fasilitas kesehatan.

Selain kesehatan ibu, aspek lainnya yang diperhitungkan derajat kesehatan anak yang diukur melalui indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA). Realisasi capaian AKB di Kota Balikpapan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 9/1.000 KH. Sedangkan untuk AKBA masih mengalami fluktuasi angka. Pada tahun 2018, angka ini mengalami peningkatan menjadi 8/1.000 KH. Lalu pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 7/1.000 KH, hingga tahun 2020 masih berada pada angka yang sama dan mengalami peningkatan menjadi 10/1.000 KH pada tahun 2021.

Indikator ini berkaitan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tujuan 3 sasaran 2 terkait dengan upaya menurunkan angka kematian neonatal setidaknya 12/1.000 KH. Realisasi AKB Kota Balikpapan jika dikaitkan dengan

SDGs sudah menunjukkan hasil yang baik. Akan tetapi untuk mengoptimalkan penurunan AKB, perlu untuk memperhatikan sasaran lainnya yaitu pemenuhan persentase imunisasi dasar lengkap sebanyak 80%.

Tabel 2.27 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA) di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kematian Bayi (AKB)	6/1.000 KH	7/1.000 KH	7/1.000 KH	7/1.000 KH	9/1.000 KH
Angka Kematian Balita (AKBA)	6/1.000 KH	8/1.000 KH	7/1.000 KH	7/1.000 KH	10/1.000 KH

Sumber: Dinkes Kota Balikpapan, 2022

Fluktuatifnya kondisi kedua indikator diatas, diakibatkan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi, salah satunya terkait kelengkapan peralatan medis yang terbatas sehingga menyulitkan tenaga kesehatan ketika akan melakukan pertolongan medis terhadap bayi yang mengalami gangguan kesehatan. Masih minimnya kelengkapan tersebut ditambah dengan kapasitas SDM tenaga kesehatan yang belum sepenuhnya baik dalam hal penanganan persalinan. Permasalahan lainnya adalah masih kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga terkait penanganan kondisi darurat, salah satu penyebabnya adalah penyusunan buku kesehatan ibu dan anak tidak terisi dengan lengkap. Pemberian edukasi secara rutin juga belum dilaksanakan dengan baik.

d. SPM Bidang Kesehatan

Dalam pemenuhan pelayanan dasar bidang kesehatan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan, pencapaian indikator SPM Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.28 Pencapaian Indikator SPM Urusan Kesehatan Tahun 2020-2021

No.	Indikator SPM	Tahun	
		2020	2021
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	94%	97%
	a. Jumlah Ibu Hamil yang dilayani Sesuai Standar	12.643	10.633
	b. Jumlah Sasaran Ibu Hamil	13.461	10.999
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	93%	97%
	a. Jumlah Ibu Bersalin yang dilayani Sesuai Standar	12.248	10.148
	b. Jumlah Sasaran Ibu Bersalin	13.139	10.494
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99%	101%
	a. Jumlah Bayi Baru Lahir yang dilayani Sesuai Standar	12.127	10.062
	b. Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir (Kelahiran Hidup)	12.238	9.999
4	Pelayanan Kesehatan Balita	61%	83%

No.	Indikator SPM	Tahun	
		2020	2021
	a. Jumlah Balita yang dilayani Sesuai Standar	36.419	41.451
	b. Jumlah Sasaran Balita	59.324	49.689
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	71%	54%
	a. Jumlah Usia Pendidikan Dasar dilayani Sesuai Standar	14.481	31.972
	b. Jumlah Sasaran Anak Usia Pendidikan Dasar	20.267	58.919
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	30%	40%
	a. Jumlah Usia Produktif dilayani Sesuai Standar	142.028	175.414
	b. Jumlah Sasaran Usia Produktif	473.274	439.124
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	28%	42%
	a. Jumlah Usia Lanjut dilayani Sesuai Standar	12.988	24.104
	b. Jumlah Sasaran Usia Lanjut	46.396	58.063
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	20%	21%
	a. Jumlah Penderita Hipertensi dilayani Sesuai Standar	35.138	38.722
	b. Jumlah Sasaran Penderita Hipertensi	173.828	184.755
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	51%	56%
	a. Jumlah Penderita DM dilayani Sesuai Standar	8.223	9.633
	b. Jumlah Sasaran Penderita DM	16.092	17.103
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	75%	74%
	a. Jumlah ODGJ dilayani Sesuai Standar	550	522
	b. Jumlah Sasaran ODGJ	731	707
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	38%	30%
	a. Jumlah TB dilayani Sesuai Standar	3.844	4.058
	b. Jumlah Sasaran TB	10.000	13.598
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	58%	80%
	a. Jumlah HIV dilayani Sesuai Standar	10.310	13.887
	b. Jumlah Sasaran HIV	17.657	17.409

e. Derajat Kesehatan Masyarakat

Pada aspek ini, penilaian terhadap kesehatan masyarakat dinilai dari tingkat penanganan terhadap penyakit baik yang menular maupun tidak menular. Beberapa jenis penyakit yang rawan terjadi pada masyarakat seperti *tuberculossis*, demam berdarah (DBD), HIV dan AIDS, serta angka gizi buruk.

Angka prevalensi HIV dan AIDS di Kota Balikpapan cenderung mengalami kenaikan. Dari tahun 2018 ke tahun 2019 angka prevalensinya mengalami peningkatan menjadi 2,26. Namun, hingga tahun 2021 angka ini mengalami penurunan menjadi 0,043. Tingginya angka peningkatan pada tahun 2019 disebabkan oleh rendahnya deteksi kasus penemuan pada HIV. Hal ini diperburuk dengan kurangnya pemantauan terhadap pasien-pasien HIV. Jika mengacu pada SPM bidang kesehatan terkait pelayanan kesehatan bagi orang berisiko HIV, pelayanan kesehatan berupa deteksi HIV diberikan kepada kelompok yang rentan seperti ibu hamil, pasien TBC, pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), pengguna NAPZA suntik, warga binaan pemasyarakatan, dan penjaja seks. Adapun skrining dilakukan minimal 1 kali dalam setahun.

Sedangkan untuk demam berdarah dengue (DBD) kondisinya cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 dan 2018 menyentuh angka 78,3/100.000. Pada tahun 2019 angka ini kembali mengalami kenaikan menjadi 240,65/100.000, hingga pada tahun 2020 angka ini mengalami penurunan menjadi 112,46/100.000.

Hal yang sama juga terjadi pada penanganan penyakit *tuberculosis* (TBC) yang mengalami fluktuasi angka. Pada tahun 2017 dan 2018, prevalensi TBC adalah 199,5/100.000. angka ini mengalami lonjakan yang signifikan menjadi 272,29/100.000 penduduk pada tahun 2019. Hingga terjadi penurunan angka pada tahun 2021 menjadi 62,7/100.000 penduduk, disebabkan karena tingginya *undetective case* di kelompok berisiko, ketidakpatuhan berobat, *missing case* di Rumah Sakit dan Klinik, serta *nett* nya *Multi Drug Resistant Tuberculosis* (MDR-TB).

Sedangkan untuk prevalensi gizi buruk dan gizi kurang menunjukkan grafik yang cukup optimal pada tahun 2017 indikator masih di angka 2,53%. Sempat terjadi penurunan menjadi 2,22% di tahun 2018, angka ini kembali mengalami peningkatan menjadi 2,7% pada tahun 2019. Angka ini kembali mengalami penurunan menjadi 2,20% pada tahun 2020, dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 7,16%.

Tabel 2.29 Angka Penderita Penyakit HIV dan AIDS, Demam Berdarah, dan TBC Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Prevalensi HIV dan AIDS	0,05	0,05	2,26	0,43	0,043
Angka Kejadian DBD per 100.000 penduduk	78,3 / 100.000 penduduk	78,3 / 100.000 penduduk	240,65/100.000 penduduk	112,46/100.000 penduduk	62,7/100.000 penduduk
Prevalensi TBC	199,5/100.000 penduduk	199,50/100.000 penduduk	272,29/100.000 penduduk	123,90/100.000 penduduk	177,9/100.000 penduduk
Prevalensi Gizi Buruk & Gizi Kurang	2,53%	2,22 %	2,7%	2,20%	7,16%

Sumber: Dinkes Kota Balikpapan, 2022

Upaya penanganan kesehatan masyarakat ini sudah diupayakan penanganannya dengan meningkatkan program kelurahan siaga aktif dan Unit

Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). Cakupan kelurahan siaga aktif adalah cakupan kelurahan siaga aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk. Capaian indikator ini tiap tahunnya konsisten berada diangka 100%.

Adapun cakupan UKBM aktif adalah Jumlah seluruh posyandu, polindes dan desa siaga aktif yang digunakan oleh masyarakat. Capaian indikator ini mengalami peningkatan walaupun peningkatannya baru terjadi di tahun 2017 yaitu dari 50% menjadi 50,74%. Hingga tahun 2021, capaian indikator ini adalah 80%. Belum Optimalnya realisasi keaktifan UKBM ini dapat menjadi salah satu penyebab terkait masih rendahnya pemantauan kualitas kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan UKBM (Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat seperti posyandu, polindes, dan desa siaga). Persentase Cakupan UKBM yang aktif pada tahun 2019 masih di angka 75%. Berdasarkan data saat ini, jumlah posyandu yang aktif sebanyak 711 posyandu dan 119 Posbindu PTM (Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular).

Tabel 2.30 Cakupan Kelurahan Siaga dan UKBM Aktif Di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan UKBM Aktif	50,74%	60%	75%	80%	80%

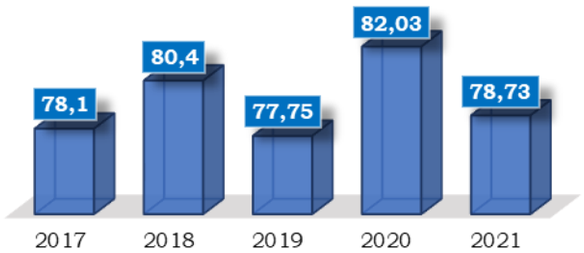
Sumber: Dinkes Kota Balikpapan, 2021

Penyebab lainnya yang juga kerap dihadapi adalah perilaku hidup masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung untuk mencegah penyakit. Perilaku masyarakat dalam menjalankan pola hidup sehat masih kurang. Untuk kasus PTM, permasalahannya adalah faktor perilaku dari masyarakat yang belum sepenuhnya berperilaku hidup sehat seperti dari diet tidak sehat, merokok, kurang aktivitas. Selain itu terkait sanitasi juga masih banyak masyarakat yang BAB sembarangan yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi menurun. Upaya penanganan penyakit ini juga kerap kali dihadapkan oleh rendahnya kesadaran terhadap konsumsi obat. Penggunaan obat secara rasional masih rendah yang disebabkan karena kepercayaan tenaga kesehatan dan masyarakat terhadap produk dalam negeri masih kurang. Khususnya terhadap obat generik yang dianggap kurang bagus. Selain sosialisasi yang belum optimal terkait dengan produk obat produk dalam negeri juga menjadi penyebab lainnya. Proses perencanaan obat juga masih mengalami beberapa kendala seperti Sistem Rencana Kebutuhan Obat (RKO) masih belum mewakili kebutuhan obat di fasilitas kesehatan karena belum semua fasilitas kesehatan dan stakeholder terkait

mengisi daftar kebutuhan obat, pedoman perencanaan obat belum mengakomodir kesesuaian kebutuhan obat, kurang sinkronnya antara kebutuhan dan perencanaan obat berdampak ketidaksesuaian harga obat yang beredar di masyarakat, dan penyediaan obat secara mandiri oleh bidang kesehatan terhambat oleh ketersediaan bahan baku masih banyak kendala. Upaya pemenuhan obat ini juga terkendala oleh adanya regulasi impor bahan baku obat yang menyulitkan.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pengukuran tingkat pengelolaan infrastruktur menggunakan indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar. Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI) kota Balikpapan dari tahun 2017 sampai dengan 2020 yang diukur dari pendapat warga Kota Balikpapan tentang kepuasan layanan infrastruktur dari berbagai aspek seperti infrastruktur jalan, jembatan, moda transportasi, jaringan air bersih, irigasi dan perumahan. Pada tahun 2017, realisasi indikator ini sebesar 78,1 lalu meningkat signifikan menjadi 80,40 pada tahun 2018 dan terakhir menjadi 78,73 pada tahun 2021. Hal yang perlu dicermati mengingat indeks ini dihitung berdasarkan persepsi kepuasan masyarakat, maka capainnya dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.



Gambar 2.59 Indeks Kepuasan Infrastruktur Dasar (IKLI) tahun 2017 - 2021
Sumber: DPU Kota Balikpapan, 2022

Berdasarkan kinerja penyelenggaraan jalan, sesuai Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 188.45-415/2016 tentang Penetapan Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota Balikpapan maka total panjang jalan kota adalah sepanjang 501,18 km, dimana kondisi jalan dan jembatan Kota Balikpapan yang dilakukan berdasarkan survey oleh DPU Kota Balikpapan dari tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.31 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Balikpapan (km) Tahun 2017-2021

Kualitas	2017		2018		2019		2020		2021	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Baik	95,39	19,04	288,95	57,65	95,39	19,04	365,31	72,89	344,95	68,83
Sedang	295,56	58,97	133,24	26,58	295,56	58,97	96,59	19,27	102,36	20,42
Rusak	58,60	11,69	30,55	6,10	58,60	11,69	38,91	7,76	53,87	10,75
Rusak Berat	51,63	10,30	48,44	9,66	51,63	10,30	0,38	0,08	0	0
Jumlah	501,18	100,00	501,18	100,00	501,18	100,00	501,18	100,00	501,18	100,00

Sumber: DPU Kota Balikpapan, 2022

Berdasarkan data tersebut di atas maka persentase kemantapan jalan yang dihitung dari jalan baik dan sedang dibandingkan total panjang jalan, pada tahun tahun 2021 adalah sebesar 89,25% atau turun jika dibandingkan capaian pada

tahun 2020 sebesar 92,16%. Hal ini seiring dengan perbaikan data dan perencanaan kondisi jalan melalui pemanfaatan sistem informasi jalan dan jembatan.

Tabel 2.32 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kota Balikpapan (km) Tahun 2017-2021

Jenis Permukaan	2017		2018		2019		2020		2021	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Aspal	454,18	90	374,141	75	454,18	90	412,474	82	392,943	78
Kerikil	10,85	2	16,305	3	10,85	2	9,97	2	26,089	5
Tanah	24,45	5	43,398	9	24,45	5	23,693	5	24,692	5
Tidak Dirinci	15,85	3	67,335	13	15,85	3	55,043	11	57,456	11
Jumlah	505,33	100	501,180	100	505,33	100	501,18	100	501,18	100

Sumber: DPU Kota Balikpapan, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas kondisi jalan yang telah beraspal pada tahun 2021 sebanyak 78%, mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang mencapai 82%.

Indikator lainnya yang digunakan adalah persentase panjang trotoar yang telah memenuhi standar dimana menunjukkan grafik peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2017, indikator ini berada diangka 10,58% dan terus mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 14,98% di tahun 2020. Angka ini tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 2021.

Tabel 2.33 Tingkat Kualitas Trotoar dan Jalan di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase panjang trotoar yang telah memenuhi standar	10,58	12,73	14,98	14,98	14,98
Persentase kemantapan jalan	96,86	83,76	84,06	85,11	89,25

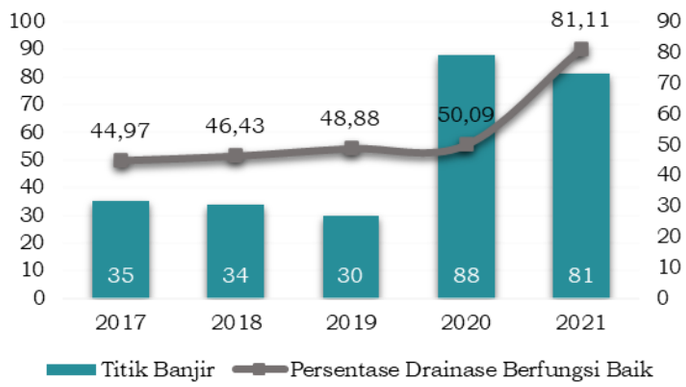
Sumber: DPU Kota Balikpapan, 2022

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa perhitungan kondisi jalan di Kota Balikpapan didasarkan pada baseline ruas jalan sesuai dengan SK Wali Kota Balikpapan tentang Penetapan Status Jalan Kota. Adapun kinerja untuk penambahan ruas jalan baru diluar Jalan Kota, diukur dengan indeks aksesibilitas kawasan perkotaan yang dihitung berdasarkan panjang jalan terhadap luas kawasan perkotaan. Indeks aksesibilitas Kota Balikpapan pada tahun 2017 adalah sebesar 1,415 dan mengalami peningkatan hingga akhir 2021 yaitu sebesar 1,480.

Tabel 2.34 Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Tahun	Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan
2017	1,415
2018	1,427
2019	1,430
2020	1,475
2021	1,480

Sumber: DPU Kota Balikpapan, 2022



Gambar 2.60 Persentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik dan Titik Banjir di Kota Balikpapan tahun 2016-2020

Sumber: DPU Kota Balikpapan, 2021

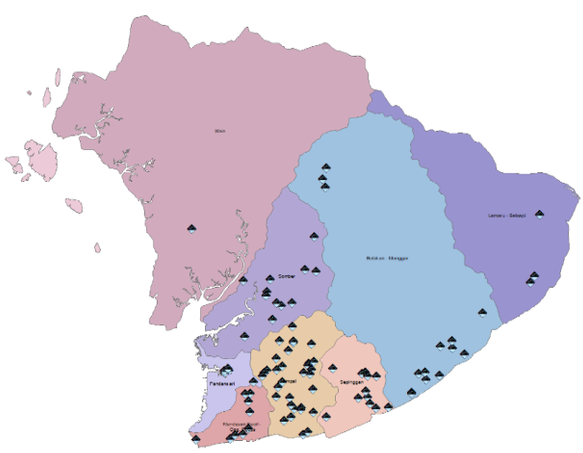
Berdasarkan kinerja pengelolaan sumber daya air, terdapat beberapa indikator sehubungan dengan fokus penyelenggaran urusan pemerintahan di Kota Balikpapan yaitu pengendalian banjir, pegelolana saluran irigasi dan penyediaan sumber air baku. Sehubungan dengan pengendalian banjir, penyelenggaran drainase di Kota Balikpapan selama ini mengacu pada Masterplan Drainase yang telah disusun dengan pengaturan rencana dimensi drainase dan rencana pembangunan bendungan pengendali (bendali) banjir di beberapa titik. Jika dilihat berdasarkan kondisi drainase, menunjukkan adanya peningkatan pemeliharaan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya persentase drainase yang berfungsi baik. Pada tahun 2017, persentase indikator ini masih diangka 44,97% dan meningkat hingga 81,11% pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 kondisi drainase di Kota Balikpapan dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.35 kondisi drainase di Kota Balikpapan Tahun 2021

NO	KECAMATAN	KONDISI KONSTRUKSI (m)		
		Baik	Sedang	Buruk
1	Balikpapan Barat	28.066,960	-	707,440
2	Balikpapan Kota	53.777,570	3.958,020	127,060
3	Balikpapan Tengah	37.589,480	1.339,440	1.806,870
4	Balikpapan Utara	104.548,670	38.406,800	8.668,940
5	Balikpapan Selatan	84.902,778	34.098,195	9.039,265
6	Balikpapan Timur	102.517,350	55.221,240	30.190,590
TOTAL 2021		411.402,808	133.023,695	50.540,165

Titik banjir Kota Balikpapan sesuai dengan baseline yang telah disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan pada tahun 2020 titik banjir Kota Balikpapan sebanyak 88 titik yang tersebar pada DAS Somber sebanyak 12 Titik, DAS Wain 1 Titik, DAS Pandansari 4 Titik, DAS Klandasan Kecil 9 Titik, DAS Ampal 32 Titik, DAS Lamaru – Solok Api 3 Titik, DAS Batakan – Manggar 14



Gambar 2.1 Peta Sebaran Titik Banjir Kota Balikpapan Tahun 2020

Sumber: DPU Kota balikpapan, 2021

Titik dan DAS Sepinggan 12 Titik. Sedangkan basline titik banjir Kota Balikpapan tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 24 titik banjir.

Berdasarkan luas genangan banjir yang terj adi di Kota Balikpapan dari tahun 2018 hingga tahun 2020, terjadi trend penurunan luasan genangan terutama pada DAS Ampal. Sementara untuk DAS Klandasan dan DAS Sepinggan tidak mengalami perubahan luasan genangan.

Tabel 2.36 Luas Genangan Banjir di Kota Balikpapan Tahun 2018-2021

No.	Kabupaten/Kota	DAS	Luas Genangan Banjir (Ha)			
			2018	2019	2020	2021
1	Kota Balikpapan	Sungai Ampal	130	110	82	82
		Klandasan	50	50	50	50
		Sepinggan	50	50	50	50
TOTAL			230	210	182	182

Sumber: DPU Kota Balikpapan, 2022

Untuk penyelenggaraan irigasi di Kota Balikpapan saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, dimana Daerah Irigasi Yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota di Kota Balikpapan terdapat 2 (dua) daerah irigasi yaitu daerah irigasi Balikpapan Utara seluas 25 Ha dan daerah irigasi Gunung Binjai seluas 325 Ha. Khusus daerah irigasi Gunung Binjai memiliki luas area tanam seluas 150 Ha dengan indeks pertanaman 100% serta produksi 3,5 ton/Ha/panen.

Penyediaan air baku merupakan salah satu permasalahan utama Kota Balikpapan, bedasarkan data dari Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) tahun 2021 total penyediaan air baku Kota Balikpapan meningkat sebesar 1572,17. Kebutuhan air minum Kota Balikpapan pada tahun 2021 bedasarkan hasil perhitungan proyeksi sebesar 1,780 liter/detik, sehingga selisih ketersediaan air baku dengan kebutuhan air baku sebesar 207,83 liter/detik. Rincian sumber air baku dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37 Sumber Air Baku Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

No	Sumber Air Baku	2017 (Lt/dtk)	2018 (Lt/dtk)	2019 (Lt/dtk)	2020 (Lt/dtk)	2021 (Lt/dtk)
1	Waduk Manggar	1100	1100	1100	1100	1.100
2	Sungai Selok Api	20	-	-	-	-
3	Sungai Jembatan Besi	20	-	-	-	
4	Sumur Dalam	250	250	250	250	252,17
5	Waduk Teritip	-	220	220	220	220
	Jumlah	1390	1570	1570	1570	1572,17

Sumber: PTMB, 2022

Untuk penyediaan air minum terbagi menjadi jaringan perpipaan dan jaringan bukan perpipaan. Untuk jaringan perpipaan terbagi menjadi dua yaitu PTMB dan Non PTMB. Pengelolaan air minum di Kota Balikpapan yang saat ini

sebagian besar dilayani oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB), dimana hingga akhir tahun 2021 cakupan pelayanan PTMB telah mencapai 78,14%. Adapun perkembangan pelayanan air bersih jaringan perpipaan Kota Balikpapan sebagai berikut:

Tabel 2.38 Perkembangan Pelayanan Air Minum Perpipaan PTMB Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk (Jiwa)	769.919	644.315	667.188	697.079	710.293
2	Jumlah pelanggan (SR)	98.111	100.199	103.144	108.161	111.394
3	Cakupan pelayanan (%)	76,56	79,05	79,6	81,37	78,14
4	Kapasitas produksi (l/det)	1.215	1.276	1.305	1.408	1.510
5	Panjang perpipaan (m)	1.335.998	1.359.110	1.375.944	1.375.944	1.669.295
6	Persentase Kehilangan Air (%)	34,36	33,23	31,55	30,40	37,14

Sumber: PTMB, 2022

Gambaran mengenai layanan jaringan air minum perpipaan di Kota Balikpapan berdasarkan data PTMB dan Susenas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.39 Layanan Jaringan Air Minum Perpipaan di Kota Balikpapan

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Jiwa Terlayani Jaringan Perpipaan PDAM (JP PDAM)	Jumlah Jiwa Terlayani Jaringan Perpipaan Non PDAM (JP Non PDAM)	Jumlah Jiwa Terlayani Jaringan Perpipaan (BJP)	Total Jumlah Jiwa Terlayani Air Minum (JP dan BJP)	% Akses Air Minum Layak	% Akses Air Minum Perpipaan	% Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan
		(g) = (c) x (f)	(h) = (d) x (f)	(i) = (e) x 100SR x (f)	(e)	(f)	(g)	(h)
1	Balikpapan	556.970	111.896	26.241	695.287	96,20%	78,41%	3,8%

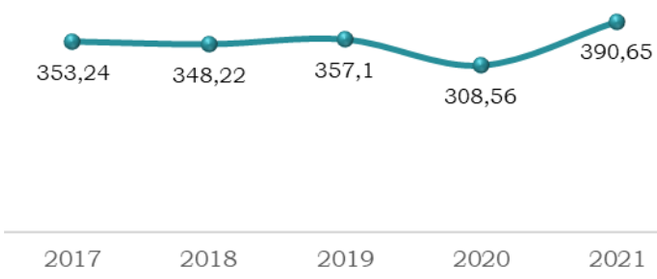
Sumber : PTMB, 2021

Penyediaan air baku di Kota Balikpapan saat ini bersumber dari Waduk Teritip dan Waduk Manggar dengan total penyediaan 1.300 liter/detik sehingga masih terdapat defisit air baku saat ini sebesar 420 liter/detik. Untuk memenuhi kebutuhan Kota Balikpapan dalam penyediaan air minum direncanakan memanfaatkan air baku yang bersumber dari Embung Aji Raden sebesar 150 liter/detik dan Waduk Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 1.000 liter/detik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan advokasi baik kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI untuk lanjutan pembangunan Embung Aji Raden beserta jaringan transmisi dan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Teritip Tahap II sebesar 200 liter/detik, dukungan pembiayaan untuk sisa kebutuhan Embung Aji Raden, dan alokasi penyediaan air baku yang bersumber dari Waduk Sepaku Semoi.

Selanjutnya untuk pengelolaan air limbah, sarana dan prasarana air limbah di Kota Balikpapan terbagi menjadi beberapa sistem yaitu sistem terpusat dan sistem setempat. Fasilitas pengelolaan air limbah terpusat yang ada di Kota Balikpapan adalah IPAL skala kawasan di Kelurahan Margasari yang melayani 2.076 Sambungan Rumah (SR). Hal ini mengalami peningkatan dari 1.308

Sambungan Rumah setelah dilaksanakan pengembangan jaringan yang bersumber dari pendanaan Hibah Air Limbah SAIIG pada tahun 2016-2018.

Selain IPAL Kawasan, pengelolaan limbah terpusat juga dilakukan melalui sistem IPAL Komunal dengan jumlah yang telah terbangun sejak tahun 2006 sampai dengan 2021 sebanyak 53 unit atau 2.603 Sambungan Rumah (SR) dan sumber pendanaan berasal dari Program Sanimas, SLBM maupun DAK Sanitasi yang dilakukan pengelolaan secara swadaya oleh masyarakat. Sambungan Rumah (SR) IPAL Komunal bertambah sebanyak 150 SR pada tahun 2021. Sedangkan untuk sistem setempat, Pemerintah Kota Balikpapan telah membangun tangki septik individu sebanyak 450 unit pada tahun 2018 dengan sumber pendanaan berasal dari Hibah Air Limbah Setempat (Sanitasi) APBN TA 2018 dan DAK serta 42 unit pada tahun 2020 melalui APBD Kota Balikpapan dan pada tahun 2021 tidak dilakukan pemasngan tangki septik yang sesuai SNI.



Gambar 2.2 Rata-Rata Volume Sampah Harian Ke TPAS Manggar Kota Balikpapan Tahun 2017-2021
Sumber: DLH Kota Balikpapan, 2022

Tabel 2.41 Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah Di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

No	Tahun	Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah			
		Sambungan Rumah (SR) IPAL Terpusat	IPAL Komunal (Unit)	Sambungan Rumah (SR) IPAL Komunal (SR)	Tangki Septik yang sesuai dengan SNI
1	2017	-	5	250	-
2	2018	-	10	500	450
3	2019	-	7	350	-
4	2020	-	-	-	42
5	2021	-	-	150	-
Jumlah		2.603	53	1.200	492

Sumber: Disperkim dan PTMB Tahun 2022
Keterangan : (-) Tidak dilakukan pemasangan

Terkait dengan sarana dan prasarana persampahan yang berkaitan dengan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hingga tahun 2021 jumlah dan kondisi sarana dan prasarana persampahan di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.42 Sarana dan Prasarana Persampahan Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

No	Infrastruktur	2017		2018		2019		2020		2021	
		Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak
1	Truk	54	5	54	5	54	6	71	8	64	15
2	TPS	410		410		410		73	291	73	291
3	TPS 3R	6		3	3	3	3	4	3	4	3
4	Bank Sampah	125		69	56	69	56	69	56	69	56
5	MRF	1		1		1		1		1	-
Jumlah		596	5	537	64	537	65	218	358	211	365

Sumber: DLH Kota Balikpapan, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, hingga tahun 2021 jumlah sarana dan prasarana persampahan sebanyak 576 dengan rincian 211 dalam kondisi baik dan 365 dalam kondisi rusak. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) menjadi sarana dan

prasarana yang memiliki jumlah kerusakan terbanyak yaitu 291 TPS. Penyelenggaran sarana dan prasarana persampahan ditujukan untuk menunjang kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah yaitu dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Menindaklanjuti kebijakan dan strategi pengeolaan sampah sesuai dengan Peraturan Walikota No 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Menjadi Sampah Sejenis Rumah Tangga, pengelolaan sampah dimaksudkan untuk mewujudkan zero waste to landfill. Hingga pada tahun 2021, rata-rata volume sampah harian yang masuk ke TPA Sampah Manggar adalah sebesar 390,65 ton/hari, dimana hal ini meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 308,56 ton/hari.

Terkait kinerja penataan ruang ditunjukkan melalui penyusunan dokumen rencana tata ruang dan upaya pengendalian pemanfaatan ruang. Hingga tahun 2020 rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan adalah RTRW Kota Balikpapan melalui Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032. Adapun rencana rinci tata ruang telah disusun pada tahun 2020 yang meliputi 6 Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) yaitu BWP Balikpapan Utara, BWP Balikpapan Selatan, BWP Balikpapan Timur, BWP Balikpapan Barat, BWP Balikpapan Tengah dan BWP Balikpapan Kota saat ini sedang dalam tahap penetapan melalui Peraturan Walikota.

Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Kota Balikpapan 2017 – 2021

Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Perda tata ruang (1 RTRW, 1 RDTR, 1 Insentif dan Disinsentif)	Dokumen	0	-	0	2	2
Persentase penerbitan pemanfaatan ruang	%	98,1	98,24	98,4	98,58	98,75
Persentase rencana tata ruangyang disusun	%	40	45	88	100	100
Jumlah rencana rinci tata ruang/kota	Dokumen	0	0	0	2	2
Jumlah kesediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatanruang	Dokumen	1.809	3.538	4.999	6.248	6.986
Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tataruang	%	98,1	98,24	98,4	98,58	98,75

Sumber: DPPR Kota Balikpapan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah persentase penerbitan pemanfaatan ruang pada tahun 2021 adalah mencapai 98,75%, jumlah kesediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang atau *advice planning* hingga tahun 2021 adalah sebanyak 6.986 dokumen dan persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang adalah 98,75%.

2.3.1.4. Perumahan dan Permukiman

Pokok penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman selain penyediaan SPM adalah penyediaan rumah layak huni dan pengurangan kawasan perumahan dan permukiman kumuh. Sesuai dengan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), SPM

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah penyediaan dan rehabilitas rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penurunan backlog perumahan sendiri mendukung tujuan 11 sasaran 1 pada SDGs yaitu terkait menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.

Untuk indikator yang berkaitan dengan SPM hingga tahun 2020 belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Perumahan dan Permukiman dikarenakan hasil identifikasi awal tidak terdapat permukiman yang signifikan berada di atas kawasan rawan bencana. Untuk menindaklanjuti akan dilaksanakan identifikasi yang lebih detail pada tahun 2021 terhadap permukiman yang berada di kawasan rawan bencana serta yang terkena relokasi program Pemerintah Kota Balikpapan.

Tabel 2.44 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2017-2021

Tahun	APBN	APBD Provinsi	APBD Kota	Jumlah
2017	200	0	105	305
2018	0	0	97	97
2019	235	50	77	362
2020	0	60	109	169
2021	159	100	91	350
Jumlah	594	210	479	1283

Sumber: DISPERKIM Kota Balikpapan, 2022

Rumah layak huni di Kota Balikpapan yang telah dilakukan peningkatan kualitas pada tahun 2017-2021 adalah sebanyak 1.283 unit terdiri dari 594 unit dari pembiayaan APBN Pusat, 210 unit dari pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Timur dan 479 unit dari pembiayaan APBD Kota Balikpapan. Berdasarkan hasil pendataan Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2021, jumlah rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan sebanyak 630 unit jumlah terbanyak berada di Kecamatan Balikpapan Tengah dan Balikpapan Utara. Adapun rincian persebaran per kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.45 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kota Balikpapan Tahun 2021

No	Kecamatan	2021	
		Jumlah RTLH (unit)	Persentase (%)
1	Balikpapan Barat	99	15,71%
2	Balikpapan Kota	61	9,68%
3	Balikpapan Selatan	57	9,05%
4	Balikpapan Tengah	176	27,94%
5	Balikpapan Timur	41	6,51%
6	Balikpapan Utara	196	31,11%
Total		630	100%

Sumber: DISPERKIM Kota Balikpapan, 2022

Masalah yang kerap dihadapi terkait peningkatan kualitas RTLH adalah kian meningkatnya jumlah populasi penduduk dan kemampuan masyarakat untuk membangun dan menjangkau rumah yang layak huni. Selain itu, rumah tidak layak huni tidak dapat diintervensi karena tidak masuk dalam kriteria RTLH

yang salah satu penyebabnya adalah masalah legalitas kepemilikan tanah. Indikator lain yang digunakan untuk urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah backlog perumahan. Backlog rumah dapat diukur dari dua perspektif yaitu dari sisi kepenghunian maupun dari sisi kepemilikan dengan capaian Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.46 Capaian Penurunan Backlog Perumahan

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kepala Keluarga	161.892	257.259	229.916	236.293	240.079
Jumlah (Unit Rumah)	142.568	142.568	204.717	208.811	212.613
Backlog KEPEMILIKAN (Unit Rumah)	(49.806)	(49.806)	(87.782)	(92.556)	(94.039)
Backlog HUNIAN (Unit Rumah)	19.324	114.691	25.199	24.931	27.465
Presentase Backlog Kepemilikan (Jumlah Backlog / Jumlah Rumah)	34,93%	34,93%	42,88%	44,33%	44,23%

Sumber: Disperkim Kota Balikpapan, 2022

Berdasarkan data tersebut di atas, maka backlog perumahan yang terjadi di Kota Balikpapan adalah backlog kepemilikan yang meningkat dari 49.806 unit pada tahun 2017 menjadi 94.039 pada tahun 2021 atau meningkat dari 34,93% menjadi 44,23% terhadap rumah yang tersedia. Hal ini bertolak belakang dengan backlog hunian dimana terjadi surplus atau dengan kata lain sebanyak 27.465 kepala keluarga tinggal dengan menumpang atau menyewa rumah. Tingginya backlog kepemilikan mengindikasikan masih rendahnya jangkauan masyarakat terhadap penyediaan rumah. Tingginya backlog juga dipengaruhi oleh tingginya migrasi yang masuk ke Kota Balikpapan.

Sedangkan untuk bidang permukiman, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-667/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan, luas kawasan kumuh di Kota Balikpapan adalah seluas 282, 20 Ha dan telah dilakukan penanganan dari tahun 2017-2020 sehingga pada akhir tahun 2020 luas kawasan kumuh di Kota Balikpapan sesuai baseline tahun 2014 adalah 0 Ha.

Tabel 2.47 Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Baseline Tahun 2014

No	Lokasi		Luas Kawasan (Ha)				
	Kecamatan	Kelurahan	2015	2017	2018	2019	2020
1.	Balikpapan Utara	Muara Rapak	27,88	36,98	27,28	0	0
2.	Balikpapan Barat	Baru Ulu	17,73	16,27	7,03	0	0
		Baru Tengah	22,51	32,26	0	0	0
		Margomulyo	40,89	15,65	0	0	0
		Margasari	22,06	19,02	0	0	0
3.	Balikpapan Selatan	Sepinggan Raya	37,38	15,42	6,3	0	0
4.	Balikpapan Tengah	Karang Jati	12,52	4,53	10,67	0	0
5.	Balikpapan Kota	Klandasan Ulu	4,52	3,53	4,52	0	0
		Damai	9,36	11,32	0,4	0	0
		Telagasari	8,66	8,73	0	0	0
6.	Balikpapan Timur	Manggar	28,05	21,17	0	0	0
		Manggar Baru	50,64	29,75	2,45	0	0
Jumlah			282,20	224,86	58,65	0	0

Sumber: SK Walikota Nomor 188.45 – 336/2018

Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Balikpapan melakukan perhitungan ulang kondisi perumahan dan permukiman di Kota Balikpapan sesuai dengan kriteria kumuh yang terdiri atas 7 indikator yaitu Kondisi Bangunan Gedung,

Kondisi Jalan Lingkungan, Kondisi Penyediaan Air Minum, Kondisi Drainase Lingkungan, Kondisi Pengelolaan Air Limbah, Kondisi Pengelolaan Persampahan dan Kondisi Proteksi Kebakaran, maka sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 188.45-326/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan, terdapat perumahan dan permukiman kumuh di Kota Balikpapan seluas 153,3 Ha yang terdapat di 6 (enam) kelurahan yaitu:

Tabel 2.48 Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Baseline Tahun 2020

No	Lokasi		Luas Kawasan (Ha)
	Kecamatan	Kelurahan	2020
1.	Balikpapan Barat	Baru Ilir	24,57
2.	Balikpapan Tengah	Karang Jati	32,03
		Karang Rejo	23,98
		Gunung Sari Ulu	56,93
3.	Balikpapan Kota	Damai	5.40
		Klandasan Ilir	10,39
Jumlah			153,3

Sumber: Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021

2.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban sampai dengan tahun 2021 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap baik aparatur pemerintah dan aparatur keamanan. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya. Hal ini terliat dari jumlah kasus kejahatan yang semakin menurun dari tahun ke tahun.

Tabel 2.49 Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran yang Dilaporkan di Kota Balikpapan Menurut Jenisnya, 2017-2021

No	Jenis Kejahatan/Pelanggaran	2017	2018	2019	2020	2021
1	Politik	-	-	-	-	-
2	Terhadap Kepala Negara	-	-	-	-	-
3	Terhadap Ketertiban Umum	-	-	-	-	-
4	Kebakaran	12	9	5	2	1
5	Pembakaran	-	-	-	-	-
6	Memberi Suap	-	-	-	-	-
7	Mata Uang	-	1	-	-	-
8	Pemalsuan Surat	3	3	3	1	4
9	Perzinahan	9	8	8	2	1
10	Perkosaan	-	-	-	-	-
11	Melanggar Kesopanan/Cabul	34	36	36	24	20
12	Perjudian	27	17	7	5	1
13	Penculikan	-	-	-	-	-
14	Pembunuhan	5	7	2	2	-
15	Penganiayaan Berat	122	109	58	46	34
16	Penganiayaan Ringan	47	34	25	6	4
17	Pencurian dengan Pemberatan	224	255	114	108	123
18	Pencurian Biasa	87	92	50	53	15
19	Pencurian dengan Kekerasan	48	42	22	17	14

No	Jenis Kejahatan/Pelanggaran	2017	2018	2019	2020	2021
20	Pemerasan	4	-	-	-	-
21	Penggelapan	53	48	39	36	16
22	Penipuan	65	56	35	20	33
23	Perusakan	14	15	6	4	1
24	Penadahan	-	-	-	-	-
25	Ekonomi	-	-	-	-	-
26	Curanmor R2	271	141	100	81	69
27	Curanmor R4	12	8	6	3	3
28	Kejahatan Langgar Sopan	-	-	-	-	-
29	Lain-Lain	693	634	183	102	66
Total		1794	1730	1515	512	405

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2022

Upaya penurunan peristiwa kejahatan dan pelanggaran ini memang terus diupayakan. Berdasarkan data yang ada, penurunan angka kriminalitas saat ini masih belum optimal. Pada tahun 2017, persentase penurunan angka kriminalitas sebesar 18%. Angka ini mengalami kenaikan menjadi 20% pada tahun 2018. Barulah pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 18,5%, hingga mencapai 20% pada tahun 2021.

Masih belum optimalnya penurunan angka kriminalitas disebabkan karena pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat juga kurang. Berdasarkan indikator persentase poskamling aktif, pada tahun 2017, jumlahnya hanya sebesar 63,41%. Angka ini mengalami peningkatan menjadi 75% pada tahun 2021. Sedangkan untuk indikator rasio petugas linmas juga masih belum menunjukkan perkembangan yang maksimal. Pada tahun 2016, realisasi indikator ini sebesar 2,43%. Lalu meningkat menjadi 4% pada tahun 2018. Penurunan realisasi terjadi pada tahun 2019 menjadi 3,5%. Hingga pada tahun 2021, terjadi peningkatan rasio petugas linmas menjadi 100%.

Masih belum optimalnya upaya penurunan angka kriminalitas dan penguatan poskamling dan petugas linmas menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya jumlah petugas linmas sehingga mempengaruhi fungi linmas. Rasio petugas linmas menurun pada tahun 2019 menjadi 3,5. Sedangkan realisasi tahun 2017 dan 2018 adalah 4. Saat ini total jumlah petugas linmas adalah 40 orang. Idealnya setiap pos kamling dijaga minimal 2 orang dengan asumsi penjagaannya selama 24 jam bukan hanya pada malam hari saja. Hal ini sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020. Karena keterbatasan tersebut, satlinmas diorientasikan untuk membantu pelaksanaan pengawasan pilkada.

Kurangnya jumlah petugas linmas ini karena aturan terdahulu belum memberikan insentif kepada petugas linmas yang berasal dari anggaran dinas. Mengikuti aturan terbaru dari permendagri, program satlinmas ini nantinya berhak mendapatkan biaya operasional dari pemerintah. Diharapkan dengan adanya pemberian insentif tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja bagi para petugas linmas.

Tabel 2.50 Angka Kriminalitas dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Penurunan angka kriminalitas	18%	20%	18,50%	18%	20%
Persentase poskamling aktif	63,41%	63,61%	63,81%	64,01%	75%
Rasio Petugas Linmas	4%	4%	3,50%	4,50%	100%

Sumber: Satpol PP Kota Balikpapan, 2022

Kurangnya upaya peningkatan perlindungan masyarakat ini terlihat dari belum optimalnya dua indikator yaitu Cakupan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Cakupan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Untuk indikator pertama yaitu cakupan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, realisasi indikator ini sebesar 64,1. Angka ini terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 60,26. Hal ini menunjukan indikasi penurunan tingkat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, karena perbandingan jumlah personil Satpol PP yang lebih sedikit dibandingkan laju pertambahan penduduk Kota. Namun pada tahun 2021, angka cakupan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mengalami peningkatan menjadi 70.

Sedangkan indikator selanjutnya yaitu Cakupan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat mengukur tingkat keaktifan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Poskamling. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perkembangan penguatan poskamling masih terkendala dari keterbatasan jumlah SDM yang ada. Hal ini berpengaruh terjadinya stagnasi pada realisasi indikator cakupan penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Realisasi indikator ini sebesar 5,26 dari tahun 2017 hingga tahun 2019, dan mengalami peningkatan hingga mencapai 100 pada tahun 2021. Kenaikan ini menunjukan indikasi aktifnya personil Linmas dan masyarakat berpartisipsi membentuk Satgas-satgas penanggulangan Covid-19.

Tabel 2.51 Cakupan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	64,1	62,82	61,54	60,26	70
Cakupan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	5,26	5,26	5,26	6,57	100

Sumber: Satpol PP Kota Balikpapan, 2022

Untuk indikator cakupan penegakan perda dan perkada menghitung penyelesaian kasus pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi dalam 1 (satu) tahun baik yang diselesaikan secara yustisi maupun non yustisi, penyelesaian secara yustisi dilakukan melalui pelaksanaan Sidang Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) sedang penyelesaian secara non yustisi melalui penandatanganan surat pernyataan dan tidak disidangkan. Jika dilihat dari datanya, terjadi tren peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016, cakupan penegakan perda dan perkada berada pada angka 78,43%, angka ini terus mengalami peningkatan setiap tahun hingga menyentuh 85,11% pada tahun 2020.

Beberapa kendala yang dihadapi untuk penegakan perda dan perkada ini diantaranya belum optimalnya penegakan regulasi daerah karena kondisi pandemi. Penegakan aturan daerah menjadi lebih terbatas pada penegakan perwali tentang covid. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mana varian penegakan perdanya jauh lebih banyak. Saat kondisi pandemi difokuskan pada dua aturan yaitu perda ketertiban umum dan perwali penegakan hukum terkait covid. Perilaku masyarakat dalam menaati aturan juga masih rendah. Satpol PP masih kesulitan dalam upayanya menegakkan perda terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengatur tentang pedagang kaki lima dan mengenai anak jalanan, pengemis, dan-lain-lain. Tingkat kehadiran masyarakat yang melanggar perda saat sidang juga cukup rendah. Hal ini juga disebabkan karena sidang hanya dilakukan 1 kali sebulan sehingga masyarakat terkadang tidak datang. Perlu penambahan frekuensi persidangan agar tingkat kehadiran masyarakat pun menjadi lebih tinggi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan sesuai perannya dalam penyelenggaraan Penegakan Peraturan perundangan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan Kota Balikpapan dalam kondisi kondusif, berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban akibat pelanggaran Peraturan Daerah sehingga roda pemerintahan berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan indeks persentase Cakupan Penegakan Perda dan Perkada serta Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan sebagaimana tabel di Bawah berikut.

Tabel 2.52 Cakupan Penegakan Perda dan Perkada dan Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan Di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	80	81,63	83,33	97,55	100
Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	85,6	86,6	87,7	88,8	100

Sumber: Satpol PP Kota Balikpapan, 2022

Secara keseluruhan upaya penguatan perlindungan masyarakat dan penegakan aturan daerah masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja di Satpol PP. Sarana dan Prasarana Dinas Ketenteraman masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2019 misalnya terkait dengan luasan kantor. Hal ini berpengaruh pada ruangan dan fasilitas di kantor yang kurang baik. Misalnya ruang kerja, ruang pos jaga, ruang rapat, ruang layanan pengaduan, serta tempat penyimpanan barang dan gudang tidak ada, sekretariat ptns ada tapi tidak maksimal, layanan pengaduan dan pemeriksaan juga kurang optimal.

Keterbatasan jumlah SDM juga menjadi kendala lainnya. Jumlah personil operasional saat ini berjumlah 142 pegawai sedang jumlah penduduk Kota

Balikpapan ±700.000 jiwa. Dengan jumlah pegawai tersebut juga kurang ideal dibandingkan dengan luas wilayah Kota Balikpapan yaitu ± 503,3 km². Idealnya Satpol PP Kota Balikpapan memiliki 350 personel. Disamping itu, masih terdapat beberapa pegawai yang belum diangkat pada posisi jabatan fungsional.

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat juga berkaitan dengan mitigasi bencana daerah. Upaya mitigasi ini diwujudkan untuk memastikan bahwa keselamatan masyarakat terjamin dari jenis bencana apapun. Adapun kewenangan terkait bencana ini menjadi tupoksi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dalam melaksanakan tugasnya, BPBD memiliki empat indikator kinerja yaitu Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, serta Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan capaian tahun 2017-2021 pada tabel berikut.

Tabel 2.53 Capaian Kinerja Layanan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kota Balikpapan Tahun 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Realisasi SPM (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	N/A	92,92	99	80	100
2	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	70	75	81	83,16	100
3	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	80	95,42	100
4	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	100	80	95,42	100

Sumber : BPBD Kota Balikpapan, 2022

Permasalahan yang dihadapi dalam waktu tanggap serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran disebabkan karena terdapat beberapa daerah yang sulit dijangkau seperti di daerah Kariangau dan Teritip. Berdasarkan dari RSPK (Rencana Sistem Proteksi Kebakaran) terkait dengan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran), Standar proteksi wilayah adalah 2,5 km dengan UPT pemadam kebakaran, dan jarak antar UPT tidak boleh lebih dari 5 km. Hal ini dipersulit dengan kondisi geografis wilayah yang sebagian besar perbukitan dan jalanan yang sempit.

Masih belum optimalnya upaya penanganan kebakaran ini memang dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah masih kurangnya jumlah sarana dan prasarana penunjang pemadam kebakaran. Mobil operasional pemadam kebakaran yang ada saat ini masih belum sesuai dengan standar nasional. Mengacu pada ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) bahwa 1 unit Mobil damkar melayani 10.000 jiwa. Kota Balikpapan dengan penduduk sebanyak 667.188 akan tetapi kendaraan operasionalnya hanya 23 unit atau masih sekitar 35% dari ketentuan ideal. Kota Balikpapan idealnya memiliki 67 unit pemadam. Selain itu, mobil operasional untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sempit serta gedung-gedung tinggi juga masih belum optimal. Selama ini, untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sempit sudah terdapat mobil jeep, akan tetapi mobil tersebut belum mampu menjangkau gang-gang sempit.

Lalu terkait dengan tingkat tanggap waktu yang masih fluktuatif capaiannya, berdasarkan identifikasi permasalahan yang sudah dilakukan penyebabnya adalah masih kurangnya respon petugas di lapangan ketika terjadi kebakaran. Penyebab lainnya karena belum ada perhitungan valid terkait waktu respon dari kantor hingga ke lokasi kebakaran. Waktu dihitung hanya berdasarkan asumsi masyarakat. Disisi lain, masih rendahnya capaian tingkat tanggap waktu tersebut terjadi karena laporan masyarakat ketika terjadi kebakaran masih lambat. Belum optimalnya pengembangan aplikasi pelaporan berbasis digital juga menyebabkan respon waktu terhadap bencana kebakaran masih kurang baik.

Untuk menangani permasalahan bencana kebakaran ini, beberapa hal yang perlu dibenahi adalah meningkatkan kualitas SDM. Masih kurangnya pelatihan maupun simulasi untuk petugas di lapangan maupun kepada masyarakat. Salah satu hambatan di lapangan ketika masyarakat belum mengetahui SOP penanganan kebakaran sehingga menyulitkan petugas di lapangan. Merujuk pada Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018, pengembangan kapasitas aparatur penanggulangan bencana mencakup aspek penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan anggaran, penguatan kelembagaan, pembinaan personil, dan pelatihan teknis.

2.3.1.6. Sosial

Bidang sosial menjadi salah satu aspek yang memiliki hubungan dengan sumber daya manusia dan penanggulangan berbagai permasalahan sosial di Kota Balikpapan, salah satunya dalam hal rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS, keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti mengalami tren penurunan dari tahun 2017 hingga 2021, dimana capaian indikator ini menyentuh angka 99,83% pada tahun 2017, namun pada tahun 2021 angka ini hanya sebesar 44,92%. Untuk pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar mengalami capaian yang fluktuatif pada setiap tahunnya. Pada tahun 2017, capaian indikator ini sebesar 76,59%. Pada tahun 2018 hingga 2019, pelayanan indikator ini mengalami peningkatan hingga mencapai 98,72% pada tahun 2019. Angka ini kembali mengalami penurunan hingga mencapai 31,82% pada tahun 2021. Pelayanan rehabilitasi sosial untuk lansia terlantar juga mengalami capaian yang fluktuatif dari tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017, capaiannya menyentuh angka 90,72%, angka ini mengalami peningkatan hingga mencapai 98,12% pada tahun 2018. Meskipun sempat mengalami penurunan menjadi 83,24% pada tahun 2019, angka ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai 100% pada tahun 2021.

Untuk capaian pelayanan rehabilitasi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis pada tahun 2017 hanya sebesar 54,74%, hingga pada tahun 2020, angka ini mencapai 100%.

Selain itu, pelayanan yang dilaksanakan adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada korban bencana dalam bentuk: (a) penampungan sementara; (b) bantuan Pangan; (c) sandang; (d) air bersih dan sanitasi; dan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2021, persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebesar 100%. Pada indikator berikutnya cakupan PMKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2018 dengan 120,65% yang menerima bantuan. Selanjutnya, pada capaian tahun 2021 persentase PMKS yang menerima bantuan sosial sebesar 78,82%. Capaian kinerja Kota Balikpapan bidang urusan sosial pada tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54 Capaian Kinerja Layanan SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2017 - 2021

No	Program / Kegiatan	Tingkat Capaian SPM /Realisasi Program (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	99,83	93,68	93,33	63	44,92
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	76,59	89,15	98,72	88	31,82
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	90,72	98,12	83,24	90	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	54,74	93,96	58,06	100	0
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	84,37	85,14	67,84	100	100
6	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Dampak Bencana	84,37	85,14	68,00	86,66	100
7	Persentase PMKS yang Menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	84,07	120,65	74,26	75,33	78,82
8	Persentase PSKS yang telah dibina	61,06	85,12	78,60	23,92	50
9	Persentase PMKS Miskin yang Terlayani	23,65	100	49	165,42	80
10	Persentase PMKS Miskin penerima Bantuan Sosial Pangan yang terlayani	90,00	41,63	83,72	121,90	21
11	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	56,68	107,75	146,46	154,20	48,16
12	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Logistik bagi Korban Bencana	31,25	33,75	33,47	12,75	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Balikpapan, 2022

Upaya pemenuhan kebutuhan sosial di Kota Balikpapan memang masih pada tahap pengembangan dan peningkatan institusi sosial yang ada. Dinas Sosial sebagai OPD yang mengemban tugas untuk mendistribusikan dan memastikan logistik serta penanganan sosial tentu membutuhkan bantuan dari pihak lainnya. Salah satunya adalah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Perkembangan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 tidak mengalami perkembangan yaitu sebanyak 6 orang. Sedangkan untuk Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) juga tidak mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 yaitu sebanyak 34 orang.

Jumlah lembaga/organisasi sosial mengalami peningkatan dari 32 lembaga pada tahun 2017, menjadi 37 lembaga pada tahun 2018, namun hingga tahun 2021 angka ini tidak mengalami peningkatan.

Tabel 2.55 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	6	6	6	6	6
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	34	34	34	34	34
3	Taruna Siaga Bencana	95	95	95	84	87
4	Karang Taruna	34	34	34	34	40
5	Lembaga/Organisasi Sosial	32	37	37	37	37
6	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	-	-	-	-	-
7	Kelompok Usaha Bersama Produktif (KUBE)	20	20	20	20	-
8	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	30	35	35	35	36
9	Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSU)	2	2	2	2	1
10	Yayasan Sosial	19	8	8	8	28
11	Lembaga Sumbangan Sosial	10	10	15	15	9
12	CSR Perusahaan Lingkungan	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Sosial Kota Balikpapan, 2022

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kota Balikpapan berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan pada tahun 2021 sebanyak 3.825 pencaker, dan telah ditempatkan sesuai klasifikasi kebutuhan sebanyak 962 pencaker. Dengan kondisi tersebut maka masih terdapat 3.519 pencaker di Kota Balikpapan yang belum ditempat atau bekerja. Proporsi terbesar dari pencari kerja terdaftar ini adalah mereka yang berpendidikan SMA/K, sebanyak 63,61%, atau sebanyak 2.433 orang. Urutan nomor dua pencari kerja terdaftar terbesar adalah dari kalangan yang berpendidikan strata-1 (S1) dengan proporsi 23,40%, atau sebanyak 895 orang.

Tabel 2.56 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dan Belum DitempatkanMenurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

Pendidikan	Pencari Kerja Tahun 2020 yang belum di tempatkan		Pencari Kerja Tahun 2021		Ditempatkan		Belum Ditempatkan	
	L	P	L	P	L	P	L	P
SD	97	1	45	1	7	0	106	1
SMP	133	12	80	6	12	0	119	11
SMA/K	1.167	831	2.072	361	486	136	835	476
Diploma	141	387	260	140	84	28	188	392
S1	538	605	487	408	124	84	624	678
S2	51	36	5	5	1	0	52	37
Jumlah Total	2.127	1.872	2.904	921	714	248	1.924	1.595

Sumber: Disnaker Kota Balikpapan, 2022

Dengan kondisi pencari kerja yang terus meningkat, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 juga meningkat. Pada tahun 2017, TPAK Kota Balikpapan sebesar 63,38%. Angka ini meningkat pada tahun 2018 menjadi 64,33%. Hingga tahun 2019, TPAK Kota Balikpapan sebesar 65,14%. Pada tahun yang sama, terjadi penurunan Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan yang semula 10,39% pada tahun 2017, menjadi 7,29% pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, TPAK Kota Balikpapan mengalami penurunan sebesar 2,24% menjadi 62,9%. Sama halnya dengan TPT Kota Balikpapan yang juga mengalami kenaikan menjadi 9,00% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19 terhadap tenaga kerja dan lapangan pekerjaan di Kota Balikpapan. Pada tahun 2021, seiring dengan berlangsungnya era *new normal* dan kondisi perekonomian di Kota Balikpapan yang cenderung membaik berdampak pada kembali meningkatnya capaian TPAK Kota Balikpapan menjadi sebesar 64,29% dan mampu menekan angka TPT menjadi 8,94%.

Terbatasnya lapangan pekerjaan, kapasitas dan ketrampilan SDM mengakibatkan banyak pencari kerja tidak tertampung. Jumlah ketersediaan lapangan kerja yang tidak memadai atau dapat diasumsikan adanya penyempitan ruang penyerapan tenaga kerja dan hal ini berdampak pada permintaan tenaga kerja menjadi lebih sedikit. Peningkatan Angka Partisipasi Kerja ini mendukung tujuan 8 sasaran 3 pada SDGs yaitu menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

Jika dilihat berdasarkan capaian indikator kinerja terkait dengan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terus menunjukkan peningkatan meskipun di tahun 2019 mengalami penurunan namun persentasenya sudah di atas 100%. Namun angka ini mengalami penurunan signifikan menjadi 52,80% pada tahun 2020 karena dampak pandemi covid-19. Pada tahun 2021 seiring dengan pemulihan perekonomian di era *new normal*, angka ini kembali mengalami peningkatan menjadi 101,70%. Adapun perhitungan indikator ini berdasarkan jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja dibagi dengan jumlah pencari kerja yang menjadi target pelatihan.

Meskipun demikian, pelaksanaan pelatihan kerja masih memiliki beberapa kendala yaitu jenis pelatihan yang biasanya dilaksanakan belum sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan industri dalam mencari tenaga kerja. Selain itu, terbatasnya pelatihan kejuruan pada LPK yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kota Balikpapan serta masih kurangnya kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta dalam melaksanakan pelatihan kompetensi kejuruan mengakibatkan pelatihan yang dilakukan belum sepenuhnya optimal untuk memenuhi pasar tenaga kerja.

Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan melalui program magang yang telah dilaksanakan mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 jumlah pencari kerja yang difasilitas magang oleh perusahaan terus menunjukkan peningkatan,

meskipun di tahun 2020 mengalami penurunan namun persentasenya sudah di atas 100%. Pada tahun 2021, persentase pencari kerja yang difasilitasi magang oleh perusahaan telah mencapai 136,67%, dimana angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya sebesar 129,6%. Program ini mendukung tujuan 8 sasaran 5 SDGs yaitu Pada tahun 2021, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.

Diharapkan nantinya calon tenaga kerja yang mengikuti program magang sudah memenuhi standar kompetensi kerja. Belum optimalnya fungsi dari forum komunikasi terkait program magang juga menjadi permasalahan yang mana forum ini idealnya menjadi wadah bagi calon tenaga kerja, pemerintah, dan perusahaan terkait dengan pelaksanaan program magang. Akan tetapi pelaksanaan forum ini belum sepenuhnya berjalan karena kurangnya koordinasi.

Permasalahan tenaga kerja di Kota Balikpapan juga menyangkut ketersediaan dokumen perencanaan maupun regulasi yang menaunginya. Belum tersusunnya masterplan ketenagakerjaan baik skala makro ataupun mikro sangat menyulitkan Dinas Ketenagakerjaan dalam menentukan kebutuhan akan pengembangan kompetensi tenaga kerja. Rencana pengembangan ketenagakerjaan dalam dokumen masterplan ketenagakerjaan nantinya juga perlu mempertimbangkan dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial ketenagakerjaan dengan perjanjian bersama tahun 2017-2021 cenderung mengalami fluktuasi angka. Namun demikian masih terdapat permasalahan terkait hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga ketidakpahaman atau ketidakpatuhan pengusaha/pelaku usaha terhadap ketentuan normatif sebagaimana peraturan yang berlaku.

Selain itu, tidak semua perusahaan menjalankan operasional bisnisnya di Kota Balikpapan, sehingga ketika dilakukan pembinaan ke lapangan atau pemanggilan dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau fasilitasi permasalahan ketenagakerjaan lainnya menjadi terhambat karena perusahaan tersebut tidak memiliki kantor di Balikpapan. Pada masa pandemi Covid-19, jumlah kasus perselisihan hubungan industrial. Hal ini membutuhkan upaya penanganan dengan aturan yang lebih kompleks karena merupakan kasus baru yang jarang terjadi. Kurangnya SDM pengawas ketenagakerjaan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam menangani kasus-kasus ketenagakerjaan.

Tabel 2.57 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kota Balikpapan 2017 – 2020

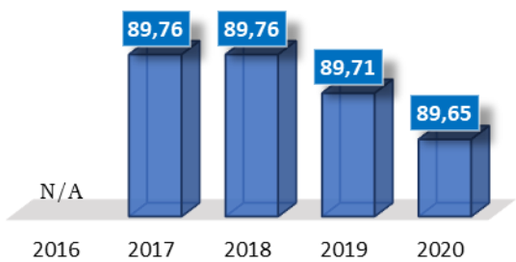
Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,39	9,52	7,29	9,00	8,94
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	63,38	64,3	64,7	62,9	64,29
Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja	%	74,80	334,20	122,70	52,80	101,70

Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pencari Kerja yang difasilitasi Magang di perusahaan	%	158	190,48	443,64	129,60	136,67
Persentase Calon Wirausaha yang mendapatkan Pembinaan	%	0	0	541,66	0	85,00
Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	28,76	19,27	3,98	23,00	30,50
Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dengan Perjanjian Bersama	%	70,42	66,19	79,36	68,10	62,50

Sumber: BPS Kota Balikpapan dan Disnaker Tahun 2022

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Salah satu rujukan dalam menilai kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks pembangunan gender adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.



Gambar 2.63 Indeks Pembangunan Gender Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020

Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan, 2021

Berdasarkan grafik capaian indeks pembangunan gender Kota Balikpapan, IPG Kota Balikpapan mengalami penurunan pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Pada tahun 2018, IPG Kota Balikpapan berada pada angka 89,76, dimana angka ini sama dengan IPG pada tahun 2017. Pada tahun 2019, IPG Kota Balikpapan menyentuh angka 89,71 dan terus mengalami penurunan menjadi 89,65 pada tahun 2020. IPG Kota Balikpapan mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan pada dua komposit yaitu: AHH dan pengeluaran per kapita perempuan. Namun pada tahun 2021, IPG Kota Balikpapan mengalami peningkatan menjadi 89,83.

Beberapa hal yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender di Kota Balikpapan, yaitu: 1. Hak sipil kebebasan, sejauh mana anak mendapat akta Kelahiran 2. Pengasuhan keluarga, tingkat pemahaman orang tua terhadap pengasuhan anak 3. Klaster kesehatan dasar, angka kematian ibu bayi, stunting, pemenuhan air bersih 4. Klaster pendidikan, sejauh mana tingkat putus sekolah 5. Perlindungan khusus, berupa penanganan korban kekerasan, bencana, dll.

IPG di Kota Balikpapan memiliki angka yang melampaui capaian IPG Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan pembangunan gender di Kota Balikpapan

telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa setiap proses perencanaan kebijakan, program, hingga kegiatan harus mempertimbangkan terkait pengarutamaan gender. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan demi terciptanya kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

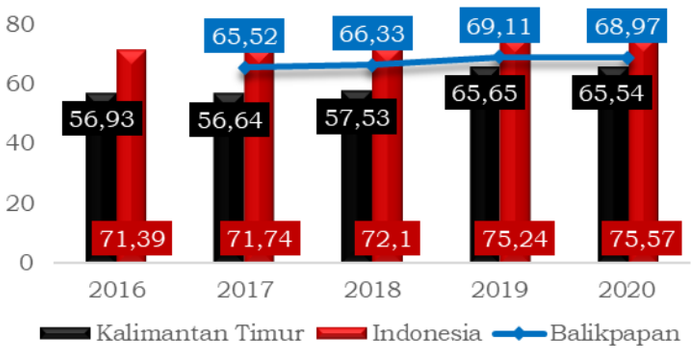
Tabel 2.58 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur

No.	Provinsi/Kabupaten	IPG				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kalimantan Timur	85,61	85,63	85,98	85,70	85,95
2.	Kota Balikpapan	89,74	89,76	89,71	89,65	89,83

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Salah satu hal yang perlu didorong dalam peningkatan indeks pembangunan gender (IPG) di Kota Balikpapan adalah melakukan evaluasi terhadap capaian nilai indeks pembangunan gender di Kota Balikpapan. Belum adanya kajian evaluasi terhadap capaian IPG di Kota Balikpapan mengingat capaian IPG bukan merupakan kinerja DP3AKB saja, namun merupakan kerja bersama seluruh perangkat daerah. Selain Indeks Pembangunan Gender, indikator dalam pemberdayaan perempuan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Capaian IDG menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Adapun capaian IDG di Kota Balikpapan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berada di atas angka Provinsi Kalimantan Timur, namun masih berada dibawah angka Nasional sebagaimana tertera pada grafik berikut.

IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Hal ini dilihat dari beberapa indikator antara lain keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Capaian indikator keterlibatan perempuan dalam parlemen mengalami peningkatan dari 17,78% pada tahun 2017 menjadi 20% pada tahun 2019, dan angka ini tidak mengalami perubahan hingga 2021. Sama halnya dengan capaian



Gambar 2.64 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia Tahun 2016 – 2020

Sumber: BPS diolah, 2021

sumbangan pendapatan perempuan yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2020. Pada tahun 2017, sumbangan pendapatan perempuan hanya sebesar 25,71%, angka ini terus meningkat hingga mencapai 26,75% pada tahun 2020. Namun angka ini mengalami penurunan menjadi 26,41% pada tahun 2021. Sedangkan untuk capaian indikator perempuan sebagai tenaga profesional mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga 2019 mencapai 42,39%, namun mengalami penurunan menjadi 41,76% pada tahun 2020 dan kembali meningkat menjadi 48,91% pada tahun 2021.

Tabel 2.59 Indikator IDG Kota Balikpapan tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	%	17,78	17,78	20	20	20
2	Perempuan sebagai Tenaga Profesional	%	40,39	41,84	42,39	41,76	48,91
3	Sumbangan Pendapatan Perempuan	%	25,71	26,09	26,61	26,75	26,41

Sumber : BPS diolah, 2022

Capaian persentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap perempuan di Kota Balikpapan mengalami laju yang fluktuatif, dimana terjadi penurunan pada tahun 2017 sampai dengan 2021, dengan persentase penyelesaian sebesar 84,29% pada tahun 2017 menjadi 62,16% pada tahun 2019. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 72,86% dan kembali mengalami penurunan menjadi 71,08% pada tahun 2021.

Tabel 2.60 Jumlah Kasus Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan

No	Tahun	Jumlah Korban	Penanganan Selesai	Proses	% Penyelesaian
1	2017	140	118	22	84,29
2	2018	69	54	15	78,26
3	2019	74	46	28	62,16
4	2020	70	51	19	72,86
5	2021	83	59	24	71,08

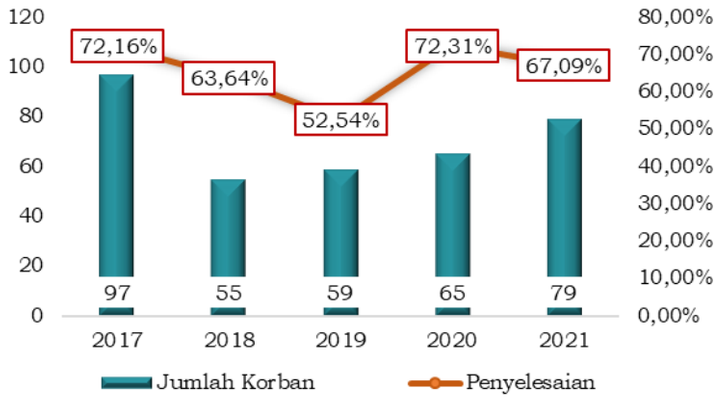
Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan, 2022

Pada tahun 2019, penanganan korban kekerasan terhadap anak sebesar 52,54% dengan jumlah korban sebanyak 59 anak. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 79 korban dengan tingkat penanganan 67,09%. Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa pandemi justru meningkat, karena pengawasan orang tua yang sangat minim. Anak lebih sering menggunakan smart phone, sehingga pergaulan anak melalui sosial media mengalami penyimpangan.

Terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap perempuan. Salah satu kendala utama dalam menangani kasus ini adalah pembagian tugas pokok dan fungsi antar dinas. Kasus korban kekerasan terhadap perempuan terdiri dari kasus kekerasan perempuan anak dan perempuan dewasa. Kasus perempuan dewasa (KDRT)

diperoleh berdasarkan aduan, kemudian pihak-pihak terkait melakukan mediasi, sehingga penyelesaian untuk permasalahan KDRT tinggi. Sedangkan untuk kasus penanganan korban anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian harus di selesaikan di tingkat pengadilan. Permasalahannya adalah jika sudah berurusan dengan aparat, maka tidak bisa cepat selesai, karena harus ada alat bukti minimal dua alat bukti. Kasus kekerasan seksual di Kota Balikpapan sebanyak 42 dari 59 kasus. Penanganannya relatif panjang karna memerlukan pembuktian yang cukup rumit. Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani korban kekerasan anak dan perempuan sangat tergantung dengan penegak hukum. Penyelesaian kasus korban kekerasan anak dan perempuan bisa selesai kurang lebih 1-3 tahun. Dalam penyelesaian kasus kekerasan pada anak dan perempuan dipengaruhi oleh 5 klaster, yaitu klaster 1-4 berupa pencegahan melalui sosialisasi dan klaster 5.

Berdasarkan grafik capaian persentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap anak, sejak tahun 2017 – 2019 mengalami penurunan dari 72,16% menjadi 52,54%, namun mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 72,31%. Angka ini kembali mengalami penurunan menjadi 67,09% pada tahun 2021.



Gambar 2.64 Capaian Persentase Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan terhadap Anak
Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan, 2020

Adapun jumlah kasus yang terjadi di Kota Balikpapan sebanyak 79 kasus pada tahun 2021. Angka ini sebenarnya telah mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. Peningkatan ini bisa dilihat dua sisi, yang pertama adanya peningkatan ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap kekerasan anak semakin baik ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kasus. Disisi lain peningkatan ini juga mengindikasikan kekerasan terhadap anak semakin banyak terjadi di masyarakat.

Tabel 2.61 Laporan Jenis Kasus Kekerasan Terhadap Anak

No.	Kategori Kasus	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	KDRT	39	13	-	14	0
2	Kekerasan Seksual	35	30	46	31	47
3	Penelantaran	15	1	1	0	0
4	Kekerasan Fisik	24	21	34	10	8
5	Kekerasan Psikis	34	13	5	9	8
6	Eksploitasi	0	0	2	0	4
7	Perdagangan Orang (TPPO)	0	1	0	0	0
8	Lainnya	53	1	3	2	2
Jumlah		200	80	91	66	69

Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan, 2021

Sedangkan untuk mengukur capaian perlindungan anak digunakan indikator Kota Layak Anak. Kota Layak Anak adalah indikator yang menjadi tolok ukur penilaian terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya 13 (tiga belas) hak-hak anak untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kota Balikpapan selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yaitu 2017 dan 2018 telah mencapai tingkat madya dan untuk tahun 2019 Kota Balikpapan strata kota layak layak anak meningkat satu level yaitu di tingkat nindya. Belum optimalnya Kota Balikpapan sebagai kota layak anak karena belum adanya dukungan komitmen dari berbagai pihak. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa indikator kota layak anak sangat memerlukan dukungan pendanaan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

2.3.2.3 Pangan

Ketersediaan pangan diukur melalui presentase cadangan pangan masyarakat yang ada di Kota Balikpapan, baik yang bersumber dari kota maupun dukungan provinsi. Cadangan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah saat ini masih terbatas pada bahan pokok beras yang bekerja sama dengan Bulog. Selain diukur dari ketersediaan pangan utama, ketahanan pangan diukur juga dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah indikator untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup dan seimbang. Semakin tinggi skor pola pangan menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya. Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat Kota Balikpapan pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami tren kenaikan. Namun, pada tahun 2020 PPH masyarakat Kota Balikpapan menurun menjadi 86,2, hal ini dikarenakan ada pergeseran pola konsumsi pangan dari yang semula mengutamakan sumber energi karbohidrat (padi-padian dan umbi-umbian) menjadi sumber protein. Selain itu, terdapat perubahan perilaku masyarakat Kota Balikpapan dalam beradaptasi menghadapi pandemi covid-19. Pada tahun 2021, skor PPH masyarakat Kota Balikpapan mengalami peningkatan menjadi 87. Sementara untuk indikator kinerja Persentase Pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan menunjukkan tren perbaikan dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Indikator kinerja urusan pangan digambarkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.62 Capaian Kinerja Layanan SPM Bidang Urusan Pangan Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2021

No.	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Cadangan Pangan Masyrakat	*Belum dilakukan Pengukuran*	62%	58%	38%	

No.	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
2	Persentase Daerah Rentan rawan Pangan	NA	NA	NA	NA	NA
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81.5 (AKE 2150) 83,8 (AKE 2000)	86,2 (AKE 2150) 89,0 (AKE 2000)	87,7 (AKE 2150) 90,2 (AKE 2000)	86,2 (AKE 2100)	87
4	Persentase Pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	*Belum Ada Kegiatan Pengujian Sampel Pangan*	92,74	98	100	100

Sumber : DP3 Kota Balikpapan, 2022

Disamping itu, ketahanan pangan suatu daerah juga dapat diukur melalui Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan. Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, tahun 2018 Kota Balikpapan berada pada peringkat kesembilan tingkat kota dengan skor indeks ketahanan pangan sebesar 83,62, kemudian meningkat signifikan di tahun 2019 sebesar 88,74 dan tahun 2020 sebesar 87,66 (peringkat ketiga). Adapun di tahun 2021 Kota Balikpapan berada pada peringkat terbaik keempat dengan nilai 88,68 setelah Denpasar (93,97), Pekanbaru (90,56), Bukit Tinggi (88,90).

Tabel 2.63 Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Indeks Ketersediaan (IK)	N/A	N/A	42,45	N/A
2	Indeks Keterjangkauan (IA)	N/A	N/A	97,44	98,01
3	Indeks Pemanfaatan (IP)	N/A	N/A	79,66	81,06
4	Komposit / Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	83,62	88,74	87,66	88,68

Sumber : Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, Indeks Ketahanan Pangan 2018 s/d 2021

2.3.2.4 Pertanahan

Capaian kinerja sektor pertanahan dapat terlihat dari pelayanan kepada masyarakat terkait pengurusan dokumen pertanahan dan kinerja pengadaan lahan untuk pembangunan penyediaan dan pengolahan air baku (pembangunan waduk Teritip dan embung Aji Raden) serta pengadaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum (pembangunan Institut Teknologi Kalimantan).

Untuk pelayanan kepada masyarakat terkait pengurusan dokumen pertanahan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terus menunjukkan kinerja yang baik. Namun, pada tahun 2020 persentase tanah yang memiliki IMTN di Kota Balikpapan mengalami penurunan dari 88%

pada tahun 2019 menjadi 76,95%. Angka ini kembali mengalami peningkatan menjadi 88% pada tahun 2022.

Capaian indikator kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang selanjutnya adalah persentase penanganan kasus/sengketa pertanahan, pada indikator kinerja ini dalam kurun waktu 5 tahun memiliki rata-rata capaian sebesar 76,13%, dengan rincian persentase penanganan sengketa sebagaimana terlihat pada tabel 2.63.

Angka persentase periode 2017-2021 berfluktuasi tergantung dari banyaknya jumlah pengaduan yang masuk terhadap jumlah pengaduan yang difasilitasi. Adapun penanganan kasus/sengketa pertanahan yang difasilitasi mayoritas disebabkan masih banyaknya tumpang tindih kepemilikan lahan dan pemanfaatan lahan ynag tidak sesuai dengan peruntukannya dalam RTRW. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh OPD teknis terkait Pemerintah Kota perlu lebih ditingkatkan. Adapun isu peruntukan lahan ini memiliki keterkaitan dengan tujuan pertama pada sasaran ketiga SDGs yang mencanangkan bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terkait dengan kepemilikan dan kontrol atas tanah. Kurangnya pengawasan terhadap peruntukan lahan dapat berakibat pada berkurangnya akses bagi masyarakat dalam hal kepemilikan tanah.

Tabel 2.64 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2021

Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase tanah yang memiliki IMTN	%	43	79	88	76,95	88
Persentase penanganan kasus/sengketa pertanahan	%	82,86	57	74	85	81,81
Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	Hektar	25,28	30,26	8,07	0	21,2

Sumber: DPPR Tahun 2022

Untuk kinerja pengadaan lahan pembangunan penyediaan dan pengolahan air baku, kegiatan prioritas Kota Balikpapan yaitu pembangunan waduk Teritip di kelurahan Teritip dan pembangunan Embung Aji Raden di Kelurahan Lamaru. Untuk waduk Teritip yang memiliki luas sesuai Penetapan lokasi 330 Ha,walaupun waduk telah terbangun dan telah operasional, masih ada sisa lahan yang belum bebas sekitar 35 Ha untuk area spil way dan sebagian area genangan. Adapun kendala yang dihadapi adalah permasalahan tumpang tindih lahan dan perbedaan luasan antara sertipikat dengan hasil ukur fisik dilapangan sehingga sampai saat ini belum dapat dilakukan proses konsinyasi.

Untuk pembangunan Embung Aji Raden, dari Kebutuhan lahan sesuai penetapan lokasi Tahun 2020 seluas 150,34 Ha, sampai dengan Tahun 2019 telah dibebaskan seluas 8,23 Ha yang telah digunakan untuk pembangunan tubuh bendung, spill way, intake dan sistem perpipaan intake. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kota mengupayakan pembebasan lahan untuk sebagian area genangan seluas 21,3 Ha. Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah Kota

Balikpapan untuk pembebasan lahan pembangunan Embung Aji Raden ini adalah banyaknya permasalahan tumpang tindih lahan, rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid-19, adanya penambahan luasan pada penetapan lokasi Tahun 2020 menyesuaikan revisi dokumen perencanaan serta keterbatasan anggaran APBD Kota, dimana dibutuhkan anggaran sebesar kurang lebih Rp. 181 Miliar untuk pembebasan sisa lahan seluas 120,81 Ha. Untuk itu Pemerintah Kota Balikpapan berupaya agar pembiayaannya juga dapat dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Terkait dengan pembangunan Institut Teknologi Kalimantan (ITK), hingga tahun 2019, dari total kebutuhan lahan sesuai penetapan lokasi seluas 310 Ha telah dibebaskan seluas 142,93 Ha. Adapun kendala yang dihadapi antara lain adanya keberatan oleh beberapa pemilik tanah yang masuk dalam penetapan lokasi dan diperlukan revisi penyusunan dokumen perencanaan menyesuaikan dengan Masterplan yang disusun oleh tim ITK. Untuk proses pembebasan lahan selanjutnya, pemerintah Kota fokus pada bidang tanah yang diperuntukkan sebagai akses utama dan pintu gerbang melalui jalan Soekarno Hatta KM 14.

Tabel 2.65 Kebutuhan Lahan Pembangunan Waduk Teritib, Embung Aji Raden dan ITK

Lokasi	Total Kebutuhan Lahan sesuai Penetapan lokasi (Ha)	Telah dibebaskan (Ha)	Belum dibebaskan (Ha)
Waduk Teritip	330	294,39	35,61
Embung Aji Raden	150,34	8,23 (on progress 2021: 21,3)	120,81
Institut Teknologi kalimantan	310	142,93	167,07

Sumber : DPPR, 2021

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Dalam mengukur kualitas lingkungan hidup, digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri atas 3 parameter, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Adapun klasifikasi IKLH adalah Sangat Baik IKLH > 80; Baik 70 < IKLH ≤ 80; Cukup baik 60 < IKLH ≤ 70; Kurang baik 50 < IKLH ≤ 60; Sangat kurang baik 40 < IKLH ≤ 50 dan Waspada 30 < IKLH ≤ 40. IKLH Kota Balikpapan mengalami fluktuasi capaian mulai tahun 2017 hingga mencapai angka 69,66 pada tahun 2021. Pada tahun 2018, terjadi penurunan nilai IKLH yaitu 59,58 karena berkurangnya indeks Kualitas Udara dari 97,9 di tahun 2017 menjadi 84,9 yang dipicu oleh meningkatnya kadar NO2 dan SO2 di udara. Rata rata capaian IKLH kota Balikpapan periode 2017-2021 ada pada klasifikasi cukup baik

Untuk parameter Indeks Kualitas Air (IKA) terjadi fluktuasi capaian dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Capaian IKA Kota Balikpapan sempat meningkat signifikan menjadi 49,5 di tahun 2018, akan tetapi kembali menurun pada tahun

2019 menjadi 47,9. Hingga tahun 2021 IKA Kota Balikpapan berada diangka 49,44. Beberapa hal yang menyebabkan pencemaran ini adalah pertambahan jumlah penduduk yang mana berdampak pada bertambah besarnya limbah domestik.

Volume air limbah domestik yang dihasilkan berpotensi menambah beban pencemaran air permukaan yang disebabkan belum terkelolanya air limbah secara komunal. Selain itu masih terdapat praktik usaha ilegal di Daerah Aliran Sungai (DAS).Berdasarkan hasil kajian inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar pada DAS Kladasan Kecil dan Kladasan II tahun 2016, dari 23 UKM yang diperkirakan limbahnya masuk ke Sungai Klandasan Kecil menunjukkan bahwa beban TSS yang tertinggi dari kegiatan pabrik tahu sebesar 131.985,6 gr/hari, beban pencemar organik BOD sebesar 42.579,3 gr/hari dan beban COD dari pabrik tahu sebesar 70.851,8 gr/hari. Kenyataan ini menggambarkan masih adanya usaha ilegal yang limbah kegiatannya secara langsung mencemari sungai Klandasan Kecil. Di sepanjang dua sungai menunjukkan bahwa masih banyak usaha yang tidak mengendalikan air limbahnya dengan baik. Kenyataan ini ditunjukkan dengan hasil pengukuran air limbah dari usaha kegiatan tersebut yang dari beberapa parameternya melebihi baku mutu air limbah.

Permasalahan berikutnya adalah penanganan limbah cair juga masih belum optimal sehingga berdampak banyak terhadap pencemaran air. Berdasarkan Kajian Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar pada DAS Klandasan Kecil dan Klandasan II pada tahun 2016 disimpulkan bahwa sumber pencemar yang berkontribusi paling besar terhadap pencemaran adalah limbah cair domestik dimana beban dari kegiatan domestik mencapai 3340,04 kg BOD/hari, 6405,01 kg COD/hari dan 1430,71 Kg TSS/hari sementara kegiatan lain 5,85 kg BOD/hari, 12,89 kg COD/hari dan 6,12 Kg TSS/hari. Aktivitas rumah tangga juga berkontribusi banyak terhadap limbah cair. Sumber air limbah dari kegiatan rumah tangga adalah aktivitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK), sebagian besar mempunyai tangki septik yang mengolah air limbah dari black water (toilet), sedangkan dari *grey water* (non toilet berupa aktivitas mandi, mencuci, memasak) belum dilakukan pengolahan dan dibuang langsung ke saluran penerima.

Secara keseluruhan, pencemaran air di Kota Balikpapan didominasi oleh pencemaran akibat air limbah domestik dan non domestik, serta limpasan air hujan yang membawa kikisan tanah. Selain itu meningkatnya pencemaran air, khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berlokasi di tengah kota, yaitu DAS Klandasan Besar dan DAS Klandasan Kecil, disebabkan pula oleh semakin padatnya penduduk dan tingginya pertumbuhan kegiatan komersil di sekitarnya. Meskipun berada di tengah Kota, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas air masih sangat kurang. Banyaknya kegiatan komersil, terutama usaha skala kecil seperti rumah makan, bengkel, dan kos-kosan mengolah air limbah

dengan sarana dan prasarana yang sangat minim. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan pelaku usaha skala kecil terhadap kewajiban untuk mengelola air limbah kegiatan/usahanya. Selain itu, biaya untuk mengolah air limbah dianggap relatif besar oleh sebagian pelaku usaha.

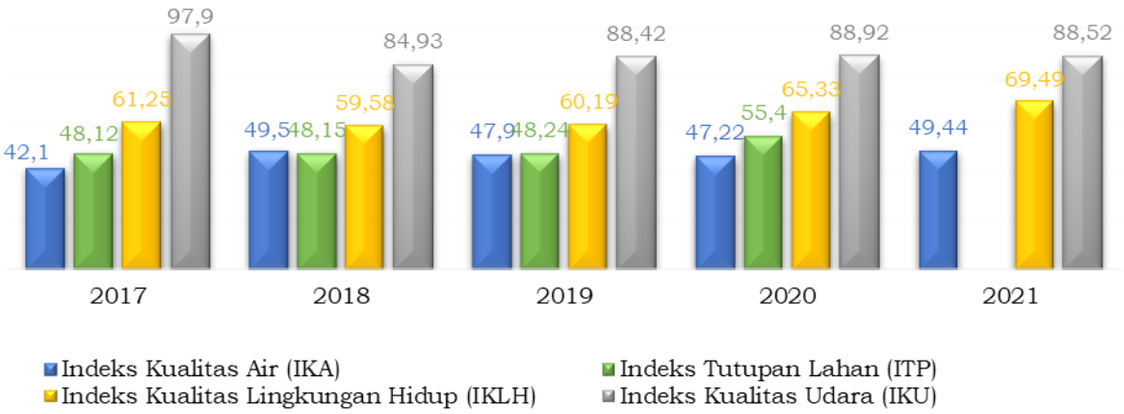
Indeks selanjutnya adalah Indeks Kualitas Udara (IKU). IKU adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kualitas udara berupa gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Capaian realisasi IKU Kota Balikpapan mengalami fluktuasi angka. Pada tahun 2017 angkanya berada di 97,9, lalu mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 84,93. Capaian realisasi ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai 88,92 pada tahun 2020, namun angka ini kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 88,52.

Beberapa hal yang mempengaruhi pencemaran udara salah satunya adalah sektor industri. Pertumbuhan pembangunan sektor industri perdagangan dan jasa relatif cepat. Kota Balikpapan sendiri masuk dalam kategori kota yang tingkat pertumbuhan dan pembangunannya relatif cepat. Selain itu penambahan penduduk dan industri menghasilkan gas rumah kaca yang lama kelamaan akan merusak ozon dan meningkatkan suhu serta anomali cuaca. Curah hujan yang ekstrem serta peningkatan suhu mengakibatkan munculnya bencana seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir dan tanah longsor.

Besarnya produksi gas emisi juga berpengaruh terhadap pencemaran udara. Penyumbang emisi terbesar adalah bidang manufaktur sebesar 68,7%, kemudian transportasi sebesar 11,7% dan permukiman serta usaha dan kelembagaan sebesar 8%. Aktivitas pengilangan minyak dari Pertamina Refinery Unit IV juga menyumbangkan emisi yang cukup besar. Jumlah emisi GRK dari aktivitas tersebut mencapai 1.976.220 ton CO2e pada tahun 2010, atau menempati 69,30% dari jumlah emisi di sektor Energi dan Transportasi, dan 66,85% terhadap total emisi Kota Balikpapan pada tahun 2010. Besarnya Emisi dari Pertamina RU V ini menyebabkan sektor Energi dan Transportasi menjadi sangat dominan di antara dua sektor penyumbang emisi yang lain di Kota Balikpapan.

Faktor lainnya adalah meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2019 sebanyak 616.626 kendaraan. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 4,71%. Pada tahun 2010, bidang Transportasi menyumbang 347.136 ton CO2e atau 11,74% dari total emisi kota pada tahun yang sama. Lalu pada tahun 2020 dengan proyeksi BAU menyumbang sebesar 1.214.975 ton CO2e atau dengan persentase sebesar 20,77% terhadap total emisi kota.

Indeks selanjutnya adalah Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH). ITH adalah suatu nilai yang digunakan untuk menghitung tutupan lahan/ hutan dibandingkan dengan Luas Wilayah. ITH Kota Balikpapan sendiri menunjukkan grafik peningkatan pada periode tahun 2016-2020. Angka ITH sempat mengalami stagnasi dari tahun 2016 hingga tahun 2017 sebesar 48,12. Barulah pada tahun 2018 angka ITH mengalami kenaikan menjadi 48,15. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020 angkanya terus mengalami peningkatan mencapai 55,4.



Gambar 2.65 Indeks IKA, IKLH, IKL dan IKU Tahun 2017 - 2020

Sumber: DLH Kota Balikpapan Tahun 2022

Salah satu dampak dari belum optimalnya penanganan pengupasan lahan adalah terjadinya perubahan iklim. Pengupasan lahan secara langsung mengakibatkan berkurangnya vegetasi tanaman setempat yang sebelumnya berfungsi sebagai penyerap gas karbon dioksida (CO2) dan tempat peresapan air ke tanah, dengan berkurangnya vegetasi maka gas CO2 menjadi tidak terserap serta tanah menjadi mudah terkena erosi saat hujan lebat. Hal tersebut mengakibatkan munculnya dampak lingkungan seperti terjadinya peningkatan suhu udara, sedimentasi, banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan dan lahan di beberapa titik lokasi. Pada tahun 2019, jumlah kegiatan yang melakukan pengupasan lahan menurun 60,77% dari jumlah pengupasan lahan pada tahun 2018. Namun, luasan yang dilakukan pengupasan lahannya seluas 1.943.125 m².

Tingginya angka pengupasan lahan ini disebabkan oleh pelaku usaha dan masyarakat perseorangan yang tidak mempertimbangkan aspek pembangunan atau aturan yang sesuai. Pelaku usaha lebih memilih Pembukaan dan pengupasan lahan dilakukan sekaligus, dibandingkan secara bertahap. Masalah lainnya adalah masih terjadinya kerusakan mangrove. Kerusakan mangrove terjadi akibat dari beralih fungsinya lahan melalui pembukaan lahan. Hal ini dapat dilihat dari cenderung menurunnya lahan untuk peruntukan tertentu yang berdampak pula pada berkurangnya areal mangrove. Keadaan ini diperkuat dengan hasil studi komprehensif kondisi eksisting dan *monitoring* lingkungan pesisir Kota Balikpapan yang dilakukan pada tahun 2016, dimana dalam kurun waktu 15 tahun terakhir telah terjadi berkurangnya areal mangrove seluas 95,06 ha. Dari besaran luasan ini terdiri dari 85 ha berada di area yang sesuai dengan RTRW yang ditetapkan

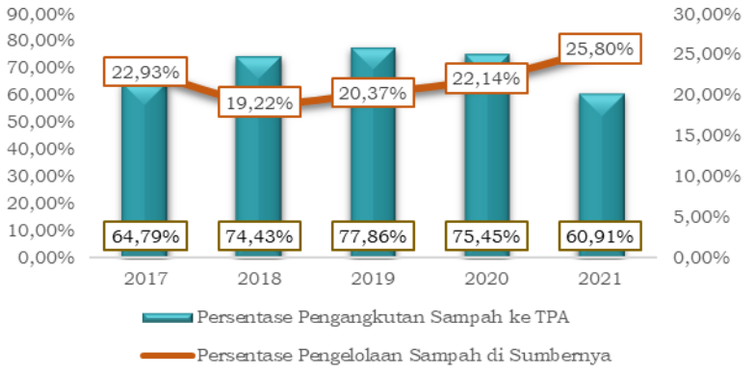
sebagai area mangrove, sedangkan sisanya merupakan areal di luar ketetapan RTRW. Masalah kerusakan mangrove lain yang mendapat perhatian publik secara besar, adalah saat terjadinya tumpahan minyak (*oil spill*) pada tanggal 30 Maret 2019 di teluk Balikpapan.

Bencana ini terjadi akibat kebocoran (patahnya) pipa distribusi minyak mentah bawah laut berdiameter 20 inci yang berlokasi di Terminal Lawe-Lawe ke Terminal Balikpapan milik PT. Pertamina RU V Balikpapan. Lokasi patah pipa terletak pada koordinat S 01°14'42.1" dan 116°47'16.2" sekitar 500 meter dari Terminal Lawe-Lawe ke arah Penajam. Sebaran tumpahan minyak mentah tersebut berdampak terhadap ekosistem dan biota laut di Teluk Balikpapan. Dari hasil survei lapangan ditemukan real mangrove yang rusak akibat dari tumpahan minyak adalah seluas 29,52 Ha. Selain sedikitnya lahan peruntukan untuk mangrove, masalah lain yang muncul dari berkurangnya tutupan lahan ini adalah terjadinya bencana tanah longsor. Sepanjang tahun 2017 telah terjadi tanah longsor di Kota Balikpapan sebanyak 63 kali yang disebabkan oleh curah hujan tinggi. Sementara itu di tahun 2016 terjadi tanah longsor sebanyak 24 kali, hal ini menunjukkan peningkatan tanah longsor yang terjadi di Kota Balikpapan. Hampir 85% wilayah Kota Balikpapan konturnya berbukit dan 15% relatif datar yang berada di sepanjang pesisir pantai. Adapun kontur yang berbukit memiliki tingkat kelerengan sebesar 15% sampai dengan 40% termasuk klasifikasi kelerengan curam dengan luas 39.955,57 m2, sehingga dengan kondisi tersebut menyebabkan rawan terjadinya longsor.

Pemanfaatan lahan di kontur berbukit didominasi oleh pembangunan rumah swadaya dan perumahan formal oleh pengembang. Hal ini menyebabkan kondisi lahan akan terbuka dan memerlukan drainase untuk mengalirkan limpasan air hujan agar tidak meresap ke tanah. Drainase yang ada belum sepenuhnya mengalir ke drainase kota, sehingga masih banyak aliran air yang masuk ke tanah karena tidak dilengkapi dengan drainase yang memenuhi standar untuk mengalir ke drainase kota. Aktivitas pembangunan perumahan juga turut menambah kerusakan ini. Pelaku usaha/kegiatan pembangunan perumahan dalam melakukan kegiatan konstruksi kurang memperhatikan kondisi lahan yang berbukit yang terakomodir dalam dokumen kajian lingkungan, namun masih banyak yang belum menerapkannya.

Adapun upaya terkait pembebasan hutan lindung dan hutan kota juga masih belum sepenuhnya terlaksana. Hutan lindung manggar dari 5.999 ha masih terdapat 1.000 ha yang belum dibebaskan sehingga banyak aktivitas masyarakat yang dapat mengancam kelestarian hutan lindung. Kemudian 20 hutan kota baru 5 yang menjadi milik pemerintah kota, sementara itu tanaman yang ada belum tertata masih hutan belukar yang mana seharusnya dapat dimanfaatkan untuk rekreasi dengan penataan kawasan dan tanaman yang baik.

Permasalahan lainnya terkait urusan lingkungan hidup adalah pengelolaan sampah. Untuk mengukur capaian kinerja penanganan permasalahan sampah digunakan dua indikator yaitu Persentase pengangkutan sampah ke TPA dan Persentase pengelolaan sampah di sumbernya. Untuk persentase pengangkutan sampah ke TPA persentasenya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pengelolaan sampah. Capaian realisasi untuk pengangkutan sampah pada tahun 2017 adalah 64,79%. Angka ini terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2019 menjadi 77,86%. Namun hingga tahun 2021, angka ini terus mengalami penurunan menjadi 60,91%.



Gambar 2.66 Persentase Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021
Sumber: DLH Kota Balikpapan Tahun 2022

Permasalahan pengelolaan sampah disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah masih kurangnya kesadaran dan minat masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah. Pemilahan dan pengolahan sampah di sumber belum mencapai hasil yang diharapkan. Indikasi dari belum berhasilnya pemilahan dan pengolahan sampah adalah masih tingginya volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Manggar, belum optimalnya pemilahan sampah di *Material Recovery Facility* (MRF), serta banyaknya bank sampah yang tidak aktif. Khusus untuk masyarakat di wilayah pesisir dan sungai masih menjadi wilayah yang kurang dalam mengelola sampahnya. Diperkirakan timbunan sampah yang dihasilkan melalui kegiatan permukiman sepanjang daerah aliran sungai sebanyak 411,32 ton/hari. Kota Balikpapan sendiri diperkirakan menghasilkan sampah sebesar 488,25 ton/hari. Berdasarkan hasil *sampling* sampah dari aliran air Sungai Pandan Sari, diperkirakan berat sampah sebesar 182,88 ton dengan komposisi sampah organik sebesar 63,03%, plastik 34,03 %, sampah inert lainnya (konstruksi bangunan, bebatuan, dsb. Sampah jenis ini tidak dapat didaur ulang, namun bisa digunakan ulang) 2,19%, kaca 0,22% dan logam 0,57%.

Berdasarkan hasil *sampling* tersebut dinilai berpotensi menjadi timbulan sampah di laut. Kecenderungan yang terjadi, Permukiman penduduk daerah pesisir terutama di Kecamatan Balikpapan Timur, Selatan, Kota dan Barat yang terbuat dari kayu dan terapung di atas air mengakibatkan rentan terjadi kebakaran, sehingga di beberapa daerah dibuat ruang kosong diantara rumah penduduk sebagai partisi dan sumber air jika terjadi kebakaran. Akibatnya ruang

kosong tersebut selain sebagai jalur apI juga digunakan untuk membuang sampah terutama sampah kecil seperti bungkus plastik, kantong plastik dll.

Program pemilahan sampah dari sumber dan pengelolaan sampah dengan konsep 3R telah dilaksanakan di kelurahan Gunung Bahagia sejak tahun 2014 sebagai pilot project yang didukung dengan fasilitas seperti MRF, ITF, halte sampah, pengangkutan sampah terjadwal dan sosialisasi serta pembinaan. Namun demikian hingga tahun 2019 program tersebut masih belum optimal untuk mewujudkan *zero waste to landfill* yang terlihat dari data MRF dan ITF yang berfluktuatif dan belum mencapai kapasitas maksimal. ITF hanya sebesar 25,98% - 31.31% yang dapat dimanfaatkan menjadi kompos, sisanya residu yang dikirim ke TPAS Manggar. Sementara itu, sampah MRF di tahun 2019 menurun sebesar 51,14 dari tahun 2018.

Ketersediaan pusat daur ulang sampah juga masih minim. Pemerintah Kota Balikpapan belum memiliki Pusat Daur Ulang (PDU) guna mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan mengontrol harga pasar di bank sampah. Adanya PDU dapat menarik minat masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah karena masyarakat dapat secara langsung melihat dan merasakan manfaat dari sampah yang didaur ulang, sehingga perekonomian masyarakat dapat berputar. Selain PDU, program lainnya yang perlu ditingkatkan adalah pengelolaan sampah melalui bank sampah. Ketersediaan bank sampah saat ini masih belum cukup ideal.

Terdapat 126 bank sampah di Kota Balikpapan yang tersebar di seluruh kecamatan. Namun jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 107 unit berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2020. Selain jumlah, sebaran bank sampah juga dirasa kurang merata untuk menjangkau seluruh masyarakat di Kota Balikpapan. Jumlah bank sampah di Balikpapan Timur sebanyak 39 unit, Balikpapan Utara 15 unit, Balikpapan Selatan 27 unit, Balikpapan Kota 19 unit, Balikpapan Tengah 12 unit, dan Balikpapan Barat 14 unit.

Hal lain yang perlu diperhitungkan adalah ledakan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya jumlah sampah. Pertumbuhan penduduk di Balikpapan mempengaruhi bertambahnya volume limbah, termasuk jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Untuk pengendalian terhadap limbah B3 yang dihasilkan pelaku usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan pengawasan terhadap pemegang izin usaha. Namun, untuk limbah B3 skala rumah tangga yang mempunyai potensi cukup besar terhadap pencemaran lingkungan belum ada pengelolaan yang memadai.

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan jumlah sampah yang dihasilkan juga semakin banyak, demikian juga dengan sampah yang termasuk dalam kategori sampah B3 yang dihasilkan. Saat ini, tempat pemilahan/pewadahan untuk sampah B3 di Kota Balikpapan belum tersedia, data

persentase sampah B3 juga belum terdata dengan baik. Pengelolaan di TPA pun belum maksimal yakni masih tercampur dengan limbah domestik rumah tangga. Aktivitas rumah tangga memang mengindikasikan banyak menghasilkan sampah B3. Pilihan produk rumah tangga untuk kemudahan aktivitas sehari-hari dan umumnya mengandung bahan berbahaya dan beracun, dan menambah produksi sampah domestik non berbahaya dan beracun yang dihasilkan dari rumah tangga. Hasil kajian sarana dan prasarana limbah B3 diketahui bahwa rata-rata sampah rumah tangga yang dihasilkan sebanyak 0,0188 per orang/hari. Sampah B3 berpotensi meningkat dan apabila tidak ada penanganan khusus, sehingga akan menimbulkan bahaya yang serius bagi lingkungan dan kesehatan manusia, seperti sampah atau limbah B3 dari elektronik yang mengandung Timbal, Merkuri, Arsenik, Kadmium yang dapat mengganggu sistem metabolisme tubuh, karsinogenik.

Pengelolaan sampah B3 rumah tangga ini juga masih terhambat karena belum adanya regulasi daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun belum secara jelas mengatur pengelolaan sampah B3 untuk skala rumah tangga. Hal ini tentu berpengaruh pada kesulitan bagi *stakeholder* untuk merumuskan peraturan teknis di daerah.

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu urusan strategis yang menjadi urusan daerah adalah terkait dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Urusan ini diampu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Salah satu indikator yang digunakan adalah jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga. Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Pada tahun 2021, jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga sebanyak 237.838 KK, atau 100 persen seluruh keluarga di Kota Balikpapan sudah mempunyai Kartu Keluarga SIAK.

Tabel 2.66 Persentase Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	% Keluarga Yang Memiliki KK				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Balikpapan Timur	100%	100%	100%	100%	100%
2	Balikpapan Barat	100%	100%	100%	100%	100%
3	Balikpapan Utara	100%	100%	100%	100%	100%
4	Balikpapan Tengah	100%	100%	100%	100%	100%
5	Balikpapan Selatan	100%	100%	100%	100%	100%
6	Balikpapan Kota	100%	100%	100%	100%	100%
T O T A L		100%	100%	100%	100%	100%

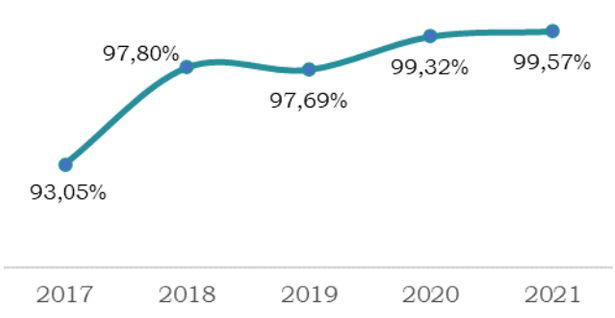
Sumber: Database SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2022

Sedangkan indikator lainnya adalah Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. Dengan memiliki KTP, penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Terjadi peningkatan jumlah penduduk wajib KTP dari 484.041 pada tahun 2020 menjadi 495.274 pada tahun 2021. Jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik juga meningkat persentasenya. Dari 99,32% pada tahun 2020 menjadi 99,57% pada tahun 2021.

Tabel 2.67 Jumlah Penduduk Wajib KTP dan Memiliki e-KTP Tahun 2017 – 2021

No	Kecamatan	Jml Pendudk Wajib KTP					Jml Pddk yang Memiliki KTP-el				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Balikpapan Timur	52.771	57.353	59.487	1.121	62.829	39.569	54.620	57.668	60.140	62.485
2	Balikpapan Barat	63.936	67.116	67.544	67.141	67.663	57.035	65.084	65.578	67.136	67.334
3	Balikpapan Utara	104.446	110.818	114.713	117.508	120.797	117.751	107.388	111.442	116.034	120.278
4	Balikpapan Tengah	76.028	77.701	78.187	77.175	77.267	60.927	75.986	76.124	77.145	76.979
5	Balikpapan Selatan	92.653	97.964	100.744	101.963	104.279	87.307	93.503	97.524	101.148	103.859
6	Balikpapan Kota	61.277	62.166	63.366	62.484	62.439	54.065	60.723	61.557	62.479	62.224
TOTAL		431.237	451.111	473.118	484.041	495.274	416.107	365.646	416.654	457.304	493.159

Sumber: Database SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2022



Gambar 2.67 Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jika merujuk pada data historis kepemilikan KTP Elektronik, grafiknya menunjukkan angka yang masih fluktuatif. Pada tahun 2017 persentase kepemilikan E-KTP sebesar 93,05%. Sempat mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2018 menjadi 97,80%, lalu kemudian menurun di tahun 2019 menjadi 97,69%. Hingga tahun 2021 realisasi kepemilikan E-KTP terus meningkat menjadi sebesar 99,57%.

Masih naik turunnya cakupan kepemilikan E-KTP disebabkan karena masih adanya kendala yang dihadapi ketika pelaksanaannya di lapangan. Salah satunya adalah belum optimalnya sosialisasi administrasi kependudukan khususnya perubahan kebijakan pelayanan kependudukan. Terdapat perubahan aturan terkait kependudukan yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Sebagai contoh diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 sehingga pembuatan KTP Elektronik tidak perlu surat pengantar dari RT/RW. Lalu aturan lainnya misalnya dalam Permendagri 119 tahun 2019 yang saat ini tidak lagi menggunakan kertas security printing tetapi dicetak diatas kertas HVS putih 80 gram serta dapat dicetak secara mandiri oleh masyarakat. Hal ini masih belum banyak dipahami oleh masyarakat. Sehingga terkadang membuat pelaksanaannya

yang seharusnya menjadi lebih mudah menjadi terhambat karena belum pahamnya masyarakat terkait aturan baru tersebut.

Disamping itu, dalam merespon kondisi pandemi covid-19 yang terjadi, pemerintah juga melakukan perubahan pelayanan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan perubahan signifikan terkait dengan prosedur pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Jika sebelumnya dilakukan melalui tatap muka, saat ini pelayanan dilakukan secara daring/online. Masyarakat yang belum terbiasa melakukan pelayanan secara daring mengalami kesulitan dalam mengajukan permohonan pelayanan yang disebabkan belum memahami prosedur. Hambatan lainnya adalah terbatasnya gadget yang digunakan masyarakat untuk menggunakan layanan online tersebut.

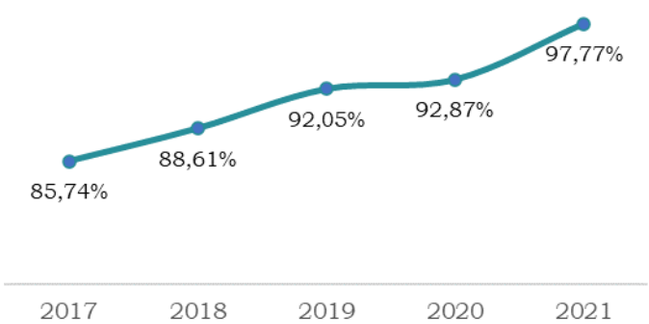
Adapun dalam hal kepemilikan akta kelahiran, berdasarkan laporan kepemilikan akta kelahiran anak umur 0 – 18 tahun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa pada kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 terjadi peningkatan cakupan kepemilikan akte kelahiran anak sebesar 6,5%. Hal tersebut menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan akta kelahiran bagi anak-anak dalam rangka pemenuhan hak sipil mereka dan untuk kemudahan dalam segala urusan terutama pendidikan, kesehatan dan sosial.

Tabel 2.68 Data Kepemilikan Akta Kelahiran Untuk Penduduk Usia Anak Tahun 2017 – 2021

No	Kecamatan	Jml Penduduk Usia 0 – 18 Tahun					Jml Penduduk usia 0 – 18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Balikpapan Timur	25.704	26.228	27.065	31.257	32.146	21.527	22.451	24.487	28.387	31.428
2	Balikpapan Barat	30.345	28.593	28.791	31.853	31.903	26.192	26.477	28.171	30.359	31.325
3	Balikpapan Utara	47.933	49.546	50.804	56.885	58.301	41.288	42.502	46.678	53.591	57.031
4	Balikpapan Tengah	32.103	31.396	30.778	33.151	33.139	28.129	27.917	29.454	31.636	32.514
5	Balikpapan Selatan	42.028	43.456	43.984	48.985	50.044	35.330	35.938	38.300	44.300	48.668
6	Balikpapan Kota	24.737	24.977	24.030	26.043	25.968	21.439	21.311	21.997	24.172	25.366
Jumlah		207.149	202.850	204.196	205.452	231.501	178.068	173.905	176.596	189.087	226.332

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2022

Jika merujuk pada data historis dari tahun 2017 hingga tahun 2021, cakupan kepemilikan akta kelahiran menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya. Pada tahun 2017 cakupan kepemilikan akta kelahiran masih berada diangka 85,74%. Lalu meningkat menjadi 92,05% pada tahun 2019. Hingga tahun 2021 angkanya sudah mencapai 97,77%.



Gambar 2.68 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selain penerbitan akta kelahiran dan KTP Elektronik, indikator lainnya yang digunakan untuk melihat kinerja administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah penerbitan akta kematian dan kartu identitas anak. Untuk penerbitan akta kematian menunjukkan grafik fluktuatif. Pada tahun 2017 angka masih sebesar 95,11%. Angka ini kemudian meningkat signifikan menjadi 99,31% di tahun 2018. Akan tetapi terjadi penurunan hingga tahun 2020 menjadi 88,90%. Namun pada tahun 2021, angka ini mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar 90,85%. Hal ini terjadi disebabkan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat kepemilikan akte kematian dalam pengurusan surat-surat penting lainnya terkait dengan urusan kepegawaian, perwarisan dan perbankan.

Sedangkan untuk cakupan kepemilikan kartu identitas anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 capaiannya sebesar 32,71%, angka ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai 85,82% pada tahun 2021. Terkait dengan capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) yang masih rendah , hal ini disebabkan karena program KIA baru diluncurkan pada tahun 2016. Dan Kota Balikpapan mulai melaksanakan program pencetakan KIA pada tahun 2018 melalui inovasi 3 in I dan pencetakan massal bagi siswa SD pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel 2.69 Cakupan Penerbitan Akta Kematian dan Kartu Identitas Anak di Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Penerbitan Akta Kematian	95,11%	99,31%	97,04%	88,90%	90,85%
Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak	-	32,71%	56,13%	63,22%	85,82%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Kota Balikpapan memiliki 4 (empat) lembaga pemberdayaan masyarakat, baik yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan program pembangunan dari kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Keempat lembaga tersebut antara lain:Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Dimana pada setiap Kelurahan dan Kecamatan di Kota Balikpapan memiliki masing-masing 1 (satu) lembaga dari ke-empat lembaga pemberdayaan masyarakat tersebut, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.70 Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2021

No	Nama Lembaga	Jumlah	
		Kecamatan	Kelurahan (lembaga)
1	LPM	6	34
2	PKK	6	34
3	Karang Taruna	6	34
4	LKM	6	34

Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan

Selain kelembagaan pemberdayaan masyarakat, indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembinaan pemberdayaan masyarakat adalah peran aktif

masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, dan infrastruktur di wilayah permukiman. Hal ini terlihat dari kenaikan yang cukup signifikan swadaya masyarakat dalam kegiatan sosial, budaya, keagamaan, kebersihan lingkungan dan pembangunan infrastruktur permukiman berupa barang dan jasa maupun dana selama kurun waktu 2016 – 2020, sebagaimana tabel dibawah ini berikut ini

Tabel 2.71 Dana Swadaya Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

No	Tahun	Dana Swadaya Masyarakat
1	2016	Rp 93.971.882.000
2	2017	Rp 88.615.487.049
3	2018	Rp 93.338.387.000
4	2019	Rp100.738.092.285
5	2020	Rp 83.875.636.859
Jumlah		Rp 460.539.485.193

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Balikpapan, 2021
*) dari 27 kelurahan.

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk di Kota Balikpapan berdasarkan usia yang dominan adalah pada usia produktif, yaitu sebesar 88% dari total penduduk pada tahun 2020, sedangkan untuk kelompok usia balita hanya 8% dan 4% untuk lansia. Hal ini berarti Kota Balikpapan berada dalam fase bonus demografi, dimana jumlah penduduk produktif atau angkatan kerja (usia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk yang tidak produktif (di bawah 5 tahun dan di atas 64 tahun). Penduduk merupakan komponen atau aspek yang strategis dalam mendorong dinamika kemajuan daerah dan bangsa, sehingga keberadaannya merupakan modal dasar pembangunan. Oleh karena itu pembangunan yang dirancang haruslah pembangunan yang "*population-responsive*", atau ada yang menyebut "*people centered development*" yaitu pembangunan yang senantiasa mengacu atau merujuk kepada dinamika dan tren perkembangan kependudukan Kependudukan. Strategisnya masalah kependudukan diakui oleh seluruh negara termasuk Indonesia, sehingga pada akhirnya dalam sidang Persatuan bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1989 disepakati sebagai hari kependudukan.

Pembangunan kependudukan yaitu upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. Secara garis besar pembangunan kependudukan meliputi 5 (lima) pilar pokok yaitu: 1) Pengendalian kuantitas penduduk, 2) Peningkatan Kualitas Penduduk, 3) Pembangunan Keluarga, 4) Pengarahan Mobilitas, 5) Pengembangan sistem informasi kependudukan.

Persentase pemakai alat kontrasepsi selalu mengalami kenaikan sejak tahun 2016 – 2021, dimana pada tahun 2021, 70,30% telah menggunakan alat kontraspesi. Namun, terdapat beberapa kendala terkait pemakaian alat kontrasepsi ini di masyarakat, seperti masih adanya kelompok masyarakat (PUS kategori *unmet need*) yang beranggapan bahwa menggunakan alat kontrasepsi KB

itu bertentangan dengan pemahaman agama yang dimiliki, khususnya di wilayah Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur.

Tabel 2.72 Jumlah Akseptor KB Aktif Menurut Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Jenis Kontrasepsi	Tahun	Kecamatan						Jumlah
		Timur	Barat	Utara	Tengah	Selatan	Kota	
IUD	2017	621	1.449	3.442	2.195	1.629	1.029	10.365
	2018	678	1.170	4.149	2.323	1.801	1.156	11.277
	2019	760	1.228	3.950	2.476	1.902	1.414	11.730
	2020	821	1.195	3.426	2.545	1.931	1.211	11.129
	2021	818	1231	3467	2621	1975	1232	11.344
MOW	2017	246	276	727	589	525	428	2.791
	2018	259	240	890	587	599	443	3.018
	2019	292	242	957	597	652	446	3.186
	2020	320	242	720	572	655	447	2.956
	2021	359	412	733	587	671	447	3.209
MOP	2017	16	17	20	57	19	13	142
	2018	16	16	20	54	19	13	138
	2019	16	16	21	57	20	13	143
	2020	14	14	20	47	20	15	130
	2021	15	15	19	48	19	14	130
Kondom	2017	267	243	1.443	600	748	417	3.718
	2018	263	255	1.596	586	806	433	3.939
	2019	281	260	1.714	616	898	435	4.204
	2020	290	247	1.416	463	926	468	3.810
	2021	193	284	1394	477	931	484	3.763
IMPT	2017	719	469	943	1.081	748	328	4.288
	2018	778	463	1.110	1.217	915	394	4.877
	2019	751	498	1.170	1.232	1.437	446	5.534
	2020	816	520	984	1.112	1.085	418	4.935
	2021	625	555	1035	1242	1145	435	5.037
STK	2017	3.734	6.179	6.266	4.604	5.393	3.321	29.497
	2018	3.835	5.428	6.652	4.600	5.695	3.474	29.684
	2019	4.041	5.384	7.556	5.175	5.891	3.597	31.644
	2020	4.102	5.406	8.470	4.947	5.991	3.810	32.726
	2021	3962	4525	8727	5067	6277	3858	32.416
PIL	2017	2.224	3.594	4.529	2.442	3.090	1.401	17.280
	2018	2.203	3.322	4.334	2.756	3.188	1.410	17.213
	2019	2.209	3.246	4.522	2.444	3.273	1.440	17.134
	2020	2.154	3.043	4.612	2.550	3.321	1.477	17.157
	2021	2279	2742	4646	2620	3335	1497	17.119

Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan, 2020

Sementara itu berdasarkan jumlah akseptor yang digunakan, pada tahun 2021, jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh akseptor KB aktif adalah suntik (STK) yaitu sebanyak 32.416 orang. Penggunaan suntik dianggap dapat lebih efektif dan lebih mudah digunakan oleh penduduk yang sedang mengikuti program keluarga berencana.

Tabel 2.73 Persentase Pasangan Usia Subur dan Akseptor Keluarga Berencana Tahun 2017 - 2021

No.	Kecamatan	% PUS yang berKB aktif				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Balikpapan Utara	65,47%	70,63%	74,39%	74%	74,42%
2.	Balikpapan Selatan	63,01%	65,36%	68,36%	69%	69,22%
3.	Balikpapan Kota	63,57%	65,82%	67,49%	69%	68,98%
4.	Balikpapan Timur	70,30%	70,23%	69,44%	70%	68,94%
5.	Balikpapan Barat	68,48%	67,92%	68,98%	69%	65,49%
6.	Balikpapan Tengah	68,82%	70,15%	68,37%	70%	71,19%
Jumlah		66,32%	68,35%	70,02%	70,17%	70,30%

Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan, 2020

Jumlah Pasangan Usia Subur di Kota Balikpapan meningkat dari tahun 2020 sebanyak 103.169 menjadi 103.862 pada tahun 2021. Sama halnya dengan

jumlah akseptor aktif yang mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebanyak 73.018 dibandingkan pada tahun 2020 sebanyak 72.843. jumlah akseptor aktif terbanyak di Kecamatan Balikpapan Utara. Peningkatan akseptor aktif seiring dengan peningkatan persentase PUS yang ber KB aktif yaitu pada tahun 2020 sebesar 70,17% meningkat menjadi 70,30% pada tahun 2021. Persentase tertinggi di Kecamatan Balikpapan Utara.

Tingkat kepesertaan KB usia subur didominasi oleh suntik, pil KB, dan IUD. Namun, IUD justru jarang dipakai karena ada ketakutan dalam diri masyarakat, sehingga yang paling diminati adalah KB suntik. Oleh karena itu, perlu peran dari mitra terkait dalam rangka membudayakan MKJP bukan hanya peran Pil KB namun juga Fasilitas Kesehatan untuk mengedukasi guna mengarahkan pasangan usia subur menggunakan MKJP. MKJP lebih aman dan dapat dipakai hingga jangka panjang, sedangkan suntik hanya satu bulan dan tiga bulan.

Capaian proporsi wanita usia subur yang tidak menggunakan alat KB mengindikasikan jumlah wanita usia subur yang sudah berstatus kawin tetapi tidak menggunakan alat KB. Pada tahun 2021 terdapat 14,29% proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan KB.

Namun, terdapat beberapa catatan permasalahan antara lain masih adanya kelompok masyarakat (PUS kategori *unmet need*) yang belum bisa secara optimal/ intensif dilakukan penyuluhan KB oleh Penyuluh KB, khususnya di wilayah permukiman elite (kalangan menengah keatas) dan beberapa pondok pesantren di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur maupun Balikpapan Utara.

Persentase peningkatan kelompok kegiatan yang mendukung program KKBPK menunjukkan kenaikan sejak tahun 2017 – 2021, dimana dari 4,52% pada tahun 2017 menjadi 20,54% pada tahun 2021. Sebaliknya, terkait dengan kelompok pemuda yang mendukung kegiatan KKBPK, jumlahnya mengalami tingkat yang fluktuatif, dimana pada tahun 2021 terdapat 29,41% kelompok pemuda yang mendukung kegiatan KKBPK. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 1,04 %.

Persentase jumlah keluarga yang telah terpapar program pemahaman terhadap fungsi keluarga terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017-2021. Pada tahun 2020, capaian keluarga yang terpapar terkait program fungsi keluarga sebesar 4,07%. Angka ini mengalami peningkatan menjadi 85,56% pada tahun 2021.

Persentase remaja yang terpapar program keluarga berencana mengalami jumlah yang fluktuatif, dimana pada tahun 2018 naik menjadi 4,72% dari tahun 2017 sebesar 1,51%, sebelum terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 1,13%. Namun, pada tahun 2021 angka ini mengalami peningkatan menjadi 100,96%.

Selain itu, terkait program pengendalian penduduk dan keluarga berencana ke depan, terdapat beberapa catatan permasalahan, seperti masih terdapat perkawinan pada usia anak/remaja di bawah 21 tahun. Hal ini berbahaya dikarenakan aspek kesehatan reproduksi seorang perempuan layak melahirkan pertama kali usia 20 tahun ke atas dan menikah pada umur 20. Meskipun ada UU perkawinan, bahwa perempuan maupun laki-laki dapat menikah usia 19 tahun, minimnya dana untuk sarpras pendukung, seperti kendaraan operasional yang serba terbatas dan alat peraga penyuluhan yang sangat minim da hanya tergantung pada penyediaan dana dari DAK. Tahun 2021, DAK tidak dialokasikan untuk alat peraga penyuluhan namun untuk pengadaan pelayanan KB di Faskes, selain itu sarana Kartu Identitas Anak (KIA) juga sangat minim, laju pertumbuhan penduduk cenderung meningkat yang dominan disebabkan faktor migrasi, dan perlunya pengadaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK).

Tabel 2.74 Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate* / CPR)	66,32%	68,35%	70,02%	70,17%	70,30%
Proporsi / Persentase Wanita Usia Subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi KB (*Unmet Need*)	18,10%	15,64%	14,49%	14,04%	14,29%
Persentase Keluarga terpapar pemahaman tentang fungsi keluarga	4,52%	5,32%	8,00%	4,07%	85,56%
Persentase remaja terpapar tentang Program Generasi Berencana	1,51%	4,72%	1,59%	1,13%	100,96%
Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan (POKTAN) dan Pendukung Program KKBPK	4,52%	5,32%	8.00%	8,5%	20,54%
Peningkatan Jumlah Kelompok Remaja Pendukung KKBPK (PIK R/M)	1,51%	4,72%	1,59%	1,04%	29,41%

Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan, 2020

2.3.2.9 Perhubungan

Sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan merupakan simpul transportasi dengan adanya Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Pelabuhan Internasional Semayang dan Pelabuhan Internasional Peti Kemas Kariangau, sedangkan untuk transportasi darat dihubungkan melalui jalan baik jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota. Panjang ruas jalan Kota Balikpapan berdasarkan Surat Keputusan Kota Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-415/2016 tanggal 27 September 2016 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota Balikpapan adalah sepanjang 501,180 KM. Sementara Jalan Provinsi yang melalui Kota Balikpapan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 622/K.295/2018 Tanggal 25 Juni 2018 Tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi adalah Jalan KM 5,5 Balikpapan-Kariangau sepanjang 10,51 KM dan Jalan Mulawarman sepanjang 16,21 KM. Sementara menurut Kep.Men PUPR Nomor.290/KPTS/M/2015 Jalan Nasional

yang berada di Kota Balikpapan antara lain: Jalan Sudirman sepanjang 8,07 KM, Jalan Iswahyudi sepanjang 4,06 KM, Syarifuddin Yoes (JL. Ke Airport) 5,69 KM, JLN. MT. Haryono / Ring Road 2,75 KM, dan JLN. Soekarno-Hatta sepanjang 25,09 KM.

Dalam hal penyelenggaran transportasi darat, jumlah kendaraan di Kota Balikpapan terus mengalami pertumbuhan seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian Kota Balikpapan. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, kendaraan di Kota Balikpapan masih kendaraan pribadi masih mendominasi jika dibandingkan dengan kendaraan umum.

Tabel 2.75 Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit) Di Kota Balikpapan Tahun 2021

Jenis Kendaraan	Bukan Umum	Umum	Dinas	Jumlah
Sedan	14.880	2983	2186	20.049
Station Wagon	75.243	6017	3153	84.413
Mini Bus	169.181	7302	5721	182.204
Jeep	64.115	3087	3610	70.812
Lain-lain	672	166	165	1.003
Mobil Penumpang	324.088	19555	14835	358.478
Bus	3.988	2148	527	6.663
Micro Bus	18.866	1376	2121	22.363
Bus Bertingkat	-	2	0	2
Lain-lain	268	120	19	407
Mobil Bus	23.122	3646	2667	29.435
Pick Up	230.510	12612	3800	246.922
Deliver Van	2.284	1181	716	4.181
Truck	62.469	13025	3929	79.423
Tangki	6.182	2054	866	9.102
Double Cabin	40.510	5899	2703	49.112
Lain-lain	1.841	547	126	2.514
Mobil Barang	343.796	35518	12140	391.454
Sepeda Motor Solo	2.277.040	16992	48894	2.342.926
Sepeda Motor dgn Kereta Samping	994	585	504	2.083
Sepeda Motor Roda Tiga	223	1	45	269
Scooter	161.126	10225	6868	178.219
Trail	19.421	10174	6666	36.261
Lain-lain	500	202	317	1.019
Sepeda Motor	2.479.304	38179	63294	2.580.777
Mobil Pemadam Kebakaran	214	142	332	688
Mobil Ambulance	406	165	885	1.456
Mobil Jenazah	111	102	86	299
Fork Lift	46	50	45	141
Lain-lain	26	45	23	94
Kendaraan Khusus	805	505	1371	2.681
JUMLAH	3.171.115	97.403	94.307	3.362.825

Sumber: Dishub Kota Balikpapan, 2022

Adapun mengenai penyelenggaraan angkutan, jumlah angkutan kota di Kota Balikpapan mengalami penurunan dari 1.807 unit pada tahun 2016 menjadi 782 unit, hal ini seiring dengan rencana peremajaan angkutan kota dan penyelenggaraan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan meskipun jumlah koridor SAUM dari tahun 2017 hingga tahun 2021 belum mengalami penambahan yaitu berjumlah 1 koridor yang melayani jalur Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal Batu Ampar. Berkurangnya jumlah angkutan kota dan belum tersedianya SAUM yang belum

optimal mengakibatkan rasio angkutan kota terhadap jumlah kendaraan semakin menurun dari 0,31% pada tahun 2017 menjadi 0,07% pada tahun 2021.

Tabel 2.76 Perbandingan Angkutan Kota terhadap Jumlah Kendaraan Tahun 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Angkutan Kota	1.755	1.754	1.215	782	509
Jumlah Kendaraan	572.976	588.911	610.819	637.531	700.476
Rasio Angkutan Kota terhadap Jumlah Kendaraan	0,31%	0,30%	0,20%	0,12%	0,07%

Sumber: Dishub Kota Balikpapan, 2022

Pengembangan SAUM ini berfungsi untuk mendukung tujuan 11 sasaran 2 SDGs yaitu menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua. Perencanaan Koridor SAUM masih bersinggungan dengan rute angkutan kota yang menyebabkan akan terjadinya konflik kepentingan dan kondisi jalan di Kota Balikpapan yang curam dan kurang lebar juga menyebabkan sulitnya pengembangan moda transportasi publik.

Sama halnya dengan penyelenggaraan angkutan, penyelenggarana perlengkapan dan prasaran jalan juga tidak mengalami penambahan yang signifikan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 seperti jumlah ATCS dan panjang jalur sepeda. Hal ini perlu diperkuat untuk beberapa tahun ke depan untuk mengantisipasi kepadatan lalu-lintas di Kota Balikpapan dan mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman Dihuni dan sebagai *Smart City*.

Tabel 2.77 Jumlah Fasilitas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Angkutan Kota	1.755	1.754	1.215	782	509
Jumlah Koridor SAUM	1 (Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal Batu Ampar)	1 (Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal Batu Ampar)	1 (Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal Batu Ampar)	1 (Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal Batu Ampar)	1 (Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal Batu Ampar)
Jumlah Halte SAUM	14	14	14	14	14
Jumlah Rambu	2.306	2.447	3.229	3.848	12.281
Jumlah ATCS	15	15	15	15	14
Panjang Jalur Sepeda	4.500	4.500	4.500	5.000	11.000

Sumber: Dishub Kota Balikpapan, 2022

Sementara data kecelakaan tidak ditampilkan mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi kejadian kecelakaan, seperti kondisi kendaraan, kondisi jalan, perilaku dan kondisi pengendara sehingga tidak dapat dijustifikasi menjadi kinerja urusan perhubungan.

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan

pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari sub urusan informasi dan komunikasi publik serta aplikasi infomatika.

Untuk penyelenggaraan sub urusan informasi dan komunikasi public dapat digambarkan melalui kinerja penyelenggaraan saluran informasi Pemerintah Kota Balikpapan sebagai alat deseminasi konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah. Saat ini sudah memiliki saluran informasi yang resmi yaitu melalui portal http://balikpapan.go.id. Selain itu berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan juga mempunyai berbagai saluran informasi melalui website instansi masing-masing. Selain portal resmi, Pemerintah Kota Balikpapan juga memiliki beberapa saluran informasi lainnya berupa media sosial untuk membangun interaksi bersama warganya. Media sosial tersebut yaitu, Fanpage Facebook http://www.facebook.com/pemkotbpn, instagram pemkot_balikpapan, twitter @PemkotBPN, layanan SMS dan Whatsapp 08115440542 dan Aplikasi berbasis andorid *Digital Government* Info Balikpapan.

Tabel 2.78 Data Menara Telekomunikasi Kota Balikpapan Tahun 2017-2020

No	Penyedia Menara	Jumlah Menara Telekomunikasi			
		2018	2019	2020	2021
1	PT. Telkomsel	54	112	112	101
2	PT. Indosat	46	46	46	26
3	PT. Xl Axiata	14	19	14	6
4	PT. Protelindo	82	82	82	95
5	PT. Centratama Menara Indonesia	11	13	13	22
6	PT. Dayamitra Telekomunikasi	42	51	51	70
7	PT. Hutcison 3 Indonesia	17	18	18	18
8	PT. Inti Bangun Sejahtera	1	7	7	7
9	PT. Solusi Tunas Pratama	24	33	33	33
10	PT. Tower Bersama Grup	59	73	73	74
11	PT. Anugrah Comunication	3	4	4	4
12	PT. Komet Infra Nusantara	6	6	6	3
13	PT. Persada Sokka Tama	1	1	1	1
JUMLAH		344	360	460	460

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

Selain media sosial, Pemerintah Kota Balikpapan juga memiliki Balikpapan 112, yaitu sebuah nomor tunggal panggilan darurat yang dapat dimanfaatkan oleh warga saat terjadi keadaan darurat, seperti kebakaran,

bantuan evakuasi medis, dan tindakan kejahatan. Adanya saluran informasi ini berpengaruh pada meningkatnya respon pemerintah Kota Balikpapan atas pengaduan masyakat dari 80% pada tahun 2017 menjadi 100% pada tahun 2021.

Tabel 2.79 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase cakupan Pengawasan Infrastruktur telekomunikasi	%	80%	85%	90%	83%	100%
Persentase Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah	%	90%	90%	90%	84%	95%
Persentase Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat	%	80%	80%	80%	94%	100%

Sumber: Dinas Kominfo, 2022

Terkait dengan pengawasan infrastruktur telekomunikasi, persentase cakupan pengawasan infrastruktur menunjukkan peningkatan dari 80% pada tahun 2017 menjadi 100% pada tahun 2021. Jumlah menara telekomunikasi di Kota Balikpapan pada tahun 2017 sebanyak 344 menara dari 10 perusahaan penyedia menjadi menjadi 460 menara pada tahun 2021 dari 13 perusahaan penyedia. Meskipun jumlahnya terus meningkat namun masih belum diketahui berapa kebutuhan ideal menara di Kota Balikpapan dikarenakan belum adanya kajian.

Untuk penyelenggaraan sub urusan aplikasi informatika dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan. Hingga saat ini 90% OPD telah memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah. Selain itu 80% layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan/atau terintegrasi. Hal ini perlu terus ditingkatkan mengingat kebutuhan sebagai *Smart City* untuk peningkatan pelayanan serta perkembangan informasi teknologi yang kian pesat. Pembangunan berbasis *Smart City* menyediakan ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, masyarakat, pelaku bisnis, dunia pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) lain.

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi aktif di Kota Balikpapan pada tahun 2017 sebanyak 446 unit, mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 435 unit. Kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai 494 unit pada tahun 2021

Tabel 2.80 Jumlah Koperasi Aktif Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	Tahun

		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Koperasi	Unit	436	435	438	478	494

Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2022

Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Balikpapan mengalami trend kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 hanya berjumlah 1.035 usaha, meningkat pesat menjadi 47.054 usaha di tahun 2020. Kecamatan Balikpapan Selatan menjadi kecamatan dengan jumlah UMKM terbanyak yaitu 9.980 usaha. Kemudian Kecamatan Balikpapan Utara dengan 9.343 usaha. Lalu disusul oleh Kecamatan Tengah dengan 7.430 usaha.

Tabel 2.81 Jumlah UMKM di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Kecamatan	UMKM				
	2017	2018	2019	2020	2021
Balikpapan Selatan	230	373	407	1337	9.980
Balikpapan Kota	63	125	162	68	6.163
Balikpapan Timur	36	247	206	386	7.249
Balikpapan Utara	362	169	206	2194	9.343
Balikpapan Tengah	273	223	271	563	7.430
Balikpapan Barat	71	80	195	141	6.889
TOTAL	1.035	1.217	1.447	4.689	47.054

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021, DKUMKMP Kota Balikpapan, 2022

Jumlah unit usaha yang mengalami trend kenaikan, sejalan dengan jumlah tenaga kerja yang terserap dan jumlah omsetnya. Pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja UMKM sebanyak 1.897 orang, jumlahnya terus mengalami peningkatan menjadi 97.549 orang pada tahun 2020.

Tabel 2.82 Perkembangan UMKM Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Unit Usaha					
Mikro	803	900	1.398	19.812	47.054
Kecil	232	174	22	2961	0
Menengah	0	0	0	272	0
Jumlah	1.035	1.074	1.420	23.045	47.054
Tenaga Kerja (orang)					
Mikro	1.405	2.148	2.746	N/A	97.549
Kecil	492	0	44	N/A	0
Menengah	0	0	0	N/A	0
Jumlah	1.897	2.148	2.790	0	97.549
Omzet (Rp Juta)					
Mikro	8.106	0	60.064	N/A	758972
Kecil	24.026	0	13.774	N/A	0
Menengah	0	0	0	N/A	0
Jumlah	32.132	0	73.838	0	758.972

Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2022

Upaya promosi produk UMKM melalui kerja sama dengan perusahaan, toko swalayan, ataupun retail modern lainnya mengalami trend kenaikan pada tahun 2017 hingga 2021. Dimana pada tahun 2017 hanya sebanyak 125 UMKM yang bermitra, naik menjadi 180 UMKM pada tahun 2021. Dari sisi akses pinjaman permodalan bagi UMKM di Kota Balikpapan, presentase kredit di perbankan mengalami trend penurunan di tahun 2019 hingga 2021. Berikut merupakan tabel capaian kinerja urusan Koperasi UMKM tahun 2017-2021.

Tabel 2.83 Capaian Kinerja Urusan Koperasi UMKM 2017-2021

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan	UMKM	125	135	150	170	180
Persentase Jumlah Koperasi aktif	Persen	80	80	84,19	87,86	81,79
Persentase kredit UMKM di Bank	Persen	36,41	37,80	36,74	31,56	29,72
Jumlah Pengurus/pengawas/pengelola Koperasi bersertifikat	Orang	66	100	60	60	150

Sumber: DKUMKMP Tahun 2022

Adapun upaya peningkatan kualitas KUMKM ini sejalan dengan tujuan SDGs. Dalam SDGs tujuan ke 8 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, terdapat sasaran menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

2.3.2.12 Penanaman Modal

Pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur berdampak pada semakin luasnya lingkup pelayanan jasa Kota Balikpapan kedepannya. Selain itu, insensitas yang tinggi dari berbagai pertemuan, pameran dan konferensi baik skala regional, nasional maupun internasional menjadikan Kota Balikpapan dikenal sebagai Kota MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*) yang memperkuat peran dan fungsi Kota Balikpapan sebagai kota terkemuka. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Kota Balikpapan.

Oleh karenanya diperlukan penguatan daya saing investasi daerah yang didukung oleh faktor-faktor kunci daya saing investasi yaitu sumber daya manusia yang berdaya saing dengan makna ketersediaan tenaga kerja baik dari sisi kuantitas maupun kualitas tenaga kerja, infrastruktur yang berkualitas dan didukung oleh teknologi yang mampu mengurangi biaya faktor-faktor produksi.

Jika melihat realisasi investasi di Kota Balikpapan hingga sejauh ini sudah cukup baik. Investasi dari modal dalam negeri dan modal asing walaupun setiap tahunnya mengalami fluktuasi angka, akan tetapi jumlahnya cukup banyak dengan penyerapan tenaga yang juga cukup besar. Pada tahun 2017 investasi dari modal dalam negeri hanya sebesar Rp 16,03 Miliar, kemudian terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 hingga mencapai Rp 16,77 Triliun pada tahun 2021. Sementara investasi dari modal asing juga tidak kalah dengan modal dalam negeri. Pada tahun 2017 jumlah penanaman modal asing sebanyak Rp 2,28 Triliun dan mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, namun kembali meningkat di tahun 2021 dengan realisasi investasi modal asing sebesar Rp 2,82 Triliun.

Tabel 2.84 Realisasi Investasi Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Penanaman Modal Dalam Negeri (miliar rupiah)	16,03	26,71	2.500,51	13.849,41	16.773,02
Penanaman Modal Asing (miliar rupiah)	2.284,44	865, 60	374,61	519,75	2.820,49
Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia	538	760	2.469	7.023	3.052
Penyerapan Tenaga Kerja Asing	29	21	31	56	15

Sumber: DPMPT Kota Balikpapan Tahun 2022

Jika dijabarkan menurut sektor usahanya, sektor kontruksi menjadi yang paling berkontribusi terhadap investasi di Kota Balikpapan. Selama periode tahun 2017-2021, realisasi investasi sektor industri kimia dan farmasi yang berkontribusi sebesar Rp 21,149 Triliun, kemudian diikuti sektor kontruksi yang mencapai Rp 8,1 Triliun. Lalu selanjutnya adalah sektor industri makanan yang berkontribusi sebesar Rp 3,167 Triliun, dibawah sektor ini terdapat sektor pertambangan dengan realisasi investasi sebesar Rp 2,989 Triliun. Berikut adalah rincian realisasi investasi dari setiap sektor usaha periode tahun 2017-2021:

Tabel 2.85 Realisasi Investasi Menurut Sektor Usaha Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 (juta rupiah)

Sektor Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	Total (2017-2021)
Pertambangan	2.068.797,86	2.196,26	430.117,50	452.393,38	35.803,70	2.989.308,70
Listrik, Gas dan Air	-	-	107.930,00	6.032,72	8.120,40	122.083,12
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	14.389,40	7.211,84	132.795,20	19.225,30	582.864,00	756.485,74
Perdagangan dan Reparasi	38.112,46	32.796,04	190.848,80	186.669,30	133.460,00	581.886,60
Industri Makanan	1.242,18	472.546,98	29.337,00	193.597,26	2.471.040,80	3.167.764,22
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-	75,04	-	-	2.946,30	3.021,34
Industri Kertas dan Percetakan	-	-	-	-	5,00	5,00
Hotel dan Restoran	3.350,70	672,94	24.318,80	6.379,56	15.566,60	50.288,60
Jasa Lainnya	273,36	2.211,64	406.680,40	356.010,38	452.318,40	1.217.494,18
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	505,06	64.160,42	192.267,50	398.252,78	1.482.746,80	2.137.932,56
Kehutanan	-	-	-	-	60,80	60,80
Konstruksi	-	1.216.254,84	1.170.531,50	5.669.960,30	44.821,90	8.101.568,54
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	-	3.392,88	11.500,50	51.130,08	15.856,60	81.880,06
Industri Kayu	-	7.801,20	14.000,00	56.933,50	147.689,00	226.423,70
Industri Lainnya	-	-	177,00	-	9,60	186,60
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	-	-	-	8.980,16	369,50	9.349,66
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	-	-	-	324,00	2,90	326,90
Industri Kimia dan Farmasi	-	-	-	6.963.271,80	14.186.322,40	21.149.594,20
Industri Mineral Non Logam	-	-	-	-	13.500,60	13.500,60

Sumber: DPMPT Kota Balikpapan Tahun 2022

Fluktuasi realisasi investasi di Kota Balikpapan saling berkorelasi dengan pengelolaan perizinan yang diterapkan. Semakin baik pengelolaan perizinan tentu saja akan berkorelasi positif dengan peningkatan investasi. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana pengelolaan perizinan dilakukan seperti jumlah tingkat kepatuhan perizinan penanaman modal, persentase jumlah pelayanan perizinan yang terintegrasi secara online, persentase peningkatan jumlah LKPM PMA dan PMDN yang diterima, dan persentase penyelesaian masalah penanaman modal dan perizinan.

Untuk indikator jumlah tingkat kepatuhan perizinan penanaman modal dihitung melalui jumlah unit usaha yang melaporkan kegiatan usahanya melalui

platform lkpmonline.go.id. Pada tahun 2016, jumlah unit usaha yang melaporkan kegiatan usahanya sebanyak 143 usaha. Angka ini mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 175 usaha. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 151 usaha, namun pada tahun selanjutnya angka ini terus meningkat hingga mencapai 1.241 usaha pada tahun 2020. Grafik peningkatan ini menunjukkan tingkat kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan usahanya semakin meningkat setiap tahunnya.

Selain itu upaya untuk melakukan reformasi perizinan melalui digitalisasi perizinan secara online salah satu indikator yang digunakan adalah persentase jumlah pelayanan perizinan yang terintegrasi secara online. Pada tahun 2016, realisasi indikator ini masih berada diangka 12%. Angka ini meningkat menjadi 19% pada tahun 2017. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2020 mencapai 41,25%. Tren peningkatan realisasi indikator ini menunjukkan bahwa upaya reformasi perizinan sudah semakin baik.

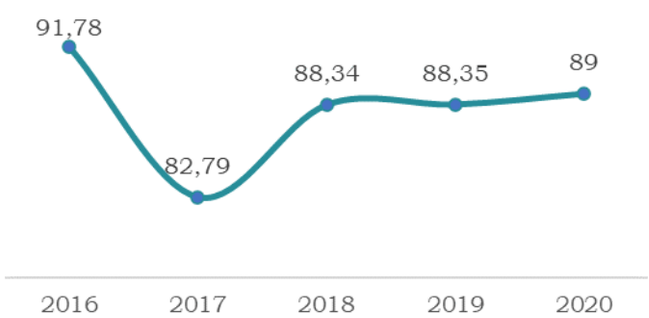
Indikator lainnya yang menunjukkan realisasi yang cukup baik adalah persentase penyelesaian masalah penanaman modal dan perizinan. Indikator ini memiliki realisasi yang konsisten di angka 100% yang berarti seluruh laporan terkait penanaman modal dan perizinan sudah ditindaklanjuti oleh *stakeholder* terkait.

Tabel 2.86 Capaian Kinerja Pengelolaan Perizinan Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Tingkat Kepatuhan Perizinan Penanaman Modal	143	175	151	315	1241	3450
Persentase Jumlah Pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara online	12%	19%	41,25%	41,25%	41.25%	67,50%
Persentase Peningkatan Jumlah LKPM PMA dan PMDN yang diterima	43,00%	22,38%	-13,71%	108,61%	192.7%	178%
Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal dan Perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tahun 2021

Walaupun dari segi pengelolaan perizinan sudah menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik, akan tetapi tingkat kepuasan masyarakat masih mengalami fluktuasi angka. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), pada tahun 2016 mencapai sebesar 91,78. Indikator SKM ini mengalami penurunan terendah di tahun 2017 menjadi 82,79 namun kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 89,06.



Gambar 2.69 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Urusan Penanaman Modal di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olah raga dari tahun 2016 hingga 2020 berdasarkan indikator jumlah pemuda berprestasi seperti Paskibraka, Pemuda Pelopor jumlahnya terus meningkat, namun peningkatannya masih belum

signifikan setiap tahunnya. Salah satunya diakibatkan modernisasi yang merubah perilaku sehingga cenderung menghambat prestasi pemuda. Oleh karena itu, perlu adanya arahan pemanfaatan teknologi informasi ke arah yang positif dengan mengangkat kearifan lokal Kota Balikpapan melalui berbagai aplikasi.

Di Kota Balikpapan belum tersedia regulasi turunan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Disisi lain, implementasi Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan masih belum efektif. Adanya pandemi covid-19 mengakibatkan pengangguran pemuda di Kota Balikpapan meningkat. Sektor ekonomi kreatif yang dominan diisi oleh pemuda menjadi terkendala sehingga berjalan lambat, oleh karena itu banyak pemuda beralih usaha ke sektor lainnya yang lebih diminati di masa pandemi covid-19.

Berdasarkan tujuan ke 8 SDGs tentang meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, terdapat sasaran pada tahun 2030 yakni mencapai pekerjaan tetap dan produktif serta layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menciptakan kesempatan kerja terutama bagi pemuda untuk mengatasi tingkat pengangguran pemuda yang masih tinggi. Di tengah keterbatasan tersebut, pemuda Balikpapan masih menunjukkan prestasi dalam berbagai event dan bidang.

Di samping itu, jumlah atlet berprestasi terus mengalami penurunan pada tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018 jumlahnya sebanyak 668 orang, angka ini terus mengalami penurunan hingga hanya 25 orang pada tahun 2020 seiring menurunnya event olahraga di masa pandemi covid-19. Seiring dengan berlakunya era *new normal*, jumlah atlet berprestasi kembali mengalami peningkatan menjadi 343 orang. Prestasi atlet lokal diharapkan dapat mencapai level nasional atau internasional, yang perlu diimbangi pula dengan ketersediaan pelatih dari segi kualitas maupun kuantitas. Presentase ketersediaan sarana prasarana olahraga mengalami trend fluktuatif dari tahun ke tahun hingga mencapai 91,00% di tahun 2021. Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olah raga pada tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.87 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 2017-2021

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Peningkatan jumlah pemuda berprestasi	Orang	48	53	57	31	48
Jumlah atlet berprestasi	Orang	0	668	566	25	343
Peningkatan prestasi olahraga	Medali	55	516	1.643	25	365
Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana olah raga	Persen	91,02	91,07	91,04	91,12	91,00

Sumber: DPOP Kota Balikpapan, Tahun 2022

2.3.2.14 Statistik

Statistik berkualitas dan dapat diandalkan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perumusan suatu kebijakan. Data statistik tersebut harus terdokumentasi secara memadai yang selanjutnya dapat diolah menjadi informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data tersebut harus memenuhi kriteria antara lain akurat, dapat dipercaya, lengkap, dapat diakses, tersedia tepat waktu dan mudah dimengerti. Dokumen-dokumen statistik ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan, diantaranya PDRB, IPM, Suseda, KBDA, Indeks Gini Rasio, Input Output, IKM dan IHK. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ketersediaan dokumen statistik di Kota Balikpapan selama kurun waktu tahun 2017-2021.

Tabel 2.88 Ketersediaan Dokumen Statistik di Kota Balikpapan 2017 – 2021

No	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
1	PDRB	√		√		√		√		√	
2	IPM	√		√		√		√		√	
3	Suseda	√		√		√		√		√	
4	KBDA	√		√		√		√		√	
5	Indeks Gini Rasio	√		√		√		√		√	
6	Input Output		√		√		√		√		√
7	IKM	√		√		√		√		√	

Sumber: Bappedalitbang Kota Balikpapan Tahun 2022

Pada tujuan 17 SDGs tentang penguatan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan terdapat sasaran yang berkaitan dengan urusan statistik yaitu pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. Sasaran RPJMN terkait dengan sasaran tersebut yaitu meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.

2.3.2.15 Persandian

Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi. Pada tahun 2019 melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan sertifikat elektronik bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi (BSSN) untuk menyelenggarakan tanda tangan digital sebagai

pengaman kerawanan dalam transaksi elektronik untuk aplikasi *e-office* serta pada pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain sertifikat elektronik juga dilakukan pengelolaan dan perlakukan terhadap informasi yang dikecualikan milik Perangkat Daerah yang bekerjasama dengan BSSN.

Tabel 2.89 Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase OPD yang melakukan pengamanan informasi	%	-	25	50	61	65
Jumlah OPD yang telah dilakukan sistem pengamanan informasi	OPD	-	10	15	22	22

Sumber: Dinas Kominfo, 2022

Hal ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Nomor 188.45-39/2019 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kota Balikpapan, terdapat 59 jenis informasi yang dikecualikan Pemerintah Kota Balikpapan. Selain itu kegiatan persandian di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dilakukan melalui kontra penginderaan yang bertujuan untuk pengamanan sinyal pada beberapa kegiatan penting atau bersifat terbatas.

Sampai dengan tahun 2021, OPD yang melakukan pengamanan informasi hanya sebanyak 65% meskipun meningkat dari tahun 2018 sebesar 25%. Pada tahun 2020 baru 19 OPD termasuk seluruh kecamatan yang sudah melakukan pengaman informasi yaitu:

1. Seluruh Kecamatan
2. Bagian Administrasi Pembangunan Setdakot, Bagian Perekonomian Setdakot, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Umum dan Perlengkapan, Bagian Organisasi, Bagian Hukum
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Bappeda Litbang
5. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah
7. Dinas Perhubungan
8. Dinas Ketenagakerjaan
9. Dinas Kesehatan
10. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
13. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
16. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
17. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
18. Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu
19. RSUD Beriman

2.3.2.16 Kebudayaan

Balikpapan adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Sebagai pusat bisnis dan industri, kota ini memiliki perekonomian terbesar di seluruh Kalimantan, Balikpapan berawal dari sebuah perkampungan nelayan di tepi Selat Makassar pada abad ke-19. Pengeboran pertama sumur minyak di kota ini dimulai pada 10 Februari 1897. Pada tahun 1907, Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) mendirikan kantor di kota ini, yang kemudian diikuti oleh masuknya investasi dari berbagai perusahaan multinasional. Perekonomian kota yang tumbuh sangat pesat memancing banyak pendatang dan ekspatriat ke Kota Balikpapan. Saat ini, Balikpapan telah menjadi kota besar yang multi-etnis, sampai dengan saat ini terdapat 188 paguyuban berada di Kota Balikpapan,

Pengelolaan urusan kebudayaan dapat diukur melalui dua indikator yaitu Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya, dan keagamaan, serta Cagar budaya yang dilindungi. Adapun realisasi indikator prestasi di bidang seni, budaya, dan keagamaan pada 6 kegiatan pada tahun 2017-2019. Realisasi indikator prestasi tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi hanya 2 kegiatan saja yang dapat dilaksanakan karena kondisi pandemi covid-19. Pada tahun 2021, realisasi indikator ini kembali mencapai 6 kegiatan.

Tabel 2.90 Prestasi di Bidang Seni, Budaya, dan Keagamaan

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya, dan keagamaan	Kegiatan	6	6	6	2	6

Sumber:Disdikbud Kota Balikpapan, 2021

Indikator selanjutnya adalah cagar budaya yang dilindungi. Realisasi indikator ini menunjukkan adanya tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 terdapat 100 lokasi cagar budaya yang dilindungi. Realisasi ini terus mengalami peningkatan hingga menjadi 144 lokasi pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021, dikarenakan terdampak pembangunan proyek *Refinery Development Master Plan* (RDMP), jumlah cagar budaya yang dilindungi mengalami penurunan menjadi 126 lokasi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah tidak semua cagar budaya lokasinya berada di lahan pemerintah, terdapat lokasi cagar budaya yang masuk kewenangan perusahaan, TNI/Polri, serta Pertamina sehingga sulit melakukan elaborasi dan promosi. Masalah lainnya yang dihadapi adalah anggaran kegiatan promosi cagar budaya belum maksimal karena terkendala wabah Covid-19. Upaya pelestarian cagar budaya telah dilakukan, namun pada tahun 2020 pandemi Covid-19 telah menimbulkan kendala untuk memaksimalkan pembangunan sarana dan prasarana cagar budaya pada tahun 2021.

Tabel 2.91 Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cagar budaya yang dilindungi	Lokasi	100	119	129	144	126

Sumber: Disdikbud Kota Balikpapan, 2021

2.3.2.17 Perpustakaan

Indikator efektivitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Berbagai upaya dan inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan adalah peningkatan jumlah koleksi buku, baik manual maupun elektronik, penyediaan permainan edukatif, penyediaan sarana prasarana yang nyaman bagi pengunjung, mobil perpustakaan keliling dan planning gallery. Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami tren penurunan sejak tahun 2018. Pada tahun 2017 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 202.263 orang. Sejak tahun 2018 sampai tahun 2021, terjadi penurunan jumlah kunjungan perpustakaan hingga menjadi 14.782 orang pada tahun 2021.

Penurunan drastis jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2019 disebabkan karena perpustakaan pernah 1 bulan penuh tidak beroperasi karena sedang melakukan pengelolaan buku. Selain itu kondisi pandemi covid yang terjadi pada tahun 2020 juga semakin mengurangi jumlah kunjungan ke perpustakaan. Terkait dengan hal tersebut perlu dilakukan upaya dan inovasi dalam meningkatkan kembali jumlah kunjungan baik secara langsung maupun online.

Selain penurunan jumlah kunjungan perpustakaan, penambahan jumlah anggota perpustakaan juga mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 penambahan jumlah anggota sebanyak 5.819 orang. Lalu pada tahun 2018 jumlah menurun menjadi 3.440 orang. Hingga tahun 2021 penambahan jumlah anggota hanya sebanyak 1.611 orang.

Semakin berkurangnya penambahan jumlah anggota ini disebabkan karena pengembangan fasilitas maupun sarana prasarana perpustakaan masih belum optimal. Hal ini menurunkan minat masyarakat untuk datang langsung ke perpustakaan. Ketersediaan ruang untuk pendayagunaan perpustakaan masih belum sesuai kebutuhan.

Indikator lainnya yaitu penambahan jumlah judul koleksi bahan pustaka juga menunjukkan terjadi penurunan yang signifikan. Pada tahun 2017, penambahan jumlah koleksi bahan pustaka mencapai 2.243. Walaupun sempat terjadi kenaikan penambahan koleksi menjadi 3.772 di tahun 2018, realisasi indikator ini kembali mengalami penurunan menjadi 442 tambahan koleksi bahan pustaka. Pada tahun 2020 hingga 2021, angka ini kembali meningkat menjadi masing-masing 1.075 dan 1.090 penambahan judul koleksi bahan pustaka.

Adapun terkait dengan pembinaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip juga memiliki program pembinaan terhadap perpustakaan dan taman baca yang ada di Kota Balikpapan. Pada tahun 2017, jumlah perpustakaan/taman baca yang telah dibina sebanyak 241. Sempat terjadi penurunan pada tahun 2018 menjadi 196, akan tetapi indikator ini terus mengalami peningkatan hingga menjadi 350 pada tahun 2021.

Secara keseluruhan, kinerja urusan perpustakaan mengalami tren penurunan capaian kinerja, walaupun di beberapa aspek seperti jumlah binaan perpustakaan mengalami peningkatan. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM perpustakaan berpengaruh terhadap keseluruhan urusan perpustakaan. Merujuk pada standar nasional yaitu Peraturan Kepala Perpustakaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota, per 75 ribu penduduk membutuhkan minimal 1 pustakawan. Dan saat ini jumlah pustakawan hanya 2 orang. Idealnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Balikpapan memiliki 10 pustakawan.

Dengan kondisi keterbatasan SDM ini menyulitkan untuk melaksanakan beberapa program yang telah direncanakan. Selain terkait kuantitas, kualitas pustakawan juga masih perlu untuk ditingkatkan. Bimbingan teknis kepada pustakawan maupun pengelola perpustakaan lainnya belum pernah dilaksanakan selama tahun 2017-2021. Hal ini bisa dilihat dari capaian pelaksanaan bimtek yang masih belum ada hingga saat ini. Capaian kinerja urusan perpustakaan pada tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.92 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kunjungan Perpustakaan	Orang	202.263	134.566	98.192	21.744	14.782
Jumlah Penambahan Anggota Perpustakaan	Orang	5.819	3.440	3.310	2.104	1.611
Penambahan Jumlah Judul Koleksi Bahan Pustaka	Judul	2.243	3.772	442	1.075	1.090
Jumlah Perpustakaan/Taman Baca yang Telah Dibina	Unit	229	239	254	264	350

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2022

2.3.2.18 Kearsipan

Selain mengelola urusan arsip daerah, fungsi lainnya dari urusan kearsipan adalah menguatkan tata kelola arsip untuk semua OPD yang ada. Oleh karenanya fungsi kearsipan yang melekat pada Dinas Perpustakaan dan Arsip juga mengemban tugas untuk meningkatkan pengelolaan arsip bagi semua OPD. Untuk mengukur sejauh mana penguatan tata kelola terdapat dua indikator kinerja yaitu Persentase Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan SIKD dan Persentase Perangkat Daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata.

Adapun di Kota Balikpapan, implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dimulai sejak tahun 2018. pada tahun 2018 jumlah OPD yang

mengimplementasikan SIKD sebanyak 7 OPD dari total 36 OPD. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2019 semua OPD telah mengimplementasikan SIKD. Sedangkan untuk indikator persentase perangkat daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata mengalami fluktuasi angka. Pada tahun 2017, realisasi indikator ini sebesar 14,35%. Lalu menurun menjadi 10% pada tahun 2018. Hingga tahun 2021 realisasi indikator ini kemudian meningkat lagi menjadi 30%.

Tabel 2.93 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan SIKD	-	19,44%	100%	100%	75%
Persentase Perangkat Daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata	14,35%	10%	25%	25%	30%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2022

Walaupun kedua indikator telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik akan tetapi masih terdapat kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah belum optimalnya SDM pengelola arsip, terbatasnya SDM menyebabkan struktur, dan kelembagaan arsip yang belum memadai. Selain terkait dengan SDM, kendala lainnya adalah kurang memadainya fasilitas penunjang untuk pengembangan arsip. Gudang yang ada saat ini untuk penyimpanan arsip inaktif dan statis masih belum sesuai standar penyimpanan arsip. Upaya digitalisasi arsip juga masih belum dapat diterapkan dengan baik. Dalam peraturan Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Tahun 2020-2024, dicanangkan untuk melakukan pengembangan E-Arsip dan Big Data Kearsipan. Pengembangan aplikasi arsip sendiri belum menunjukkan ke arah yang baik karena penataan dan pendataan arsip belum memanfaatkan aplikasi. Fenomena kerja dari rumah bagi para pegawai karena pandemi virus covid-19 menjadi satu momentum penting agar semua OPD bekerja dengan pola virtual. Namun momentum ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena sistem informasi kearsipan yang dibangun masih bersifat parsial.

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Merujuk Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan

sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2017–2021 dapat terlihat pada tabel berikut. Capaian produksi perikanan tertinggi dicapai pada tahun 2019, yaitu sebesar 6.384,52 ton. Sementara capaian produksi perikanan terendah terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 4.242,54 ton. Dari sisi peningkatan produksi perikanan, pada tahun 2017 terjadi penurunan yang signifikan, tingkat produksi perikanan Kota Balikpapan sebesar –1.450,63 Ton. Selanjutnya, pada tahun 2018, jumlah produksi perikanan mengalami kenaikan menjadi 293,41 ton serta mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.849 ton. Walaupun sempat mengalami penurunan menjadi -1.700,86 ton pada tahun 2020, namun angka ini kembali mengalami peningkatan menjadi 764,05 ton pada tahun 2021.

Tabel 2.94 Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 – 2021

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah produksi perikanan	4.242,54	4.536,3	6.384,52	4.275,00	5.039
Jumlah produksi perikanan budidaya	411,54	391,3	266,92	275,00	486,24
Jumlah produksi perikanan tangkap	3.831,00	4.145,0	6.117,60	4.000,00	4.552,8
Jumlah peningkatan produksi perikanan (kenaikan)	-1450,63	293,41	1.849,27	-2.109,52	764,05

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan, 2022

2.3.3.2. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

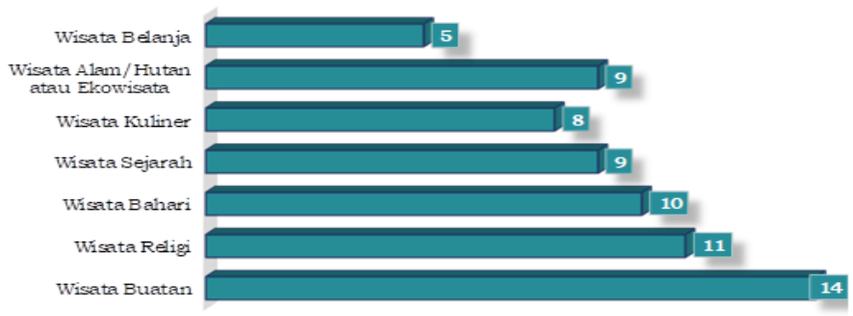
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Balikpapan mengalami tren peningkatan dari tahun 2016 hingga 2019, angka ini tercatat sebesar Rp 11,001 juta pada tahun 2016 menjadi Rp 14,024 juta di tahun 2019. Walaupun angka ini sempat mengalami penurunan menjadi Rp 11,930 juta pada tahun 2020, namun angka ini kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 12,151 juta pada tahun 2021. Hal ini ditunjang oleh peningkatan dari sub sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum serta kenaikan tarif retribusi.

Tabel 2.95 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Tahun	Kontribusi terhadap PDRB (miliar rupiah)
2017	12.597,91
2018	13.531,14
2019	14.024,64
2020	11.930,24
2021	12.151,89

Sumber : BPS, diolah, 2022

Kota Balikpapan memiliki 66 objek wisata pada tahun 2021. Merujuk Surat Keputusan MENPARPOSTEL No 98/PW.102/MPPT-87, objek wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.



Gambar 2.70 Jumlah Objek Wisata di Kota Balikpapan Menurut Jenisnya Tahun 2021
Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2022

Berdasarkan Grafik 2.74 dapat dilihat bahwa dari 66 objek wisata di Kota Balikpapan, 14 diantaranya adalah objek wisata buatan, 5 objek wisata belanja, 8 objek wisata kuliner, 11 objek wisata religi, 9 objek wisata alam/hutan atau ekowisata, 10 objek wisata bahari, dan 9 objek wisata sejarah. Berikut daftar objek wisata di Kota Balikpapan:

Tabel 2.96 Objek dan Nama Tempat Wisata di Kota Balikpapan

No	Objek Wisata	Nama Tempat Wisata
1	Wisata Alam/Hutan atau Ekowisata	1. Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) 2. Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) 3. Mangrove Center Graha Indah 4. Kebun Raya Balikpapan (KRB) 5. Mangrove Margo Mulyo 6. Kawasan Ekowisata Teluk Balikpapan 7. Ekosistem Mangrove Kariangau 8. Desa Wisata Teritip 9. Bambu Wanadesa
2	Wisata Buatan	1. Penangkaran Buaya Teritip 2. Carribean Island Waterpark Regency 3. Waterpark Griya Permata Asri Ringroad 4. Jembatan Ulin Kariangau 5. Kampung Atas Air Margasari 6. Kampung Warna-Warni Teluk Seribu 7. Aqua Boom 8. Taman Bekapai 9. Taman Tiga Generasi 10. Waduk Manggar 11. Kampoeng Kenangan Lamaru 12. Kampung Pinisi 13. Kampung Kangkung 14. Gifta Garden
3	Wisata Religi	1. Islamic Center 2. Mahavihara Budha Manggala Balikpapan 3. Masjid Jami' Al Ula 4. Masjid Agung At-Taqwa 5. Masjid Istiqomah 6. Klenteng Guang De Miao 7. Pondok Pesantren Hidayatullah 8. Vihara Eka Dharma Manggala 9. Vihara Buddha Maitreya 10. Masjid Ceng Ho 11. Gereja Katolik Santa Maria
4	Wisata Bahari	1. Pantai Manggar Segara Sari 2. Pantai Lamaru 3. Pantai Monpera 4. Pantai Kemala 5. Pantai Kilang Minyak Pertamina 6. Pantai Seraya (Sepinggan Raya) 7. Pantai Banua Patra 8. Pantai Nirmala Lamaru/SMACLY 9. Pantai Damba Enggang 10. Pantai Teluk Bayur

No	Objek Wisata	Nama Tempat Wisata
5	Wisata Bersejarah	1. Tugu Makam Jepang 2. Tugu Australia 3. Museum Kodam VI Mulawarman 4. Monumen Mathilda 5. Meriam Jepang 6. Rumah Dahor Heritage 7. Meriam Jepang Sidodadi 8. Tugu Peringatan Perdamaian Indonesia 9. Tugu Peringatan Demontrasi Rakyat Balikpapan Karang Anyer
6	Wisata Belanja	1. Pasar Inpres Kebun Sayur 2. Plaza Balikpapan 3. Balikpapan Super Block 4. Roti Tiam 5. Salak Kilo
7	Wisata Kuliner	1. Komplek Ruko Bandar 2. Melawai 3. Pasar Segar 4. Lapangan Merdeka 5. Taman Tiga Generasi 6. Taman Bekapai 7. Restoran Dandito 8. Restoran Kenari

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka, 2020

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan daerah Kota Balikpapan tahun 2016 – 2026 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 7 Tahun 2016, bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut Rippda Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan 2026. Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi: Destinasi pariwisata; Pemasaran pariwisata; Industri pariwisata; dan kelembagaan kepariwisataan. Visi pembangunan kepariwisataan daerah yaitu "Terwujudnya Daerah sebagai Tujuan Pariwisata Internasional dengan mengedepankan ekowisata, ekokultural, *MICE*, dan wisata transit bagi kesejahteraan masyarakat".

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Balikpapan cenderung mengalami kenaikan sejak tahun 2017–2019, pada tahun 2017 jumlah kunjungan ke Kota Balikpapan mengalami kenaikan 2.554.423 orang dan terus meningkat menjadi 2.802.058 pada tahun 2018 dan 2.917.514 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, karena dampak pandemi covid, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Balikpapan mengalami penurunan yang signifikan menjadi 1.082.273 orang. Seiring dengan berlangsungnya era *new normal* pada tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Balikpapan kembali mengalami kenaikan menjadi 1.449.320 orang.

Jumlah *event* pariwisata dan budaya Kota Balikpapan tahun 2017 – 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, 2020 dan 2021, jumlah *event* yang dapat diselenggarakan sebanyak 7 *event*. Sementara pada tahun 2017 1 *event* dan 5 *event* pada tahun 2018. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang dapat menyelenggarakan 8 *event*.

Upaya pengembangan destinasi pariwisata selain bertujuan untuk menarik jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Balikpapan juga menjadi sarana penyediaan ruang publik bagi penduduk Kota Balikpapan. Berdasarkan grafik pengembangan destinasi pariwisata di Kota Balikpapan, bahwa pengembangan destinasi pariwisata di Kota Balikpapan cenderung mengalami fluktuasi, hingga pada tahun 2021 terdapat 31 destinasi pariwisata yang dikembangkan.

Pengembangan destinasi pariwisata di Kota Balikpapan, bahwa pengembangan destinasi pariwisata di Kota Balikpapan cenderung mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 terdapat 28 destinasi pariwisata yang dikembangkan, kemudian pada tahun 2017 dan 2018 terdapat 1 destinasi yang dikembangkan. Pengembangan destinasi pariwisata terus mengalami peningkatan hingga mencapai 41 destinasi pada tahun 2020. Namun pengembangan destinasi pariwisata kembali mengalami penurunan menjadi 31 destinasi pada tahun 2021. Salah satu kendala dalam pengembangan destinasi pariwisata terutama di wilayah pantai yaitu adanya abrasi. Berdasarkan data dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan sejak tahun 2016 hingga 2021 telah terjadi abrasi sejauh 40 meter terutama di daerah Kelurahan Manggar, Manggar Baru, dan Sepinggan. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan yang serius agar abrasi tidak mempengaruhi destinasi pariwisata yang telah dikembangkan.

Merujuk tujuan 8 SDG's pengembangan destinasi pariwisata mendukung menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal pada tahun 2030. Selain itu, berdasarkan dokumen Roadmap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, secara spesifik terdapat 2 tujuan pembangunan berkelanjutan, yang menjadikan urusan pariwisata sebagai bagian dari strateginya. Pertama, tujuan 7 Energi Bersih dan Terbarukan. Kedua, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Tabel 2.97 Arah Strategi Pengembangan Pariwisata Berdasarkan SDG's

Tujuan	Arah Kebijakan	Strategi Tahun 2020-2024
Energi Bersih dan Terbarukan	Mendorong pemanfaatan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan energi final sektor transportasi, rumah tangga dan industri	Pengembangan klaster industri, kawasan ekonomi khusus dan kawasan pariwisata
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Percepatan transformasi struktural melalui modernisasi pertanian, reindustrialisasi, dan pemanfaatan sumber-sumber pertumbuhan baru	Meningkatkan konektivitas destinasi pariwisata dengan fokus pada MICE, pariwisata minat khusus, dan lintas batas pariwisata

Sumber: *Roadmap* SDG's Nasional, 2017

Terkait pengembangan destinasi objek wisata unggulan Kota Balikpapan pada tahun 2017 – 2021, terdapat 2 destinasi yang dikembangkan menjadi destinasi objek wisata unggulan pada tahun 2017. Selanjutnya menjadi 1 objek destinasi unggulan pada 2018. Kemudian mengalami kenaikan signifikan pada

tahun 2019 menjadi 10 objek destinasi wisata, hingga kembali mengalami penurunan menjadi 6 objek destinasi wisata pada tahun 2020 dan 2021.

Jumlah asosiasi yang bermitra adalah banyaknya asosiasi pengusaha pariwisata yang bermitra dengan Pemerintah Kota Balikpapan. Jumlah asosiasi pengusaha pariwisata yang bermitra dengan Pemerintah Kota Balikpapan mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2020, terdapat 9 asosiasi perusahaan yang bermitra dari sebelumnya 1 asosiasi pada tahun 2018. Namun angka ini mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 menjadi 8 asosiasi yang bermitra.

Tabel 2.98 Capaian Kinerja Sektor Pariwisata Tahun 2017 – 2021

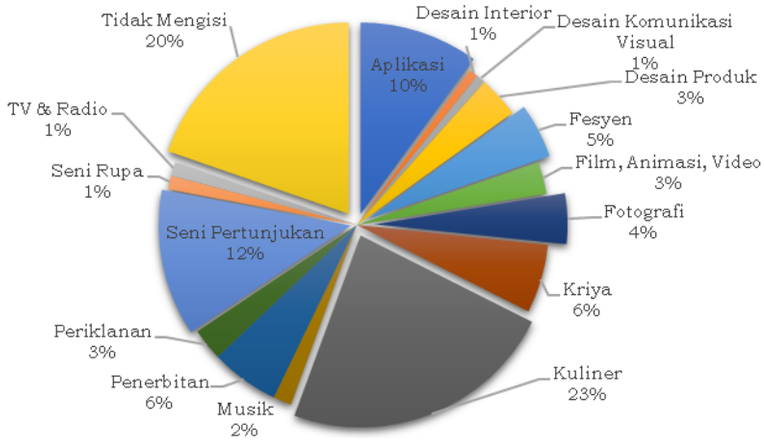
Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kunjungan wisatawan	2.554.423	2.802.058	2.917.514	1.082.273	1.449.320
Peningkatan event Pariwisata dan Budaya	1	5	8	7	7
Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	1	1	30	41	31
Meningkatnya potensi objek wisata unggulan di kota Balikpapan	2	1	10	6	6
Jumlah asosiasi yang bermitra	0	1	8	9	8

Sumber : DPOP Kota Balikpapan, 2022

Ekonomi Kreatif sebagai konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama mulai masuk di Kota Balikpapan ditandai dengan berdirinya Forum Ekonomi Kreatif / Balikpapan Creative Forum (BCF) pada tahun 2016, yang dilanjutkan dengan aktivasi 6 sub sektor ekonomi kreatif dan kolaborasi pentahelix aktor Academicians, Business, Community, Government, Media (ABCGM) pada tahun 2017 dan 2018. Eksistensi ekonomi kreatif ini dikukuhkan kembali dengan ditandatanganinya MoU antara Bekraf dan Pemerintah Kota Balikpapan serta BCF pada tahun 2019. Kota Balikpapan merupakan salah satu dari 10 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) di tahun 2019 dengan subsektor aplikasi dan games dan di tahun yang sama dilakukan peresmian Balikpapan Creative Center (BCC) di Gedung Parkir Klandasan sebagai wadah kolaborasi pelaku ekonomi kreatif untuk berkreasi.

Kota Balikpapan telah memiliki Dokumen Masterplan Pengembangan Ekraf 2021-2026 yang difasilitasi Kemenparekraf RI pada tahun 2021. Disamping itu, di tahun 2021 Kota Balikpapan menerima SK KaTa Kreatif Indonesia yang diserahkan secara langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka Fungsionalisasi 10 KaTa Kreatif Indonesia Tahun 2019 untuk Sub Sektor Aplikasi dan Pengembangan Permainan. Pemerintah Kota Balikpapan melakukan Reaktivasi Kepengurusan Forum Ekraf melalui Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 188.45-410/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Forum Ekonomi Kreatif Kota Balikpapan Masa Bakti 2021-2024 yang mana kepengurusannya dikukuhkan di awal tahun 2022, tepatnya tanggal 20 Januari 2022.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan bersama relawan ekonomi kreatif. Sub sektor ekonomi kreatif yang mendominasi responden di Kota Balikpapan antara lain: Kuliner, Seni Pertunjukan, dan Aplikasi yang tergambar sebagaimana grafik dibawah ini.



Gambar 2.71 Sub Sektor Ekonomi Kreatif Kota Balikpapan
Sumber: Bappeda Litbang (diolah, 2021)

2.3.3.3. Pertanian

Lahan pertanian di Kota Balikpapan relatif terbatas luas dan sebarannya. Selain itu, pertanian di Kota Balikpapan umumnya dilakukan dalam skala kecil. Kawasan yang masih mengusahakan pertanian cenderung terpusat di Kecamatan Balikpapan Timur, utamanya kelurahan Manggar, Lamaru, dan Teritip.

Tabel 2.99 Luas Panen Padi dan Palawija (Ha) di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Tahun	Padi Sawah	Padi Ladang	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kedelai	Kacang Hijau *Green Bean*
2017	97	40	137	190	217	23	22	-	-
2018	60	3	63	80	232	24	20	-	-
2019	38	1	39	96	257	-	-	-	-
2020	66	-	66	247	324	17,5	21	-	-
2021	72	-	72	148,4	272	14	10,2	-	-

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2022, BPS Kota Balikpapan

Berdasarkan Tabel 2.94 di atas, secara umum terjadi penurunan luas panen palawija dari tahun 2020 ke tahun 2021. Terkait dengan luas panen padi ladang, sejak tahun 2017 hingga 2021 mengalami trend penurunan. Pada tahun 2017, terdapat 40 hektar lahan untuk panen padi ladang, tetapi mengalami penurunan secara signifikan menjadi 3 hektar pada tahun 2018, hingga 0 hektar pada tahun 2021. Hal serupa juga terjadi bagi luas lahan panen padi sawah, luas tersebut mengalami penurunan menjadi 38 hektar pada tahun 2019 dari 60 hektar pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2020 dan 2021 luas lahan panen padi sawah mengalami peningkatan kembali masing-masing seluas 66 dan 72 hektar. Selama kurun waktu 2017 hingga 2021, luas lahan panen ubi kayu merupakan lahan yang terluas diantara komoditas lainnya.

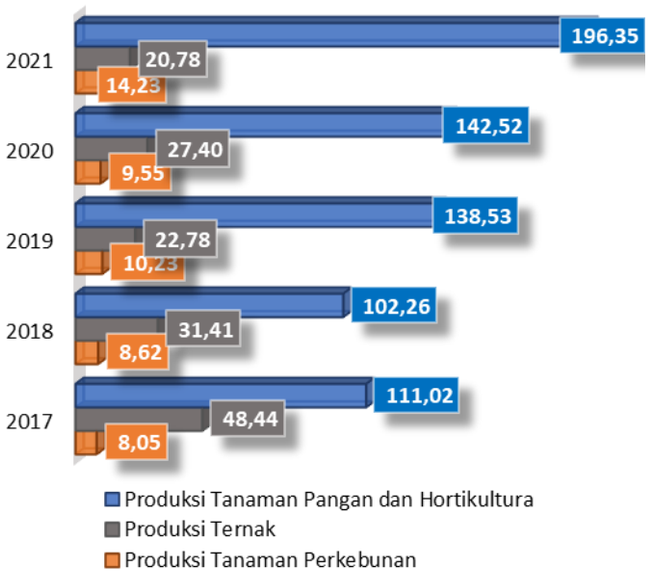
Tabel 2.100 Produksi Panen Padi dan Palawija (Ton) di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Tahun	Padi Sawah	Padi Ladang	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kedelai	Kacang Hijau *Green Bean*
2017	NA	NA	NA	448	8.834	360	315	-	-
2018	362,1	6	368	492	10.332	360	94	-	-

Tahun	Padi Sawah	Padi Ladang	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kedelai	Kacang Hijau *Green Bean*
2019	222,4	3	225,4	672	12.032	717	138	-	-
2020	358,5	-	358,5	1358	15.187	262,5	42	-	-
2021	398,4	-	398,4	735,6	12.085	210	20,4	-	-

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021, BPS Kota Balikpapan

Berdasarkan Tabel 2.94 dan 2.95, dari luas panen padi 72 hektar dihasilkan 398,4 ton padi di tahun 2021. Sementara dari luas panen jagung 148,4 hektar dan ubi kayu 272 hektar dihasilkan masing-masing 735,6 ton jagung dan 12.085 ton ubi kayu (jumlah panen terbanyak), sedangkan kacang tanah menjadi komoditas dengan hasil produksi paling sedikit yaitu 20,4 ton. Secara umum terjadi penurunan produksi palawija di tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun 2020. Terdapat, temuan menarik bahwa luas lahan panen yang meningkat pada tanaman padi memiliki hubungan yang positif dengan jumlah produksi panen, tetapi pada lahan kacang tanah justru mengalami penurunan. Hal ini dapat menjadi catatan, bahwa jenis tanah di Kota Balikpapan lebih tepat bagi komoditas ubi kayu.



Gambar 2.72 Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tanaman Perkebunan dan Ternak (Ribu Ton) di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Sumber: DP3 Kota Balikpapan, 2021

Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura dihitung dari realisasi produksi bidang pertanian untuk komoditi padi, palawija, sayuran dataran rendah dan buah-buahan tahun berjalan. Komoditas hortikultura yang dikembangkan antara lain meliputi kangkung, sawi, ketimun, terung, bayam, salak, pepaya, dan pisang. Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura mengalami penurunan pada tahun 2017 hingga 2018. Pada tahun 2019, jumlah produksi meningkat menjadi sebesar 138.525 ton, dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 196.346 ton pada tahun 2021.

Jumlah produksi tanaman perkebunan dihitung dari realisasi produksi bidang perkebunan untuk komoditi karet, kelapa dan lada tahun berjalan. Berdasarkan grafik kenaikan produksi tanaman perkebunan, terjadi peningkatan produksi tanaman perkebunan pada tahun 2017 hingga 2019. Namun, terjadi penurunan menjadi 9.547,99 ton pada tahun 2020, dan kembali mengalami peningkatan menjadi 14.235 ton pada tahun 2021.

Jumlah produksi ternak diperoleh dari realisasi produksi bidang peternakan untuk komoditi daging sapi, daging ayam dan telur tahun berjalan. Berdasarkan

grafik jumlah produksi ternak Kota Balikpapan sejak tahun 2017-2021 menunjukkan jumlah yang fluktuatif. Pada tahun 2017, jumlah produksi ternak adalah 48.439,32 ton. Pada tahun 2018 hingga tahun 2019 angka ini mengalami penurunan hingga mencapai 22.783,56 ton pada tahun 2019. Jumlah produksi ternak mengalami peningkatan menjadi 27.4040,56 ton pada tahun 2020. Namun, angka ini kembali mengalami penurunan menjadi 20.785 ton pada tahun 2021.

Merujuk capaian kinerja urusan pertanian Kota Balikpapan, terdapat tiga indikator yang dijadikan acuan antara lain: kenaikan produksi tanaman pangan dan hortikultura, kenaikan produksi tanaman perkebunan, dan kenaikan produksi ternak sebagai berikut.

Tabel 2.101 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2017 – 2021

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
Kenaikan produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)	-13.420,00	-8.755,00	36.265,00	-6.177,20	63.998,60
Kenaikan produksi tanaman perkebunan (ton)	2.039,33	575,65	1.604,97	-681,27	4.686,37
Kenaikan produksi ternak (ton)	1.153,58	-17.028,32	-8.627,44	4.619,44	-6.618,37

Sumber : DP3 Kota Balikpapan, 2021

2.3.3.4. Perdagangan

Sarana perdagangan di Kota Balikpapan berkembang pesat cukup. Pada tahun 2017 jumlah toko mencapai 209. Jumlahnya meningkat pada tahun 2018 menjadi 220 toko. Hingga akhir tahun 2019 jumlah toko mencapai 264. Namun, sampai dengan tahun 2021 jumlah toko mengalami penurunan menjadi 214 toko. Sementara untuk pasar rakyat perubahan jumlahnya tidak signifikan seperti minimarket. Tercatat hingga tahun 2021 jumlah pasar rakyat di Kota Balikpapan sebanyak 12 pasar. Adapun sarana perdagangan lainnya tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.102 Sarana Perdagangan di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Sarana Perdagangan	2017	2018	2019	2020	2021
Pasar	16	13	17	0	12
Toko	209	220	264	241	214
Kios	-	-	-	-	4.230
Warung	-	-	-	-	24
Jumlah	225	233	281	241	4.480

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2022, BPS Kota Balikpapan

Jumlah kios di 11 pasar rakyat yang ada di Kota Balikpapan sejumlah 4.239 kios. Dimana jumlah kios terbanyak terdapat di Pasar Sepinggan, yaitu sebanyak 828 kios. Sementara jumlah kios terendah di Pasar Rakyat KM.12 Karang Joang yaitu sebanyak 56 kios.

Tabel 2.103 Jumlah Kios dan Pedagang Kaki Lima di Kota Balikpapan Tahun 2021

Wilayah Pasar	Jumlah Kios	Jumlah PKL
Inpres Kebun Sayur	223	50
Penampungan A	265	-
Kampung Baru Tengah	332	-
Laok Besi dan Warung	72	-
Pasar Rakyat Km.12	56	-
Pandansari	781	108
Klandasan I	577	80
Klandasan II	577	-
Damai	294	20

Wilayah Pasar	Jumlah Kios	Jumlah PKL
Sepinggan	828	100
Tertip	234	80
Total	4.239	338

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021, BPS Kota Balikpapan

Pada tahun 2021, mini market dan toko tradisional di Kota Balikpapan yang belum memiliki izin paling banyak tersebar di Kecamatan Balikpapan Kota dan Balikpapan Selatan yaitu sebanyak 12 mini market/toko tradisional. Sementara itu, Kecamatan Balikpapan Timur menjadi daerah dengan mini market/toko yang tidak berizin paling sedikit, yaitu sebanyak 0 mini market/toko tradisional.

Adapun terkait dengan ekspor impor, realisasi ekspor yang melalui Kota Balikpapan tahun 2021 mencapai $7.356.143.316,03. Hal ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan pada tahun 2020 yang mencapai $2.934.541.516,32. Sementara itu, realisasi impor yang masuk ke Kota Balikpapan tahun 2021 mencapai $3.629.366.821,49 sedangkan pada tahun 2020 hanya sebesar $2.780.828.826,45. Perkembangan realisasi nilai produk ekspor dan impor di Kota Balikpapan Pada Tahun 2017-2021 tergambar pada tabel di bawah ini.



Gambar 2.73 Mini Market dan Toko Tradisional yang Belum Memiliki Izin Tahun 2020
Sumber: Dinas Perdagangan Tahun 2020

Tabel 2.104 Realisasi Ekspor dan Impor Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Ekspor ($)	Realisasi Impor ($)
2017	2.510.019.355,83	84.874.061,78
2018	2.780.087.611,87	5.342.734,65
2019	3.103.163.031,62	7.395.368,84
2020	2.934.541.516,32	2.780.828.826,45
2021	7.356.143.316,03	3.629.366.821,49

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Balikpapan 2022

Persentase pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar di tahun 2017 sebesar 79%. Kemudian di tahun 2018 hingga tahun 2020, angka ini mengalami penurunan menjadi 64,25%. Pada tahun 2021, angka ini mengalami peningkatan menjadi 66,3%. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan jumlah pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar dibagi dengan jumlah pelaku usaha yang diawasi.

Untuk pelaku usaha wajib tera yang melakukan tera/ tera ulang capaiannya mengalami trend kenaikan pada tahun 2017 hingga 2019. Namun mengalami penurunan yang signifikan menjadi 36,09% di tahun 2020. Hingga pada tahun 2021, capaian indikator ini kembali mengalami kenaikan menjadi 78,38%.

Terdapat 4 pasar yang telah diklasifikasikan ke Golongan A berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yaitu Pasar Klandasan I, Klandasan II, Pandansari dan Pasar Inpres Kebun

Sayur. Di tahun 2020 capaian indikator kinerja Persentase pasar berklasifikasi A menurun menjadi 33,3% dari tahun sebelumnya yang mencapai 36%, angka ini tidak mengalami perubahan hingga tahun 2021. Nilai pasar terhadap penilaian adipura pada kurun waktu 2017 hingga 2021 masih stagnan di 72,15. Capaian kinerja urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.105 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kota Balikpapan 2017 – 2021

Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan unit usaha dagang	Unit usaha	248	248	248	230	214
Persentase pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar	%	79	66	64,96	64,25	66,3
Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	%	66,12	66,56	70,73	36,09	78,38
Persentase pasar berklasifikasi A	%	36	36	36	33,30	33,3
Nilai ekspor bersih	US$ Juta	2.510,10	2.780,12	3103,16	2.937,12	3.726,78
Nilai pasar terhadap penilaian adipura	Nilai	72,15	72,15	72,15	72,15	72,15

Sumber: Dinas Perdagangan Tahun 2022

2.3.3.5. Perindustrian

Jumlah usaha yang mendapat sertifikasi kompetensi dan kualifikasi perusahaan di Kota Balikpapan menjadi penting untuk melihat sejauh mana kualitas iklim usaha yang telah terbentuk. Banyaknya usaha kecil yang mendapatkan sertifikasi dan kualifikasi perusahaan mengalami fluktuasi yaitu sebanyak 169 usaha pada tahun 2017 dan mengalami penurunan hingga tahun 2019 hanya 119 usaha kecil yang tersertifikasi. Pada tahun 2020 angka ini kembali meningkat menjadi 138 usaha kecil yang tersertifikasi dan kembali menurun menjadi 97 di tahun 2021. Jenis usaha terbanyak yang mendapatkan sertifikasi kompetensi adalah CV (*Limited Partnership)* yaitu sebanyak 51 usaha pada tahun 2021.

Tabel 2.106 Jumlah Usaha Kecil yang Mendapat Sertifikasi Kompetensi di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Jenis Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
CV *Limited Partnership*	99	86	73	77	51
Koperasi	-	-	-	-	-
Perseroan Terbatas	69	62	44	59	44
Toko	-	1	1	1	-
Usaha Dagang	1	1	1	1	2
Firma	-	-	-	-	-
Jumlah	169	150	119	138	97

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2022, BPS Kota Balikpapan

Sementara itu untuk usaha non-kecil, jumlahnya relatif lebih banyak dibandingkan dengan usaha kecil. Walaupun mengalami fluktuasi angka setiap tahunnya, akan tetapi penurunannya tidak sebanyak dengan usaha kecil. Pada tahun 2017, usaha non-kecil yang mendapatkan sertifikasi kompetensi sebanyak 158 usaha. Jumlah ini menurun pada tahun 2018 menjadi 143 usaha dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 144 usaha. Hingga tahun 2021 hanya tersisa 102 usaha yang memiliki sertifikasi kompetensi. Jenis usaha yang memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi perusahaan terbanyak adalah perseroan terbatas yaitu sebanyak 92 usaha pada tahun 2021.

Tabel 2.107 Jumlah Usaha Non-Kecil yang Mendapat Sertifikasi Kompetensi di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Jenis Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
CV *Limited Partnership*	6	14	6	11	7
Koperasi	4	4	4	4	3
Perseroan Terbatas	148	125	134	107	92
Toko	-	-	-	-	-
Usaha Dagang	-	-	-	-	-
Firma	-	-	-	-	-
Jumlah	158	143	144	122	102

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2022, BPS Kota Balikpapan

Jika dilihat lebih lanjut, perkembangan sektor perindustrian Kota Balikpapan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 tidak mengalami perubahan yang signifikan baik berdasarkan jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja, maupun jumlah investasi, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.108 Perkembangan Sektor Perindustrian Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Unit Usaha					
Industri Kecil	621	622	628	628	637
Industri menengah	139	144	146	146	147
Industri Besar	128	128	128	128	128
Jumlah	883	894	902	902	912
Tenaga Kerja (orang)					
Industri Kecil	4.008	4.013	4035	4035	4.094
Industri Menengah	2.459	2.594	2667	2667	2.697
Industri Besar	6.887	6.887	6887	6887	6.887
Jumlah	13.354	13.494	13.589	13.589	13.678
Investasi (juta Rp.-)					
Industri Kecil	75.915	76.578	77691	77691	88.991
Industri Menengah	85.130	151.643	169025	169025	177.025
Industri Besar	588,667	588.667	588667	588667	588.667

Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2022

Pembangunan industri Kota Balikpapan diarahkan pada pembangunan industri pengolahan bukan migas, hingga saat ini pembangunan industri bukan migas di Indonesia mengalami pertumbuhan dan berkembang signifikan. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan, telah mengatur terkait kawasan peruntukan industri. Sesuai arah kebijakan pemerintah Kota Balikpapan akan membangun dan mengembangkan industri Prioritas, Industri Pendukung dan Industri potensial masa depan pada kawasan peruntukan industri sesuai dengan RTRW Kota Balikpapan.

Kawasan rencana peruntukan industri di Kota Balikpapan, terbagi atas:

- Kawasan Industri Kariangau (KIK)

  KIK berlokasi di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, merupakan kawasan strategis yang dapat dijangkau melalui darat dan laut. Pembangunan keseluruhan memiliki total luasan sekitar 2.117 Ha. Industri yang sudah eksisting sampai dengan tahun 2020 sebanyak 15 perusahaan, kawasan ini juga dilengkapi dengan sarana terminal peti kemas yang beroperasi pada tahun 2012.

- Koridor Perwilayahan Industri di Batakan dan Mulawarman

  Klaster Batakan merupakan wilayah peruntukan kategori industri sedang. Kawasan industri Batakan tersebar di sepanjang Jalan Mulawarman.

- Kawasan Industri Kecil Somber

  Kawasan Industri Kecil di Kawasan Industri Kecil Somber (KIKS). KIKS seluas 9 Ha yang telah dimanfaatkan seluas 3 Ha. Di KIKS telah terdapat 60 industri tahu tempe dari total 118 industri tahu tempe di Kota Balikpapan. Kawasan Industri Kecil Somber (KIKS) telah dilengkapi infrastruktur seperti jalan, gudang, drainase, jaringan listrik, pengolahan air limbah dan air bersih.

- Kawasan Industri Kecil Teritip

  Kawasan Industri Kecil Teritip berada di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur meliputi lahan seluas 6,4 ha. Industri Kecil Teritip meliputi: Industri Pengelolaan Hasil Pertanian dan Industri Pengelolaan Hasil Perikanan. Saat ini telah terdapat 24 rumah produksi dari total perencanaan sebanyak 48 rumah produksi.

- Kawasan Industri Perikanan Manggar

  Kawasan Industri Perikanan Manggar terletak di Kelurahan Manggar dan Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur. Kawasan Industri Perikanan Manggar termasuk dalam kawasan minapolitan Manggar, dimana terdapat 6 blok dalam kawasan minapolitan tersebut.

Capaian kinerja pertumbuhan IKM pada tahun 2017 sebesar 0,57% meningkat menjadi 0,79% pada tahun 2018. Pertumbuhan ini hanya disumbang oleh kelompok industri Agro, Logam Mesin dan Perekayasaan, serta Aneka dalam 3 tahun terakhir (2017-2019), sedangkan kelompok industri Hasil Hutan, Pulp dan Kertas, Kimia, Alat Angkut, dan Tekstil jumlahnya tidak berkembang dan cenderung tidak bertambah. Walaupun pada tahun 2020 tidak terdapat pertumbuhan industri, namun pada tahun 2021 angka ini kembali mengalami peningkatan sebesar 1,11% dengan bertambahnya jumlah industri pada kelompok hasil hutan sebanyak 1 industri, kelompok logam mesin dan perekayasaan sebanyak 3 industri, alat angkut sebanyak 2 industri, serta kelompok aneka sebanyak 4 industri.

Tabel 2.109 Perkembangan Kelompok Industri Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

No	Kelompok Industri	2017	2018	2019	2020	2021
1	Hasil Hutan	78	78	78	78	79
2	Pulp dan Kertas	108	108	108	108	108
3	Kimia	109	109	109	109	109
4	Agro	195	197	201	201	201
5	Logam Mesin dan Perekayasaan	147	152	153	153	156
6	Alat Angkut	128	128	128	128	130
7	Tekstil	93	93	93	93	93
8	Aneka	30	30	32	32	36
Total		888	895	902	902	912
% Pertumbuhan Industri		0,57	0,79	0,78	0	0,01

Sumber: Dinas Perindustrian Koperasi UMKM Tahun 2022

Adapun capaian indikator selanjutnya terkait kinerja urusan perindustrian yaitu persentase IKM menerapkan teknologi industri yang juga mengalami trend

kenaikan dimana capaian pada tahun 2017 sebesar 16% berhasil meningkat menjadi 43,37% pada tahun 2021.

Persentase industri yang menggunakan bahan baku lokal dihitung berdasarkan jumlah IKM yang mengikuti pelatihan menggunakan bahan baku lokal, namun demikian capaian setiap tahunnya cenderung berfluktuatif. Capaian pada tahun 2018 sebesar 11,11% hingga tahun 2019, namun angka ini mengalami penurunan menjadi 0% pada tahun 2020 dan kembali meningkat menjadi 5,48% pada tahun 2021. Bahan baku lokal yang kerap digunakan yaitu salak, buah naga, ikan, nanas, pisang, rumput laut, kepiting, pepaya, dan singkong. Jumlah IKM yang ikut pelatihan pada setiap jenis bahan baku rata-rata sebanyak 20 IKM. Capaian kinerja urusan perindustrian tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.110 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian 2017-2021

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Pertumbuhan IKM	%	0,57	0,79	0,78	0,80	1,11
Persentase IKM menerapkan teknologi industri	%	16	19	36,23	38,81	43,37
Persentase industri eksisting terhadap perizinan industri di KIK	%	37,13	28,7	30	27	40
Persentase industri *eksisting* terhadap *siteplan* SIKS	%	51,35	60,89	58,71	58,71	59,15
Persentase industri *eksisting* terhadap *siteplan* SIKT	%	7.19	7.51	10,34	10,34	10,34
Persentase industri yang menggunakan bahan baku lokal	%	5,3	11,11	11,1	0	5,48

Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan, 2022

Selain mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, penyediaan infrastruktur industri juga menjadi aspek penting yang terus diupayakan sesuai dengan standar nasional. Infrastruktur industri dalam hal ini meliputi lahan industri, energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, sumber daya air, fasilitas sanitasi, serta fasilitas jaringan transportasi. Terkait dengan kebutuhan lahan industri, berdasarkan data dari RPIK Kota Balikpapan, pada tahun 2020-2024 dibutuhkan lahan seluas 3.590 Ha. Kebutuhan terhadap lahan ini akan meningkat pada tahun 2025-2035 menjadi 3.600 Ha. Upaya pemenuhan lahan ini memang membutuhkan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat. Perlu adanya penyesuaian perencanaan agar pembangunan industri berjalan secara integratif serta mendukung pembangunan nasional.

Tabel 2.111 Proyeksi Kebutuhan Lahan dan Jumlah Kawasan Industri Baru Tahun 2015-2035

Uraian	Tahun		
	2015-2019	2020-2024	2025-2035
Kebutuhan Lahan Kawasan Industri (Ha)	3.580	3.590	3.600
Jumlah Kawasan Industri yang Akan Dibangun (Unit)	1	1	1

Sumber: RPIK 2015-2035 Kota Balikpapan

Pada SDGs tujuan 8 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, terdapat sasaran mencapai tingkat

produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya yang dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran serta IKM di Kota Balikpapan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya kompetensi SDM yang sesuai dan memiliki kompetensi yang memadai.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah terkait dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah bagi peningkatan daya saing daerah.Beberapa indikator yang dianalisis dalam melihat kemampuan ekonomi daerah seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga non – pangan lebih tinggi sebesar 0,15 poin apabila dibandingkan dengan rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga pangan. Keseluruhan indikator tersebut tersebut menggambarkan total pengeluaran serta kemampuan daya beli masyarakat. Berikut adalah indikator total pengeluaran Kota Balikpapan:

Tabel 2.112 Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Total Pengeluaran		1.493.493	1.843.111	2.085.477	1.877.211	1.999.470
1	Total Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non – Pangan	879.267	1.072.510	1.204.028	1.079.842	1.164.430
2	Rasio	0,59	0,58	0,57	0,57	0,58
3	Total Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pangan	-	-	881.449	797.369,83	835.040
4	Rasio	-	-	0,42	0,42	0,42

Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka 2021

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Semakin pesatnya arus modernisasi dan pembangunan, tentu saja akan berdampak pada kebutuhan akan pengembangan infrastruktur wilayah di Kota Balikpapan. Oleh karenanya pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk Menyediakan infrastruktur untuk semua baik pengguna infrastruktur maupun pemerataan kewilayahan yang mendukung pengembangan wilayah dan aksesibilitas Kota Balikpapan melalui pembangunan jalan dan infrastruktur transportasi berkelanjutan dengan mendorong penggunaan transportasi bukan kendaraan bermotor (*non motorized vehicle*) yaitu jalur pejalan kaki dan jalur sepeda serta mendorong penggunaan transportasi massal. pengelolaan Kota Balikpapan harus berkesinambungan dengan sistem ekologi dan kenyamanan hidup bagi masyarakat Kota Balikpapan. Upaya menaikkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kota Balikpapan terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses infrastruktur (transportasi, komunikasi, air bersih, dan

sanitasi), makanan, udara bersih, perumahan yang terjangkau, lapangan kerja dan ruang terbuka hijau. Konsepsi *liveable city* sesungguhnya merupakan representasi *sustainable city*, yang merupakan kemampuan untuk mempertahankan (dan meningkatkan) kualitas hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Balikpapan.

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan.

1) Aksesibilitas Daerah

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Tabel 2.113 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang Jalan	453,635	501,18	501,18	501,18	501,18
2	Jumlah Kendaraan	572.976	588.911	610.819	637.531	700.476
3	Rasio	0,000792	0,000851	0,00082	0,00079	0,00072

Sumber: DPU dan Dishub, Tahun 2022

Kota Balikpapan berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Primer dan sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Bandar Udara Sepinggan yang berdasarkan Tatanan Kebandaraudaraan Nasional berperan sebagai pusat pengumpul primer saat ini melayani penerbangan domestik dan internasional. Meskipun pada beberapa tahun terakhir pertumbuhan penumpang di Bandara Udara SAMS Sepinggan mengalami pertumbuhan yang tidak signifikan yang dipengaruhi oleh melemahnya perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.114 Pertumbuhan Penumpang Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan Tahun 2017-2021

Penerbangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Internasional	45.320	56.802	59.002	8.870	238
Domestik	7.254.136	7.441.334	5.370.714	2.730.927	2.271.267

Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2022

Pada tahun 2021, jumlah penumpang di Bandar Udara Sepinggan turun menjadi 2.271.267 penumpang. Hal ini dikarenakan telah beroperasinya Bandar Udara APT Pranoto Samarinda sejak ahir tahun 2018 serta dampak dari Pandemi Covid-19. Sedangkan pada angkutan laut, jumlah penumpang mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga tiket pesawat sejak tahun 2018. Jumlah penumpang angkatan laut di pelabuhan juga mengalami penurunan pada tahun 2020 karena terdampak pandemi Covid-19. Adapun data arus penumpang di Pelabuhan Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.115 Arus Penumpang Turun dan Naik Angkutan Laut di Pelabuhan Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Tahun	Penumpang turun (Jiwa)	Penumpang naik (Jiwa)
2017	148.998	162.852
2018	251.304	206.026
2019	251.304	206.026
2020	93.038	86.606
2021	135.397	127.554

Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2022

2) Ketaatan Terhadap Tata Ruang

Berdasarkan hasil Review RTRW Kota Balikpapan Tahun 2016, secara keseluruhan rencana pola ruang Kota Balikpapan saat ini masih terbilang baik, yaitu dengan penilaian pengkajian kesesuaian sekitar 85% artinya masih terdapat bentuk simpangan pola ruang yang perlu disesuaikan mengikuti perkembangan kota saat ini. Adapun penjelasan rincinya antara lain:

- Terjadi perubahan guna lahan antara Rencana Pola Ruang RTRW dengan Guna Lahan Eksisting Tahun 2016 sebesar 12% dari total luas Kota Balikpapan atau sekitar 6.285,56 Ha;
- Kesesuaian guna lahan eksisting Tahun 2016 dengan Rencana Pola Ruang RTRW seluas 46.032,06 Ha atau sekitar 85% dari total luas Kota Balikpapan;
- Terdapat guna lahan tanah kosong yang belum diolah sesuai dengan program rencana pola ruang seluas 2.090,91 Ha atau seluas 4% dari total luas Kota Balikpapan; Penilaian kesesuaian rencana pola ruang dan tutupan lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.116 Penilaian Kesesuaian Rencana Pola Ruang dan Tutupan Lahan

Penilaian Kesesuaian	Kawasan Lindung		Kawasan Budidaya		Total Rencana Pola Ruang	
	Luas	%	Luas	%	Luas	%
Tidak sesuai	2.617,86	9,67	3.667,70	13,42	6.285,56	12
Sesuai	24.242,60	89,52	21.789,46	79,73	46.032,06	85
Belum dilaksanakan	218,80	0,81	1.872,11	6,85	2.090,91	4

Sumber: Bappeda Kota Balikpapan-Hasil Analisa Tahun 2016

3) Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur di Kota Balikpapan mengalami peningkatan pembangunan. Pengembangan infrastruktur seperti air minum, restoran, hotel, kelistrikan, dan telekomunikasi diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.117 Infrastruktur Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

No	Infrastruktur	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Cakupan Layanan Air Minum	76,50%	76,56%	79,05%	77,29%	81,37%
2.	Jumlah Bank	187	187	187	187	187
3.	Jumlah Hotel	67	67	67	67	45
4.	Masyarakat yang menggunakan listrik	-	203.420	214.570	214.570	235.140

Sumber: DPU, tahun 2022

4) Ketersediaan Air Bersih dan Listrik

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat membuat layanan kota akan semakin tidak efektif, kecuali kota dapat memberikan fasilitas layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan yang tinggal di kota. Oleh karena itu, Kota Balikpapan harus dapat mewujudkan diri sebagai kota yang mampu melayani penduduknya dengan fasilitas yang memadai dan berkualitas. Salah satu fasilitas dasar yang wajib dipenuhi adalah kebutuhan akan air bersih dan listrik.

Jumlah konsumen air bersih di Kota Balikpapan pada tahun 2021 mencapai 111.394 pelanggan. Dari total pelanggan tersebut didominasi dari pelanggan rumah tangga sebanyak 104.584 pelanggan dan niaga sebanyak 4.468 pelanggan. Total air yang disalurkan mencapai 26.238.606 m^3 dengan total nilai yang dihasilkan sebesar Rp 251.562.046.342.

Tabel 2.118 Konsumen Air Bersih di Kota Balikpapan Tahun 2021

Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Air yang Disalurkan (m^3)	Nilai (Rp)
Sosial	1.525	1.165.872	3.034.162.229
Rumah Tangga	104.584	22.938.203	223.709.599.905
Instansi Pemerintah	263	425.714	1.724.761.433
Niaga	4.468	1.492.583	19.484.285.100
Industri	13	11.644	199.836.486
Khusus	541	204.590	3.409.401.189
Jumlah	111.394	26.238.606	251.562.046.342

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2022, BPS Kota Balikpapan

Sebagai salah satu fasilitas pelayanan publik, ketersediaan listrik menjadi hal yang sangat penting dalam menunjang aktivitas masyarakat, industri, hingga fasilitas publik yang ada. Kota Balikpapan sebagai salah satu kota dengan aktivitas perekonomian yang cukup maju di Pulau Kalimantan memang memiliki kebutuhan listrik yang cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pelanggan yang terus meningkat setiap tahunnya.

Untuk pelanggan rumah tangga sendiri sudah mencapai 222.361 pelanggan hingga tahun 2021. Jumlah ini meningkat cukup banyak jika dibandingkan dengan tahun 2017, pelanggan listrik rumah tangga saat itu sebanyak 184.167. Hal yang sama juga terjadi pada fasilitas publik. Hingga tahun 2021, jumlah pelanggan yang masuk dalam kategori publik mencapai 1.164, angka ini juga meningkat cukup tajam, pada tahun 2017 jumlahnya baru mencapai 793 pelanggan. Peningkatan jumlah pelanggan juga terjadi pada sektor bisnis dengan total sebanyak 18.385 pelanggan. Padahal pada tahun 2017 jumlahnya hanya sebanyak 15.592. Pada sektor bisnis memang mengalami peningkatan jumlah pelanggan yang konsisten setiap tahunnya, yang mana rata-rata meningkat sebanyak 1.000an pelanggan. Adapun untuk sektor industri, jumlahnya menjadi yang paling sedikit dibandingkan sektor lainnya karena hanya memiliki 87 pelanggan.

Tabel 2.119 Jumlah Pelanggan Listrik Berdasarkan Kelompok Tarif Tahun 2017-2021

Kelompok Tarif	2017	2018	2019	2020	2021
Sosial	2.781	2.953	3.041	3.233	3.474
Rumah Tangga	184.167	194.396	204.281	213.850	222.361
Bisnis	15.592	16.183	16.388	16.859	18.385
Industri	87	91	86	85	87
Publik	793	947	1.089	1.113	1.164
Jumlah	203.420	214.570	224.885	235.140	245.471

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2022, BPS Kota Balikpapan

Meningkatnya jumlah pelanggan pengguna listrik setiap tahunnya, tentu saja berpengaruh pada kebutuhan listrik di Kota Balikpapan. Produksi listrik terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017, produksi listrik mencapai 948.278.941 KWh. Secara perlahan-lahan meningkat setiap tahunnya, hingga akhir tahun 2021, produksi listrik sudah mencapai 1.437.067.514 KWh. Adapun listrik terjual juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah listrik yang terjual di Kota Balikpapan sebanyak 902.556.690 KWh. Jumlahnya pun juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga tahun 2021, jumlah listrik terjual sebanyak 1.114.506.142 KWh.

Tabel 2.120 Kondisi Penyediaan Listrik di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Daya Terpasang (KW)	516.162.322	563.062.959	516.477.000	613.764.772	658.380.022
Produksi Listrik (KWh)	948.278.941	981.711.526	1.096.861.192	1.088.423.119	1.437.067.514
Listrik Terjual (KWh)	902.556.690	938.862.796	1.051.811.715	1.046.308.251	1.114.506.142
Susut/Hilang (KWh)	45.722.251	41.763.730	45.049.747	42.114.868	54.115.362

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2022, BPS Kota Balikpapan

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

1) Realisasi Investasi

Realisasi investasi di Kota Balikpapan hingga sejauh ini sudah cukup baik. Investasi dari modal dalam negeri dan modal asing walaupun setiap tahunnya mengalami fluktuasi angka, akan tetapi jumlahnya cukup banyak dengan penyerapan tenaga yang juga cukup besar.

Tabel 2.121 Realisasi Investasi Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Penanaman Modal Dalam Negeri (miliar rupiah)	16,03	26,71	2.500,51	13.849,41	16.773,02
Penanaman Modal Asing (miliar rupiah)	2.284,44	865,60	374,61	519,75	2.820,49
Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia	538	760	2.469	7.023	3.052
Penyerapan Tenaga Kerja Asing	29	21	31	56	15

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2022, BPS Kota Balikpapan

2) Angka Kriminalitas

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban pada tahun 2021 relatif kondusif baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dunia usaha. Berbagai tindakan kriminalitas, unjuk rasa serta mogok kerja yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparatur keamanan. Hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.122 Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran yang Dilaporkan Menurut Jenisnya Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2021

No.	Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Narkoba	276	319	371	233	243
2	Kebakaran	12	5	5	2	1
3	Pemalsuan Surat	3	2	3	2	5
4	Perzinahan	9	5	8	2	3
5	Melanggar Kesopanan/Cabul	34	37	36	23	17
6	Perjudian	27	15	7	5	0
7	Pembunuhan	5	9	2	2	1
8	Penganiayaan Berat	124	-	58	46	16
9	Penganiayaan Ringan	45	-	25	6	13
10	Pencurian dengan pemberatan	226	-	114	106	93
11	Pencurian Biasa	85	80	50	54	45
12	Pencurian dengan Kekerasan	48	42	22	17	9
13	Pemerasan	-	1	-	3	-
14	Penggelapan	54	62	39	45	10
15	Penipuan	65	51	35	20	23
16	Perusakan	14	16	6	4	1
17	Curanmor R2	271	137	100	81	55
18	Curanmor R4	12	6	-	2	3
19	Lain-lain	796	1.000	230	88	68
Jumlah		2.106	1.787	1.111	741	606

Sumber: Polresta Balikpapan Tahun 2022

3) Jumlah Demo

Aktivitas investasi perlu didukung dengan kondusifitas kota. Salah satu indikator kondusifitas kota dapat dilihat dari kemampuan Pemerintah Kota dalam mengatasi penyampaian aspirasi masyarakat yang disampaikan secara terbuka melalui kegiatan demonstrasi massa. Apabila tidak dikelola dengan baik, kegiatan demonstrasi tersebut menjadi faktor penghambat iklim investasi. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, terdapat aktivitas demonstrasi massa yang bersifat damai, sehingga tetap terjaga kondusifitas Kota. Tahun 2020 terjadi sebanyak 11 kali kegiatan demonstrasi. Terjaganya kondusifitas di Kota Balikpapan didukung pula oleh adanya Markas Kodam VI Tanjung Pura dan Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang juga sebagai faktor kompetitif untuk menarik minat investasi, dilihat dari keamanan berinvestasi. Berkenaan dengan indikator iklim berinvestasi salah satunya yaitu proses perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

4) Usaha Kemudahan Perizinan

Kemudahan perizinan menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan jumlah investasi. Apalagi dengan begitu banyaknya potensi baik di sektor perdagangan maupun industri di Kota Balikpapan yang dapat digarap oleh para investor. Oleh karenanya penting untuk kemudian melihat sejauh mana kemudahan investasi di Kota Balikpapan.

Berdasarkan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan yang dirilis oleh BPS, pengurusan izin di Kota Balikpapan cukup banyak. Dari grafiknya, memang masih terjadi fluktuasi angka setiap tahunnya. Pada tahun 2017, sebanyak 9.060 pengajuan izin yang dilakukan. Angka ini

menurun pada tahun 2018 menjadi 6.666 izin. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, angka ini kembali mengalami peningkatan hingga 19.105 pengajuan izin yang dilakukan pada tahun 2021.

Jika diuraikan lebih lanjut, walaupun terjadi penurunan dalam beberapa tahun terakhir, akan tetapi pengajuan izin untuk tempat usaha mengalami lonjakan yang cukup tinggi dari tahun 2017 sampai 2019. Pada tahun 2017, jumlah pengajuan izin tempat usaha hanya 1.799 izin. Lalu meningkat pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 hingga 3.514 izin. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah pengajuan izin tempat usaha menjadi 708 izin. Sementara untuk izin tempat tinggal jumlahnya cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017, pengajuan izin tempat tinggal mencapai 895 izin. Sempat kembali meningkat tajam pada tahun 2018 menjadi 1.202 izin. Jumlahnya kembali merosot pada tahun 2019 dan tahun 2020 menjadi hanya sebanyak 599 izin. Hingga pada tahun 2021, pengajuan izin tempat tinggal kembali mengalami peningkatan menjadi 708 izin.

Tabel 2.123 Jumlah Tempat Usaha, Tempat Tinggal, dan Lain-lain yang Mengurus Izin di DPMPT Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Izin Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Tempat Usaha	1.799	2.042	3.514	1.982	708
Tempat Tinggal	895	1.202	701	599	724
Lainnya	6.366	3.422	1.164	13.406	18.381
Jumlah	9.060	6.666	5.379	15.987	19.105

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2022, BPS Kota Balikpapan

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Salah satu penunjang keberhasilan dari pelaksanaan pelayanan publik dan pengelolaan urusan daerah adalah kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Semakin baik tingkat kualitas dan kompetensi ASN tentu saja berkorelasi positif dengan tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenanya penting dilakukan upaya peningkatan kualitas ASN sebagai wujud menciptakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Fungsi tersebut menjadi ranah dari urusan kepegawaian yang diemban oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Untuk mengukur sejauh mana tingkat pengembangan ASN terdapat 4 indikator yang digunakan yaitu Indeks Profesionalitas ASN, Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai syarat jabatan, Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin PNS, dan Skor nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat.Untuk indikator yang pertama yaitu indeks profesionalitas ASN. Kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Merujuk pada data historis yang ada, indeks profesionalitas ASN mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 realisasi indikator ini sebesar 89,00, angka ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai 93,04 pada tahun 2019. Namun pada tahun berikutnya, angka ini terus mengalami penurunan hingga mencapai 91,05 pada

tahun 2021. Terkait dengan perbedaan data tersebut, proses integrasi data kepegawaian yang dilakukan saat ini memang masih belum optimal. Proses integrasi sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2019. Koordinasi dengan BKN juga telah dilakukan sehingga saat ini masih berproses untuk integrasi daerah. Sifatnya bisa dilihat dari dari SKPK agar bisa diintegrasikan dengan SIMPEG di BKPSDM. Pada tahun 2020 proses integrasi data kepegawaian terkendala karena keterbatasan SDM sehingga belum sampai pada integrasi satu arah. Sehingga akan tetap dilakukan proses integrasi 2 arah pada tahun 2021.

Selain itu kendala lainnya adalah tingkat kedisiplinan pegawai yang masih perlu untuk ditingkatkan. Dari data historis terkait persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS, penurunan persentase pelanggaran disiplin PNS meningkatkan adanya tren yang semakin baik karena angka realisasinya semakin tinggi. Pada tahun 2017, realisasi indikator ini berada diangka 19,05%. Hingga tahun 2019, persentase penurunannya sudah mencapai 35,71%. Walaupun sempat mengalami penurunan menjadi 11,11% pada tahun 2020, angka ini kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 37,50%. Meskipun persentase penurunannya semakin meningkat akan tetapi upaya untuk peningkatan disiplin terhadap PNS harus tetap dimaksimalkan.

Berdasarkan data yang sudah direkap, terdapat 99 pelanggaran disiplin ASN sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Upaya untuk meminimalisir pelanggar disiplin ini belum dilakukan secara kolektif oleh semua OPD. Hal ini dikarenakan sistem pengukuran kedisiplinan belum dilakukan secara integratif masih melalui OPD masing-masing. Terkait dengan absensi pun juga belum dilaksanakan secara integratif masih melalui OPD masing-masing. Fungsi pengawasan dari inspektorat sudah dilakukan dengan baik akan tetapi belum didukung dengan fungsi pengawasan dari setiap OPD. Sejauh ini upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai adalah pembentukan satgas pedis (Satuan Tugas Peningkatan Disiplin), pemberian *reward* kepada PNS teladan masih belum optimal untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai.

Indikator selanjutnya adalah pengukuran tingkat ketepatan posisi aparatur dengan kompetensi sesuai syarat jabatan. Pengukuran indikator ini menjadi penting untuk mendapatkan gambaran seluruh jabatan yang tersedia dijabat oleh ASN yang memiliki kompetensi yang baik sehingga pelaksanaan kinerja juga akan semakin meningkat. Pada tahun 2017 realisasi indikator ini sebesar 83,85%. Peningkatan terus terjadi hingga tahun 2018 mencapai 92,9%. Akan tetapi pada tahun 2019 sampai tahun 2021 terjadi penurunan, hingga menjadi 74,36%.

Ketercapaian indikator ini sangat ditentukan dari penerapan sistem merit ASN. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem tersebut adalah nilai indeks yang ada saat ini belum tervalidasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018

Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Telah dilakukan penilaian mandiri penerapan sistem merit melalui Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit. Total Akhir Penilaian Instansi sebelum diverifikasi KASN : 259 namun belum divalidasi. Secara keseluruhan dari hasil identifikasi penilaian yang dilakukan masih terdapat 8 unsur yang menjadi titik lemah.Untuk melihat mana tingkat keberhasilan upaya peningkatan ASN yang telah dilaksanakan, salah satu indikator yang digunakan adalah skor dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Adapun realisasi skor SKM menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Pada tahun 2017, skor dari hasil SKM sebesar 78,69, angka ini terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 82,64 pada tahun 2021.Perkembangan teknologi dalam revolusi industri 4.0 menuntut pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*) dan pembangunan SDM yang menguasai IT. Kebijakan dari pusat, pada tahun 2024 diarahkan menuju smart ASN yaitu seluruh ASN sudah menguasai IT. Upaya yang dilakukan saat ini adalah pemberian pelatihan terhadap guru-guru yang masih kurang melek IT. Adapun terkait pelayanan akan melakukan sistem kepegawaian secara online. Tahun 2021 sudah dianggarkan untuk aplikasi SIMPEG terkait dengan kepegawaian dan penyediaan SDM berbasis IT.

Selain itu BKPSDM juga terus mengupayakan pembuatan aplikasi diklat secara daring. Hal ini untuk menyiasati keterbatasan ruang gerak karena kondisi pandemic yang terjadi. Untuk aplikasi yang dibuat baru proyek awal dan kemudian ada evaluasi pembelajaran sifatnya CBT yang akan digunakan untuk kenaikan pangkat. Akan tetapi aplikasinya saat ini masih bermasalah sehingga belum bisa ditunjukkan secara fisik.

Tabel 2.124 Capaian Tingkat Pengembangan ASN Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Profesionalitas ASN	89	92,58	93,04	92,3	91,05
Penurunan Pelanggaran disiplin PNS (%)	19,05	17,65	35,71	11,11	37,50
Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Syarat Jabatan (%)	83,85	92,9	89,39	80,44	74,36
Skor Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	78,69	78,78	79,96	80,37	82,64

Sumber : BKPSDM, 2022

Tabel 2.125 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Balikpapan

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah / Judul Tabel	Satuan	Tahun					Sumber
		2017	2018	2019	2020	2021	
ASPEK DEMOGRAFI							
Jumlah Penduduk	Jiwa	633.196	649.806	670.505	697.079	710.293	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pertumbuhan Penduduk	%	2,44	2,62	3,19	3,96	1,90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah Penduduk Laki-Laki	Jiwa	328.382	333.347	338.202	352.802	362.754	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah Penduduk Perempuan	Jiwa	307.630	312.380	316.976	335.516	347.539	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah Penduduk Lahir	Jiwa	19.211	20.095	19.044	10.366	10.466	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Kelahiran terhadap Total Penduduk	%	3,03	3,09	2,84	1,49	1,47	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah Penduduk Datang	Jiwa	18.142	13.499	12.218	13.165	17.743	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Pendatang terhadap Total Penduduk	%	2,87	2,08	1,82	1,89	2,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PDRB per Kapita							
Nilai PDRB ADHB	Triliun Rupiah	87,72	97,70	105,14	103,84	111,32	Badan Pusat Statistik
Nilai PDRB ADHK	Triliun Rupiah	76,03	79,81	83,79	83,01	86,80	Badan Pusat Statistik
PDRB Per Kapita ADHB	Juta Rupiah	137,92	151,30	165,69	151,20	160,10	Badan Pusat Statistik
PDRB Per Kapita ADHK	Juta Rupiah	119,55	123,59	132,06	120,87	124,84	Badan Pusat Statistik
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010	%	3,84	4,97	4,99	-0,93	4,56	Badan Pusat Statistik
Laju Inflasi	%	2,45	3,13	1,88	0,65	2,28	Badan Pusat Statistik
Kemiskinan							
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	17,86	17,00	15,78	17,02	18,53	Badan Pusat Statistik
Tingkat Kemiskinan	%	2,82	2,64	2,42	2,57	2,89	Badan Pusat Statistik
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)		0,23	0,67	0,26	0,38	0,50	Badan Pusat Statistik
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		0,03	0,26	0,06	0,12	0,15	Badan Pusat Statistik
Ketimpangan / Indeks Gini							
Indeks Gini		0,32	0,32	0,302	0,311	0,325	Badan Pusat Statistik
Fokus Kesejahteraan Sosial							
Indeks Pembangunan Manusia		79,01	79,81	80,11	80,01	80,71	Badan Pusat Statistik
Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	10,55	10,65	10,67	10,68	10,91	Badan Pusat Statistik
Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan	tahun	10,22	10,32	10,34	10,35	10,69	Badan Pusat Statistik
Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki	tahun	11,06	11,17	11,18	11,19	11,36	Badan Pusat Statistik
Harapan Lama Sekolah	tahun	13,75	14,12	14,13	14,14	14,22	Badan Pusat Statistik
Harapan Lama Sekolah Perempuan	tahun	14	14,27	14,29	14,3	14,31	Badan Pusat Statistik
Harapan Lama Sekolah Laki-Laki	tahun	13,74	14,12	14,13	14,14	14,22	Badan Pusat Statistik
Angka Harapan Hidup	tahun	73,97	74,18	74,41	74,49	74,76	Badan Pusat Statistik
Angka Harapan Hidup Perempuan	tahun	75,88	76,09	76,21	76,33	76,55	Badan Pusat Statistik
Angka Harapan Hidup Laki-Laki	tahun	72,05	72,26	72,51	72,62	72,86	Badan Pusat Statistik
Pengeluaran Per Kapita	Juta Rupiah	14,254	14,557	14,791	14,549	14,862	Badan Pusat Statistik
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah / Judul Tabel	Satuan	Tahun					Sumber
		2017	2018	2019	2020	2021	
Pendidikan							
Rasio Guru terhadap Murid PAUD		01:11	01:11	01:10	01:11	1:4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rasio Guru terhadap Murid SD/MI		01:22	01:26	01:23	01:23	1:22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rasio Guru terhadap Murid SMP/MTs		01:21	01:24	01:21	01:20	1:20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	76	86	22,85	65,68		Badan Pusat Statistik
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	108,21	107,35	107,35	105,52	104,64	Badan Pusat Statistik
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	85,23	92,78	92,78	96,81	95,49	Badan Pusat Statistik
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	98,19	99,98	99,98	99,52	99,49	Badan Pusat Statistik
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	81,51	82,93	82,93	83,24	83,16	Badan Pusat Statistik
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	%	88,21	107,35	103,01	79,8	92,37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	%	108,34	91,62	75,65	93,36	87,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI	%	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,02	0,01	0,03	0,03	0,01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,08	0,08	0,03	0,11	0,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase Sekolah Pendidikan dengan Kondisi Bangunan Baik SD/MI	%	68,81	11,15	85,27	57,75	85,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase Sekolah Pendidikan dengan Kondisi Bangunan Baik SMP/MTs	%	81,59	57,13	83,37	77,11	56,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI	%	100,54	26,81	68,5	30,18	26,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTs	%	55,96	55,96	89,06	28,49	23,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kesehatan							
Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Nasional	%	81,81	96,3	96,3	96,3	96,3	Dinas Kesehatan
Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi Nasional	%	53,33	36,37	86,67	86,67	86,67	Dinas Kesehatan
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	%	65	70	72	72,24	71,14	Dinas Kesehatan
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	%	65	70	98	98,15	68,44	Dinas Kesehatan
Persentase Ketersediaan SDM Tenaga Kesehatan di Puskesmas	%	70	75	83	82,72	92	Dinas Kesehatan
Persentase Ketersediaan SDM Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit	%	70	70	52	97,32	50	Dinas Kesehatan
Angka Kematian Ibu (AKI)	/ 1.000 KH	78	72	64	73,43	178	Dinas Kesehatan
Angka Kematian Bayi (AKB)	/ 1.000 KH	6	7	7	7	9	Dinas Kesehatan
Angka Kematian Balita (AKBA)	/ 1.000 KH	6	8	7	7	10	Dinas Kesehatan
Prevalensi HIV dan AIDS		0,05	0,05	2,26	0,43	0,043	Dinas Kesehatan
Angka Kejadian DBD per 100.000 penduduk	/ 100.000 penduduk	78,3	78,3	240,65	112,46	62,7	Dinas Kesehatan
Prevalensi TBC	/ 100.000 penduduk	199,5	199,5	272,29	123,9	177,9	Dinas Kesehatan
Prevalensi Gizi Buruk & Gizi Kurang	%	2,53	2,22	2,70	2,20	7,16	Dinas Kesehatan
Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Cakupan UKBM Aktif	%	50,74	60	75	80	80	Dinas Kesehatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
Indeks Kepuasan Infrastruktur Dasar (IKLI)		78,1	80,4	77,75	82,03	78,73	Bappeda Litbang

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah / Judul Tabel	Satuan	Tahun					Sumber
		2017	2018	2019	2020	2021	
Persentase panjang trotoar yang telah memenuhi standar	%	10,58	12,73	14,98	14,98	14,98	Dinas Pekerjaan Umum
Persentase kemantapan jalan	%	96,86	83,76	84,06	85,11	89,25	Dinas Pekerjaan Umum
Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan		1,415	1,427	1,430	1,475	1,48	Dinas Pekerjaan Umum
Persentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik	%	44,97	46,43	48,88	50,09	81,11	Dinas Pekerjaan Umum
Titik Banjir	Titik	35	34	30	88	81	Dinas Pekerjaan Umum
Kapasitas Sumber Air Baku	liter/detik	1.390	1.570	1.570	1.570	1.572,17	PTMB Kota Balikpapan
Jumlah Pelanggan Pelayanan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	98.111	100.199	103.144	108.161	111.394	PTMB Kota Balikpapan
Cakupan Layanan Air Minum	%	76,56	79,05	79,6	81,37	78,14	PTMB Kota Balikpapan
Kapasitas Produksi Pelayanan Air Minum Perpipaan	liter/detik	1.215	1.276	1.305	1.408	1.510	PTMB Kota Balikpapan
Panjang Perpipaan Pelayanan Air Minum	meter	1.335.998	1.359.110	1.375.944	1.375.944	1.669.295	PTMB Kota Balikpapan
Persentase Kehilangan Air Pelayanan Air Minum Perpipaan	%	34,36	33,23	31,55	30,4	37,14	PTMB Kota Balikpapan
Volume Sampah Ke TPAS Manggar	ton	352,24	348,22	357,1	308,56	390,65	Dinas Lingkungan Hidup
Perda tata ruang (1 RTRW, 1 RDTR, 1 Insentif dan Disinsentif)	Dokumen	0	-	0	2	2	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Persentase penerbitan pemanfaatan ruang	%	98,1	98,24	98,4	98,58	98,75	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Persentase rencana tata ruang yang disusun	%	40	45	88	100	100	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Jumlah rencana rinci tata ruang/kota	Dokumen	0	0	0	2	2	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Jumlah kesediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang	Dokumen	1.809	3.538	4.999	6.248	6.986	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang	%	98,1	98,24	98,4	98,58	98,75	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Perumahan dan Permukiman							
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	unit	305	97	362	169	350	Dinas Perumahan dan Permukiman
Jumlah Kepala Keluarga	KK	161.892	257.259	229.916	236.293	240.079	Dinas Perumahan dan Permukiman
Jumlah (Unit Rumah)	unit	142.568	142.568	204.717	208.811	212.613	Dinas Perumahan dan Permukiman
Backlog KEPEMILIKAN (Unit Rumah)	unit	-49.806	-49.806	-87.782	-92.556	-94.039	Dinas Perumahan dan Permukiman
Backlog HUNIAN (Unit Rumah)	unit	19.324	114.691	25.199	24.931	27.465	Dinas Perumahan dan Permukiman
Presentase Backlog Kepemilikan	%	34,93%	34,93%	42,88%	44,33%	44,23%	Dinas Perumahan dan Permukiman
Luas Kawasan Kumuh	hektar	224,86	58,65	0	153,3	153,3	Dinas Perumahan dan Permukiman
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
Penurunan angka kriminalitas	%	18	20	18,5	18	20	Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase poskamling aktif	%	63,41	63,61	63,81	64,01	75	Satuan Polisi Pamong Praja
Rasio Petugas Linmas	%	4	4	3,5	4,5	100	Satuan Polisi Pamong Praja
Cakupan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	64,1	62,82	61,54	60,26	70	Satuan Polisi Pamong Praja
Cakupan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	%	5,26	5,26	5,26	6,57	100	Satuan Polisi Pamong Praja
Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	%	80	81,63	83,33	97,55	100	Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	%	85,6	86,6	87,7	93	100	Satuan Polisi Pamong Praja
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	N/A	92,92	99	80	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	70	75	81	83,16	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	80	95,42	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	80	95,42	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah / Judul Tabel	Satuan	Tahun					Sumber
		2017	2018	2019	2020	2021	
Sosial							
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	%	99,83	93,68	93,33	63	44,92	Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	%	76,59	89,15	98,72	88	31,82	Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	%	90,72	98,12	83,24	90	100	Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	54,74	93,96	58,06	100	0	Dinas Sosial
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	%	84,37	85,14	67,84	100,00	100	Dinas Sosial
Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Dampak Bencana	%	84,37	85,14	68	86,66	100	Dinas Sosial
Persentase PMKS yang Menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	84,07	120,65	74,26	75,33	78,82	Dinas Sosial
Persentase PSKS yang telah dibina	%	61,06	85,12	78,6	23,92	50	Dinas Sosial
Persentase PMKS Miskin yang Terlayani	%	23,65	100	49	165,42	80	Dinas Sosial
Persentase PMKS Miskin penerima Bantuan Sosial Pangan yang terlayani	%	90	41,63	83,72	121,90	21	Dinas Sosial
Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	%	56,68	107,75	146,46	154,20	48,16	Dinas Sosial
Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Logistik bagi Korban Bencana	%	31,25	33,75	33,47	12,75	100	Dinas Sosial
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	6	6	6	6	6	Dinas Sosial
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	34	34	34	34	34	Dinas Sosial
Taruna Siaga Bencana		95	95	95	84	87	Dinas Sosial
Karang Taruna	organisasi	34	34	34	34	40	Dinas Sosial
Lembaga/Organisasi Sosial	lembaga	32	37	37	37	37	Dinas Sosial
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)		-	-	-	-	-	Dinas Sosial
Kelompok Usaha Bersama Produktif (KUBE)	kelompok	20	20	20	20	-	Dinas Sosial
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	lembaga	30	35	35	35	36	Dinas Sosial
Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSU)	lembaga	2	2	2	2	1	Dinas Sosial
Yayasan Sosial	yayasan	19	8	8	8	28	Dinas Sosial
Lembaga Sumbangan Sosial	lembaga	10	10	15	15	9	Dinas Sosial
CSR Perusahaan Lingkungan	perusahaan	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
Tenaga Kerja							
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,39	9,52	7,29	9	8,94	Dinas Ketenagakerjaan
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	63,38	64,3	64,7	62,9	64,29	Dinas Ketenagakerjaan
Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja	%	74,8	334,2	122,7	52,8	101,7	Dinas Ketenagakerjaan
Persentase Pencari Kerja yang difasilitasi Magang di perusahaan	%	158	190,48	443,64	129,6	136,67	Dinas Ketenagakerjaan
Persentase Calon Wirausaha yang mendapatkan Pembinaan	%	0	0	541,66	0	0	Dinas Ketenagakerjaan
Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	28,76	19,27	3,98	23	30,5	Dinas Ketenagakerjaan

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah / Judul Tabel	Satuan	Tahun					Sumber
		2017	2018	2019	2020	2021	
Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dengan Perjanjian Bersama	%	70,42	66,19	79,36	68,1	62,5	Dinas Ketenagakerjaan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
Indeks Pembangunan Gender (IPG)		89,74	89,76	89,71	89,65	89,83	Badan Pusat Statistik
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		65,52	66,33	69,11	68,97	68,62	Badan Pusat Statistik
Keterlibatan Perempuan di Parlemen	%	17,78	17,78	20	20	20	Badan Pusat Statistik
Perempuan sebagai Tenaga Profesional	%	40,39	41,84	42,39	41,76	48,91	Badan Pusat Statistik
Sumbangan Pendapatan Perempuan	%	25,71	26,09	26,61	26,75	26,41	Badan Pusat Statistik
Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	%	84,29	78,26	62,16	72,86	71,08	DP3AKB
Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak	%	72,16	63,64	52,54	72,31	67,09	DP3AKB
Pangan							
Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	%	Belum dilakukan Pengukuran	62	58	38		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Persentase Daerah Rentan rawan Pangan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		81.5 (AKE 2150) 83,8 (AKE 2000)	86,2 (AKE 2150) 89 (AKE 2000)	87,7 (AKE 2150) 90,2 (AKE 2000)	86,2 (AKE 2100)	87	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Persentase Pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	Belum Ada Kegiatan Pengujian Sampel Pangan	92,74	98	100	100	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Pertanahan							
Persentase tanah yang memiliki IMTN	%	43%	79%	88%	76,95%	88,00%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Persentase penanganan kasus/ sengketa pertanahan	%	82,86%	57%	74%	85%	82%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Jumlah bidang tanah yang diredistribusi		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Lahan yang tersertifikasi							Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	Hektar	25,28	30,26	8,07	0	21,2	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Lingkungan Hidup							
Indeks Kualitas Pencemaran Air (IKA)		42,1	49,5	47,9	47,22	49,44	Dinas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		61,25	59,58	60,19	68,07	69,66	Dinas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Pencemaran Udara (IKU)		97,9	84,93	88,42	88,92	88,52	Dinas Lingkungan Hidup
Indeks Tutupan Lahan (ITP)		48,12	48,15	48,24	55,4		Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Pengangkutan Sampah ke TPA	%	64,79	74,43	77,86	75,45	60,91	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Pengelolaan Sampah di Sumbernya	%	22,93	19,22	20,37	22,14	25,8	Dinas Lingkungan Hidup
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
Persentase Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga	%	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik	%	93,05	97,8	97,69	99,32	99,57	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	%	85,74	88,61	92,05	92,87	97,77	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	95,11	99,31	97,04	88,9	90,85	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah / Judul Tabel	Satuan	Tahun					Sumber
		2017	2018	2019	2020	2021	
Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	-	32,71	56,13	63,22	85,82	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
Dana Swadaya Masyarakat	Rp	88.615.487.049	93.338.387.000	100.738.092.285	83.875.636.859		Bagian Pemerintahan Setda Kota Balikpapan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
Persentase Pasangan Usia Subur yang berKB Aktif	%	66,32	68,35	70,02	70,17	70,30	DP3AKB
Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate / CPR)	%	66,32	68,35	70,02	70,17	70,30	DP3AKB
Proporsi / Persentase Wanita Usia Subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi KB (Unmet Need)	%	18,1	15,64	14,49	14,04	14,29	DP3AKB
Persentase Keluarga terpapar pemahaman tentang fungsi keluarga	%	4,52	5,32	8	4,07	85,56	DP3AKB
Persentase remaja terpapar tentang Program Generasi Berencana	%	1,51	4,72	1,59	1,13	100,96	DP3AKB
Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan (POKTAN) dan Pendukung Program KKBPK	%	4,52	5,32	8	8,5	20,54	DP3AKB
Peningkatan Jumlah Kelompok Remaja Pendukung KKBPK (PIK R/M)	%	1,51	4,72	1,59	1,04	29,41	DP3AKB
Perhubungan							
Jumlah Angkutan Kota	unit	1.755	1.754	1.215	782	509	Dinas Perhubungan
Jumlah Kendaraan	unit	572.976	588.911	610.819	637.531	700.476	Dinas Perhubungan
Rasio Angkutan Kota terhadap Jumlah Kendaraan	%	0,31%	0,30%	0,20%	0,12%	0,07%	Dinas Perhubungan
Jumlah Koridor SAUM		1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
Jumlah Halte SAUM		14	14	14	14	14	Dinas Perhubungan
Jumlah Rambu		2.306	2.447	3.229	3.848	12.281	Dinas Perhubungan
Jumlah ATCS		15	15	15	15	14	Dinas Perhubungan
Panjang Jalur Sepeda		4.500	4.500	4.500	5.000	11.000	Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika							
Aplikasi yang terintegrasi dengan SIPKD	Aplikasi	0	1	1	1		Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase cakupan Pengawasan Infrastruktur telekomunikasi	%	80	85	90	83	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah	%	90	90	90	84	95	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat	%	80	80	80	94	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
Jumlah Koperasi Aktif	unit	436	435	438	478	494	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian
Jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan	unit	125	135	150	170	180	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian
Persentase Jumlah Koperasi aktif	%	80	80	84,19	87,86	81,79	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian
Persentase kredit UMKM di Bank	%	36,41	37,8	36,74	31,56	29,72	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian
Jumlah Pengurus/pengawas/pengelola Koperasi bersertifikat	Orang	66	100	60	60	150	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian
Penanaman Modal							
Penanaman Modal Dalam Negeri	miliar rupiah	16,03	26,71	2.500,51	13.849,41	16.773,02	Badan Pusat Statistik
Penanaman Modal Asing	miliar rupiah	2.284,44	865,6	374,61	519,75	2.820,49	Badan Pusat Statistik

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah / Judul Tabel	Satuan	Tahun					Sumber
		2017	2018	2019	2020	2021	
Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia	Orang	538	760	2.469	7.023	3.052	Badan Pusat Statistik
Penyerapan Tenaga Kerja Asing	Orang	29	21	31	56	15	Badan Pusat Statistik
Jumlah Tingkat Kepatuhan Perizinan Penanaman Modal	Izin	175	151	315	1241	3450	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Persentase Jumlah Pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara online	%	19	41,25	41,25	41,25	67,5	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Persentase Peningkatan Jumlah LKPM PMA dan PMDN yang diterima	%	22,38	-13,71	108,61	192,7	178	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal dan Perizinan	%	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Urusan Penanaman Modal		82,79	88,34	88,35	89	89,06	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kepemudaan dan Olahraga							
Peningkatan jumlah pemuda berprestasi	Orang	48	53	57	31	48	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Jumlah atlet berprestasi	Orang	0	668	566	25	343	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Peningkatan prestasi olahraga	Medali	55	516	1.643	25	365	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana olah raga	%	91,02	91,07	91,04	91,12	91	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Persandian							
Persentase OPD yang melakukan pengamanan informasi	%	-	25	50	61	65	Dinas Komunikasi dan Informatika
Jumlah OPD yang telah dilakukan sistem pengamanan informasi	OPD	-	10	15	22	22	Dinas Komunikasi dan Informatika
Kebudayaan							
Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya, dan keagamaan	Kegiatan	6	6	6	2	6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Cagar budaya yang dilindungi	Lokasi	100	119	129	144	126	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Perpustakaan							
Jumlah Kunjungan Perpustakaan	Orang	202.263	134.566	98.192	21.744	14.782	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Jumlah Penambahan Anggota Perpustakaan	Orang	5.819	3.440	3.310	2.104	1.611	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Penambahan Jumlah Judul Koleksi Bahan Pustaka	Judul	2.243	3.772	442	1.075	1.090	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Jumlah Perpustakaan / Taman Baca yang Telah Dibina	Unit	229	239	254	264	350	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kearsipan							
Persentase Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan SIKD	%	-	19,44	100	100	75	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Persentase Perangkat Daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata	%	14,35	10	25	25	30	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan							
Kelautan dan Perikanan							
Jumlah produksi perikanan	ton	4.242,54	4.536,30	6.384,52	4.275,00	5.039,05	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Jumlah peningkatan produksi perikanan (kenaikan)	ton	-1450,63	293,41	1.849,27	-2.109,52	764,05	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Pariwisata							
Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	2.554.423	2.802.058	2.917.514	1.082.273	1.449.320	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Peningkatan event Pariwisata dan Budaya	Event	1	5	8	7	7	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	Objek	1	1	30	41	31	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Meningkatnya potensi objek wisata unggulan di kota Balikpapan	Objek	2	1	10	6	6	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah / Judul Tabel	Satuan	Tahun					Sumber
		2017	2018	2019	2020	2021	
Jumlah asosiasi yang bermitra	Asosiasi	0	1	8	9	8	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Pertanian							
Total produksi tanaman pangan dan hortikultura	Ton	111.015	102.260	138.525	132.347,80	196.346,40	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kenaikan produksi tanaman pangan dan hortikultura	Ton	-13.420,00	-8.755,00	36.265,00	-6.177,20	63.998,60	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Total produksi tanaman perkebunan	Ton	8.049,15	8.624,80	10.229,77	9.548,50	14234,87	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kenaikan produksi tanaman perkebunan	Ton	2.039,33	575,65	1.604,97	-681,27	4.686,37	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Total produksi ternak	Ton	48.439,32	31.411,00	22.783,56	27.403,00	20784,63	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kenaikan produksi ternak	Ton	1.153,58	-17.028,32	-8.627,44	4.619,44	-6.618,37	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Perdagangan							
Cakupan unit usaha dagang	Unit usaha	248	248	248	230	214	Dinas Perdagangan
Persentase pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar	%	79	66	64,96	64,25	66,3	Dinas Perdagangan
Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	%	66,12	66,56	70,73	36,09	78,38	Dinas Perdagangan
Persentase pasar berklasifikasi A	%	36	36	36	33,3	33,3	Dinas Perdagangan
Nilai ekspor bersih (US$ Juta)	US$ Juta	2.510,10	2.780,12	3103,16	2937,12	3726,78	Dinas Perdagangan
Nilai pasar terhadap penilaian adipura	Nilai	72,15	72,15	72,15	72,15	72,15	Dinas Perdagangan
Perindustrian							
Pertumbuhan IKM	%	0,57	0,79	0,78	0,8	1,11	Dinas Perindustrian Koperasi UMKM
Persentase IKM menerapkan teknologi industri	%	16	19	36,23	38,81	43,37	Dinas Perindustrian Koperasi UMKM
Persentase industri eksisting terhadap perizinan industri di KIK	%	37,13	28,7	30	27	40	Dinas Perindustrian Koperasi UMKM
Persentase industri eksisting terhadap siteplan SIKS	%	51,35	60,89	58,71	58,71	59,15	Dinas Perindustrian Koperasi UMKM
Persentase industri eksisting terhadap siteplan SIKT	%	7.19	7.51	10,34	10,34	10,34	Dinas Perindustrian Koperasi UMKM
Persentase industri yang menggunakan bahan baku lokal	%	5,3	11,11	11,1	0	5,48	Dinas Perindustrian Koperasi UMKM
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
Fokus Iklim Berinvestasi							
Fokus Sumber Daya Manusia							
Indeks Profesionalitas ASN		89	92,58	93,04	93,3	91,05	BKPSDM
Penurunan Pelanggaran disiplin PNS	%	19,05	17,65	35,71	11,11	37,5	BKPSDM
Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Syarat Jabatan	%	83,85	92,9	89,39	80,44	74,36	BKPSDM
Skor Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat		78,69	78,78	79,96	80,37	82,64	BKPSDM

2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Salah satu pengukuran evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2021 dapat dilakukan berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan dan program serta penyerapan anggaran. Evaluasi pencapaian target kinerja tahun 2021 juga menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan di tahun 2018 menuju perencanaan tahun-tahun selanjutnya. Saat ini sedang dilakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2021, sebagai bahan penyusunan LKPJ.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan tahun 2016-2021, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan tahun 2021 dan program pembangunan tahun 2021 harus berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung pencapaian misi yang telah ada guna mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

2.5.1. Misi 1: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi

Misi 1 RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 ini adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi atau dengan kata lain meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja tinggi, berkemampuan/memiliki kompetensi yang tinggi, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Prioritas pembangunan diharapkan pada tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul dan berkarakter, ditopang dengan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang makin baik serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya dan agama. Misi ini memiliki tiga tujuan, yaitu: (1) mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing; (2) mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani secara berkelanjutan; dan (3) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan. Misi 1 dijabarkan menjadi tiga sasaran kota, secara rinci analisis capaian kinerja masing-masing sasaran pada Misi 1 sebagai berikut.

A. Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

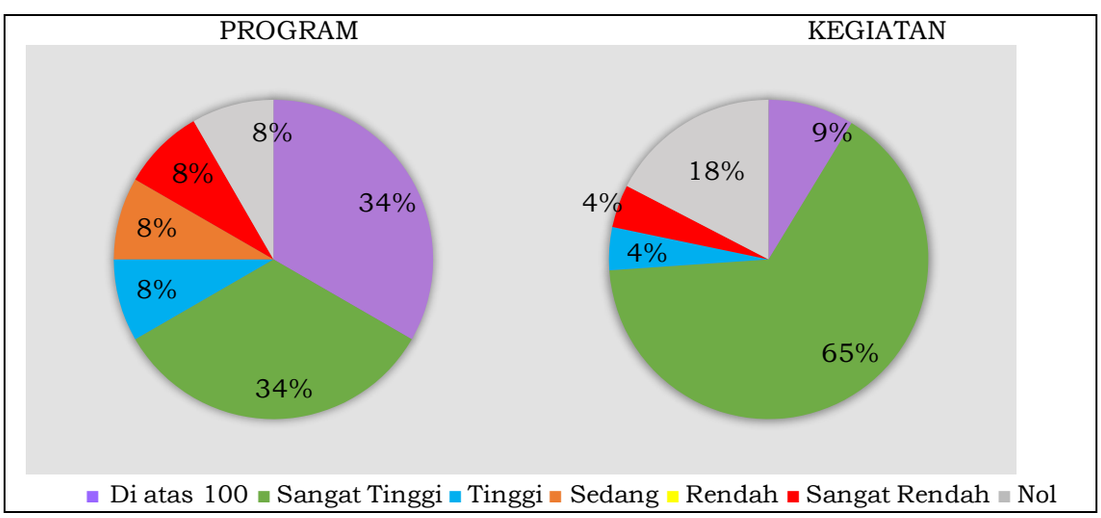
Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang dianggap sebagai komponen utama dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus

penentu keberhasilan pembangunan daerah. SDM yang berkualitas tidak hanya cerdas intelektual, namun juga harus cerdas emosional dan cerdas spiritual sehingga kombinasi ketiga kecerdasan tersebut akan menghasilkan SDM yang berdaya saing dan membentuk smart people atau masyarakat cerdas. Indikator pada Sasaran 1 adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Kedua indikator ini merupakan indikator pembentuk dimensi pengetahuan pada IPM. Hasil evaluasi RKPD Kota Balikpapan untuk Sasaran 1 dapat dilihat pada Tabel 2.126

Tabel 2.126 Capaian Sasaran 1 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II			Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
			K	K	K	
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing.						
Sasaran Daerah 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10.53	10.91	103.61	
	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15.73	14.22	90.40	

Sasaran 1 didukung oleh 9 program dan 23 kegiatan. Secara keseluruhan, pencapaian program menunjukkan kinerja yang sangat baik dimana ada 34 persen program masuk dalam kategori di atas 100 dan 34 persen program lainnya berada pada kategori sangat tinggi, dan 8 persen masuk kategori tinggi. Hanya 16 persen program yang masuk dalam kategori sedang dan rendah. Namun, masih terdapat data yang tidak dapat dihitung karena tidak lengkap. Sementara, sebagian besar kegiatan pendukung Sasaran 1 telah masuk dalam kategori antara tinggi hingga lebih dari 100 persen (lihat Gambar 2.74).



Gambar 2.74 Rekapitulasi Capaian Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 1 Hasil RKPD Kota alikpapan Tahun 2021 Semester II

Secara rinci data capaian program dan kegiatan pendukung Sasaran 1 hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II disajikan pada Tabel 2.127 dan Tabel 2.128.

Tabel 2.127 Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran 1 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,53		10,91		103,61		
		Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,73		14,22		90,40		
1	Program 1: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bidang Pendidikan)	Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah (Persen)	Persen	98,3	325.501.534.978	94,94	284.228.962.586	96,53	87,32	
2	Program 2: Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Melek Huruf	Persen	99,50	271.275.892.695	99,98	338.510.794.836	100,48	124,78	
3	Program 3: Angka Melek Huruf Program Pengembangan Kurikulum	Angka Partisipasi Kasar SD	Persen	93,25	728.949.100	92,88	526.831.629	99,60	72,27	
		Angka Partisipasi Kasar SMP	Persen	84,25		88,73		105,32		
4	Program 4: Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persen	86,64	2.128.905.000	97,72	1.384.492.805	112,79	65,03	
		Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi SD/SMP	Persen	94,49		0		0		
5	Program 5: Program Pengembangan Kesenian Tradisional (Bidang Kebudayaan)	Peningkatan Prestasi Dibidang Seni. Budaya Dan Kegamaan	Penghargaan	6	1.838.970.000	4	1.303.657.032	66,67	70,89	
6	Program 6: Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cagar Budaya Yang Dilindungi	Cagar Budaya	121	1.402.850.000	121	1.056.598.426	100,00	75,32	
7	Program 7: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Bidang Perpustakaan)	Persentase Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persen	98,25	8.220.400.960	98.3	6.395.489.615	100,07	77,80	
8	Program 8: Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Kunjungan Perpustakaan	Orang	190.00	1.295.404.150	0	1.172.550.378	0,00	90,52	Karena ada PSBB
9	Program 9: Program Pengelolaan Arsip (Bidang Arsip)	Terdata Dan Tertata	Persen	35,00	649.999.750	35.00	569.219.280	100,00	87,57	

Tabel 2.128 Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Sasaran 1 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Program 1: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bidang Pendidikan)	Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah (Persen)	Persen	98.35	325.501.534.978	94.94	284.228.962.586	96.53	87.32	
1	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sosialisasi Penyusunan Rencana BOS dan BOP, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BOS, Pendampingan Penyusunan RKA BOS	Kegiatan	1	149.999.850	111.11	139.504.764	111.11	93.00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	Persen	90	321.484.970.134	90.99	281.308.700.014	101	87.50	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	Persen	90	2.021.828.000	110.48	1.541.369.417	123	76.24	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Persen	90	773.872.540	111.11	528.470.244	123	68.29	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Persen	90	1.070.864.454	106.42	710.918.147	118	66.39	
1	Program 2: Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Melek Huruf	Persen	99.50	271.275.892.695	99.98	338.510.794.836	100.48	124.78	
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sub Kegiatan	9	118.368.479.213	9	178.934.583.354	100	151.17	
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sub Kegiatan	10	121.991.464.388	10	129.394.393.054	100	106.07	
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Sub Kegiatan	3	18.913.793.250	3	13.608.255.802	100	71.95	
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Sub Kegiatan	6	12.002.155.844	6	16.573.562.626	100	138.09	
1	Program 3: Angka Melek Huruf Program Pengembangan Kurikulum	Angka Partisipasi Kasar SD	Persen	93.25	728.949.100	92.88	526.831.629	99.60	72.27	
		Angka Partisipasi Kasar SMP	Persen	84.25		88.73		105.32		
1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Sub Kegiatan	1	728.949.101	1	526.831.630	100.00	72.27	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Program 4: Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persen	86.64	2.128.905.000	97.72	1.384.492.805	112.79	65.03	
		Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi SD/SMP	Persen	94.49		0		0		
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persen	100	2.128.905.001	97.72	1.384.492.806	98	65.03	
1	Program 5: Program Pengembangan Kesenian Tradisional (Bidang Kebudayaan)	Peningkatan Prestasi Dibidang Seni. Budaya Dan Kegamaan	Penghargaan	6	1.838.970.000	4	1.303.657.032	66.67	70.89	
1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan	2	1.838.970.000	2	1.303.657.032	100	70.89	
1	Program 6: Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cagar Budaya Yang Dilindungi	Cagar Budaya	121	1.402.850.000	121	1.056.598.426	100.00	75.32	
1	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan	3	1.402.850.000	3	1.056.598.426	100	75.32	
1	Program 7: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bidang Perpustakaan)	Persentase Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	98.25	8.220.400.960	98.32	6.395.489.615	100.07	77.80	
1	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	4	55.000.000	4	38.767.450	100.00	70.49	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	82	4.425.541.750	76.66	3.480.866.590	93.49	78.65	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kualitas pelayanan administrasi perangkat daerah	Persen	98.35	465.761.674	98.32 %	362.365.325	99.97	77.80	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	78	2.542.105.936	75.51	1.937.746.668	96.81	76.23	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	75	731.991.600	72.28	575.743.582	96.37	78.65	
1	Program 8: Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Kunjungan Perpustakaan	Orang	190000	1.295.404.150	0	1.172.550.378	0.00	90.52	
1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah keanggotaan Perpustakaan Daerah Kota Balikpapan	Orang	7000	1.129.379.150	14782	1.032.041.019	211.17	91.38	
2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pembudayaan Gemar Membaca Melalui Kegiatan Literasi	Kegiatan	5	166.025.000	5	140.509.359	100.00	84.63	
1	Program 9: Program Pengelolaan Arsip (Bidang Arsip)	Terdata dan Tertata	Persen	35.00	649.999.750	35.00	569.219.280	100.00	87.57	
1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Volume arsip yang dipelihara	Box	500	250.000.000	400	208.844.470	80.00	83.54	
2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang didata	OPD	3	120.000.000	1	96.911.760	33.33	80.76	
3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan jaringan informasi Kearsipan yang dikelola	Jenis	1	279.999.750	1	263.566.050	100.00	94.13	

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2016-2021, maka kesesuaian kinerja RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II Pada Sasaran 1 terhadap pencapaian target RPJMD dapat dilihat pada Tabel 2.129.

Tabel 2.129 Kesesuaian Tingkat Capaian Kinerja Sasaran I Terhadap RPJMD Tahun 2021

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Satuan	Capaian RPJMD Tahun 2021 (%)		Ket.
				K	Rp	
1	Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing.					
1	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	103.61		
		Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	90.40		
1	Program 1: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bidang Pendidikan)	Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah (Persen)	Persen	196.48	30.29	
2	Program 2: Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Melek Huruf	Persen	0	0	
3	Program 3: Program Pengembangan Kurikulum	Angka Partisipasi Kasar SD	Persen	0	0	
		Angka Partisipasi KasarSMP	Persen	0	0	
4	Program 4: Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persen	0	0	
		Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi SD/SMP	Persen	0	0	
5	Program 5: Program Pengembangan Kesenian Tradisional (Bidang Kebudayaan)	Peningkatan Prestasi Dibidang Seni, Budaya Dan Kegamaan	Penghargaan	11.11	67.78	
6	Program 6: Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cagar Budaya Yang Dilindungi	Cagar Budaya	100	165.82	
7	Program 7: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bidang Perpustakaan)	Persentase Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persen	0	0	
8	Program 8: Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Kunjungan Perpustakaan	Orang	0	0	
9	Program 9: Program Pengelolaan Arsip (Bidang Arsip)	Terdata Dan Tertata	Persen	483.33	178.42	

B. Capaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Berkelanjutan

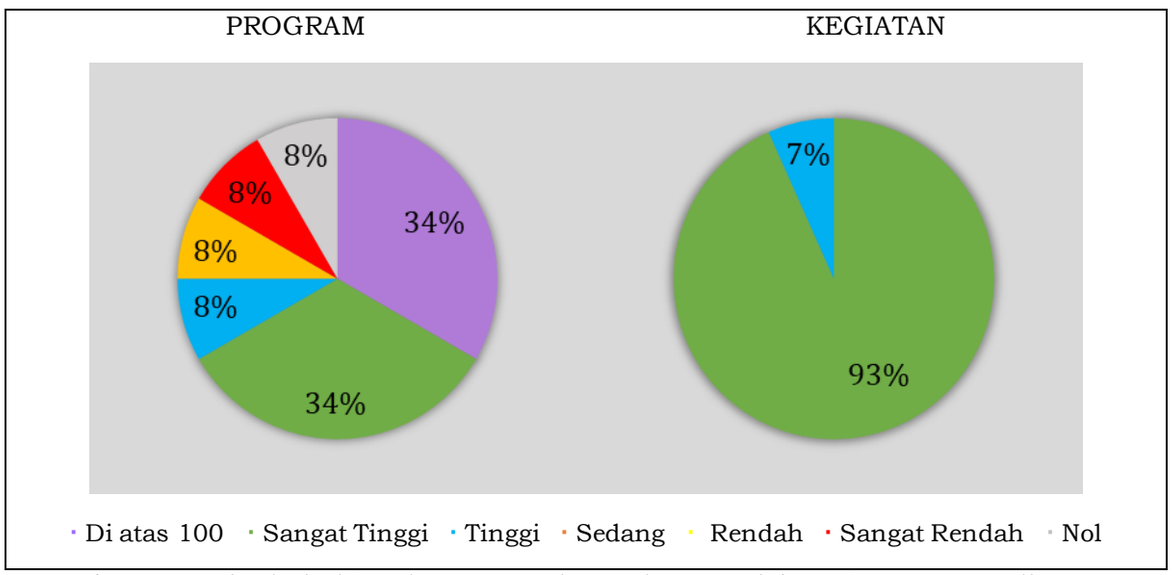
Sasaran 2 ini dimaksud untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Kesehatan masyarakat yang berkelanjutan diharapkan tercapai melalui strategi peningkatan aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan dengan rumusan operasional akan dilakukan dengan peningkatan upaya promotif dan preventif melalui lembaga dan pengelola

kesehatan masyarakat, peningkatan manajemen layanan kesehatan di tingkat FKTP dan rujukan dan optimalisasi regulasi pelayanan kesehatan. Peningkatan aksesibilitas dimaksudkan untuk kemudahan seluruh lapisan masyarakat mengakses layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Kualitas pelayanan kesehatan difokuskan ketersediaan dan profesionalisme sumber daya manusia serta sarana prasaranakesehatan. Manajemen pelayanan kesehatan diharapkan masyarakat semakin pasti dan mudah untuk mendapatkan layanan kesehatan yang cepat, tanggap, akurat dan nyaman. Sasaran 2 ini diukur oleh satu indikator yaitu Angka Harapan Hidup. Hasil evaluasi RKPD Kota Balikpapan untuk Sasaran 2 dapat dilihat pada Tabel 2.130.

Tabel 2.130 Capaian Sasaran 2 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II			Ket.
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
			K	K	K	
Tujuan 2: Mewujudkan Masyarakat yang Sehat Jasmani dan Rohani Secara Berkelanjutan.						
Sasaran Daerah 2: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Berkelanjutan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,04	74,76	100,97	

Sasaran 2 didukung oleh 5 program dan 15 kegiatan. Dari seluruh program pendukung Sasaran 2, terdapat 34 persen program yang capaiannya di atas 100 persen, 42 persen masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi. Capaian program-program ini didukung dengan capaian kegiatan-kegiatan yang hampir seluruhnya masuk dalam kategori sangat tinggi (93%) (lihat Gambar 2.75). Capaian program dan kegiatan pendukung Sasaran 2 disajikan pada Tabel 2.131. dan Tabel 2.132.



Gambar 2.75 Rekapitulasi Capaian Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 2 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

Tabel 2.131 Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran 2 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Sasaran Daerah 2: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Berkelanjutan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74.04		74.76		100.97		
1	Program 1: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bidang Pendidikan)	Angka Kesakitan	Tahun	1	102.517.850.758	1	107.072.972.408	100	104.44	Indikator Negatif
2	Program 2: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehataan Masyarakat	Angka Kesakitan	Persen	98.35	115.756.789.501	98.35	104.035.410.385	100	89.87	Indikator Negatif
3	Program 3: Program Peningkatan Kapasistas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan Berijin	Persen	90.00	11.749.201.500	90.00	676.801.573	100	5.76	
4	Program 4: Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Ijin Usaha Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan minum yang diterbitkan	Persen	98.25	382.683.500	98.25	180.833.000	100	47.25	
5	Program 5: Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Angka Kesakitan	Persen	98.25	2.652.673.500	22.63	2.888.503.700	177	108.89	Indikator Negatif

Tabel 2.132 Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Sasaran 2 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Program 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bidang Pendidikan)	Angka Kesakitan	Tahun	1	102.517.850.758	1	107.072.972.408	100	104.44	Indikator Negatif
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlakasananya Pengadaan Obat, BMHP dan Reagen, Terlaksananya Pembangunan Puskesmas	Persen	50.00	88.819.958.150	50.00	75.320.834.395	100	84.80	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah dan sub kegiatan	Sub Kegiatan	6	8.640.538.000	5	6.115.967.892	83.33	70.78	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan	2	1.358.604.608	2	1.082.750.894	100	79.70	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Darah dan Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	4	3.698.750.000	4	3.384.357.883	100	91.50	
1	Program 2 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan	Persen	98.35	115.756.789.501	98.35	104.035.410.385	100	89.87	Indikator Negatif
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Karang Jati, Terlaksananya Penyediaan Alat Kesehatan dan Pelaksanaan Kalibrasi, Terlaksananya Penyediaan Obat, Vaksin dan BMHP	Persen	100	40.722.867.500	100	5.705.399.007	100	14.01	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan	Persen	100	73.995.922.001	100	71.427.219.857	100	96.53	
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terlaksanya Kegiatan dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan sistem informasi Kesehatan secara terintegrasi	Sub Kegiatan	2	700.000.000	2	270.191.000	100	38.60	
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C. D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin RS Kelas C, D yang diterbitkan	Sub Kegiatan	1	338.000.000	1	95.730.025	100	28.32	
1	Program 3 : Program Peningkatan Kapasistas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan Berijin	Persen	90.00	11.749.201.500	90.00	676.801.573	100	5.76	
1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Balikpapan yang di terbitkan (Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan/jumlah rekomendasi yang diusulkan)	Sub Kegiatan	1	200.000.000	1	160.357.000	100	80.18	
2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Pelatihan Yang Memiliki Sertifikat	orang	45	641.701.500	45	641.701.500	100	100.00	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Program 4 : Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Ijin Usaha Farmasi. Alat Kesehatan dan Makan minum yang diterbitkan	Persen	98.25	382.683.500	98.25	180.833.000	100	47.25	
1	Pemberian Izin Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan ijin Apotek, Toko Obat dan UMOT	Bulan	12	40.715.000	12	25.960.000	100	63.76	
2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Sub Kegiatan	1	247.842.500	1	180.833.000	100	72.96	
3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya kegiatan inventarisasi sarana industri rumah tangga pangan, sarana yang diawasi 168 sarana. sampel yang di ambil dan di uji 40 sampel, dan terlaksananya monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana industri rumah tangga (IRTP)	Bulan	12	94.126.000	12	48.297.000	100	51.31	
1	Program 5 : Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Angka Kesakitan	Persen	98.25	2.652.673.500	22.63	2.888.503.700	177	108.89	Indikator Negatif
1	Advokasi. Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Bulan	12	2.425.442.000	12	2.886.854.000	100	119.02	
2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi	Bulan	12	227.231.500	12	1.649.700	100	0.73	

Kesesuaian kinerja RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II pada Sasaran 2 terhadap pencapaian target RPJMD dapat dilihat pada Tabel 2.127.

Tabel 2.133 Kesesuaian Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 2 Terhadap RPJMD Tahun 2021

NO	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Satuan	Capaian RPJMD Tahun 2021 (%)		Ket.
				K	Rp	
1	Tujuan 2: Mewujudkan Masyarakat yang Sehat Jasmani dan Rohani Secara Berkelanjutan.					
1	Sasaran Daerah 2: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Berkelanjutan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	100.97		
1	Program 1: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bidang Pendidikan)	Tingkat Angka Kesakitan	Tahun	0	0	Indikator Negatif
2	Program 2: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehataan Masyarakat	Tingkat Angka Kesakitan	Persen	0	0	Indikator Negatif
3	Program 3: Program Peningkatan Kapasistas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan Berijin	Persen	0	0	
4	Program 4: Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Ijin Usaha Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan minum yang diterbitkan	Persen	0	0	
5	Program 5: Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Tingkat Angka Kesakitan	-	0	0	Indikator Negatif

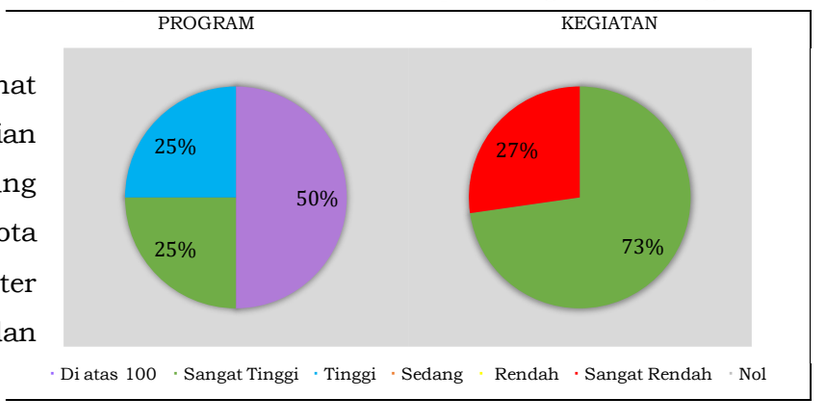
C. Capaian Kinerja Sasaran 3 Menurunnya Jumlah Pengangguran

Selain pendidikan dan Kesehatan, fokus pemerintah Kota Balikpapan juga diarahkan pada kemampuan masyarakat dalam pemenuhan sandang, pangan dan papan melalui diperoleh dari usaha dan pekerjaan. Sasaran 3 ini diarahkan untuk menurunnya jumlah pengangguran serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Sasaran ini diukur dua indikator, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) danTingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Hasil evaluasi RKPD Kota Balikpapan untuk Sasaran 3 dapat dilihat pada Tabel 2.128.

Tabel 2. 134 Capaian Sasaran 3 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II			Ket.
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
			K	K	K	
Tujuan 3: Mewujudkan Kehidupan Masyarat yang Berkualitas melalui Pengembangan Partisipasi yang Menyeluruh dan Berkesinambungan						
Sasaran Daerah 3: Menurunnya Jumlah Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase	4.55	8.94	50.89	Indikator Negatif
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persentase	64.92	64.29	99.03	

Sasaran 3 didukung oleh 4 program dan 11 kegiatan. Meskipun capaian program menunjukkan kinerja tinggi dan sangat tinggi bahkan terdapat 50 persen program mencapai lebih dari 100 persen, namun terdapat kegiatan yang capaiannya masuk kategori sangat rendah (27%) (lihat Gambar 2.76) dan data capaian program dan kegiatan pendukung Sasaran 3 hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II disajikan pada Tabel 2.135. dan Tabel 2.136.



Gambar 2.76 Rekapitulasi Capaian Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 3 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

Tabel 2.135 Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran 3 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Sasaran 3: Menurunnya Jumlah Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase	4,55		8,94		51		Indikator Negatif
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		64,92		64,29		99,03		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	Persentase	81,5	6.115.831.579	77,7	1.369.871.236	95,34	22,40	
2	Prrogram Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pelatihan Kerja	Persentase	100	958.616.500	81	785.724.083	81,00	81,96	
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terserap di Pasar Kerja	Persentase	26	163.888.000	37,3	129.075.500	143,46	78,76	
4	Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	Persentase	50	226.209.200	70	164.614.955	140,00	72,77	

Tabel 2.136 Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Sasaran 3 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	Persentase	81,5	6.115.831.579	77,7	1.369.871.236	95,34	22,40	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	Persentase	100	4.465.061.250	100	4.421.352.703	100	99,02	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	2	264.150.000	1	221.629.960	50	83,90	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	6	903.905.077	6	788.609.418	100	87,24	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan	3	188.107.752	3	127.104.114	100	67,57	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan	3	294.607.500	3	232.527.744	100	78,93	
2	Prrogram Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pelatihan Kerja	Persentase	100	958.616.500	81	785.724.083	81,00	81,96	
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Sub Kegiatan	3	908.835.000	1	780.424.083	33,33	85,87	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Sub Kegiatan	1	49.781.500	1	5.400.000	100,00	10,85	
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terserap di Pasar Kerja	Persentase	26	163.888.000	37,3	129.075.500	143,46	78,76	
1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan	2	97.988.000	1	75.090.500	50,00	76,63	
2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Sub Kegiatan	2	65.900.000	2	53.985.000	100,00	81,92	
4	Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	Persentase	50	226.209.200	70	164.614.955	140,00	72,77	
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan	3	21.000.000	3	14.338.000	100,00	68,28	
2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sub Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan	4	205.209.200	4	150.276.955	100,00	73,23	

Kesesuaian kinerja RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II pada Sasaran 3 terhadap pencapaian target RPJMD dapat dilihat pada Tabel 2.131.

Tabel 2.137 Kesesuaian Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 3 Terhadap RPJMD Tahun 2021

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Satuan	Capaian RPJMD Tahun 2021 (%)		Ket.
				K	Rp	
1	Tujuan 3: Mewujudkan Kehidupan Masyarat yang Berkualitas melalui Pengembangan Partisipasi yang Menyeluruh dan Berkesinambungan					
1	Sasaran Daerah 3: Menurunnya Jumlah Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	50.89		Indikator Negatif
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	99.03		
1	Program 1: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	Persen	161	549	
2	Program 2: Prrogram Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pelatihan Kerja	Persen	0	0	
3	Program 3: Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terserap di Pasar Kerja	Persen	267	55	
4	Program 4: Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	Persen	240	133	

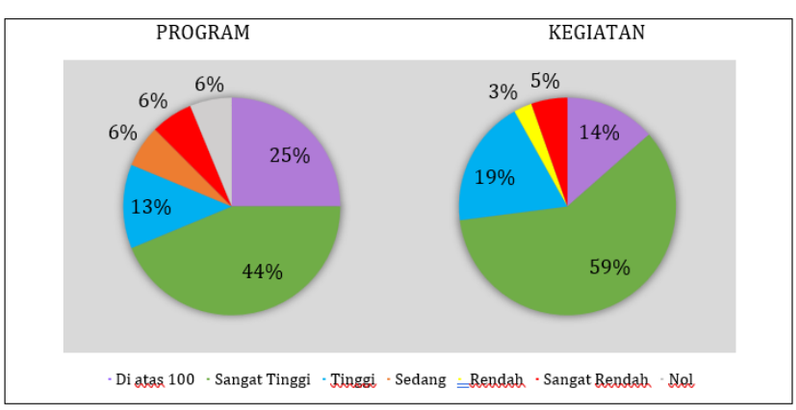
D. Capaian Kinerja Sasaran 4 Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan

Sasaran 4 diharapkan untuk dapat mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan arah pembangunan yang difokuskan pada pengendalian kependudukan, penurunan tingkat kemiskinan dan kesetaraan gender yang ditunjukkan dengan indikator IPM, tingkat kemiskinan (TKm), dan IPG. Hasil evaluasi RKPD Kota Balikpapan untuk Sasaran 4 dapat dilihat pada Tabel 2.132.

Tabel 2.138 Capaian Sasaran 4 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II			Ket.
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
			K	K	K	
Tujuan 3: Mewujudkan Kehidupan Masyarat yang Berkualitas melalui Pengembangan Partisipasi yang Menyeluruh dan Berkesinambungan						
Sasaran Daerah 4: Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Jumlah	79.53	80.71	101.48	
	Tingkat Kemiskinan (TKm)	Persen	2.3	2.89	74.34	Indikator Negatif
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Jumlah	92	89.65	97.45	

Sasaran ini didukung oleh 16 program dan 37 kegiatan. Berdasarkan rekapitulasi capaian program dan kegiatan diketahui bahwa ada 25 persen Program yang capaiannya melebihi 100 persen dan paling besar capaian program masuk pada kategori tinggi sekali (44%), hal ini selaras pula dengan capaian di level kegiatan (lihat Gambar 2.77). Secara rinci data capaian kinerja program dan kegiatan pendukung Sasaran 4 hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II disajikan pada Tabel 2.139 dan Tabel 2.140.



Gambar 2.77 Rekapitulasi Capaian Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 4 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

Tabel 2.139 Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran 4 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Sasaran 4: Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Menyeluruh dan Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Jumlah	79,53		80,71		101		
		Tingkat Kemiskinan (TKm)	Persen	2,30		2,89		74,34		Indikator Negatif
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Jumlah	92		89,65		97,45		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah	154	8.375.676.052	189	7.527.391.035	122,73	89,87	
2	Program Pemberdayaan Sosial	PSKS yang telah dibina	Persen	50,35	1.369.162.600	50,35	1.334.273.900	100	97,45	
3	Program Rehabilitasi Sosisal	PMKS yang Menerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persen	79,3	1.497.858.068	80	1.363.630.119	101	91,04	
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS	Persen	72	1.579.737.550	72,38	1.453.721.150	101	92,02	
5	Program Penanganan Bencana	Tersediannya Sarana dan Prasarana Logistik bagi Korban Bencana	Persen	20	676.471.100	20	618.995.501	100	91,50	
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Kegiatan	2	401.056.833	1	308.116.400	50	76,83	
7	Program Pengendalian Penduduk	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	Persen	100	179.927.100	100	549.262.000	100	305,27	
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Peserta KB Aktif MKJP	Persen	30,98	3.412.922.450	27,06	1.790.998.773	87,35	52,48	
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap perempuan (jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan yang telah selesai pendampingannya sampai dengan akhir tahun dibagi jumlah perempuan korban kekerasan sampai akhir tahun X 100%)	Persen	75,01	1.504.396.600	72,92	1.097.155.014	97,21	72,93	
10	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	IKM Internal Perangkat Daerah	Nilai	0	7.351.233.512	0	1.816.563.862	0%	24,71	
11	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Capaian IPG	Persen	50	224.999.910	49,37	222.182.990	98,74	98,75	
12	Program Perlindungan Perempuan	Perlindungan Perempuan	Persen	10,57	834.189.550	6,93	547.241.069	65,56	65,60	
13	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Layanan Penyedia Layanan Konseling Keluarga di Tingkat Kecamatan	Persen	83,33	219.086.360	73,59	193.501.537	88,31	88,32	
14	Program Pengelolaan Data Gender dan Anak	Persentase Jumlah RAD yang ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas KLA	Persen	100	293.146.400	100	275.789.786	100	94,08	
15	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase tindak lanjut rekomendasi gugus tugas KLA	Persen	100	229.297.700	100	225.759.805	100	98,46	
16	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Penyelesaian Penanganan Klien Anak pada UPTD PPA	Persen	65,15	918.724.113	67,02	774.561.041	102,87	84,31	

Tabel 2.140 Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran 4 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah	154	8.375.676.052	189	7.527.391.035	122,73	89,87	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indek Kepuasanan Masyarakat (IKM) layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah	35	5.648.461.550	35	4.996.460.582	100,00	88,46	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indek Kepuasanan Masyarakat (IKM) layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah	97	819.485.250	97	1.079.088.834	100,00	131,68	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan pertahun	Jumlah	6	306.050.000	6	304.061.000	100,00	99,35	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah	27	1.046.151.252	27	992.948.401	100,00	94,91	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	30	555.528.000	30	458.883.218	100,00	82,60	
2	Program Pemberdayaan Sosial	PSKS yang telah dibina	Persen	50,35	1.369.162.600	50,35	1.334.273.900	100	97,45	
1	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan dan Lembaga Sosial yang Mendapatkan sosialisasi PUB dan Tata Cara Pengajuan Hibah/Bansos	Jumlah	50	739.162.500	50	733.387.500	100	99,22	
2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	PSKS yang telah dibina	Jumlah	40	630.000.100	40	600.886.400	100	95,38	
3	Program Rehabilitasi Sosisal	PMKS yang Menerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persen	79,3	1.497.858.068	80	1.363.630.119	101	91,04	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	PMKS yang Menerima Bantuan Sosisl untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persen	79,3	622.670.839	60	516.775.024	76	82,99	
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	PMKS Miskin Penerima Bantuan Sosial Pangan yang Terlayani	Persen	90	875.187.229	25,11	846.855.095	28	96,76	
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS	Persen	72	1.579.737.550	72,38	1.453.721.150	101	92,02	
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	PMKS miskin yang terlayani	Persen	27%	1.579.737.550	96,02%	1.453.721.150	355	92,02	
5	Program Penanganan Bencana	Tersediannya Sarana dan Prasarana Logistik bagi Korban Bencana	Persen	20	676.471.100	20	618.995.501	100	91,50	
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan Korban Bencana	Jumlah	590	585.471.400	480	531.165.000	81,36	90,72	
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	Jumlah	20	90.999.700	20	87.830.601	100	96,52	
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Kegiatan	2	401.056.833	1	308.116.400	50	76,83	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Hari Pahlawan	Kegiatan	1	401.056.833	1	20.781.710	100	5,18	
7	Program Pengendalian Penduduk	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	Persen	100	179.927.100	100	549.262.000	100	305,27	
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	Persen	100	13.500.000	72,65	9.809.000	72,65	72,66	
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan terkait Pengendalian Penduduk	Kegiatan	1	166.427.100	1	545.753.000	100	327,92	
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Peserta KB Aktif MKJP	Persen	30,98	3.412.922.450	27,06	1.790.998.773	87,35	52,48	
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya PUS Peserta KB Aktif	PUS	75,974	728.455.467	84,06	612.331.691	110,64	84,06	
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	IMP terbina oleh PKB	Jumlah	34	313.200.000	93,35	292.376.940	274,56	93,35	
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kepersertaan KB MKJP (Jumlah PUS dalam Status Kawin yang Menjadi Peserta KB MKJP/Jumlah PUS dikali 100)	Persen	26,25	1.855.413.983	42,49	788.393.158	161,87	42,49	
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Intervensi pada Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas)	Jumlah	32	515.853.000	69,55	358.770.000	217,34	69,55	
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap perempuan (jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan yang telah selesai pendampingannya sampai dengan akhir tahun dibagi jumlah perempuan korban kekerasan sampai akhir tahun X 100%)	Persen	75,01	1.504.396.600	72,92	1.097.155.014	97,21	72,93	
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase cakupan jumlah kelompok BKB/BKR/BKL/UPPKA/PIK-R terbentuk	Persen	10,74	1.504.396.600	8,3	1.246.963.559	77,28	82,89	
10	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	IKM Internal Perangkat Daerah	Nilai	0	7.351.233.512	0	1.816.563.862	0	24,71	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah	14	5.903.529.900	14	5.773.988.671	100	97,81	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis Layanan Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Jumlah	14	628.020.100	14	550.368.844	100	87,64	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah	3	425.922.712	3	366.045.697	100	85,94	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Layanan Pemeliharaan Barag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinyahan Daerah	Jumlah	2	393.760.800	2	280.946.722	100	71,35	
11	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Capaian IPG	Persen	50	224.999.910	49,37	222.182.990	98,74	98,75	
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG	Dokumen	500	214.101.310	50	187.084.240	10	87,38	
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang dalam industri rumah yang terlatih	Jumlah	60	10.898.600	60	10.098.750	100	92,66	
12	Program Perlindungan Perempuan	Perlindungan Perempuan	Persen	10,57	834.189.550	6,93	547.241.069	65,56	65,60	
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan RT Terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan	Persen	8,37	280.392.750	7	239.690.023	83,63	85,48	
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO	Jumlah	1	358.438.000	1	163.728.610	100,00	45,68	
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan	Jumlah	4	195.358.800	4	143.822.436	100,00	73,62	
13	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Layanan Penyedia Layanan Konseling Keluarga di Tingkat Kecamatan	Persen	83,33	219.086.360	73,59	193.501.537	88,31	88,32	
1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	IKM terhadap Layanan PUSPPAGA HARAPAN (Pusat Pembelajaran Keluarga Sahabat Keluarga Balikpapan)	Jumlah	82	72.899.796	72	64.016.308	87,82	87,81	
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pertemuan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah	1	43.099.800	1	34.354.799	100,00	79,71	
3	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan PUSPAGA bagi Keluarga	Jumlah	5	103.086.764	5	95.130.430	100,00	92,28	
14	Program Pengelolaan Data Gender dan Anak	Persentase Jumlah RAD yang ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas KLA	Persen	100	293.146.400	100	275.789.786	100	94,08	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilih	Jumlah	12	293.146.400	12	275.789.786	100	94,08	
15	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase tindak lanjut rekomendasi gugus tugas KLA	Persen	100	229.297.700	100	225.759.805	100	98,46	
1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen rekomendasi kebijakan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi KLA oleh Kementerian PPPA	Dokumen	1	229.297.700	1	225.759.805	100	98,46	
16	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Penyelesaian Penanganan Klien Anak pada UPTD PPA	Persen	65,15	918.724.113	67,02	774.561.041	102,87	84,31	
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Wilayah RT Terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak	Persen	5,51	15.624.810	4,57	12.987.480	82,94	83,12	
2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan UPTD PPA	Jumlah	78	819.374.303	65	683.685.411	83,33	83,44	
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan untuk SDM lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah	2	83.725.000	2	77.888.150	100,00	93,03	

Kesesuaian kinerja RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II pada Sasaran 4 terhadap pencapaian target RPJMD dapat dilihat pada Tabel 2.141.

Tabel 2.141 Kesesuaian Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 4 Terhadap RPJMD Tahun 2021

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Satuan	Capaian RPJMD Tahun 2021 (%)		Ket.
				K	Rp	
1	Tujuan 3: Mewujudkan Kehidupan Masyarat yang Berkualitas melalui Pengembangan Partisipasi yang Menyeluruh dan Berkesinambungan					
1	Sasaran Daerah 4: Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Jumlah	101.48		
		Tingkat Kemiskinan (TKm)	Persen	74.34		Indikator Negatif
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Jumlah	97.45		
1	Program 1: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah	0	0	
2	Program 2: Program Pemberdayaan Sosial	PSKS yang telah dibina	Persen	0	0	
3	Program 3: Program Rehabilitasi Sosisal	PMKS yang Menerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persen	198	276	
4	Program 4: Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS	Persen	211	1124	
5	Program 5: Program Penanganan Bencana	Tersediannya Sarana dan Prasarana Logistik bagi Korban Bencana	Persen	0	0	
6	Program 6: Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Kegiatan	0	0	
7	Program 7: Program Pengendalian Penduduk	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	Persen	0	0	
8	Program 8: Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Peserta KB Aktif MKJP	Persen	183	194	
9	Program 9: Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap perempuan (jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan yang telah selesai pendampingannya sampai dengan akhir tahun dibagi jumlah perempuan korban kekerasan sampai akhir tahun X 100)	Persen	0	0	
10	Program 10: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	IKM Internal Perangkat Daerah	Nilai	0	0	
11	Program 11: Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Capaian IPG	Persen	151	78	
12	Program 12: Program Perlindungan Perempuan	Perlindungan Perempuan	Persen	0	0	
13	Program 13: Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Layanan Penyedia Layanan Konseling Keluarga di Tingkat Kecamatan	Persen	0	0	
14	Program 14: Program Pengelolaan Data Gender dan Anak	Persentase Jumlah RAD yang ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas KLA	Persen	0	0	
15	Program 15: Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase tindak lanjut rekomendasi gugus tugas KLA	Persen	0	0	
16	Program 16: Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Penyelesaian Penanganan Klien Anak pada UPTD PPA	Persen	0	0	

2.5.2. Misi 2: Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan

Misi 3 RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dijabarkan menjadi sasaran kabupaten nomor 5 dan 6 untuk memantapkan Balikpapan menjadi kota layak huni yang aman dan nyaman (*liveable city*) dengan memantapkan penyediaan berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak,

air bersih, listrik, sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik, fasilitasibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan) yang memadai, berkualitas dan berkelanjutan. Analisis capaian kinerja dua sasaran sasaran pada Misi 2 dijelaskan sebagai berikut.

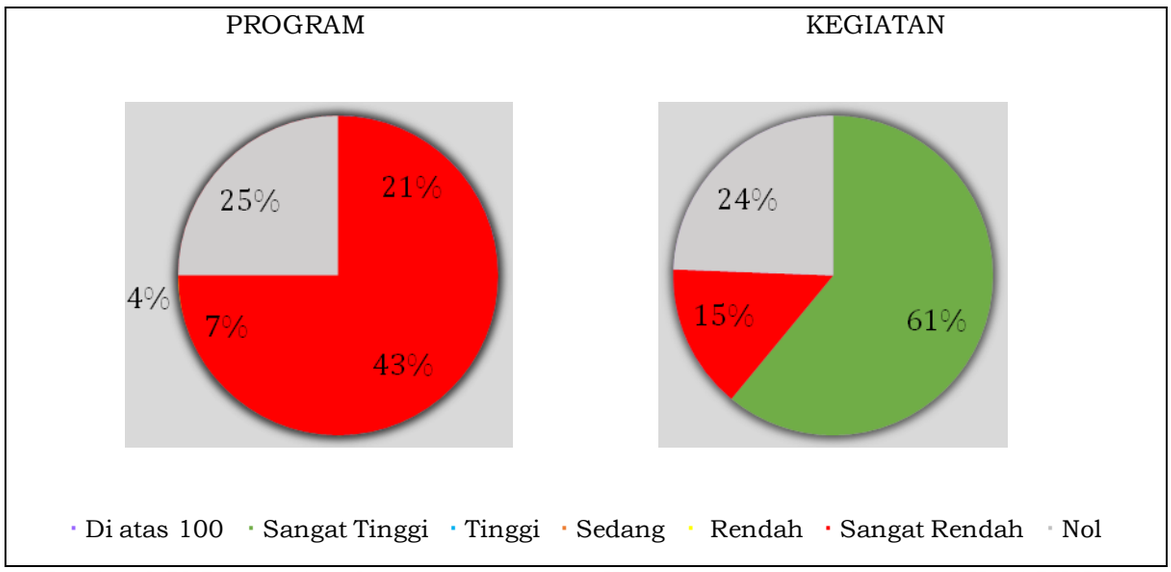
A. Capaian Kinerja Sasaran 5 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup akan dicapai pada RPJMD 2016-2021 dengan meningkatkannya indikator indeks kualitas lingkungan hidup. Hasil evaluasi RKPD Kota Balikpapan untuk Sasaran 5 dapat dilihat pada Tabel 2.136.

Tabel 2.142 Capaian Sasaran 5 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II			Ket.
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
			K	K	K	
Tujuan 4: Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan						
Sasaran Daerah 5: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		60.46	69.66	115.22	

Sasaran ini didukung oleh 28 program dan 41 kegiatan. Berdasarkan rekapitulasi capaian program dan kegiatan diketahui bahwa ada 21 persen program yang capaiannya melebihi 100 persen dan paling besar capaian program masuk pada kategori tinggi sekali (43%), namun pada level kegiatan capaian kinerja paling tinggi masuk pada level tinggi sekali sebesar 61 persen dan tercatat ada 15 persen yang masuk dalam kategori rendah sekali (lihat Gambar 2.78).



Gambar 2.78 Rekapitulasi Capaian Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 5 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

Secara rinci data capaian program dan kegiatan pendukung Sasaran 5 hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II disajikan pada Tabel 2.143 dan Tabel 2.144.

Tabel 2.143 Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran 5 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kualitas pelayanan administrasi Perangkat Daerah	Persen	75	7.299.165.758	75	6.294.656.321	100	86,24	
2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Penertiban Pemanfaatan Ruang	Persen	98.5	207.975.000	0.17	201.799.250	100.17	97,03	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	persentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan untuk jalan	Persen	80	5.000.000.000	0,00	12.651.240	0	0,25	tidak ada angka realisasi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan tata ruang di kota balikpapan	Dokumen	Perda rdtr, rtrw, isentif disinsentif 1 dokumen	1.914.073.600	28,60	1.430.477.822	100	74,73	tidak dapat dihitung karena target bukan angka
5	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase IMTN yang diterbitkan dibanding IMTN yang diusulkan oleh masyarakat	Persen	74	40.000.000	0	3.487.500	0	8,72	
6	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan pengolahan air baku	Persen	51,25	39.684.394.000	3,97	26.854.114.471	93	67,67	
7	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase IMTN yang diterbitkan dibanding IMTN yang diusulkan oleh masyarakat	Persen	74	291.199.700	87,90	280.565.200	119	96,35	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen	76,66	30.286.890.047	76,66	25.350.150.365	100	83,70	
9	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kesefiaan data dokumen perencanaan	Persen	31,25	297.999.736	31,26	233.463.704	100	78,34	
10	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dilakasanakan	Persen	1	1.033.902.742	100,00	888.127.357	100	85,90	
11	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	Persen	11	2.019.998.903	43,00	4.893.674.165	400	242,26	
12	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usaha/Kegiatan Penghasilan Limbah B3 yang Melaporkan Limbahnya	Persen	26	137.000.000	26,32	1.437.060.197	100	1048,95	
13	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha/Kegiatan yang memiliki izin lingkungan	Persen	18,29	79.000.000	18,29	78.015.950	100	98,75	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
14	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH	Persen	1	528.054	0,00	467.715.844	0	88573,57	tidak ada angka realisasi
15	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang terselenggara	Persen	1	34.988.500	100,00	33.853.000	100	96,75	
16	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan yang terselesaikan	Persen	1	99.643.000	100	80.016.230	100	80,30	
17	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase pengolahan sampah dari sumbernya	Persen	26	39.120.426.224	97,66	46.182.466.492	379	118,05	
18	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah Koleksi yang dikelola	Jumlah	1	3.033.813.022	1	3.227.136.248	100	106,37	
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Persen	100	19.213.712.600	75	14.479.531.381	75	75,36	
20	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Menurunnya Titik Banjir	Jumlah	35	11.420.000.000	24	10.768.878.847	69	94,30	
21	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Layanan Air Minum	Persen	80,90	19.500.082.910	90	17.555.802.023	111	90,03	
22	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik	Persen	47,86	71.057.799.837	46	33.008.314.091	96	46,45	
23	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Jalan dan Drainase Lingkungan Kondisi Baik	Persen	70	118.829.999.700	45	52.987.721.643	64	44,59	
24	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kantor pemerintah dalam kondisi baik	Persen	90,32	70.807.122.000	96	67.668.314.320	106	95,57	
25	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olah raga	Persen	91,07	18.100.000.000	91,07	29.721.774.175	100	164,21	
26	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan	Jumlah	1492	85.445.612.351	0	143.490.631.833	0	167,93	tidak ada angka realisasi
27	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Bersertfikat	Persen	95	250.000.000	103	257.947.353	108	103,18	
28	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	Jumlah	5	1.853.467.000	0	1.853.467.000	0	100,00	tidak ada angka realisasi

Tabel 2.144 Capaian Kinerja Kegiatam Pendukung Sasaran 5 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kualitas pelayanan administrasi Perangkat Daerah	Persen	75	7.299.165.758	0,75	6.294.656.321	100	86,24	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN DPPR	Jumlah	37	6.057.322	37	5.275.388.991	100	87091,11	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Jenis Komponen Listrik yang diadakan, Tersedianya Alat Tulis Kantor, Tersedianya makanan dan minuman Pegawai, Rapat dan Tamu Terlaksananya Belanja barang cetakan dan penggandaan, Tersedianya Bahan Bacaan, Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	Bulan	12	466.934.850	0,0094	392.942.718	0,0783	84,15	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pemersih, Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor serta Tersedianya Gaji THL/ Naban Bidang Sekretariat	Bulan	12	514.908.908	0,01	462.774.014	0,0837	89,87	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas serta Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Bulan	12	260.000.000	0,0082	163.550.571	0,0683	62,90	
2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Penertiban Pemanfaatan Ruang	Persen	1	207.975.000	0,17	201.799.250	17,3	97,0	
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Honorarium & Operasional TABG, SLF (rekomendasi IMB, Pemeriksaan dok. SLF, Rekomendasi pembongkaran, perancangan peraturan daerah)	Jumlah	4	207.975.000	0,7895	201.799.250	19,7	97,0	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	persentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan untuk jalan	Persen	1	5.000.000.000	0,002	12.651.240	0,250	0,2530248	
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengadaan tanah untuk pelebaran jalan	M2	600	5.000.000.000	0	12.651.240	0,000	0.25	Belum ada angka persentase realisasi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	penyelenggaraan tata ruang di kota balikpapan	Dokumen	1	1.914.073.600	0,286	1.430.477.822	28,6	74,73	
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Dokumen Revisi Perda Revisi RTRW dan percepatan RDTR	Jumlah	2	1.258.448.600	1	865.847.190	50	68,80	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen Rencana Teknis Tata Ruang sebagai panduan pengembangan kawasan	Jumlah	1	500.000.000	0,5	423.242.000	50	84,65	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penertiban bangunan yang melanggar ketentuan di Kota Balikpapan	Jumlah	10	155.625.000	0,0074	141.388.632	0,074	90,85	
5	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase IMTN yang diterbitkan dibanding IMTN yang diusulkan oleh masyarakat	Persen	74	40.000.000	0	3.487.500	0	8,71875	belum ada persentase realisasi
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah rapat fasilitasi permasalahan tanah dan peninjauan lokasi tanah	Jumlah	20 kali	40.000.000	0	3.487.500	0	8,71875	belum ada persentase realisasi
6	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	persentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan pengolahan air baku	Persen	1	39.684.394.000	0,0397	26.854.114.471	7,75	67,67	
1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengadaan tanah untuk pengolahan air baku dan saras umum	Hektar	29	39.684.394.000	0,46	26.854.114.471	1,61	67,67	
7	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase IMTN yang diterbitkan dibanding IMTN yang diusulkan oleh masyarakat	Persen	74	291.199.700	0,879	280.565.200	118,78	96,34	
1	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah IMTN yang terbit	Bidang	2.000	291.199.700	0,879	280.565.200	0,044	96,34	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen	77	30.286.890.047	0,7666	25.350.150.365	100	83,70	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah	71	10.494.611.083	70,98	9.088.630.794	100	86,60	
2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah pendapatan kewenangan administrasi daerah	Jumlah	0	155.370.264	0	1.385.150.339	0	891,51	belum ada angka target dan realisasi
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkatr Daerah	Jumlah	74	505.375.000	0	489.806.350	0	96,91	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	79	1.647.154.100	0	1.415.781.744	0	85,95	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah	72	16.085.379.600	0	12.970.781.138	0	80,63	
9	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kesefiaan data dokumen perencanaan	Persentase	0	297.999.736	0,3126	233.463.704	100,03	78,34	
1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen PLH yang menjadi acuan lingkungan hidup	Jumlah	1	297.999.736	1	233.463.704	100	78,34	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
10	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dilakasanakan	Persentase	100	1.033.902.742	1	888.127.357	100	85,90	
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah	21	883.902.742	21	739.003.607	100	83,61	
2	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Pemulihan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah	1	150.000.000	1	149.123.750	100	99,42	
11	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	Persentase	10,75	2.019.998.903	0,43	4.893.674.165	400	242,26	
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Tutupan Lahan yang Menjadi Tanggung Jawab Kota	Jumlah	6802,43	2.019.998.903	6802,43	4.893.674.165	100	242,261	
12	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usaha/Kegiatan Penghasilan Limbah B3 yang Melaporkan Limbahnya	Persen	26,32	137.000.000	0,2632	1.437.060.197	100	1048,95	
1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan B3	Jumlah	15	137.000.000	15	126.375.062	100	92,24	
13	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha/Kegiatan yang memiliki izin lingkungan	Persen	0	79.000.000	0,1829	78.015.950	100	98,75	
1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang Memenuhi Persyaratan Lingkungan	Jumlah	75	79.000.000	70	78.015.950	93,3	98,75	
14	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH	Persen	100	528.053.500	0	467.715.844		88,57	belum ada persentase realisasi
1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Jumlah	80	528.053.500	80	467.715.844	100	88,57	
15	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang terselenggara	Persen	100	34.988.500	1	33.853.000	100	96,75	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah	2	34.988.500	2	33.853.000	100	96,75	
16	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan yang terselesaikan	Persen	100	99.643.000	100	80.016.230	100	80,30	
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah	100	99.643.000	100	80.016.230	100	80,30	
17	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase pengolahan sampah dari sumbernya	Persen	25,80	39.120.426.224	0,9766	46.182.466.492	378,53	118,05	
1	Pengelolaan Sampah	jumlah tonase sampah yang dikurangi	Jumlah	171.749	39.120.426.224	171.749	46.182.466.492	100	118,05	
18	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah Koleksi yang dikelola	Jumlah	1	3.033.813.022	1	3.227.136.248	100	106,37	
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi yang dikelola	Jumlah	1	3.033.813.022	1	3.227.136.248	100	106,37	
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Persen	100	19.213.712.600	0,75	14.479.531.381	75	75,36	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Terlaksana	Sub Kegiatan	1	9.608.659.100	1	8.988.366.866	100	93,54	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Terlaksana	Sub Kegiatan	4	756.700.000	4	456.571.365	100	60,34	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Terlaksana	Sub Kegiatan	2	5.100.000.000	2	1.485.959.200	100	29,14	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Terlaksana	Sub Kegiatan	2	1.857.552.500	2	1.772.498.440	100	95,42	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Terlaksana	Sub Kegiatan	3	1.890.801.000	3	1.576.135.510	100	83,36	
20	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Menurunnya Titik Banjir	Jumlah	35	11.420.000.000	24	10.768.878.847	68,57	94,30	
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan yang terlaksanan	Sub Kegiatan	2	11.420.000.000	1	10.768.878.847	50	94,30	
21	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Layanan Air Minum	Persen	80,90	19.500.082.910	0,9	17.555.802.023	111,25	90,03	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Terlaksana	Sub Kegiatan	3	19.500.082.910	3	17.555.802.023	100	90,03	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
22	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik	Persen	47,86	71.057.799.837	0,46	33.008.314.091	96,11	46,45	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan yang terlaksana	Sub Kegiatan	6	71.057.799.837	6	33.008.314.091	100	46,45	
23	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Jalan dan Drainase Lingkungan Kondisi Baik	Persen	70	118.829.999.700	45	52.987.721.643	64,29	44,59	
1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Terlaksana	Sub Kegiatan	4	118.829.999.700	4	52.987.721.643	100	44,59	
24	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kantor pemerintah dalam kondisi baik	Persen	90,32	70.807.122.000	96	67.668.314.320	106,29	95,567102	
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Sub Kegiatan Terlaksana	Sub Kegiatan	2	70.807.122.000	2	67.668.314.320	100	95,567102	
25	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olah raga	Persen	91,07	18.100.000.000	0,9107	29.721.774.175	100	164,21	
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Terlaksana	Sub Kegiatan	1	18.100.000.000	1	67.668.314.319	100	373,86	
26	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan	Jumlah	1.492	85.445.612.351	0	1,43491E+11	0	167,93	belum ada ada angka realisasi
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan yang terlaksana	Jumlah	7	85.445.612.351	7	1,43491E+11	100	167,93	
27	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Bersertfikat	Persen	95	250.000.000	103	257.947.353	108	0	
1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Sub Kegiatan Terlaksana	Jumlah	1	250.000.000	1	257.947.353	100	0	
28	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	Jumlah	5	1.853.467.000	0	1.853.467.000		100	belum ada persentase realisasi
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR IPAL komunal terbangun	Jumlah	150	1.853.467.000	150	1.853.467.000	100	100	

Kesesuaian kinerja RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II Pada Sasaran 5 terhadap pencapaian target RPJMD dapat dilihat pada Tabel 2.145.

Tabel 2.145 Kesesuaian Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 5 Terhadap RPJMD Tahun 2021

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Satuan	Capaian RPJMD Tahun 2021 (%)		Ket
				K	Rp	
1	Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas kota yang berwawasan lingkungan					
1	Sasaran Daerah 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup			115.22		
1	Program 1: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas pelayanan administrasi Perangkat Daerah	Persen	2	21,947	
2	Program 2: Program Penataan Bangunan Gedung	Presentase Penertiban Pemanfaatan Ruang	Persen	0	0	
3	Program 3: Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan untuk jalan	Persen	0,006	0,219	
4	Program 4: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyelenggaraan tata ruang di Kota Balikpapan	Dokumen	0	1,49	
5	Program 4: Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase IMTN yang diterbitkan dibanding IMTN yang diusulkan oleh masyarakat	Persen	0	0	
6	Program 6: Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan pengolahan air baku	Persen	0	0	
7	Program 7: Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase IMTN yang diterbitkan dibanding IMTN yang diusulkan oleh masyarakat	Persen	0	1,25	
8	Program 8: Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen	1,255	0,96	
9	Program 9: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesediaan data dokumen perencanaan	Persen	0	0	
10	Program 10: Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dilakasanakan	Persen	0	0	
11	Program 11: Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase RTH yang dikelola	Persen	0	0	
12	Program 12: Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Usaha/Kegiatan Penghasilan Limbah B3 yang Melaporkan Limbahnya	Persen	0	0	
13	Program 13: Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Usaha/Kegiatan yang memiliki izin lingkungan	Persen	0	0	
14	Program 14: Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH	Persen	0	0	
15	Program 15: Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang terselenggara	Persen	0	0	
16	Program 16: Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan yang terselesaikan	Persen	0	0	
17	Program 17: Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	persentase pengolahan sampah dari sumbernya	Persen	0	0	
18	Program 18: Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah Koleksi yang dikelola	Jumlah	4,785	1,06	
19	Program 19: Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Persen	0	0	
20	Program 20: Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Menurunnya Titik Banjir	Jumlah	0	0	
21	Program 21: Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan Layanan Air Minum	Persen	2,099	0,85	
22	Program 22: Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Presentase Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik	Persen	2,214	7,72	
23	Program 23: Program Pengembangan Permukiman	Persentase Jalan dan Drainase Lingkungan Kondisi Baik	Persen	0	0	
24	Program 24: Program Penataan Bangunan Gedung	Kantor pemerintah dalam kondisi baik	Persen	2,009	1,31	
25	Program 25: Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olah raga	Persen	2	2,68	
26	Program 26: Program Penyelenggaraan Jalan	Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan	Jumlah	0	3,27	
27	Program 27: Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Bersertfikat	Persen	2,136	3,57	
28	Program 28: Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	Jumlah	0	1,18	

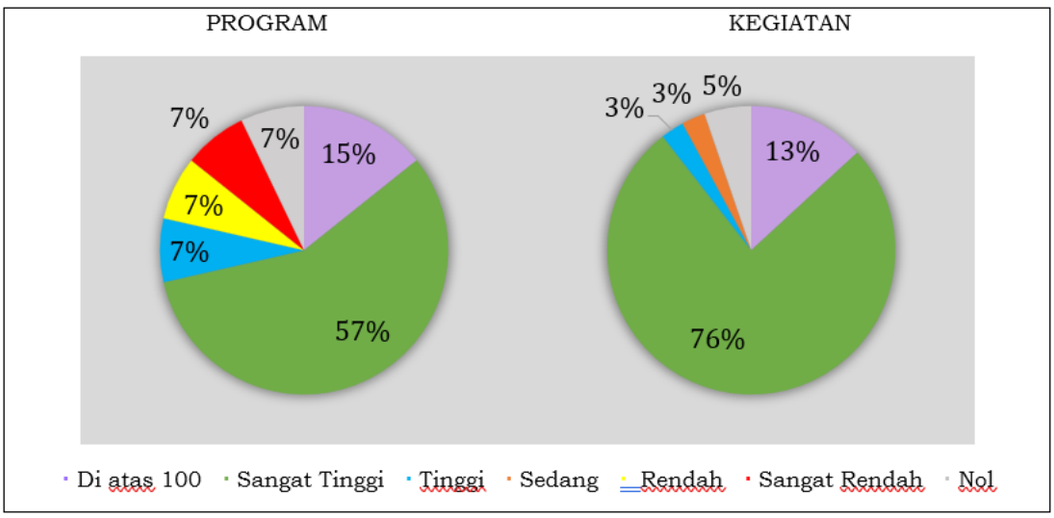
B. Capaian Kinerja Sasaran 6 Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Sasaran 6 adalah untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan pada RPJMD 2016-2021 dengan indikator indeks kota layak. Hasil evaluasi RKPD Kota Balikpapan untuk Sasaran 6 menunjukkan bahwa realisasi melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2021, sehingga mencapai kinerja sebesar 105,34 persen (lihat Tabel 2.140).

Tabel 2.146 Capaian Sasaran 6 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II			Ket.
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
			K	K	K	
Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan						
Sasaran Daerah 6: Meningkatkan Keamanan, kenyamanan, dan ketertiban Lingkungan	Index Kota Layak/ *Livable City Index*		74.5	78.48	105.34	

Untuk mencapai Sasaran 6 ini didukung oleh 14 program dan 38 kegiatan. Berdasarkan rekapitulasi capaian program dan kegiatan diketahui bahwa ada 15 persen Program yang capaiannya melebihi 100 persen dan paling besar capaian program masuk pada kategori tinggi sekali (57%). Selaras dengan capaian program, pada level kegiatan capaian kinerja yang mencapai kinerja lebih dari 100 sebesar 61 persen dan tercatat ada 15 persen yang masuk dalam kategori rendah sekali (lihat Gambar 2.83). Secara rinci data capaian program dan kegiatan pendukung Sasaran 6 hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II disajikan pada Tabel 2.147 dan Tabel 2.148.



Gambar 2.79 Rekapitulasi Capaian Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 6 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

Tabel 2.147 Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran 6 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatkan Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Lingkungan		Index Kota Layak/ *Livable City Index*							
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah		100	11.197.610.202	85	9.465.256.193	85	84,53	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Menurunnya Backlog Perumahan		56299	2.455.000.000	94.039	3.383.523.057	167,03	137,82	
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh		257	2.301.511.000	0	2.240.710.045			Belum ada nilai realisasi
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Taman yang Terkelola dan Terpelihara		100	23.100.590.916	100	22067980840	100	95,53	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi		100	3.089.466.523	96	3.148.069.363	96	101,90	
6	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundangan, Penunjang Tim Desk Pemilu dan Penyaluran Bantuan Keuangan Parpol serta PAW Anggota DPRD		100	1.454.997.960	100	2669169429	100	183,45	
7	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah subkegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		1	1.454.997.960	1	1360328979	100	93,4935	
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Terciptanya Pemahaman akan Bahaya Dampak Negatif dari Minuman Keras dan Narkoba		2,90	500.000.000	2,9	421.695.723	100	84,3391	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi		98,25	25339629000	98,25	73.267.162.513	100	289,14	
10	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penurunan Angka Kriminalitas		17	6.183.401.728	17	8.039.174.003	100	130,01	
11	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		12	6.052.011.728	12	7.861.851.503	100	129,90	
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah		100	25.530.119.946	61,81	11.840.964.242	61,81	46,38	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
13	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Dampak Bencana (saat bencana)		90	3.324.539.300	94	3.260.008.585	104,01	98,06	
14	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan Bencana dan bahaya Kebakaran		100	5.669.305.312	36,24	4.968.535.617	36,24	87,64	

Tabel 2.148 Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Sasaran 6 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah		100	11.197.610.202	85	9.465.256.193	85	84,53	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Sub Kegiatan		1	6.146.400.540	1	5.530.482.355	100	89,98	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Sub Kegiatan		4	510.856.508	4	455.693.317	100	89,20	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sub Kegiatan		1	200.500.000	1	196.552.400	100	98,03	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Sub Kegiatan		3	686.114.404	3	489.537.481	100	71,35	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Sub Kegiatan		3	3.653.738.750	3	2.792.990.640	100	76,44	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Menurunnya Backlog Perumahan		56299	2.455.000.000	94039	3.383.523.057	167,03	137,82	
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Sub Kegiatan		2	2.200.000.000	3	3.139.164.983	150	142,69	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Sub Kegiatan		1	255.000.000	1	244.358.074,00	100	95,83	
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh		257	2.301.511.000	0	2.240.710.045	0	97,358	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Sub Kegiatan		2	437.000.000	2	404.783.470	100,00	92,63	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Unit Rumah Tiak Layak Huni yang Diperbaiki		114	1.864.511.000	350	1.835.926.575	307,02	98,47	
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Taman yang Terkelola dan Terpelihara		100	23.100.590.916	100	22.067.980.840	100	95,53	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terlaksananya Sub Kegiatan		2	23.100.590.916	2	22067980840	100	95,53	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi		100	3.089.466.523	96	3.148.069.363	96	101,90	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah sub kegiatan administrasi perangkat daerah		13	2.075.811.075	13	2.219.012.212	100	106,90	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Memberikan bimbingan teknis bagi aparatur		2	49.777.500	2	11.397.000	100	22,8959	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor		1	544.611.850	1	669.739.855	100	122,9756	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi jasa penunjang urasan kantor		12	236.766.098	12	175.597.852	100	74,1651	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dan jenis unit peralatan kantor		1	182.500.000	1	72.322.444	100	39,6287	
6	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Terjalinnya silaturahmi dan koordinasi antara Pemkot dengan Organisasi kemasyarakatan		100	391.050.000	100	728.630.699	100	186,33	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah subkegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		2	391.050.000	2	156.329.256	100	39,98	
7	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundangan, Penunjang Tim Desk Pemilu dan Penyaluran Bantuan Keuangan Parpol serta PAW Anggota DPRD		100	1.454.997.960	100	2.669.169.429	100	183,45	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah subkegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		1	1.454.997.960	1	136.032.979	100	9,35	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah subkegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		2	524.995.000	2	1.308.840.450	100	249,31	
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Terciptanya Pemahaman akan Bahaya Dampak Negatif dari Minuman Keras dan Narkoba		2,90	500.000.000	2,90	421.695.723	100	84,3391	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah pelaksanaan koordinasi Monitoring		42	500.000.000	42	421.695.723	100	84,3391	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi		98,25	25.339.629.000	98,25	73.267.162.513	100	289,1406	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Satpol PP		14	23.071.301.350	14	68.645.541.258	100	297,5365	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		12	1.132.023.280	12	2.653.922.967	100	234,4407	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	169.200.000	100	1.125.950.500	100	665,4554	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	622.983.900	12	841.747.788	100	135,1155	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	1.089.980.500	12	1.655.940.474	100	151,9239	
10	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penurunan Angka Kriminalitas		17	6.183.401.728	17	8.039.174.003	100	130,0122	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		12	6.052.011.728	12	7.861.851.503	100	129,9048	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah		12	81.400.000	12	97.242.400	100	119,4624	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)		1	49.990.000	1	80.080.100	100	160,1922	
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah		100	25.530.119.946	61,81	11.840.964.242	61,81	46,38	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Upah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah		100	19.940.148.150	0	0	0	0,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya		425	650.000.000	97	737.100.288	0,228824	113,40	Tidak dapat dihitung karena satuan target dan realisasi tidak sama
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor		35	699.971.800	35	688.748.954	100	98,40	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelancaran pelayanan umum perkantoran		100	634.999.996	84,75	456.559.260	84,75	71,90	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM layanan pemeliharaan BMD		100	3.605.000.000	96,75	9.958.555.740	96,75	276,24	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
12	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Dampak Bencana (saat bencana)		90	3.324.539.300	94	3.260.008.585	104,01	98,06	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan penanggulangan bencana		83	80.000.000	98	78.562.000	118,03	98,20	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	pelayanan penanggulanan benacana pada masyarakat		7	1.451.999.300	7	1.578.213.785	100,00	108,69	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase cakupan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		95,40	1.617.540.000	89	1.430.795.800	92,89	88,46	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan penataan sistem dasar penanggulangan bencana		50	175.000.000	99	172.437.000	197,08	98,54	
13	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan Bencana dan bahaya Kebakaran		100	5.669.305.312	36,24	4.968.535.617	36,24	87,64	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran		93	4.943.455.312	92,86	4.590.394.622	100,28	92,86	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran		70	725.850.000	52,10	378.140.995	74,43	52,10	

Kesesuaian kinerja RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II pada Sasaran 6 terhadap pencapaian target RPJMD dapat dilihat pada Tabel 2.149.

Tabel 2.149 Kesesuaian Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 6 Terhadap RPJMD Tahun 2021

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Satuan	Capaian RPJMD Tahun 2021 (%)		Ket.
				K	Rp	
	Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan					
	Sasaran Daerah 6 : Meningkatkan Keamanan, kenyamanan, dan ketertiban Lingkungan			105,34		
1	Program 1: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Persen	2	33,72	
2	Program 2: Program Pengembangan Perumahan	Menurunnya Backlog Perumahan	Jumlah	3,34	9,48	
3	Program 3: Program Kawasan Permukiman	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	Persen	0	0,43	
4	Program 4: Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Taman yang Terkelola dan Terpelihara	Jumlah	2	0,79	
5	Program 5: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	Persen	0	0	
6	Program 6: Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Terjalinnya silaturahmi dan koordinasi antara Pemkot dengan Organisasi kemasyarakatan	Jumlah	50	26,53	
7	Program 7: Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundangan, Penunjang Tim Desk Pemilu dan Penyaluran Bantuan Keuangan Parpol serta PAW Anggota DPRD	Jumlah	0	0	
8	Program 8: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	Persen	94.00	56,41	
9	Program 9: Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penurunan Angka Kriminalitas	Persen	0	0	
10	Program 10: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	Persen	0	0	
11	Program 11: Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Dampak Bencana (saat bencana)	Persen	0	0	
12	Program 12: Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana dan bahaya Kebakaran	Persen	0	0	

2.5.3. Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Representatif

Misi 3 merupakan aspek penting dan vital dalam mendorong percepatan proses pembangunan wilayah karena infrastruktur yang berkualitas berperan penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Untuk dapat memperoleh modal pembangunan yang tidak tergerus dan berkualitas maka perlu upaya serius untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu komitmen pemerintah Kota Balikpapan ditunjukkan dengan satu sasaran yang dijelaskan sebagai berikut.

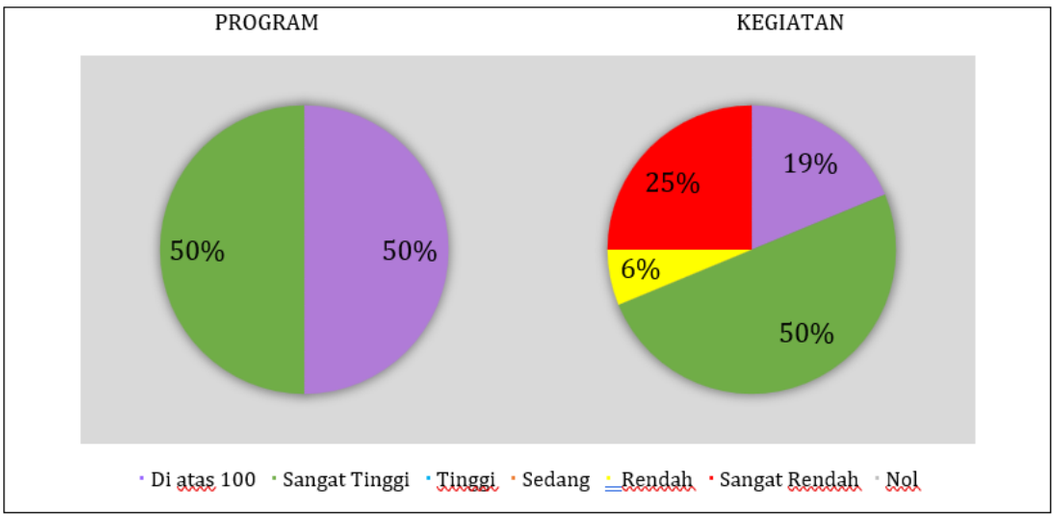
A. Capaian Kinerja Sasaran 7 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan infrastruktur yang handal dapat memberikan efek pengganda yang dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Sasaran ini memiliki satu indikator yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur. Hasil evaluasi RKPD Kota Balikpapan untuk Sasaran 7 menunjukkan kinerja tinggi sekali sebesar 99,11persen (lihat Tabel 2.150).

Tabel 2.150 Capaian Sasaran 7 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II			Ket.
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
			K	K	K	
Tujuan 5: Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur						
Sasaran Daerah 7: Terwujudnya Infrastruktur yang Handal	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Jumlah	79	78,3	99,11	

Pada Sasaran 7 terdapat 4 program dan 16 kegiatan pendukung. Berdasarkan rekapitulasi capaian program dan kegiatan diketahui bahwa ada 15 persen program yang capaiannya melebihi 100 persen dan paling besar capaian program masuk pada kategori tinggi sekali (57%). Selaras dengan capaian program, pada level kegiatan capaian kinerja yang mencapai kinerja lebih dari 100 sebesar 61 persen dan tercatat ada 15 persen yang masuk dalam kategori rendah sekali (lihat Gambar 2.80).



Gambar 2.80 Rekapitulasi Capaian Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

Secara rinci data capaian program dan kegiatan pendukung Sasaran 7 hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II disajikan pada Tabel 2.151 dan Tabel 2.152.

Tabel 2.151 Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran 7 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sasaran 7: Terwujudnya Infrastruktur yang Handal	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Jumlah	79		78,3		99,11		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Persen	100	25.367.515.272	98	22.280.282.232	98	87,83	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Rambu Jalan	Jumlah	47,3	42.322.687.772	50,05	51.909.683.916	105,81	122,65	
	Program Pengelolaan Pelayaran	Pelayanan Kepelabuhan	Jumlah	100	290.000.000	100	444.713.509	100	153,35	
	Program Pengembangan Perumahan	Menurunnya Backlog Perumahan	Unit	56.299	1.700.000.000	94.039	847.806.422	167,03	49,87	

Tabel 2.152 Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Sasaran 7 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

	Sasaran/Program	**Indikator**	**Satuan**	**Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II**						**Ket**
				Target		**Realisasi**		**Capaian (%)**		
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Persen	100	25.367.515.272	98	22.280.282.232	98	87,83	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan yang terlaksana	Sub Kegiatan	2	16.638.775.000	72	12.663.383.290	3600	76,11	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan yang terlaksana	Sub Kegiatan	1	600.000.000	1	267.251.600	100	44,54	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan yang terlaksana	Sub Kegiatan	6	1.113.000.000	1	1.168.151.880	16,67	104,96	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan yang terlaksana	Sub Kegiatan	3	4.651.500.272	1	6.039.146.843	33,33	129,83	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan yang terlaksana	Sub Kegiatan	2	2.364.240.000	1	2.142.348.619	50	90,61	
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Rambu Jalan	Jumlah	47,3	42.322.687.772	50,05	51.909.683.916	105,81	122,65	
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan yang terlaksana	Sub Kegiatan	1	149.720.000	1	143.320.000	100,00	95,73	
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan	Sub Kegiatan	3	30.513.000.000	4	45.869.722.671	133,33	150,33	
3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan	Sub Kegiatan	2	400.000.000	2	396.321.959	100,00	99,08	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan	Sub Kegiatan	1	3.999.999.972	2	3.734.172.900	200,00	93,35	
5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan	Sub Kegiatan	2	2.800.000.000	2	2.317.991.250	100,00	82,79	
6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan yang terlaksana	Sub Kegiatan	2	1.720.000.000	2	256.932.097	100,00	14,94	
7	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	jumlah sub kegiatan yang terlaksana	Sub Kegiatan	2	1.700.201.800	3	1.166.252.499	150,00	68,59	
8	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan yang terlaksana	Sub Kegiatan	2	1.039.766.000	0	817.387.790	0,00	78,61	
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Pelayanan Kepelabuhan	Jumlah	100	290.000.000	100	444.713.509	100	153,35	
1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah sub kegiatan yang terlaksana	Sub Kegiatan	1	70.000.000	1	56.651.500	100	80,93	
2	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah sub kegiatan yang terlaksana	Sub Kegiatan	1	220.000.000	1	388.062.009	100	176,39	
4	Program Pengembangan Perumahan	Menurunnya Backlog Perumahan	Unit	56.299	1.700.000.000	94.039	847.806.422	167,03	49,87	
1	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah sub kegiatan yang terlaksana	Persen	100	1.700.000.000	75	847.806.422	75,00	49,87	

Kesesuaian kinerja RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II pada Sasaran 7 terhadap pencapaian target RPJMD dapat dilihat pada Tabel 2.153.

Tabel 2.153 Kesesuaian Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 7 Terhadap RPJMD Tahun 2021

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Satuan	Capaian RPJMD Tahun 2021 (%)		Ket.
				K	Rp	
1	Tujuan 5 : Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur					
1	Sasaran 7: Terwujudnya Infrastruktur yang Handal	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Jumlah	99,11		
1	Program 1: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Persen	204	671	
2	Program 2: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Rambu Jalan	Jumlah	140	7112	
3	Program 3: Program Pengelolaan Pelayaran	Pelayanan Kepelabuhan	Jumlah	0	0	
4	Program 4: Program Pengembangan Perumahan	Menurunnya Backlog Perumahan	Unit	715	753	

2.5.4. Misi 4 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif

Kinerja Misi 4 untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif dan kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan (*green economy*) dan berkeadilan. Misi ini didukung oleh dua sasaran daerah yang akan dijelaskan sebagai berikut.

A. Capaian Kinerja Sasaran 8 Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat

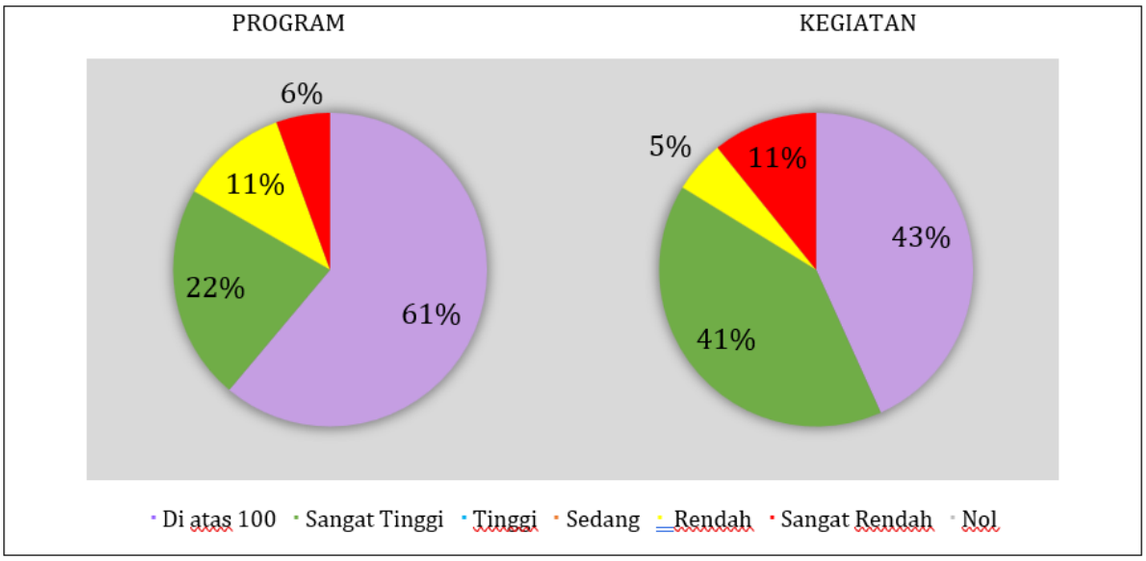
Perkembangan perekonomian kota sangat tergantung pada pergerakan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya pemerintah perlu mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dengan menciptakan kreatifitas yang dapat menimbulkan nilai tambah bagi usaha masyarakat, sehingga dapat terciptanya pemerataan pendapatan masyarakat Kota Balikpapan. Sasaran ini diukur dengan dua indikator, yaitu Indeks Gini Ratio dan PDRB Per Kapita dengan pencapaian kinerja di tahun 2021 Semester II dapat dilihat pada Tabel 2.148.

Tabel 2.154 Capaian Sasaran 8 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II			Ket.
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
			K	K	K	
Tujuan 6: Menggerakkan sendi-sendi Perekonomian Masyarakat.						
Sasaran Daerah 8: Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini Ratio		0.3	0.311	96.46	
	PDRB perkapita	Juta	126.64	160.1	126.42	

Sasaran ini didukung oleh 14 program dan 24 kegiatan. Berdasarkan rekapitulasi capaian program dan kegiatan diketahui bahwa sebagian besar program mencapai lebih dari 100 persen (61%) dan sangat tinggi sebesar 22

persen. Hal ini berbanding lurus dengan capaian pada level kegiatan (lihat Gambar 2.81). Secara rinci data capaian program dan kegiatan pendukung Sasaran 8 hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II disajikan pada Tabel 2.155 dan Tabel 2.156.



Gambar 2.81 Rekapitulasi Capaian Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 8 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

Tabel 2.155 Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran 8 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sasaran 8: Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat									
1	Program 1: PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri eksisiting terhadap perizinan industri di KIK	Persen	28.00	8,983,416,345	34.67	6,687,178,370	123.82	74.44	
		Persentase industri eksisting terhadap siteplan SIKS		85.00		54.34		63.93		
		Persentase industri eksisting terhadap siteplan SIKT		20.00		10.34		51.70		
		Persentase industri yang menggunakan bahan baku lokal		15.00		5.54		36.93		
2	Program 2: PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Pertumbuhan IKM	Persen	0.90	79,985,700	27.16	37,693,200	3017.78	47.12	
3	Program 3: PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM menerapkan teknologi industri	Persen	25.00	200,000,000	43.37	183,050,000	173.48	91.53	
4	Program 4: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persen	100.00	8,735,108,150	100.00	7,389,139,025	100.00	84.59	
5	Program 5: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Jumlah Koperasi aktif	Persen	80.90	77,485,550	90.80	44,808,050	112.24	57.83	
6	Program 6: PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Pengurus/pengaw as/pengelola Koperasi bersertifikat	Orang	60	545,304,000	150	486,185,667	250.00	89.16	
7	Program 7: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan	UMKM	180	317,099,800	180	274,925,250	100.00	86.70	
8	Program 8: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase kredit UMKM terhadap seluruh jumlah kredit di bank	Persen	36.60	116,399,900	36.74	110,443,600	100.38	94.88	
9	Program 9: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persen	85	13,765,892,294	85	11,378,611,357	100.00	82.66	
10	Program 10: PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar berklasifikasi A	Persen	22.00	10,753,734,482	33.30	8,875,801,328	151.36	82.54	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
11	Program 11: PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan unit usaha dagang	Unit	70	99,945,000	214	82,009,290	305.71	82.05	
12	Program 12: PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai eksport bersih	Juta Dollar	2946.6	474,918,000	6260.4	435,079,664	212.46	91.61	
13	Program 13: PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Sesuai Standar	Persen	39.00	548,880,207	66.30	459,710,881	170.00	83.75	
		Persentase ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) tera/tera ulang		80.00		78.38		97.98		
14	Program 14: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Unit Usaha Dagang	Unit	70	99,850,000	214	82,009,290	305.71	82.13	

Tabel 2.156 Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Sasaran 8 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri eksisiting terhadap perizinan industri di KIK	Persen	28.00	8,983,416,345	34.67	6,687,178,370	123.82	74.44	
		Persentase industri eksisting terhadap siteplan SIKS		85.00		54.34		63.93		
		Persentase industri eksisting terhadap siteplan SIKT		20.00		10.34		51.70		
		Persentase industri yang menggunakan bahan baku lokal		15.00		5.54		36.93		
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Pertumbuhan IKM	Persen	0.90	79,985,700	27.16	37,693,200	3017.78	47.12	
1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan IKM	Persen	0.90	79,985,700	27.16	37,693,200	3017.78	47.12	
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM menerapkan teknologi industri	Persen	25.00	200,000,000	43.37	183,050,000	173.48	91.53	
1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM menerapkan teknologi industri	Persen	25.00	200,000,000	43.37	183,050,000	173.48	91.53	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persen	100.00	8,735,108,150	100.00	7,389,139,025	100.00	84.59	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Persen	100.00	5,926,094,000	100.00	5,092,606,714	100.00	85.94	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Persen	100.00	1,341,000,000	41.34	1,201,030,472	41.34	89.56	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Persen	100.00	978,514,150	36.78	741,826,997	36.78	75.81	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Persen	100.00	489,500,000	75.86	353,674,842	75.86	72.25	
5	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Jumlah Koperasi aktif	Persen	80.90	77,485,550	90.80	44,808,050	112.24	57.83	
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah koperasi aktif	Persen	80.90	77,485,550	90.80	44,808,050	112.24	57.83	
6	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Pengurus/pengaw as/pengelola Koperasi bersertifikat	Orang	60	545,304,000	150	486,185,667	250.00	89.16	
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus/pengawas/pengelola koperasi bersertifikat	Orang	60	342,400,000	150	323,239,084	250.00	94.40	
2	Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pendamping koperasi dan UMKM	Orang	2	202,904,000	2	162,946,583	100.00	80.31	
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan	UMKM	180	317,099,800	180	274,925,250	100.00	86.70	
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan	UMKM	180	317,099,800	180	274,925,250	100.00	86.70	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase kredit UMKM terhadap seluruh jumlah kredit di bank	Persen	36.60	116,399,900	36.74	110,443,600	100.38	94.88	
1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase kredit UMKM terhadap seluruh jumlah kredit di Bank	Persen	36.60	116,399,900	36.74	110,443,600	100.38	94.88	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persen	85.00	13,765,892,294	85.00	11,378,611,357	100.00	82.66	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan yang terlaksana	Sub kegiatan	1	10,228,056,250	1	8,690,541,766	100.00	84.97	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan yang terlaksana	Sub kegiatan	6	1,242,897,050	0	1,074,343,142	0.00	86.44	Target 6, realisasi 0
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan yang terlaksana	Sub kegiatan	4	1,695,728,244	3	1,155,377,263	75.00	68.13	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan yang terlaksana	Sub kegiatan	3	599,210,750	3	458,349,186	100.00	76.49	
10	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar berklasifikasi A	Persen	22.00	10,753,734,482	33.30	8,875,801,328	151.36	82.54	
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sub kegiatan yang terlaksana	Sub kegiatan	1	7,209,824,842	1	5,557,168,452	100.00	77.08	
2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah sub kegiatan yang terlaksana	Sub kegiatan	2	3,543,909,640	2	3,318,632,876	100.00	93.64	
11	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan unit usaha dagang	Unit	70	99,945,000	214	82,009,290	305.71	82.05	
1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan yang terlaksana	Sub kegiatan	1	99,945,000	1	71,104,753	100.00	71.14	
12	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai eksport bersih (juta dollar)	Juta Dollar	2946.60	474,918,000	6,260.40	435,079,664	212.46	91.61	
1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan yang terlaksana	Sub kegiatan	2	474,918,000	2	435,079,664	100.00	91.61	
13	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Sesuai Standar	Persen	39.00	548,880,207	66.30	459,710,881	170.00	83.75	
		Persentase ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) tera/tera ulang	Persen	80.00		78.38		97.98		
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah sub kegiatan yang terlaksana	Sub kegiatan	2	548,880,207	2	459,710,881	100.00	83.75	
14	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Unit Usaha Dagang	Unit	70	99,850,000	214	82,009,290	305.71	82.13	
1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah sub kegiatan yang terlaksana	Sub kegiatan	1	99,850,000	1	82,009,290	100.00	82.13	

Kesesuaian kinerja RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II pada Sasaran 8 terhadap pencapaian target RPJMD dapat dilihat pada Tabel 2.157.

Tabel 2.157 Kesesuaian Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 8 Terhadap RPJMD Tahun 2021

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Satuan	Capaian RPJMD Tahun 2021 (%)		Ket.
				K	Rp	
1	Tujuan 6: Menggerakkan sendi-sendi Perekonomian Masyarakat.					
1	Sasaran 8: Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini Ratio	Juta	96.46		
		PDRB perkapita		126.42		
		Persentase industri eksisting terhadap perizinan industri di KIK,	Persen	34.67	85.03	
1	Program 1: Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase industri eksisting terhadap siteplan SIKS,		54.34		
		Persentase industri eksisting terhadap siteplan SIKT,		10.34		
		Persentase industri yang menggunakan bahan baku lokal		5.54		
2	Program 2: Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan IKM	Persen	3107.00	1.53	Target 0,9 sedangkan realisasi 27,96
3	Program 3: Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM menerapkan teknologi industri	Persen	294.00	18.58	
4	Program 4: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persen			target RPJMD tidak ditemukan
5	Program 5: Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Jumlah Koperasi aktif	Persen	220.62	46.57	
6	Program 6: Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Jumlah Pengurus/pengawas/pengelola Koperasi bersertifikat	Orang	726.67	150.63	
7	Program 7: Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan	UMKM	195.00	40.29	
8	Program 8: Program Pengembangan UMKM	Persentase kredit UMKM terhadap seluruh jumlah kredit di bank	Persen	186.61	120.30	
9	Program 9: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persen	169.00	488.54	
10	Program 10: Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase pasar berklasifikasi A	Persen	151.36	613.76	
11	Program 11: Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Cakupan unit usaha dagang	Unit	322.00	21.52	
12	Program 12: Program Pengembangan Ekspor	Nilai eksport bersih	Juta Dollar	312	311.23	
13	Program 13: Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Presentase Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Sesuai Standar, Persentase ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) tera/tera ulang	Persen	334,74 186,25	153.18	
14	Program 14: Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan Unit Usaha Dagang	Unit			target RPJMD tidak ditemukan

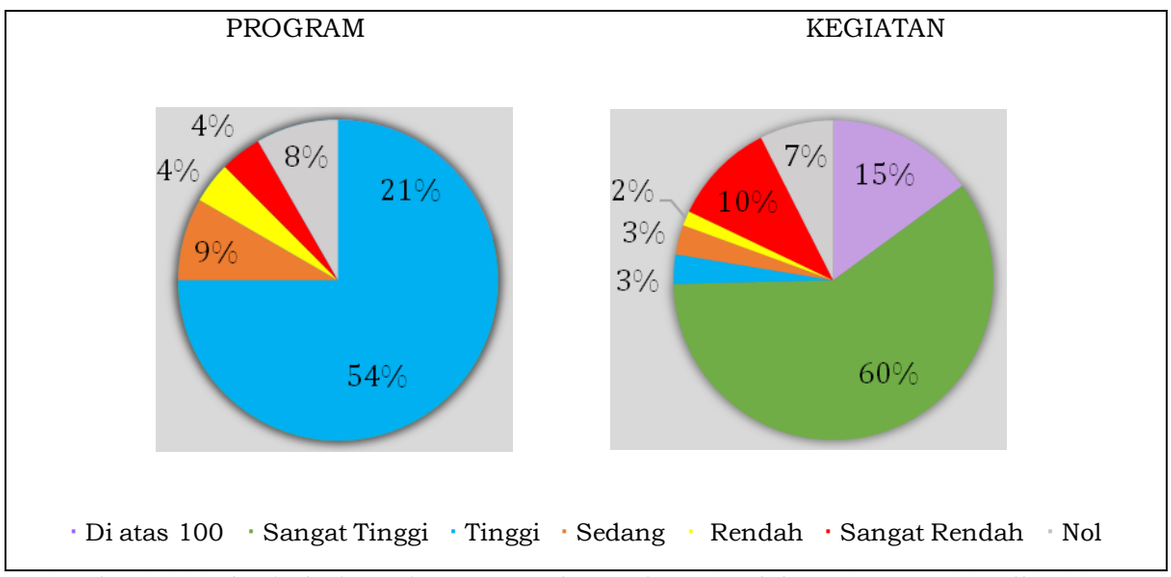
B. Capaian Kinerja Sasaran 9 Mendorong Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan

Sasaran ini diarahkan untukmeningkatkan pertumbuhan produksi dengan penerapan ekonomi hijau diharapkan akan menghasilkan perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Pencapaian sasaran ini dengan mendorong meningkatnya nilai PDRB Nonmigas (ADHK) yang capaiannya pada tahun 2021 Semester II sebesar 102,15 persen (lihat Tabel 2.158).

Tabel 2.158 Capaian Sasaran 9 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II			Ket.
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
			K	K	K	
Tujuan 7: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau						
Sasaran Daerah 9: Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Nilai PDRB Non Migas (ADHK)	Trilliun	38.62	40.61	105.15	

Sasaran ini didukung oleh 23 program dan 45 kegiatan. Berdasarkan rekapitulasi capaian program dan kegiatan diketahui bahwa sebagian besar program dan kegi atan mencapai lebih dari 100 persen dan sangat tinggi (lihat Gambar 2.82). Secara rinci data capaian program dan kegiatan pendukung Sasaran 9 hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II disajikan pada Tabel 2.159 dan Tabel 2.160.



Gambar 2.82 Rekapitulasi Capaian Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 9 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

Tabel 2.159 Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran 9 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sasaran 9: Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan									
1	Program 1: PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	Destinasi	2	2,205,395,000	2	3,483,169,464	100.00	157.94	
2	Program 2: PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	Wisatawan	2488535	2,579,892,608	2488535	2,500,375,817	100.00	96.92	
3	Program 3: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah asosiasi yang bermitra	Asosiasi	10	480,000,000	100	244,285,000	1000.00	50.89	
4	Program 4: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	3.00	17,566,799,022	2.00	14,764,525,329	66.67	84.05	
5	Program 5: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persen	88.00	609,589,536	10.00	580,890,645	11.36	95.29	
6	Program 6: PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase jumlah sampel aman (kandungan residunya dibawah ambang batas) yang diperiksa terhadap total sampel yang diperiksa	Persen	100.00	100,000,000	103.00	63,227,821	103.00	63.23	
7	Program 7: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persen	100	10,764,745,382	100	9,710,178,875	100.00	90.20	
8	Program 8: PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	eningkatan jumlah pemuda berestasi	Orang	50	4,824,755,000	48	2,775,332,768	96.00	57.52	
9	Program 9: PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya Atlet Berestasi	Persen	30.00	10,529,293,064	30.00	910,063,876	100.00	8.64	
		Peningkatan prestasi olahraga (jumlah medali)	Medali	40 provinsi, 41 nasional	5,665,132,024	322 43	4,234,928,647	100	75	
10	Program 10: PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan aktif	Persen	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	100.00	
11	Program 11: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persen	100.00	11,754,912,768	100.00	10,196,683,064	100.00	86.74	
12	Program 12: PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rencana investas	Trilliun	6.5	249,994,400	6.5	15,707,200	100.00	6.28	
13	Program 13: PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase rencana investor PMA terhadap PMDN swasta nasional	Persen	25.00	299,999,800	25.00	197,184,494	100.00	65.73	
14	Program 14: PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	SKM pelayanan perizinan	Indeks	88.9	999,002,148	89.06	716,288,036	100.18	71.70	
15	Program 15: PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Tingkat Kepatuhan Perizinan Penanaman Modal	Izin	145	566,222,134	145	422,657,813	100.00	74.65	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16	Program 16: PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara online	Persen	40.00	980,933,752	40.00	916,285,310	100.00	93.41	
17	Program 17: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	Persen	10.00	848,004,446	10.00	673,077,571	100.00	79.37	
18	Program 18: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Prasarana Pertanian yang tersedia	Persen	100	573,684,500	100	1,293,898,085	100	225.54	
19	Program 19: PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase Prasarana Pertanian yang tersedia	Persen	83.00	783,315,540	869.00	654,977,570	1046.99	83.62	
20	Program 20: PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Kenaikan Produksi Perkebunan	Ton	291	98,850,000	4686.58	93,980,600	1610.51	95.07	
21	Program 21: PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas kelompok tani	Persen	75.00	444,960,672	40.14	291,000,213	53.52	65.40	
22	Program 22: PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	146.7	99,999,300	143.61	99,034,995	97.89	99.04	
23	Program 23: PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Kenaikan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	302.4	638,440,072	210.74	535,426,718	69.69	83.86	

Tabel 2.160 Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Sasaran 9 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	WTP Opini	WTP		WTP		100		
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Yang Tersusun	Dokumen	1	-	0	34.643.132	0	0	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	persen	35	10.234.553.941	95	8.721.879.951	85.2199	85.22	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai di Bappeda Litbang	tahun	1	10.234.553.941	1	6.204.128.807	100	60.62	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlasananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	sub kegiatan	5	10.234.553.941	5	3.052.375.381	100	29.82	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	3	10.234.553.941	3	347.988.203	100	3.40	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan BMD	sub kegiatan	3	10.234.553.941	3	478.094.226	100	4.67	
5	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen laporan kinerja	dokumen	2	10.234.553.941	2	104.736.500	100	1.02	
3	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase target kinerja Perencanaan	persen	88	2.437.613.450	0	-	0	0.00	
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah laporan kegiatan Musrenbang dan penyusunan RKPD	laporan	3	1.000.000.000	3	651.658.856	100	65.17	
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah aplikasi perencanaan pembangunan	aplikasi	1	1.257.613.450	1	898.588.750	100	71.45	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja	dokumen	4	180.000.000	0	-	0	0.00	
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan Hasil Penelitian	persen	100	587.312.250	100	577.766.000	100	98.37	
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen Kajian Survey Indeks Persepsi Korupsi Kota Balikpapan	dokumen	1	225.000.000	1	222.970.000	100	99.10	
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen Kajian Survey Indeks Pelayanan Infrastruktur dan Kota Layak Huni	dokumen	1	300.000.000	1	299.450.000	100	99.82	
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Seminar Kreteknov 2021 dan Tersediannya Informasi dan Data Pelaku Inovasi	laporan/ dokumen	1	62.312.250	1	55.346.000	100	88.82	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.936.938.522	0	-	0	0.00	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	sub kegiatan	1	9.367.326.800	0	-	0	0.00	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	sub kegiatan	2	74.752.500	1	46.872.700	16.66	62.70	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	sub kegiatan	6	1.092.003.640	18	1.127.368.402	600	103.24	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	3	778.580.182	12	670.358.465	400	86.10	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	3	596.900.400	12	555.071.497	1200	92.99	
6	Penataan Organisasi	Jumlah Sub Kegiatan dari Kegiatan Penataan Organisasi	sub kegiatan	1	27.375.000	1	225.000	100	0.82	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan/ Pengawasan	persen	90	211.810.000	102.35	416.812.500	113.72	196.79	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah subkegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	sub kegiatan	1	22.375.000	1	4.812.500	100	21.51	
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Sub Kegiatan dari Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	sub kegiatan	1	189.435.000	1	412.000.000	100	217.49	
7	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan/ Pengawasan	persen	90	218.540.000	83.74	115.497.000	93.0444	52.85	
1	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Sub Kegiatan dari Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	sub kegiatan	2	218.540.000	2	112.209.500	100	51.35	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	persen	95	6.118.733.801	95	5.014.250.019	100	81.95	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya gaji dan tunjangan asn di diskominfo	bulan	14	4.492.443.000	14	3.664.040.989	100	81.56	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya sub kegiatan	sub kegiatan	3	528.562.500	3	749.554.069	100	141.81	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya sub kegiatan	sub kegiatan	1	412.780.000	1	394.820.000	100	95.65	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya sub kegiatan	sub kegiatan	3	428.173.301	3	405.597.912	100	94.73	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya sub kegiatan	sub kegiatan	2	256.775.000	2	195.057.049	100	75.96	
9	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis TIK		100	3.644.464.880	101	3.489.162.994	101	95.74	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Aplikasi yang terintegrasi	sub kegiatan	6	3.644.464.880	6	3.489.162.994	100	95.74	
10	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		aplikasi	1	3.652.497.300	1	3.406.700.807	100	93.27	
1	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sub kegiatan	sub kegiatan	3	3.652.497.300	3	3.406.696.807	100	93.27	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Pengumpulan data statistik pada OPD	OPD	36	217.150.000	36	195.772.000	100	90.16	
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sub kegiatan	sub kegiatan	1	217.150.000	1	195.772.000	100	90.16	
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Kota		60	49.918.000	60	19.751.933	100	39.57	
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sub kegiatan	sub kegiatan	1	49.918.000	1	19.751.933	100	39.57	
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyelesaian dokumen keuangan Tepat Waktu	persen	100	97.970.411.490	100	-	100	0.00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Subkegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	sub kegiatan	2	30.000.000	2	29.683.940	100	98.95	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	sub kegiatan	6	28.527.658.950	6	22.460.364.883	100	78.73	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas dan Persentase fasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100	1.030.000.000	100	561.024.023	100	54.47	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	sub kegiatan	7	26.267.959.490	7	15.819.883.710	100	60.23	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	unit	2	1.600.000.000	0	739.200.000	0	46.20	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	sub kegiatan	2	17.589.361.500	2	15.394.314.682	100	87.52	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	sub kegiatan	2	13.688.483.000	2	12.524.671.409	100	91.50	
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	14	1.216.538.000	14	1.137.223.446	100	93.48	
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah pengadaan perlengkapan di rumah jabatan yang disediakan	jenis	7	5.379.167.000	11	4.217.124.802	157.143	78.40	
10	Penataan Organisasi	Persentase fasilitasi Penataan Organisasi	persen	100	676.998.650	100	106.167.392	100	15.68	
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Subkegiatan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi PImpinan	sub kegiatan	3	1.964.244.900	3	653.267.900	100	33.26	
14	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase potensi peningkatan nilai Swadaya Masyarakat Dalam kegiatan Pembangunan di Kelurahan	persen	7.5	50.396.459.226	0	-	0	0	
1	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan	persen	100	32.470.571.560	1	186.529.427	1	0.57	
2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	sub kegiatan	3	12.523.413.966	1	8.584.413.742	33.33	68.55	
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	sub kegiatan	3	1.434.130.550	3	506.279.315	100	35.30	
4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Subkegiatan Kerjasama Daerah	sub kegiatan	1	3.968.343.150	1	2.967.352.918	100	74.78	
15	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Laju Inflasi	persen	4	2.333.174.631	2.28	106.870.866	143	4.58	
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	sub kegiatan	3	562.348.131	3	114.980.130	100	20.45	
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan APBD yang tepat Waktu, Efektif dan Efisien	persen	80	953.926.500	80	509.384.968	100	53.40	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah subkegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	sub kegiatan	3	816.900.000	3	647.623.622	100	79.28	
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persen	100	71.850.527.044	100	40.768.310.197	100	56.74	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah PNS Setwan	orang	36	4.841.255.850	36	3.627.006.079	100	74.92	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi kantor	jenis	5	16.537.632.230	5	80.464.560	100	0.49	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sewa Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	0	0	0	-	0	0	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jenis pelayanan adm perkantoran	jenis	3	2.841.471.964	3	2.177.771.146	100	76.64	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan	jenis	2	6.180.000.000	2	2.459.880.504	100	39.80	
6	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD	orang	45	33.500.167.000	180	27.710.836.370	400	82.72	
7	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah jenis pelayanan administrasi kantor	jenis	2	7.950.000.000	2	4.001.688.038	100	50.34	
17	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Rancangan Produk Hukum yang dapat diselesaikan menjadi Produk Hukum Daerah	persen	30	24.443.277.580	29.4	12.093.673.444	98	49.48	
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Naskah Akademik/Kajian	kajian/ NA	8	10.832.777.580	8	3.092.266.303	100	28.55	
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah anggota Badan Anggaran yang mengikuti kompetensi	orang	23	2.000.000.000	23	1.063.019.234	100	53.15	
3	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD	orang	45	6.710.500.000	45	5.347.525.183	100	79.69	
4	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah reses	kegiatan	3	2.500.000.000	3	1.674.398.948	100	66.98	
5	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Anggota DPRD	orang	45	900.000.000	45	360.620.795	100	40.07	
6	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Anggota DPRD Badan Musyawarah	orang	23	1.500.000.000	23	916.463.776	100	61.10	
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan administrasi perkantoran	persen	100	36.542.904.676	6	34.826.510.745	6	95.30	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluai kinerja per triwulan	dokumen	4	335.000.000	1	330.270.075	25	98.59	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			32.876.279.000		31.695.725.263	0	96.41	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Baaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	sub kegiatan	6	1.889.667.600	6	1.811.647.722	100	95.87	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	sub kegiatan	2	666.958.076	2	566.363.944	100	84.92	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeiharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioal atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	sub kegiatan	3	775.000.000	3	574.847.201	100	74.17	
19	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase PD dengan Realisasi Anggaran diatas 85persen, Persentase Proses Penyelesaian RKA/DPA	persen	94.44	123.639.702.043	0	90.825.488.016	0	73.46	
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terselenggaranya RKA, Perda Dan Perwal APBD Kota Balikpapan	persen	100	2,143,000,000	100	1.888.944.782	100	88.14	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terselenggaranya Penatausahaan Pengelolaan Keuangan	persen	100	1,195,000,000	100	1.134.352.906	100	94.92	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	sub kegiatan	3	710.000.000	3	525.132.479	100	73.96	
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	persen	100	118.991.702.043	1	86.268.846.304	1	72.50	
5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Aplikasi Pengelola Keuangan yang terpelihara dan ter- update	sub kegiatan	2	600.000.000	1	1.008.879.545	50	168.15	
20	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Jumlah Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	persen	40.77	3.160.000.000	0	20.350.201.942	0	643.99	
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Tanah Pemerintah yang Bersertipikat	persen	40.77	3.160.000.000	217	20.350.201.942	532.254	643.99	
21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kualitas pelayanan perangkat daerah	persen	100	39.315.849.530	75	20.760.644.260	75	52.80	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	36.737.059.500	100	24.171.128.652	100	65.79	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kualitas pelayanan administrasi	persen	100	999.862.950	100	1.029.298.431	100	102.94	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	Nilai	100	842.298.300	100	731.862.618	100	86.89	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	persen	100	736.628.780	75	2.404.195.857	75	326.38	
22	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Pajak daerah dan rertribusi daerah terhadap APBD	persen	23.05	6.835.393.020	24.32	5.879.366.854	105.51	86.01	
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya Sub Kegiatan	sub kegiatan	9	6.835.393.020	9	5.879.366.854	100	86.01	
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Nilai hasil survey kepuasan masyarakat	Nilai	80	9.275.361.006	82.64	7.736.170.805	103.3	83.41	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kualitas pelayanan administrasi perkantoran	persen	80	7.322.763.000	82.64	6.176.951.667	103.3	84.35	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	sub kegiatan	5	1.490.415.470	5	1.254.608.152	100	84.18	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	3	121.692.536	3	107.811.871	100	88.59	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	2	340.490.000	2	196.799.115	100	57.80	
24	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	persen	100	3.736.449.090	78.25	2.033.383.772	78.25	54.42	
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah subkegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	sub kegiatan	5	1.502.000.640	5	1.067.627.272	100	71.08	
2	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah sub kegiatan Mutasi dan Promosi	sub kegiatan	3	1.006.768.200	3	95.951.200	100	9.53	
3	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah sub kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	sub kegiatan	3	1.139.387.000	3	772.700.750	100	67.82	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah sub kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	sub kegiatan	5	88.293.250	100	64.741.550	2000	73.33	
25	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir dan kompetensi	persen	100	7.826.461.136	0	4.642.151.780	0	59.31	
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah sub kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	sub kegiatan	2	1.029.770.300	2	727.343.700	100	70.63	
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah sub kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	sub kegiatan	1	6.796.690.836	1	3.914.808.080	100	57.60	
26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM internal perangkat daerah	persen	77	9.264.854.052	78.94	8.848.965.280	102.51	95.51	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	tahun	1	5.352.731.300	1	5.030.353.091	100	93.98	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	sub kegiatan	5	2.852.464.500	5	3.261.237.198	100	114.33	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	3	508.564.252	3	225.087.398	100	44.26	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKM Internal tentang layanan pemeliharaan BMD	persen	80	551.094.000	80	332.287.593	100	60.30	
27	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase perekaman KTP	persen	98	2.486.442.576	99.57	2.491.648.717	101.60	100.21	
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	sub kegiatan	2	2.486.442.576	2	2.491.648.717	100	100.21	
28	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	persen	98	632.786.396	97.77	383.656.400	99.7653	60.63	
1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	sub kegiatan	1	632.786.396	1	383.656.400	100	60.63	
29	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan kota Balikpapan Kepada Pemangku Kepentingan	persen	41.18	942.117.716	1	466.284.250	2.42	49.49	
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan	sub kegiatan	1	620.117.716	1	466.284.250	100	75.19	
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	sub kegiatan	1	322.000.000	0	-	0	0.00	
30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah hasil pengendalian dan evaluasi kinerja out put dan kinerja keuangan	dokumen	2	13.837.265.534	2	29.463.714.418	100	212.93	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah subkegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	sub kegiatan	2	29.999.450	2	40.188.850	100	133.97	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	sub kegiatan	1	10.031.633.300	1	22.705.108.284	100	226.34	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	sub kegiatan	6	1.293.897.692	6	2.329.445.142	100	180.03	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	2	1.734.891.092	2	3.723.728.496	100	214.64	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	3	715.196.000	3	1.220.781.201	100	170.69	
6	Penataan Organisasi	Jumlah sub kegiatan Penataan Organisasi	sub kegiatan	1	31.648.000	1	33.536.200	100	105.97	
31	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan peranan kecamatan dan kelurahan	persen	84	313.477.000	84	5.027.411.919	100	1603.76	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	sub kegiatan	2	223.132.600	2	108.993.050	100	48.85	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	sub kegiatan	1	17.938.750	1	10.913.100	100	60.84	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	sub kegiatan	1	72.405.650	1	65.178.650	100	90.02	
32	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jumlah RT yang mendapat bantuan dana SPGRM dan Persentase kehadiran peserta PKK	persen	84	2.238.405.650	84	2.588.081.010	100	115.62	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah sub Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	sub kegiatan	2	1.997.141.600	2	1.422.719.250	100	71.24	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah sub kegiatan	sub kegiatan	4	241.264.050	4	253.124.550	100	104.92	
33	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan peranan kecamatan dan kelurahan	persen	84	99.424.900	89	46.773.000	105.95	47.04	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sub kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	sub kegiatan	1	99.424.900	1	46.773.000	100	47.04	
34	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tercapainya kinerja dan keuangan	persen	80	14.892.338.797	0	14.808.702.105	0	99.44	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah	dokumen	1	25.424.950	1	21.210.650	100	83.42	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	sub kegiatan	1	9.983.481.600	1	9.020.921.196	100	90.36	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	sub kegiatan	1	21.000.000	1	13.800.000	100	65.71	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	sub kegiatan	5	1.851.466.247	5	1.709.389.622	100	92.33	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	sub kegiatan	1	248890000	0	-	0	0.00	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	3	1.970.495.600	3	1.610.898.979	100	81.75	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	sub kegiatan	3	988.090.400	3	821.582.679	100	83.15	
8	Penataan Organisasi	Jumlah Sub Kegiatan Penataan Organisasi	sub kegiatan	1	52.380.000	1	50.123.500	100	95.69	
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	persen	100	137.378.250	100	3.077.758.988	100	2240.35	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	sub kegiatan	2	21.350.350	2	25.425.200	100	119.09	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	sub kegiatan	2	26.318.900.000	2	2.166.131.400	100	82.30	
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	sub kegiatan	1	89.709.000	1	80.994.000	100	90.29	
36	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai potensi swadaya masyarakat	persen	100	858.912.325	0	1.870.816.675	0	217.81	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	sub kegiatan	20	715.204.325	20	1.680.490.575	100	234.97	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya sub kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	sub kegiatan	4	143.708.000	4	190.326.100	100	132.44	
37	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	persen	100	47.905.000	0	47.905.000	0	100	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sub Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	sub kegiatan	1	47.905.000	0	47.905.000	0	100	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
38	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	persen	82	13.506.739.076	82	9.700.807.294	100	71.82	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	sub kegiatan	1	19.998.000	0	-	0	0.00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	sub kegiatan	1	9.152.406.400	1	7.425.328.434	100	81.13	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	sub kegiatan	6	1.583.621.237	6	816.683.458	100	51.57	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	2	1.967.613.439	2	416.537.708	100	21.17	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	3	642.400.000	3	1.042.257.694	100	162.24	
6	Penataan Organisasi	Jumlah Sub Kegiatan Penataan Organisasi	sub kegiatan	1	140.700.000	0	-	0	0.00	
39	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan peranan kecamatan dan kelurahan	persen	85	380.670.500	1	178.362.900	1.17	46.85	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	sub kegiatan	2	176.971.100	2	8.155.100	100	4.61	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	sub kegiatan	1	113.699.400	1	107.006.800	100	94.11	
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	sub kegiatan	1	90.000.000	1	63.201.000	100	70.22	
40	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kehadiran peserta sosialisasi TTG posyantek dan LPM	persen	90	1.322.435.967	90	4.262.593.992	100	322.33	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan	sub kegiatan	2	1.002.886.967	2	4.130.864.992	100	411.90	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	sub kegiatan	4	319.549.000	4	131.729.000	100	41.22	
41	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan peranan kecamatan dan kelurahan	persen	85	187.131.207	85	131.078.000	100	70.05	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	sub kegiatan	1	187.131.207	1	131.078.000	100	70.05	
42	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya Kapasitas Aparatur	persen	100	15.026.133.234	100	13.255.077.239	100	88.21	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub KegiatanAdministrasi Keuangan Perangkat Daerah	sub kegiatan	1	10.005.451.300	1	8.976.919.147	100	89.72	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	sub kegiatan	5	819.796.122	5	784.762.457	100	95.73	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	sub kegiatan	1	-	0	-	0	0	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	3	3.351.710.706	3	2.831.990.907	100	84.49	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	3	762.420.106	3	582.874.628	100	76.45	
6	Penataan Organisasi	Jumlah Sub Kegiatan Penataan Organisasi	sub kegiatan	2	86.755.000	2	78.530.100	100	90.52	
43	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	persen	90	642.209.800	90	4.081.145.571	100	635.48	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	sub kegiatan	2	121.131.000	2	90.461.000	100	74.68	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	sub kegiatan	2	366.315.500	2	3.860.475.171	100	1053.87	
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	sub kegiatan	2	154.763.300	2	130.209.400	100	84.13	
44	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase prestasi yang diraih	persen	94	729.279.700	94	1.257.562.750	100	172.44	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	sub kegiatan	2	577.276.400	2	1.138.087.950	100	197.15	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	sub kegiatan	4	152.003.300	4	119.474.800	100	78.60	
45	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	persen	90	217.675.000	90	33.275.000	100	15.29	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Sub Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	sub kegiatan	1	217.675.000	1	33.275.000	100	15.29	
46	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja perangkat Daerah	persen	100	16.917.967.208	100	13.714.898.604	100	81.07	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah subkegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	sub kegiatan	1	10.000.000	1	3.911.500	100	39.12	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	sub kegiatan	1	11.496.067.800	1	10.055.261.160	100	87.47	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah subkegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	sub kegiatan	6	1.269.731.791	6	1.139.507.927	100	89.74	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah subkegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	sub kegiatan	2	451.816.700	2	32.265.000	100	7.14	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah subkegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	2	2.505.625.737	2	1.877.953.146	100	74.95	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah subkegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	4	1.184.725.180	4	638.264.871	100	53.87	
47	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan peran kecamatan dan kelurahan	persen	85	847.257.825	85	3.090.241.386	100	364.73	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah subkegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	sub kegiatan	2	545.202.100	0	-	0	0.00	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	jumlah sub kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	sub kegiatan	2	116.026.725	2	3.029.566.386	100	2611.09	
3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	jumlah subkegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	sub kegiatan	1	70.075.000	0	-	0	0.00	
4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	jumlah subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	sub kegiatan	2	115.954.000	2	60.675.000	100	52.33	
48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jumlah RT yang mendapatlkan bantuan SPGRM & Persentase kehadiran peserta PKK	persen	90	1.222.423.860	90	2.881.439.560	100	235.72	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah subkegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	sub kegiatan	4	1.194.646.860	4	1.440.719.780	100	120.60	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	jumlah subkegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	sub kegiatan	2	27.777.000	2	49.625.050	100	178.66	
49	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan peran kecamatan dan kelurahan	persen	85	326.282.000	85	228.762.550	100	70.11	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	jumlah subkegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	sub kegiatan	1	326.282.000	1	228.762.550	100	70.11	
50	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja output dan kinerja keuangan	dokumen	15	11.863.739.444	15	9.727.385.970	100	81.99	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	sub kegiatan	2	40.000.000	2	38.180.500	100	95.45	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	sub kegiatan	1	8.078.197.700	1	6.637.537.824	100	82.17	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	sub kegiatan	6	1.315.101.840	6	1.139.710.187	100	86.66	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	2	1.719.383.904	2	1.383.045.610	100	80.44	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	3	690.056.000	3	528.911.849	100	76.65	
6	Penataan Organisasi	Jumlah Penataan Organisasi	sub kegiatan	1	21.000.000	0	-	0	0.00	
51	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan yang diakomodir	persen	100	534.298.200	100	2.208.184.136	100	413.29	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	sub kegiatan	2	163.912.000	2	121.062.500	100	73.86	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	sub kegiatan	1	218.545.200	1	2.028.374.136	100	928.13	
3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	sub kegiatan	1	82.999.000	0	-	0	0.00	
4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	sub kegiatan	1	68.842.000	1	58.747.500	100	85.34	
52	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase potensi peningkatan nilai swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kelurahan	persen	100	954.277.500	1	1.526.939.090	1	160.01	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	sub kegiatan	1	64.999.200	0	-	0	0.00	
2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	sub kegiatan	2	684.360.300	2	1.440.852.890	100	210.54	
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	sub kegiatan	3	204.918.000	3	86.086.200	100	42.01	
53	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	persen	100	212.180.000	100	202.547.200	100	95.46	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	sub kegiatan	1	212.180.000	1	202.547.200	100	95.46	

Kesesuaian kinerja RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II pada Sasaran 9 terhadap pencapaian target RPJMD dapat dilihat pada Tabel 2.161.

Tabel 2.161 Kesesuaian Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 9 Terhadap RPJMD Tahun 2021

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Satuan	Capaian RPJMD Tahun 2021		Ket.
				K	Rp	
1	Tujuan 7 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau					
1	Sasaran 9: Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Nilai PDRB Non Migas (ADHK)	Trilliun	105.15		
1	Program 1: Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	Destinasi	13.16	476.38	Target 38, namun realisasi hanya 2
2	Program 2: Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Wisatawan	272.88	109.51	
3	Program 3: Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah asosiasi yang bermitra	Asosiasi	120	332.32	
4	Program 4: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	70.40	31.50	
5	Program 5: Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persen	81.82	101.32	
6	Program 6: Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase jumlah sampel aman (kandungan residunya dibawah ambang batas) yang diperiksa terhadap total sampel yang diperiksa	Persen	92.03	127.96	
7	Program 7: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persen			target RPJMD tidak dapat ditemukan
8	Program 8: Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Peningkatan jumlah pemuda berprestasi	Orang	252.00	263.99	
9	Program 9: Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya Atlet Berprestasi, Peningkatan prestasi olahraga (jumlah medali)	Persen, Medali		167.22	K Tidak dapat dihitung karena indikator "Peningkatan prestasi olahraga" memiliki dua target yaitu provinsi dan nasional
10	Program 10: Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan aktif	Persen			tidak dapat diisi karena target RPJMD tidak dapat ditemukan
11	Program 11: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persen	100.30	101.29	
12	Program 12: Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rencana investasi	Trilliun	296.46	37.11	
13	Program 13: Program Promosi Penanaman Modal	Persentase rencana investor PMA terhadap PMDN swasta nasional	Persen	112.56	34.85	
14	Program 14: Program Pelayanan Penanaman Modal	SKM pelayanan perizinan	Indeks	200.29	51.76	

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Satuan	Capaian RPJMD Tahun 2021		Ket.
				K	Rp	
15	Program 5: Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Tingkat Kepatuhan Perizinan Penanaman Modal	Izin	388.13	42.62	
16	Program 16: Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara online	Persen	203.13	74.78	
17	Program 17: Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	Persen	30	30.69	
18	Program 18: Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Presentase Prasarana Pertanian yang tersedia	Persen			Tida dapat diisi karena tidak target RPJMD tidak dapat ditemukan
19	Program 19: Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Presentase Prasarana Pertanian yang tersedia	Persen			Tida dapat diisi karena tidak target RPJMD tidak dapat ditemukan
20	Program 20: Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Kenaikan Produksi Perkebunan	Ton	6949.18	1.55	Target RPJMD 79,667 Ton, realisasi 4686,58 Ton
21	Program 21: Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kelas kelompok tani	Persen	126.85	59.58	
22	Program 22: Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	217.27	4.21	
23	Program 23: Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Kenaikan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	5.30	3.20	Target RPJMD besar, namun realisasi kecil

2.5.5. Misi 5 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif

Misi 5 dijabarkan untuk satu tujuan yaitu terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima dengan satu sasaran.

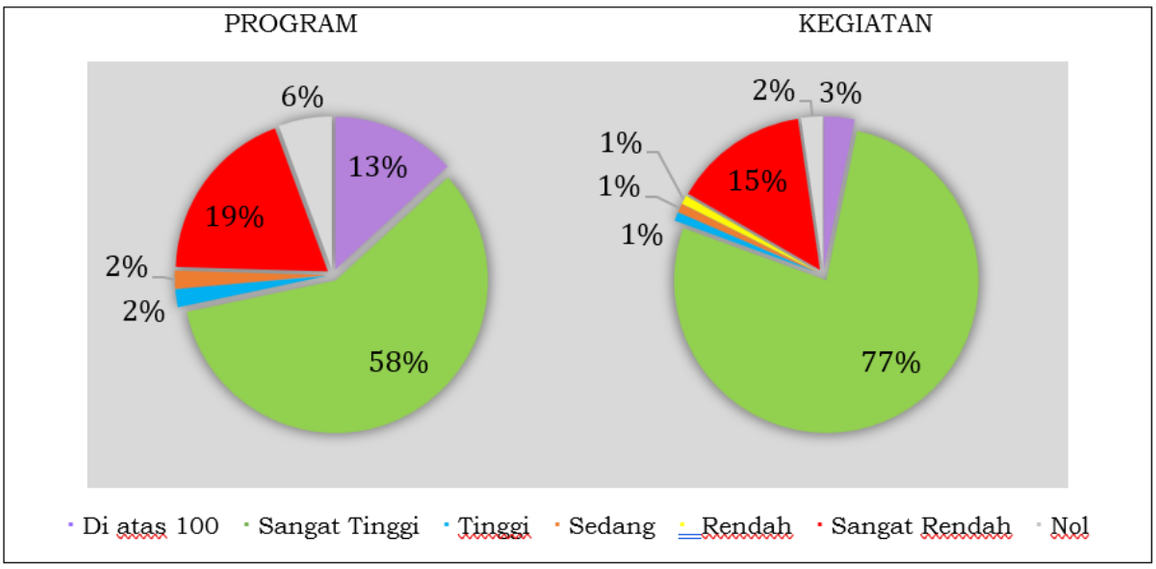
A. Capaian Kinerja Sasaran 10 Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Untuk mencapai Sasaran 10, Pemerintah Kota Balikpapan dituntut untuk melakukan inovasi dalam pemanfaatan teknologi guna mendukung penataan kelembagaan, pengembangan aparatur, sistem pengawasan, serta pemeriksaan yang efektif. Untuk mencapai sasaran ini maka terdapat 6 indikator sasaran, yaitu: opini laporan keuangan, Indeks Persepsi Korupsi, Survei Kepuasan Masyarakat, Nilai Evaluasi Lakip, Penilaian Kepatuhan, dan Indeks Profesionalitas ASN. Capaian kinerja sasaran di tahun 2021 Semester II dapat dilihat pada Tabel 2.162.

Tabel 2.162 Capaian Sasaran 10 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II			Ket.
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
			K	K	K	
Tujuan 8: Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang prima.						
Sasaran Daerah 10: Tata kelola pemerintahan yang baik.	Opini laporan keuangan	kategori	WTP	WTP	100	
	Indeks persepsi korupsi	indeks	6.9	7.18	104.06	
	Survey kepuasan masyarakat	indeks SKM	80.36	82.5	102.66	
	Nilai evaluasi LAKIP	skor	75	68.99	91.99	
	Penilaian kepatuhan	zona warna	79	99.24	125.62	
	Indeks profesionalitas ASN	indeks	87	92.05	105.80	

Sasaran ini didukung oleh 56 program dan 216 kegiatan. Berdasarkan rekapitulasi capaian program dan kegiatan diketahui bahwa sebagian besar program mencapai kinerja sangat tinggi sebesar 58 persen dan terdapat 13 persen program yang melampaui target (13%). Hal ini berbanding lurus dengan capaian pada level kegiatan (lihat Gambar 2.83). Secara rinci data capaian program dan kegiatan pendukung Sasaran 10 hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II disajikan pada Tabel 2.163 dan Tabel 2.`64.



Gambar 2.83 Rekapitulasi Capaian Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 10 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

Tabel 2.163 Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran 10 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Tata kelola pemerintahan yang baik	Opini laporan keuangan	kategori	WTP		WTP		100		
		Indeks persepsi korupsi	indeks	6.9		7.18		104.06		
		Survey kepuasan masyarakat	indeks SKM	80.36		82.5		102.66		
		Nilai evaluasi LAKIP	skor	75		68.99		91.99		
		Penilaian kepatuhan	zona warna	79		99.24		125.62		
		Indeks profesionalitas ASN	indeks	87		92.05		105.80		
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	WTP Opini			0	-	0	0	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	persen	95	10.234.553.941	95	8.721.879.951	100	85.22	
3	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase target kinerja Perencanaan	persen	88	2.437.613.450	0	-	0	0.00	
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan Hasil Penelitian	persen	100	587.312.250	100	577.766.000	100	98.37	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.936.938.522	0	-	0	0.00	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan/ Pengawasan	persen	90	211.810.000	102.4	416.812.500	113.72	196.79	
7	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan/ Pengawasan	persen	90	218.540.000	83.74	115.497.000	93.044	52.85	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	persen	95	6.118.733.801	95	5.014.250.019	100	81.95	
9	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis TIK		100	3.644.464.880	101	3.489.162.994	101	95.74	
10	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		aplikasi	1	3.652.497.300	1	3.406.700.807	100	93.27	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Pengumpulan data statistik pada OPD	OPD	36	217.150.000	36	195.772.000	100	90.16	
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Kota	persen	60	49.918.000	60	19.751.933	100	39.57	
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyelesaian dokumen keuangan Tepat Waktu	persen	100	97.970.411.490	100	-	100	0.00	
14	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase potensi peningkatan nilai Swadaya Masyarakat Dalam kegiatan Pembangunan di Kelurahan	persen	7.5	50.396.459.226	0	-	0	0.00	
15	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Laju Inflasi	persen	4	2.333.174.631	2.28	106.870.866	143	4.58	
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persen	100	71.850.527.044	100	40.768.310.197	100	56.74	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
17	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Rancangan Produk Hukum yang dapat diselesaikan menjadi Produk Hukum Daerah	persen	30	24.443.277.580	29.4	12.093.673.444	98	49.48	
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan administrasi perkantoran	persen	100	36.542.904.676	6	34.826.510.745	6	95.30	
19	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase PD dengan Realisasi Anggaran diatas 85persen, Persentase Proses Penyelesaian RKA/DPA	persen	94,44 100	123.639.702.043	0	90.825.488.016	0	73.46	
20	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Jumlah Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	persen	40.77	3.160.000.000	0	20.350.201.942	0	643.99	
21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kualitas pelayanan perangkat daerah	persen	100	39.315.849.530	75	20.760.644.260	75	52.80	
22	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Pajak daerah dan rertribusi daerah terhadap APBD	persen	23.05	6.835.393.020	24.32	5.879.366.854	105.51	86.01	
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Nilai hasil survey kepuasan masyarakat	Nilai	80	9.275.361.006	82.64	7.736.170.805	103.3	83.41	
24	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	persen	100	3.736.449.090	78.25	2.033.383.772	78.25	54.42	
25	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir dan kompetensi	persen	100	7.826.461.136	0	4.642.151.780	0	59.31	
26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM internal perangkat daerah	persen	77	9.264.854.052	78.94	8.848.965.280	102.52	95.51	
27	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase perekaman KTP	persen	98	2.486.442.576	99.57	2.491.648.717	101.6	100.21	
28	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	persen	98	632.786.396	97.77	383.656.400	99.765	60.63	
29	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan kota Balikpapan Kepada Pemangku Kepentingan	persen	41.18	942.117.716	1	466.284.250	2.42	49.49	
30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah hasil pengendalian dan evaluasi kinerja output dan kinerja keuangan	dokumen	2	13.837.265.534	2	29.463.714.418	100	212.93	
31	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan peranan kecamatan dan kelurahan	persen	84	313.477.000	84	5.027.411.919	100	1603.76	
32	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jumlah RT yang mendapat bantuan dana SPGRM dan Persentase kehadiran peserta PKK	persen	84	2.238.405.650	84	2.588.081.010	100	115.62	
33	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan peranan kecamatan dan kelurahan	persen	84	99.424.900	89	46.773.000	105.95	47.04	
34	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tercapainya kinerja dan keuangan	persen	80	14.892.338.797	0	14.808.702.105	0	99.44	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	persen	100	137.378.250	100	3.077.758.988	100	2240.35	
36	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai potensi swadaya masyarakat	persen	100	858.912.325	0	1.870.816.675	0	217.81	
37	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	persen	100	47.905.000	0	47.905.000	0	100.00	
38	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	persen	82	13.506.739.076	82	9.700.807.294	100	71.82	
39	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan peranan kecamatan dan kelurahan	persen	85	380.670.500	1	178.362.900	1.17	46.85	
40	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kehadiran peserta sosialisasi TTG posyantek dan LPM	persen	90	1.322.435.967	90	4.262.593.992	100	322.33	
41	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan peranan kecamatan dan kelurahan	persen	85	187.131.207	85	131.078.000	100	70.05	
42	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya Kapasitas Aparatur	persen	100	15.026.133.234	100	13.255.077.239	100	88.21	
43	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	persen	90	642.209.800	90	4.081.145.571	100	635.48	
44	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase prestasi yang diraih	persen	94	729.279.700	94	1.257.562.750	100	172.44	
45	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	persen	90	217.675.000	90	33.275.000	100	15.29	
46	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja perangkat Daerah	persen	100	16.917.967.208	100	13.714.898.604	100	81.07	
47	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan peran kecamatan dan kelurahan	persen	85	847.257.825	85	3.090.241.386	100	364.73	
48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jumlah RT yang mendapatlkan bantuan SPGRM & Persentase kehadiran peserta PKK	persen	90	1.222.423.860	90	2.881.439.560	100	235.72	
49	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan peran kecamatan dan kelurahan	persen	85	326.282.000	85	228.762.550	100	70.11	
50	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja output dan kinerja keuangan	dokumen	15	11.863.739.444	15	9.727.385.970	100	81.99	
51	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan yang diakomodir	persen	100	534.298.200	100	2.208.184.136	100	413.29	
52	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase potensi peningkatan nilai swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kelurahan	persen	100	954.277.500	100	1.526.939.090	100	160.01	
53	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	persen	100	212.180.000	100	202.547.200	100	95.46	

Tabel 2.164 Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Sasaran 10 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	WTP Opini	WTP		WTP		100		
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Yang Tersusun	Dokumen	1	-	0	34.643.132	0	0	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	persen	35	10.234.553.941	95	8.721.879.951	85.2199	85.22	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai di Bappeda Litbang	tahun	1	10.234.553.941	1	6.204.128.807	100	60.62	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlasananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	sub kegiatan	5	10.234.553.941	5	3.052.375.381	100	29.82	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	3	10.234.553.941	3	347.988.203	100	3.40	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan BMD	sub kegiatan	3	10.234.553.941	3	478.094.226	100	4.67	
5	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen laporan kinerja	dokumen	2	10.234.553.941	2	104.736.500	100	1.02	
3	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase target kinerja Perencanaan	persen	88	2.437.613.450	0	-	0	0.00	
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah laporan kegiatan Musrenbang dan penyusunan RKPD	laporan	3	1.000.000.000	3	651.658.856	100	65.17	
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah aplikasi perencanaan pembangunan	aplikasi	1	1.257.613.450	1	898.588.750	100	71.45	
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja	dokumen	4	180.000.000	0	-	0	0.00	
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan Hasil Penelitian	persen	100	587.312.250	100	577.766.000	100	98.37	
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen Kajian Survey Indeks Persepsi Korupsi Kota Balikpapan	dokumen	1	225.000.000	1	222.970.000	100	99.10	
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen Kajian Survey Indeks Pelayanan Infrastruktur dan Kota Layak Huni	dokumen	1	300.000.000	1	299.450.000	100	99.82	
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Seminar Kreteknov 2021 dan Tersediannya Informasi dan Data Pelaku Inovasi	laporan/ dokumen	1	62.312.250	1	55.346.000	100	88.82	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.936.938.522	0	-	0	0.00	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	sub kegiatan	1	9.367.326.800	0	-	0	0.00	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	sub kegiatan	2	74.752.500	1	46.872.700	16.66	62.70	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	sub kegiatan	6	1.092.003.640	18	1.127.368.402	600	103.24	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	3	778.580.182	12	670.358.465	400	86.10	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	3	596.900.400	12	555.071.497	1200	92.99	
6	Penataan Organisasi	Jumlah Sub Kegiatan dari Kegiatan Penataan Organisasi	sub kegiatan	1	27.375.000	1	225.000	100	0.82	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan/ Pengawasan	persen	90	211.810.000	102.35	416.812.500	113.72	196.79	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah subkegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	sub kegiatan	1	22.375.000	1	4.812.500	100	21.51	
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Sub Kegiatan dari Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	sub kegiatan	1	189.435.000	1	412.000.000	100	217.49	
7	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan/ Pengawasan	persen	90	218.540.000	83.74	115.497.000	93.0444	52.85	
1	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Sub Kegiatan dari Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	sub kegiatan	2	218.540.000	2	112.209.500	100	51.35	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	persen	95	6.118.733.801	95	5.014.250.019	100	81.95	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya gaji dan tunjangan asn di diskominfo	bulan	14	4.492.443.000	14	3.664.040.989	100	81.56	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya sub kegiatan	sub kegiatan	3	528.562.500	3	749.554.069	100	141.81	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya sub kegiatan	sub kegiatan	1	412.780.000	1	394.820.000	100	95.65	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya sub kegiatan	sub kegiatan	3	428.173.301	3	405.597.912	100	94.73	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya sub kegiatan	sub kegiatan	2	256.775.000	2	195.057.049	100	75.96	
9	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis TIK		100	3.644.464.880	101	3.489.162.994	101	95.74	
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Aplikasi yang terintegrasi	sub kegiatan	6	3.644.464.880	6	3.489.162.994	100	95.74	
10	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		aplikasi	1	3.652.497.300	1	3.406.700.807	100	93.27	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sub kegiatan	sub kegiatan	3	3.652.497.300	3	3.406.696.807	100	93.27	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Pengumpulan data statistik pada OPD	OPD	36	217.150.000	36	195.772.000	100	90.16	
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sub kegiatan	sub kegiatan	1	217.150.000	1	195.772.000	100	90.16	
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Kota		60	49.918.000	60	19.751.933	100	39.57	
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sub kegiatan	sub kegiatan	1	49.918.000	1	19.751.933	100	39.57	
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyelesaian dokumen keuangan Tepat Waktu	persen	100	97.970.411.490	100	-	100	0.00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Subkegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	sub kegiatan	2	30.000.000	2	29.683.940	100	98.95	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	sub kegiatan	6	28.527.658.950	6	22.460.364.883	100	78.73	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas dan Persentase fasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100	1.030.000.000	100	561.024.023	100	54.47	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	sub kegiatan	7	26.267.959.490	7	15.819.883.710	100	60.23	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	unit	2	1.600.000.000	0	739.200.000	0	46.20	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	sub kegiatan	2	17.589.361.500	2	15.394.314.682	100	87.52	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	sub kegiatan	2	13.688.483.000	2	12.524.671.409	100	91.50	
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	14	1.216.538.000	14	1.137.223.446	100	93.48	
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah pengadaan perlengkapan di rumah jabatan yang disediakan	jenis	7	5.379.167.000	11	4.217.124.802	157.143	78.40	
10	Penataan Organisasi	Persentase fasilitasi Penataan Organisasi	persen	100	676.998.650	100	106.167.392	100	15.68	
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Subkegiatan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi PImpinan	sub kegiatan	3	1.964.244.900	3	653.267.900	100	33.26	
14	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase potensi peningkatan nilai Swadaya Masyarakat Dalam kegiatan Pembangunan di Kelurahan	persen	7.5	50.396.459.226	0	-	0	0	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan	persen	100	32.470.571.560	1	186.529.427	1	0.57	
2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	sub kegiatan	3	12.523.413.966	1	8.584.413.742	33.33	68.55	
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	sub kegiatan	3	1.434.130.550	3	506.279.315	100	35.30	
4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Subkegiatan Kerjasama Daerah	sub kegiatan	1	3.968.343.150	1	2.967.352.918	100	74.78	
15	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Laju Inflasi	persen	4	2.333.174.631	2.28	106.870.866	143	4.58	
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	sub kegiatan	3	562.348.131	3	114.980.130	100	20.45	
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan APBD yang tepat Waktu, Efektif dan Efisien	persen	80	953.926.500	80	509.384.968	100	53.40	
3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah subkegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	sub kegiatan	3	816.900.000	3	647.623.622	100	79.28	
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persen	100	71.850.527.044	100	40.768.310.197	100	56.74	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah PNS Setwan	orang	36	4.841.255.850	36	3.627.006.079	100	74.92	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi kantor	jenis	5	16.537.632.230	5	80.464.560	100	0.49	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sewa Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	0	0	0	-	0	0	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jenis pelayanan adm perkantoran	jenis	3	2.841.471.964	3	2.177.771.146	100	76.64	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan	jenis	2	6.180.000.000	2	2.459.880.504	100	39.80	
6	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD	orang	45	33.500.167.000	180	27.710.836.370	400	82.72	
7	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah jenis pelayanan administrasi kantor	jenis	2	7.950.000.000	2	4.001.688.038	100	50.34	
17	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Rancangan Produk Hukum yang dapat diselesaikan menjadi Produk Hukum Daerah	persen	30	24.443.277.580	29.4	12.093.673.444	98	49.48	
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Naskah Akademik/Kajian	kajian/ NA	8	10.832.777.580	8	3.092.266.303	100	28.55	
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah anggota Badan Anggaran yang mengikuti kompetensi	orang	23	2.000.000.000	23	1.063.019.234	100	53.15	
3	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD	orang	45	6.710.500.000	45	5.347.525.183	100	79.69	
4	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah reses	kegiatan	3	2.500.000.000	3	1.674.398.948	100	66.98	
5	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Anggota DPRD	orang	45	900.000.000	45	360.620.795	100	40.07	
6	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Anggota DPRD Badan Musyawarah	orang	23	1.500.000.000	23	916.463.776	100	61.10	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan administrasi perkantoran	persen	100	36.542.904.676	6	34.826.510.745	6	95.30	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluai kinerja per triwulan	dokumen	4	335.000.000	1	330.270.075	25	98.59	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			32.876.279.000		31.695.725.263	0	96.41	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Baaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	sub kegiatan	6	1.889.667.600	6	1.811.647.722	100	95.87	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	sub kegiatan	2	666.958.076	2	566.363.944	100	84.92	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeiharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioal atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	sub kegiatan	3	775.000.000	3	574.847.201	100	74.17	
19	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase PD dengan Realisasi Anggaran diatas 85persen, Persentase Proses Penyelesaian RKA/DPA	persen	94.44	123.639.702.043	0	90.825.488.016	0	73.46	
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terselenggaranya RKA, Perda Dan Perwal APBD Kota Balikpapan	persen	100	2,143,000,000	100	1.888.944.782	100	88.14	
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terselenggaranya Penatausahaan Pengelolaan Keuangan	persen	100	1,195,000,000	100	1.134.352.906	100	94.92	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	sub kegiatan	3	710.000.000	3	525.132.479	100	73.96	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	persen	100	118.991.702.043	1	86.268.846.304	1	72.50	
5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Aplikasi Pengelola Keuangan yang terpelihara dan ter- update	sub kegiatan	2	600.000.000	1	1.008.879.545	50	168.15	
20	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Jumlah Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	persen	40.77	3.160.000.000	0	20.350.201.942	0	643.99	
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Tanah Pemerintah yang Bersertipikat	persen	40.77	3.160.000.000	217	20.350.201.942	532.254	643.99	
21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kualitas pelayanan perangkat daerah	persen	100	39.315.849.530	75	20.760.644.260	75	52.80	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	36.737.059.500	100	24.171.128.652	100	65.79	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kualitas pelayanan administrasi	persen	100	999.862.950	100	1.029.298.431	100	102.94	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	Nilai	100	842.298.300	100	731.862.618	100	86.89	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	persen	100	736.628.780	75	2.404.195.857	75	326.38	
22	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Pajak daerah dan rertribusi daerah terhadap APBD	persen	23.05	6.835.393.020	24.32	5.879.366.854	105.51	86.01	
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya Sub Kegiatan	sub kegiatan	9	6.835.393.020	9	5.879.366.854	100	86.01	
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Nilai hasil survey kepuasan masyarakat	Nilai	80	9.275.361.006	82.64	7.736.170.805	103.3	83.41	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kualitas pelayanan administrasi perkantoran	persen	80	7.322.763.000	82.64	6.176.951.667	103.3	84.35	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	sub kegiatan	5	1.490.415.470	5	1.254.608.152	100	84.18	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	3	121.692.536	3	107.811.871	100	88.59	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	2	340.490.000	2	196.799.115	100	57.80	
24	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	persen	100	3.736.449.090	78.25	2.033.383.772	78.25	54.42	
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah subkegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	sub kegiatan	5	1.502.000.640	5	1.067.627.272	100	71.08	
2	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah sub kegiatan Mutasi dan Promosi	sub kegiatan	3	1.006.768.200	3	95.951.200	100	9.53	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah sub kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	sub kegiatan	3	1.139.387.000	3	772.700.750	100	67.82	
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah sub kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	sub kegiatan	5	88.293.250	100	64.741.550	2000	73.33	
25	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir dan kompetensi	persen	100	7.826.461.136	0	4.642.151.780	0	59.31	
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah sub kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	sub kegiatan	2	1.029.770.300	2	727.343.700	100	70.63	
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah sub kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	sub kegiatan	1	6.796.690.836	1	3.914.808.080	100	57.60	
26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM internal perangkat daerah	persen	77	9.264.854.052	78.94	8.848.965.280	102.51	95.51	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	tahun	1	5.352.731.300	1	5.030.353.091	100	93.98	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	sub kegiatan	5	2.852.464.500	5	3.261.237.198	100	114.33	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	3	508.564.252	3	225.087.398	100	44.26	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKM Internal tentang layanan pemeliharaan BMD	persen	80	551.094.000	80	332.287.593	100	60.30	
27	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase perekaman KTP	persen	98	2.486.442.576	99.57	2.491.648.717	101.60	100.21	
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	sub kegiatan	2	2.486.442.576	2	2.491.648.717	100	100.21	
28	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	persen	98	632.786.396	97.77	383.656.400	99.7653	60.63	
1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	sub kegiatan	1	632.786.396	1	383.656.400	100	60.63	
29	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan kota Balikpapan Kepada Pemangku Kepentingan	persen	41.18	942.117.716	1	466.284.250	2.42	49.49	
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan	sub kegiatan	1	620.117.716	1	466.284.250	100	75.19	
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	sub kegiatan	1	322.000.000	0	-	0	0.00	
30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah hasil pengendalian dan evaluasi kinerja out put dan kinerja keuangan	dokumen	2	13.837.265.534	2	29.463.714.418	100	212.93	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah subkegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	sub kegiatan	2	29.999.450	2	40.188.850	100	133.97	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	sub kegiatan	1	10.031.633.300	1	22.705.108.284	100	226.34	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	sub kegiatan	6	1.293.897.692	6	2.329.445.142	100	180.03	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	2	1.734.891.092	2	3.723.728.496	100	214.64	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	3	715.196.000	3	1.220.781.201	100	170.69	
6	Penataan Organisasi	Jumlah sub kegiatan Penataan Organisasi	sub kegiatan	1	31.648.000	1	33.536.200	100	105.97	
31	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan peranan kecamatan dan kelurahan	persen	84	313.477.000	84	5.027.411.919	100	1603.76	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	sub kegiatan	2	223.132.600	2	108.993.050	100	48.85	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	sub kegiatan	1	17.938.750	1	10.913.100	100	60.84	
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	sub kegiatan	1	72.405.650	1	65.178.650	100	90.02	
32	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jumlah RT yang mendapat bantuan dana SPGRM dan Persentase kehadiran peserta PKK	persen	84	2.238.405.650	84	2.588.081.010	100	115.62	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah sub Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	sub kegiatan	2	1.997.141.600	2	1.422.719.250	100	71.24	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah sub kegiatan	sub kegiatan	4	241.264.050	4	253.124.550	100	104.92	
33	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan peranan kecamatan dan kelurahan	persen	84	99.424.900	89	46.773.000	105.95	47.04	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sub kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	sub kegiatan	1	99.424.900	1	46.773.000	100	47.04	
34	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tercapainya kinerja dan keuangan	persen	80	14.892.338.797	0	14.808.702.105	0	99.44	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah	dokumen	1	25.424.950	1	21.210.650	100	83.42	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	sub kegiatan	1	9.983.481.600	1	9.020.921.196	100	90.36	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	sub kegiatan	1	21.000.000	1	13.800.000	100	65.71	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	sub kegiatan	5	1.851.466.247	5	1.709.389.622	100	92.33	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	sub kegiatan	1	248890000	0	-	0	0.00	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	3	1.970.495.600	3	1.610.898.979	100	81.75	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	sub kegiatan	3	988.090.400	3	821.582.679	100	83.15	
8	Penataan Organisasi	Jumlah Sub Kegiatan Penataan Organisasi	sub kegiatan	1	52.380.000	1	50.123.500	100	95.69	
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	persen	100	137.378.250	100	3.077.758.988	100	2240.35	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	sub kegiatan	2	21.350.350	2	25.425.200	100	119.09	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	sub kegiatan	2	26.318.900.000	2	2.166.131.400	100	82.30	
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	sub kegiatan	1	89.709.000	1	80.994.000	100	90.29	
36	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai potensi swadaya masyarakat	persen	100	858.912.325	0	1.870.816.675	0	217.81	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	sub kegiatan	20	715.204.325	20	1.680.490.575	100	234.97	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya sub kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	sub kegiatan	4	143.708.000	4	190.326.100	100	132.44	
37	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	persen	100	47.905.000	0	47.905.000	0	100	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sub Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	sub kegiatan	1	47.905.000	0	47.905.000	0	100	
38	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	persen	82	13.506.739.076	82	9.700.807.294	100	71.82	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	sub kegiatan	1	19.998.000	0	-	0	0.00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	sub kegiatan	1	9.152.406.400	1	7.425.328.434	100	81.13	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	sub kegiatan	6	1.583.621.237	6	816.683.458	100	51.57	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	2	1.967.613.439	2	416.537.708	100	21.17	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	3	642.400.000	3	1.042.257.694	100	162.24	
6	Penataan Organisasi	Jumlah Sub Kegiatan Penataan Organisasi	sub kegiatan	1	140.700.000	0	-	0	0.00	
39	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan peranan kecamatan dan kelurahan	persen	85	380.670.500	1	178.362.900	1.17	46.85	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	sub kegiatan	2	176.971.100	2	8.155.100	100	4.61	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	sub kegiatan	1	113.699.400	1	107.006.800	100	94.11	
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	sub kegiatan	1	90.000.000	1	63.201.000	100	70.22	
40	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kehadiran peserta sosialisasi TTG posyantek dan LPM	persen	90	1.322.435.967	90	4.262.593.992	100	322.33	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan	sub kegiatan	2	1.002.886.967	2	4.130.864.992	100	411.90	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	sub kegiatan	4	319.549.000	4	131.729.000	100	41.22	
41	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan peranan kecamatan dan kelurahan	persen	85	187.131.207	85	131.078.000	100	70.05	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	sub kegiatan	1	187.131.207	1	131.078.000	100	70.05	
42	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya Kapasitas Aparatur	persen	100	15.026.133.234	100	13.255.077.239	100	88.21	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub KegiatanAdministrasi Keuangan Perangkat Daerah	sub kegiatan	1	10.005.451.300	1	8.976.919.147	100	89.72	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	sub kegiatan	5	819.796.122	5	784.762.457	100	95.73	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	sub kegiatan	1	-	0	-	0	0	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	3	3.351.710.706	3	2.831.990.907	100	84.49	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	3	762.420.106	3	582.874.628	100	76.45	
6	Penataan Organisasi	Jumlah Sub Kegiatan Penataan Organisasi	sub kegiatan	2	86.755.000	2	78.530.100	100	90.52	
43	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	persen	90	642.209.800	90	4.081.145.571	100	635.48	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	sub kegiatan	2	121.131.000	2	90.461.000	100	74.68	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	sub kegiatan	2	366.315.500	2	3.860.475.171	100	1053.87	
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	sub kegiatan	2	154.763.300	2	130.209.400	100	84.13	
44	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase prestasi yang diraih	persen	94	729.279.700	94	1.257.562.750	100	172.44	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	sub kegiatan	2	577.276.400	2	1.138.087.950	100	197.15	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	sub kegiatan	4	152.003.300	4	119.474.800	100	78.60	
45	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	persen	90	217.675.000	90	33.275.000	100	15.29	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Sub Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	sub kegiatan	1	217.675.000	1	33.275.000	100	15.29	
46	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja perangkat Daerah	persen	100	16.917.967.208	100	13.714.898.604	100	81.07	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah subkegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	sub kegiatan	1	10.000.000	1	3.911.500	100	39.12	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	sub kegiatan	1	11.496.067.800	1	10.055.261.160	100	87.47	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah subkegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	sub kegiatan	6	1.269.731.791	6	1.139.507.927	100	89.74	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah subkegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	sub kegiatan	2	451.816.700	2	32.265.000	100	7.14	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah subkegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	2	2.505.625.737	2	1.877.953.146	100	74.95	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah subkegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	4	1.184.725.180	4	638.264.871	100	53.87	
47	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan peran kecamatan dan kelurahan	persen	85	847.257.825	85	3.090.241.386	100	364.73	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah subkegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	sub kegiatan	2	545.202.100	0	-	0	0.00	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	jumlah sub kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	sub kegiatan	2	116.026.725	2	3.029.566.386	100	2611.09	
3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	jumlah subkegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	sub kegiatan	1	70.075.000	0	-	0	0.00	
4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	jumlah subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	sub kegiatan	2	115.954.000	2	60.675.000	100	52.33	
48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jumlah RT yang mendapatlkan bantuan SPGRM & Persentase kehadiran peserta PKK	persen	90	1.222.423.860	90	2.881.439.560	100	235.72	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah subkegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	sub kegiatan	4	1.194.646.860	4	1.440.719.780	100	120.60	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	jumlah subkegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	sub kegiatan	2	27.777.000	2	49.625.050	100	178.66	
49	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan peran kecamatan dan kelurahan	persen	85	326.282.000	85	228.762.550	100	70.11	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	jumlah subkegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	sub kegiatan	1	326.282.000	1	228.762.550	100	70.11	
50	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja output dan kinerja keuangan	dokumen	15	11.863.739.444	15	9.727.385.970	100	81.99	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	sub kegiatan	2	40.000.000	2	38.180.500	100	95.45	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	sub kegiatan	1	8.078.197.700	1	6.637.537.824	100	82.17	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	sub kegiatan	6	1.315.101.840	6	1.139.710.187	100	86.66	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	2	1.719.383.904	2	1.383.045.610	100	80.44	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sub kegiatan	3	690.056.000	3	528.911.849	100	76.65	

	Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2021 Semester II						Ket
				Target		Realisasi		Capaian (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6	Penataan Organisasi	Jumlah Penataan Organisasi	sub kegiatan	1	21.000.000	0	-	0	0.00	
51	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan yang diakomodir	persen	100	534.298.200	100	2.208.184.136	100	413.29	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	sub kegiatan	2	163.912.000	2	121.062.500	100	73.86	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	sub kegiatan	1	218.545.200	1	2.028.374.136	100	928.13	
3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	sub kegiatan	1	82.999.000	0	-	0	0.00	
4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	sub kegiatan	1	68.842.000	1	58.747.500	100	85.34	
52	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase potensi peningkatan nilai swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kelurahan	persen	100	954.277.500	1	1.526.939.090	1	160.01	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	sub kegiatan	1	64.999.200	0	-	0	0.00	
2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	sub kegiatan	2	684.360.300	2	1.440.852.890	100	210.54	
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	sub kegiatan	3	204.918.000	3	86.086.200	100	42.01	
53	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	persen	100	212.180.000	100	202.547.200	100	95.46	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	sub kegiatan	1	212.180.000	1	202.547.200	100	95.46	

Kesesuaian kinerja RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 Semester II pada Sasaran 10 terhadap pencapaian target RPJMD dapat dilihat pada Tabel 2.165.

Tabel 2.165 Kesesuaian Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 10 Terhadap RPJMD Tahun 2021

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Satuan	Capaian RPJMD Tahun 2021 (%)		Ket
				K	Rp	
1	Tujuan 10 : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang prima.					
1	Sasaran 10: Tata kelola pemerintahan yang baik.	Opini laporan keuangan	Kategori	100		
		Indeks persepsi korupsi	Indeks	104.06		
		Survey kepuasan masyarakat	Indeks SKM	102.66		
		Nilai evaluasi LAKIP	Skor	91.99		
		Penilaian kepatuhan	Zona Warna	125.62		
		Indeks profesionalitas ASN	Indeks	105.80		
1	Program 1: Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	WTP Opini			
2	Program 2: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi				
3	Program 3: Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Presentase target kinerja Perencanaan				
4	Program 4: Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan Hasil Penelitian		200	38.59	
5	Program 5: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
6	Program 6: Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan/Pengawasan	Persen	213.72	41.15	
7	Program 7: Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan/Pengawasan	Persen			
8	Program 8: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	Persen			
9	Program 9: Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis TIK				
10	Program 10: Program Aplikasi Informatika		aplikasi			
11	Program 11: Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Pengumpulan data statistik pada OPD	OPD			
12	Program 12: Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Kota				
13	Program 13: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen keuangan Tepat Waktu				
14	Program 14: Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase potensi peningkatan nilai Swadaya Masyarakat Dalam kegiatan Pembangunan di Kelurahan		192.40	36.09	
15	Program 15: Program Perekonomian Dan Pembangunan	Laju Inflasi		943.80	30.60	
16	Program 16: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				
17	Program 17: Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Presentase Rancangan Produk Hukum yang dapat diselesaikan menjadi Produk Hukum Daerah				
18	Program 18: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan administrasi perkantoran		106.00	243.49	
19	Program 19: Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase PD dengan Realisasi Anggaran diatas 85, Persentase Proses Penyelesaian RKA/DPA		0	722.66	
20	Program 20: Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase Jumlah Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat		136.67	554.58	
21	Program 21: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas pelayanan perangkat daerah				

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Satuan	Capaian RPJMD Tahun 2021 (%)		Ket
				K	Rp	
22	Prgram 22: Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase Pajak daerah dan rertribusi daerah terhadap APBD		92.73	11.07	
23	Program 23: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Skor Nilai hasil survey kepuasan masyarakat	Nilai	201.70	71.23	
24	Program 24: Program Kepegawaian Daerah	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian		158.25	45.92	
25	Program 25: Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir dan kompetensi		100.55	34.59	
26	Program 26: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM internal perangkat daerah		239.27	33.08	
27	Program 27: Program Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP				
28	Program 28: Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran		232.30	37.43	
29	Program 29: Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan kota Balikpapan Kepada Pemangku Kepentingan				
30	Program 30: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil pengendalian dan evaluasi kinerja output dan kinerja keuangan	dokumen	100	114.71	
31	Program 31: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan peranan kecamatan dan kelurahan		169.81	119.28	
32	Program 32: Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase jumlah RT yang mendapat bantuan dana SPGRM dan Persentase kehadiran peserta PKK		184	62.61	
33	Program 33: Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan peranan kecamatan dan kelurahan		137	51.29	
34	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya kinerja dan keuangan		0	124.61	
35	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat		217.65	85.90	
36	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Nilai potensi swadaya masyarakat				
37	Program 37: Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat				
38	Program 38: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah				
39	Program 39: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan peranan kecamatan dan kelurahan				
40	Program 40: Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kehadiran peserta sosialisasi TTG posyantek dan LPM		190	69.84	
41	Program 41: Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan peranan kecamatan dan kelurahan		185	41.64	
42	Program 42: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya Kapasitas Aparatur		100	139298.12	
43	Program 43: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat		100	89.83	
44	Program 44: Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase prestasi yang diraih		1.88	108.16	
45	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat		200	32.25	
46	Program 46: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian kinerja perangkat Daerah		101	128.41	
47	Program 47: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan peran kecamatan dan kelurahan		200	90.94	

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Satuan	Capaian RPJMD Tahun 2021 (%)		Ket
				K	Rp	
48	Program 48: Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase jumlah RT yang mendapatlkan bantuan SPGRM & Persentase kehadiran peserta PKK		200	61.13	
49	Program 49: Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan peran kecamatan dan kelurahan		200	11.86	
50	Program 50: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja output dan kinerja keuangan	Dokumen	200	89.80	
51	Program 51: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan yang diakomodir		200	0	
52	Program 53: Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase potensi peningkatan nilai swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kelurahan		113.33	58.57	
53	Program 53: Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat		160	29.66	

2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.6.1. Permasalahan Pembangunan Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah yang dijabarkan ialah indikator kinerja di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SPM/SDGs/Standar Nasional/ dengan target tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya atau tren). Secara umum, permasalahan pembangunan daerah dan Prioritas Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.166 Permasalahan Pembangunan Daerah

No	Prioritas Daerah	Permasalahan	Analisa
1	Birokrasi Pemerintahan	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan	1) Perlunya Penguatan Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Bebas Korupsi 2) Menumbuhkan "trust" yang tinggi dari masyarakat melalui: a. Inspirasi "trust" di lingkungan Pemerintah Kota. b. Klarifikasi tentang tujuan organisasi. c. Penyelarasan sistem dan prosedur d. Penempatan orang yang tepat di posisi yang tepat
2	Kesehatan dan Pendidikan	1) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar yang memadai; 2) Belum optimalnya pemenuhan kualitas dan kuantitas guru yang sesuai dengan standar/kebutuhan; 3) Belum optimalnya IPM dari indikator Pendidikan; 4) Belum mamadainya alat Kesehatan di fasilitas Kesehatan; 5) Belum optimalnya SDM bidang Kesehatan; 6) Belum optimalnya promosi keshatan masyarakat guna membangun pembangunan Kesehatan yang holistic; 7) Masih rendahnya penerapan pola hidup sehat di masyarakat.	1) Bidang Kesehatan: a. Subsidi iuran BPJS bagi peserta PBPU kelas 3. b. Pembangunan Rumah Sakit di wilayah yang membutuhkan. 2) Bidang Pendidikan: a. Bantuan subsidi di SPP untuk sekolah swasta SD/MI dan SMP/MTs; b. Peningkatan Insentif Guru dari PAUD, TK, SD dan SMP; c. Pembangunan dan pengembangan sekolah-sekolah nyaman dihuni (baik sarprasnya, kualitas gurunya dan kualitas proses belajar mengajar); d. Optimalisasi SKB (sanggar kegiatan belajar);

No	Prioritas Daerah	Permasalahan	Analisa
3	Pengentasan Kemiskinan	1) Masih rendahnya kualitas produk dari industri kecil dan menengah; 2) Belum optimalnya pengembangan industri; 3) Belum optimalnya akses hunian layak terjangkau; 4) Masih terdapatnya permukiman kumuh dan warga yang tidak memiliki rumah.	1) Optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK); 2) Bantuan Permodalan untuk UMKM 3) Ketidaksinkronan data kemiskinan antar- OPD sehingga perlunya memilah data PPKS terkait dengan kebutuhannya masing-masing untuk memastikan penyaluraan bantuan tepat sasaran
4	Penyediaan Air Minum yang Sehat dan Merata	1) Terbatasnya ketersediaan air baku dikarenakan kurangnya sumber air dan permintaan air bersih meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk, investasi usaha dan kegiatan yang membutuhkan air bersih; 2) Belum optimalnya layanan air bersih.	1) Akselarasi percepatan peningkatan air baku dan mempermudah akses masyarakat dalam pemasangan air minum; 2) Perlunya peningkatan ketersediaan air baku.
5	Pengendalian Banjir	1) Adanya pembukaan /pengupasan lahan yang tidak terpantau; 2) Masih adanya aktivitas pembangunan yang tidak mempertimbangkan DDTLH Kota Balikpapan; 3) Kurangnya kesadaran dan minat masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya;	1) Percepatan penanganan DAS Sungai Ampal; 2) Percepatan pembangunan drainase di Balikpapan Timur; 3) Percepatan revitalisasi drainase di seluruh Kota Balikpapan; 4) Percepatan pembangunan Bendali/Bozem di Lingkungan Kawasan Perumahan.
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kondisi Sosial Yang Nyaman	1) Belum optimalnya pembangunan Kota yang aman, tertib dan ramah lingkungan; 2) Belum optimalnya penegakan regulasi daerah karena kondisi pandemi; 3) Kurangnya personil di dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1) Mewujudkan kota layak anak, layak difabel dan layak lansia; 2) Mewujudkan kota sehat, beas narkoba; 3) Menghidupkan ritual keagamaan di seluruh laporan masyarakat;
7	Pengembangan Balikpapan Sebagai Kota MICE dan Wisata		1) Pengembangan pusat perdagangan dan perekonomian; 2) Penguatan *City Branding* Balikpapan; 3) Pusat Forum Pertemuan Wilayah, Nasional dan International; 4) Kerjasama dengan seluruh organisasi profesi untuk bisnis untuk penyelenggaraan MICE; 5) Pengembangan objek wisata; 6) Pengembangan wisata behari di sepanjang pantai Balikpapan; 7) Pembangunan Kampung Budaya; 8) Penyediaan transportasi khusus ke daerah wisata; 9) Peningkatan kualitas hotel dan restoran.
8	Pengembangan Balikpapan Sebagai Kota Kreatif		1) Penyelenggaran pekan ekonomi kreatif setiap tahun sebagai ajang promosi dan pemasaran produk-produk kreatif; 2) Pemuda-pemuda Balikpapan masuk ke pengembangan ekonomi kreatif melalui Pendidikan, pelatihan dan aksi-aksi kreatif; 3) Rumah kreatif di tiap kecamatan se Kota Balikpapan sebagai pusat Pendidikan dan pelatihan bagi pelaku industry kretaif dan UMKM; 4) Event-event kreatif di luar daerah dan luar negeri;
9	Revitalisasi Perusda	1) Payung hukum eksistensi Perusda belum berjalan sebagaimana mestinya; 2) Belum optimalnya kontribusi terhadap PAD yang diberikan oleh Perusda	1) Dapat memberikan konstribusi PERUSDA yang besar terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) Dapat Meningkatkan Kinerja Perusda

2.6.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Balikpapan. Permasalahan tersebut selanjutnya akan menjadi tolok ukur bagi penyelesaian solusi di masa yang akan datang. Adapun permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.167 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

No	Urusan	Permasalahan	Solusi
1	Pendidikan	1) Keterbatasan formasi penerimaan ASN khususnya tenaga pendidik.	Pemerintah Kota Balikpapan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memenuhi kebutuhan guru
		2) Masih terdapat guru yang belum bersertifikasi pada jenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI/Sederajad dan SMP/MTs/Sederajat	Pemerintah Kota Balikpapan mengalokasikan pendanaan sertifikasi guru semua jenjang pendidikan
		3) Belum sesuainya Rasio Jumlah Guru ASN dengan Jumlah Siswa Cakupan ketersediaan sekolah SD/MI/Sederajat/SMP/MTs/Sederajat/SMU	Pemerintah Kota Balikpapan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memenuhi kebutuhan guru
		4) Cakupan ketersediaan sekolah SD/MI/Sederajat/SMP/MTs/Sederajat/SMU	Pemerintah Kota Balikpapan mengalokasikan penambahan RKB di sekolah yang memenuhi persyaratan
		5) Pemerintah Kota Balikpapan mengalokasikan penambahan RKB di sekolah yang memenuhi persyaratan	Sarana dan jaringan di setiap sekolah
		6) Keterbatasan daya tampung sekolah negeri	Keterbatasan daya tampung sekolah negeri
2	Kesehatan	1) Belum Meratanya Akses terhadap Pengetahuan dan Informasi terkait Penanganan Ibu Hamil	Masih terhambatnya Upaya Penanganan Medis terhadap Ibu Hamil
		2) Masih terhambatnya Upaya Penanganan Medis terhadap Ibu Hamil	Masih terhambatnya Upaya Penanganan Medis terhadap Ibu Hamil
		3) Belum Optimalnya Upaya Pengurangan Angka Kematian Bayi	Terdapat rumah sakit khusus Ibu Anak
		4) Belum Meratanya Penyebaran SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	Mengoptimalkan Keberadaan sekolah kejuruaan Kesehatan
		5) Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Belum Sesuai dengan Standar Aturan yang Berlaku	Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Belum Sesuai dengan Standar Aturan yang Berlaku
		6) Terbatasnya sarana prasarana kesehatan	Sumber pendanaan APBN dan APBD Provinsi
		7) Masih Rendahnya Penerapan Pola Hidup Sehat di Masyarakat	Mengoptimalkan tenaga masyarakat yang membantu
3	Pekerjaan Umum	1) Belum Optimalnya Pengelolaan Data Jalan dan Belum Tersusunnya Rencana Pemeliharaan Jalan	Meningkatnya Tingkat Kemantapan Jalan melalui Pemeliharaan Rutin Jalan

No	Urusan	Permasalahan	Solusi
		2) Belum terhubungnya Pusat Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kota dengan Jaringan Jalan seperti Kawasan Industri Kariangau dan Kawasan Perkotaan Balikpapan Timur	Terbangunnya jalan akses ke Kawasan Industri Kariangau dan Kawasan Balikpapan Timur
		3) Belum terhubungnya Pusat Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kota dengan Jaringan Jalan seperti Kawasan Industri Kariangau dan Kawasan Perkotaan Balikpapan Timur	Terbangunnya jalan akses ke Kawasan Industri Kariangau dan Kawasan Balikpapan Timur
		4) Belum selesainya pembebasan lahan dan pembangunan Embung Aji Raden dan terbatasnya sumber air baku di Kota Balikpapan	Termanfaatkannya air baku dari Embung Aji Raden dan Tersusunnya Rencana Pemenuhan Air Baku Regional
		5) Keterbatasan air baku dan masih tingginya tingkat kebocoran	Menigkatnya layanan air minum perpipaan melalui PDAM dan berkurangnya tingkat kebocoran
		6) Masih terbatasnya sarana pengolahan air limbah terpusat serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah yang aman	Meningkatkan akses air limbah aman
		7) Terbatasnya lahan TPA Sampah Manggar, TPS 3R belum beroperasi secara optimal, Pengelolaan Sampah di TPA masih belum menggunakan teknologi yang mampu mereduksi volume sampah	Menggalakkan dan pengoptimalkan kegiatan pengolahan sampah di sumbernya
4	Penataan Ruang	1) Masih belum selesainya penyusunan tiga perda yang saat ini sedang diproses	Pendampingan teknis dari Kementerian ATR/BPN untuk proses revisi RTRW Kota dan untuk RDTR Kota Balikpapan ditargetkan ditetapkan melalui Perkada sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
		2) Belum adanya pembaruan data peta sesuai dengan perubahan terbaru	Adanya Pendampingan teknis dari Kementerian ATR/BPN untuk proses revisi RTRW Kota 2017- 2037
		3) Masih adanya pelaksanaan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan	koordinasi,pendampingan teknis dan pengendalian pada proses perizinan pemanfaatan ruang
		4) Masih adanya alih fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat	Optimalisasi upaya pengawasan dan penindakan lintas OPD terhadap setiap perizinan pemanfaatan ruang
		5) Belum Adanya Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Belum Adanya Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		6) Pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) turut mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan	Optimalisasi upaya pengawasan dan penindakan lintas OPD terhadap setiap perizinan pemanfaatan ruang
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1) Penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan dan Permukiman belum dipahami secara optimal oleh OPD Pengampu	Tersusunnya basis data SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Tersusunnya Rencana Aksi Penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2) Masih terbatasnya data by name by address Rumah Tidak Layak Huni dan tidak lengkapnya readiness criteria terutama mengenai permasalahan legalitas lahan	Tersusunnya data by name by address Rumah Tidak Layak Huni dan berkurangnya rumah tidak layak huni

No	Urusan	Permasalahan	Solusi
		3) Hunian yang tersedia belum menjangkau secara merata baik dari sisi persebaran maupun kemampuan masyarakat untuk membeli	
		4) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang mengindikasikan kawasan kumuh (jalan dan drainase lingkungan, air minum, air limbah, keteraturan bangunan, dll)	Berkurangnya luas kawasan kumuh
		5) Sebagian besar kondisi PSU tidak layak untuk dilakukan serah terima pengelolaan selain banyak perumahan yang sudah tidak ada lagi developer selaku pengelola PSU	Bertambahnya Perumahan yang menyerahkan pengelolaan PSU
6	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1) Belum idealnya sarana dan prasarana yang sesuai dengan Permendagri nomor 17 Tahun 2019	
		2) Belum optimalnya penegakan regulasi daerah karena kondisi pandemi	Mensosialisasikan Perundang-undangan Daerah yang berlaku
		3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati regulasi daerah	Mensosialisasikan Perundang-undangan Daerah yang berlaku
		4) Terbatasnya kewenangan Satpol PP dalam penegakan regulasi daerah	Mensosialisasikan Perundang-undangan Daerah yang berlaku
		5) Belum idealnya jumlah personel Satpol PP jika dibandingkan dengan jumlah penduduk	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang baik dengan mengikuti jenjang Diklat yang dibutuhkan
		6) Masih kurangnya jumlah petugas Linmas sehingga mempengaruhi fungi Linmas	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang baik dengan mengikuti jenjang Diklat yang dibutuhkan
7	Pengampu BPBD	1) Kurangnya jumlah mobil operasional kebakaran sesuai dengan Standar Nasional	Penambahan sarana/prasarana dan pemeliharaannya (Sesuai SNI 1 unit damkar untuk 10.000 jiwa jadi idelanya Balikpapan mempunyai 67 unit Damkar)
		2) Belum optimalnya tingkat tanggap waktu kebakaran	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang baik dengan mengikuti jenjang Diklat yang dibutuhkan agar lebih responsive terhadap penanggulangan bencana dan kebakaran dan pengembangan aplikasi pelaporan berbasis digital
		3) Belum optimalnya upaya peningkatan SDM	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang baik dengan mengikuti jenjang Diklat yang dibutuhkan agar lebih responsive terhadap penanggulangan bencana dan kebakaran dan pengembangan aplikasi pelaporan berbasis digital
		4) Masih rendahnya area cakupan pelayanan kebakaran	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai salah satu rencana pembangunan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, Peningkatan sapraslog dan penambahan UPT maka tingkat waktu tanggap semakin cepat
		5) Proyek pemindahan IKN berpotensi akan menambah jumlah cakupan pelayanan kebakaran	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai salah satu rencana pembangunan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, Peningkatan sapraslog dan penambahan UPT maka tingkat waktu tanggap semakin cepat
		6) Kasus kebakaran masih banyak terjadi di wilayah kumuh	Peningkatan sapraslog dan penambahan UPT

No	Urusan	Permasalahan	Solusi
8	Sosial	1) Belum optimalnya penanganan penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Peningkatan kualitas Pendataan penyandang disabilitas terlantar di luar panti social
		2) Belum optimalnya pembinaan terhadap potensi sumber Kesehjaraan sosial (PSKS)	Peningkatan pembinaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
		3) Belum tersedianya rumah/tempat yang representatif untuk melaksanakan rehabilitasi sosial	Penyusunan perencanaan pembangunan pusat rehabilitasi sosial terpadu
		4) Kurangnya minat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) untuk mendapatkan peningkatan keterampilan	Pendampingan sosial kepada PPKS dalam rangka merubah pola pikir untuk lebih mandiri
		5) Kurangnya SDM untuk melakukan pendataan, verifikasi,dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Optimalisasi Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)
		6) Belum adanya regulasi terkait proses pendataan dan verivali DTKS	SOP Verifikasi dan Validasi DTKS
		7) Masih belum optimalnya integrasi program penanggulangan kemiskinan antar-OPD	Peraturan Daerah Kota Balikpapan No.5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan
		8) Belum adanya regulasi yang mengatur kelembagaan dan Fungsi SLRT	Belum adanya regulasi yang mengatur kelembagaan dan Fungsi SLRT
9	Tenaga Kerja	1) Keterbatasan lapangan kerja disertai dengan meningkatnya pencari kerja	Keberadaan RDMP dan isu IKN
		2) Belum Optimalnya Pelaksanaan Pelatihan Kerja terhadap Calon Tenaga Kerja	Keberadaan perusahaan
		3) Belum optimalnya program magang untuk calon tenaga kerja	Keberadaan perusahaan
		4) Kurangnya Pembinaan terhadap Calon Tenaga Kerja yang Ingin Berwirausaha	Perkembangan UMKM
		5) Belum Tersusunnya Masterplan Ketenagakerjaan	sedang dilaksanakan di tahun 2021
		6) Belum Adanya Regulasi (Perwal) Terkait dengan Pemberian Sanksi Kepada Perusahaan yang Melanggar Perda	penguatan koordinasi dengan provinsi
		7) Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem Pemetaan Angkatan Kerja	penguatan koordinasi dengan provinsi
		8) Penanganan kasus hubungan industrial masih kurang sesuai dengan prosedur yang berlaku	penguatan koordinasi dengan provinsi
		9) Penanganan kasus hubungan industrial masih kurang sesuai dengan prosedur yang berlaku penguatan koordinasi dengan provinsi Kurangnya SDM Pengawas Ketenagakerjaan	penguatan koordinasi dengan provinsi
10	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	1) Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Perkapita Laki-laki lebih baik dibandingkan perempuan	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak Peningkatan potensi perempuan
		2) Keterwakilan perempuan dalam lembaga eksekutif masih rendah	Keterlibatan perempuan dalam bidang politik semakin meningkat

No	Urusan	Permasalahan	Solusi
		3) Masih rendahnya sumbangan pendapatan perempuan	Perempuan sebagai tenaga profesional mengalami peningkatan
		4) Pemahaman OPD terhadap PUG masih rendah	Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
		5) Peran kelembagaan PUG baik tingkat kota maupun OPD belum maksimal	Telah terbentuk Kelompok Kerja PUG yang akan menjadi penggerak Pelaksanaan PUG sampai tingkat staf Pelaksana di masing-masing OPD
		6) Belum maksimalnya penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Telah terbentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang didukung SDM yang mendapatkan pelatihan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
		7) Kinerja OPD yang sangat berkaitan dengan peran lintas sektor OPD lain, dan atau para lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan)	Sinergi antara lembaga penegak hukum dengan OPD terkait dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
		8) OPD belum optimal melibatkan masyarakat, dunia usaha dan media massa serta stakeholder lainnya dalam hal pemenuhan hak anak	a) Telah terbentuk seksi Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat RT b) Telah terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Balikpapan
11	Pangan	1) Belum optimalnya upaya penguatan pola konsumsi masyarakat yang berimbang/beragam	Pola konsumsi masyarakat yang berimbang/beragam
		2) Persentase cadangan pangan masyarakat mengalami trend penurunan	Meningkatnya cadangan pangan masyarakat yang bersumber dari provinsi dan pusat
		3) Belum adanya Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan Daerah	Tersusunnya Regulasi Cadangan Pangan Daerah
		4) Belum adanya pemetaan daerah rawan pangan di Kota Balikpapan	Tersedianya peta daerah rawan pangan melalui inventarisasi data sektoral sebagai pendukung penentuan daerah rawan pangan di Kota Balikpapan
12	Pertanahan	1) Masih banyaknya IMTN yang bermasalah dan persyaratan yang belum lengkap	Optimalisasi pelayanan melalui aplikasi sistem informasi pertanahan
		2) Permintaan IMTN melonjak akibat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)	Optimalisasi pelayanan melalui aplikasi sistem informasi pertanahan
		3) Masih belum rampungnya pengadaan lahan untuk Pembangunan Bendungan Teritip	Upaya untuk mendorong pendanaan pembebasan lahan melalui APBN
		4) Masih terhambatnya pengadaan tanah untuk pembangunan Institut Teknologi Kalimantan (ITK)	Upaya untuk mengusulkan ITK sebagai proyek strategis nasional
		5) Belum optimalnya pengerjaan proyek pelebaran Jalan Letjend Suprapto	Alokasi anggaran pembebasan lahan pada program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
		6) Belum berlanjutnya pengadaan tanah untuk Embung Aji Raden	Upaya untuk mendorong pendanaan pembebasan lahan melalui APBN
		7) Capaian penanganan sengketa pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017	Peningkatan layanan mediasi
		8) Dokumen perencanaan berupa RTRW masih belum sepenuhnya dipatuhi	Optimalisasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan penertiban serta Penegakan Hukum

No	Urusan	Permasalahan	Solusi
13	Lingkungan Hidup	1) Kurangnya sumber air	Melakukan pembangunan bendungan Teritip,Embung Aji Raden dan upaya kerjasama pemanfaatan air baku dari bendungan Sepaku-Semoi
		2) Permintaan air bersih meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk, investasi usaha, dan kegiatan yang membutuhkan air bersih	Optimalisasi pengelolaan air baku oleh PDAM
		3) Pengupasan lahan yang tidak terkendali, baik yang berizin maupun tidak berizin	koordinasi,pendampingan teknis dan pengendalian lintas OPD pada setiap permohonan izin investasi yang didahului dengan pekerjaan pengupasan lahan
		4) Berkurangnya kapasitas drainase	Kegiatan normalisasi saluran drainase Kota dan Pengendalian sedimentasi melalui upaya pendampingan teknis pada permohonan izin investasi
		5) Dampak Lingkungan Balikpapan sebagai Kota Penyangga IKN	penyesuaian dan sinkronisasi rencana tata ruang dan pembangunan di Kota Balikpapan dengan rencana pemindahan ibukota negara untuk meminimalisir dampak lingkungan
		6) Pembukaan lahan dan pengupasan lahan yang dilakukan pengembang tidak sesuai dengan aturan	koordinasi,pendampingan teknis dan pengendalian lintas OPD pada setiap permohonan izin pengembang perumahan
		7) Kerusakan Mangrove	Melakukan konservasi mangrove dan menetapkan kawasan mangrove di pesisir Kota sebagai Kawsan Ekosistem Esensial (KEE)
		8) Masih belum optimalnya pembebasan hutan lindung dan hutan kota yang ada di wilayah Kota Balikpapan.	Alokasi anggaran untuk penyusunan dokumen perencanaan dan belanja modal pada program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		9) Kurangnya kesadaran dan minat masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah sesuai ketentuan tata cara pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah
		10) Belum tersedianya pusat daur ulang	telah ada 2 unit rumah daur ulang dan 3 bank sampah yang telah melakukan kegiatan pendauran ulang sampah
		11) Kurangnya sebaran dan jumlah bank sampah	Mendorong peran aktif kelompok masyarakat untuk membentuk bank sampah dan kemudahan pelayanan Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah Terintegrasi secara Elektronik
		12) Kurangnya fasilitas pemerintah untuk angkutan sampah terpilah	Pengalokasian anggaran sarana angkutan sampah terpilah pada program Pengelolaan Persampahan
		13) Pertumbuhan penduduk mengakibatkan sampah B3 Rumah Tangga meningkat	Meningkatkan peran aktif masyarakat dan usaha kecil dalam mengelola Limbah B3 rumah tangga dari produk yang digunakan sehari-hari
		14) Belum ada regulasi untuk pengelolaan sampah B3 rumah tangga	Upaya penyusunan draf Perkada Pengelolaan sampah B3 Rumah Tangga
		15) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah B3 rumah tangga	Kegiatan edukasi masyarakat dan usaha kecil mengenai Limbah B3 rumah tangga dan bagaimana pengendaliannya
		16) Belum tersedianya fasilitas pemerintah kota untuk pengelolaan sampah B3 rumah tangga	Pengalokasian anggaran untuk gudang limbah B3 di TPAS Manggar berdasarkan kajian limbah B3 tahun 2019

No	Urusan	Permasalahan	Solusi
		17) Kurangnya kesadaran masyarakat di wilayah pesisir dan sungai	Penguatan sosialisasi dan peningkatan peran serta Masyarakat di wilayah pesisir dalam pengelolaan sampah
		18) Kurangya sarana untuk pengambilan sampah dari aliran air	pengalokasian anggaran pengadaan sarana jarring sampah/kubus apung pada muara sungai
		19) Pengupasan lahan tidak terkendali	koordinasi,pendampingan teknis dan pengendalian lintas OPD pada setiap permohonan izin investasi yang didahului dengan pekerjaan pengupasan lahan
		20) Peningkatan emisi kegiatan industri	Penyusunan rencana aksi mitigasi penurunan emisi dari sektor industri terutama kegiatan manufacturing migas
		21) Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor	Optimalisasi SAUM dan mendorong penggunaan BBG untuk kendaraan bermotor
14	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib Administrasi Kependudukan	Pemanfaatan website, media sosial dalam mensosialisasikan pentingnya kepemilikan E KTP
		2) Kurangnya Pemahaman Sebagian Masyarakat dalam Memanfaatkan/Menggunakan Pelayanan Daring	Optimalisasi program 3 in 1
		3) Adanya perubahan aturan terkait administrasi kependudukan yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat	Koordinasi dan membangun jejaring dengan institusi Pendidikan
		4) masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat kepemilikan akte kematian dalam pengurusan dokumen penting	Semakin tingginya permintaan terhadap akte kematian sebagai prasyarat pengurusan dokumen oleh Instansi/Perbankan/Jasa Keuangan lainnya
15	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1) Penolakan pemakaian alat KB yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama	Optimalisasi Peran Penyuluh Keluarga Berencana dengan melibatkan penyuluh agama dari Kementerian Agama dalam mengedukasi masyarakat pentingnya Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan kualitas keluarga
		2) Kurangnya pemahaman wanita usia subur dalam status kawin akan pentingnya pengaturan jarak kelahiran dalam siklus kehidupan perempuan	Edukasi terhadap calon pasangan pengantin tentang pentingnya program KB
		3) Adanya biaya tindakan layanan kesehatan yang dibebankan kepada Peserta KB bukan peserta BPJS Kesehatan	a) Penyusunan regulasi yg mengatur terkait pelayanan KB di balikpapan yg gratis (krn masih adanya tarif retribusi pelayanan KB di faskes bagi PUS yg tidak memiliki BPJS) b) Optimalisasi Komunikasi, Informasi, Edukasi kepada masyarakat terkait pentingx ber KB (khususx KB MKJP)
		4) Masih Rendahnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendewasaan usia perkawinan	Regulasi terkait Pendewasaan Usia Perkawinan
		5) Laju pertumbuhan penduduk cenderung meningkat yang dominan disebabkan faktor Migrasi	Implementasi Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kota Balikpapan 2015 – 2035
16	Perhubungan	1) Belum optimalnya pengembangan koridor sarana angkutan umum	Terbangunnya koridor baru SAUM yang terhubungan dengan angkutan perkotaan
		2) Belum optimalnya pengembangan SAUM, manajemen rekayasa lalu lintas, serta pengembangan jaringan jalan kota	Meningkatkan kinerja jalan kota

No	Urusan	Permasalahan	Solusi
		3) Kurangnya sarana dan prasarana parkir dan belum adanya peraturan pengelolaan parkir	Meningkatnya realisasi retribusi parkir terhadap potensi yang ada
		4) Terbatasnya anggaran penyediaan perlengkapan jalan	Meningkatnya persentase penyediaan perlengkapan jalan
17	Komunikasi dan Informatika	1) Pengembangan aplikasi belum terintegrasinya secara menyeluruh	Meningkatkan penggunaan persentase aplikasi yang terintegrasi
		2) Sistem pengelolaan aduan publik masih belum terpadu satu pintu	Meningkatnya persentase tanggapan atas pengaduan masyarakat yang terintegrasi terpadu satu pintu
18	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	1) Belum optimalnya akses pinjaman permodalan bagi pelaku UMKM	Membuka akses permodalan UMKM dengan perbankan dengan mengoptimalkan peran UCCB
		2) Belum optimalnya kerjasama KUMKM dengan toko swalayan untuk promosi produk	Terjalinnya kerjasama UMKM dengan mitra dalam memperluas sasaran promosi
		3) Terbatasnya pengurus/pengawas/pengelola koperasi yang memiliki sertifikat	Tersertifikasinya pengurus/pengawas/pengelola koperasi dengan bekerjasama dengan stakeholder terkait
		4) Updating data koperasi dan UMKM yang belum rutin dilakukan	Data Koperasi dan UMKM yang tervalidasi melalui updating data rutin
19	Penanaman Modal	1) Masih tingginya ketergantungan terhadap sektor migas dan pertambangan	Meningkatkan investasi penanaman modal di sektor non migas dan pertambagan
		2) Fluktuasi hasil penilaian Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan baik secara offline maupun online
		3) Belum seluruh pelayanan perizinan terintegrasi secara online	Integrasi pelayanan perizinan secara online
20	Kepemudaan dan Olah Raga	1) Belum tersedianya peraturan serta belum efektifnya implementasi regulasi tentang kepemudaan	Implementasi pelaksanaan regulasi kepemudaan secara massif
		2) Belum optimalnya prestasi atlet lokal	Meningkatnya prestasi atlet melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan keolahrgaaan dengan melibatkan seluruh stakeholders
21	Statistik	1) Belum tersusunya daftar data dan pemantapan kelembagaan satu data di tingkat OPD	Melaksanakan pengelolaan data sesuai dengan Perwali Satu Data
22	Persandian	1) Belum adanya regulasi tentang tata kelola persandian	Meningkatnya persentase OPD yang menyelenggarakan pengamanan informasi
23	Kebudayaan	1) Sinergisitas antar OPD masih belum maksimal dalam pelaksanaan event	didukung sarana prasarana nasional dan internasional
		2) Belum optimalnya pembinaan dan pendataan terhadap Paguyuban yang ada	Menyiapkan jumlah paguyuban mewakili suku warga
		3) Lokasi cagar budaya yang berjauhan	mengoptimalkan fungsinya dan promosi ke masyarakat
		4) Pelimpahan kewenangan urusan kebudayaan ke Dinas Pendidikan di tahun 2018 mengakibatkan kinerjanya belum optimal	dukungan paguyuban
		5) Pandemi Covid-19 yang menghambat pengelolaan cagar budaya	optimisme percepatan pemulihan pasca covid
24	Perpustakaan	1) Jumlah pustakawan belum sesuai dengan standar nasional	pelatihan dan pengembangan SDM

No	Urusan	Permasalahan	Solusi
		2) Kompetensi Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan perlu ditingkatkan	pelatihan dan pengembangan SDM
		3) Keterbatasan data dan SDM dalam melakukan pembinaan	kerjasaman dengan pusat dan provinsi
		4) Masih kurangnya fasilitas pendukung perpustakaan	kerjasaman dengan pusat dan provinsi
		5) Keterbatasan jumlah buku di perpustakaan	kerjasaman dengan pusat dan provinsi
		6) Menurunnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan	pengembangan perpustakaan digital
		7) Menurunnya jumlah anggota perpustakaan	Meningkatkan program gemar membaca siswa SD dan SMP yang semakin meningkat
		8) Pelaksanaan kegiatan peningkatan minat baca pada tahun 2020 masih belum optimal	Buku digital
		9) Belum optimalnya koordinasi dengan OPD lain untuk meningkatkan minat baca masyarakat	Buku digital
25	Kearsipan	1) Keterbatasan SDM dalam Pengelolaan Arsip	Pelatihan dan pembinaan, kerjasama dengan pusat dan provinsi
		2) Masih kurangnya jumlah OPD yang tertib terhadap pengelolaan arsip	Komitmen OPD pentingnya arsip
		3) Gedung penyimpanan arsip belum memadai	Sudah memiliki gedung tersendiri
		4) Belum optimalnya upaya pengembangan digitalisasi arsip	pengembangan digitalisasi arsip
		5) Masih kurangnya anggaran untuk pengembangan pengelolaan kearsipan	kerjasama pusat dan provinsi
26	Perikanan	1) Faktor cuaca yang tidak menentu mempengaruhi tangkapan nelayan, tingginya biaya melaut, meningkatnya harga ikan, kualitas armada nelayan belum memadai	Meningkatnya produksi perikanan tangkap melalui pemanfaatan teknologi dalam peningkatan produksi perikanan tangkap dengan menggandeng seluruh stakeholders
		2) Belum optimalnya aktivitas budidaya perikanan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas pelaku budidaya perikanan
		3) Sarana prasarana tambak dan ketersediaan benih ikan yang tidak memadai	Meningkatnya produksi perikanan melalui revitalisasi sarana prasarana tambak dan penyediaan variasi benih
27	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	1) Penurunan jumlah kunjungan wisatawan selama pandemi covid-19	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan promosi pariwisata
		2) Belum optimal kualitas sarana dan prasarana di tempat pariwisata	Optimalisasi kualitas sapras pariwisata dengan melibatkan seluruh stakeholders
		3) Belum adanya arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif	Tersedianya pemetaan potensi ekonomi kreatif masing-masing wilayah, pemantapan road map pengembangan ekonomi kreatif
28	Pertanian	1) Status kepemilikan lahan pertanian yang bukan milik sendiri Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian	Tersedianya regulasi (Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan) LP2B
		2) Produksi padi ladang dan padi sawah mengalami penurunan	Meningkatkan produksi melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dengan terbatasnya lahan

No	Urusan	Permasalahan	Solusi
		3) Luas tanam dan tanaman padi sawah dan padi ladang terus berkurang	
		4) Fluktuasi produksi tanaman perkebunan	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan melalui intensifikasi lahan perkebunan dengan tanaman sela tumpang sari, tidak mengandalkan kesuburan tanah secara alami.
		5) Fluktuasi produksi peternakan	Meningkatnya produksi peternakan melalui perubahan pola peternakan yang tidak hanya fokus pada penggemukan hewan ternak, Penyediaan lahan sumber pakan hijauan ternak, Pemeriksaan kesehatan hewan secara berkala
29	Perdagangan	1) Penurunan persentase pelaku usaha menjual produk sesuai dengan standar	Meningkatnya pelaku usaha ynag menjual produk sesuai standar dengan terus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dengan melibatkan seluruh stakeholders
		2) Ketergantungan kebutuhan barang pokok dengan daerah pemasok luar Balikpapan	Menjalin kerjasama dengan daerah pemasok
		3) Menurunnya persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang di masa pandemi covid-19	Meningkatnya wajib tera yang melakukan tera ulang dengan sosialisasi dan pendekatan secara persuasif kepada wajib tera
		4) Kondisi fisik bangunan dan fasilitas pasar rakyat yang belum memenuhi standar dan berwawasan lingkungan	Revitalisasi pasar rakyat
		5) Penurunan nilai ekspor selama pandemi covid-19	Meningkatkan nilai ekspor melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi dagang, penganekaragaman komiditas ekspor
30	Perindustrian	1) Bahan baku sulit untuk didapatkan	Meningkatnya industri yang menggunakan bahan baku local
		2) Perkembangan sektor perindustrian cenderung stagnan selama pandemi covid-19	Meningkatnya perkembangan sektor industri yang adaptif dengan kebutuhan pasar
31	Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	1) Masih dominannya kebutuhan biaya pembangunan untuk percepatan pembangunan di Kota Balikpapan yang bertumpu pada dana pusat/fiskal pusat sebesar 71,28%	Meningkatnya derajat desentralisasi keuangan daerah dengan mengoptimalkan penerimaan PAD
		2) Menurunnya penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam masa pandemi Covid-19 (masalah khusus yang terjadi pada tahun 2020)	Meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah
32	Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Pendidikan & Pelatihan	1) Adanya perbedaan aturan terkait penghitungan Indeks Profesionalitas ASN Masih terdapatnya Pegawai yang melakukan pelanggaran kedisiplinan	Pelatihan, pembinaan dan tugas belajar Pemberian Reward kepada PNS teladan
		2) Masih Kurangnya Perencanaan Kebutuhan ASN	Pelatihan dan pembinaan
		3) Masih belum optimalnya sistem merit dilihat dari unsur penilaiannya	Komitmen penerapan sistem merit
		4) Upaya pengembangan SDM berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum sepenuhnya mampu diterapkan oleh ASN	Tercapainya pembangunan SDM yang menguasai IT (Smart ASN)
		5) Pengembangan aplikasi daring untuk diklat masih dalam tahap proses pengembangan	Aplikasi Diklat secara daring dan pembelajaran berbasis Computer Based Test (CBT)

No	Urusan	Permasalahan	Solusi
		6) Proses integrasi data masih dalam tahap proses	SAKP KemenPAN
		7) Belum optimalnya SDM yang ada terkait integrasi data	SAKP KemenPAN
33	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap OPD Belum Optimal	Peningkatan kualitas dan intensitas binwas kepada OPD dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
		2) Capaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern (APIP) saat ini sudah berada di level 3	Pelatihan dan pembinaan
		3) Penggunaan teknologi informasi dalam hal pengawasan belum sepenuhnya dilakukan secara efektif	Pengembangan aplikasi TI yang lebih mudah dioperasikan/diterapkan dan melakukan pemutakhiran/updating fitur (menu) menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan pengguna (user)
		4) Capaian OPD pada penilaian SAKIP yang masih perlu ditingkatkan	Pelatihan dan pembinaan
		5) Belum optimalnya proses audit kepada OPD	Penguatan SDM
		6) Fasilitas dan Sarana Prasarana belum sepenuhnya mendukung proses audit	Penambahan sarana/prasarana dan pemeliharaannya agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung kelancaran proses audit
		7) Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih terkendala pada aspek tertentu	Pembinaan
		8) Masih kurangnya komitmen OPD dalam mewujudkan unit kerja yang masuk dalam Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Pembinaan
		9) Masih rendahnya implementasi budaya integritas	Pembinaan

2.7. Inovasi Daerah

Inovasi menjadi kata kunci dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus untuk akselerasi pencapaian pembangunan daerah. Melalui inovasi maka penggunaan sumber daya akan dapat diefektifkan, sehingga akan tumbuh budaya kerja cerdas. Inovasi yang sedang dan telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.168 Inovasi Daerah yang Telah Dilaksanakan

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
1	Integrasi Data Pengaduan ke Dalam Rencana Kerja (INTAN RAJA)	Integrasi Data Pengaduan ke dalam Rencana Kerja adalah proses integrasi usulan masyarakat dan pegawai di RSUD Beriman Balikpapan ke dalam dokumen rencana kerja yang di dalamnya terdapat program dan kegiatan untuk mengatasi masalah yang menjadi prioritas sesuai dengan pengaduan masyarakat dan pegawai di RSUD Beriman Balikpapan.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
2	SIMANIS MBAK MAR (Sistem Pelayanan dan Informasi Masyarakat Berbasis Teknologi Android Kelurahan Margo Mulyo)	Pelayanan dan informasi melalui media online bagi mansyarakat di wilayah kelurahan Margo Mulyo
3	LAGU RT BARU (Laporan Kegiatan Ketua Rukun Tetangga Baru Ulu)	Laporan Kegiatan RT yang selama ini pengimputan Laporan dilakukan secara konvensional dengan Adanya Aplikasi Lagu RT Baru yang berbasis teknologi (online) Ketua RT dapat Menginput Laporan Kegiatan dimana, dan kapan pun sepanjang ada internet, dengan adanya Aplikasi Lagu RT Baru instansi Kelurahan Baru Ulu dapat Memonitoring Kegiatan Ketua RT setiap hari melalui aplikasi Lagu RT Baru
4	KATA SI RAMLI	Berdasarkan Perda Kota Balikpapan No 1 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Produk/kemasan Plastik Sekali Pakai dan Perwali Kota Balikpapan NO 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai bahwa ada beberapa kawasan di Kota Balikpapan yang wajib menerapkan peraturan tentang pengendalian dan pengelolaan persampahan salah satunya adalah kawasan wisata konservasi dan Kebun Raya Balikpapan adalah salah satu nya.
5	Pelayanan Insentif Untuk Investasi Dengan Mudah (PINTU INDAH)	Pelaksanaan inovasi berupa pemberian insentif kepada calon investor berupa keringanan fiskal dan non fiskal. Yang teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota dan berbasis teknologi informasi. Layanan fiskal dilakukan melalui sistem informasi yg melibatkan tim teknis terdiri dari OPD teknis sesuai dengan kelompok usaha yg diinvestasikan. Layanan non fiskal berupa pemberian layanan prioritas dengan sarana prasarana yg diwujudkan dalam proses pelayanan di DPMPT
6	ANYAMAN MAS BEJO	Anyaman Mas Bejo adalah singkatan dari Anjungan Pelayanan Mandiri Masyarakat Sumber Rejo yang berbentuk Anjungan berada di ruang tunggu pelayanan yang berfungsi bagi masyarakat untuk mengajukan pelayanan secara online dan melakukan pencetakan dokumen pelayanan. Anyaman Mas Bejo juga dapat diakses melalui perangkat handphone masing-masing warga, dimana saja dan kapanpun.
7	"SI PITUNG" Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Penyelesaian Piutang Pajak Daerah	Inovasi untuk penyelesaian piutang pajak daerah terkhusus pada pajak PBB-P2 yang setiap tahun bertambah dan sudah terakumulasi dari tahun 1993
8	Aksi Perlindungan Sosial terhadap Korban Bencana (Arlint Kobana)	Aksi perlindungan sosial terhadap korban bencana (Arlint Kobana) merupakan inovasi untuk membantu ketersedian barang bantuan sosial yg digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Kegiatanya meliputi 2 aspek, 1) penyediaan aplikasi utk mempermudah, mengelola dan menyalurkan barang bantuan sosial untuk korban bencana, 2) memfasilitasi pembentukan forum bagi organisasi sosial yg terlibat dalam penanganan bencana.
9	SIMPANANKU KOPI (sistem pelayanan khusus komprehensif)	sistem pelayanan yang formulasikan untuk penyandang disabilitas yang selama ini masih belum mendapatkan akses untuk mendaptkan pelayanan publik yang maksimal. oleh karena itu dibuat pelayanan komprehensif yang mencakup semua kebutuhan.
10	Pembinaan usia Dini menjaring atlet sepak bola yang Unggul (undi Masbolu)	Untuk meningkatkan pembibitan dan pembinaan khusus ya prestasi sepak bola di kota Balikpapan
11	PELAYANAN TERA/TERA ULANG TANGKI UKUR MOBIL SELESAI SEHARI	Meningkatkan Pelayanan Tera/Tera Ulang Selesai Sehari (Tangki Ukur Mobil) dalam melaksanakan penata usahaan dalam penyerahan Surat Keterangan Hasil Pengujian kepada Pelanggan ditingkatkan lebih cepat dari 3 hari menjadi satu hari.
12	Penyederhanaan Sistem Penyetoran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Di Kota Balikpapan	1. Juru pungut wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Bendahara Penerimaan Dinas dalam waktu 1x24 jam pada hari kerja sejak Retribusi diterima, 2. Dengan adanya beberapa resiko dengan ketentuan tersebut maka dipandang perlu untuk merubah sistem penyetoran retribusi tempat rekreasi dan olahraga sehingga dapat meningkatkan pelayanan retribusi tempat rekreasi dan olahraga kepada masyarakat sebagai pengguna layanan dan mengupayakan tertib administrasi

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
13	STANDAR PELAYANAN DAN SUMBER INFORMASI BPKD KOTA BALIKPAPAN (TRANSFORMASI)	Memberikan Kemudahan informasi dalam alur pelayanan dan jaminan kualitas pelayanan didapatkan oleh SKPD dengan cara penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan, dengan Keputusan Wali Kota Balikpapan dan buku saku digital tentang Standar Pelayanan dan Sumber Informasi BPKD Kota Balikpapan
14	Update data Pencairan dengan kartu Kendali GOOGLE SPREADSHEET (TETAP ENAK GOOGLE SPREADSHEET)	Kartu kendali kegiatan difungsikan sebagai alat kontrol kegiatan yang nantinya akan di sinkronisasikan dengan data yang terdapat di bagian keuangan. Karena nantinya data yang ada sebagai dasar dalam pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasioanal (LO) selanjutnya data tersebut juga akan di gunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan setiap tahun sehingga akan memperoleh laporan keuangan yang valid. Inovasi ini dilakukan untuk mengatasi temuan berulang pada saat pemeriksaan. Mekanisme kartu kendali kegiatan berupa pencatatan pengeluaran/pencairan kegiatan sehingga apabila diperlukan maka data atau informasi tersebut dapat disampaikan dengan tepat dan cepat serta akurat. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini akan terciptanya tata kelola administrasi keuangan yang lebih baik dan tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel
15	Sistem Pelaporan dan Aduan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi Kelurahan Lamaru	Dengan adanya sistem pelaporan aduan masyarakat melalui aplikasi semua aduan cepat ditangani dan bukti aduan tersebut tersimpan didata
16	SISTEM PELAPORAN PUPUK BERSUBSIDI (SILAPUBER) KOTA BALIKPAPAN	SILAPUBER (Sistem Pelaporan Pupuk Bersubsidi) Kota Balikpapan adalah sistem pelaporan yang dibuat untuk membantu dalam pengawasan dan pemantauan penyaluran pupuk bersubsidi dari 10 kios penyalur pupuk resmi di Kota Balikpapan melalui pelaporan online atau digital. Melalui aplikasi ini diharapkan bahwa penyampaian pelaporan penyaluran pupuk bersubsidi oleh verifikator dapat lebih cepat di input dan tepat waktu sehingga data yang diperoleh dapat disajikan secara akurat dan real time. Aplikasi Silapuber Kota Balikpapan dapat diakses melalui smartphone dan komputer.
17	SIPAWLIN (Sistem Pendaftaran Wajib Pajak Online)	Sistem Pendaftaran Wajib Pajak Online (SIPAWLIN) adalah Suatu Sistem berbasis online yang dibangun untuk memberikan kemudahan kepada Pelaku Usaha dalam melakukan pendaftaran 9 pajak daerah. Sistem ini merupakan suatu metode dalam mengoptimalkan pelayanan pendaftaran Wajib Pajak serta optimalisasi penggalian potensi melalui peningkatan jumlah wajib pajak baru guna meningkatkan penerimaaan pendapatan pajak daerah. Sistem ini berupa sistem aplikasi berbasis web yang dapat diakses menggunakan web browser dan bisa dioperasikan melalui komputer, laptop, tablet atau telepon pintar (smartphone) yang terhubung dengan koneksi internet
18	Pengembangan Aplikasi Simpra Kota Balikpapan	Untuk mengoptimalkan aplikasi Simpra Kota Balikpapan yang telah ada agar dapat terintegrasi dengan aplikasi keuangan daerah dan data warehouse LKPP melalui API serta dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kinerja penyedia barang/jasa
19	LARUNG KOPER	Laporan Kegiatan RT yang dulu dibuat secara manual di kertas, diubah dengan cukup mengirimkan file dalam bentuk Microsof word melalui Grup WA RT yang telah dibentuk
20	KGB OKE	Banyak yg mengalami keterlambatan kenaikan berkala karena lupa atau SK KGB hilang. Berdasarkan data keterlambatan KGB berkisar 1 tahun s.d. 1 tahun 6 bulan. Untuk prosedur KGB setiap PNS mengajukan permohonan KGB bila tidak membuat maka PNS tidak mendapat kenaikan gaji berkala meskipun sudah TMT-nya Petugas pembuat SKB kewalahan bila permohonan menumpuk dan konsekwensinya ada SK KGB yg terlambat dibuat, Akibat setiap KGB mengajukan permohonan berdampak penumpukan dokumen dan membuat kantor tidak nyaman
21	SI GAWAI (Sistem Informasi Penyelenggaraan Kepegawaian)	Sistem informasi berupa aplikasi yang berisi data dan dokumen kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan penghargaan masa kerja serta memiliki fitur reminder dalam penjagaannya

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
22	Sistem Informasi Humas dan Protokol	Sebuah aplikasi digital berbasis APK yang dikenal dengan Sitem Informasi Humas & Protokol atau "Si Mas Pro". Dalam rangka memberikan layanan informasi yang lengkap baik kepada internal maupun eksternal, aplikasi Si Mas Pro melengkapi content pada landing page yang terdiri dari fitur IYA KAH WAL yang merupakan akronim dari Informasi Layanan Kegiatan Harian dan Jadwal, serta fitur IYA BUJUR yang merupakan akronim dari Informasi Layanan Sambutan dan Jurnal.
23	SIMANIS MBAK MAR (Sistem Pelayanan dan Informasi Masyarakat Berbasis Teknologi Kelurahan MArgo Mulyo)	Pelayanan dan Informasi Masyarakat berbasis teknologi android di Kelurahan Margo Mulyo untuk Merubah Pelayanan dan Informasi Masyarakat secara Tatap Muka menjadi secara online.
24	DATIN OK (DATa INformasi pOs Kamling berbasis qr code)	Inovasi pengembangan database dan informasi data pos kamling berupa pembuatan aplikasi Quick Respone (QR) Code Pos Kamling yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan guna memudahkan dalam mengakses semua informasi tentang Pos Kamling di Kota Balikpapan. Terobosan atau inovasi di atas, diharapkan menjadi efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsi Pelayanan Informasi, yang mana inovasi ini akan diberi nama DATIN OK (DATa INformasi pos Kamling berbasis qr code) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan
25	Aplikasi layanan informasi/rekomendasi drainase ekspres	Komplain dari masyrakat terkait lamanya penerbitan surat informasi maupun rekomendasi drainase. Waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan Surat Informasi/Rekomendasi Drainase > 14 hari kerja. Surat Informasi Drainase/Rekomendasi Drainase adalah salah satu persyaratan IMB maupun Siteplan
26	Sarana Pengendali Portal Pengunjung Pantai Manggar Segara Sari (NADA ALUN)	Sarana Portal pengunjung ini adalah merupakan sarana untuk menertibkan pengunjung di loket masuk pantai manggar dengan tidak saling mendahului sekaligus untuk melalui protokol kesehatan yaitu memakai masker, cek suhu dan menyemprot sanitizer tangan pengunjung sebelum masuk Pantai Manggar, sehingga pengunjung masuk dengan rasa aman, nyaman dan tertib
27	Sistem Informasi elektronik hasil penelitian dan pengembangan (SI ELIT)	SI e-LIT (Sistem Informasi elektronik hasil penelitian dan pengembangan) adalah sebuah sistem database yang berisi data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan Pemerintah Kota Balikpapan yang akan dibangun berbasis teknologi informasi. Dengan database yang mudah diakses, akurat, valid dan terbarukan diharapkan dapat mempermudah untuk memperoleh serta mengolah data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan baik sebagai salah satu bahan pengambil kebijakan publik maupun penggunaan secara luas oleh stakeholder terkait. Disamping itu sistem ini dapat digunakan sebagai salah satu bentuk kontrol dan monitoring terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
28	KARTU KENANGAN BALBAR	Mengetahui Realisasi Anggaran Kegiatan dan Sisa Pagu Anggaran Kegiatan
29	Digitalisasi Dokumen Proyek Pembangunan Gedung Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan (edokumen)	Untuk menjawab perkembangan kota yang semakin pesat berdampak pada kebutuhan peningkatan infrastruktur perkotaan yang diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik bagi berbagai stakeholder. Diperlukan adanya suatu pola pengendalian ditengah keterbatasan sumber daya manusia dalam menggelola banyaknya dokumen kegiatan proyek yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. Pengendalian kegiatan yang akan dilakukan oleh project leader merupakan suatu upaya untuk menjaga dokumen kegiatan proyek yang semula masih dilakukan secara konvensional menjadi digital sehingga didapatkan informasi yang sistematis terintegrasi yang mampu memberikan kecepatan penyajian data secara terkini atas dinamika yang ada
30	SIIP MAS UNANG (Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat Kelurahan Sungai Nangka)	Inovasi SIIP MAS UNANG dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu : 1. Menyediakan Buku Panduan dan Informasi Pelayanan Kelurahan Sungai Nangka. 2. Melaksanakan Pembinaan Administrasi RT kepada Ketua RT se-Kelurahan Sungai Nangka. 3. Menyediakan link informasi pelayanan Kelurahan Sungai Nangka yang dapat diakses secara online

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
31	Sistem Pelaporan Kedaruratan (SIMPEL DARURAT)	Sebagai salah satu wujud dalam upaya percepatan penanggulangan bencana serta peningkatan pelayanan publik di wilayah kerja UPTD BPBD Wilayah Utara, maka dibuat suatu aplikasi sistem pelaporan berbasis website yaitu SIMPEL DARURAT, yang dapat diakses dan digunakan oleh semua masyarakat melalui handphone di wilayah kerja UPTD PBD Wilayah Utara pada khususnya, dan seluruh masyarakat Kota Balikpapan pada umumnya. Dengan adanya SIMPEL DARURAT, maka sistem pelaporan kedaruratan yang sudah berjalan saat ini menggunakan telpon dan atau radio, akan saling melengkapi
32	Transparansi Informasi Pembangunan Sapras Kelurahan Teritip (TIPS TERITIP)	Tips Teritip adalah akronim dari Transparansi Informasi Pembangunan Sarana-prasarana Kelurahan Teritip yang menyajikan Informasi publik terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kelurahan teritip yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan baik yang penganggarannya berada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan maupun yang berada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Balikpapan Timur selama ini dirasa kurang transparan atau minim diketahui oleh ketua RT, LPM maupun Kelurahan. Maka melalui inovasi “Tips Teritip” ini diharapkan informasi Publik terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana-prasarana di wilayah kelurahan teritip dapat lebih transparan dan bisa diakses melalui Scan Qr Code dan link bit.ly oleh ketua RT dan Ketua LPM kelurahan teritip sebagai garda terdepan dalam membantu pemerintah dalam hal pelayanan kepada masyarakat termasuk penyampaian informasi yang valid dari pemerintah tentang informasi pembangunan sarana dan prasarana tersebut
33	SISTEM INFORMASI LAPORAN KETERSEDIAN BAHAN POKOK (SI PORTER BAPOK)	Kegiatan monitoring dan pemantauan ketersediaan bahan pokok pada pelaku usaha kurang optimal dimasa pandemic corona virus disease-19,sehingga menyebabkan data laporan stok ketersediaan bahan pokok kurang optimal didapatkan dari pelaku usaha. Padahal kondisi pangan di masa pandemic harus di lakukan pemantauan stok secara konsisten dan periodik (bulanan)
34	Optimalisasi Sarana Informasi dan Administrasi Pelayanan BPSTB Secara Digital di UPTD Wilayah I	Dalam rangka stimulasi kepada pedagang untuk taat administrasi BPSTB, dan di butuhkan prasarana pelayanan pendukung dilapangan serta untuk mengoptimalkan sistem birokrasi internal dan sistem kearsipan yang efektif berbasis digital
35	Layanan Pendaftaran Online Rumah Tidak Layak Huni (LAPOR RUTILAHU)	Layanan Online Pendaftaran Rumah Tidak Layak Huni untuk memenuhi permintaan data terkait program perbaikan rumah tidak layak huni
36	Layanan Usulan Online Kesejahteraan Sosial Kelurahan Mekar Sari	Suatu layanan pendataan berbasis online yang merupakan bagian sistem pelayanan kesejahteraan sosial terpadu yang dinamis dan berkelanjutan
37	Bisik Tilik Bantuan Hukum (BILIK BANKUM)	Ruang Konsultasi Hukum bagi Instansi Pemerintah di Kantor Camat se Balikpapan mengenai permasalahan tanah
38	BILIK KONSULTASI DAN PENGADUAN	Memudahkan Masyarakat dalam Berkonsultasi terkait Bantuan Sosial
39	Verifikasi Dokumen Ahli Waris Sistem Aplikasi QR Code	Inovasi ini menyajikan informasi berupa data hasil verifikasi dokumen ahli waris di wilayah Balikpapan Tengah.
40	Sistem Antrian Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan (SADAR LAN SUKETAN)	Inovasi yang dilakukan adalah dengan membuat suatu system pendaftaran pelayanan surat keterangan kesehatan “ SADAR LAN SUKETAN” dengan memisahkan antrian antara kunjungan pasien poli umum dengan klien pengguna jasa pelayanan pembuatan surat keterangan kesehatan. Sehingga pelayanan surat kesehatan dapat dilakukan secara terpisah antara pasien berobat umum dengan klien pengguna jasa pemeriksaan dan pembuatan surat keterangan kesehatan.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
41	"PERIUK NASI"	"Periuk Nasi" atau akronim dari Pembayaran Digital Retribusi Kekayaan Daerah di Sentra Industri adalah suatu inovasi yang sangat diperlukan masyarakat dimasa pandemi Covid-19 dan juga turut mendukung Program Gerakan Non Tunai (GNT) dari Bank Indonesia dan turut berkontribusi pada target Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Balikpapan. Periuk Nasi bukanlah inovasi berbasis aplikasi tetapi inovasi berbasis metode pembayaran secara digital dengan menyediakan perangkat lunak yang bernama QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang diberikan Bank Indonesia dan menggunakan aplikasi dompet digital yang sudah ada untuk pelaksanaan metode pembayarannya. QRIS bukanlah QR Code biasa, melainkan QR Code yang identik atau terhubung langsung dengan rekening Bank pemegang QRIS. Sehingga apabila QRIS discan melalui aplikasi dompet digital maka akan muncul permintaan nominal yang akan dibayar dan kemudian akan memotong saldo uang elektronik yang ada diaplikasi dompet digital. Tanpa harus memasukkan nomor rekening pengirim maupun penerima. Setelah dibayarkan maka uang elektronik yang dikirim akan diterima direkening pemilik QRIS. Metode dan perangkat itu selain menjadi solusi untuk meniadakan tatap muka, mengurangi pembayaran secara tunai atau beredarnya uang kartal, memberikan efektivitas dan akuntabilitas dalam alur proses pembayaran ke rekening Kas Daerah, juga menciptakan budaya digital pada masyarakat menuju Balikpapan sebagai Kota Smart City.
42	Pojok Diskusi Ekspor	Memberikan pelayanan kepada pelaku usaha baik secara online maupun offline dg tujuan meningkatkan produk2 unggulan dan menciptakan eksportir eksportir baru
43	Klinik Informasi Pengembangan Perumahan	sebagai Informasi Masyarakat dalam mendapat informasi terkait perumahan yang berizin di kota Balikpapan sehingga terjadi Sengketa properti.Dengan adanya inovasi ini pengagas menyampaikan informasi melalu media web,instagram dan spanduk/ banner
44	SISTEM DATA INTEGRASI PUSKESMAS MARGA SARI (TEMAN MARSA)	Integrasi data-data pelaporan dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan pada rapat koordinasi Puskesmas dengan Dinkes, Pemkot dan stakeholder lainnya. Adanya aplikasi TEMAN MARSA ini memudahkan pimpinan, pemegang program dan stakeholder internal maupun eksternal Puskesmas mengakses data - data yang diperlukan dengan cepat dan akurat serta menjadi solusi keterbatasan tempat penyimpanan arsip / dokumen fisik
45	SAKALA (Sistem Aplikasi Gaji Berkala)	SAKALA adalah aplikasi yang mampu memberikan peringatan kepada admin utama/Kasubag umum ketika H-45 Kenaikan Gaji Berkala melalui email dan notif WA pasa PNS yang bersangkutan ketika hari H KGB nya, serta menghitung usia anak-anak PNS tertanggung. Selain menjaga hak PNS terkait KGB, SAKALA juga membantu mengontrol agar tidak ada kelebihan bayar tunjangan anak. Diharapkan selain administrasi yang jadi lebih rapi, manfaat besarnya adalah PNS tidak lagi disibukkan dengan urusan administratif seperti pengurusan KGB manual sehingga fokus oada tupoksi di unit kerja masing-masing, secara tidak langsung meningkatkan kualitas pelayanan publik
46	Majalah Kelurahan Media Klandasan ilir	masyarakat yang mengurus pelayanan administrasi di Kelurahan masih banyak yang tidak membawa persyaratan lengkap, hanya membawa surat pengantar dari RT saja, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan RT tentang persyaratan yang diwajibkan. dengan begitu dibuatlah sebuah buku yang memuat persyaratan administrasi pelayanan di Kelurahan, tapi tidak hanya seatas itu saja, namun ada informasi lainnya yang termuat dalam buku tersebut, yang akhirnya berbentuk majalah, karena memuat bermacam informasi dan juga sebagai media promosi UMKM yang ada di wilayah dan usaha lainnya yang ada diwilayah kelurahan
47	Peda padas (pemutahiran data pedagang pasar pandansari)	Peda padas adalah suatu kegiatan yg dilakukan akibat kondisi pasar pasca kebakaran yg sampai saat ini data yg ada belum maksimal dikarenakan banyak petak .kios atau lapak beralih tangan kepenyewa yg lain atau keluarganya dan juga kurang cermat serta jarang update setelah surat perjanjian dibuat serta tidak pernah dilakukan pendataan oleh uptd will II pasar pandansari

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
48	Tamara Internal Dispustakar	Tamara Internal Dispustakar adalah bentuk digitalisasi dari pendataan dan penyelamatan arsip keuangan SP2D tahun 2014 di lingkungan internal Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan. Inovasi ini ditujukan untuk menghindari hilangnya arsip dan juga kesulitan dalam mencari arsip di ruang penyimpanan arsip. Karena, seperti yang kita ketahui, arsip disimpan dan digabung dalam ruang arsip, sementara biasanya arsip yang kita cari hanya dalam bentuk satu lembar dokumen saja. Adanya digitalisasi arsip dengan memanfaatkan Google Drive ini dipercaya akan memudahkan pencarian, pendataan, dan penyelamatan arsip. Arsip yang sudah melewati batas akhir simpan pun bisa kita musnahkan tetapi datanya masih terselamatkan dalam bentuk digital. Hal ini juga bermanfaat dalam penghematan ruang simpan arsip di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
49	Anjungan Layanan Aduan dan Informasi Kelurahan Sepinggan Raya (ALADIN SERAYA)	"ALADIN SERAYA" atau Anjungan Layanan Aduan dan Informasi Kelurahan Sepinggan Raya. ALADIN SERAYA adalah Anjungan layanan yang berfungsi untuk mempermudah penyampaian aduan dan informasi dari masyarakat kepada pihak kelurahan dan mempercepat penanganan aduan dan informasi yang masuk. ALADIN SERAYA dapat diakses langsung di ruang pelayanan dan di tautan bit.ly/AladinSeraya (yang ditautkan dalam website kelurahan di sepingganraya.balikpapan.go.id)
50	Simfle (sistem informasi manajemen file)	SIMFLE, kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen File adalah sebuah aplikasi yang berbasis WEB yang digunakan pegawai dan seluruh seksi di Kelurahan Baru Ilir Balikpapan agar memudahkan perekaman atau pencarian arsip serta menjamin keamanan dan ketersediaan arsip yang autentik secara digital untuk setiap periode. Seiring dengan perkembangan teknologi maka melalui sistem informasi yang dibangun ini akan dapat memberikan kemudahan kepada para semua pihak terkait dalam perekaman dan mengetahui secara langsung arsip melalui smartphone. Data yang terdapat pada pada sistem informasi ini diperoleh dari surat manual yang dilakukan digitalisasi dokumen, diantaranya yaitu : Surat Masuk, Surat Keluar, Surat Pelayanan dan Surat Penting. Harapan besar melalui sistem ini dapat meningkatkan dari sisi kecepatan informasi, kemudahan, ketersediaan dan keamanan data
51	DIGITALISASI KEARSIPAN BERKAS DENGAN ONEDRIVE	Sebagai salah satu wujud dalam upaya percepatan pengelolaan arsip di UPTD Puskesmas Prapatan, perlu dibuat suatu system penyimpanan arsip melalui aplikasi Onedrive, yang dapat diakses dan digunakan oleh pegawai UPTD Puskesmas Prapatan melalui komputer, laptop maupun melalui handphone. Sistem pengelolaan arsip dengan menggunakan Aplikasi Onedrive ini mempermudah pegawai Puskesmas Prapatan dalam pemanfaatan arsip dengan optimal. Pengelolaan arsip melalui Onedrive dapat mengakses aplikasi di internet dapat mempermudah penggunaannya untuk menyimpan dan mencari dokumen
52	Satuan Tugas Pengawasan dan Optimalisasi 9 Pajak Daerah (SATGAS PANGLIMA BIJAK)	Pembentukan tim khusus yang betugas untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan dan verifikasi lapangan kepada wajib pajak daerah untuk 9 (Sembilan) jenis pajak daerah sehingga penerimaan pajak diharapan bisa lebih optimal dan tersedianya data terkini / update terkait status wajib pajak daerah yang belum melaporkan pajak daerahnya akibat Pandemi Covid-19.
53	PERSIBA BERAKSI (Pengajuan Verifikasi Belanja Berbasis Aplikasi)	Untuk memudahkan verifikasi belanja dalam rangka pengajuan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan
54	SIGRA PSR (SINERGI PENANGANAN KETERTIBAN WARGA PENDATANG SEPINGGAN RAYA)	Bahwa saat ini pengawasan terhadap warga pendatang/penduduk sementara masih sangat lemah karena kurangnya kesadaran dari masyarakat dan warga pendatang untuk melapor kepada pengurus RT di lingkungannya, serta keterbatasan dari perangkat RT dalam pengawasan terhadap warga pendatang dilingkunganya
55	Integrasi Pelayanan dan Bimbingan Berbasis Online Penggunaan Siinas dalam Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Industri di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Kota Balikpapan	Pembangunan kerangka pelayanan Konsultasi SIINas (Sistem Informasi Industri) oleh Kementrian Perindustrian dalam rangka memfasilitasi pemenuhan komitmen demi penerbitan Izin Usaha Industri. Pelayanan di bantu dengan memberikan akses panduan secara online dalam bentuk buku dan juga video yang dapat diakses pelaku usaha

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
56	REKONSILIASI DAN ANALISA PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI (RELEPANSI)	Rekonsiliasi dan Analisa Pendapatan Pajak serta Retribusi (RELEPANSI) adalah sistem berbasis web yang menyajikan format rekonsiliasi antara BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) selaku konsolidator dengan Perangkat Daerah penyusun Laporan Keuangan OPD, yang didalamnya menyajikan komponen perhitungan nilai realisasi dan nilai piutang pendapatan yang dilaksanakan OPD secara berkala.
57	Senang Sampah (Semangat Menabung dan Timbang Sampah)	“Senang Sampah” ini hadir untuk dapat membudayakan masyarakat untuk lebih Semangat Menabung dan Timbang Sampah.
58	SISTEM PEMBUATAN SURAT SEHAT " SI PESUT SEHAT"	Sistem Aplikasi pembuatan surat keterangan sehat berbasis web menggunakan kode QR dimana pengguna jasa dapat mengisi data diri mereka melalui scan barcode di Hp masing-masing
59	TANOS (Tampung dan Organisir Usulan)	Sebuah basis data usulan perencanaan pembangunan bersumber dari masyarakat yang dikumpulkan dari data usulan Musrenbang Kelurahan. Basis data ini berisi kolom dengan fitur penyaringan dan penyortiran mulai dari kecamatan, kelurahan, RT, usulan pekerjaan, koefisien, perangkat daerah pengampu dan status usulan. Hasil yang ingin diraih dengan hadirnya basi data ini adalah terciptanya tata perencanaan pembangunan berbasis usulan masyarakat yang jelas, lancar, sistematis dan akuntabel
60	LISAN ANDAL (Optimalisasi Layanan Panggilan Darurat Balikpapan)	Dengan adanya LISAN ANDAL maka akan dilakukan peningkatan layanan 112, Melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait layanan gawat darurat secara luas, Meningkatkan Service Level Agreement (SLA), menyusun konsep regulasi penyelenggaraan layanan panggilan darurat, meningkatkan kompetensi SDM 112, serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan layanan 112. LISAN ANDAL juga memiliki filosofi agar para operator layanan panggilan gawat darurat memiliki LISAN yang ANDAL dalam memberikan pelayanan prima dan responsif.
61	SIEPEN “Sistem Elektronik Pengawasan dan Pengendalian” Kendaraan Wajib Uji	Aplikasi berbasis web yang dibuat untuk mengintegrasikan pengawasan dilapangan dengan layanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Laporan dari petugas dilapangan langsung terekam oleh system dan diteruskan ke system layanan di bidang perhubungan, sehingga apabila pemilik kendaraan melakukan pelanggaran di lapangan dan dilaporkan maka system akan secara otomatis memblokir/menolak layanan yang di ajukan.
62	BUKA LINE (BURSA KERJA ONLINE)	Buka Line (Bursa Kerja Online) adalah sarana mempertemukan antara pencari kerja dan pemberi kerja pada waktu tertentu secara online, mulai dari pendaftaran mencari pekerjaan,melamar dan bertemu dengan wakil pemberi kerja/perusahaan secara online
63	Digitalisasi Laporan Swadaya dan Usulan Masyarakat Kelurahan Sungai Nangka (DIGDAYA SUKA)	Gagasan inovasi dengan judul DIGDAYA SUKA (Digitalisasi Swadaya Masyarakat Kelurahan Sungai Nangka) memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu pembuatan form pengajuan maupun laporan kegiatan swadaya masyarakat secara online yang dapat diakses secara real-time dan memiliki format yang baku sehingga turut memudahkan pihak Kelurahan untuk mendapatkan rekapitulasi data.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi lokal dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik ke depan, khususnya untuk tahun 2023. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2023 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan.

Bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi makro ekonomi serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan Kota Balikpapan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023, maka perlu diuraikan tentang berbagai kebijakan untuk menghadapi peluang dan tantangan yang ada, terutama yang terkait dengan perkembangan ekonomi makro daerah. Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2023.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah tidak lepas dari tren ekonomi makro Kota Balikpapan, Provinsi dan Nasional serta memperhatikan dinamika perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi global 2023 diasumsikan menglami pemulihan pasca pandemi Covid-19, meskipun ketidakpastian dapat sewaktu-waktu mengoreksi ke bawah pertumbuhan ekonomi.

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Pandemi Covid-19 yang lebih lama dan berdampak lebih besar dari perkiraan menyebabkan proses pemulihan ekonomi tentunya akan berlanjut pada tahun 2023. Apalagi proses pemulihan ekonomi saat ini pada tahun 2022 dibayangi oleh munculnya varian baru virus Covid-19 yang memiliki tingkat penyebaran yang lebih cepat. Episentrum pandemi yang awalnya berada di Cina, saat ini sudah beralih ke Amerika Serikat, Eropa serta negara-negara berkembang seperti Brasil, India, Rusia, Peru, Chili, Meksiko, Pakistan Afrika Selatan, Turki dan Indonesia. Perkembangan yang ada mendorong berbagai negara menutup perbatasan serta menerapkan kebijakan physical distancing dan lockdown meskipun dengan kebijakan yang lebih longgar. Kondisi ini berdampak besar terhadap penurunan aktivitas ekonomi dan mempersulit upaya dalam rangka pemulihan ekonomi secara global. Meskipun demikian, mulai meluasnya vaksinasi global diharapkan menurunkan tingkat resiko infeksi.

Di sisi lain, pemulihan ekonomi dengan mulai meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat, perbaikan pasar tenaga kerja serta pemberian kebijakan stimulus fiskal serta moneter juga meningkatkan tingkat inflasi. Namun peningkatan inflasi yang tidak terkendali dan dalam jangka waktu yang cukup lama tentunya akan dapat

menyebabkan perekonomian sebuah negara menjadi *overheating*. Hal inilah yang diantisipasi oleh Amerika Serikat pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 dimana tingkat inflasi yang terjadi mencapai 7% dan menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Sebagaimana kita ketahui bahwa perekonomian di negara-negara maju dan memiliki dominasi tinggi tentunya akan mempengaruhi terhadap perekonomian global.

Pemulihan ekonomi global saat ini juga bertambah dengan dinamika dan eskalasi hubungan antara Rusia & Ukraina yang mengakibatkan terhambatnya supply barang baik karena kondisi perang itu sendiri maupun kebijakan politik negara lainnya yang melakukan kebijakan embargo. Langkanya komiditi yang dipasok oleh kedua negara tersebut terutama komoditi pangan dan energi mengakibatkan efek yang berlipat secara global terhadap komiditi tersebut termasuk substitusinya. Meskipun terdapat windfall effect yang dirasakan yaitu adanya kenaikan pendapatan negara terutama komiditi energi yang dipasok oleh Indonesia, namun disisi lain kenaikan harga secara global juga akan dirasakan secara nasional yang perlu diantisipasi agar tidak melemahkan daya beli masyarakat.

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan. Dengan demikian, tema pembangunan RKP Tahun 2023 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun sasaran pembangunan nasional sebagaimana RKP Tahun 2023 yang ditargetkan pada RPJMN adalah sebagai berikut.

Laju Pertumbuhan Ekonomi	: 5.30 – 5.90 %
Tingkat Pengangguran Terbuka	: 5,30 – 6,00 %
Tingkat Kemiskinan	: 7,50 – 8,50 %
Indeks Pembangunan Manusia	: 73,31 – 73,49
Rasio Gini	: 0,375 – 0,378
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	: 27,02 %
Nilai Tukar Petani (NTP)	: 103 – 105
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	: 106 – 107

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Kalimantan Timur

Diperkirakan perekonomian Kalimantan Timur masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa Tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara cermat dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih

mencakup: a) Perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang menjadi mitra dagang utama Kalimantan Timur; b) Kondisi pandemi COVID-19 yang diperkirakan terus berlangsung dengan munculnya varian baru berakibat akan munculnya kebijakanpembatasan pada aktifitas masyarakat. c) Isu geopolitik dunia yakni perang dagang Australia- Republik Rakyat Tiongkok, serta potensi ketegangan di Timur Tengah; d) Kebijakan ekonomi hijau menjadi tuntutan masyarakat global dimana Indonesia untuk mendorong transformasi ekonomi menuju pembangunan yang yang rendah emisi dan ramah lingkungan; e) Kebijakan pemerintah pusat yang sewaktu-waktu dapat berubah berkaitan dengan ekspor bahan mentah (terutama komoditas batubara); f) Tren penurunan harga minyak dunia masih berlanjut; g) Mulai digalakannya implementasi energi baru terbarukan di Kawasan Asia Timur menyebabkan permintaan ekspor berpotensi menurun; h) Meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran akibat masih berlangsungnya pandemi COVID-19 yang menurunkan tingkat konsumsi masyarakat.

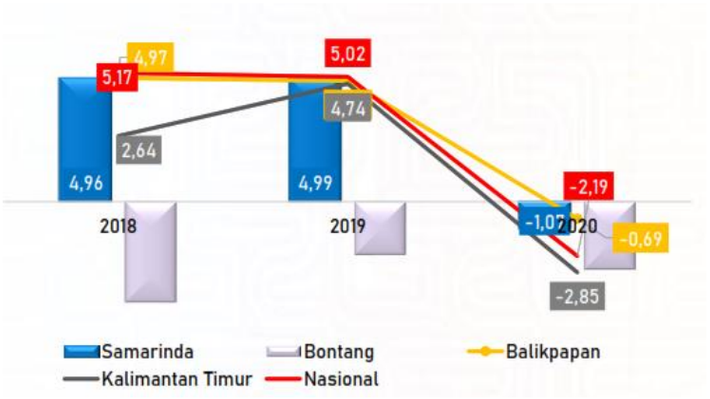
Di sisin lain, beberapa peluang yang diperkirakan mampu mempertahankan kinerja positif ekonomi Kalimantan Timur sebagai berikut: a) Momentum dipilihnya Kalimantan Timur sebagai IKN dan telah ditetapkannya RUU tentang Ibukota Negara, diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan sentimen bisnis di daerah serta mempercepat realisasi investasi, terutama dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana IKN Nusantara; b) Berlanjutnya proyek peningkatan kapasitas kilang minyak Balikpapan/Refinery Development Master Plan Refinery Unit V (RDMP RU V Pertamina) dan beberapa proyek swasta lain; c) Peningkatan kinerja ekspor batu bara seiring dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi negara tujuan utama ekspor seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Negara Asia lainnya; d) Beroperasinya sumur migas baru akan mendorong kinerja industri pengolahan LNG dengan adanya peningkatan supply bahan baku; e) Meningkatnya kinerja lapangan usaha konstruksi seiring dengan berlanjutnya pengerjaan proyek strategis multiyears existing (RDMP RUV, Bendungan Sepaku – Semoi, Pabrik Amonium Nitrat, Pabrik Coal Methanol dan realisasi investasi baru korporasi di Kaltim dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi; f) Optimaliasasi Kebijakan B20 dan B30 dan rencana B40 memberi peluang bagi peningkatan daya serap produk CPO di pasar domestik; g) Optimalisasi sumur-sumur migas baru dan optimalisasi Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus; h) Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, yang diharapkan mampu meningkatkan investasi yang implikasinya adalah dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Pada Tahun 2023, ekonomi makro Kalimantan Timur diharapkan dapat tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Stabilitas makro sangat penting bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua pihak atau ekonomi yang inklusif. Target makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Laju Pertumbuhan Ekonomi	: 3,5 ± 1 %
Tingkat Pengangguran Terbuka	: 6,50 %
Tingkat Kemiskinan	: 5,90 %
Indeks Pembangunan Manusia	: 77,75
Rasio Gini	: 0,308
PDRB per Kapita	: Rp. 185 Jt
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	: 76,15

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Balikpapan

Perekonomian Kota Balikpapan pada tahun 2021 dihadapkan pada tantangan pemulihan ekonomi dampak Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan pada tahun 2021, secara umum menglami perbaikan jika dibandingkan tahun 2020, meskipun pada Triwulan III mengalami perlambatan jika dibandingkan Triwulan II akibat *second wave* Covid-19 karena adanya varian delta. Perekonomian Kota Balikpapan pada tahun 2021 sebagaimana perekonomian nasional dan provinsi mengalami bouncing dan tumbuh sebesar 4,56% jika dibandingkan perekonomian pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan pada tahun 2021 ini lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 3,69% dan perekonomian provinsi sebesar 2,48%.



Gambar 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan Tahun 2018-2020

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 didorong oleh beberapa faktor antara lain :

1. Berlanjutnya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) RU V
2. Pembangunan akses IKN dan proyek strategis nasional
3. Menguatnya permintaan domestik seiring pemulihan pasca Covid-19
4. Relaksasi aktivitas ekonomi. termasuk pembelajaran tatap muka
5. Cakupan vaksinasi masyarakat Kota Balikpapan

Perekonomian Kota Balikpapan pada tahun 2023 diharapkan dapat tumbuh secara progresif dari dampak positif rencana pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur sebagaimana yang telah diumumkan oleh Presiden RI pada 26 Agustus 2019 yang undang-undangnya telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 18 Januari 2022. Pembangunan ibu kota baru yang diberi

nama Ibu Kota Nusantara pada tahap awal berupa pembangunan infrastruktur dasar berupa pembangunan jalan dan konektivitas, fasilitas air minum, fasilitas perkantoran, fasilitas pendidikan dan kesahatan dan seterusnya. Ibu Kota Nusantara ini secara jangka pendek ditargetkan dapat dioperasionalkan pada tahun 2024. Secara umum optimisme peluang perekonomian Kota Balikpapan di Tahun 2023 dapat digenjot dari berlanjutnya pekerjaan proyek strategis khususnya RDMP Balikpapan, menguatnya harga komoditas dan perbaikan ekspor khususnya CPO, potensi pembangunan infrastruktur pemerintah khususnya konektivitas untuk mendukung IKN, bauran lanjutan insentif fiskal dan moneter serta akselerasi Program Pemulihan Ekonomi di daerah, serta disetujuinya Undang Undang Ibu Kota Negara yang akan mendorong kinera realisasi investasi swasta serta mendorong konsumsi. Sedangkan tantangan yang perlu dihadapi yaitu ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19 seiiring berkembangnya varian virus baru, *maintenance* rutin industri pengolahan migas, prospek kinerja sektor pertambangan Kalimantan Timur yang menurun, dan Fluktuasi Harga komoditas serta potensi peningkatan inflasi yang cukup tinggi.

Mempertimbangkan kondisi ekonomi secara keseluruhan dan potensi yang dimiliki Kota Balikpapan, perekonomian Kota Balikpapan pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,5-5,0 % dengan tingkat inflasi yang diharapkan dapat terkendali dalam sasaran inflasi nasional yakni 3,0 ± 1%.

Dengan memperhatikan capaian dan kondisi perekonomian Kota Balikpapan, Regional dan Global serta target perekonomian Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, maka target indikator makro pembangunan Kota Balikpapan tahun 2023 yaitu:

Tabel 3. 1 Target Indikator Makro Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2021

	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi	-0,93	4,56	4,1	4,60
Tingkat Kemiskinan	2,57	2,89	2,42	2,39
Tingkat Pengangguran Terbuka	9,00	8,94	9,00	8,46
Indeks Pembangunan Manusia	80,01	80,71	80,11	81,00
Indeks Gini	0,302	0,325	0,30	0,30

Tabel 3. 2 Persandingan Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2023

INDIKATOR MAKRO	NASIONAL	PROV KALTIM	KOTA BALIKPAPAN
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30-5,90	3,5 ± 1	4,60
Tingkat Kemiskinan (%)	5,30-6,00	5,90	2,39
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,50-8,50	6,50	8,46
Indeks Pembangunan Manusia	73,31-73,49	77,75	81,00
Indeks Gini	0,375-0,378	0,308	0,30

Arah kebijakan dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yakni “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman

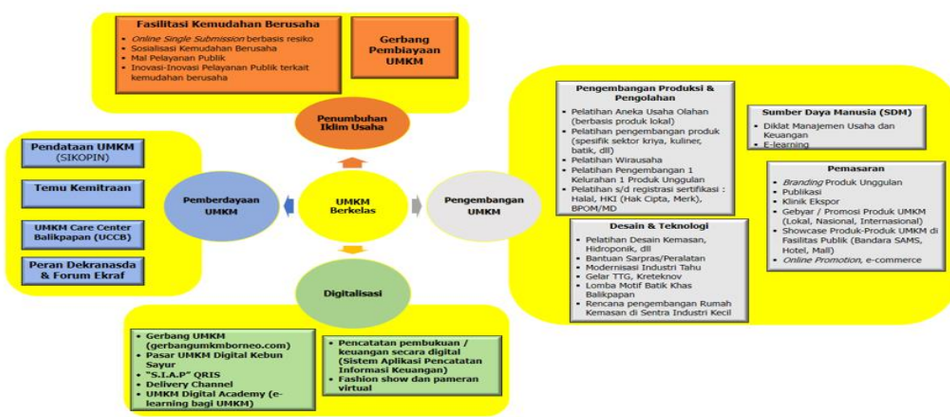
Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman". Adapun arah kebijakan ekonomi yang disusun Pemerintah Kota Balikpapan yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021 untuk mencapai tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi serta Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif, yakni :

a. Mengembangkan Sentra-Sentra Industri/Produk Ekonomi Lokal
b. Menguatkan dan Mengembangkan Koperasi & UMKM
c. Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Angkatan Kerja
d. Memperluas Perlindungan dan Jaminan Sosial
e. Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Melalui Peningkatan Keterampilan dan Perluasan Akses Modal
f. Menyediakan Regulasi dan Kebijakan yang Mempermudah Investasi
g. Meningkatkan Perluasan Lapangan kerja
h. Meningkatkan Ketersediaan dan Akses Pangan Berkelanjutan Bagi Masyarakat
i. Peningkatan promosi dan event pariwisata
j. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pariwisata
k. Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif
l. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif

Memperhatikan target indikator makro tersebut dan sejalan dengan arah kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, maka pengembangan ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2023 diarahkan pada:

1. UMKM Berkelas

UMKM Berkelas merupakan kebijakan terintegrasi dari hulu hingga hilir yang dilakukan dalam mengembangkan skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil sekaligus memastikan UMKM Kota Balikpapan menjadi tuan rumah di rumah sendiri dalam menyambut Ibu Kota Nusantara. Dengan disahkannya UU RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tentunya menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan. UMKM Berkelas dilaksanakan melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan UMKM, penumbuhan iklim usaha, dan digitalisasi secara terintegrasi



2. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif terpadu melalui :
   a. Peningkatan sumber daya manusia pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
   b. Pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas
   c. Penataan kawasan wisata
   d. Penguatan kalender event pariwisata dan MICE
3. Mendorong investasi dan kompetensi angkatan kerja untuk meningkatkan kesempatan kerja

3.2. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan Kota Balikpapan periode tahun 2016-2020 menjadi gambaran kapasitas keuangan Kota Balikpapan dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah terkait erat dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Penyusunan APBD bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan Pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dalam penyusunan APBD, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran yaitu penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*), dengan penganggaran (*budgeting*) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Kinerja keuangan pada periode pembangunan sebelumnya, terlihat pada kemampuan keuangan daerah yang ditunjukkan oleh Derajat Desentralisasi Fiskal melalui perbandingan kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah APBD. Tujuan dari Derajat Desentralisasi Fiskal adalah untuk melihat persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah sehingga mengetahui kemampuan daerah dalam kemandirian keuangan yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN	1,993,392,905,725	1,873,966,991,358	2,230,736,621,233	2,469,528,492,671	2,515,508,487,764
Pendapatan Asli Daerah	560,365,008,676	612,250,040,990	646,868,407,485	764,087,241,241	609,057,640,903
Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)	28.11%	32.67%	29.00%	30.94%	24.21%

Sumber : BPKD Kota Balikpapan 2016-2020 (Diolah, 2021)

Derajat Desentralisasi Keuangan dimana secara rata-rata pada periode pembangunan 2016-2020 pada klasifikasi Cukup"24,21%". Artinya kebutuhan biaya pembangunan untuk percepatan pembangunan di Kota Balikpapan lebih dominan bertumpu pada dana pusat/fiskal pusat sebesar 75,79%.

Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung) maupun pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

yang Sah). Struktur APBD Kota Balikpapan terdiri atas 3 (tiga) komponen utama yaitu (1) Pendapatan, (2) Belanja, dan (3) Pembiayaan. Masing-masing komponen diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Pendapatan

Kinerja Pendapatan Kota Balikpapan menunjukkan grafik perkembangan yang cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan 6.40%. Dalam kurun waktu 2016 hingga 2020, pendapatan tertinggi dicapai pada tahun 2019 dan terendah pada tahun 2017. Pada tahun 2017 sempat terjadi realisasi penurunan pendapatan apabila dibandingkan dengan tahun 2016. Akan tetapi angka tersebut kembali meningkat pada tahun 2018 dan 2019. Di tahun 2020 mengalami sedikit penurunan kembali apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebagaimana yang dialami kabupaten/kota di Indonesia bahkan global, namun tidak lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2018, 2017, dan 2016.

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Daerah			
	Target APBDP	Realisasi	%	Kelebihan / Kekurangan
2016	2.234.750.897.296,11	1.993.392.905.725.29	89,20%	(241.357.991.570,82)
2017	1.938.309.743.312,00	1.873.966.991.358,01	96,68%	(64.342.751.953,99)
2018	2.227.832.853.277,00	2.230.736.621.233,10	100,13%	2.903.767.956,10
2019	2.527.027.291.918,00	2.469.525.394.871,23	89,20%	(57.501.897.046,77)
2020	2.084.616.352.502,00	2.515.508.487.764,14	120,67%	430.892.135.262,14
TOTAL	11.012.537.138.305,10	11.083.133.498.752,40	99,18%	70.593.262.646,66

Sumber: BPKD Kota Balikpapan (Diolah, 2021)

Gambar 3.2 Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020



Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2016-2020 (Diolah, 2021)

Jika dilakukan perbandingan antara target dengan realisasi pendapatan, rata-rata realisasi pendapatan daerah Kota Balikpapan tahun 2016-2020 sebesar 99,18%. Dengan realisasi pendapatan tertinggi dicapai pada tahun 2020 sebesar 120,67%. Sementara persentase realisasi terendah terjadi pada tahun 2016 dan 2019 sebesar 89,20%.

3.2.2. Belanja

Selain melihat komponen pendapatan dari Kota Balikpapan, aspek lain yang juga dipertimbangkan adalah belanja daerah. Kapasitas belanja daerah tentu saja harus melihat kapasitas pendapatan dan kebutuhan pembangunan daerah. Efektivitas penggunaan anggaran akan tercapai apabila antara belanja dan

pendapatan seimbang dan dampak dari belanja daerah mempengaruhi indikator pembangunan. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah menjadi pertimbangan bagi para *stakeholders* dalam menilai efektivitas dan efisiensi proses pembangunan daerah. Sehingga menjadi hal yang wajar apabila banyak daerah kemudian menjadi lebih bijak dalam merumuskan belanja daerah yang tepat sasaran.

Belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Kota Balikpapan sendiri dalam hal belanja daerah, memiliki grafik yang cukup fluktuatif.

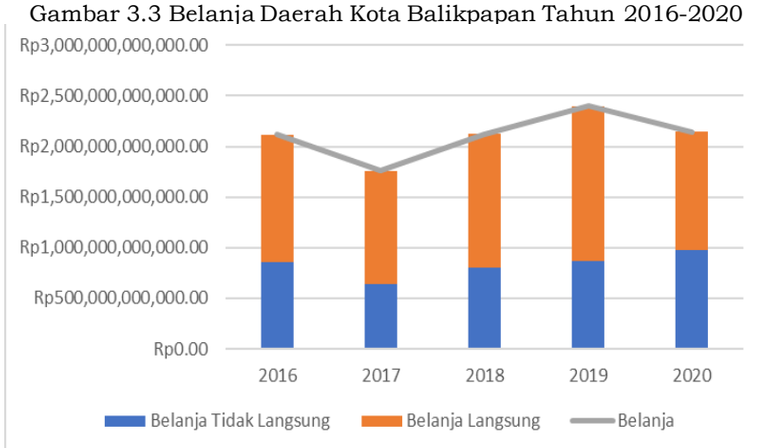
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Daerah			
	Target APBDP	Realisasi	%	Kelebihan/Kekurangan
2016	2.459.642.377.868,20	2.115.528.754.788,83	86,01%	(342.113.623.079,37)
2017	2.022.018.424.820,00	1.760.680.756.755,85	87,08%	(286.597.122.269,25)
2018	2.407.567.298.809,00	2.120.970.176.539,75	88,10%	(286.597.122.269,25)
2019	2.789.437.578.346,00	2.401.163.498.671,13	86,08%	(380.975.604.156,67)
2020	2.440.084.440.033,91	2.145.207.734.777,38	87,92%	(248.478.974.762,53)
TOTAL	12.069.996.168.783,10	10.549.824.661.451,10	87,00%	(1.520.171.507.331,97)

Sumber: BPKD Kota Balikpapan (Diolah, 2021)

Jika dilakukan perbandingan antara target dengan realisasi belanja, rata-rata realisasi belanja daerah Kota Balikpapan tahun 2016-2020 sebesar 87%. Dengan realisasi belanja tertinggi dicapai pada tahun 2018 sebesar 88.10%. Sementara persentase realisasi terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 86,01%.

Gambar 3.3 Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020



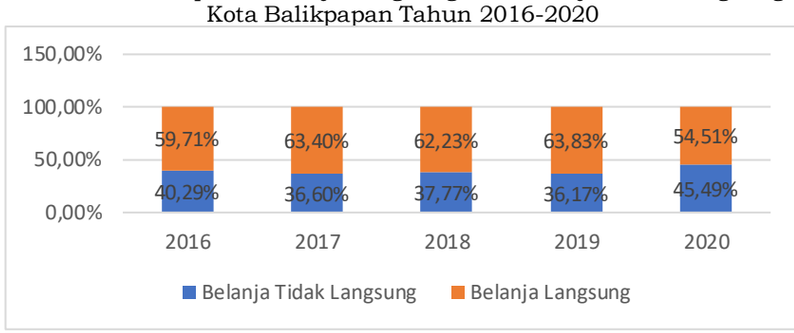
Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2016-2020 (Diolah, 2021)

Analisis terhadap realisasi belanja daerah selama tahun anggaran 2016-2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp2.401.163.498.671,00. Sementara Realisasi Belanja Daerah terendah terjadi

pada tahun 2017, yaitu sebesar Rp1.760.680.756.755,85. Selama periode 2016 hingga 2020 rata-rata pertumbuhan belanja sebesar 1,56%. Dari komponen belanja daerah yang membentuknya, rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung lebih tinggi dibandingkan belanja langsung. Rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung daerah pada tahun 2016-2020 mampu tumbuh sebesar 5,17%, sedangkan rata-rata pertumbuhan belanja langsung tumbuh sebesar -0,24%.

Gambar 3.4 Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kota Balikpapan Tahun 2016-2020



Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2016-2020 (Diolah, 2021)

- Selama periode 2016-2020 rata-rata pertumbuhan pada komponen belanja langsung tumbuh sebesar -0,24%, yang terdiri dari sub komponen belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sementara apabila dicermati dari proporsi belanjanya, belanja langsung Kota Balikpapan memiliki proporsi lebih yaitu dengan rata-rata sebesar 60,74% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan rata-rata proporsi belanja tidak langsung hanya sebesar 39,26%.

3.2.3. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan semua pos penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang disepakati. Pembiayaan Daerah yang dianggarkan merupakan seluruh transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Selain juga dapat berasal dari pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Adapun untuk pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Realisasi pembiayaan di Kota Balikpapan menunjukkan pola yang fluktuatif. Pembiayaan tertinggi terjadi di tahun 2020 sebesar Rp309.171.718.088,00. Hal ini dikarenakan besarnya penerimaan pembiayaan yang mencapai

Rp323.831.718.088,00 sedangkan pengeluaran pembiayaan hanya Rp14.660.000.000,00. Sementara pada tahun 2017 terjadi penurunan yang cukup signifikan dengan pembiayaan sebesar Rp85.007.745.930,00. Menurunnya angka pembiayaan ini dikarenakan penerimaan yang menurun cukup drastis menjadi Rp102.568.681.508,00 sedangkan pengeluaran meningkat tajam menjadi Rp17.560.935.578,00. Jika dilihat rata-rata pertumbuhan pembiayaan dalam kurun waktu 2016-2020 adalah sebesar 24,17%.

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keutamaan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Penentuan arah kebijakan keuangan dilakukan dengan memperhatikan kinerja dan realisasi keuangan tahun sebelumnya, kebijakan pengelolaan keuangan negara dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 serta asumsi kerangka ekonomi makro.

3.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan data realisasi tahun 2021, Pendapatan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp 331.957.919.141,12 atau sebesar 13,20% dari tahun 2020, yang mana penurunan terbesar berasal dari sektor Pendapatan Transfer. Sedangkan untuk pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 75.671.328.706,00 atau sebesar 12,42% dari realisasi tahun 2020. Dengan catatan pada saat rancangan awal RKPD ini disusun belum dilakukan audit terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan.

Tabel 3. 6 Realisasi Pendapatan Tahun 2019 – 2021

KODE REK	URAIAN	REALISASI		
		2019	2020	2021
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.469.528.492.671,86	2.515.508.487.764,14	2.183.550.568.623,02
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	764.087.241.241,05	609.057.640.903,42	684.728.969.610,02
4.1.1.	Pajak Daerah	565.236.192.479,07	425.129.773.688,60	537.513.232.779,32
4.1.2.	Retribusi Daerah	55.653.797.069,87	49.272.540.221,33	43.880.140.229,77
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16.870.674.739,20	16.174.599.738,41	17.906.485.028,05
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	126.326.576.952,91	118.480.727.255,08	85.429.111.572,88
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.637.884.749.567,00	1.830.196.140.055,00	1.443.258.420.222,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.182.575.687.529,00	1.489.457.814.889,00	1.065.096.106.332,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	455.309.062.038,00	340.738.325.166,00	378.162.313.890,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	67.556.501.863,81	76.254.706.805,72	55.563.178.791,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	67.556.501.863,81	7.243.548.238,72	3.174.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	69.011.158.567,00	52.389.178.791,00

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2022

*) Realisasi Tahun 2019 dan 2020 dilakukan *mapping* terhadap PP Nomor 12 Tahun 2019

Perhitungan pendapatan daerah dilakukan dengan asumsi/pendekatan yakni sebagai berikut:

1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perhitungan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
2) Pendapatan tranfer yang berupa pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan tranfer antar daerah dari pendapatan bagi hasil diasumsikan sesuai dengan yang telah diperhitungkan pada RPJMD Tahun 2021-2026, sedangkan pendapatan tranfer antar daerah dari bantuan keuangan belum diperhitungkan.
3) Lain-lain pendapatan yang sah hanya memperhitungkan pendapatan hibah dari pemerintah pusat sesuai dengan yang telah diperhitungkan pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan belum memperhitungkan pendapatan lainnya.

Selain itu, perhitungan pendapatan daerah dilakukan dengan melihat proyeksi asumsi makro ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2023 dan berdasarkan hasil kajian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta melihat performa pendapatan daerah tahun 2021 dan proyeksi pendapatan tahun 2022.

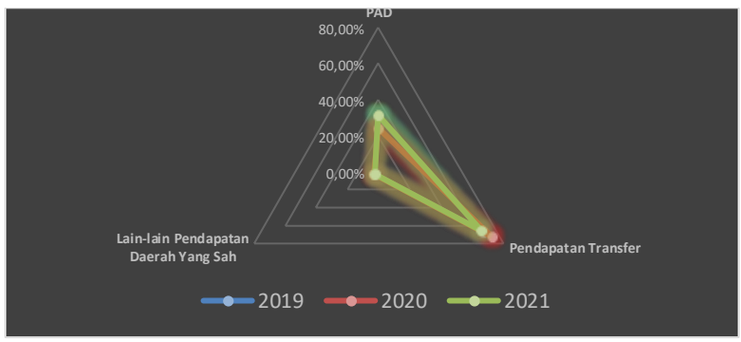
Tabel 3. 7 Target Pendapatan Tahun 2022 – 2023

KODE REK	URAIAN	PROYEKSI/TARGET RAPBD RPJMD TA 2022-2023	
		TA 2022	TA 2023
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.452.550.850.000	2.362.757.996.872
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	850.000.000.000	984.307.900.872
4.1.01.	Pajak Daerah	631.637.067.750	786.149.873.872
4.1.02.	Retribusi Daerah	74.121.954.250	46.705.000.000
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.040.000.000	21.042.000.000
4.1.04.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	124.200.978.000	130.411.027.000
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.495.153.593.000	1.371.450.096.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.145.551.766.000	1.021.848.269.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.111.528.054.000	987.824.557.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	501.046.316.000	559.517.864.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	428.306.693.000	428.306.693.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	68.651.156.000	
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	113.523.889.000	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	34.023.712.000	34.023.712.000
4.2.01.02.01	DID	34.023.712.000	34.023.712.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	349.601.827.000	349.601.827.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	349.601.827.000	349.601.827.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	107.397.257.000	7.000.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000	7.000.000.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.000.000.000	7.000.000.000
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri		
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	101.397.257.000	-
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan (Hibah Dana BOS)	97.771.230.000	-
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	3.626.027.000	-
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.452.550.850.000	2.362.757.996.872

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2022

Target pendapatan tahun 2022 telah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diuraikan sebagai berikut :

a. Target penerimaan pendapatan daerah Kota Balikpapan tahun 2023 sebesar Rp 2.362.757.996.872 atau mengalami Penurunan sebesar 3,77% dibandingkan target penerimaan pendapatan daerah tahun 2022 sebesar Rp 2.452.550.850.000;
b. Penerimaan pendapatan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 984.307.900.872 atau mengalami peningkatan sebesar 15,8% dibanding rencana tahun 2022 sebesar Rp 850.000.000.000 dengan kontribusi terbesar PAD berasal dari pajak daerah sebesar 79,9%. Adapun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan naik sebesar 5% dari target tahun 2022;
c. Pada pos Pendapatan Transfer untuk tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 1.553.625.141.000 atau mengalami peningkatan sebesar 3,91% dibandingkan dengan rencana tahun 2022 sebesar Rp 1.495.153.593.000;
d. Lain–Lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 7.000.000.000 yang bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.



Gambar 3. 5 Kontribusi Pendapatan Daerah 2019-2021
Sumber : BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2022

Pendapatan daerah Kota Balikpapan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selama kurun waktu tahun 2019-2021, Kota Balikpapan masih bergantung pada Pendapatan Transfer, yang ditunjukkan dengan masih tingginya kontribusi Pendapatan Transfer terhadap pendapatan daerah yaitu rata-rata sebesar 68,39%.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka arah kebijakan Pendapatan Daerah dirumuskan sebagai berikut :

a. Meningkatkan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui upaya:
   - Pembenahan manajemen data wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
   - Elektronifikasi dan digitalisasi layanan dan sistem pemungutan termasuk sistem pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang terintegrasi

- Evaluasi tarif pajak daerah dan retribusi daerah
- Mengoptimalkan sumber pendaptan lain yang sah melalui peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah

b. Mengoptimalkan realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah melalui:

- Evaluasi data perhitungan dana alokasi umum dan dana bagi hasil
- Pemenuhan readiness criteria untuk usulan dana alokasi khusus dan bantuan keuangan provinsi.

3.3.2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui belanja operasi, belanja modal, maupun belanja tidak terduga.

Dari sisi realisasi Belanja daerah Kota Balikpapan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Tahun 2019-2021) cenderung fluktuatif. Dalam kurun waktu tersebut, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan terjadi penurunan di tahun 2020 dikarenakan *refocusing* dan penyesuaian terhadap potensi pendapatan akibat Pandemi Covid-19, hal ini juga tergambar dari peningkatan belanja belanja tidak terduga yang diperuntukkan penanganan kesehatan, jarring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.

Realisasi dan proporsi belanja daerah pada kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 8 Realisasi Belanja Tahun 2019 - 2021

KODE REK	Uraian	Realisasi					
		2019*	Proporsi (%)	2020*	Proporsi (%)	2021	Proporsi (%)
5.	BELANJA	2.408.461.974.189,33	100	2.145.207.734.777,38	100	2.284.374.352.057,42	100
5.1.	BELANJA OPERASI	1.718.825.566.678,31	71,37	1.596.079.114.613,19	74,40	1.669.410.934.648,46	73,08
5.1.01	Belanja Pegawai	975.669.430.670,69		698.670.023.957,31		703.364.403.696,20	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	622.064.723.166,62		737.162.177.596,66		810.478.475.890,97	
5.1.04	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00		0		1.000.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	117.862.586.041,00		121.018.223.059,22		154.568.055.061,29	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.228.826.800,00		39.228.690.000,00		-	
5.2.	BELANJA MODAL	687.770.681.357,02	28,56	428.692.685.694,51	19,98	529.694.571.105,26	23,19
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.865.726.154,00	0,08	120.435.934.469,68	5,61	85.268.846.303,70	3,73
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.865.726.154,00		120.435.934.469,68		85.268.846.303,70	

Sumber: BPKD Kota Balikpapan Tahun 2022

*) Realisasi Tahun 2019 dan 2020 dilakukan *mapping* terhadap PP Nomor 12 Tahun 2019

Belanja daerah tahun 2023 tetap dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Penyusunan Belanja Tahun 2023 telah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Belanja Kota Balikpapan pada tahun 2023 antara lain :

a. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, memperluas penyediaan kesempatan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung arah kebijakan nasional untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
b. Penganggaran Belanja disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan terukur untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi anggaran serta diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas dengan prinsip *Money Follow Priority Program dalam rangka* pencapaian visi misi RPJMD 2021-2026.
c. Memberikan alokasi anggaran pada sektor–sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
d. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaan 2021 dan kemungkinan adanya kegiatan–kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya termasuk antisipasi ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19.

Tabel 3. 9 Target Belanja Tahun 2022–2023

KODE REK	URAIAN	PROYEKSI/TARGET RAPBD RPJMD TA 2022-2023	
		TA 2022	TA 2023
5.	BELANJA	2.602.156.718.301	2.607.907.693.765
5.1.	BELANJA OPERASI	1.982.301.026.316	2.035.067.383.105
5.1.01	Belanja Pegawai	829.711.050.925	837.190.341.890
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.028.247.315.863	1.059.254.998.865
5.1.04	Belanja Subsidi	1.000.000.000	0
5.1.05	Belanja Hibah	122.682.659.528	97.093.282.350
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	660.000.000	18.028.760.000
5.2.	BELANJA MODAL	556.855.691.985	552.720.310.660
5.2.01	Belanja Modal Tanah	80.524.897.700	94.813.217.200
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.296.153.202	54.092.628.943
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	126.227.175.207	164.132.988.200
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	220.298.991.376	215.269.875.927
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.475.474.500	24.411.600.390
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya (BLUD)	33.000.000	-
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	63.000.000.000	20.120.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	63.000.000.000	20.120.000.000

Sumber : BPKD Kota Balikpapan Tahun 2022

Pada rancangan ini, untuk *mandatory spending* tahun 2023 dialokasikan sebesar 22,39% untuk fungsi Pendidikan atau Rp 584.000.000.000,- dan sebesar 15,47% atau Rp 403.399.992.000,- untuk fungsi Kesehatan.

Tabel 3. 10 Alokasi Belanja Mandatory Tahun 2023*

A.	TOTAL BELANJA DAERAH TA 2023				2.607.907.693.765
B.	BELANJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	Total Pagu Program Disdikbud TA 2023				584.000.000.000
	B.1	BELANJA GAJI (ASUMSI 102,5% x TA 2022)		584.000.000.000	
		1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	236.548.600.000	
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	0	
		3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.250.000.000	
		4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	0	

		5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	0	
		6	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.050.000.000	
		7	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	220.000.000	
		8	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	60.000.000	
		9	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	990.000.000	
		10	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0	
		11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	343.881.400.000	
MANDATORY SPENDING PENDIDIKAN					22,60%
C.	BELANJA DINAS KESEHATAN				
Total Pagu Program DINKES TA 2023					403.399.992.000
	C.1	BELANJA GAJI (ASUMSI 102,5% x TA 2022)		403.399.992.000	
		1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	203.357.079.000	
		2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.131.995.000	
		3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	960.000.000	
		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.250.000.000	
		5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	193.700.918.000	
MANDATORY SPENDING KESEHATAN					15,61%

3.3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kota Balikpapan dari tahun 2019 -2022 bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah.

Tabel 3. 11 Realisasi Pembiayaan Tahun 2019-2021

KODE REK	URAIAN	REALISASI		
		2019	2020	2021
6.	PEMBIAYAAN	262.765.199.606,15	309.171.718.088,05	653.536.537.888,77
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	291.631.786.428,55	323.831.718.088,05	679.472.471.074,81
6.1.1.	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	291.631.786.428,55	323.831.718.088,05	679.472.471.074,81
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	28.866.586.822,40	14.660.000.000,00	25.935.933.186,04
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	28.866.586.822,40	14.660.000.000,00	25.935.933.186,04
	PEMBIAYAAN NETTO	262.765.199.606,15	309.171.718.088,05	653.536.537.888,77
	SiLPA TAHUN BERKENAAN	323.831.718.088,68	679.472.471.074,81	552.712.754.454,37

Sumber: BPKD Kota Balikpapan Tahun 2022

Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar 9,37% sesuai asumsi dalam RPJMD 2021-2026 dan memperhatikan rata-rata realiasi SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sebesar 10% yang berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2023 dialokasikan untuk penyertaan modal ke BUMD dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang bertujuan peningkatan pendapatan daerah serta pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta telah dilakukannya penyusunan perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.

Tabel 3. 12 Target Pembiayaan Tahun 2022–2023

KODE REK	URAIAN	PROYEKSI/TARGET RAPBD RPJMD TA 2022-2023	
		TA 2022	TA 2023
6	PEMBIAYAAN DAERAH	149.605.868.301	245.149.696.893
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	175.605.868.301	273.749.696.893
6.1.01	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	175.605.868.301	273.749.696.893
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	26.000.000.000	28.600.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	26.000.000.000	28.600.000.000
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	149.605.868.301	245.149.696.893
6.3	SiLPA TAHUN BERKENAAN	0	0

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2021

Sejalan dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah, arah kebijakan pembiayaan pembangunan di Tahun 2023 juga diarahkan pada:

1) Mengoptimalkan sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
2) Meningkatkan akses sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* melalui optimalisasi peran Forum CSR.
3) Pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU;

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja atau pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan tahun 2023 serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah adalah

menghitung proyeksi pendapatan daerah ditambah dengan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran, sehingga menghasilkan angka proyeksi total penerimaan riil kas daerah. Proyeksi total penerima riil kas daerah dikurangi dengan proyeksi total belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama sehingga akan menghasilkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2023. Berikut perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan daerah Kota Balikpapan tahun 2023:

Tabel 3. 13 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Balikpapan

NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2023
1	Total penerimaan	2.607.907.693.765
1.a	Pendapatan	2.362.757.996.872
1.b	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	245.149.696.893
	Dikurangi:	
2	Prioritas I dan II	1.730.376.059.550
2.a	Prioritas I (Belanja Mengikat)	1.338.069.749.550
	Belanja Pegawai	832.571.784.371
	Belanja Barang dan Jasa (Gaji Non PNS, Iuran BPJS, Belanja Pemeliharaan, Belanja Listrik, air, telepon, Belanja Surat Kabar, BBM OPS)	484.771.215.179
	Hibah Pendidikan	20.726.750.000
2.b	Prioritas II (Prioritas RPJMD)	392.306.310.000
	Multi years: SD SMP terpadu (Program Pengelolaan Pendidikan)	28.000.000.000
	Multi years: SMP Balikpapan Barat (Program Pengelolaan Pendidikan)	-
	Multi years: RS Balikpapan Barat (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan)	25.000.000.000
	Janji Wali Kota : Seragam (Program Pengelolaan Pendidikan)	19.617.900.000
	Janji Wali Kota : Subsidi SPP (Program Pengelolaan Pendidikan)	32.691.360.000
	Janji Wali Kota : BPJS (Program Pengelolaan Jaminan Kesehatan)	88.457.050.000
	Multi years: Pengendalian banjir (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan)	85.000.000.000
	Janji Wali Kota : Air minum	100.840.000.000
	Janji Wali Kota : Balikpapan Kota MICE (1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, minus subkegiatan UPT ; 2. Program Pemasaran Pariwisata)	11.000.000.000
	Janji Wali Kota : Balikpapan Kreatif (1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; 2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif)	1.700.000.000
3	Pengeluaran Pembiayaan	28.600.000.000
Kapasitas riil kemampuan keuangan (1-2-3)		848.931.634.215

Sumber : *BPKD dan BP2DRD Kota Balikpapan (Diolah,2021)*

Berdasarkan Tabel 3.13 diketahui bahwa rencana penggunaan kapasitas rill kemampuan keuangan daerah dalam rangka pendanaan program pembangunan Tahun 2023. Proritas Satu (I) merupakan Belanja Mengikat yang mengikat terdiri dari

Belanja Gaji Pegawai, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, operasional wajib/Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta hibah wajib. Prioritas Dua (II) merupakan program pembangunan daerah atau program unggulan *(dedicated)*Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Sedangkan Kapasitas riil kemampuan keuangan (1-2-3) Rp. 848.931.634.215;selanjutnya akan menjadiPrioritas Tiga (III) yang merupakan program pembangunan daerah atau Prioritas Perangkat Daerah lainnya yang merupakan program mendukung Perangkat Daerah untuk capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Perangkat daerah yang berkaitan dengan Kementrian terkait.

Adapun Hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan di atas akan menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan program-program yang akan direncanakan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang akan dirumuskan dalam RPJMD.

Tabel 3. 14 Rencana Pembangunan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

NO.	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2023 (RP)
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2.577.907.693.765
1	Prioritas I (Belanja Mengikat)	1.338.069.749.550
2	Prioritas II (Prioritas RPJMD)	390.906.310.000
3	Prioritas III (Prioritas Perangkat Daerah lainnya)	848.931.634.215
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2.577.907.693.765

Sumber : *BPKD dan BP2DRD Kota Balikpapan (Diolah,2021)*

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021. Pada dokumen RPJMD tersebut, visi dan misi Wali Kota Balikpapan adalah :

"Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman"

Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 memiliki makna sebagai berikut:

Kota Balikpapan sebagai Kota Terkemuka dapat diartikan bahwa dalam lima tahun ke depan, Kota Balikpapan diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya baik dalam Skala Regional, Nasional maupun Global dengan ditunjang oleh fasilitas penunjang perkotaan yang memadai. Kondisi kota juga semakin berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, dan udara). Rencana pengembangan pusat perekonomian baru dalam kawasan *Coastal Area*, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasi daerah, pengembangan objek wisata dan ekonomi kreatif masyarakat, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan dan pengembangan infrastruktur strategis lainnya, ditunjang dengan posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur dan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru diharapkan secara langsung berdampak pada perkembangan perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai Kota yang Nyaman Dihuni, Kota Balikpapan akan terus memperbaiki kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan yang memadai serta berwawasan lingkungan agar Kota Balikpapan semakin nyaman dijadikan sebagai tempat tinggal dan tempat beraktifitas bagi warganya.

Sedangkan Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman adalah memiliki arti kota yang berperadaban tinggi, nyaman dihuni dengan spiritualitas yang mewarnai seluruh aktivitas warga kota. Kota yang masyarakatnya berperadaban maju, dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam kondisi masyarakat yang majemuk, yang didukung kepemerintahan yang baik, dan menjadikan iman sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai landasan dalam seluruh gerak pembangunan. Dalam rangka perwujudan Visi tersebut, maka dirumuskanlah misi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Selanjutnya misi tersebut dijabarkan menjadi beberapa tujuan dan sasaran pembangunan yang terdiri dari :

Tujuan 1: Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi

Salah satu prasyarat terwujudnya pembangunan daerah yang baik adalah dengan menguatkan tata kelola pemerintahan khususnya dari sisi profesionalitas dan transparansi. Sebagai respon dari isu strategis tersebut, maka proses perencanaan pembangunan Kota Balikpapan menetapkan tujuan yaitu "Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi". Untuk mendukung tujuan tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 4. 1 Tujuan dan Sasaran Misi 1



Sumber: Bappedalitbang, diolah 2021

Tujuan ini adalah dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan secara umum yang secara langsung akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara luas. Peningkatan kinerja profesionalitass dan transparansi birokrasi pemerintahan ini juga perlu didukung dengan perbaikan atau penyempurnaan dari sisi kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, sistem dan prosedur pelayanan umum sehingga menjadi lebih responsif dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Tujuan Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi adalah hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Indeks reformasi birokrasi menggambarkan kemajuan instansi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan melayani. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi.

Tujuan 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu isu strategis dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan perekonomian daerah. Oleh karenanya, untuk merespon dan menindaklanjuti isu tersebut maka pembangunan Kota Balikpapan harus didorong dan diarahkan pada pencapaian tujuan yaitu "Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing" dalam rentang waktu lima tahun mendatang. Pencapaian tujuan itu sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah Kota Balikpapan mampu memenuhi derajat kualitas "Indeks Pembangunan Manusia (IPM)".

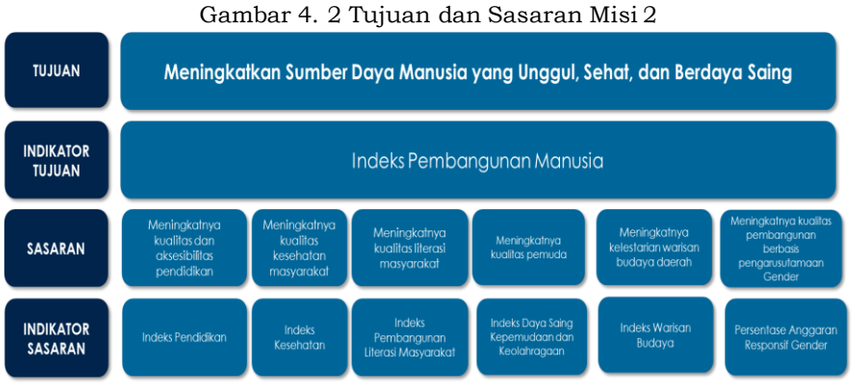
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang

dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dalam penghitungan IPM, indikator yang digunakan adalah:

a. Dimensi Kesehatan diukur menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH)
b. Dimensi Pengetahuan diukur menggunakan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
c. Dimensi standar hidup layak diukur menggunakan Pengeluaran per Kapita disesuaikan

Efektivitas pencapaian tujuan itu akan terjadi jika kinerja lintas OPD pemerintah Kota Balikpapan bisa tersinergikan dan terkonsolidasikan dengan baik. Pencapaian tujuan ini diukur dengan meningkatkan indeks kepuasan layanan infrastruktur. Untuk mendukung peningkatan IPM ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini :

Gambar 4. 2 Tujuan dan Sasaran Misi 2



Sumber: Bappedalitbang, diolah 2021

Tujuan 3: Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan

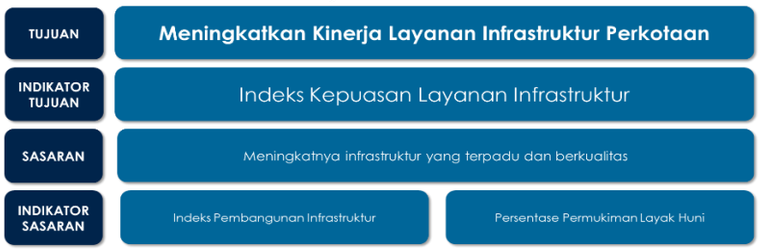
Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauh mana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah dalam menyediakan fasilitas dan meningkatkan layanan infrastruktur secara merata. Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci perkembangan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan layanan infrastrukur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Pengukuran keberhasilan dari tujuan tersebut adalah dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. Selain mengukur kepuasan masyarakat juga akan diinvetarisasi keinginan serta harapan dari masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur. Sektor infrastruktur yang dinilai dalam Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah:

a. Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas
b. Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, Laut dan Udara)
c. Penyediaan infrastruktur air bersih
d. Penyediaan infrastruktur irigasi
e. Penyediaan infrastruktur perumahan

Untuk mendukung peningkatan indeks layanan infrastruktur ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 4. 3 Tujuan dan Sasaran Misi 3



Sumber: Bappedalitbang, diolah 2021

Tujuan 4: Mewujudkan Lingkungan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

Proses pembangunan di Kota Balikpapan diarahkan untuk mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Paradigma pembangunan tersebut bertujuan agar proses pembangunan berjalan beriringan dengan upaya pelestarian lingkungan. Hal ini sesuai dengan dua isu strategis Kota Balikpapan yaitu Penyediaan Infrastruktur yang andal dan berwawasan lingkungan serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Untuk merespon isu strategis tersebut maka tujuan yang ditetapkan adalah Terwujudnya Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan. Untuk mendukung tujuan tersebut, satu indikator tujuan yang dijadikan target bersama oleh program lintas OPD Pemerintah Kota Balikpapan adalah "Indeks *Liveable City*". Indeks *Liveable City* atau Indeks Kota Layak Huni merupakan sebuah indeks tahunan yang menunjukkan tingkat kenyamanan warga kota untuk tinggal, menetap dan beraktivitas di suatu kota yang ditinjau dari berbagai aspek perkotaan. Prinsip-prinsip Kota Layak Huni adalah:

1. Ketersediaan sarana kebutuhan dasar (perumahan, air, listrik)
2. Ketersediaan fasilitas publik (transportasi, taman-taman kota, fasilitas beribadah, kesehatan, pendidikan)
3. Ketersediaan ruang publik dan tempat berinteraksi bagi masyarakat
4. Keamanan
5. Dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya di kota
6. Sanitasi

Upaya pencapaian tujuan ini didukung oleh sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 4. 4 Tujuan dan Sasaran Misi 4



Sumber: Bappedalitbang, diolah 2021

Tujuan 5: Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif

Upaya untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif diarahkan agar terjadi pertumbuhan ekonomi serta mengurangi dampak dari permasalahan kemiskinan. Inklusivitas dalam upaya pembangunan ekonomi menjadi kunci untuk mengejar pemerataan sehingga diharapkan pendapatan per kapita, kesejahteraan, dan daya beli masyarakat semakin membaik ke depannya.

Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan ini, maka digunakan 1 indikator tujuan yaitu Indeks Gini. Indeks Gini merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah. Distribusi pendapatan semakin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan semakin tidak merata jika nilai Koefisien Gini makin mendekati satu (1).Adapun upaya untuk memperbaiki indeks gini dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan UMKM, mengurangi tingkat pengangguran dan menurunnya angka kemiskinan.

Tujuan 6: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah tidak terlepas dari perputaran roda ekonomi pada wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting untuk terus digerakkan demi menopang hajat hidup masyarakat. Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan ini maka digunakan 1 indikator yakni Pertumbuhan Ekonomi. Adapun upaya untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan mengintervensi berbagai sektor dan bidang mulai dari pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, investasi, dan ketahanan pangan daerah.Upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 4. 5 Tujuan dan Sasaran Misi 5



Sumber: Bappedalitbang, diolah 2021

Keterkaitan antara tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan serta indikator kinerja program dapat dijelaskan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 1. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Balikpapan tahun 2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2020 (BASELINE)	TARGET TAHUN 2023	TARGET AHIR PERIODE RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Profesionalitas dan Transparasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	68,99	75,52	75,58	Meningkatkan keselarasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah berbasis kinerja
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	80	83	Memperkuat pengawasan dan tata kelola keuangan yang akuntabel	Mengoptimalkan Transparasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	24,21%	41,42%	44,40%	Intensifikasi potensi penerimaan pendapatan asli daerah	Optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah
			Indeks SPBE	N/A	3.3	4.0	Menerapkan pelayanan publik yang cepat, tanggap, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara terintegrasi dan terpadu	Membangun sistem *e-government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
			Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 4	Menguatkan akuntabilitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah	Mendorong pelaksanaaan pengendalian intern dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
		Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	0,62	0,73	0,84	Pemantapan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	82,85	85,05	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Modern	Mendorong Pengembangan Pelayanan Publik yang Inovatif
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing	IPM	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,7487	0,7506	0,7524	Meningkatkan Kemudahan Akses Layanan Pendidikan Seluruh Masyarakat	Menyediakan Sarana Prasarana Pembelajaran yang berkualitas dalam Penyelenggaraan Pendidikan
								Menyediakan SDM yang berkualitas dalam Penyelenggaraan Pendidikan
								Perluasan bantuan biaya pendidikan
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,8383	0,8388	0,8397	Meningkatkan tingkat derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan sistem kesehatan	Menyediakan sarana prasarana yang berkualitas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan
								Menyediakan SDM yang berkualitas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan
								Perluasan bantuan biaya kesehatan
		Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi	N/A	11	12,5	Meningkatkan budaya membaca masyarakat	Mengembakan sistem *E-Library*

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2020 (BASELINE)	TARGET TAHUN 2023	TARGET AHIR PERIODE RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Masyarakat					
		Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0,020	0,022	0,025	Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Mengembangkan potensi dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan
		Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	0,4920	0,4962	0,4975	Mengembangkan nilai budaya Kota Balikpapan	Meningkatkan kualitas SDM pengelola kebudayaan
								Memperluas akses warisan budaya kepada masyarakat
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	14,43%	25%	60%	Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan untuk Semua (perempuan, pemuda, lansia, anak, difabel)	Mengoptimalkan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender
								Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana Layanan Lansia dan Difabel
								Mengoptimalkan Pembangunan Kota yang Layak Anak
Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	77,8	78,78	80,02	Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Memadai	Meningkatkan Konektivitas Kawasan Perkotaan yang Terintegrasi
								Mengembangkan layanan air minum dan air limbah
								Meningkatkan infrastruktur pengendali banjir
			Persentase Permukiman Layak Huni	98,59%	99,32%	100%	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan perumahan	Meningkatkan penyediaan infrastruktur kawasan permukiman dan perumahan
Mewujudkan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan	*Livable City Index*	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,07	69,70	68,51	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup
								Mengoptimalkan Upaya Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
			Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	89%	89,4%	90%	Meningkatkan kualitas ruang kota	Mendorong pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukan
								Meningkatkan nilai estetika ruang kota
		Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	108	105	99	Menguatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanggulangan bencana
								Membangun sarana prasarana penanggulangan bencana yang berkualitas
								Menyusun dokumen perencanaan mitigasi dan penanggulangan bencana
			Indeks Ketentraman dan	0,5601	0,8267	0,8794	Optimalisasi koordinasi lintas sektor dalam menciptakan ketentraman dan	Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur penegak perda

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2020 (BASELINE)	TARGET TAHUN 2023	TARGET AHIR PERIODE RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Ketertiban				ketertiban	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kerukunan dan toleransi
								Penyelenggaraan penegakkan perda yang humanis
Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Gini	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah , Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan UMKM	3,09%	3,17%	3,45%	Meningkatkan Produk Unggulan Daerah	Mengembangkan Sentra-Sentra Industri/Produk Ekonomi Lokal
								Menguatkan dan Mengembangkan Koperasi & UMKM
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9	8,46	7,74	Memperluas Kesempatan Kerja	Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Angkatan Kerja
			Tingkat Kemiskinan	2,57	2,39	2,36	Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Memperluas Perlindungan dan Jaminan Sosial
								Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Melalui Peningkatan Keterampilan dan Perluasan Akses Modal
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	3,018	3,530	4,440	Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi	Menyediakan Regulasi dan Kebijakan yang Mempermudah Investasi
								Meningkatkan Perluasan Lapangan kerja
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	87	87	90	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatkan Ketersediaan dan Akses Pangan Berkelanjutan Bagi Masyarakat
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	1,08	1,50	3,40	Meningkatan pemasaran pariwisata	Peningkatan promosi dan event pariwisata
								Meningkatkan kualitas sarana prasarana pariwisata
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	N/A	2,42%	3,22%	Meningkatkan Pengelolaan Industri Kreatif	Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	-0,56%	3,97%	5,00%	Meningkatkan jaringan distribusi perdagangan sektor barang dan jasa	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif

Sumber : Bappedalitbang, diolah 2021

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Pembangunan Kota Balikpapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Balikpapan yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020–2024, dinamika pandemi COVID-19, dan isu strategis yang menjadi perhatian.

Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021. Capaian tersebut sangat fundamental dan signifikan setelah tahun sebelumnya berbagai indikator pembangunan mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19.

Tantangan besar masih akan dihadapi oleh perekonomian Indonesia, antara lain masih terdapatnya scars akibat krisis COVID-19, yaitu learning loss, belum kembalinya tingkat kemiskinan dan pengangguran ke level sebelum pandemi, belum pulihnya dunia usaha secara optimal, dan masih terbatasnya infrastruktur dasar. Untuk itu, transformasi ekonomi perlu dilakukan secara inklusif melalui tiga pilar yaitu (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Selain itu, pemerintah saat ini perlu meninggalkan legacy pembangunan sebagai landasan bagi pemerintahan berikutnya untuk lepas landas sehingga penciptaan lapangan kerja, penciptaan efek pengganda terhadap perekonomian dan peningkatan produktivitas perekonomian jangka menengah-panjang tetap berkelanjutan. Tanpa adanya intervensi kebijakan strategis, produktivitas dan daya saing Indonesia diperkirakan akan semakin menurun. Untuk mengejar gap pertumbuhan agar tetap sejalan dengan target keluar dari middle-income trap maka transformasi ekonomi yang didorong melalui peningkatan produktivitas menjadi semakin penting.

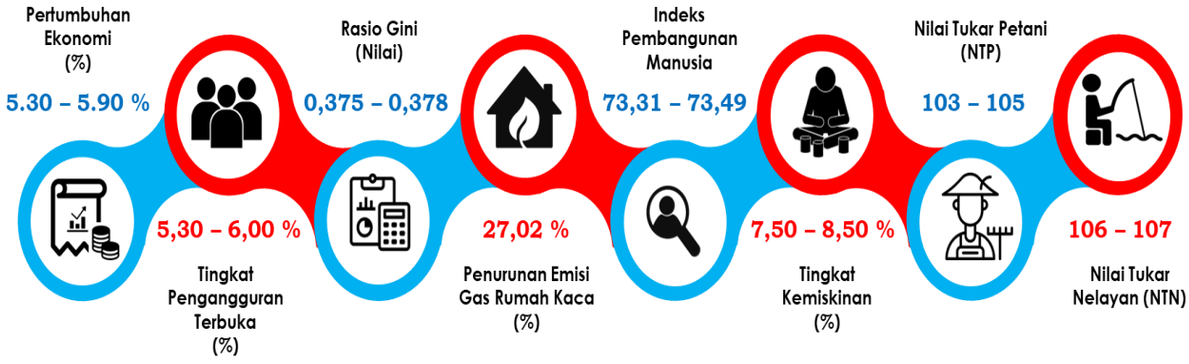
Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah

"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan

untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa. Adapun target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2023 ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut :

Gambar 4. 6. target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2023



Penyusunan RKP tahun 2023 dilakukan dengan Melanjutkan pembangunan 2022, Merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2020 – 2024 dan dilaksanakan melalui 7 (tujuh) prioritas nasional sebagai berikut :

Gambar 4. 7. 7 (Tujuh) Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2023



1. Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
   Kebijakan pembangunan pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian; industri pengolahan; pariwisata; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta didukung penguatan reformasi fiskal; penguatan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi; peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT); pemanfaatan digitalisasi; dan ekonomi hijau.

2. Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
   Pembangunan wilayah pada tahun 2023 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi

permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

3. Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
   Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing merupakan kunci peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2023 akan diarahkan pada keberlanjutan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, dan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

4. Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
   Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan memiliki kedudukan penting dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki peran sentral dalam memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, disiplin, etos kerja, jujur, tekun, gigih, dan tangguh sebagai faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi di segala bidang kehidupan.

5. Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
   Pembangunan infrastruktur tahun 2023 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

6. Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
   Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam RKP Tahun 2023 difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan; serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup; pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan; peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim; serta pembangunan rendah karbon.

Prioritas nasional tidak hanya berupa 7 Prioritas Nasional sebagaimana telah tercantum di dalam RPJMN 2020-2024 dan secara berkelanjutan dijalankan melalui RKP dan RKPD. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 juga memiliki arah kebijakan spesifik. Adapun Penjabaran arah kebijakan, capaian yang diharapkan, dan dukungan Major Project (MP) di dalam RKP 2023, dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Penjabaran Arah Kebijakan RKP 2023

Arah Kebijakan	Penjabaran	Capaian Diharapkan	Dukungan Major Project (MP)
Percepatan penghapusan kemiskinan	· Peningkatan sistem jaminan sosial · Modernisasi	· Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5%-2,0% · Proporsi penduduk yang	· MP reformasi sistem perlindungan sosial · MP food estate

Arah Kebijakan	Penjabaran	Capaian Diharapkan	Dukungan Major Project (MP)
ekstrem	pertanian	tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%	(kawasan sentra produksi pangan)
	· Pemerataan pembangunan	· Nilai Tukar Petani sebesar 103-105 · Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107	· MP wilayah adat Papua (La Pago dan Domberay)
Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan	Peningkatan sistem pendidikan dan kesehatan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter)	· Prevalensi stunting pada balita sebesar 17,5% · Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk · Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71% · Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43% · Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48% · Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun · Angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi (PT) sebesar 31,89%	· MP reformasi kesehatan nasional · MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0)
Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*	Penyediaan lapangan usaha	· Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43% · Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48% · Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang · Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%	
Mendorong pemulihan dunia usaha	Revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM	· Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50% · Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9- 4,2% · Nilai devisa pariwisata sebesar US$ 1,76-6,06 Miliar · Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3% · Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun	· MP destinasi pariwisata prioritas · MP pengelolaan terpadu UMKM
Revitalisasi industri dan riset terapan	Industrialisasi serta riset dan inovasi	· Pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,4-5,9% · Konstribusi PDB industri pengolahan 20,6% · Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan yang	· MP kawasan industri prioritas dan smelter

Arah Kebijakan	Penjabaran	Capaian Diharapkan	Dukungan Major Project (MP)
		dihasilkan sebesar 10 · Peringkat Global Innovation Index 75- 80 · Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55- 6,6,08% · Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,8%	
Pembangunan rendah karbon dan transisi energi	Ekonomi rendah karbon dan transisi energi	· Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02% · Kapasitas terpasang pembangkit EBT- kumulatif sebesar 1.778,2 GW · Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan · Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%	· MP pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 · MP akselerasi pengembangan enegri terbaharukan dan konservasi energi
Percepatan pembangunan infrastruktur dasar	· Penyediaan air bersih dan sanitasi · Infrastruktur digital · Infrastruktur konektivitas	· Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m3/detik; · Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman) · Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5% · Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7% · Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%	· MP reformasi sistem kesehatan nasional · MP transformasi digital · MP jaringan pelabuhan utama terpadu · MP percepatan penurunan kematian ibu dan sunting
Pembangunan IKN	Fasilitasi dasar IKN	· Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A · Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha	· MP pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

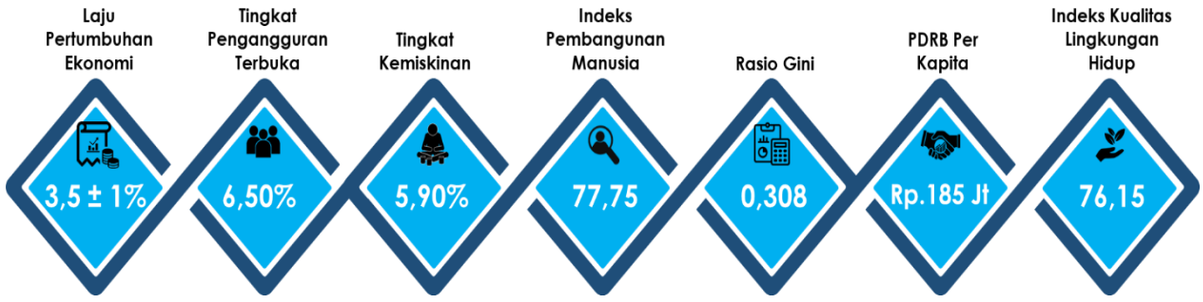
4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, berbagai permasalahan dan isu strategis serta kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, arah kebijakan RKP tahun 2023 serta permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan tahun 2023, maka Provinsi Kalimantan Timur pada RKPD Tahun 2023 mengusung tema pembangunan daerah :

"Peningkatan Produktivitas Guna Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat".

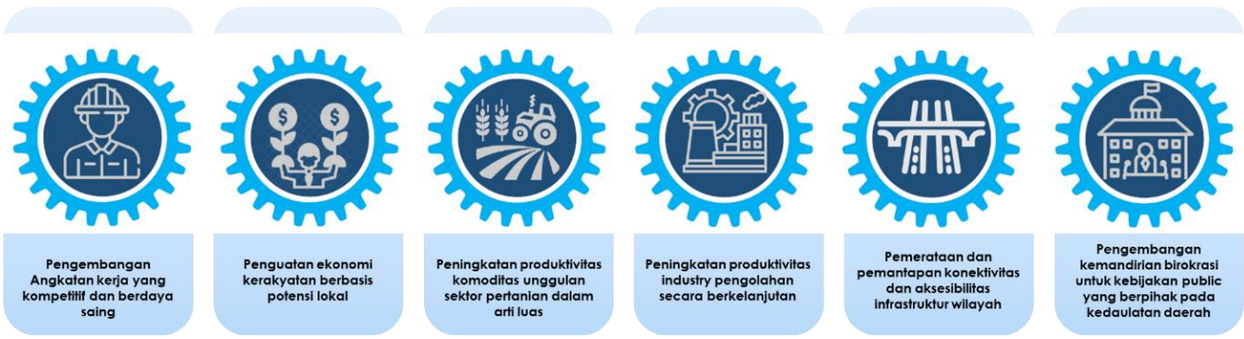
Adapun Target Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut :

Gambar 4. 8. Target Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023



Berdasarkan tema tersebut, Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 dilakukan dengan memperhatikan tindak lanjut dari tema tahun sebelumnya, dimana setelah pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dilakukan pasca puncak pandemi COVID-19, yang kemudian dilanjutkan dengan reformasi struktural dan penguatan daya saing daerah, maka fokus pembangunan selanjutnya adalah menjaga dan terus memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur yang dilaksanakan dengan 6 (enam) prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagai berikut :

Gambar 4. 9. 6 (enam) prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023



Adapun arah kebijakan pembangunan Kota balikpapan beserta lokasi khusus pelaksanaannya dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan, target sasaran pembangunan daerah, serta sektor potensial di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Arah Kebijakan dan Lokus Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2023

ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Kec. Balikpapan Timur, Kec. Balikpapan Utara, Kec. Balikpapan Selatan
Peningkatan pelayanan kesehatan dan akreditasi Puskesmas	Bpp Timur (3 Utama), Bpp Selatan (1 Paripurna), Bpp Kota (1 Utama), Bpp Tengah (2 Paripurna), Bpp Utara (1 Paripurna), Bpp Barat (2 Utama)
Penanganan prasarana jalan dan jembatan	• Rekontruksi Jalan: KM.5.5 BALIKPAPAN - KARIANGAU • Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan di Ruas JL. MULAWARMAN (BALIKPAPAN) • Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan di Ruas KM.5.5 BALIKPAPAN - KARIANGAU
Peningkatan prasarana pengendali banjir	Depsos Atas (Balikpapan)
Pemberian bantuan stimulan rumah layak huni bagi keluarga pra sejahtera	Kota Balikpapan
Sertifikasi pelaku usaha olahan hasil perikanan	Balikpapan Barat (Baru Tengah)

ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
	Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan dalam mendukung arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim salah satunya adalah melalui pengembangan Sentra Industri Kecil Teritip (SIKT) dalam rangka pembinaan Industri Kecil Menengah dengan produksi olahan hasil pertanian, perikanan, dan kelautan
Pengembangan kelompok perhutanan sosial	KPHL Balikpapan (Kelurahan Karang Joang, Kelurahan Lamaru, Kelurahan Manggar)
Pengembangan industri Kariangau	Kawasan Industri Kariangau

4.2.3. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan 2023

Berdasarkan telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantn Timut , maka prioritas pembangunan Kota Balikpapan tahun 2023 telah memiliki keterkaitan dengan prioritas nasional, arah kebijakan RKP 2023, dan prioritas Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun demikian, prioritas terkait pembangunan IKN sebagaimana telah tercantum di dalam arah kebijakan RKP dan prioritas provinsi, belum secara eksplisit terdapat di dalam prioritas Kota Balikpapan. Prioritas pembangunan Kota Balikpapan, terutama terkait pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan SDM perlu secara eksplisit diarahkan menopang tahap awal pembangunan KIPP-IKN. Hal ini sekaligus sebagai operasionalisasi dari posisi Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang IKN. Secara spesifik dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4. 4 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan 2023

Prioritas Nasional	Arah Kebijakan RKP 2023	Prioritas Provinsi Kalimantan Timur 2023	Prioritas Kota Balikpapan 2023
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Mendorong pemulihan dunia usaha	Penguatan ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan masyarakat	Penguatan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
	Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent* job	Pengembangan Angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing	
	Mendorong pemulihan dunia usaha	Peningkatan produktivitas kawasan industri pengolahan secara berkelanjutan	
	Revitalisasi industri dan riset terapan	Penguatan ekspor komoditi unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi	
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	Penguatan ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan masyarakat	Penguatan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan	Pengembangan Angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan			
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar	Pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur antar daerah dan kawasan pendukung IKN	Pembangunan infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan perkotaan
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Pembangunan rendah karbon dan transisi energi		Pembangunan infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan perkotaan
Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik		Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik
	Pembangunan IKN	Pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur antar daerah dan kawasan pendukung IKN	

4.2.4. Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2023

Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan pembangunan lima tahunan RPJMD Kota balikpapan tahun

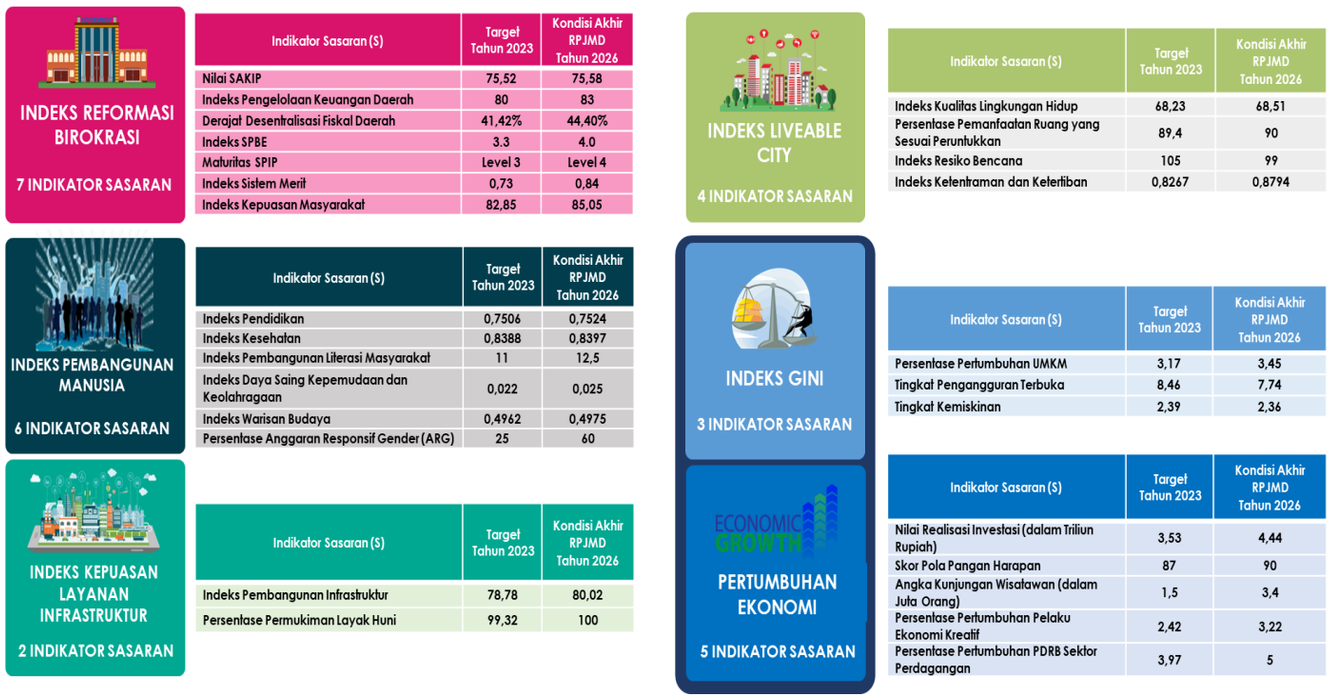
2021-2026. Adapun Tema dan prioritas pembangunan daerah Pelaksanaan Tahun 2023 untuk RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 4. 10. 6 (enam) prioritas Pembangunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026



Adapun Target Makro Pembangunan Kota Balikpapan tahun 2023 ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut:

Gambar 4. 11. Target Makro Pembangunan Kota Balikpapan tahun 2023



Indikator Sasaran (S)	Target Tahun 2023	Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2026
Nilai SAKIP	75,52	75,58
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80	83
Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	41,42%	44,40%
Indeks SPBE	3.3	4.0
Maturitas SPIP	Level 3	Level 4
Indeks Sistem Merit	0,73	0,84
Indeks Kepuasan Masyarakat	82,85	85,05

Indikator Sasaran (S)	Target Tahun 2023	Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2026
Indeks Pendidikan	0,7506	0,7524
Indeks Kesehatan	0,8388	0,8397
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11	12,5
Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0,022	0,025
Indeks Warisan Budaya	0,4962	0,4975
Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	25	60

Indikator Sasaran (S)	Target Tahun 2023	Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2026
Indeks Pembangunan Infrastruktur	78,78	80,02
Persentase Permukiman Layak Huni	99,32	100

Indikator Sasaran (S)	Target Tahun 2023	Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2026
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,23	68,51
Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Peruntukkan	89,4	90
Indeks Resiko Bencana	105	99
Indeks Ketentraman dan Ketertiban	0,8267	0,8794

Indikator Sasaran (S)	Target Tahun 2023	Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2026
Persentase Pertumbuhan UMKM	3,17	3,45
Tingkat Pengangguran Terbuka	8,46	7,74
Tingkat Kemiskinan	2,39	2,36

Indikator Sasaran (S)	Target Tahun 2023	Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2026
Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	3,53	4,44
Skor Pola Pangan Harapan	87	90
Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	1,5	3,4
Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	2,42	3,22
Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	3,97	5

Berdasarkan tema RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 dengan Prioritas pembangunan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 maka fokus pembangunan daerah untuk tahun 2023 merupakan Prioritas pembangunan Kota Balikpapan tahun 2023 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Balikpapan tahun 2023.

Gambar 4. 12. Fokus Pembangunan Kota Balikpapan tahun 2023



Penerapan konsep holistik-tematik, integratif dan spasial terhadap Fokus Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut :

a. Fokus Pembangunan Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik.

Pada fokus pembangunan ini dokumen strategis yang dihasilkan antara lain :

- Dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Gambar 4. 13. Fokus Pembangunan Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik



Terdapat 5 program prioritas pembangunan daerah pada fokus pembangunan ini antara lain:

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
   - Fokus pembangunan pada program ini adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Pemenuhan Kuantitas Aparatur Sipil Negara.
   - Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah BKPSM dan Bagian Organisasi Tata Laksana.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
   - Fokus pembangunan pada program ini adalah Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Pemenuhan Kuantitas Aparatur Sipil negara.
   - Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Badan kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bagian Organisasi Tata Laksana.

3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
   - Fokus pembangunan pada program ini adalah Peningkatan Layanan Kependudukan baik secara Online dan Offline, dan Kerjasama Pengiriman Dokumen kepada Masyarakat menggunakan Jasa Layanan Online
   - Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kecamatan dan Kelurahan.

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
   - Fokus pembangunan pada program ini adalah Pengendalian pelaporan penerimaan gratifikasi Pemantapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta Penguatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
   - Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Inspektorat dan Semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
   - Fokus pembangunan pada program ini adalah Peningkatan Layanan Administrasi serta Peningkatan Pelayanan Publik dan Tata Laksana.
   - Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

b. Fokus Pembangunan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Pada fokus pembangunan ini dokumen strategis yang dihasilkan antara lain :

- Dokumen Perencanaan SDK
- Dokumen Perencanaan Makro dan Mikro Ketenagakerjaan
- Dokumen Strategi Sanitasi Kota
- RAD Pangan dan Gizi
- Penyusunan RAPERDA Ketenagakerjaan

Gambar 4. 14. Fokus Pembangunan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing



Terdapat 8 program prioritas pembangunan daerah pada fokus pembangunan ini antara lain :

1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN dan PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
   - Fokus pembangunan pada program ini adalah Pemerataan Akses Layanan Pendidikan (Pembangunan unit sekolah baru, Penambahan ruang kelas baru, dan Sarana Utilitas Sekolah), Pemberian Subsidi SPP bagi siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pertama sederajat Swasta, Pemberian seragam sekolah bagi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pertama Negeri/swasta bagi kelas 1 dan 7, dan Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
   - Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Perumahan dan Permukiman, Bagian Organisasi Tata Laksana dan Pihak Swasta.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN, PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT dan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
   - Fokus pembangunan pada program ini adalah Pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Barat dan Rumah Sakit Balikpapan Timur, Peningkatan Frekuensi Diseminasi Program/Kegiatan Promotif dan Preventif Penyehatan Lingkungan (PHBS) kepada masyarakat, Bantuan Iuran BPJS (JKN) Kelas III bagi Masyarakat Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Masyarakat Tidak Mampu, Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan pada setiap layanan kesehatan (Dinkes, Rumah Sakit, dan PKM), dan Peningkatan dan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan.
   - Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Bagian Organisasi Tata Laksana, BPJS Kesehatan dan Masyarakat.

3. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

- Fokus pembangunan pada program ini adalah Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kelurahan dan Masyarakat.

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA dan PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
   - Fokus pembangunan pada program ini adalah Memperbanyak Koleksi Buku Bacaaan Baik yang Digital maupun Konvensional, dan Memperluas akses layanan perpustakaan di setiap kelurahan ataupun dengan layanan perpustakaan keliling.
   - Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kelurahan, Pihak Swasta dan Masyarakat.

c. Fokus Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Perkotaan.

Pada fokus pembangunan ini dokumen strategis yang dihasilkan antara lain :

- Masterplan Smart City & SPBE
- MoU Pengendalian Banjir
- RPIJM
- SSK
- Rencana Pengembangan Citra Kota

Gambar 4. 15. Fokus Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Perkotaan



Terdapat 5 program prioritas pembangunan daerah pada fokus pembangunan ini antara lain :

1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
   - Fokus pembangunan pada program ini adalah Lanjutan Penanganan Banjir DAS Ampal (MYC), Peningkatan Jembatan di alur Sungai Ampal, Pembebasan Lahan Bendali Hulu Sungai Ampal, Drainase Depsos Atas, Malioboro, Agung Tunggal, Beler, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
   - Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, dan Masyarakat.

2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
   - Fokus pembangunan pada program ini adalah Lanjutan Pembebasan Lahan dan Pembangunan Embung Aji Raden, Pembangunan IPA Teritip Tahap II, Pembangunan Jaringan Distribusi SPAM Teritip dan Penyiapan SPAM Regional Sepaku Semoi.

- Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Kementrian PUPR, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, dan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.

3. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
   - Fokus pembangunan pada program ini adalah Penataan Taman Kota, Penataan Pedestrian dan Trotoar (Jend. Sudirman, A Yani), Pembangunan Landmark Kota, dan Sarana dan Prasarana Jalan (Jalur sepeda, marka, PJU, dan papan nama jalan)
   - Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Pekerjaan umm, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup.

4. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
   - Fokus pembangunan pada program ini adalah Penanganan Sampah Pesisir, Penyiapan Pengembangan TPA Sampah Manggar, dan Peningkatan Manajemen Pengumpulan, Pengangkutan dan Pengelolaan Persampahan.
   - Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Pekerjaan umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, Kecamatan, kelurahan dan Masyarakat.

5. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
   - Fokus pembangunan pada program ini adalah Peningkatan dan pengembangan kompetensi BPBD, Pemenuhan Kuantitas SDM BPBD, serta Pemenuhan Sarana dan Prasana Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (baik terpusat pada kantor BPBD dan pada setiap UPTD di wilayah kecamatan).
   - Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan umum, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Sosial, Bagian Organisasi, Kecamatan, kelurahan dan Masyarakat.

d. Fokus Pembangunan Penguatan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Investasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
   Pada fokus pembangunan ini dokumen strategis yang dihasilkan antara lain :
   - Masterplan Smart City & SPBE
   - Peta Jalan Pengendaliain Inflasi
   - Masterplan Pengembangan Ekonomi Kreatif
   - Roadmap TP2DD

Gambar 4. 16. Fokus Pembangunan Penguatan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Investasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat



Terdapat 4 program prioritas pembangunan daerah pada fokus pembangunan ini antara lain :

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN & PENGEMBANGAN UMKM (UMKM TUMBUH)
   - Fokus pembangunan pada program ini adalah UMKM Digital Academy, *capacity building* UMKM, Publikasi dan *Branding* & Promosi Produk UMKM berbasis bahan loka.
   - Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, menengah dan Perindustrian, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perdagangan, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Perbankan, Dunia Usaha, Media, Dekranasda dan Forum EKRAF

2. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
   - Fokus pembangunan pada program ini adalah Kemitraan Tenaga Kerja dan Pasar Kerja, dan Kemitraan Tenaga Kerja dan UMKM.
   - Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, menengah dan Perindustrian.

3. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI & SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
   - Fokus pembangunan pada program ini adalah Pengembangan Sarpras Pantai Manggar, Pengembangan 3 Desa Wisata Baru dan 3 Desa Wisata Prioritas, dan Peningkatan Kapasitas Pelaku Pariwisata & Perhotelan
   - Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, menengah dan Perindustrian, Dunia Usaha, dan Forum EKRAF

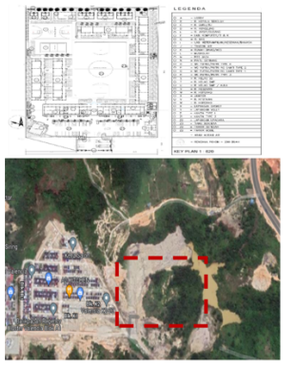
4. PROGRAM PROMOSI DAERAH
   - Fokus pembangunan pada program ini adalah Promosi Investasi : ALKI II EXPO, Promosi Pariwisata : Balikpapan Marathon (Scalling Up Balikpapan 10K), dan Promosi Produk Unggulan : Balikpapan Fest
   - Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, menengah dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal terpadu, Dinas Perdagangan, Perbankan, Dunia Usaha, dan Media.

Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi.

Adapun Program Prioritas Kota Balikpapan pada Tahun 2023 yang di usulkan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan timur adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan

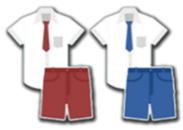
SITEPLAN RENCANA PEMBANGUNAN SD-SMP TERPADU BALIKPAPAN SELATAN



Cakupan layanan pendidikan di Kota Balikpapan secara umum masih tergolong rendah dan persebaran usia sekolah yang tinggi berada di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan. Kondisi tersebut menimbulkan polemik saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menerapkan sistem zonasi.

Pendanaan Tahun 2023
Rp. 28.000.000.000

Pengadaan Perlengkapan Siswa
Dengan melibatkan UMKM dalam penyediaan Batik Balikpapan



Kelas 1 SD Negeri dan Swasta
Kelas 7 SMP Negeri dan Swasta

SD Besaran Rp.300.000 per Stel
Jumlah Siswa : 12.558
SMP Besaran Rp.300.000 per Stel
Jumah Siswa : 11.294

Pendanaan Tahun 2023
Rp. 19.617.900.000

Subsidi Uang Sekolah (SPP) bagi siswa di sekolah swasta (SD & SMP)
Memberikan Subsidi Uang Sekolah bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta



SD besaran subsidi Rp.75.000/siswa/bulan
Jumlah siswa : 19.465 anak
SMP besaran subsidi Rp.110.000/siswa/bulan
Jumlah siswa : 13.153 anak

Pendanaan Tahun 2023
Rp. 32.691.360.000

2. Bidang Kesehatan

PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BALIKPAPAN BARAT

DESIGN RSUD BALIKPAPAN BARAT.
RENCANA GEDUNG 5 LANTAI + 1 BASEMENT

DESIGN JALUR SIRKULASI GEDUNG RSUD BALIKPAPAN BARAT



DESIGN PERENCANAAN GEDUNG RSUD BALIKPAPAN BARAT

Upaya pemenuhan cakupan layanan Kesehatan dalam pemenuhan akses layanan dasar untuk mendukung Kota Balikpapan sebagai beranda IKN Nusantara. Pembangunan RSUD Balikpapan Barat merupakan Pengembangan/peningkatan status dari Rumah Sakit Khusus Bersalin (RSKB) Sayang Ibu menjadi RSUD.

Pendanaan Tahun 2023
Rp. 25.000.000.000

PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT



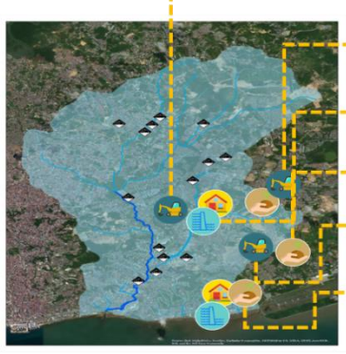
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Subsidi Iuran BPJS bagi Peserta Pekerja bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta bukan Pekerja sebanyak 190 ribu Jiwa

Pendanaan Tahun 2023
Rp. 88.457.050.000

3. Penanggulangan Banjir (Das Ampal)

Sebagai komitmen Pemerintah Kota untuk Pengendalian Banjir DAS Ampal dan didukung oleh DPRD Kota Balikpapan, maka sejak Perubahan APBD TA 2021 hingga Perubahan APBD TA 2023 telah disepakati pelaksanaan kegiatan tahun jamak (multiyears) pengendalian banjir DAS Ampal sebesar Rp.150 Miliar yang difokuskan pada saluran sekunder Balikpapan Baru dan saluran sekunder Inhutani.





Banjir Pasar Segar
- Peningkatan Badan Jalan Balikpapan Baru

Banjir Global Sport
- Pembangunan Gorong-Gorong
- Penertiban Pengupasan Lahan

Banjir Beller, Penggalang dan Mufakat
- Pembebasan Lahan Bendali Hulu Sungai Ampal
- Serah Terima Pengelolaan PSU

Banjir Beje – Beje (Asnawi Arbain)
- Penertiban Pengupasan Lahan

Banjir MT Haryono
- Peningkatan Sekunder Balikpapan Baru & Sekunder Inhutani

Banjir Posindo
- Pembebasan Lahan Bendali Posindo
- Pengawasan & Pengendalian Perizinan
- Serah Terima Pengelolaan PSU

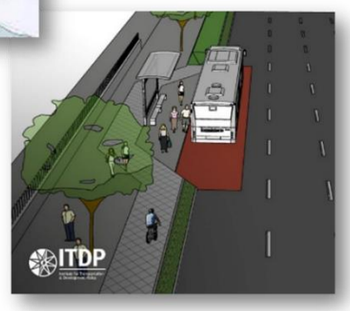
Pendanaan Tahun 2023
Rp. 85.000.000.000

4. Penataan Jalan Mt. Haryono

Dalam rangka penataan Jalan MT Haryono ini, Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2022 akan melaksanakan penyusunan RTBL DAS Ampal sebagai konsep integrasi antara upaya pengendalian banjir dan penataan kawasan DAS Ampal karena ruas jalan MT Haryono ini termasuk dalam DAS Ampal







Kebutuhan Pendanaan
Rp. 51.000.000.000

5. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Teritip





Kebutuhan Pendanaan
Rp. 405.000.000.000



Untuk memenuhi kebutuhan Kota Balikpapan hingga tahun 2024, penyediaan air minum direncanakan melalui pembangunan SPAM Teritip dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 400 liter/detik yang bersumber dari Waduk Teritip dengan kapasitas sebesar 250 liter/detik dan Embung Aji Raden sebesar 150 liter/detik

6. Pengembangan Pariwisata

Kota Balikpapan memiliki posisi strategis karena berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan memiliki sarana prasarana transportasi Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Pelabuhan Semayang, dan Pelabuhan Kariangau.

Kebutuhan Pendanaan
Rp. 101.000.000.000









Kota Balikpapan berkembang menjadi sebuah kota jasa sebagaimana visi jangka panjang Kota Balikpapan sebagai Kota 5 Dimensi (Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan, dan Kebudayaan) sebagai pintu gerbang menuju Ibu Kota Negara dan Provinsi Kalimantan Timur.

4.2.5. Telaah Dukungan program terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka sebaiknya ditampilkan persandingan antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Program RKPD Kota Balikpapan tahun 2023

Tabel 4.5. Dukungan Program Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Balikpapan

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	RKPD KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023		
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	DINAS SOSIAL
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
2	Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan Dan Nutrisi Serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan Daerah Rawan Pangan	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan Yang aman	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
4	Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Bagi Semua	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APS)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Semua Perempuan Dan Anak Perempuan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO per 100.000 Penduduk Perempuan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase penyelesaian penanganan Klien pada UPTD PPA (jumlah klien UPTD PPA yang sudah tuntas penanganan nya dibagi jumlah klien yang ditangani dikalikan 100)	
6	Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan sanitasi yang berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		DINAS PEKERJAAN UMUM
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modem Untuk semua	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
8	Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	DINAS KETENAGAKERJAAN
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan berkelanjutan serta mendorong investasi	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kesesuaian pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantab	DINAS PEKERJAAN UMUM
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
10	Mengurangi Kesenjangan di Dalam dan Antar Negara	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantab	DINAS PEKERJAAN UMUM
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraa n Penataan Ruang	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tangga di luar SK kumuh yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	RKPD KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023		
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
12	Menjamin Pola Produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
13	Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim Dan Dampaknya	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dilaksanakan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
15	Melindungi, Memulihkan dan Mendukung Penggunaan yang Berkelanjutan Terhadap Ekosistem Daratan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	DINAS PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalia Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Belum ada indikator di lampiran file PDF DLH	
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Kokoh	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	SETDA DAN SELURUH OPD
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	INSPEKTORAT
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Monitoring Potensi Konflik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di kecamatan yang optimal	KECAMATAN
17	Menguatkan Cara Pelaksanaan Dan Revitalisasi Kerjasama Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama	SEKRETARIAT DAERAH

4.3. Inovasi Daerah

Untuk mewujudkan Kota Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai madinatul iman tidak lepas dari dukungan seluruh masyarakat Kota Balikpapan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Kota Balikpapan wajib memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, sehingga menjadi kompetitif dan unggul sehingga pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dapat berjalan selaras dan seimbang. Pemerintah Kota Balikpapan senantiasa pengembangan inovasi pada setiap sektor pelayanan. Adapun beberapa inovasi Pemerintah Kota Balikpapan yang sedang berjalan dan akan dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. INOVASI PENINGKATAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN

A. PORTABEL (PORTAL BELAJAR ASN BALIKPAPAN)



PORTABEL ASN Kota Balikpapan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan platform digital terdiri atas media pembelajaran berbasis learning

management system (LMS), Direktori Inovasi dan kegiatan pembelajaran sharing knowlegde guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap ASN Kota Balikpapan, guna pemenuhan hak pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam 1 (satu) tahun melalui pendekatan pembelajaran terintegrasi.



Dalam pelaksanaan implementasi Jangka Pendek PORTAL BELAJAR ASN BALIKPAPAN, yang dilaksanakan selama 2 bulan atau 60 (enam puluh) hari terdapat kendala karena padatnya jadwal kegiatan diakhir tahun sehingga beberapa kegiatan harus direschedule ; Manfaat Aksi Perubahan PORTAL BELAJAR ASN BALIKPAPAN, berupa LMS diaplikasikan sebagai pengganti modul, pelaksaan pre tes dan post tes, sehingga efisien dalam sisi biaya pencetakan bahan ajar/ materi bagi peserta, dan mendukung less paper sehingga pembelajaran dengan metode e-learning dapat mengaplikasikan green officce ;

Manfaat Aksi Perubahan PORTAL BELAJAR ASN BALIKPAPAN, berupa LMS diaplikasikan sebagai pengganti modul, pelaksaan pre tes dan post tes, sehingga efisien dalam sisi biaya pencetakan bahan ajar/ materi bagi peserta, dan mendukung less paper sehingga pembelajaran dengan metode e-learning dapat mengaplikasikan green office ; Aksi Perubahan PORTAL BELAJAR ASN BALIKPAPAN akan tetap dilanjutkan eksekusinya di Jangka Menengah dan Jangka Panjang sebagai bagian dari rencana pengembangan ASN Kota Balikpapan dalam rangka peningkatan nilai indeks profesionalisme ASN, implementasi sistem merit, dan pemenuhan GAP Kompetensi, sebagaimana komitmen Rencana Pengembangan ASN yang telah dipaparkan Wali Kota Balikpapan pada Pelatihan Kepala Daerah dan akan dimonitoring oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

B. SOSIALISASI IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PNS



Setiap tahun terdapat Pelanggaran Disiplin PNS karena melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pada Tahun 2021 terdapat 2 kasus pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang melibatkan 3 (tiga) PNS kota Balikpapan. Pada awal Tahun 2022 terdapat 1 kasus melibatkan 1 orang PNS sehingga perlu dilakukan Sosialisasi tentang Izin Perkawinan dan Izin Perceraian.



Pada Tahun 2020 terdapat gugatan perceraian tahun 2020 sebanyak 18 orang dengan rincian penggugat P=13 L=5, dengan permasalahan karena ketidakcocokan sebanyak 11 orang, adanya wanita sebanyak 7 orang, pada tahun 2021 sebanyak 18 orang dengan rincian penggugat P=14 L=4, dengan

permasalahan karena ketidakcocokan rumah, petengkaran, tidak menafkahi lahir dan bathin, adanya wanita lain Dan lain lain.

untuk mengurangi tingkat perceraian PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan maka diadakan layanan konseling pernikahan oleh Psikolog mulai bulan maret setiap hari selasa jam 10 sampai dengan jam 12 bagi PNS dibuka layanan konseling pernikahan dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu.



2. PENTAS AKBAR

Inovasi ini dilakukan untuk mengembangkan Balikpapan sebagai kota sehat. Kota sehat adalah suatu kondisi suatu wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Pentas akbar merupakan inovasi agar program kegiatan dapat berjalan kembali dalam era adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan protocol Covid-19 di semua tatanan kota sehat. Adaptasi dilakukan dengan dengan:



Pertama Peraturan Walikota Balikpapan tentang Pengembangan Kota Sehat dalam Era Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Balikpapan (PENTAS AKBAR).

Kedua Surat Keputusan Wali Kota tentang Tim Forum Kota Sehat adaptasi kebiasaan baru

Ketiga sertifikasi pada lintas sektor kawasan kota sehat yang dapat mengimplementasikan protokol covid-19 dengan baik. Dan diharapkan dapat memberikan daya ungkit pemulihan ekonomi masyarakat

Keempat Aplikasi Pengembangan Kota Sehat Dalam Era Adaptasi Kebiasaan Baru (PENTAS AKBAR). Aplikasi ini berbasis android Aplikasi Pentas Akbar dapat diinstal melalui play store. Pentas Akbar berbasis android yang dapat menyajikan data informasi kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan kelompok mitra kerja tertentu dalam rangka tindak lanjut penanganan kasus kesehatan. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan solusi dalam keterbatasan melakukan kegiatan tatap muka pada masa pandemi covid-19.

Untuk mengukur kemajuan kegiatan pada setiap tatanan yang dipilih dibutuhkan indikator disetiap tatanan. Selain indikator kota sehat Kota Balikpapan juga memiliki indikator kinerja utama yang selaras dengan indikator kota sehat ini. Oleh karena itu jika indikator kinerja utama kota meningkat maka juga akan meningkatkan capaian indikator kota sehat. Adapun penilaian kota sehat

dilaksanakan setiap dua tahun oleh Pemerintah Pusat dan pada tahun 2019 Kota Balikpapan berhasil meraih kategori penghargaan kota sehat Swasti Saba Wistara.

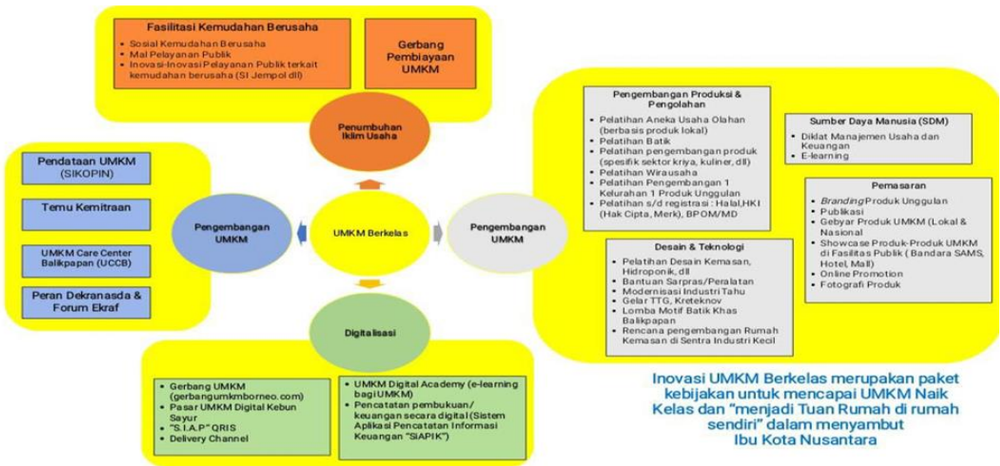
3. SNIPER

SNIPER adalah Aplikasi Strategi Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Terpadu Kota Balikpapan. SNIPER ini merupakan suatu upaya perkuatan pola pengawasan yang saat ini telah berjalan dimana belum sepenuhnya menjadi suatu informasi yang sistematis terintegrasi yang mampu memberikan kecepatan penyajian data secara terkini atas dinamika yang ada. SNIPER dapat diakses melalui *website* Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. SNIPER berfungsi *Pertama* memastikan kegiatan pembangunan Kota Balikpapan sudah sesuai spesifikasi yang sesuai peraturan yang berlaku. *Kedua* menyediakan informasi yang lebih luas mengenai infrastruktur kota.



4. UMKM BERKELAS

UMKM Berkelas merupakan suatu inovasi Pemerintah Kota Balikpapan yang bertujuan untuk menaikkan nilai UMKM menjadi tuan rumah di rumah sendiri dalam menyambut Ibu Kota Nusantara. UMKM Berkelas merupakan paket kebijakan lengkap sehingga memudahkan di dalam berusaha bagi masyarakat. Baik di dalam kemudahan pelayanan perizinan dan pengembangan UMKM.



5. Inovasi Penanganan Sampah

A. LACAKAJA

LACAKAJA merupakan perangkat *Global Potitioning System* (GPS) yang dipasang pada kendaraan operasional pengangkutan sampah yang berfungsi untuk mengukur efektifitas dan efisiensi operasional armada angkutan sampah. Aplikasi LACAKAJA dapat dipantau secara real-time sehingga memudahkan

pemantauan sistem kerja angkutan sampah dan efisiensi penggunaan bahan bakar dan biaya operasional sesuai dengan jarak tempuh rute per kendaraan.

B. Resirkulasi Air Lindi



Inovasi ini dilatarbelakangi oleh meningkatknya kualitas pengolahan air lindi di TPAS Manggar. Pelaksanaannya yaitu air lindi yang sudah dialirkan ke kolam disirkulasi ulang ke *landfill*, sirkulasi ulang ini menggunakan pemipaan dan menggunakan pompa. Manfaatnya antara lain adalah meningkatkan kualitas air lindi, membuat *landfill* selalu dalam keadaan lembab sehingga dapat menghindari terjadi kebakaran *landfill*, menambah kapasitas gas methan di l*andfill*.

C. Waste To Energy (WTE)

Inovasi Pemerintah Kota Balikpapan di dalam penanganan sampah diantaranya waste to energy, yaitu memanfaatkan gas methan dari sampah menjadi tenaga listrik. Kegiatan ini dilakukan pengelolaannya di Tempat Pengeolahan Sampah Akhir Manggar (TPAS Manggar) dengan menerapkan *Sanitary Landfill*. Gas methan yang ditangkap, dialirkan ke generator dengan menggunakan mobil bekas sebagai penggerak dan dikonfersikan ke energi listrik sebesar 15.000 Kwh



.



Saat ini kapasitas listrik yang dihasilkan bertambah menjadi 20.000 Kwh. Untuk pendistribusian gas ke warga dilakukan pemipaan yang saat ini tengah dilakukan peningkatan kualitasnya yang didukung dari CSR PT. Pertamina Hulu Mahakam dan ICLEI. Selain digunakan untuk kebutuhan warga dan



UMKM, sebagian dari gas methan tersebut dibakar melalui pembuatan Flare Gas Methan.

6. Inovasi Pengurangan Sampah

A. Produk Plastik Sekali Pakai

Kota Balikpapan telah memiliki Peraturan Daerah Balikpapan Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan produk/kemasan plastic sekali pakai. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 tahun 2019 dikeluarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai

B. Pengembangan Teknologi Pyrolysis di TPAS Manggar



Inovasi ini dilatarbelakangi oleh timbulan sampah plastik yang belum ada dilakukan pembatasan dengan kebijakan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, sedangkan yang sudah ada dimasyarakat, sebagian dikelola melalui Teknologi Pyrolisis. Bahan bakar hasil pyrolisis saat ini sedang dalam proses uji kualitas BBM bekerjasama dengan PT. Pertamina RU V. Manfaat dari inovasi ini diantaranya adalah engurangi timbulan sampah plastik, mengurangi sampah plastik di laut karena di kumpulkan oleh nelayan, dan nelayan dapat menukarkan sampah plastik dengan BBM hasil pyrolysis sampah plastik.

C. *Less Waste Briefing* (Panduan Pengurangan Sampah)

Banyak di berbagai acara masih banyak terdapat sampah organik dari kelebihan makanan. Informasi yang disampaikan memuat: informasi mengenai pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, penerapan konsep *eco office*, pemilahan sampah sesuai jenisnya dan imbauan bijak untuk berkonsumsi, dan tidak menyediakan kemasan sekali pakai namun menyediakan air isi ulang.

D. Pembayaran Premi BPJS dengan Sampah

Inovasi ini dilatarbelakangi karena masih terdapat masyarakat yang tidak mampu membayar premi BPJS dan Komitmen pemerintah Kota Balikpapan untuk mengurangi sampah ke TPA, serta mendiversifikasi fungsi bank sampah. Pemerintah Kota Balikpapan bekerjasama dengan BPJS diperbantukan untuk membayar iuran BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan kepada pengusaha untuk memberikan sampah anorganiknya ke Bank Sampah Unit terdekat. Bank Sampah menjual sampah anorganik tersebut ke pengepul. Sebagian perolehan penjualan tersebut diperbantukan untuk membayar iuran BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Usulan langsung Masyarakat

RKPD merupakan Dokumen Induk Tahunan yang memuat seluruh aspirasi masyarakat Kota Balikpapan, tidak terkecuali termasuk bagaimana upaya mewujudkan visi Kota Balikpapan dalam bentuk kebijakan dan program setiap tahunnya. Didalam Dokumen RKPD, Untuk mengakomodir usulan masyarakat yang berguna untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) atau masyarakat bisa menyampaikan usulan di daerahnya secara online melalui SIPD Kemendagri. Untuk tahun 2023, usulan masyarakat yang terinput didalam SIPD dan telah di teruskan ke Musrenbang Kota/Provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Usulan Langsung Masyarakat Tahun 2023 Kota Balikpapan

PROFIL	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KELURAHAN	SKPD TUJUAN AKHIR
Lurah Klandasan Ilir	Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	Trotoar jalan rusak berat	Jalan Mayjen Sutoyo (Sepanjang Nuansa Elektronik s/d Sekolah Pelita Hati) Kiri Kanan -1.2745102993481003, 116.8462085950682, Kota Balikpapan	Klandasan Ilir	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Klandasan Ilir	Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Dinding Parit rusak saat hujan besar sehingga menyebabkan banjir	Jl. Mayjen Sutoyo RT. 40 (-1.2693921295905914, 116.84758348685705), Kota Balikpapan	Klandasan Ilir	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Klandasan Ilir	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Dinding saluran drainase rusak parah, merupakan saluran drainase primer	Jl. Bukit Niaga RT. 11 (-1.2752599541194247, 116.83959984844282), Kota Balikpapan	Klandasan Ilir	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Telaga Sari	Pembangunan siring/turap pada jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	siring retak	RT.06 Kelurahan Telaga Sari -1.268133,116.832818, Kota Balikpapan	Telaga Sari	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Telaga Sari	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan rusak	RT. 41 Kelurahan Telaga Sari -1.268399, 116.831593, Kota Balikpapan	Telaga Sari	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Telaga Sari	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	drainase rusak	-RT.13 Kel. Telaga Sari 1.269219, 116.822546, Kota Balikpapan	Telaga Sari	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Gunungsari Ilir	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	PERBAIKAN DRAINASE DAN PENUTUPAN DRAINASE SEPANJANG JL. WONOSARI	-1.2683978177084028, 116.84097542507763, Kota Balikpapan	Gunungsari Ilir	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Gunungsari Ilir	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	PERBAIKAN DRAINASE DEPAN GAPURA RT.38	-1.273501349179535, 116.83937018089857, Kota Balikpapan	Gunungsari Ilir	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Gunungsari Ilir	Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	PERBAIKAN SIRING DRAINASE DAN PENAMBAHAN TINGGI DRAINASE	-1.2681344963011676, 116.83734902507763, Kota Balikpapan	Gunungsari Ilir	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Gunungsari Ilir	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	PERBAIKAN JALAN GANG TARUNA SARI RT.61 (GAPURA MERAH)	-1.2631429745132188, 116.83648574042084, Kota Balikpapan	Gunungsari Ilir	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Sepinggan	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan rusak parah, P = 150 M, L = 3 M, T = 10 Cm	Jl. Teratai Merah RT. 56, Kota Balikpapan	Sepinggan	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Sepinggan	Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Rusak, longsor tidak mampu menampung debit air, P = 25 M, L = 1 M, T = 1 M	Jl. Taman Sepinggan II RT. 30, Kota Balikpapan	Sepinggan	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Muararapak	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	(Prioritas 1) Perbaikan Jembatan Lampu Merah dari Gedung Ramayana ke Jl. Klamono RT. 44 , Lokasi: Lampu Merah Rapak Plaza Jl. Klamono RT. 44 Kelurahan Muara	Jl. Klamono RT. 44 (Lampu Merah Plaza Rapak) Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat : -1.2414558,116.83503680, Kota Balikpapan	Muararapak	DINAS PEKERJAAN UMUM

PROFIL	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KELURAHAN	SKPD TUJUAN AKHIR
		Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Tujuan: Penangulangan banjir Volume : Panjang 12 M Lebar 10 M Titik Koordinat : -1.2414558,116.8350368			
Lurah Manggar	Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter)	SERING BANJIR	RT 63, 62, 32 34 - 1.224853, 116.962993, Kota Balikpapan	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Manggar	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	BANJIR	RT 3 -1.246754, 116.933408, Kota Balikpapan	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Manggar	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	MACET	RT 21, 22, 18, 17, 16,15, 14,13, 11 (1°14''32.3"S 116°56''27.8"E), Kota Balikpapan	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Manggar	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	MACET	RT 98, 56, 44, 43, 42 - 1.221810, 116.966102, Kota Balikpapan	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Baru Tengah	Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	turap siring ulin rusak	jl. sultan hasanuddin Gang Aman RT.19, Kota Balikpapan	Baru Tengah	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Baru Tengah	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	penutup dan rainase rusak	Jl. 15 Oktober Gang Sepakat RT.15, Kota Balikpapan	Baru Tengah	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Baru Tengah	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	rusak berat	jl. Letjend Soeprapto RT.29, Kota Balikpapan	Baru Tengah	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Karang Jati	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Perbaikan Drainase dan Pengerukan Sedimentasi	Drainase sepanjang Jl Pasar Karang Jati, Kota Balikpapan	Karang Jati	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Karang Jati	Pengerukan sedimen pada sungai/drainase primer	Pengerukan Sedimentasi Parit Drainase Panjang: 800 M	Sepanjang Jalan Jend.A.Yani dari Gapura Karang ugis sampai Depan Masjid Al wustho, Kota Balikpapan	Karang Jati	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Karang Jati	Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Peningkatan dan Tutup Drainase Panjang: 70 M	RT 04 Gang Keramik, Kota Balikpapan	Karang Jati	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Damai Baru	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sering banjir sehingga perlu ditinggikan	Jl. Agung Tunggal Gg. Kalimaya RT. 17 Ukuran P = 110 m L = 5 m T = 25 cm, Kota Balikpapan	Damai Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Damai Baru	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Belum ada saluran drainase (dua sisi) dan sering terjadi genangan air	Jl. Mayor Pol. Zainal Arifin gg. Tower RT. 18 Ukuran P = 300 m, Kota Balikpapan	Damai Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Damai Baru	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan menuju rumah sakit BB sudah rusak cukup parah yaitu pecah, bergelombang sehingga jika hujan air akan banyak tergenang dijalan	Jl. Menuju rumah sakit BB RT. 19 Ukuran P = 155 m L = 3 m T = 15 cm, Kota Balikpapan	Damai Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Margo Mulyo	Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Rusak	RT. 41 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan	Margo Mulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Margo Mulyo	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	rusak	RT. 40 kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan	Margo Mulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Margo Mulyo	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Rusak	RT. 49 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan	Margo Mulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Manggar Baru	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jalan rusak berat dimana area sekitar jalan ada kantor kelurahan manggar baru, kantor UPT Pemadam Wilayah Timur, depan gedung serbaguna yang sering digunakan untuk acara/kegiatan masyarakat	Jalan Pesut RT 21 -1.222976, 116.969647, Kota Balikpapan	Manggar Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM

PROFIL	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KELURAHAN	SKPD TUJUAN AKHIR
Lurah Manggar Baru	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Belum terbangun drainase (drainase utama)	Jln. Persatuan RT 47 samping gg bunga -1.206275, 116.962984, Kota Balikpapan	Manggar Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Damai Bahagia	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Rusak	JL.Marsma R Iswahyudi RT.22 -1.273844, 116.864120, Kota Balikpapan	Damai Bahagia	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Damai Bahagia	Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	Jalan rusak	Jl. Pupuk Raya -1.265866, 116.864874, Kota Balikpapan	Damai Bahagia	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Damai	Pembangunan siring/turap pada jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	siring atau turap pada no rumah 100 sudah longsor dan siring pada sekitaran rumah no 47 sd 49 akan longsor jika siklus hujan semakin bertambah	jl. markoni dalam rt 8, Kota Balikpapan	Damai	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Damai	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	peningkatan jalan jembatan putus menuju jalan bukit cinta batas Rt.19 dan 37	Jl. Bukit Cinta Rt.37, Kota Balikpapan	Damai	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Karang Rejo	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Tidak adanya drainase /Gorong - gorong wilyayah RT.7	-1.248825778772601, 116.83971723962999, Kota Balikpapan	Karang Rejo	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Karang Rejo	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	lantai parit/ drainase amblas / jebol RT.78	-1.2464660416769522, 116.8450979230985, Kota Balikpapan	Karang Rejo	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Karang Rejo	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	parit dibawah jalan trotoar bocor, tebalnya sedimen dan tumpukan sampah wilayah RT.75	-1.24058194108339, 116.83874058077062, Kota Balikpapan	Karang Rejo	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Karang Rejo	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	kiri kanan bahu jalan yang sudh rusak dan berlubang wilayah RT.62, 63, 64, 65, 66	-1.2488444893451516, 116.84057302614615, Kota Balikpapan	Karang Rejo	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Karang Rejo	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	jalan aspal rusak dan berlubang RT.35, RT.36, RT.37 dan RT.38	-1.2449880837162217, 116.8382505549823, Kota Balikpapan	Karang Rejo	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Kariangau	Pelatihan Peningkatan Produk UMKM	belum optimal	Jalan Kartini RT 5 Kariangau, Kota Balikpapan	Kariangau	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Lurah Kariangau	Pelatihan Peningkatan Produk UMKM	Belum ada pelatihan kuliner bagi warga	Jalan Srikandi RT 1 Kariangau, Kota Balikpapan	Kariangau	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Lurah Kariangau	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jalan sudah rusak parah	Jalan Ruhuy Rahayu RT 6 Kariangau, Kota Balikpapan	Kariangau	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Kariangau	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Kesenian dan Kebudayaan/Adat Istiadat	perlu bantuan hibah kesenian kuda lumping	RT 7 Kariangau, Kota Balikpapan	Kariangau	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Lurah Kariangau	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Belum tersedia drainase	Jalan Karya Bakti RT 13 Kariangau, Kota Balikpapan	Kariangau	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Kariangau	Pelatihan Peningkatan Produk UMKM	belum ada pelatihan kuliner	RT 13 Kariangau, Kota Balikpapan	Kariangau	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

PROFIL	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KELURAHAN	SKPD TUJUAN AKHIR
Lurah Kariangau	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jalan rusak berat	Jl. Sultan Hasanuddin RT 14, mulai gerbang pelabuhan ferry ke kantor lurah kariangau, Kota Balikpapan	Kariangau	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Kariangau	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jalan masih pengerasan dan berbahaya bagi kendaraan bermotor	Jalan Selok Baru RT 8 Kariangau, Kota Balikpapan	Kariangau	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Marga Sari	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jalanan rusak 120 m (3x40)	Jl. Sepaku Laut RT. 10 -1.2355537,116.8193969, Kota Balikpapan	Marga Sari	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Marga Sari	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jalan rusak berlubang P = 800 M L = 5 M	Pemukiman Atas Air RT. 29 - 1.2374338,116.8178749, Kota Balikpapan	Marga Sari	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Marga Sari	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak berat / jalan pemukiman P = 80,00 M L = 3,00 M T = 10 CM	Jl. Semoi Perumahan Guru RT. 13 -1.2356777,116.8203594, Kota Balikpapan	Marga Sari	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Marga Sari	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak berlubang dan retak - retak P = ± 400 M L = 2 M	Jl. Pandan Sari RT. 29 - 1.237485,116.820013, Kota Balikpapan	Marga Sari	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Karang Joang	Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	KONDISI BADAN JALAN PATAH DAN JIKA DIBIARKAN AKAN MEMBAHAYAKAN PENGGUNA JALAN (PRIORITAS 3)	JL.SOEKARNO HATTA KM.20 RT.40 - 1°6'''''''35,63816"S 116°52'''''''36,8679"E, Kota Balikpapan	Karang Joang	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Karang Joang	Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	KONDISI SAAT INI BADAN JALAN SUDAH SEPARUH LONGSOR, DAN SUDAH BERAKIBAT PADA RUSAKNYA RUMAH PENDUDUK SEKITAR. APABILA DIBIARKAN AKAN SEMAKIN PARAH. JALAN MENUJU KEBUN RAYA BALIKPAPAN. TERDAPAT BANYAK PEMUKIMAN (PRIORITAS 1)	JL. SEI WAIN RT. 33 - 1°18''38,16532"S 116°52''3,88862"E, Kota Balikpapan	Karang Joang	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Karang Joang	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	BADAN JALAN RUSAK AKIBAT PROYEK TOL, BERLUBANG SEPANJANG JALAN SEHINGGA MEMBAHAYAKAN PENGGUNA JALAN. TERDAPAT BANYAK PEMUKIMAN DI JALAN INI (PRIORITAS 5)	JL. TEPO RT. 08, 09, 52, 07, 60, 06, 05 - 1°11''20,98853"S 116°54''46,49875"E, Kota Balikpapan	Karang Joang	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Karang Joang	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	KONDISI JALAN SAAT INI BERLUBANG SEHINGGA SERING TERJADI KECELAKAAN (PRIORITAS 6)	JL. KARYA BHAKTI KM.9,5 RT. 08 - 1°11''37,04132"S 116°53''20,80442"E, Kota Balikpapan	Karang Joang	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Karang Joang	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	BADAN JALAN LONGSOR, RUSAK DAN BERLUBANG SEHINGGA MEMBAHAYAKAN PENGGUNA JALAN. PERMUKIMAN DENGAN JUMLAH WARGA YANG BANYAK. SALAH SATU JALAN TEMBUSAN KE KELURAHAN GRAHA INDAH (PRIORITAS 8)	JL. BATU RATNA KM. 11 RT. 15, RT. 14, RT. 13, RT. 12, RT. 57, RT. 54, RT. 11 -1°''11,97898"S 116°51''59,44561"E, Kota Balikpapan	Karang Joang	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Batu Ampar	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah dan bebatuan dengan panjang 200m dan lebar 3m	Gg. Perjuangan 2 RT.64 - 1.226258, 116.854831, Kota Balikpapan	Batu Ampar	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Batu Ampar	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase	drainase masih berupa parit alam dengan panjang 200m dan	JL. Padat Karya Gg. Buntu RT.37 -1.227127, 116.847084, Kota	Batu Ampar	DINAS PEKERJAAN UMUM

PROFIL	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KELURAHAN	SKPD TUJUAN AKHIR
	< 1)	lebar 50cm	Balikpapan		
Lurah Batu Ampar	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah dan bebatu dengan panjang 200m dan lebar 3m	JL. Prokalamasi RT.26 -1.225966, 116.850786, Kota Balikpapan	Batu Ampar	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Baru Ulu	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalannya rusak perlu perbaikan P:122m L;2m	Jln.Letjen Suprapto RT.04 Kelurahan Baru Ulu -1.229796, 116.814637, Kota Balikpapan	Baru Ulu	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Baru Ulu	Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	Jalan Rusak Panjang 300 Meter Lebar 6 Meter Tebal 10 Cm	Jalan Wolter Monginsidi RT 18, 21, 22, 23, 26, 31, 47, dan RT 49 -1.222324, 116.813460, Kota Balikpapan	Baru Ulu	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Baru Ulu	Pembangunan siring/turap pada jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Rusak berat P = 10 M L = 7 M	Jl. Letjen Suprapto Jalan Gang RT. 6 -1.230037, 116.813859, Kota Balikpapan	Baru Ulu	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Baru Ulu	Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Siringnya Longsor	Jl. Wolter Monginsidi RT. 53 -1.222688, 116.817221, Kota Balikpapan	Baru Ulu	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Baru Ilir	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan lingkungan RT 03 Kel Baru Ilir banyak yang retak dan berlubang	Jl Sultan Hasanuddin RT 03 Kel Baru Ilir (-1.233814,116.818870), Kota Balikpapan	Baru Ilir	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Baru Ilir	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Drainase lingkungan RT 02 banyak yang rusak	Jl. Sultan Hasanuddin RT 02 Kel Baru Ilir (-1.233168,116.818807), Kota Balikpapan	Baru Ilir	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Baru Ilir	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan lingkungan RT 47 Kel Baru Ilir banyak yang rusak akibat musibah kebakaran	jl. gunung Polisi Rt 47 Kel Baru Ilir (-1.235696,116.829064), Kota Balikpapan	Baru Ilir	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Mekar Sari	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Saluran drainase tidak maksimal dengan baik dikarenakan badan jalan mengalami kerusakan di beberapa bagian dan berlumut	Jl. Sultan Alauddin RT. 37, Kota Balikpapan	Mekar Sari	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Mekar Sari	Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Badan parit tidak tertutup, dan terdapat keretakan sehingga berpotensi mengganggu saluran drainase serta kurang aman bagi warga sekitar pada saat turun hujan	Jl. Merdeka RT. 36, Kota Balikpapan	Mekar Sari	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Mekar Sari	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Badan parit mengalami kerusakan, sehingga berpotensi mengganggu saluran drainase	Jl. RE Martadinata RT. 29 (tembusan RT. 21 sampai ke RT. 34), Kota Balikpapan	Mekar Sari	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Mekar Sari	Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Badan parit retak dan berlumut, pada saat hujan air meluap dan berpotensi mengganggu saluran drainase	Jl. RE Martadinata RT. 26 (sepanjang jalan besar), Kota Balikpapan	Mekar Sari	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Mekar Sari	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Badan parit tidak dalam kondisi baik sehingga berpotensi mengganggu saluran drainase dan berpotensi banjir pada kondisi curah hujan tinggi	Jl. Mangga RT. 24 -1.257304, 116.838293, Kota Balikpapan	Mekar Sari	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Sumber Rejo	Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Siring Gang	RT. 17 Jl. P. Antasari no. 18 GG. Belibis (1.253131, 116. 840333), Kota Balikpapan	Sumber Rejo	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Sumber Rejo	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Pengaspalan dan pembuatan Trotoar Sumber Rejo I Volume= 500 m (Usulan Tahun 2022)	JL. Sumber Rejo I RT. 34, Kota Balikpapan	Sumber Rejo	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Gunungbahagia	Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	Titik rawan kemacetan	Jalan Ruhui Rahayu RT.54 Kelurahan Gunung Bahagia, Kota Balikpapan	Gunungbahagia	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Gunungbahagia	Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan	Drainase perlu peningkatan	Jalan Ruhui Rahayu RT. 22 dan RT. 20 Kelurahan Gunung Bahagia, Kota Balikpapan	Gunungbahagia	DINAS PEKERJAAN UMUM

PROFIL	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KELURAHAN	SKPD TUJUAN AKHIR
Lurah Gunungsari Ulu	Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	wilayah rawan longsor, siring kiri atas jalan perlu diperbaiki p : 70 m , t : 2 m	RT.25 -1.256101, 116.843386, Kota Balikpapan	Gunungsari Ulu	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Gunungsari Ulu	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan pecah-pecah dan berlubang sementara saluran air samping jalan juga rusak. volume jalan p : 300 m , l : 1.5 m , t : 0,10 m volume drainase p : 75 m , l : 0,30 m , t : 0,30 m	Gg.Anugerah RT.07 -1.261536, 116.842025, Kota Balikpapan	Gunungsari Ulu	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Prapatan	Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	DRAINASE DALAM KEADAAN BUNTU SEHINGGA AIR TIDAK DAPAT MENAGALIR	JL. YOS SUDARSO RT. 9, Kota Balikpapan	Prapatan	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Teritip	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	PRIORITAS 1 RAKORENBANG KEL. TERITIP (Jalan sempit, diusulkan pelebaran kiri-kanan masing-masing 1 meter)	Jl. Gunung Binaj RT.12 RT.13 RT.14 RT.15 RT. 16 -1.142025, 116.995065, Kota Balikpapan	Teritip	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Teritip	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	PRIORITAS 2 RAKORENBANG KEL. TERITIP (Jalan Akses hasil perikanan, P=1500 m x L=4 m)	Jl. Handil Sulawesi RT.45 -1.143397, 117.006934, Kota Balikpapan	Teritip	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Teritip	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	PRIORITAS 3 RAKORENBANG KEL. TERITIP (Akses/Jalan alternatif penghubung ke Kel. Lamaru dan Kel. Karang Joang P=5000 m x L=5 m)	Jl. Gunung Bahagia RT. 10 -1.159882, 116.970746, Kota Balikpapan	Teritip	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Teritip	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	PRIORITAS 4 RAKORENBANG KEL. TERITIP (Jalan menuju pantai masih berupa tanah, akses hasil perikanan dan perkebunan P=1000 x L=4m)	Jl. Handil Marga RT.24 dan RT.33 -1.137905, 117.011322, Kota Balikpapan	Teritip	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Teritip	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	PRIORITAS 5 RAKORENBANG KEL. TERITIP (Jalan masih berupa jalan tanah, akses menuju pertanian sawah padi) P=1500m x L=4m)	Jl. Usaha Tani ex Jl. Pipa RT.48 -1.131238, 116.993977, Kota Balikpapan	Teritip	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Sungainangka	Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter)	Drainase Sudah Rusak Rawan Terjadi Banjir	Poka RT. 15, Kota Balikpapan	Sungainangka	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Sepinggan Baru	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan rusak	Jl. Abdi Praja RT. 27 Kel.Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	Sepinggan Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Sepinggan Baru	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan masih tanah	Jl. swadaya I GG I Kel. Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	Sepinggan Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Graha Indah	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	kondisi jalan sudah banyak yang rusak	Jl. Taman Sari RT.22, Kota Balikpapan	Graha Indah	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Graha Indah	Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Belum adanya parit lingkungan RT.05	Graha Indah RT.05, Kota Balikpapan	Graha Indah	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Graha Indah	Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Dikarenakan ketika hujan deras air meluap dan menimbulakn banjir	Jl. Blambangan RT.62, Kota Balikpapan	Graha Indah	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Graha Indah	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan belum pernah di lakukan semenisasi	Jalan Karya Bhakti Km.9,5 RT.41, Kota Balikpapan	Graha Indah	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah	Peningkatan/Perkerasan/s	Dikarenakan kondisi	Jl. Utama Taman Sari	Graha Indah	DINAS

PROFIL	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KELURAHAN	SKPD TUJUAN AKHIR
Graha Indah	emenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	jalan yang sudah berlubang/rusak	RT.23, Kota Balikpapan		PEKERJAAN UMUM
Lurah Klandasan Ulu	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jembatan sudah tidak layak dan dapat membahayakan warga yang menggunakannya	-1.278488, 116.828690, Jl. Jend. Sudirman Gg.Slewangan RT.5, Kota Balikpapan	Klandasan Ulu	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Klandasan Ulu	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jembatan sudah tidak layak dan dapat membahayakan warga yang menggunakannya	-1.278311, 116.829181, Jl. Jend. Sudirman RT.4, Kota Balikpapan	Klandasan Ulu	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Gunungsamarinda Baru	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jalan mulai rusak dan berlubang	Jl. Diponegoro RT. 35 (1.2298556,116.8642574), Kota Balikpapan	Gunungsamarind	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Lamaru	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan berlumpur belum disemenisasi	Jln. Gn. Huffco Gg. Rindu Sekumpul 1°11''43.6"S 116°59''15.9"E -1.195447, 116.987750, Kota Balikpapan	Lamaru	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Lamaru	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan berlumpur belum disemenisasi 3 titik lokasi	Jln. Poros Traktor 6 RT.08 1°09''13.5"S 116°57''21.8"E -1.153749, 116.956058, Kota Balikpapan	Lamaru	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Lamaru	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perbaikan Jalan berlumpur belum disemenisasi	Jln. Salok Lai RT.09 1°08''18.2"S 116°56"41.8"E -1.138384, 116.944939, Kota Balikpapan	Lamaru	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Lamaru	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Drainase rusak	Jln Mulawarman Gg. Sumber Rezeki RT.15 - 1.206284696423148, 116.97888138289343, Kota Balikpapan	Lamaru	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Gunungsamarinda	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Gorong gorong di jembatan masih kurang besar dan ada gorong gorong yang tidak berfungsi	-1.236780, 116.855705 Jl. Indrakila Kampung Timur - Samping siregar, Kota Balikpapan	Gunungsamarinda	DINAS PEKERJAAN UMUM
Lurah Gunungsamarinda	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	memecah kemacetan disekitar SMP 6	-1.240025, 116.850280 RT 10 - RT 50 Kampung Timur, Kota Balikpapan	Gunungsamarinda	DINAS PEKERJAAN UMUM

5.2 Pokok Pikiran DPRD

Pada Pelaksanaan Musrenbang Kota Balikpapan Tahun 2022, DPRD secara langsung hadir dan menyampaikan point-point penting dalam pokok-pokok pikiran DPRD kota balikpapan secara umum memberikan masukan kepada pemerintah kota balikpapan antara lain sebagai berikut:

1. Pembenahan pada bidang pendidikan yakni untuk mengurai permasalahan peningkatan jumlah usia anak sekolah yang belum dapat ditampung dalam sekolah negeri, serta peningkatan fasilitas pendidikan;
2. Bidang pekerjaan umum dan perumahanan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan merata serta fokus pada program penanganan banjir, dan juga ketersediaan air bersih bagi seluruh masyarakat;
3. Fasilitas penerangan jalan umum diseluruh wilayah balikpapan;

Adapun secara garis besar, telaahan pokok-pokok pikiran utama DPRD kota balikpapan yang diwujudkan dalam bentuk berbagai program pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat balikpapan antara lain:

1. Pada bidang pendidikan diharapkan agar pemerintah kota tetap berkonsentrasi dalam pembangunan sekolah negeri baru, penambahan dan peningkatan tenaga pendidik, rehabilitasi gedung sekolah dan peningkatan fasilitas pendidikan, serta program pembinaan kepada anak-anak putus sekolah, dan juga penambahan kurikulum ekstrakulikuler pendidikan karakter anak berbasis pendekatan agama.

sesegera mungkin, pemerintah kota bersama DPRD kota balikpapan agar membentuk peraturan daerah yang mewajibkan bagi setiap sekolah negeri maupun swasta di kota balikpapan, termasuk pesantren, agar diwajibkan untuk membuka kelas khusus untuk pendidikan hafidz qur'an di segala tingkatan usia. begitu pula pendidikan agama non-muslim sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, dapat difasilitasi secara khusus, baik fasilitas fisik, maupun anggaran dalam rangka mendukung kegiatan agama secara khusus dimaksud;

2. Pada bidang pekerjaan umum dan perumahan, DPRD kota balikpapan berharap pemerintah kota tetap mepriortaskan program pembangunan dan peningkatan infrastruktur, serta perbaikannya baik jalan jembatan, drainase, siring. mengingatnya seringnya terjadi musibah banjir dalam beberapa tahun terakhir, maka DPRD kota balikpapan meminta agar pemerintah fokus terhadap program penanganan banjir, sebagaimana tercantum pula pada program prioritas dalam visi misi wali kota balikpapan;
3. Peningkatan program sambungan air bersih pdam yang signifikan dan merata diseluruh wilayah, dengan mereview kembali kebijakan persyaratan pemasangan sambungan air pdam;
4. Program perluasan penerangan jalan umum diseluruh wilayah, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasana lalu lintas.

Pokok–Pokok Pikiran DPRD juga di sampaikan melalui aplikasi SIPD yang mana setiap anggota DPRD diberikan Kewenangan untuk mengusulkan seluruh aspirasi masyarakat yang ada di Kota Balikpapan. Pada Tahun 2023 jumlah Pokok Pikiran yang di usulkan DPRD Kota Balikpapan sebanyak 851 Usulan sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Pokok Pikiran DPRD Tahun 2023 Kota Balikpapan

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
1	Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	kedalaman dan Lebar drainase Kurang, di perlukan penutup drainase	RT.39 Kelurahan Karang Rejo, Kota Balikpapan	80 M	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	sebagian jalan lingkungan masih berupa lapisan batu dan tanah	RT.62 KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR, Kota Balikpapan	80 M	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	perbaikan lantai drainase dan penutup drainase	RT.60 KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR, Kota Balikpapan	100 M	DINAS PEKERJAAN UMUM
4	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Lantai dan dinding Drainase perlu Pebaikan dan perluasan	RT. 62 KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR, Kota Balikpapan	130 M	DINAS PEKERJAAN UMUM
5	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan Lingkungan sering tergenang air jika Hujan	RT.65 KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR, Kota Balikpapan	70 M	DINAS PEKERJAAN UMUM
6	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	terdapat lantai parit rusak dan sebgaian dinding perlu perbaikan	RT. 51 KELURAHAN KARANG REJO, Kota Balikpapan	60 M	DINAS PEKERJAAN UMUM
7	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	TERDAPAT JALAN LINGKUNGANYANG RUSAK	RT. 13 KELURAHAN GUNUNG SARI ULU, Kota Balikpapan	90 M	DINAS PEKERJAAN UMUM
8	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	LANTAI DRAINASE SUDAH RUSAK	RT.69 KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR, Kota Balikpapan	70 M	DINAS PEKERJAAN UMUM
9	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	PERMUKAAN JALAN SUDAH RUSAK	RT.39 KELURAHAN KARANG REJO, Kota Balikpapan	80 M	DINAS PEKERJAAN UMUM
10	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan Lingkungan tidak baik, perlu perbaikan	RT. 38 KELURAHAN KARANG REJO, Kota Balikpapan	100 M	DINAS PEKERJAAN UMUM
11	Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	jalur air mengalir tidak lancar sehingga menggenangi jalan, dan kondisi darainase sangat kecil	RT.65 KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR, Kota Balikpapan	80 M	DINAS PEKERJAAN UMUM
12	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Bajar	RT.31, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
13	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan Panjang = 150 Meter Lebar = 4 Meter	RT.01, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
14	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.07, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	drainase < 1)	P= 150 Meter ; L= 100 cm ; T= 100 cm			
15	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir P= 100 Meter ; L= 40 cm	Gang Ulin 3 Perumnas RT.11, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
16	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan P= 100 Meter ; L= 4 Meter	RT.13, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
17	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.18, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
18	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.19, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
19	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.20, Kota Balikpapan	50 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
20	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jln. Komplek Ramayana RT.22, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
21	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.24, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
22	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.27, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
23	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	Jln. Telindung Baru RT.29, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
24	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.30, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
25	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	Jln. Wahab Syahrani RT.32, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
26	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jln. LKMD RT.33, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
27	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.36, Kota Balikpapan	125 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
28	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jln. Soekarno Hatta Gang Sutrisno RT.37, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
29	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Gang Rahayu 8 RT.39, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
30	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	Jln. Perintis Gang 5 RT.40, Kota Balikpapan	160 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
31	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.41, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
32	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.42, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
33	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	Gang Dahlia RT.43, Kota Balikpapan	175 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
34	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	Jln. Perintis II RT.44, Kota Balikpapan	50 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
35	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jln. A.W Syahrani Gang Bersinar 4 A RT.45, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
36	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Blok C6 dan Blok C7 RT.47, Kota Balikpapan	250 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
37	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.47, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
38	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	Jln. Pattimura Depan Telkom RT.48, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
39	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.49, Kota Balikpapan	250 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
40	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.50, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
41	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.53, Kota Balikpapan	800 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
42	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.54, Kota Balikpapan	300	DINAS PEKERJAAN UMUM
43	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.56, Kota Balikpapan	155 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
44	Peningkatan/Perkerasan/semeni	Akses Jalan Terbatas dan	Jln. AW Syahrani	100 Meter	DINAS PEKERJAAN

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Rawan Kecelakaan	RT.58, Kota Balikpapan		UMUM
45	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.59, Kota Balikpapan	250 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
46	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.60, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
47	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jln. Patimura Blok D7 RT.61, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
48	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.62, Kota Balikpapan	50 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
49	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.63, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
50	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	Jln. Perjuangan RT.64, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
51	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jln. Makmur 1 RT.65, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
52	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.68, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
53	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jln. Minangkabau RT.69, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
54	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	Jln. LKMD Blok K2 dan K3 RT.70, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
55	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.71, Kota Balikpapan	75 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
56	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	Jln. AW Syahrani RT.73, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
57	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jln. AW Syahrani Gang Podomoro 2 RT.75, Kota Balikpapan	110 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
58	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jln. Pattimura RT.76, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
59	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.77, Kota Balikpapan	60 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
60	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.46, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
61	Pembangunan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.02, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
62	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.01, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
63	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.03, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
64	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.10, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
65	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.14, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
66	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.19, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
67	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.20, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
68	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.22, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
69	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.23, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
70	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.30, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
71	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.33, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
72	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.34, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
73	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.39, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
74	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.44, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
75	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.50, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
76	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jln. Perjuanngan RT.52, Kota Balikpapan	175 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
77	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	Gang Otista RT.53, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
78	Peningkatan/Perkerasan/semeni	Akses Jalan Terbatas dan	RT.54, Kota	200 Meter	DINAS PEKERJAAN

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Rawan Kecelakaan	Balikpapan		UMUM
79	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.55, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
80	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.58, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
81	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.59, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
82	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.61, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
83	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.64, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
84	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.69, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
85	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.68, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
86	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.70, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
87	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.71, Kota Balikpapan	220 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
88	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.72, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
89	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Gang Pundi Jalan M.T. Haryono RT.74, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
90	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir (Panjang = 130 Meter ; Lebar = 80 cm)	Gang Swadaya RT.48, Kota Balikpapan	130 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
91	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang = 500 Meter ; Lebar = 3 Meter)	Jalur III B RT.01, Kota Balikpapan	500 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
92	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang = 150 Meter ; Lebar = 4 Meter)	Jln. Mulawarman II B RT.02, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
93	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang = 300 Meter ; Lebar = 4 Meter)	Jln. Mulawarman Transad I A RT.04, Kota Balikpapan	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
94	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang = 250 Meter ; Lebar = 3 Meter)	RT.07, Kota Balikpapan	250 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
95	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jln. Tepo Gang Mentari KM.10 RT.09, Kota Balikpapan	5 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
96	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang = 100 Meter ; Lebar = 4 Meter)	Gang Puncak RT.13, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
97	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir (Panjang = 200 Meter ; Lebar = 60 cm)	Gang Sehati RT.13, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
98	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir (Panjang = 6 Meter ; Lebar = 3 Meter)	Gang Muslim RT.13, Kota Balikpapan	6 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
99	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang = 200 Meter ; Lebar = 4 Meter)	Gang Ayem Tentrem RT.14, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
100	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	Jln. Batu Ratna RT.14, Kota Balikpapan	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
101	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang = 150 Meter ; Lebar = 3 Meter)	Gang Seno RT.17, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
102	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang = 150 Meter ; Lebar = 3 Meter)	Jln. Kampung Cirebon II RT.19, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
103	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang = 286 Meter ; Lebar = 3 Meter)	Gang Cempaka 2 RT.20, Kota Balikpapan	286 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
104	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang = 200 Meter ; Lebar = 1.5 Meter)	Jln. Giri Mulyo RT.22, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
105	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir (Panjang = 200 Meter ; Lebar = 70 cm)	Jln. Giri Mulyo RT.22, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
106	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang = 200 Meter ; Lebar = 3 Meter)	Gang Damai RT.23, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
107	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang = 120 Meter ; Lebar = 2 Meter)	Gang Belimbing RT.27, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
108	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang = 250 Meter ; Lebar = 4 Meter)	Jln. Giri Rejo II RT.32, Kota Balikpapan	250 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
109	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang = 80 Meter ; Lebar = 3 Meter)	Gang Asri 2 RT.33, Kota Balikpapan	80 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
110	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang = 200 Meter ; Lebar = 3 Meter)	RT.41, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
111	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.51, Kota Balikpapan	94 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
112	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Gang Sepakat RT.51, Kota Balikpapan	45 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
113	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang = 150 Meter ; Lebar = 3 Meter)	Ganga Amanah RT.54, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
114	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir (Panjang = 230 Meter ; Lebar = 60 cm)	RT.54, Kota Balikpapan	230 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
115	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang = 105 Meter ; Lebar = 3.5 Meter)	Gang AMD 2 RT.55, Kota Balikpapan	105 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
116	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	Gang AMD 2 RT.55, Kota Balikpapan	105 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
117	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jln. Transmigrasi RT.57, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
118	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jln. Bidara RT.59, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
119	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Perum. Griya Asri 2 RT.62, Kota Balikpapan	400 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
120	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.63, Kota Balikpapan	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
121	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.63, Kota Balikpapan	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
122	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Gang Wonotirto RT.43, Kota Balikpapan	250 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
123	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Argo Lestari RT.42, Kota Balikpapan	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
124	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Kurangnya Penerangan dan Rawan dengan tindak kejahatan	RT.03, Kota Balikpapan	6 unit	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
125	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Blok M RT.04, Kota Balikpapan	96 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
126	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	Blok M RT.04, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
127	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Blok Q2 dan Q3 RT.05, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
128	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.08, Kota Balikpapan	60 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
129	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.11, Kota Balikpapan	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
130	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.12, Kota Balikpapan	250 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
131	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.16, Kota Balikpapan	90 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
132	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Blok D RT.17, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
133	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.24, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
134	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.26, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
135	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.27, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
136	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.28, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	< 4 meter)				
137	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.35, Kota Balikpapan	70 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
138	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.36, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
139	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.45, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
140	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.46, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
141	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Intan II RT.48, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
142	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.62, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
143	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.63, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
144	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.65, Kota Balikpapan	220 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
145	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Blok T-U RT.25, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
146	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.01, Kota Balikpapan	160 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
147	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.13, Kota Balikpapan	160 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
148	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.14, Kota Balikpapan	170 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
149	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jln. Anggrek RT.15, Kota Balikpapan	210 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
150	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.16, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
151	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	penutupan paret karena Rawan Kecelakaan	RT.17, Kota Balikpapan	180 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
152	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur	agar warga antusias untuk datang menimbang, memeriksa balita dan terjaganya komunikasi dengan dokter demi perbaikan kesehatan di lingkungan sekitar	RT.22, Kota Balikpapan	7 Meter	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
153	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.23, Kota Balikpapan	160 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
154	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.24, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
155	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.26, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
156	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.35, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
157	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.37, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
158	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.38, Kota Balikpapan	160 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
159	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.42, Kota Balikpapan	160 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
160	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.78, Kota Balikpapan	375 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
161	Pengadaan PJU pada jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	kurangnya penerangan sehingga rawan akan tindak kejahatan	RT.78, Kota Balikpapan	20 unit	DINAS PERHUBUNGAN
162	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur	Saat ini posyandu tidak layak untuk warga	RT.78, Kota Balikpapan	1 Meter	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
163	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.81, Kota Balikpapan	600 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
164	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.84, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
165	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.98, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
166	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.99, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
167	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.50, Kota Balikpapan	160 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
168	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.51, Kota Balikpapan	125 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
169	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.52, Kota Balikpapan	160 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
170	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.54, Kota Balikpapan	160 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
171	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.59, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
172	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Dana Luas = 167 Meter Persegi	Jln. 17 Agustus Bangun Reksa KM.6 RT.32, Kota Balikpapan	167 meter persegi	SEKRETARIAT DAERAH
173	Pelatihan Peningkatan Produk UMKM	Pemanfaatan Lahan Taman untuk Pusat Wisata Kuliner	Depan Terminal Batu Ampar, Kota Balikpapan	2 Paket	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
174	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang= 200 Meter ; Lebar= 4 Meter)	RT.60, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
175	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang= 120 Meter ; Lebar= 4 Meter)	RT.61, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
176	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang= 120 Meter ; Lebar= 4 Meter)	RT.63, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
177	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang= 120 Meter ; Lebar= 4 Meter)	RT.64, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
178	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang= 150 Meter ; Lebar= 4 Meter)	RT.68, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
179	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang= 180 Meter ; Lebar= 3 Meter)	RT.70, Kota Balikpapan	180 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
180	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang= 160 Meter ; Lebar= 3 Meter)	RT.71, Kota Balikpapan	160 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
181	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang= 120 Meter ; Lebar= 4 Meter)	RT.72, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
182	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang= 160 Meter ; Lebar= 3 Meter)	RT.73, Kota Balikpapan	160 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
183	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang= 275 Meter ; Lebar= 4 Meter)	RT.83, Kota Balikpapan	275 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
184	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang= 160 Meter ; Lebar= 3 Meter)	RT.91, Kota Balikpapan	160 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
185	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang= 120 Meter ; Lebar= 4 Meter)	RT.95, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
186	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan (Panjang= 160 Meter ; Lebar= 4 Meter)	RT.100, Kota Balikpapan	160 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
187	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan yang sudah retak, semen yang mengelupas, dan jalan yang berlubang dapat membahayakan pengguna jalan dan rawan kecelakaan	RT 14, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
188	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Kayu dari Kaki/tiang jembatan yang sudah terlihat rapuh dan perlu adanya penggantian untuk menghindari jembatan roboh	RT 09, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
189	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan yang sudah retak, semen yang mengelupas, dan jalan yang berlubang dapat membahayakan pengguna jalan dan rawan kecelakaan	RT 49, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
190	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Dimensi Drainase yang sempit, terjadi penumpukan tanah/lumpur/pasir yang menyebabkan air meluap dan rawan banjir.	RT 02, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
191	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan yang sudah retak, semen yang mengelupas, Jalan yang berlubang serta	RT 04, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
		sudah amblas yang dapat membahayakan pengguna jalan dan rawan kecelakaan			
192	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Penutup beton Drainase yang sudah bolong dapat mengakibatkan air meluap keluar dan membayakan pengguna jalan	RT 04, Kota Balikpapan	122 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
193	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan yang sudah retak, semen yang mengelupas, dan jalan yang berlubang dapat membahayakan pengguna jalan dan rawan kecelakaan	RT 06, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
194	Pembangunan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Papan dari (Badan jembatan) jembatan yang sudah tidak rata, berlobang dan tidak layak pakai karena membahayakan pengguna Jalan	RT 07, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
195	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Dimensi Drainase yang sempit, terjadi penumpukan tanah/lumpur/pasir yang menyebabkan air meluap dan rawan banjir.	RT 08, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
196	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan yang setengah semen dan setengah papan dapat menganggu pengguna jalan karena kondisi papan jalan yang berjarak	RT 09, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
197	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Keadaan semen Jalan sudah retak dan tidak rata dapat membahayaklan pengguna jalan	RT 10, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
198	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Papan penutup Drainase yang sudah terbuka dan tampak sudah lapuk dan tidak layak pakai	RT 10, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
199	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan yang sudah retak, semen yang mengelupas, dan jalan yang berlubang dapat membahayakan pengguna jalan dan rawan kecelakaan	Jalan Letjen Suprapto RT 11, Kota Balikpapan	70 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
200	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Kayu dari Kaki/tiang jembatan yang sudah terlihat rapuh dan perlu adanya penggantian untuk menghindari jembatan roboh	Jalan Letjend Suprapto RT 12, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
201	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan yang sudah tidak rata, semen yang mengelupas, dan jalan yang berlubang dapat membahayakan pengguna jalan dan rawan kecelakaan	Jalan Letjend Suprapto No 10 RT 12, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
202	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Keadaan semen Jalan Jembatan yang sudah retak dan tidak rata dapat membahayaklan pengguna jalan	Jalan Letjend Suprapto RT 15, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
203	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Penguatan papan pada Jembatan	RT 16, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
204	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan yang sudah tidak rata, retak, semen yang mengelupas, dan jalan yang berlubang dapat membahayakan pengguna jalan dan rawan kecelakaan	RT 17, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
205	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Dimensi Drainase yang sempit, terjadi penumpukan tanah/lumpur/pasir yang menyebabkan air meluap dan rawan banjir.	RT 20, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
206	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan bertanah yang dapat menyebabkan jalan licin dan berlumpur pada saat hujan serta rawan kecelakaan	Jalan Wolter Monginsidi RT 22, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
207	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Kondisi Badan Jalan yang rendah mengakibatkan tergenangnya Air pada saat Hujan	RT 23, Kota Balikpapan	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
208	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Dimensi Drainase yang sempit dan kondisi tembok/dinding drainase yang rendah yang dapat menyebabkan air meluap	RT 23, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
209	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan yang sudah retak-retak dan semen mengelupas yang dapat menganggu pengguna jalan	RT 25, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
210	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan	Kondisi jalan yang sudah retak-retak, semen	RT 26, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	< 4 meter)	mengelupas dan berlubang yang dapat membahayakan pengguna jalan			
211	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan yang tidak rata/berkrikil yang dapat membahayakan pengguna jalan	RT 28, Kota Balikpapan	75 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
212	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan yang sudah tidak rata, semen mengelupas, berlubang dan berkrikil yang dapat membahayakan pengguna jalan dan rawan kecelakaan	RT 29, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
213	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan jembatan yang semennya sudah tidak rata, retak dan mengelupas yang dapat membahayakan pengguna jalan	RT 30, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
214	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan jembatan yang sudah retak dan tidak rata dapat membahayakan pengguna jalan	RT 31, Kota Balikpapan	185 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
215	Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Kondisi Dinding/penyanggah Drainase yang miring	RT 32, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
216	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan yang sudah tidak rata dan berkrikil dapat membahayakan pengguna jalan	RT 33, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
217	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan yang sudah tidak rata dan semen mengelupas yang dapat membahayakan pengguna jalan dan rawan kecelakaan	RT 34, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
218	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan yang sudah retak, tidak rata, dan berlubang yang dapat membahayakan pengguna jalan dan rawan kecelakaan	RT 39, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
219	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Dimensi drainase yang sempiti, dnding beton drainase yang sudah retak, terjadi pengendapan tanah/lumpur pada dasar drainase yang menyebabkan tersumbatnya air, tumbuhnya rerumputan/ilalang yang menutupi badan drainase	RT 40, Kota Balikpapan	400 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
220	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan retak, tidak rata dan berlubang yang dapat membahayakan pengguna jalan dan rawan kecelakaan	RT 42, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
221	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan yang masih retak dan tidak rata dapat membahayakan pengguna jalan	RT 46, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
222	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Tidak adanya pagar/pembatas pada jembatan	RT 48, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
223	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Dimensi drainase yang sempit dan kondisi Drainase yang dipenuhi sampah mengakibatkan tergenangnya air dan tersumbatnya air	RT 51, Kota Balikpapan	50 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
224	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Kondisi Drainanse yang dipenuhi tanah dan sampah mengakibatkan tersumbatnya air dan tergenangnya air	RT 53, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
225	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan yang tidak rata dan berlubang dapat membahayakan pengguna jalan	RT 51, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
226	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan yang tidak rata, retak dan berlubang yang dapat membahayakan pengguna jalan	RT 01, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
227	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan yang masih bertanah, dapat menyebabkan jalan licin dan berlumpur pada saat hujan yang bisa membahayakan pengguna jalan	RT 03, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
228	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih bertanah yang dapat menyebabkan jalan licin dan berlumpur pada saat hujan yang dapat membahayakan pengguna jalan dan rawan kecelakaan	RT 04, Kota Balikpapan	170 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
229	Peningkatan/Perkerasan/semeni	Jalan Retak dan	RT 05, Kota	200 Meter	DINAS PEKERJAAN

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Berpasir/Berkrikil dapat membahayakan pengguna jalan dan rawan kecelakaan	Balikpapan		UMUM
230	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan yang tidak rata, retak-retak dan berpasir/berkrikil yang dapat membahayakan pengguna jalan	RT 06, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
231	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan masih bertanah yang dapat menyebabkan jalan licin dan berlumpur pada saat hujan yang membahayakan pengguna jalan	RT 07, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
232	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan bertanah, berbatu-batu/krikil yang dapat menyebabkan jalan licin dan berlumpur pada saat hujan serta membahayakan pengguna jalan	RT 12, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
233	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan yang tidak rata, retak dan berpasir/berkrikil yang dapat membahayakan pengguna jalan	RT 14, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
234	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan yang bertanah, berbatu-batu/berkrikil serta tidak rata yang menyebabkan jalan licin dan berlumpur pada saat hujan serta dapat membahayakan pengguna jalan	RT 16, Kota Balikpapan	170 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
235	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan yang tidak rata dan mengalami retak-retak yang dapat membahayakan pengguna jalan	RT 02, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
236	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi polisi tidur pada jalan sudah mulai retak-retak dan sedikit hancur	RT 10, Kota Balikpapan	250 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
237	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Koindisi jalan yang tidak rata, berpasir/berkrekil/berbatu-batu, dan berlubang yang dapat membahayakan pengguna jalan	RT 16, Kota Balikpapan	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
238	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi semen jalan yang sudah tidak rata, mengalami retak-retak dan berlubang yang dapat membahayakan pengguna jalan	RT 22, Kota Balikpapan	250 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
239	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi semen jalan tidak rata , retak dan perlu perataan karena dapat membahayakan pengguna jalan	RT 47, Kota Balikpapan	250 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
240	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan yang tidak rata, retak-retak dan sedikit berlubang yang dapat membahayakan pengguna jalan	RT 06, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
241	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan yang tidak rata, retak-retak dan sedikit berlubang yang dapat membahayakan pengguna jalan	RT 50, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
242	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan yang sudah retak-retak dan berlubang yang dapat membahayakan pengguna jalan	RT 01, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
243	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan yang sudah retak-retak dan berlubang yang dapat membahayakan pengguna jalan	RT 02, Kota Balikpapan	170 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
244	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi kayu jalan yang tidak rata dan berjarak dapat membayahakan pengguna jalan	RT 04, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
245	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan yang tidak rata dan berlubang yang dapat membahayakan pengguna jalan	RT 05, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
246	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan yang tidak rata, retak-retak dan berlubang yang dapat membahayakan pengguna jalan	RT 51, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
247	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan yang retak-retak dan semen yang mengelupas	RT 53, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
248	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan yang tidak rata, retak-retak dan berlubang yang bisa membahayakan	RT 36, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
		pengguna jalan			
249	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jembatan yang ada sudah rusak dan hancur, seta pelu penguatan dgn ukuran P = 200 M, L = 2,5 m	RT.07, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
250	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan yang sudah hancur dan terkelupas, dgn ukuran P = 200 M, L = 2,5 M	RT.07, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
251	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan yang ada sudah rusak, hancur dan retak, dgn ukuran P = 200 M, L = 2 M	RT.17, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
252	Pemeliharaan Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Perbaikan lapangan SDN 003 RT 49 GSI , P = 30 M, L = 20 M,	SDN 003 Jl. Jend.A.Yani RT.49 Kel.GSI Kec.Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	600 m2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
253	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan gang Al-Fadillah RT 24	Gang Al-Fadillah Lingkungan RT 24, Kota Balikpapan	351 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
254	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan Parit Gang Bukit Merah I Rt 47 Kel Sumber Rejo (P =250m, L= 50 cm, T= 60 cm)	Drainase Gang Bukit Merah I RT 47 Sumber Rejo, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	125 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
255	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan rusak perlu diperbaiki jalan lingkungan RT.51 tembus ke jalan Prevab,P=150 m, L= 3.5 m	Lingkungan Jalan RT.51 Tembus Jalan Prevab, Kota Balikpapan	525 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
256	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	perbaikan Drainase/parit P =200 m, L= 0,6 m	Di lingkungan RT.37, Kota Balikpapan	120 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
257	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi jalan Lingkungan RT,16-17 GSI, A. P=68m x L= 3 m = 204 m2 B. P= 45 mx L=2 m = 90m2, C.P= 33m x L=2 m = 66m2 D.P=27m xL=2,5m = 67,5m2 E.P=30m x L=2,5m = 72m2 F. P= 30m x L= 4m = 120m2 jalan menuju Puskesmas	Jalan RT.16-17, Kota Balikpapan	622.5 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
258	Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan Drainase RT 01 P=24m, L= 50cm, (12m2) ==== RT 02, 03 P=51m L=60 cm (30,6 m2)	Jl. Lingkungan RT 01,02, 03, Kota Balikpapan	42.6 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
259	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi jalan, P=100 m, L= 1,5 m	Gang Pisang Jl. Lingkungan RT 40, Kota Balikpapan	150 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
260	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan Drainase, P= 300m, L=50 Cm	Lingkungan RT 40, Kota Balikpapan	150 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
261	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan rusak perlu perbaikan jalan, P=250m, L=1,5m	Jalanan Gang Lingkungan RT 34, Kota Balikpapan	375 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
262	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Normalisasi Drainase Sungai Klandasan Kecil dari Jembatan Maryati ke Jembatan Belakang Toko Utama	Sungai Klandasan Kecil dari Jembatan Maryati ke Jembatan Belakang Toko Utama, Kota Balikpapan	250 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
263	Pengerukan sedimen pada sungai/drainase primer	Normalisasi drainase / pengerukan sedimentasi	Gang Samai Lingkungan RT 38, Kota Balikpapan	150 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
264	Pengerukan sedimen pada sungai/drainase primer	Nomalisasi Drainase Sungai Klandasan Kecil dari Jembatan simpang gn Malang ke Jembatan Belakang Toko Utama	Sungai Klandasan Kecil Kel. GSI, Kota Balikpapan	250 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
265	Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Normalisasi drainase / pengerukan sedimentasi	Lingkungan RT 61, 62, 63, 64, 65 dan 66, Kota Balikpapan	500 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
266	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Renovasi Kusen Jendela dan dinding teras depan Masjid Da''''watul Khair	Masjid Da''watul Khair Jl. Mayjend. Sutoyo RT 05 (Pertigaan Jalan Banjar Telp. 0813 47 363036, 0813 4646 1377, 0813 4745 6842, Kota Balikpapan	1 Ls	SEKRETARIAT DAERAH
267	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Gang Marga mulya (PxL = 105 x 4 m = 420 m2), Jalanan Gang Kecil (2 Lokasi = 40 x 1.5 & 40 x 2 =140 m2)	Gang Margamulya Lingkungan RT 22, Kota Balikpapan	560 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
268	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	semenisasi Jalan Gang Noor P= 200 m, L = 2 m	Gang Noor Lingkungan RT 09, Kota Balikpapan	400 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
269	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan	Semenisasi Jalan Manunggal bakti P= 100 m, L= 2,5m	Gang Manunggal Bakti RT 39, Kota	250 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	< 4 meter)	Jalan masih belum di semen	Balikpapan		
270	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	semenisasi Jalan Gang Nirmala/Samping Toko Fitri P= 200 L= 3m	Gang Nirmala Lingkungan RT 21, Kota Balikpapan	600 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
271	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Renovasi Masjid Al-Mughni	Jln. Cempaka Putih No 34 RT 16/17 Gunung Sari Ilir Hp. 0181808548104, Kota Balikpapan	1 paket	SEKRETARIAT DAERAH
272	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan rusak	rt 33, Kota Balikpapan	120 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
273	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan rusak	rt 34, Kota Balikpapan	150 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
274	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan yang bertanah dan berlumpur pada saat hujan dapat menganggu kenyamanan dan membahayakan pengguna jalan serta rawan kecelakaan	Jalan Padat Karya Km 8.5 RT 67 Blok B/A, Kota Balikpapan	125 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
275	Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Drainase Lingkungan sangat Sempit sehingga dapat memudahkan banjir	Komp Perum Asabri Blok D-1 RT 03, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
276	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Lingkungan Rusak dan Membutuhkan Perbaikan	RT 25 Blok B dan Blok Q1, Kota Balikpapan	180 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
277	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Lingkungan Sangat Rusak dan Berlubang Sehingga dapat Membahayakan Pengendara	Jl. Sangga Buana RT 35, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
278	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Lingkungan masih Berupa Tanah dan Belum Pernah di Semenisasi, Sehingga Saat Hujan Berlumpur dan dapat membahayakan Warga	Jl. Sangga Buana RT 47, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
279	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Masih Berupa Tanah Sehingga Saat hujan sangat Becek dan Berlumpur	Jalan Padat Karya Blok UPM (Busri) KM 9 RT 39, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
280	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jalan Lingkungan Rusak dan Berlubang Sehingga dapat Menbahayakan Pengguna Jalan	Jl. Wira Karya RT 49, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
281	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Drainase Rusak Sehingga Air Tidak Mengalir dengan Lancar	Jl. Wira Sakti RT 49, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
282	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Lingkungan sudah Rusak dan Perlu Adanya Perbaikan	Jl. Projakal Km 5,5 Gg. SS RT 55, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
283	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Lingkungan Rusak Parah dan Dapat Membahayakan Pengguna Jalan sehingga Membutuhkan Perbaikan	Jl. Projakal Gg Blambangan RT 62, Kota Balikpapan	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
284	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Lingkungan Rusak Parah Dan butuh di Semenisasi	Perum Graha Wiyata Asri Jl. Soekarno-Hatta KM 9 RT 63, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
285	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jalan Utama Lingkungan Masih Berupa Tanah sehingga Perlu di Semenisasi	RT 71, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
286	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	drainase yang telah rusak dan buntu serta kurang maksimal dikarenakan diatas drainase ditutup kayu yang digunakan sebagai akses jalan warga lingkungan RT. 15, RT. 13 & RT.16 (P=100 M, L=1,5 M)	RT. 15, Kota Balikpapan	150 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
287	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan telah rusak, yang mana jalan tersebut sebagai jalur utama akses keluar masuk warga (P=120 M, L=1.5 M)	RT. 29, Kota Balikpapan	180 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
288	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan telah rusak berat dan merupakan akses utama untuk warga (P=100 M, L=2M)	RT. 40, Kota Balikpapan	200 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
289	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	kayu ulin pada jembatan sudah banyak yang rusak dan tidak pernah semenisasi sehingga terkesan kumuh (P=200 M, L=1,5 M)	RT. 44, Kota Balikpapan	300 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
290	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan telah rusak berat dan merupakan akses utama warga (P=100 M, L = 1,5 M)	RT. 46, Kota Balikpapan	150 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
291	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan telah rusak berat dan merupakan akses utama warga (P = 100 M, L = 1,5 M)	RT. 50, Kota Balikpapan	150 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
292	Rehabilitasi/Perbaikan	kondisi parit / drainase	Jl. Gunung Satu RT.	81 m2	DINAS PEKERJAAN

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	terjadi penyumbatan karena drainase sudah rusak rawan banjir membahayakan rumah penduduk (P=160 M, L=0,5 M)	04, Kota Balikpapan		UMUM
293	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	kondisi jalan berlubang dan becek saat hujan serta menghambat kegiatan warga (P=120 M, L=2M)	RT. 08 Margo Mulyo (Samping SDN 005), Kota Balikpapan	240 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
294	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	drainase tersumbat dan buntu, bila hujan rawan banjir dan membahayakan pemukiman warga (P=100 M, L=0,6 M)	Jl. Gunung Empat RT. 15 Margo Mulyo, Kota Balikpapan	60 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
295	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	bangunan Posyandu RT 19 Margo Mulyo rusak dan tidak layak dalam kegiatan penimbangan balita maka agar dilakukan perbaikan	Jl. Gunung Empat RT 19, Kota Balikpapan	40 cbm	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
296	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan lingkungan RT.50 Wonorejo puncak I saat ini masih rusak karena belum ada pembangunan jalan/semenisasi sehingga membahayakan pengguna jalan, saat hujan jalan berlubang/becek (P=200 M, L=3M)	RT. 50 Wonorejo Puncak I, Kota Balikpapan	600 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
297	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	jalan lingkungan RT. 50 Wonorejo Puncak I saat ini belum ada drainasenya sehingga saat hujan jalan sangat sulit dilewati karena jalan jadi becek (P=1000 M, L= 0,8 M)	RT. 50 Jl. Wonoroje Puncak I, Kota Balikpapan	800 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
298	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan / gang dilingkungan RT. 6 Sepinggan saat ini rusak karena belum pernah ada pembangunan dan membahayakan pengguna jalan (P=100 M, L = 4M)	RT. 6 Sepinggan, Kota Balikpapan	400 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
299	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	kondisi drainase saat ini longsor dan tersumbat saat hujan serta rawan longsor dan membahayakan pemukiman warga (P=150 M, L=0,5 M)	RT. 29 Margo Mulyo, Kota Balikpapan	75 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
300	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	kondisi drainase saat ini rusak dan buntu sehingga rawan longsor apabila hujan dan membahayakan rumah penduduk (P=75 M, L=0,4 M)	Jl. Gunung Empat RT. 21 Margo Mulyo, Kota Balikpapan	45 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
301	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	kondisi posyandu saat ini tidak layak dan kurang nyaman dalam kegiatan penyuluhan dan penimbangan balita dan manula	RT. 15 Margo Mulyo, Kota Balikpapan	1 unit	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
302	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	kondisi posyandu saat ini tidak layak dan kurang nyaman dalam kegiatan penyuluhan dan penimbangan balita dan manula	RT. 20 Margo Mulyo, Kota Balikpapan	1 unit	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
303	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	kondisi posyandu saat ini tidak layak dan kurang nyaman dalam kegiatan penyuluhan dan penimbangan balita dan manula	Jl. Gunung Empat Gang Radial RT. 30 Margo Mulyo, Kota Balikpapan	1 unit	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
304	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	kondisi posyandu saat ini tidak layak dan kurang nyaman dalam kegiatan penyuluhan dan penimbangan balita dan manula	Jl. AMD Gunung Empat Perum BTN RT, 38 Margo Mulyo, Kota Balikpapan	1 unit	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
305	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 31, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
306	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 05, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
307	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 36 GG. RINDU, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
308	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	KONDISI DRAINASE SUDAH TERKIKIS DAN BERLUBANG	RT. 47, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
309	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	TERJADI GENANGAN AIR DAN ALIRAN AIR DI JALAN YANG MENYEBABKAN	RT. 31, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
		JALAN MENJADI RETAK TERGERUS AIR SERTA RAWAN BANJIR			
310	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	DRAINASE YANG ADA SUDAH RUSAK DIKARENAKAN PENGIKISAN	RT. 24, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
311	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 04, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
312	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	JL. TELAGASARI I ANTARA RT. 37 DAN RT. 45, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
313	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 39, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
314	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 17, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
315	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 32 (MASJID NURUL ISLAM NAIK KEATAS), Kota Balikpapan	95 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
316	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 03, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
317	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	TERJADI GENANGAN AIR DAN RAWAN BANJIR	RT. 38, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
318	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 38, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
319	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DIAKIBATKAN JALAN RUSAK TERKIKIS AIR	RT. 07 (JALAN TANJAKAN DEPAN MASJID JABAL RAHIM), Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
320	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	TERJADI GENANGAN AIR DAN RAWAN BANJIR	RT. 62, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
321	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 52, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
322	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	TERJADI GENANGAN AIR DAN RAWAN BANJIR SERTA DINDING DRAINASE SUDAH RUSAK PARAH	RT. 40, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
323	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 26, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
324	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	TERJADI GENANGAN AIR DAN RAWAN BANJIR	RT. 28, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
325	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 37, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
326	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	TERJADI GENANGAN AIR DAN RAWAN BANJIR	RT. 37, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
327	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	TERJADI GENANGAN AIR DAN RAWAN BANJIR	RT. 03, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
328	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 28, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
329	Pemeliharaan Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	BANGUNAN PAGAR YANG LAMA SUDAH RAPUH DIKHAWATIRKAN ROBOH DAN MEMBAHAYAKAN WARGA	RT. 34 SD. 004 BALIKPAPAN KOTA, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
330	Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	TERJADI GENANGAN AIR DIKARENAKAN PARIT TIDAK MAMPU MENAMPUNG VOLUME AIR PADA WAKTU HUJAN DAN KONDISINYA SUDAH RUSAK DAN BERLUBANG	RT. 43, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
331	Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	DRAINASE YANG ADA SAAT INI KURANG LEBAR DAN DALAM SERTA BUNTU	RT. 26, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
332	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalanan sudah banyak yang lubang, sehingga saat hujan jadi licin dan buat genangan air	jalan Lingkungan Praja Muda IV, RT 21 sepinggan Baru, Kota Balikpapan	35 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
333	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan menuju akses pondok yang belum di semenisasi, sehingga jika hujan sering licin sebabkan kecelakaan	Jalan Padat Karya I pondok Mardhatillah , RT 68 Graha Indah, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
334	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	sudah rusak dan lubang sehingga sering emnampung air	jalan Letjend Suprapto Gunung Traktor RT 27	110 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
			kelurahan Baru Tengah, Kota Balikpapan		
335	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	Bangunan posyandu dan tempat wudhu disampingnya rusak	Jalan sepaku laut , RT 13 Baru Tengah, Kota Balikpapan	1 Bagunan	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
336	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan lingkungan rusak dan berlubang	Jalan Asmaul Husna , RT 39 kelurahan Teritip, Kota Balikpapan	270 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
337	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Belum ada saluran drainase, sehingga sering banjir karena penumpukan sedimentasi	Jalan Batu Ratna, dekat lokasi Mushollah amanah lama dan lingkungan lapangan volley RT 62 Karang Joang, Kota Balikpapan	375 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
338	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan sudah rusak berlubang	Jalan Letjend Suprapto, jembatan dua, RT 43 kelurahan Baru Ulu, Kota Balikpapan	25 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
339	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Rawan longsor , karena sedimentasi tidak adanya siring	Jalan Tepo, KM 10 RT 09 Karang Joang, Kota Balikpapan	500 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
340	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan masih tanah, sehingga ketika hujan selalu becek dan licin	Jalan Padat Karya, KM 8,5, Blok I RT 67 kelurahan Graha Indah, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
341	Pembangunan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jembatan swadaya masyarakat rusak dsn tertutup.	Jalan lingkungan RT 45 kelurahan Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	8 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
342	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak dsn berlubang, jika hujan becek	Jalan Gang Milenium III B ,RT 45 kelurahan Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
343	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan belum disemenisasi , sehingga licin ketika hujan	Jalan Syarifuddin Yoes, Gang Milenium III B, RT 45 kelurahan Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
344	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Banyak sedimentasi dan drainase sdh rusak	Jalan Batu ratna KM 11, RT 15 Karang Joang, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
345	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan masih dalam bentuk tanah Lampung sehingga sering becek ketika hujan	Jalan masuk perum pesona Bukit Batuah , RT 14 kelurahan Karang Joang, Kota Balikpapan	400 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
346	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	Jalan PDAM RT.68, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
347	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jalan banyak yang berlubang	Jalan Inhutani Luar Km.10 RT.41, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
348	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Belum adanya semenisasi jalan lingkungan	Jalan Soekarno Hatta Gg. Walet RT.36, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
349	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Belum adanya semenisasi jalan lingkungan	Jalan Projakal Gang. SS RT.55, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
350	Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Dimensi drainase mengecil Ukuran L=35 cm T=40cm	Jalan Taman Sari Blok J RT.27, Kota Balikpapan	140 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
351	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jalan masih tanah, belum adanya semenisasi jalan	Jalan Soekarno Hatta GG. Setrad Jepang RT.61, Kota Balikpapan	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
352	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Kerusakan Jalan Lingkungan	Jalan Soekarno Hatta Gg. Rotib RT.35, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
353	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kerusakan Jalan Lingkungan Lebar 2,5 Meter	Jalan Soekarno Hatta Gang Amanah 1 RT.12, Kota Balikpapan	456 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
354	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jalan rusak parah	Jalan Gang Padat Karya, Kota Balikpapan	95 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
355	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jalan lingkungan belum adanya semenisasi	Jalan BAtu Butok RT.85, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
356	Peningkatan/Perkerasan/semeni	Belum adanya semenisasi	Jalan Padat Karya	150 Meter	DINAS PEKERJAAN

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	jalan di tempat tersebut	Blok UPM (Narty dan Ety), Kota Balikpapan		UMUM
357	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Belum adanya semenisasi Jalan di Gang tersebut	Jalan Taman Sari RT.69, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
358	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Sambungan Jalan	Jalan Taman Sari RT.23, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
359	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Drainase masih alami, belum ada pembangunan	Jalan Graha Indah RT.01, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
360	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Pembangunan drainase	Jalan PDAM RT.51, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
361	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perlunya Perbaikan Jalan di Gang Mulia RT 12 Kelurahan Damai dengan Panjang 200 Meter dan Lebar 4 Meter	Gang Mulia RT 12 Kelurahan Damai, Kota Balikpapan	200 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM
362	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Perlunya Perbaikan Drainase di RT 38 Kelurahan Damai dengan Panjang 200 Meter Lebar 50 cm	RT 38 Kelurahan Damai, Kota Balikpapan	200 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM
363	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perlunya Peningkatan dan Perbaikan Jalan Lingkungan di RT 38 Kelurahan Damai Panjang 200 Meter Lebar 4 Meter	RT 38 Kelurahan Damai, Kota Balikpapan	200 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM
364	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perlunya Peningkatan dan Perbaikan Jalan Lingkungan Gang Bengkirai RT 33 Kelurahan Damai Panjang 200 Meter Lebar 4 Meter	Gang Bengkirai RT 33 Kelurahan Damai, Kota Balikpapan	200 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM
365	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perlunya peningkatan dan perbaikan jalan lingkungan Jl Tanjung Pura RT 22 Kelurahan Telaga Sari Panjang 200 Meter Lebar 4 Meter	Jl. Tanjung Pura RT 22 Kelurahan Telaga Sari, Kota Balikpapan	200 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM
366	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Perlunya Perbaikan Drainase di RT 34 Kelurahan Damai Panjang 200 Meter Lebar 60 Cm	RT 34 Kelurahan Damai, Kota Balikpapan	200 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM
367	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perlunya Perbaikan Jalan di Lingkungan Jalan RT 23 Kelurahan Telaga Sari Panjang 200 Lebar 4 Meter	RT 23 Kelurahan Telagasari, Kota Balikpapan	200 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM
368	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perlunya Perbaikan Jalan Lingkungan di Jl Pembangunan RT 24 KelurahanTelagasari Panjang 200 Meter Lebar 4 Meter	Jl. Pembangunan RT 24 Kelurahan Telagasari, Kota Balikpapan	200 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM
369	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perlunya Perbaikan Jalan Lingkungan RT 19 Kelurahan Damai Panjang 200 Meter Lebar 4 Meter	RT 19 Kelurahan Damai, Kota Balikpapan	200 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM
370	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Perlunya Perbaikan Drainase RT 23 Kelurahan Damai Panjang 100 Meter Lebar 90	RT 23 Kelurahan Telaga Sari, Kota Balikpapan	200 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM
371	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perlunya Perbaikan Jalan Lingkungan di Jl Pembangunan RT 38 Kelurahan Telaga Sari Panjang 200 Meter Lebar 4 Meter	Jl Pembangunan RT 38 Kelurahan Telaga Sari, Kota Balikpapan	200 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM
372	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Lampu putus menyebabkan jalan gelap pada malam hari, Tiang dan Aksesoris yang perlu di ganti/dirapikan yang dapat membayakan pengguna jalan yang melintas	RT 32, Kota Balikpapan	5 Pcs	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
373	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	KONDISI JALAN YANG GELAP PADA MALAM HARI DAPAT MEMBAHAYAKAN PENGGUNA JALAN DAN RAWAN TERJADI TINDAK KRIMINAL	Gang Rukun RT 33, Kota Balikpapan	5 Pcs	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
374	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	KONDISI JALAN GELAP DAPAT MEMBAHAYAKAN PENGGUNA JALAN DAN RAWAN TERJADI TINDAK KRIMINAL	Kampung Pati RT 26, Kota Balikpapan	10 Pcs	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
375	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 05 JL. TEPO KM. 10, Kota Balikpapan	150 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
376	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan	KONDISI JALAN GELAP YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN	RT. 05 JL. TEPO KM. 10, Kota Balikpapan	5 Pcs	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	Utara (lebar jalan < 4 meter)	PENGGUNA JALAN DAN RAWAN TERJADI KEJAHATAN			
377	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	KONDISI JALAN GELAP YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN PENGGUNA JALAN DAN RAWAN TERJADI KEJAHATAN	RT. 06 JALAN RAMBAI PERUM RAUDHAH, Kota Balikpapan	5 Pcs	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
378	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	TERJADI GENANGAN AIR DAN RAWAN BANJIR	RT. 33 GG. SENTOSA, Kota Balikpapan	150 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
379	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 48 JL. SULTAN HASANUDDIN, Kota Balikpapan	150 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
380	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	TERJADI GENANGAN AIR DAN RAWAN BANJIR	RT. 64 JALAN PAHLAWAN, Kota Balikpapan	150 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
381	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	KONDISI JALAN GELAP PADA MALAM HARI YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN PENGGUNA JALAN DAN RAWAN TERJADI TINDAK KRIMINAL	RT. 64 JALAN PAHLAWAN, Kota Balikpapan	5 Pcs	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
382	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Lingkungan Rusak dan Perlu di Semenisasi, ukuran P: 330M L: 2 M	RT 35, Kota Balikpapan	330 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
383	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Lingkungan Masih Berupa Tanah dan Belum Pernah di Semenisasi, ukuran P: 150M L:3M	Jl. Sungai Ampal RT 58, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
384	Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	Lapangan Parkir/Lapangan Upacara Kantor Kelurahan Karang Rejo Rusak, ukuran 40 x 20 M	Kantor Kelurahan Karang Rejo, Jl. Pangeran Antasari No 21 RT 63, Kota Balikpapan	40 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
385	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jalan Lingkungan Rusak dan Perlu di Semenisasi, ukuran P: 100M L: 5M T: 0,1M	RT 35, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
386	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Lingkungan Rusak dan Berlubang Sehingga Perlu di Semenisasi, ukuran P: 116M L: 3M T: 0,1M	RT 40, Kota Balikpapan	116 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
387	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Drainase Lingkungan Rusak dan Sempit Sehingga Perlu Perbaikan, Ukuran P: 186M L: 0,5M T: 0,4M	RT 18, Kota Balikpapan	186 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
388	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Lingkungan Rusak dan Semen jalan ada yang pecang dan berlubang, Ukuran P: 175M L: 2M	Jl. R.E Martadinata RT 15, Kota Balikpapan	175 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
389	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi jalan dengan P = 150m, L = 4m	Perum. Bangun Reksa Asri, RT 21 Kel. Graha Indah, Kota Balikpapan	150 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
390	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi jalan dengan P = 150m, L = 4m	Perum. Batu Ampar Permai Blok C, RT 34 Kel. Batu Ampar, Kota Balikpapan	150 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
391	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi jalan dengan P = 150m, L = 4m, T = 10-12cm	Jl. Wonorejo, RT 34 Kel. Gn. Samarinda, Kota Balikpapan	150 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
392	Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan drainase dengan P = 100m, L = 20-40cm, T = 30-40cm	Jl. Gurinda 4, RT 41 Kel. Gn. Samarinda, Kota Balikpapan	100 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
393	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi jalan dengan P = 250m, L = 6m, T = 20cm	Jl. Krayan 1 Depan Gereja Dayak, RT 49 Kel. Batu Ampar, Kota Balikpapan	250 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
394	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi jalan dengan P = 71m, L = 4m	Gg. Pataning, RT 54 Kel. Gn. Samarinda, Kota Balikpapan	71 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
395	Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan drainase dengan P = 45m, L = 60cm	Gg. Harmoni, RT 54 Kel. Gn. Samarinda, Kota Balikpapan	45 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
396	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi jalan dengan P = 150m, L = 4m	Perum. Puncak Permai, RT 58 Kel. Graha Indah, Kota Balikpapan	150 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
397	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi dengan P = 150m, L = 3m	Gg. Lestari 12, RT 60 Kel. Graha Indah, Kota Balikpapan	150 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
398	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi jalan dengan P = 80m, L = 4m	Jl. Projakal Blambangan, RT 62 Kel. Graha Indah, Kota Balikpapan	80 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
399	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi jalan dengan P = 50m, L = 4m	Belakang Blok CA, RT 71 Kel. Graha Indah, Kota Balikpapan	50 m	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
400	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi jalan dengan P = 100m, L = 4m	Blok DV, RT 72 Kel. Graha Indah, Kota Balikpapan	100 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
401	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan semenisasi jalan dengan P = 100m, L = 4m, T = 20cm	RT 69 Kel. Graha Indah, Kota Balikpapan	100 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
402	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan yang ada rusak	jalan rt.37 kel.karang rejo, Kota Balikpapan	420 meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
403	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan existing masih tanah	jalan rt.59 kel.sumber rejo, Kota Balikpapan	760 meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
404	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	sebagian masih jalan tanah dan jalan existing beton rusak	jalan rt.58 kel.sumber rejo, Kota Balikpapan	703 meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
405	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	badan jalan rusak	jalan rt.62 kel.karang rejo, Kota Balikpapan	600 meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
406	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan beton rusak	jalan rt.76 kel.karang rejo, Kota Balikpapan	400 meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
407	Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	drainase yang ada rusak dan ada yang belum ada drainase	drainase rt.12 kel.karang rejo, Kota Balikpapan	200 meter panjang	DINAS PEKERJAAN UMUM
408	Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	existing drainase alam	drainase rt.76 kel.karang rejo, Kota Balikpapan	160 meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
409	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	siring hampir roboh	siring rt.21 kel.karang rejo, Kota Balikpapan	30 meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
410	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perlunya semenisasi jalan, ukuran P = 170 M, L = 5 M	RT.37, Kota Balikpapan	170 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
411	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	kondisi jalan,sudah rusak dan berlubang, ukuran P = 150 M, L = 3 M, Tebal = 0,12 M	RT.02 Jln.Gang Pertiwi, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
412	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah rusak dan hancur, ukuran 5 x 300 M	RT.48, Kota Balikpapan	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
413	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perlunya semenisasi jalan, ukuran P = 110 M, L = 4 M, Tebal = 15 Cm	RT.49, Kota Balikpapan	110 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
414	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah rusak dan hancur, ukuran P = 150 M, L = 3 M, Tebal = 0, 12 M	RT.24, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
415	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan utama di lingkungan RT.69 Sepinggan saat ini belum mendapatkan pembangunan yan merata, masih berupa jalan tanah dan jik ahujan menulitkan akses jalan yang bahkan terkesan licin dan berbahaya, ukuran P = 250 M, L = 5 m, Tebal = 15 Cm	Jl.Prona III RT.69, Kota Balikpapan	250 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
416	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perlunya semenisasi jalan, ukuran P = 150 M, L = 3 M, Tinggi = 20 Cm	RT.52 Jl.Telaga Mas Blok J No.8, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
417	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perlunya semenisasi jalan dan tembok jalan serta pemasangan Hydran untuk fire safety, ukuran P = 275 M, L = 2 M, Tinggi = 4 M	RT.08, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
418	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih tanah dan perlu dicor , dgn ukuran P = 500 M, L = 4 M	RT.53 Jl.Prona 3 menuju Jalan Daksa Raya, Kota Balikpapan	500 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
419	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah rusak dan hancur, dengan ukuran P = 300 M, L = 6 M dengan Ketebalan 15 Cm	RT.06 Jalan Daksa Barat 2 Blok C No.24 A, Kota Balikpapan	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
420	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan sudah rusak, hancur dan tidak layak, ukuran 200 meter x 4 meter	Alam Sepinggan Lestari Jl.Bhinneka RT.30, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
421	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	kondisi Jalan memprihatinkan, dengan ukuran P = 110 M, L = 4 M	RT.59 GG Swadaya I, Kota Balikpapan	110 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
422	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan yang sudah rusak, hancur dan retak, ukuran P = 110 M, L = 4 M, Tinggi = 0,18 M	RT.19, Kota Balikpapan	110 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
423	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan sudah rusak dan hancur, ukuran P = 5 M, L = 72 M	GG Arjuna Perum Sepinggan Menara Griya RT.63, Kota Balikpapan	360 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
424	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah rusak dan hancur serta retak2, ukuran P = 200 m x L = 4 m x Ketebalan 15 Cm	Jl.Abdi Praja Utara No.05 RT.27, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
425	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan sudah rusak dan hancur, ukuran 200 x 5 meter	RT.52 Jl.Telaga Mas, Perum Griya Telaga Mas Blok J No.8, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
426	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Kondisi turap sungai yang sudah rusak, dan semenisasi jalan yang sudah rusak,ukuran + 300 - 500 M	RT.30 Alam Sepinggan Lestari Jl.Bhinneka, Kota Balikpapan	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
427	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah rusak, hancur serta retak2, dgn ukuran 110 m x 5 m x 0,1 m	Jl.Besakih XV RT.41, Kota Balikpapan	55 Meter Kubik	DINAS PEKERJAAN UMUM
428	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan yang sudah rusak dan retak2 serta tidak layak, dgn ukuran 4 Meter persegi x 200 Meter persegi	Prona III Jl.Santri RT.69 s/d Balqis Blok II RT.69, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
429	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	perbaikan draenase rusak dan pelebarab dan pembuatan baru	jalan rt 14 damai, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
430	Pembangunan siring/turap pada jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	jalan yang longsor perlu siringan	jalan rt 02 telagasari, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
431	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	pembuatan draenase	jalan rt 29 pengalang damai, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
432	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	perbaikan draenase	rt 15 damai, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
433	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	semenisasi lingkungan	jalan rt 26 ulu, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
434	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Kota	posyandu	rt 26 ulu, Kota Balikpapan	1 unit	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
435	Pembangunan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	pembuatan pagar kayu jembatan	rt 9 ulu, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
436	Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	draenase	rt 15 damai, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
437	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	semenisasi	rt 14 damai, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
438	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	semenisasi	rt 11 damai, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
439	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	semenisasi	rt 9, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
440	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	semenisasi	rt 35 prapatan, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
441	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	semeisasi	rt 31 damai, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
442	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Kota (lebar jalan < 4 meter)	tiang dan lampu dan asesoris	rt 15 damai, Kota Balikpapan	10 bh	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
443	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Kota	posyandu	rt 22 damai, Kota Balikpapan	1 unit	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
444	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	peningkatan Jalan Lingkungan rusak	Jalan Al-Makmur IV RT.32, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
445	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Jalan Lingkungan Sekitar yang sudah rusak	Jalan Markoni Atas Gg. Nur Hidayah RT.27, Kota Balikpapan	100 meeter	DINAS PEKERJAAN UMUM
446	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Jalan Lingkungan sekitar yang sudah rusak	Jalan Mayjend Sutoyo - Siaga Gg. Bukit Mutiara 3 RT.08, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
447	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Jalan Lingkungan sekitar yang rusak	Jalan Milono RT.46, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
448	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	perbaikan jalan lingkungan sekitar yang sudah rusak	Jalan Bukit Sion RT.44, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
449	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan sekitar yang sudah rusak	Jalan Bukit Cinta Damai II RT.38, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
450	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	Jl. Kalimaya RT. 14, Kota Balikpapan	100 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
451	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT. 11 Gang Ulin, Kota Balikpapan	75 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
452	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT. 47, Kota Balikpapan	100 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
453	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan	Semenisasi Jalan	RT. 50, Kota Balikpapan	100 m	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	< 4 meter)				
454	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT. 06, Kota Balikpapan	100 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
455	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT. 32, Kota Balikpapan	80 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
456	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT. 12, Kota Balikpapan	100 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
457	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	Jl. Pupuk Utara RT. 16, Kota Balikpapan	75 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
458	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	Jl. Pupuk Timur I RT. 17, Kota Balikpapan	100 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
459	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	Jl. Proklamasi Gang Tajuddin RT 95, Kota Balikpapan	200 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
460	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	Jl. Persawahan RT 15 Gunung Binjai, Kota Balikpapan	200 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
461	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	Jl. Permata Sakinah RT 99, Kota Balikpapan	200 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
462	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	Jl. Persatuan RT 30 Trans, Kota Balikpapan	200 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
463	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	Gang Rahman 1 Jl. Persatuan RT 44 Trans, Kota Balikpapan	200 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
464	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	Jl. Tanjung Kelor RT 20, Kota Balikpapan	200 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
465	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Seminisasi Jalan	Jl. Tanjung Baru RT 29, Kota Balikpapan	200 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
466	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	Jl. Permata Sakinah RT 64, Kota Balikpapan	200 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
467	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	Jl. Pondok Asri RT 29, Kota Balikpapan	200 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
468	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	Jl. Pondok Asri RT 60, Kota Balikpapan	200 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
469	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	Jl. Handil Sulawesi RT 45 Gunung Tembak, Kota Balikpapan	200 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
470	Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter)	Drainase	Jl. Selili RT 100, Kota Balikpapan	150 40	DINAS PEKERJAAN UMUM
471	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	Jl. Melati 1 RT 30, Kota Balikpapan	200 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
472	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	Rt 93 Jalan Pondok Sari, Kota Balikpapan	200 4 no	DINAS PEKERJAAN UMUM
473	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalur lalu lintas warga dan untuk mengatasi becek saat musim hujan (P=115 M, L=4M)	RT 2 Teritip, Kota Balikpapan	69 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM
474	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalur lalu lintas warga (P=115 M, L=4M)	RT 10 Lamaru, Kota Balikpapan	69 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM
475	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	mengatasi jalanan yang becek saat hujan dan sebagai jalur utama arus keluar masuk warga (P=115 M, L=4 M)	RT. 1 Teritip, Kota Balikpapan	69 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM
476	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	mengatasi banjir saat hujan	RT 31 Lamaru, Kota Balikpapan	1 paket	DINAS PEKERJAAN UMUM
477	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalur lalu lintas warga dan mengatasi becek saat hujan	RT 40 Manggar Baru, Kota Balikpapan	1 paket	DINAS PEKERJAAN UMUM
478	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	mengatasi banjir saat hujan	RT 60 Manggar, Kota Balikpapan	1 paket	DINAS PEKERJAAN UMUM
479	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Permohonan Semenisasi Jalan / Gang	RT 24, Kota Balikpapan	200 2	DINAS PEKERJAAN UMUM
480	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan / Gang	RT 39, Kota Balikpapan	100 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
481	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Perbaikan Drainase	RT 39, Kota Balikpapan	167 60	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
482	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Semenisasi	RT 27, Kota Balikpapan	200 2	DINAS PEKERJAAN UMUM
483	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan / Gang	RT 08, Kota Balikpapan	100 2	DINAS PEKERJAAN UMUM
484	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan (Kondisi Rusak)	Jl. Gunung Traktor RT 50, Kota Balikpapan	250 2	DINAS PEKERJAAN UMUM
485	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Perbaiakn dan Penguatan Jembatan Kayu Atas Air RT 44	Jl. Sepakat RT 44, Kota Balikpapan	120 2	DINAS PEKERJAAN UMUM
486	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Semenisasi	Jl. Sepakat RT 44, Kota Balikpapan	250 2	DINAS PEKERJAAN UMUM
487	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Semenisasi	Jl. Traktor RT 29, Kota Balikpapan	120 2	DINAS PEKERJAAN UMUM
488	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Perbaikan Drainase	Jl. Wolter Monginsidi RT 33, Kota Balikpapan	100 70	DINAS PEKERJAAN UMUM
489	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perbaiakn Jalan Lingkungan	RT 23 Jl. Taman Sari Kav. 5 Langit Biru, Kota Balikpapan	130 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
490	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan	RT 46 Jl. Projakal KM 5,5, Kota Balikpapan	150 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
491	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan	RT 69 Jl. Minangkabau, Kota Balikpapan	110 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
492	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Perbaikan Drainase	RT 51 Jl. PERUMPDAM KM 5,5, Kota Balikpapan	600 40	DINAS PEKERJAAN UMUM
493	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 51 JL. PERUM PDAM KM 5,5, Kota Balikpapan	250 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
494	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 67 Jl. Padat Karya KM 8,5 Blok F, Kota Balikpapan	125 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
495	Pembangunan siring/turap pada jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Pembuatan Siring dan Drainase	RT 57 Jl. Beraan Paree KM 6,5, Kota Balikpapan	200 60	DINAS PEKERJAAN UMUM
496	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Pengecoran Jalan	RT 11 Jl. Batu Ratna, Kota Balikpapan	200 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
497	Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaiakn Drainase	RT 16 dan RT 17, Kota Balikpapan	90 1	DINAS PEKERJAAN UMUM
498	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	Jl Giri Mulyo RT 24, Kota Balikpapan	130 3	DINAS PEKERJAAN UMUM
499	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	Jl. Soekarno Hatta KM 23 No. 88, Kota Balikpapan	350 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
500	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perbaikan Jalan	RT 49 Jl. Mukmin Faisal, Kota Balikpapan	150 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
501	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perbaikan Jalan	RT 56, Kota Balikpapan	150 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
502	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perbaikan Jalan	RT 10, Kota Balikpapan	150 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
503	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perbaikan Jalan	RT 47, Kota Balikpapan	150 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
504	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perbaikan Jalan	RT 70 Jl. Mukmin Faisal, Kota Balikpapan	150 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
505	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perbaikan Jalan	RT 66 Jl. Mukmin Faisal, Kota Balikpapan	150 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
506	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perbaiakn Jalan	RT 68 Jl. Mukmin Faisal, Kota Balikpapan	150 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
507	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perbaikan Jalan	RT 40 Jl. Perum. Renosari Gang Angkasa 2, Kota Balikpapan	80 4	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
508	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan/Semenisasi Jalan P 200m dan L 3m	RT 39, Kota Balikpapan	200 3	DINAS PEKERJAAN UMUM
509	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan P 70 dan L 4	RT 27, Kota Balikpapan	70 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
510	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 23, Kota Balikpapan	100 5	DINAS PEKERJAAN UMUM
511	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan P 180m dan L 3m	Rt 59, Kota Balikpapan	180 3	DINAS PEKERJAAN UMUM
512	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan dengan P 150m dan L 4m	RT 46, Kota Balikpapan	150 4	DINAS PEKERJAAN UMUM
513	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan dengan P 200m dan L 3m	RT 01, Kota Balikpapan	200 3	DINAS PEKERJAAN UMUM
514	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan perlu perbaikan karena sudah rusl	Rt 22 Kelurahan Graha Indah, Kota Balikpapan	200 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
515	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	kondisi jalan masih tanah dan perlu pengerasan	Gang Adidaya, Rt 10 Gunung Samarinda, Kota Balikpapan	150 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
516	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan gang rusak	gang salam rt 10 gunung samarinda, Kota Balikpapan	150 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
517	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	kondisi paret masih alami, tidak mampu menampung dan mengontrol debet air	Gang Sedulur 2, Rt 24 Karang Joang, Kota Balikpapan	200 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
518	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan mengalami kerusakan	blok d-a rt. 25, kelurahan graha indah, Kota Balikpapan	200 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
519	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalanan perlu perbaikan karena rusak	gang asri, rt 64 karang joang, Kota Balikpapan	200 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
520	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	kondisi jalan rusak	jalan lingkungan rt 43 gunung samarinda, Kota Balikpapan	200 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
521	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	kondisi jalan perlu perkerasan	di samping toko family rt 71 graha indah, Kota Balikpapan	200 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
522	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	kondisi jalan rusak	jalan strat 6, rt 46 kelurahan gunung samarinda, Kota Balikpapan	200 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
523	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	kondisi jalan perlu perkerasan	jalan menuju mushola nurun ala nur rt 23 graha indah, Kota Balikpapan	150 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
524	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	kondisi jalan perlu perkerasan	jalan kav 2 menuju pondok indah rt 23 graha indah, Kota Balikpapan	200 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
525	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 15, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
526	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 28, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
527	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN DIKARENAKAN FUNGSI DRAINASE YANG KURANG BAIK	RT. 04, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
528	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 40, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
529	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DIKARENAKAN KONDISI JEMBATAN/JALAN RUSAK SEHINGGA DIPERLUKAN SEMENISASI	RT. 48, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
530	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	perbaikan jalan lingkungan sekitar yang rusak	Jalan Marsma R Iswahyudi RT.05 Gg. Masjid, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
531	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningatan Jalan Lingkungan yang sudah rusak	Jalan Marsma R Iswahyudi Gg. Spada RT.06, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
532	Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	peningkatan drainase lingkungan yang sudah rusak dan rawan banjir	Jalan Marsma R Iswahyudi Gg. Spada RT.06, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
533	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	perbaikan jalan lingkungan yang sudah rusak	Jalan Marsma R Iswahyudi Gg. Mawar RT.03, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
534	Rehabilitasi/Perbaikan jalan	perbaikan jalan lingkungan	Jalan Marsma R	200 meter	DINAS PEKERJAAN

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	yang sudah rusak	Iswahyudi RT.07, Kota Balikpapan		UMUM
535	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	perbaikan drainase lingkungan sekitar yang sudah rusak dan rawan banjir	Jalan Marsma R Iswahyudi Gg. Mawar RT.04, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
536	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	perbaikan jalan lingkungan sekitar yang sudah rusak	Jalan Marsma R Iswahyudi Gg. Mawar RT.04, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
537	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	perbaikan jalan lingkungan sekitar yang sudah rusak	Jalan Marsma R Iswahyudi RT.37, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
538	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	perbaikan jalan lingkungan sekitar yang sudah rusak	Jalan Marsma R Iswahyudi Gg. Bersatu RT.03, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
539	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	perbaikan drainase lingkungan sekitar yang sudah rusak dan rawan banjir	Jalan Manunggal RT.42, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
540	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	perbaikan drainase lingkungan sekitar yang sudah rusak dan rawan banjir	Jalan Taman Sepinggan RT.30, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
541	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	perbaikan drainase lingkungan sekitar yang sudah rusak dan rawan banjir	Jalan Intan IX RT.26, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
542	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	perbaikan drianase lingkungan sekitar yang sudah rusak dan rawan banjir	Jalan Tirtasari RT.15, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
543	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	perbaikan jalan lingkungan yang sudah rusak	Jalan Daksa Barat RT.06, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
544	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan Sekitar yang sudah rusak	Jalan Marsma R Iswahyudi RT.08, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
545	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	perbaikan drainase lingkungan sekitar yang sudah rusak dan rawan banjir	Jalan PGRI RT.47, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
546	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	perbaikan jalan lingkungan sekitar yang sudah rusak	Jalan Pupuk RT.07, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
547	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	perbaikan drainase lingkungan sekitar yang sudah rusak dan rawan banjir	Jalan Praja Mukti RT.26, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
548	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	perbaikan drainase lingkungan sekitar yang sudah rusak dan rawan banjir	Jalan Abdi Praja IV RT.28, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
549	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan jalan lingkungan sekitar yang sudah rusak	Jalan Berlian RT.31, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
550	Pembangunan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Pembangunan jembatan lingkungan sekitar yang masih menggunakan media kayu	Jalan Safir RT.37, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
551	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	perbaikan jalan lingkungan sekitar yang rusak	Jalan Manuntung RT.14, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
552	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	perbaikan jalan lingkungan sekitar yang sudah rusak	Jalan Raya Daksa, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
553	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	perbaikan jalan lingkungan sekitar yang rusak	Jalan Mulawarman RT.09, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
554	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	perbaikan jalan lingkungan yang sudah rusak	Jalan Prona RT.69, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
555	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	TERJADI GENANGAN AIR PADA KAWASAN PERMUKIMAN WARGA YANG MENIMBULKAN KEKUMUHAN	RT. 28, Kota Balikpapan	50 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
556	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 53, Kota Balikpapan	150 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
557	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 50, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
558	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 64, Kota Balikpapan	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
559	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	TERJADI GENANGAN AIR DAN RAWAN BANJIR	RT. 53, Kota Balikpapan	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
560	Peningkatan/Perkerasan/semeni	TERBATASNYA AKSES	RT. 28, Kota	135 METER	DINAS PEKERJAAN

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	Balikpapan		UMUM
561	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	TERJADI GENANGAN AIR DAN RAWAN BANJIR	RT. 37, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
562	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 37, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
563	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 65, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
564	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 45 JL. MILENIUM II, Kota Balikpapan	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
565	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	TERJADI GENANGAN AIR DAN RAWAN BANJIR	RT. 48, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
566	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 48 GG. BHINEKA I S/D II, Kota Balikpapan	120 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
567	Pembangunan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	SAMBUNGAN JALAN HANCUR DAN RUSAK	RT. 50, Kota Balikpapan	10 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
568	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan yang Rusak dan Bolong ukuran 4 x 130 M	Perum PGRI Blok E RT 45, Kota Balikpapan	130 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
569	Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	Semenisasi Jalan Yang Rusak Ukuran 5 x 75 M	Jalan Biologi RT 55, Kota Balikpapan	75 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
570	Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	Semenisasi Jalan Yang Rusak ukuran 5 x 130 M	Perum Jasa Raharja Blok E RT 14, Kota Balikpapan	130 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
571	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan Yang Rusak ukuran 3 x 120 M	Jl. Prona 2 Gg 5 RT 24, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
572	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan yang belum Pernah di Semenisasi ukuran 4 x 150 M	Jl. Masjid Al- Akbar Blok D RT 49, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
573	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan yang Belum pernah di semenisasi ukuran 4 x 110 M	Jl. Lawu 3 & 4 RT 68, Kota Balikpapan	110 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
574	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan Yang Rusak Parah Ukuran 4 x 120 M	Perum Rengganis Blok 7A RT 37, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
575	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan yang Rusak dan Berlubang ukuran 4 x 150 M	Jl. MT Haryono Gg Sampoerna RT 54, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
576	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan yang Rusak Ukuran 2 x 80 Meter	Jl. Prona 3 RT 54, Kota Balikpapan	80 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
577	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan lingkungan yang Rusak dan Sempit ukuran 2,5 x 75 M	RT 41, Kota Balikpapan	75 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
578	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan yang Rusak ukuran 2 x 200 M	Jl. Marsma R Iswahyudi Gg Abbas Hani RT 10, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
579	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan yang Rusak Parah ukuran 2,5 x 150 M	Gang PLN Blok A RT 38, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
580	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Pembangunan Drainase lingkungan yang masih alami ukuran 1 x 70 M	Jl. Prona 3 Gg Ibaduhrahman RT 17, Kota Balikpapan	70 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
581	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan Yang Rusak ukuran 2 x 80 M	Gg Mufakat 1 RT 3, Kota Balikpapan	80 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
582	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan yang Rusak Parah Ukuran 4 x 120 M	Gg Polda 1 RT 48, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
583	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan Yang Rusak Parah ukuran 3 x 150 M	Gg Wiyata RT 22, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
584	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Pembangunan Drainase Lingkungan yang Masih Alami ukuran 1,5 x 150 M	Jl. Malioboro RT 37, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
585	Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	Peningkatan Jalan Poros yang Rusak dan Berlubang ukuran 7 x 160 Meter	RT 48, Kota Balikpapan	160 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
586	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Rusak Jalan Lingkungan	Rt 21, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
587	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Rusak Jalan Lingkungan	Jalan Rt 36 Gunung Samarinda Baru, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
588	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Rusak Jalan Lingkungan	Rt 48, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
589	Peningkatan/Perkerasan/semeni	Rusak Jalan Lingkungan	Rt 50, Kota	150 Meter	DINAS PEKERJAAN

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)		Balikpapan		UMUM
590	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Rusak Jalan Lingkungan	Rt 45, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
591	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Rusak Jalan Lingkungan	Jalan Rt 32, Kota Balikpapan	130 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
592	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Perbaikkan Parit	Parit RT 32, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
593	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Perbaikkan Parit	Parit Rt 23, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
594	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Rusak Jalan Lingkungan	Jalan Rt 26, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
595	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Rusak Jalan Lingkungan	Jalan Rt 35, Kota Balikpapan	130 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
596	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Rusak Jalan Lingkungan	Jalan Rt 1, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
597	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Rusak Jalan Lingkungan	Jalan Rt 2, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
598	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Rusak Jalan Lingkungan	Jalan Rt 4, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
599	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Rusak jalan Lingkungan	Jalan Rt 5, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
600	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Rusak Jalan Lingkungan	Jalan Rt 17, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
601	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Rusak jalan Lingkungan	Jalan Rt 19, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
602	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Rusak Jalan Lingkungan	Jalan Rt 21, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
603	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Rusak Jalan Lingkungan	Jalan Rt 36, Kota Balikpapan	130 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
604	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Rusak Jalan Lingkungan	Jalan Rt 40, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
605	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Rusak Jalan Lingkungan	Jalan Rt 48, Kota Balikpapan	140 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
606	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Rusak Jalan Lingkungan	Jalan Rt 63, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
607	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Rusak Jalan Lingkungan	Jalan Rt 37, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
608	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Rusak Jalan lingkungan	Jalan Rt 33, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
609	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Rusak Jalan Lingkungan	Jalan Rt 35, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
610	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Rusak Jalan Lingkungan	Jalan Rt 37, Kota Balikpapan	140 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
611	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Rusak Jalan Lingkungan	Jalan Rt 38, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
612	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Rusak Jalan Lingkungan	Jalan Rt 44, Kota Balikpapan	130 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
613	Peningkatan/Perkerasan/semeni	Rusak Jalan Lingkungan	Jalan Rt 52, Kota	140 Meter	DINAS PEKERJAAN

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)		Balikpapan		UMUM
614	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Rusak Parit Lingkungan	Parit Rt 33, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
615	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Rusak Jalan Lingkungan	Jalan Rt 17, Kota Balikpapan	130 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
616	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Rusak Parit Lingkungan	Parit Rt 29, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
617	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.10, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
618	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir (Panjang = 150 Meter ; Lebar dan Tinggi 2 Meter)	RT.40, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
619	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.15, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
620	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.05, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
621	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.22, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
622	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.23, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
623	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.29, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
624	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.02, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
625	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan P= 75 Meter ; L= 120 Cm	Gang Anggrek RT.43, Kota Balikpapan	75 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
626	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir P= 28.2 Meter ; L= 2.1 Meter	RT.58, Kota Balikpapan	28.2 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
627	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.19, Kota Balikpapan	220 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
628	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir Panjang= 70 Meter ; Lebar= 1 Meter ; Tinggi = 1 Meter	Jln. Jendral Ahmad Yani RT.04, Kota Balikpapan	70 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
629	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.35, Kota Balikpapan	37 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
630	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.35, Kota Balikpapan	286 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
631	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.57, Kota Balikpapan	220 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
632	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.86, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
633	Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.11, Kota Balikpapan	82 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
634	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.08, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
635	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Gereja Toraja RT.64, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
636	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Bantuan Dana Perbaikan Keramik Lantai dan Dinding Luas = 346 Meter Persegi	Gereja Beth-el Tabernakel Jln. Martadinata No.39 RT.27, Kota Balikpapan	346 Meter Persegi	SEKRETARIAT DAERAH
637	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Bantuan Dana Penambahan Ruang Pastori Luas = 180 Meter Persegi	GEREJA PANTEKOSTA Jln. D.I Panjaitan Nomor 2 RT.47, Kota Balikpapan	180 Meter Persegi	SEKRETARIAT DAERAH
638	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Pembangunan Kantor dan Pastori Gereja Luas = 353.50 Meter Persegi	Gereja Kasih Karunia Indonesia Jln. A. Yani No.16 RT.09, Kota Balikpapan	353.5 Meter Persegi	SEKRETARIAT DAERAH
639	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Bantuan Renovasi Rumah Ibadah Luas = 562 Meter Persegi	GEREJA BETHEL INJIL SEPENUH "SANGKAKALA" Jln. Mayjend Sutoyo No.05 RT.01 Gunung Malang, Kota Balikpapan	562 Meter Persegi	SEKRETARIAT DAERAH
640	Hibah	PERMOHONAN DANA	GPIB Jln. KOL.	971.11 Meter	SEKRETARIAT

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	BANTUAN LUAS = 971.11 METER PESEGI	SYARIFUDDIN YOES Gg. DUATAN B. SAKAI NO.83 RT.45, Kota Balikpapan	Persegi	DAERAH
641	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	BANTUAN DANA PEMBANGUNAN RUMAH PENDETA LUAS = 450 METER PERSEGI	GEREJA TORAJA Jln. LETJEN S.PARMAN RT.29, Kota Balikpapan	450 Meter Persegi	SEKRETARIAT DAERAH
642	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD	Kondisi Perpustakaan Rusak Berad dan Rawan Rubuh	SD 012 Jln. Sulawesi No.37 RT.37, Kota Balikpapan	1 RKB	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
643	Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Ruang Kelas SD Renovasi Gedung SD yang Sudah Tidak Layak Pakai agar berfungsi kembali mengingat ruang belajar tidak cukup	SD Kristen GPIB Jln Letjend Suprapto No.23, Kota Balikpapan	3 RKB	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
644	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.15, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
645	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT.16, Kota Balikpapan	400 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
646	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Apabila Hujan Terjadi Penggenangan Air sehingga membuat Permukaan Jalan Becek dan Semakin Rusak	RT.59, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
647	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Apabila Hujan Terjadi Penggenangan Air sehingga membuat Permukaan Jalan Becek dan Semakin Rusak	RT.62, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
648	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Apabila Hujan Terjadi Penggenangan Air sehingga membuat Permukaan Jalan Becek dan Semakin Rusak	RT.49, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
649	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Apabila Hujan terjadi Penggenangan Air Sehingga membuat Permukaan Jalan Becek dan Semakin Rusak	RT.56, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
650	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Apabila Hujan Terjadi Penggenangan Air sehingga membuat Permukaan Jalan Becek dan Semakin Rusak	RT.30, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
651	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Apabila Hujan Terjadi Penggenangan Air sehingga membuat Permukaan Jalan Becek dan Semakin Rusak	RT.25, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
652	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Apabila Hujan Terjadi Penggenangan Air sehingga membuat Permukaan Jalan Becek dan Semakin Rusak	RT.50, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
653	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Apabila Hujan Terjadi Penggenangan Air sehingga membuat Permukaan Jalan Becek dan Semakin Rusak	RT.14, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
654	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Apabila Hujan Terjadi Penggenangan Air sehingga membuat Permukaan Jalan Becek dan Semakin Rusak	RT.47, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
655	Pembangunan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT.47, Kota Balikpapan	6 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
656	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Apabila Hujan Terjadi Penggenangan Air sehingga membuat Permukaan Jalan Becek dan Semakin Rusak	RT.18, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
657	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	TERJADI GENANGAN AIR DAN RAWAN BANJIR	JL. HUTAN KOTA RT. 17, Kota Balikpapan	275 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
658	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	JL. HUTAN KOTA V RT. 17, Kota Balikpapan	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
659	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	JL. GAWALISI RT. 48, Kota Balikpapan	160 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
660	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERJADI GENANGAN AIR DAN RAWAN KECELAKAAN	JALAN DI ANTARA RT. 05 DAN RT. 19, Kota Balikpapan	150 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
661	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERJADI GENANGAN AIR DAN RAWAN KECELAKAAN	JL. DANAU SENTANI AREA 1 RT. 18 PONDOK KARYA AGUNG, Kota	78 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
			Balikpapan		
662	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan rusak dan berlubang	RT. 19 Balikpapan Baru, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
663	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak, berlubang dan licin	RT. 52 Kelurahan Sepinggan, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
664	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak dan berlubang, rawan kecelakaan	Jl. Wijaya 6, Kota Balikpapan	180 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
665	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan rusak, dan berlubang-lubang	Jl. Puncak Jaya Poros RT. 66 Her 2, Kota Balikpapan	300 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
666	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan rusak dan berlubang, membahayakan warga pengguna jalan	Lingkungan RT.40 Sepinggan, Kota Balikpapan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
667	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan sudah rusak dan akses utama warga ke Masjid	Jl. Merak RT. 43 BDS, Kota Balikpapan	120 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
668	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan masih tanah dan becek	Gang Wings Air RT.45 Sungainangka, Kota Balikpapan	110 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
669	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalannya rusak dan berlubang-lubang	Jl. Lemon RT. 58 Sepinggan, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
670	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan masih tanah dan licin saat hujan	RT. 42 BDS, Kota Balikpapan	110 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
671	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 69, Kota Balikpapan	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
672	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 68 GG. MIFTAHUL HUDA, Kota Balikpapan	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
673	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 32 JL. MERANTI ETAM, Kota Balikpapan	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
674	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 28 GG. DAHLIA, Kota Balikpapan	150 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
675	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	JL. SULTAN HASANUDDIN RT. 39, Kota Balikpapan	150 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
676	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	JL. SEPAKU RT. 02, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
677	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	JL. PANDAN SARI RT. 18, Kota Balikpapan	150 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
678	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	JL PANDAN SARI RT. 20, Kota Balikpapan	110 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
679	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	JL. KARANG ANYAR RT. 59, Kota Balikpapan	120 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
680	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	JL. KARANG ANYAR RT. 61, Kota Balikpapan	175 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
681	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	JL. GUNUNG POLISI RT. 51, Kota Balikpapan	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
682	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	JL. SALOK BARU RT. 08, Kota Balikpapan	150 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
683	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	JL. SALOK BARU GG. SUGIO RT. 15, Kota Balikpapan	150 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
684	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	JL.SULTAN HASANUDDIN RT 12, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
685	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	JL. SIDODADI RT 43, Kota Balikpapan	130 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
686	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	JL. SIDODADI RT 45, Kota Balikpapan	250 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
687	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	JL. SIDOMULYO RT. 02, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
688	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 28 JL. PANDAN ARUM, Kota Balikpapan	220 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
689	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 03 JL. MANUNTUNG, Kota Balikpapan	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
690	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 04 JL. SULTAN HASANUDDIN, Kota Balikpapan	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
691	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN	RT. 05 JL. RA KARTINI, Kota	115 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	< 4 meter)	KECELAKAAN	Balikpapan		
692	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 06 JL. RUHUI RAHAYU, Kota Balikpapan	175 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
693	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 07 JL. KENANGAN, Kota Balikpapan	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
694	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 10 JL. SULTAN HASANUDDIN, Kota Balikpapan	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
695	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan rusak	Gang Pos, Jalan P. Antasari Rt 68, Kota Balikpapan	30 Meter Kubik	DINAS PEKERJAAN UMUM
696	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan rusak	jalan Pangeran Antasari Rt 67, Kota Balikpapan	75 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
697	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan rusak	jalan Pangeran Antasari Rt 69 gang satria 1 dan satria 3, Kota Balikpapan	150 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
698	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	parit rusak	jalan tirtayasa rt 58, Kota Balikpapan	50 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
699	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan rusak	Rt 79, Kota Balikpapan	100 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
700	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi jalan	Rt 51, Kota Balikpapan	200 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
701	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	peningkatan Semenisasi jalan Lingkungan	RT.17 Jl.Hutan Kota 5 , Kel. Sepinggan, Kota Balikpapan	75 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
702	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Jalan Lingkungan Semenisasi	RT.12 Blok BAA POKA Sungai Nangka, Kota Balikpapan	75 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
703	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Semenisasi	RT. 24 Sepinggan Raya, Kota Balikpapan	75 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
704	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	peningkatan jalan Lingkungan untuk Semenisasi	RT. 07 Mesjid Al Taubah Gn. Bakaran, Kota Balikpapan	75 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
705	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Semenisasi	RT. 17 Blok RB 80-90 POKA, Kota Balikpapan	75 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
706	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk semenisasi	RT. 41 Blok K Perum Pesona Alam, Kota Balikpapan	75 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
707	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan jalan Lingkuan , lanjutan untuk semenisasi	RT. 35 Blok Kakatua III & Kakatua IV BDS 2, Kota Balikpapan	75 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
708	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Semenisasi	RT. 05 Damai Bahagia, Kota Balikpapan	75 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
709	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Pengingkatan Jalan Lingkungan untuk Semenisasi	RT. 70 Jl. Mukmin Faisal Sepinggan, Kota Balikpapan	75 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
710	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan jalan Lingkungan untuk Semenisasi	RT. 14 Blok TA POKA, Kota Balikpapan	75 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
711	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	peningkatan Jalan lingkungan untuk Disemenisasi	RT.62 Jl. Merdeka 3 Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	75 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
712	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan jalan Lingkungan Untuk Semenisasi	RT.01 Lorong I & II Gn Bakaran Sugai Nangka, Kota Balikpapan	75 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
713	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Lingkungan Rusak	Jl. Bukit Niaga RT.14, Kota Balikpapan	500 M2	DINAS PEKERJAAN UMUM
714	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Drainase rusak	Jl. Markoni Dalam RT.40, Kota Balikpapan	30 M2	DINAS PEKERJAAN UMUM
715	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Siring lama dari kayu sudah mulai rusak	Jl. Mayjen Sutoyo Gang Sahabat I Rt.57, Kota Balikpapan	35 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM
716	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Siring belum ada di samping jalan	Jl. Markoni Atas RT.47, Kota Balikpapan	35 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM
717	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Drinase belum ada sebagian dan sudah rusak	Jl. Jabal Rahmah IV RT.42, Kota Balikpapan	30 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
718	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Drainase rusak dan minta dibuatkan penutup	Jl. Gajah Mada RT.26, Kota Balikpapan	50 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
719	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Drainase belum ada sebagian dan kecil	Jl. Siaga Dalam RT.08, Kota Balikpapan	30 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
720	Peningkatan/Perkerasan/semeni	Jalan Rusak	Jl. Siaga Dalam Gg.	500 M2	DINAS PEKERJAAN

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	sasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)		Masjid RT.17, Kota Balikpapan		UMUM
721	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan/Gang Rusak	Jl. Agus Salim II Gg. Kamboja RT.32, Kota Balikpapan	500 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
722	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Drainase rusak	Jl. Sumbawa RT.19 Kel. Prapatan, Kota Balikpapan	50 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
723	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Material jalan masih berupa tanah	RT. 71, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
724	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	RT. 75, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
725	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	RT. 77, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
726	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	RT. 78, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
727	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan butuh pengerasan dengan beton	RT. 79, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
728	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan butuh pengerasan kembali dengan beton karen kondisi jalan rusak	RT. 81, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
729	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan mulai mengalami kerusakan dan butuh pelapisan kembali dengan beton	RT. 94, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
730	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa latrit	RT. 48, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
731	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jalan berupa tanah	RT. 47, Kota Balikpapan	500 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
732	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	RT. 27, Kota Balikpapan	300 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
733	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Warga butuh pembangunan drainase agar aliran air tidak merusak jalan	RT. 49, Kota Balikpapan	300 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
734	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Timur (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkannya penerangan jalan di lingkungan warga	RT. 77, Kota Balikpapan	13 unit	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
735	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	Jl. Persatuan Gg. Damai 3 RT. 30, Kota Balikpapan	150 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
736	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan warga masih berupa tanah	RT. 39, Kota Balikpapan	150 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
737	(Dana Kelurahan) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur	Belum tersedianya Posyandu untuk warga	RT. 75, Kota Balikpapan	1 unit	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
738	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	RT. 07, Kota Balikpapan	240 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
739	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan mulai mengalami perusakan	RT. 15, Kota Balikpapan	150 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
740	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Drainase masih bersifat alami	RT. 88, Kota Balikpapan	150 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
741	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa latrit	RT. 39, Kota Balikpapan	300 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
742	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan mengalami kerusakan	RT. 52, Kota Balikpapan	200 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
743	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Pembangunan drainase untuk melanjutkan drainase yang sudah ada	RT. 45, Kota Balikpapan	150 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
744	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	RT. 5 Lamaru, Kota Balikpapan	300 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
745	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	RT. 25, Kota Balikpapan	300 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
746	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	RT. 34, Kota Balikpapan	200 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
747	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan butuh pelapisan ulang dengan beton	RT. 47, Kota Balikpapan	200 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
748	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa latrit	RT. 43, Kota Balikpapan	200 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
749	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan masih tanah/bebatuan dan sering terjadi banjir	JL.BUKIT PERMATA SAKINAH RT.64, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
750	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak dan akses jalan tidak memungkinkan	Jl.Mulawarman RT.04, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
751	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jalan Berlubang dan masih tanah	Gg.Aman RT.24, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
752	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Berlubang	Jl.Mulawarman RT.19, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
753	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan berlubang dan rusak	JL.Tengiri II RT.23, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
754	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan Rusak	Gg.Tani I RT.01, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
755	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Berlubang dan rusak	Jl.Mulawarman RT.17, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
756	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	perlu dilakukan perkerasan jalan karena jalan masih tanah	Gg.Mushola Slok Lay RT.09, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
757	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	perlu dilakukan perkerasan jalan dikarenakan jalan masih tanah dan bebatuan	JL.AL AMIN RT.97, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
758	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perlu dilakukan semenisasi jalan di karenakan jalan masih bebatuan	Gg.paus RT.07, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
759	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Kondisi Drainase lingkungan sudah rusak	Jl. Letjend Suprapto RT 06, Kota Balikpapan	250 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
760	Pembangunan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jembatan sudah mulai rapuh dan rawan kecelakaan	Jl Wolter mongonsidi RT 48, Kota Balikpapan	250 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
761	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Semenisasi Drainase dan Tutup drainase lingkungan	RT 51, Kota Balikpapan	50 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
762	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Peningkatan dan Perbaikan jalan lingkungan	RT 03, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
763	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan saluran drainase lingkungan	RT 11, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
764	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan Saluran Drainase lingkungan	RT 04, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
765	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan saluran drainase lingkungan	RT 07, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
766	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi peningkatan dan perbaikan jalan lingkungan	RT 12, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
767	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi peningkatan dan perbaikan jalan lingkungan	RT 14, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
768	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi peningkatan dan perbaikan jalan lingkungan	RT 15, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
769	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	semenisasi peningkatan dan perbaikan jalan lingkungan	RT 21, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
770	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	perbaikan jalan dan jembatan serta penguatan tiang penyangga	RT 17, Kota Balikpapan	135 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
771	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	perbaikan saluran drainase lingkungan	RT 11, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
772	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	perbaikan Siring jalan lingkungan	RT 18, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
773	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi peningkatan dan perbaikan jalan lingkungan	RT 18, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
774	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Pembangunan siring jalan lingkungan	RT 48, Kota Balikpapan	20 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
775	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Pembangunan siring lingkungan	RT 49, Kota Balikpapan	20 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
776	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Pembangunan dan perbaikan saluran Drainase lingkungan	RT 49, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
777	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	Pembangunan Sarana Lapangan olahraga SMP Negeri 9	RT 12, Kota Balikpapan	200 meter persegi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
778	Pembangunan Kantin Sekolah SMP	Kantin SMP Negeri 9 tidak memadai	RT 12, Kota Balikpapan	30 meter persegi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
779	Penambahan Ruang Kelas Baru SMP	Perlu penambahan ruang Kelas Baru	RT 12, Kota Balikpapan	100 meter persegi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
780	Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula SMP	Perlu dilakukan pemeliharaan terhadap Aula SMP Negeri 9	RT 12, Kota Balikpapan	200 meter persegi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
781	Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	Akses jalan fungsional perlu dilakukan perbaikan	RT 13, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
782	(Dana Kelurahan) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	Pembangunan Posyandu untuk Fasilitas Kesehatan Masyarakat	RT 26, Kota Balikpapan	20 meter persegi	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
783	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan Saluran Drainase Lingkunga	RT 28, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
784	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi peningkatan dan perbaikan jalan lingkungan	RT 28, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
785	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan Saluran Drainase Lingkungan	RT 25, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
786	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Peningkatan dan Perbaikan Jalan Lingkungan	RT 23, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
787	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan Saluran Drainase Lingkungan	RT 23, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
788	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Peningkatan dan Perbaikan Jalan Lingkungan	RT 22, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
789	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Pembangunan Siring jalan lingkungan	RT 26, Kota Balikpapan	20 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
790	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan Saluran Drainase Lingkungan	RT 35, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
791	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Perbaikan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	RT 36, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
792	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Perbaikan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	RT 39, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
793	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan Saluran Drainase Lingkungan	RT 39, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
794	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Perbaikan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	RT 45, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
795	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Perbaikan dan Peningkatan Jalan Laingkungan	RT 47, Kota Balikpapan	300 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
796	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan Saluran Drainase Lingkungan	RT 47, Kota Balikpapan	300 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
797	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan Saluran Drainase Lingkungan	RT 48, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
798	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi perbaikan dan peningkatan Jalan Lingkungan	RT 48, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
799	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	Perbaikan Posyandu	RT 49, Kota Balikpapan	120 meter2	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
800	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Perbaikan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	RT 53, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
801	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Perbaikan dan Peningkatan dan Perbaikan Jalan Lingkungan	RT 56, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
802	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan Saluran Drainase Lingkungan	RT 57, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
803	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan Saluran Drainase Lingkungan	RT 59, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
804	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Perbaikan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	RT 61, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
805	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan Saluran Drainase Lingkungan	RT 61, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
806	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Perbaikan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	RT 63, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
807	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Perbaikan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	RT 51, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
808	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Perbaikan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	RT 42, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
809	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Perbaikan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	RT 43, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
810	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	Perbaikan Posyandu	RT 33, Kota Balikpapan	30 meter2	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
811	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Perbaikan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	RT 44, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
812	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Perbaikan dan Peninggian Jembatan	RT 59, Kota Balikpapan	10 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
813	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Perbaikan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	RT 62, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
814	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Perbaikan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	RT 5, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
815	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Perbaikan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	RT 6, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
816	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Perbaikan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	RT 13, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
817	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Perbaikan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	RT 14, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
818	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Perbaikan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	RT 03, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
819	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan Saluran Drainase dan Tutup Drainase	RT 45, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
820	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan Saluran Drainase Lingkungan	RT 52, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
821	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Perbaikan dan Peningkatan Jalan Nelayan	RT 03, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
822	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan Saluran Drainase Lingkungan	RT 60, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
823	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Perbaikan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	RT 12, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
824	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Terjadi genangan Air dan rawan banjir	RT 01, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
825	Pembangunan siring/turap pada jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Mengakibatkan terjadi akses jalan amblas dan putus apabila badan jalan semakin hari semakin terjadi pergerakan tanah	RT 02, Kota Balikpapan	26 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
826	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Terbatasnya akses jalan dan rawan kecelakaan	RT 03, Kota Balikpapan	110 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
827	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Menganggu kenyamanan dan membahayakan pengguna jalan	RT 06, Kota Balikpapan	80 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
828	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi genangan Air dan rawan banjir	RT 05, Kota Balikpapan	80 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
829	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Terjadi genangan Air dan rawan banjir	RT 07, Kota Balikpapan	80 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
830	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Terjadi genangan Air dan rawan banjir	RT 13, Kota Balikpapan	210 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
831	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Terjadi genangan Air dan rawan banjir	RT 15, Kota Balikpapan	190 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
832	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Terbatasnya akses jalan dan membahayakan pengguna jalan serta rawan kecelakaan	RT 16, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
833	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Menganggu kenyamanan dan membahayakan pengguna jalan	RT 26, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
834	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Menganggu kenyamanan dan membahayakan pengguna jalan	RT 27, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
835	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Menganggu kenyamanan dan membahayakan pengguna jalan	RT 28, Kota Balikpapan	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
836	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Terbatasnya akses jalan dan membahayakan pengguna jalan serta rawan kecelakaan	RT 41, Kota Balikpapan	42.5 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
837	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Tervatasnya akses jalan dan membahayakan pengguna jalan serta rawan kecelakaan	RT 54, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
838	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Terjadi genangan Air, Penyumbatan dan Rawan banjir	RT 57, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
839	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Menganggu kenyamanan dan membahayakan pengguna jalan	RT 57, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
840	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Badan jalan yang retak dan berlubang yang menganggu kenyamanan dan membahayakan pengguna jalan	RT 33, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
841	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Draenasi mengalami pengikisan dibagian dasarnya , yang akan mengakibatkan runtuhnya dinding draenase	RT 37, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
842	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Belum di semenisasi panjang jalan 100m x Lebar 3m	RT.35, Kota Balikpapan	300 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
843	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	belum disemenisasi panjang jalan 80m x Lebar 3	RT.55, Kota Balikpapan	240 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
844	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	belum di semenisasi panjang jalan 150m x Lebar 3m	RT.32, Kota Balikpapan	450 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
845	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	belum di semenisasi panjang jalan 150 m x Lebar 4m	RT,37, Kota Balikpapan	600 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
846	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Belum di Semenisasi panjang jalan 80m x Lebar 3m	RT.40, Kota Balikpapan	240 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
847	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Belum di Semenisasi panjang jalan 150m x Lebar 3m	RT.66, Kota Balikpapan	450 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
848	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	belum di Semenisasi panjang jalan 100m x Lebar 3m	RT.10, Kota Balikpapan	300 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
849	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Belum di Semenisasi panjang jalan 100 m x Lebar 3m	RT.49, Kota Balikpapan	300 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
850	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Belum di Semenisasi panjang jalan 150m x Lebar 3m	RT.30, Kota Balikpapan	450 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
851	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Belum di Semenisasi panjang jalan 150m x Lebar 3m	RT.80, Kota Balikpapan	450 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
852	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Belum di Semenisasi panjang jalan 120m x Lebar 4m	RT.29, Kota Balikpapan	480 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

5.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun berdasarkan hasil analisa keuangan dengan mempertimbangkan regulasi dan kondisi terkini perekonomian di Kota Balikpapan. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif belanja Daerah disajikan dalam tabel dibawah ini tentang Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023.

Tabel 5. 3 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2023

KODE	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	584.000.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	403.399.992.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM	306.499.993.102
1.04.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	19.499.999.815
1.05.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	33.514.000.000
1.05.0.00.0.00.02.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	29.877.257.980
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	13.992.941.078
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETENAGAKERJAAN	10.000.000.000
2.08.2.13.2.14.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	17.861.837.000
2.10.1.03.0.00.01.0000	DINAS PERTAHANAN DAN PENATAAN RUANG	123.500.000.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	118.499.764.056
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.879.873.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	78.200.000.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17.600.000.000
2.17.3.31.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL,MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	15.799.999.548
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	16.680.000.000
2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	38.000.000.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	9.999.999.789
3.27.3.25.2.09.01.0000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	21.649.930.671
3.30.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERDAGANGAN	29.499.961.400
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	188.493.552.050
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	198.070.220.721

KODE	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	14.756.734.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	41.799.983.616
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	81.299.394.450
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	19.786.913.450
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	13.720.729.730
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	20.092.928.752
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	21.211.828.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	19.791.778.111
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	22.393.775.756
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	24.865.138.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	19.375.285.350
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19.293.882.340
JUMLAH		2.607.907.693.765

5.4 Rencana Program

Rencana kerja dan pendanaan daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2023, disusun dalam rangka memenuhi sasaran pembangunan tahun ke dua RPJMD Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2021 Tentang RPJMD Tahun 2021-2026 dan arah kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional. Pada tabel 5.2 dan tabel 5.3 dibawah ini menunjukkan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan serta indikasi Rencana Program Penunjang yang disertai dengan kebutunan Pendanaan Kota Balikpapan.

Tabel 5. 4 Indikasi Rencana Kebutuhan Pendanaan Program Prioritas Kota Balikpapan Tahun 2023

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						153.108.788.427								333.118.283.994	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	86,18 Nilai	4.746.775.427						86,18 Nilai	4.620.056.680	
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	60.000.000						1 Dokumen	177.000.000	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	254 Dokumen							254 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		Dokumen	165 Dokumen							165 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		Dokumen	165 Dokumen							165 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		Dokumen	254 Dokumen							254 Dokumen		
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		Dokumen	254 Dokumen							254 Dokumen		
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	21 Laporan							21 Laporan		
1	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22 Laporan	60.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	22 Laporan	177.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	692.250.000						4 Dokumen	644.535.859	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen							13 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen							12 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen							4 Dokumen		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan		Laporan	12 Laporan							12 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Perbulan		Orang/Perbulan	2038 Orang/Perbulan							2038 Orang/Perbulan		
1	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				13 Dokumen	692.250.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	13 Dokumen	644.535.859	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1.930.200.000						1 Dokumen	1.904.554.281	
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	500 Laporan							500 Laporan		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	80 Paket							80 Paket		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket	4 Paket							4 Paket		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	12 Paket							12 Paket		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	4 Paket							4 Paket		
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	40.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	12 Paket	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	200.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	4 Paket	367.514.281	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				80 Paket	685.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	80 Paket	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	280.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	4 Paket	167.040.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-				1 Dokumen	25.200.000	Kota Balikpapan,	Dana Transfer		Meningkatkan Pemerataan	0	1 Dokumen	30.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Perundang-undangan	Undangan yang Disediakan						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	400.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	500 Laporan	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Paket	300.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Paket	550.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	3 Laporan	969.049.722						3 Laporan	973.872.540	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	2 Laporan							2 Laporan		
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	344.049.722	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	3 Laporan	461.872.540	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	625.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2 Laporan	512.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	3 Unit	1.095.275.705						3 Unit	920.094.000	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Unit	67 Unit							67 Unit		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Unit	7 Unit							7 Unit		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit							1 Unit		
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				67 Kendaraan	555.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Barang Milik Daerah	67 Kendaraan	423.094.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Peralatan	340.275.705	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Barang Milik Daerah	7 Peralatan	304.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kelurahan			unggul, sehat dan berdaya saing				
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Gedung	200.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Barang Milik Daerah	3 Gedung	193.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Gedung	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Barang Milik Daerah	1 Gedung	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	147.112.013.000						87.03 %	326.949.099.511	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket		Paket	1000 Paket	46.912.328.050						1000 Paket	152.908.695.180	
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		Orang	3310 Orang							3310 Orang		
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit		Unit	38877 Unit							38877 Unit		
						Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket		Paket	300 Paket							300 Paket		
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang		Ruang	153 Ruang							153 Ruang		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta		Peserta	200 Peserta							200 Peserta		
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Unit		Unit	214 Unit							214 Unit		
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang		Ruang	1742 Ruang							1742 Ruang		
						Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		Ruang	1728 Ruang							1728 Ruang		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Objek		Objek	7 Objek							7 Objek		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang		Ruang	151 Ruang							151 Ruang		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit		Unit	214 Unit							214 Unit		
						Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	SatPendidikan		SatPendidikan	216 SatPendidikan							216 SatPendidikan		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	SatPendidikan		SatPendidikan	216 SatPendidikan							216 SatPendidikan		
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Orang		Orang	7 Orang							7 Orang		
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit		Unit	214 Unit							214 Unit		
						Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	SatPendidikan		SatPendidikan	213 SatPendidikan							213 SatPendidikan		
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	SatPendidikan		SatPendidikan	184 SatPendidikan							184 SatPendidikan		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti	Peserta		Peserta	21549 Peserta							21549 Peserta		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik														
						Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang		Orang	639 Orang							639 Orang		
1	1	2	2.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1742 Ruang	200.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1742 Ruang	6.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				151 Ruang	200.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	151 Ruang	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				153 Ruang	200.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	153 Ruang	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				214 Unit	200.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	214 Unit	1.820.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				1728 Ruang	200.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1728 Ruang	4.600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1000 Paket	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1000 Paket	2.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				300 Paket	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	300 Paket	4.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				38877 Unit	10.221.400.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	38877 Unit	12.933.360.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				200 Peserta Didik	90.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya	0	200 Peserta Didik	240.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Semua Kelurahan	Umum		Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				216 Satuan Pendidikan	665.475.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	216 Satuan Pendidikan	665.475.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				216 Satuan Pendidikan	137.812.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	216 Satuan Pendidikan	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				21549 Peserta Didik	517.700.250	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	21549 Peserta Didik	1.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				3310 Orang	5.970.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	3310 Orang	9.758.900.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				213 Satuan Pendidikan	488.740.800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	213 Satuan Pendidikan	1.200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				184 Satuan Pendidikan	27.821.200.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	184 Satuan Pendidikan	105.440.960.180	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				639 Orang	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	639 Orang	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		Ruang	140 Ruang	74.976.540.950						140 Ruang	134.036.587.840	
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket		Paket	1000 Paket							1000 Paket		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		Orang	1679 Orang							1679 Orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket		Paket	300 Paket							300 Paket		
						Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket		Paket	300 Paket							300 Paket		
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang		Ruang	71 Ruang							71 Ruang		
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		Ruang	71 Ruang							71 Ruang		
						Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta		Peserta	200 Peserta							200 Peserta		
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta		Peserta	21806 Peserta							21806 Peserta		
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang		Ruang	71 Ruang							71 Ruang		
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang		Ruang	1105 Ruang							1105 Ruang		
						Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit		Unit	1105 Unit							1105 Unit		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang		Ruang	140 Ruang							140 Ruang		
						Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang		Ruang	17 Ruang							17 Ruang		
						Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi	Ruang		Ruang	17 Ruang							17 Ruang		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang		Ruang	66 Ruang							66 Ruang		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang		Ruang	1105 Ruang							1105 Ruang		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		Ruang	66 Ruang							66 Ruang		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit		Unit	91 Unit							91 Unit		
						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Unit		Unit	91 Unit							91 Unit		
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit		Unit	93 Unit							93 Unit		
						Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	SatPendidikan		SatPendidikan	91 SatPendidikan							91 SatPendidikan		
						Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satpendidikan		Satpendidikan	74 Satpendidikan							74 Satpendidikan		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta		Peserta	16707 Peserta							16707 Peserta		
						Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang		Orang	273 Orang							273 Orang		
1	1	2	2.02	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 sekolah	28.000.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2 sekolah	29.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	800.000.000	Kota Balikpapan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana		Meningkatkan Pemerataan Kualitas	0	2 Ruang	6.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum		Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Sekolah	500.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	5 Sekolah	5.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Sekolah	500.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	4 Sekolah	3.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				121 Set	200.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	121 Set	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				38067 Paket	9.396.500.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	38067 Paket	11.689.290.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				200 Peserta Didik	30.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	200 Peserta Didik	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				21806 Peserta Didik	403.264.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	21806 Peserta Didik	475.264.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				91 Satuan Pendidikan	170.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	91 Satuan Pendidikan	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				16707 Peserta Didik	500.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	16707 Peserta Didik	550.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir	Jumlah Pendidik dan Tenaga				1679 Orang		Kota	Dana		Meningkatkan	0	1679 Orang		DINAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					5.800.000.000	Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			7.500.900.000	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				91 Satuan Pendidikan	200.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	91 Satuan Pendidikan	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				74 Satuan Pendidikan	28.476.776.950	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	74 Satuan Pendidikan	69.171.133.840	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				273 Orang	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	273 Orang	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit		Unit	526 Unit	13.811.421.700						526 Unit	20.871.875.000	
						Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket		Paket	340 Paket							340 Paket		
						Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	SatPendidikan		SatPendidikan	556 SatPendidikan							556 SatPendidikan		
						Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	SatPendidikan		SatPendidikan	606 SatPendidikan							606 SatPendidikan		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		Orang	2096 Orang							2096 Orang		
						Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta		Peserta	11857 Peserta							11857 Peserta		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit		Unit	526 Unit							526 Unit		
						Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang		Orang	526 Orang							526 Orang		
1	1	2	2.03	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	200.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Unit	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03	5	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	400.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya	0	1 Unit	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Semua Kelurahan	Umum		Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
1	1	2	2.03	7	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				128 Paket	220.500.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	128 Paket	750.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				60 Satuan Pendidikan	110.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	60 Satuan Pendidikan	110.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1871 Orang	11.216.593.700	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1871 Orang	18.601.875.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				477 Satuan Pendidikan	560.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	477 Satuan Pendidikan	560.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				477 Satuan Pendidikan	1.054.328.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	477 Satuan Pendidikan	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				416 Orang	50.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	416 Orang	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit		Unit	98 Unit	11.411.722.300						98 Unit	19.131.941.491	
						Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket		Paket	2368 Paket							2368 Paket		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		Orang	2586 Orang							2586 Orang		
						Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket		Paket	10116 Paket							10116 Paket		
						Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta	Peserta		Peserta	4300 Peserta							4300 Peserta		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Didik													
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit		Unit	98 Unit							98 Unit		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	%		%	78.57 %							78.57 %		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit		Unit	102 Unit							102 Unit		
						Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	SatPendidikan		SatPendidikan	13 SatPendidikan							13 SatPendidikan		
						Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	SatPendidikan		SatPendidikan	98 SatPendidikan							98 SatPendidikan		
						Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Orang		Orang	50 Orang							50 Orang		
1	1	2	2.04	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				1 Unit	210.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Unit	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.04	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat				89 Unit	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	89 Unit	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.04	9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia				1072 Paket	1.000.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1072 Paket	3.525.210.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				4300 Peserta Didik	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	4300 Peserta Didik	3.877.931.491	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				20 Satuan Pendidikan	83.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	20 Satuan Pendidikan	118.150.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan				2600 Orang	10.002.722.300	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	0	2600 Orang	10.494.650.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Kompetensi dan Kualifikasi						Kelurahan			unggul, sehat dan berdaya saing				
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	116.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	116.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				20 Satuan Pendidikan							20 Satuan Pendidikan		
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	%		%	77.78 %	-						77.78 %	139.370.000	
1	1	3	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	-						11 Dokumen	139.370.000	
1	1	3	2.02	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun				11 Dokumen	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	11 Dokumen	139.370.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
															Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	%		%	91.45 %	1.250.000.000						91.45 %	1.170.674.387	
1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	1.250.000.000						2 Dokumen	1.170.674.387	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan		Laporan	2 Laporan							2 Laporan		
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				2 Dokumen	1.250.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2 Dokumen	1.170.674.387	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Izin (PAUD, SD, SMP)	%		%	99.03 %	-						99.03 %	239.083.416	
1	1	5	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen		Dokumen	132 Dokumen	-						132 Dokumen	108.030.680	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen		Dokumen	132 Dokumen							132 Dokumen		
1	1	5	2.01	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				132 Dokumen	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	132 Dokumen	108.030.680	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	5	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen		Dokumen	532 Dokumen	-						532 Dokumen	131.052.736	
						Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen		Dokumen	532 Dokumen							532 Dokumen		
1	1	5	2.02	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyaraka				132 Dokumen	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	132 Dokumen	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	5	2.02	3	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				535 Dokumen	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	535 Dokumen	81.052.736	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						341.454.624.573							345.898.179.513	
2	22	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	86,18 Nilai	339.134.624.573						86,18 Nilai	343.803.156.285	
2	22	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	339.134.624.573						4 Dokumen	343.803.156.285	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen							13 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen							12 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen							4 Dokumen		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan							12 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Perbulan		Orang/Perbulan	2038 Orang/Perbulan							2038 Orang/Perbulan		
2	22	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	339.134.624.573		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Orang/bulan	343.803.156.285	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	%		%	45 %	1.050.000.000						45 %	1.185.000.000	
2	22	2	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek		Objek	3 Objek	125.000.000						3 Objek	100.000.000	
						Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang		Orang	40 Orang							40 Orang		
2	22	2	2.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				3 Objek	65.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	3 Objek	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	2	2.01	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				40 Orang	60.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	40 Orang	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	2	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan		Laporan	2 Laporan	875.000.000						2 Laporan	1.035.000.000	
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek		Objek	220 Objek							220 Objek		
						Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat		Sertifikat	3 Sertifikat							3 Sertifikat		
2	22	2	2.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				220 Objek	875.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	220 Objek	1.035.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	2	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek		Objek	2 Objek	50.000.000						2 Objek	50.000.000	
						Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang		Orang	10 Orang							10 Orang		
2	22	2	2.03	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				15 Orang	50.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya	0	15 Orang	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
															saing				
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	%		%	27.36 %	220.000.000						27.36 %	292.141.111	
2	22	3	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga		Lembaga	5 Lembaga	220.000.000						5 Lembaga	292.141.111	
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang		Orang	100 Orang							100 Orang		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat		Sertifikat	10 Sertifikat							10 Sertifikat		
2	22	3	2.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				55 Orang	180.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	55 Orang	220.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	3	2.01	2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				40 Orang	40.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	40 Orang	72.141.111	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	4			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang diberdayakan	%		%	33.33 %	60.000.000						33.33 %	201.229.387	
2	22	4	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang		Orang	25 Orang	60.000.000						25 Orang	201.229.387	
2	22	4	2.01	1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				55 Orang	60.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	55 Orang	201.229.387	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentasase Cagara Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	%		%	95.59 %	990.000.000						95.59 %	416.652.730	
2	22	5	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek		Objek	130 Objek	80.000.000						130 Objek	130.652.730	
						Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek		Objek	2 Objek							2 Objek		
2	22	5	2.01	1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				2 Objek	30.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2 Objek	70.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	5	2.01	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	50.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2 Objek	60.652.730	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	5	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek		Objek	3 Objek	910.000.000						3 Objek	286.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek		Objek	130 Objek							130 Objek		
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek		Objek	66 Objek							66 Objek		
2	22	5	2.02	1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				129 Objek	760.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	129 Objek	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	5	2.02	3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				129 Objek	150.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	129 Objek	286.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.037.573.000							1.155.933.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	1.037.573.000						87.03 %	1.155.933.600	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	1.037.573.000						184 Satuan Pendidikan	1.155.933.600	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima gaji				31 Orang	1.037.573.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	31 Orang	1.155.933.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta				826 Siswa							826 Siswa		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						700.282.000							888.812.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	700.282.000						87.03 %	888.812.800	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	700.282.000						184 Satuan Pendidikan	888.812.800	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	700.282.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	888.812.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				695 Siswa							695 Siswa		
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				23 Orang							23 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						708.981.000							969.175.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	708.981.000						87.03 %	969.175.600	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	708.981.000						184 Satuan Pendidikan	969.175.600	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				617 Siswa	708.981.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	0	617 Siswa	969.175.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kelurahan			unggul, sehat dan berdaya saing				
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				26 Orang							26 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						818.878.000							995.825.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	818.878.000						87.03 %	995.825.600	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	818.878.000						184 Satuan Pendidikan	995.825.600	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	818.878.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	995.825.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				808 Siswa							808 Siswa		
						umlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				26 Orang							26 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						226.993.000							-	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	226.993.000						87.03 %	-	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	226.993.000						184 Satuan Pendidikan	-	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	226.993.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						483.537.000							568.884.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	483.537.000						87.03 %	568.884.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	483.537.000						184 Satuan Pendidikan	568.884.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				416 Siswa	483.537.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	416 Siswa	568.884.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				15 Orang							15 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						422.639.000							541.458.400	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	422.639.000						87.03 %	541.458.400	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	422.639.000						184 Satuan Pendidikan	541.458.400	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				343 Siswa	422.639.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat	0	343 Siswa	541.458.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Jumlah tenaga pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				14 Orang					dan berdaya saing		14 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						223.043.000							233.144.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	223.043.000						87.03 %	233.144.800	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	223.043.000						184 Satuan Pendidikan	233.144.800	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				73 Siswa	223.043.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	73 Siswa	233.144.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				8 Orang							8 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						894.827.000							1.125.108.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	894.827.000						87.03 %	1.125.108.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	894.827.000						184 Satuan Pendidikan	1.125.108.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				807 Siswa	894.827.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	807 Siswa	1.125.108.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						426.138.000							529.484.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	426.138.000						87.03 %	529.484.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	426.138.000						184 Satuan Pendidikan	529.484.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				336 Orang	426.138.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	336 Orang	529.484.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				15 Orang							15 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						426.738.000							530.084.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	426.738.000						87.03 %	530.084.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	426.738.000						184 Satuan Pendidikan	530.084.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operaional Sekolah pada Sekolah Dasar				336 Siswa	426.738.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	336 Siswa	530.084.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				15 Orang							15 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
											271.992.000							289.350.400	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	271.992.000						87.03 %	289.350.400	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	271.992.000						184 Satuan Pendidikan	289.350.400	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima gaji				9 Orang	271.992.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	9 Orang	289.350.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta				213 Siswa							213 Siswa		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						380.839.000							460.112.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	380.839.000						87.03 %	460.112.800	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	380.839.000						184 Satuan Pendidikan	460.112.800	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				272 Siswa	380.839.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	272 Siswa	460.112.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				13 Orang							13 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						883.576.000							903.400.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	883.576.000						87.03 %	903.400.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	883.576.000						184 Satuan Pendidikan	903.400.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				635 Siswa	883.576.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	635 Siswa	903.400.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				635 Siswa							635 Siswa		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						377.539.000							417.727.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	377.539.000						87.03 %	417.727.200	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	377.539.000						184 Satuan Pendidikan	417.727.200	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional pada Sekolah Dasar Negeri / Swasta				239 Siswa	377.539.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	239 Siswa	417.727.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				18 Orang							18 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						476.786.000							554.675.200	
1	1	2			PROGRAM	Rata-rata Angka Partisipasi	%		%	87.03 %							87.03 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Sekolah (APrS)					476.786.000							554.675.200	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	476.786.000						184 Satuan Pendidikan	554.675.200	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Yang Menerima Biaya Operasional pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				283 Siswa	476.786.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	283 Siswa	554.675.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				17 Orang							17 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						470.537.000							567.844.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	470.537.000						87.03 %	567.844.600	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	470.537.000						184 Satuan Pendidikan	567.844.600	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				373 Orang	470.537.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	373 Orang	567.844.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				16 Orang							16 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						248.143.000							502.462.900	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	248.143.000						87.03 %	502.462.900	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	248.143.000						184 Satuan Pendidikan	502.462.900	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				1 Siswa	248.143.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Siswa	502.462.900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						264.443.000							420.301.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	264.443.000						87.03 %	420.301.600	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	264.443.000						184 Satuan Pendidikan	420.301.600	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				247	264.443.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	247	420.301.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				11 Orang							11 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						896.576.000							1.051.956.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	896.576.000						87.03 %	1.051.956.800	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	896.576.000						184 Satuan Pendidikan	1.051.956.800	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				733 Siswa	896.576.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	733 Siswa	1.051.956.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				28 Orang							28 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						440.088.000							557.459.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	440.088.000						87.03 %	557.459.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	440.088.000						184 Satuan Pendidikan	557.459.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta				309 Siswa	440.088.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	309 Siswa	557.459.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				15 Orang							15 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						347.840.000							457.842.500	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	347.840.000						87.03 %	457.842.500	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	347.840.000						184 Satuan Pendidikan	457.842.500	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Yang Menerima Biaya Operasional				289 Siswa	347.840.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	289 Siswa	457.842.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				14 Orang							14 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						248.942.000							327.956.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	248.942.000						87.03 %	327.956.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	248.942.000						184 Satuan Pendidikan	327.956.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Negeri/Swasta				175 Siswa	248.942.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	175 Siswa	327.956.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendiidk dan Kependidikan yang menerima gaji				10 Orang							10 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						387.039.000							478.688.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	387.039.000						87.03 %	478.688.600	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	387.039.000						184 Satuan Pendidikan	478.688.600	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	387.039.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	0	0 Satuan Pendidikan	478.688.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kelurahan			unggul, sehat dan berdaya saing				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						245.793.000							309.130.400	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	245.793.000						87.03 %	309.130.400	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	245.793.000						184 Satuan Pendidikan	309.130.400	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				231 Siswa	245.793.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	231 Siswa	309.130.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				9 Orang							9 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						212.743.000							249.384.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	212.743.000						87.03 %	249.384.800	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	212.743.000						184 Satuan Pendidikan	249.384.800	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				176 Siswa	212.743.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	176 Siswa	249.384.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				8 Orang							8 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						805.428.000							872.994.400	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	805.428.000						87.03 %	872.994.400	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	805.428.000						184 Satuan Pendidikan	872.994.400	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	805.428.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	872.994.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				498 Siswa							498 Siswa		
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				28 Orang							28 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						261.792.000							272.264.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	261.792.000						87.03 %	272.264.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	261.792.000						184 Satuan Pendidikan	272.264.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	261.792.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat	0	0 Satuan Pendidikan	272.264.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/ Swasta				162 Siswa					dan berdaya saing		162 Siswa		
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yang Menerima Gaji				8 Orang							8 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						547.184.000							530.889.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	547.184.000						87.03 %	530.889.600	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	547.184.000						184 Satuan Pendidikan	530.889.600	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Yang Menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri / Swasta				271 Siswa	547.184.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	271 Siswa	530.889.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan				16 Orang							16 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						712.081.000							787.194.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	712.081.000						87.03 %	787.194.200	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	712.081.000						184 Satuan Pendidikan	787.194.200	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta				533 Siswa	712.081.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	533 Siswa	787.194.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				22 Orang							22 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						328.891.000							474.088.700	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	328.891.000						87.03 %	474.088.700	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	328.891.000						184 Satuan Pendidikan	474.088.700	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	328.891.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	474.088.700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						249.742.000							319.756.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	249.742.000						87.03 %	319.756.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	249.742.000						184 Satuan Pendidikan	319.756.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				179 Siswa	249.742.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya	0	179 Siswa	319.756.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Tenaga Pendidik dan				10 Orang							10 Orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Kependidikan									saing				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						780.981.000							1.037.993.500	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	780.981.000						87.03 %	1.037.993.500	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	780.981.000						184 Satuan Pendidikan	1.037.993.500	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidik				25 Orang	780.981.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	25 Orang	1.037.993.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				966 Siswa							966 Siswa		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						787.527.000							1.000.596.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	787.527.000						87.03 %	1.000.596.800	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	787.527.000						184 Satuan Pendidikan	1.000.596.800	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				714 Siswa	787.527.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	714 Siswa	1.000.596.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						225.593.000							266.964.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	225.593.000						87.03 %	266.964.800	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	225.593.000						184 Satuan Pendidikan	266.964.800	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang Menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri				163 Siswa	225.593.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	163 Siswa	266.964.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Diberi Gaji				13 Orang							13 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						697.132.000							813.223.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	697.132.000						87.03 %	813.223.200	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	697.132.000						184 Satuan Pendidikan	813.223.200	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah				701 Siswa	697.132.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	701 Siswa	813.223.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang diberi gaji 22 orang				22 Orang							22 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						242.193.000							305.550.400	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	242.193.000						87.03 %	305.550.400	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	242.193.000						184 Satuan Pendidikan	305.550.400	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	242.193.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	305.550.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						756.780.000							971.185.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	756.780.000						87.03 %	971.185.600	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	756.780.000						184 Satuan Pendidikan	971.185.600	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang Menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				696 Siswa	756.780.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	696 Siswa	971.185.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				26 Orang							26 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						233.793.000							296.550.400	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	233.793.000						87.03 %	296.550.400	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	233.793.000						184 Satuan Pendidikan	296.550.400	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				1 Siswa	233.793.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Siswa	296.550.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						418.138.000							-	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	418.138.000						87.03 %	-	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	418.138.000						184 Satuan Pendidikan	-	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				260 Siswa	418.138.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	260 Siswa	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				16 Orang							16 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						303.292.000							452.087.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	303.292.000						87.03 %	452.087.200	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	303.292.000						184 Satuan Pendidikan	452.087.200	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				317 Orang	303.292.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	317 Orang	452.087.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang diberi gaji				12 Orang							12 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						235.043.000							254.144.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	235.043.000						87.03 %	254.144.800	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	235.043.000						184 Satuan Pendidikan	254.144.800	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	235.043.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	254.144.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						220.744.000							294.344.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	220.744.000						87.03 %	294.344.800	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	220.744.000						184 Satuan Pendidikan	294.344.800	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta				238 Orang	220.744.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	238 Orang	294.344.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yang Menerima Gaji				8 Orang							8 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						523.585.000							632.058.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	523.585.000						87.03 %	632.058.800	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	523.585.000						184 Satuan Pendidikan	632.058.800	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah Negeri/Swasta				302 Siswa	523.585.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	302 Siswa	632.058.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik yang diberi Insentif/Gaji				18 Orang							18 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						605.583.000							762.643.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	605.583.000						87.03 %	762.643.200	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	605.583.000						184 Satuan Pendidikan	762.643.200	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar				486 Siswa	605.583.000	Kota Balikpapan,	Dana Transfer		Meningkatkan Pemerataan	0	486 Siswa	762.643.200	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Negeri/Swasta						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yang Menerima Gaji				22 Orang							22 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						900.577.000							1.076.116.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	900.577.000						87.03 %	1.076.116.800	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	900.577.000						184 Satuan Pendidikan	1.076.116.800	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				709 Siswa	900.577.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	709 Siswa	1.076.116.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				28 Orang							28 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						209.244.000							204.173.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	209.244.000						87.03 %	204.173.600	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	209.244.000						184 Satuan Pendidikan	204.173.600	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang Menerima Dana Operasional Sekolah Negeri/ Swasta				175 Siswa	209.244.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	175 Siswa	204.173.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi gaji				12 Orang							12 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						333.740.000							392.327.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	333.740.000						87.03 %	392.327.200	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	333.740.000						184 Satuan Pendidikan	392.327.200	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				202 Siswa	333.740.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	202 Siswa	392.327.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				12 Orang							12 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						948.824.000							1.048.962.400	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	948.824.000						87.03 %	1.048.962.400	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	948.824.000						184 Satuan Pendidikan	1.048.962.400	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				658 Siswa	948.824.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	0	658 Siswa	1.048.962.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerima gaji				29 Orang		Kelurahan			unggul, sehat dan berdaya saing		29 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						594.534.000							821.848.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	594.534.000						87.03 %	821.848.800	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	594.534.000						184 Satuan Pendidikan	821.848.800	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang Menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri				734 Siswa	594.534.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	734 Siswa	821.848.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Menerima Gaji				23 Orang							23 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						513.637.000							590.484.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	513.637.000						87.03 %	590.484.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	513.637.000						184 Satuan Pendidikan	590.484.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						513.637.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0		590.484.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						741.481.000							843.443.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	741.481.000						87.03 %	843.443.200	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	741.481.000						184 Satuan Pendidikan	843.443.200	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima biaya operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				818 Siswa	741.481.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	818 Siswa	843.443.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerima gaji				22 Orang							22 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						447.538.000							590.269.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	447.538.000						87.03 %	590.269.600	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	447.538.000						184 Satuan Pendidikan	590.269.600	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Guru dan Tenaga Pendidikan				16 Orang	447.538.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	16 Orang	590.269.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri / Swasta				440 Siswa							440 Siswa		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						498.187.000								-	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	498.187.000						87.03 %		
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	498.187.000						184 Satuan Pendidikan	-	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				539 Siswa	498.187.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	539 Siswa	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik & Kependidikan yang diberi gaji 17 Orang				17 Orang							17 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						408.489.000								535.104.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	408.489.000						87.03 %	535.104.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	408.489.000						184 Satuan Pendidikan	535.104.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	408.489.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	535.104.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				471 Siswa							471 Siswa		
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima Gaji				15 Orang							15 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						559.385.000								597.649.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	559.385.000						87.03 %	597.649.600	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	559.385.000						184 Satuan Pendidikan	597.649.600	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Yang Menerima Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri / Swasta				376 Siswa	559.385.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	376 Siswa	597.649.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Yang Menerima Gaji				16 Orang							16 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						445.988.000								514.678.400	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	445.988.000						87.03 %	514.678.400	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	445.988.000						184 Satuan Pendidikan	514.678.400	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				355 Siswa	445.988.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya	0	355 Siswa	514.678.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan				14 Orang							14 Orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Kependidikan yang menerima gaji									saing				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						901.626.000							1.044.776.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	901.626.000							87.03 %	1.044.776.800	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	901.626.000							184 Satuan Pendidikan	1.044.776.800	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				753 Siswa	901.626.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	753 Siswa	1.044.776.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				28 Orang							28 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						373.839.000							-	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	373.839.000							87.03 %	-	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	373.839.000							184 Satuan Pendidikan	-	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	373.839.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan							1 Satuan Pendidikan		
						Jumlah Tenaga Pendidi, dan Kependidikan yang Menerima Gaji				12 Orang							12 Orang		
						Jumlah Tenaga Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				408 Siswa							408 Siswa		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						437.388.000							545.504.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	437.388.000							87.03 %	545.504.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	437.388.000							184 Satuan Pendidikan	545.504.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				439 Siswa	437.388.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	439 Siswa	545.504.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yang Menerima Biaya Operasional				15 Orang							15 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						814.930.000							954.394.400	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	814.930.000							87.03 %	954.394.400	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	814.930.000							184 Satuan Pendidikan	954.394.400	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar				959 Siswa	814.930.000	Kota Balikpapan, Semua			Meningkatkan Pemerataan Kualitas	0	959 Siswa	954.394.400	DINAS PENDIDIKAN DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Negeri/Swasta						Kecamatan, Semua Kelurahan			Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji 24 Orang				24 Orang							24 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						690.981.000							814.028.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	690.981.000						87.03 %	814.028.800	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	690.981.000						184 Satuan Pendidikan	814.028.800	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						690.981.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0		814.028.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.064.973.000							1.209.528.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	1.064.973.000						87.03 %	1.209.528.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	1.064.973.000						184 Satuan Pendidikan	1.209.528.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						1.064.973.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0		1.209.528.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						649.182.000							787.043.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	649.182.000						87.03 %	787.043.200	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	649.182.000						184 Satuan Pendidikan	787.043.200	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				566 siswa	649.182.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	566 siswa	787.043.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				22 orang							22 orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						892.376.000							1.048.556.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	892.376.000						87.03 %	1.048.556.800	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	892.376.000						184 Satuan Pendidikan	1.048.556.800	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	892.376.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya	0	0 Satuan Pendidikan	1.048.556.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Siswa yang Menerima				668 siswa							668 siswa		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						BOS									saing				
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang diberi gaji				28 orang							28 orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.071.071.000							1.302.296.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	1.071.071.000						87.03 %	1.302.296.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	1.071.071.000						184 Satuan Pendidikan	1.302.296.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				817 Siswa	1.071.071.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	817 Siswa	1.302.296.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik Yang Diberi Insentif/Gaji				35 Orang							35 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						208.143.000							296.556.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	208.143.000						87.03 %	296.556.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	208.143.000						184 Satuan Pendidikan	296.556.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah guru yang menerima operasional				10 orang	208.143.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	10 orang	296.556.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah siswa yang menerima operasional				153 siswa							153 siswa		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						660.182.000							711.232.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	660.182.000						87.03 %	711.232.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	660.182.000						184 Satuan Pendidikan	711.232.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri / Swasta				439 Siswa	660.182.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	439 Siswa	711.232.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang diberi gaji				20 orang							20 orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						416.939.000							548.284.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	416.939.000						87.03 %	548.284.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	416.939.000						184 Satuan Pendidikan	548.284.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	416.939.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	548.284.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						390.739.000								548.484.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	390.739.000						87.03 %	548.484.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	390.739.000						184 Satuan Pendidikan	548.484.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	390.739.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	548.484.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						167.645.000								247.159.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	167.645.000						87.03 %	247.159.200	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	167.645.000						184 Satuan Pendidikan	247.159.200	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	167.645.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	247.159.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dsar Negeri / Swasta				160 Siswa							160 Siswa		
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang diberi gaji				7 Orang							7 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						218.543.000								255.784.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	218.543.000						87.03 %	255.784.800	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	218.543.000						184 Satuan Pendidikan	255.784.800	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	218.543.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	255.784.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						384.139.000								454.712.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	384.139.000						87.03 %	454.712.800	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	384.139.000						184 Satuan Pendidikan	454.712.800	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	384.139.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	454.712.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				272 siswa							272 siswa		
						Jumlah Tenaga Pendidik yang				13 orang							13 orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						diberi Insentif/Gaji													
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						305.441.000							400.127.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	305.441.000						87.03 %	400.127.200	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	305.441.000						184 Satuan Pendidikan	400.127.200	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	305.441.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	400.127.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				259 Siswa							259 Siswa		
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				12 orang							12 orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						390.539.000							517.898.400	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	390.539.000						87.03 %	517.898.400	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	390.539.000						184 Satuan Pendidikan	517.898.400	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	390.539.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	517.898.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Siswa yang Menerima Dana Bos				337 siswa							337 siswa		
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Menerima Gaji				14 Orang							14 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						390.989.000							1.093.177.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	390.989.000						87.03 %	1.093.177.600	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	390.989.000						184 Satuan Pendidikan	1.093.177.600	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	390.989.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	538.849.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/ Swasta				262 siswa							262 siswa		
						Jumlah Tenaga Pendidik yang diberi Insentif/Gaji				16 orang							16 orang		
1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0		554.328.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						222.793.000							294.550.400	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	222.793.000						87.03 %	294.550.400	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	222.793.000						184 Satuan Pendidikan	294.550.400	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah guru/tendik yang menerima operasional				9 Orang	222.793.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	9 Orang	294.550.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan							0 Satuan Pendidikan		
						Jumlah siswa yang menerima operasional				149 Siswa							149 Siswa		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						353.539.000							384.127.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	353.539.000						87.03 %	384.127.200	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	353.539.000						184 Satuan Pendidikan	384.127.200	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	353.539.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	384.127.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						406.438.000							400.927.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	406.438.000						87.03 %	400.927.200	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	406.438.000						184 Satuan Pendidikan	400.927.200	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	406.438.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	400.927.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Siswa yang Menerima BOS				218 Siswa							218 Siswa		
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				12 Orang							12 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						204.644.000							308.530.400	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	204.644.000						87.03 %	308.530.400	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	204.644.000						184 Satuan Pendidikan	308.530.400	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	204.644.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	308.530.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Siswa yang Menerima BOS				163 Siswa							163 Siswa		
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				9 Orang							9 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						402.388.000							489.518.400	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	402.388.000						87.03 %	489.518.400	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	402.388.000						184 Satuan Pendidikan	489.518.400	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	402.388.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	489.518.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				242 siswa							242 siswa		
						Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerima gaji				14 Orang							14 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						309.741.000							382.741.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	309.741.000						87.03 %	382.741.600	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	309.741.000						184 Satuan Pendidikan	382.741.600	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	309.741.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	382.741.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				297 Siswa							297 Siswa		
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				11 Orang							11 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						309.191.000							308.150.400	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	309.191.000						87.03 %	308.150.400	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	309.191.000						184 Satuan Pendidikan	308.150.400	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	309.191.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	308.150.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah siswa yang menerima biaya operasional				217 Siswa							217 Siswa		
						Jumlah Tenaga Pendidikan dan Kependidikan yang menerima Biaya Operasional				9 Orang							9 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						238.093.000							349.486.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	238.093.000						87.03 %	349.486.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	238.093.000						184 Satuan Pendidikan	349.486.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	238.093.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	0	0 Satuan Pendidikan	349.486.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kelurahan			unggul, sehat dan berdaya saing				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						320.340.000							338.941.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	320.340.000						87.03 %	338.941.600	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	320.340.000						184 Satuan Pendidikan	338.941.600	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	320.340.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	338.941.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				168 Siswa							168 Siswa		
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima gaji				11 orang							11 orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						276.642.000							268.344.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	276.642.000						87.03 %	268.344.800	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	276.642.000						184 Satuan Pendidikan	268.344.800	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	276.642.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	268.344.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						150.795.000							225.579.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	150.795.000						87.03 %	225.579.200	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	150.795.000						184 Satuan Pendidikan	225.579.200	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	150.795.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	225.579.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				153 siswa							153 siswa		
						Jumlah Tenaga Pendidik yang diberi Insentif/Gaji				7 Orang							7 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						437.588.000							497.278.400	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	437.588.000						87.03 %	497.278.400	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	437.588.000						184 Satuan Pendidikan	497.278.400	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah guru/tendik yang menerima operasional				14 Orang	437.588.000	Kota Balikpapan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana		Meningkatkan Pemerataan Kualitas	0	14 Orang	497.278.400	DINAS PENDIDIKAN DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum		Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				KEBUDAYAAN
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan							0 Satuan Pendidikan		
						Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Daerah				313 Siswa							313 Siswa		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						127.846.000							234.759.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	127.846.000						87.03 %	234.759.200	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	127.846.000						184 Satuan Pendidikan	234.759.200	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	127.846.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	234.759.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				143 siswa							143 siswa		
						Jumlah Tenaga Pendidik yang diberi Insentif/Gaji				7 Orang							7 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						438.437.000							495.924.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	438.437.000						87.03 %	495.924.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	438.437.000						184 Satuan Pendidikan	495.924.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah guru/tendik yang menerima operasional				15 Orang	438.437.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	15 Orang	495.924.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan							0 Satuan Pendidikan		
						Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				367 Siswa							367 Siswa		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						209.543.000							267.155.400	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	209.543.000						87.03 %	267.155.400	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	209.543.000						184 Satuan Pendidikan	267.155.400	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	209.543.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	267.155.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						151.795.000							217.579.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	151.795.000						87.03 %	217.579.200	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar yang	Satuan		Satuan	184 Satuan							184 Satuan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Sekolah Dasar	Mengelola Dana BOS	Pendidikan		Pendidikan	Pendidikan	151.795.000						Pendidikan	217.579.200	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	151.795.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	217.579.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						378.740.000							407.101.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	378.740.000						87.03 %	407.101.600	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	378.740.000						184 Satuan Pendidikan	407.101.600	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	378.740.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	407.101.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.035.872.000							1.157.702.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	1.035.872.000						87.03 %	1.157.702.800	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	1.035.872.000						184 Satuan Pendidikan	1.157.702.800	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				856 Siswa	1.035.872.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	856 Siswa	1.157.702.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				32 Orang							32 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						832.628.000							999.791.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	832.628.000						87.03 %	999.791.200	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	832.628.000						184 Satuan Pendidikan	999.791.200	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				794 Siswa	832.628.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	794 Siswa	999.791.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yang Menerima Gaji				27 Orang							27 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						329.540.000							330.132.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	329.540.000						87.03 %	330.132.600	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	329.540.000						184 Satuan Pendidikan	330.132.600	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				214 Siswa	329.540.000	Kota Balikpapan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana		Meningkatkan Pemerataan Kualitas	0	214 Siswa	330.132.600	DINAS PENDIDIKAN DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum		Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				11 Orang							11 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						625.283.000							757.072.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	625.283.000						87.03 %	757.072.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	625.283.000						184 Satuan Pendidikan	757.072.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				612 Siswa	625.283.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	612 Siswa	757.072.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang diberi gaji				20 Orang							20 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						671.581.000							763.643.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	671.581.000						87.03 %	763.643.200	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	671.581.000						184 Satuan Pendidikan	763.643.200	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				518 Siswa	671.581.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	518 Siswa	763.643.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				22 Orang							22 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						383.339.000							462.912.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	383.339.000						87.03 %	462.912.800	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	383.339.000						184 Satuan Pendidikan	462.912.800	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang menerima BOS				268 Siswa	383.339.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	268 Siswa	462.912.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang diberi gaji				13 Orang							13 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						298.541.000							353.941.350	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	298.541.000						87.03 %	353.941.350	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	298.541.000						184 Satuan Pendidikan	353.941.350	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan				11 Orang	298.541.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya	0	11 Orang	353.941.350	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Sekolah Dasar yang				0 Satuan Pendidikan							0 Satuan Pendidikan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Mengelola Dana BOS									saing				
						Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				219 Siswa							219 Siswa		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						562.684.000							698.016.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	562.684.000						87.03 %	698.016.600	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	562.684.000						184 Satuan Pendidikan	698.016.600	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri				365 Siswa	562.684.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	365 Siswa	698.016.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				21 Orang							21 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.195.369.000							1.345.889.500	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	1.195.369.000						87.03 %	1.345.889.500	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	1.195.369.000						184 Satuan Pendidikan	1.345.889.500	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				1014 Siswa	1.195.369.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1014 Siswa	1.345.889.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				35 Orang							35 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						210.943.000							317.356.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	210.943.000						87.03 %	317.356.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	210.943.000						184 Satuan Pendidikan	317.356.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima biaya Operasional				167 Siswa	210.943.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	167 Siswa	317.356.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang diberi gaji				10 Orang							10 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						365.139.000							504.724.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	365.139.000						87.03 %	504.724.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	365.139.000						184 Satuan Pendidikan	504.724.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				348 Siswa	365.139.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	348 Siswa	504.724.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				15 Orang							15 Orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						207.943.000								205.184.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	207.943.000						87.03 %	205.184.200	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	207.943.000						184 Satuan Pendidikan	205.184.200	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang Menerima Biaya Operasional pada Sekolah Dasar Negeri/SwastaSekolah				152 Siswa	207.943.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	152 Siswa	205.184.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang diberi gaji				7 Orang							7 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						346.290.000								378.921.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	346.290.000						87.03 %	378.921.600	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	346.290.000						184 Satuan Pendidikan	378.921.600	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Yang Menerima Biaya Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				204 Siswa	346.290.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	204 Siswa	378.921.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				11 Orang							11 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						259.542.000								251.384.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	259.542.000						87.03 %	251.384.800	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	259.542.000						184 Satuan Pendidikan	251.384.800	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang menerima BOS				195 Siswa	259.542.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	195 Siswa	251.384.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				8 Orang							8 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						225.793.000								254.779.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	225.793.000						87.03 %	254.779.200	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	225.793.000						184 Satuan Pendidikan	254.779.200	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang menerima BOS Daerah				164 Siswa	225.793.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	164 Siswa	254.779.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				7 Orang							7 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						240.593.000								352.306.000	
1	1	2			PROGRAM	Rata-rata Angka Partisipasi	%		%	87.03 %							87.03 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Sekolah (APrS)					240.593.000							352.306.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	240.593.000						184 Satuan Pendidikan	352.306.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasinal Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				205 Siswa	240.593.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	205 Siswa	352.306.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				10 Orang							10 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						259.792.000							304.149.700	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	259.792.000						87.03 %	304.149.700	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	259.792.000						184 Satuan Pendidikan	304.149.700	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaay operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri / Swasta				152 Siswa	259.792.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	152 Siswa	304.149.700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				9 Orang							9 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						286.392.000							332.927.400	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	286.392.000						87.03 %	332.927.400	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	286.392.000						184 Satuan Pendidikan	332.927.400	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri / Swasta				285 Siswa	286.392.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	285 Siswa	332.927.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				9 Orang							9 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						759.730.000							970.156.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	759.730.000						87.03 %	970.156.600	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	759.730.000						184 Satuan Pendidikan	970.156.600	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						759.730.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0		970.156.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						467.487.000							587.689.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	467.487.000						87.03 %	587.689.600	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	467.487.000						184 Satuan Pendidikan	587.689.600	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				402 Siswa	467.487.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	402 Siswa	587.689.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				16 Orang							16 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						159.245.000							286.759.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	159.245.000						87.03 %	286.759.200	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	159.245.000						184 Satuan Pendidikan	286.759.200	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada sekolah dasar negeri/swasta				118 Siswa	159.245.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	118 Siswa	286.759.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				7 Orang							7 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						221.593.000							314.716.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	221.593.000						87.03 %	314.716.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	221.593.000						184 Satuan Pendidikan	314.716.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						221.593.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0		314.716.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						431.939.000							580.684.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	431.939.000						87.03 %	580.684.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	431.939.000						184 Satuan Pendidikan	580.684.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Yang menerima Biaya Operasional Sekolah				544 Siswa	431.939.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	544 Siswa	580.684.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Yang Diberi Gaji				15 Orang							15 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						627.883.000							830.668.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	627.883.000						87.03 %	830.668.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	627.883.000						184 Satuan Pendidikan	830.668.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	627.883.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	0	0 Satuan Pendidikan	830.668.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kelurahan							
						Jumlah Siswa Yang menerima Biaya Operasional Sekolah				509 Siswa					unggul, sehat dan berdaya saing		509 Siswa		
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Menerima Gaji				21 Orang							21 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						382.889.000							505.718.400	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	382.889.000						87.03 %	505.718.400	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	382.889.000						184 Satuan Pendidikan	505.718.400	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Yang menerima Biaya Operasional Sekolah				365 Siswa	382.889.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	365 Siswa	505.718.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan				11 Orang							11 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						196.794.000							275.158.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	196.794.000						87.03 %	275.158.800	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	196.794.000						184 Satuan Pendidikan	275.158.800	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Yang menerima Biaya Operasional Sekolah				168 Siswa	196.794.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	168 Siswa	275.158.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Menerima Gaji				8 Orang							8 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						736.681.000							938.360.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	736.681.000						87.03 %	938.360.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	736.681.000						184 Satuan Pendidikan	938.360.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah guru yang menerima operasional				25 Orang	736.681.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	25 Orang	938.360.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Siswa Yang menerima Biaya Operasional Sekolah				689 Siswa							689 Siswa		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						607.335.000							851.383.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	607.335.000						87.03 %	851.383.200	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	607.335.000						184 Satuan Pendidikan	851.383.200	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Yang menerima Biaya Operasional Sekolah				627 Siswa	607.335.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	0	627 Siswa	851.383.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kelurahan			unggul, sehat dan berdaya saing				
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				22 Orang							22 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						174.044.000							168.613.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	174.044.000						87.03 %	168.613.600	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	174.044.000						184 Satuan Pendidikan	168.613.600	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						174.044.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0		168.613.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						168.194.000							245.964.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	168.194.000						87.03 %	245.964.800	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	168.194.000						184 Satuan Pendidikan	245.964.800	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Yang menerima Biaya Operasional Sekolah				58 Siswa	168.194.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	58 Siswa	245.964.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Yang Diberi Gaji				8 Orang							8 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						188.094.000							217.979.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	188.094.000						87.03 %	217.979.200	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	188.094.000						184 Satuan Pendidikan	217.979.200	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	188.094.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	217.979.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Siswa Yang menerima Biaya Operasional Sekolah				130 Siswa							130 Siswa		
						jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang diberi gaji				7 Orang							7 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						300.392.000							423.521.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	300.392.000						87.03 %	423.521.600	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	300.392.000						184 Satuan Pendidikan	423.521.600	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Yang menerima Biaya Operasional Sekolah				355 Siswa	300.392.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	355 Siswa	423.521.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Tenaga Pendidik dan				22 Orang							22 Orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Kependidikan													
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						442.589.000							571.912.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	442.589.000						87.03 %	571.912.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	442.589.000						184 Satuan Pendidikan	571.912.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	442.589.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	571.912.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Siswa Yang menerima Biaya Operasional Sekolah				520 Siswa							520 Siswa		
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan				14 Orang							14 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						777.482.000							907.817.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	777.482.000						87.03 %	907.817.600	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	777.482.000						184 Satuan Pendidikan	907.817.600	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						777.482.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0		907.817.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						380.440.000							477.496.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	380.440.000						87.03 %	477.496.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	380.440.000						184 Satuan Pendidikan	477.496.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	380.440.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	477.496.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Siswa Yang menerima Biaya Operasional Sekolah				314 Siswa							314 Siswa		
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				12 Orang							12 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						112.596.000							149.985.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	112.596.000						87.03 %	149.985.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	112.596.000						184 Satuan Pendidikan	149.985.000	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						112.596.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0		149.985.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						408.339.000								500.098.400	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	408.339.000						87.03 %		
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	408.339.000						184 Satuan Pendidikan	500.098.400	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Yang menerima Biaya Operasional Sekolah				404 Siswa	408.339.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	404 Siswa	500.098.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				24 Orang							24 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						144.895.000								220.179.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	144.895.000						87.03 %		
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	144.895.000						184 Satuan Pendidikan	220.179.200	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						144.895.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0		220.179.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						324.290.000								474.910.400	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	324.290.000						87.03 %		
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	324.290.000						184 Satuan Pendidikan	474.910.400	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						324.290.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0		474.910.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						170.195.000								275.964.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	170.195.000						87.03 %		
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	170.195.000						184 Satuan Pendidikan	275.964.800	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang Menerima BOS				217 Orang	170.195.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	217 Orang	275.964.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan				8 Orang							8 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						483.686.000								557.889.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	483.686.000						87.03 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					PENDIDIKAN														
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	483.686.000						184 Satuan Pendidikan	557.889.600	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				334 Siswa	483.686.000						334 Siswa	557.889.600	
						Jumlah Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Yang Diberi Gaji				16 Orang							16 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						387.539.000							566.669.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	387.539.000						87.03 %	566.669.600	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	387.539.000						184 Satuan Pendidikan	566.669.600	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				322 Siswa	387.539.000						322 Siswa	566.669.600	
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima Gaji				16 Orang							16 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						481.286.000							598.260.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	481.286.000						87.03 %	598.260.800	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	481.286.000						184 Satuan Pendidikan	598.260.800	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				322 Siswa	481.286.000						322 Siswa	598.260.800	
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yang Menerima Operasional				18 Orang							18 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.363.818.000							1.633.709.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	1.363.818.000						87.03 %	1.633.709.600	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	1.363.818.000						74 Satuan Pendidikan	1.633.709.600	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertamaar Negeri/Swasta				1150 Siswa	1.363.818.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat	0	1150 Siswa	1.633.709.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan				75 Orang					dan berdaya saing		75 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						808.131.000							867.617.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	808.131.000						87.03 %	867.617.600	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	808.131.000						74 Satuan Pendidikan	867.617.600	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa Penerima Dana Operasional Daerah				845 Orang	808.131.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	845 Orang	867.617.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Jumlah Kependidikan				58 Orang							58 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.432.065.000							1.630.635.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	1.432.065.000						87.03 %	1.630.635.200	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	1.432.065.000						74 Satuan Pendidikan	1.630.635.200	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama				1155 Siswa	1.432.065.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1155 Siswa	1.630.635.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan				42 Orang							42 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.553.463.000							1.645.328.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	1.553.463.000						87.03 %	1.645.328.600	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	1.553.463.000						74 Satuan Pendidikan	1.645.328.600	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada SMP Negeri 4 Balikpapan				1238 Siswa	1.553.463.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1238 Siswa	1.645.328.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS				41 Orang							41 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.082.325.000							1.364.170.400	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	1.082.325.000						87.03 %	1.364.170.400	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	1.082.325.000						74 Satuan Pendidikan	1.364.170.400	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.082.325.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya	0	1 Satuan Pendidikan	1.364.170.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Siswa Penerima Bantuan				1090 Siswa							1090 Siswa		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta									saing					
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				34 Orang							34 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.074.325.000							1.235.796.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	1.074.325.000						87.03 %	1.235.796.800	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	1.074.325.000						74 Satuan Pendidikan	1.235.796.800	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	1.074.325.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	1.235.796.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Siswa Yang Menerima Biaya Operasional Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama Neger / Swasta				1138 Siswa							1138 Siswa		
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				28 Orang							28 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.342.266.000							1.504.327.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	1.342.266.000						87.03 %	1.504.327.600	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	1.342.266.000						74 Satuan Pendidikan	1.504.327.600	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan				1 Orang	1.342.266.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Orang	1.504.327.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama				1 Siswa							1 Siswa		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.217.262.000							1.599.304.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	1.217.262.000						87.03 %	1.599.304.000	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	1.217.262.000						74 Satuan Pendidikan	1.599.304.000	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	1.217.262.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	1.599.304.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama				1123 Siswa							1123 Siswa		
						Jumlah Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan				38 Orang							38 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.105.824.000							1.231.148.000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	1.105.824.000						87.03 %	1.231.148.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	1.105.824.000						74 Satuan Pendidikan	1.231.148.000	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama				1203 Siswa	1.105.824.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1203 Siswa	1.231.148.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				30 Orang							30 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.262.570.000							1.495.178.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	1.262.570.000						87.03 %	1.495.178.200	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	1.262.570.000						74 Satuan Pendidikan	1.495.178.200	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	1.262.570.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	1.495.178.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.281.720.000							1.330.699.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	1.281.720.000						87.03 %	1.330.699.200	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	1.281.720.000						74 Satuan Pendidikan	1.330.699.200	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada SMP Negeri/ Swasta				1115 Siswa	1.281.720.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1115 Siswa	1.330.699.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				66 Orang							66 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						999.576.000							1.095.629.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	999.576.000						87.03 %	1.095.629.600	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	999.576.000						74 Satuan Pendidikan	1.095.629.600	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama				1082 Orang	999.576.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1082 Orang	1.095.629.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				26 Orang							26 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						737.082.000							868.363.298	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	737.082.000						87.03 %	868.363.298	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah	Satuan		Satuan	74 Satuan							74 Satuan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Sekolah Menengah Pertama	pertama yang Mengelola Dana BOS	Pendidikan		Pendidikan	Pendidikan	737.082.000						Pendidikan	868.363.298	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta				667 Siswa	737.082.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	667 Siswa	868.363.298	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				22 Orang							22 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.188.771.000							1.176.236.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	1.188.771.000						87.03 %	1.176.236.800	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	1.188.771.000						74 Satuan Pendidikan	1.176.236.800	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang menerima biaya operasional sekolah pada Sekolah Menengah Pertama				1040 Siswa	1.188.771.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1040 Siswa	1.176.236.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan				68 Orang							68 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						893.628.000							917.663.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	893.628.000						87.03 %	917.663.200	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	893.628.000						74 Satuan Pendidikan	917.663.200	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang Menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri/ Swasta				740 Siswa	893.628.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	740 Siswa	917.663.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang diberi gaji				22 Orang							22 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						488.937.000							841.543.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	488.937.000						87.03 %	841.543.200	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	488.937.000						74 Satuan Pendidikan	841.543.200	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta				437 Siswa	488.937.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	437 Siswa	841.543.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				22 Orang							22 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						872.327.000							1.009.187.500	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	872.327.000						87.03 %	1.009.187.500	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	872.327.000						74 Satuan Pendidikan	1.009.187.500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Pertama	BOS													
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang menerima biaya oprasional sekolah pada sekolah menengah pertama negeri 17 balikpapan				695 Siswa	872.327.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	695 Siswa	1.009.187.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan				27 Orang							27 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.114.374.000							1.274.893.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	1.114.374.000						87.03 %	1.274.893.600	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	1.114.374.000						74 Satuan Pendidikan	1.274.893.600	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	969 orang				31 Orang	1.114.374.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	31 Orang	1.274.893.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama				969 Siswa							969 Siswa		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						719.382.000							780.284.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	719.382.000						87.03 %	780.284.800	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	719.382.000						74 Satuan Pendidikan	780.284.800	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama				713 Siswa	719.382.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	713 Siswa	780.284.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan kependidikan				20 Orang							20 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						584.835.000							678.295.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	584.835.000						87.03 %	678.295.200	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	584.835.000						74 Satuan Pendidikan	678.295.200	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama				380 Siswa	584.835.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	380 Siswa	678.295.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				17 Orang							17 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						224.295.000							248.643.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	224.295.000						87.03 %	248.643.600	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	224.295.000						74 Satuan Pendidikan	248.643.600	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Pertama	BOS													
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama				87 Siswa	224.295.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	87 Siswa	248.643.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				6 Orang							6 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.138.872.000							1.291.558.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	1.138.872.000						87.03 %	1.291.558.200	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	1.138.872.000						74 Satuan Pendidikan	1.291.558.200	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama				1 Siswa	1.138.872.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Siswa	1.291.558.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Orang							1 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						750.333.000							-	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	750.333.000						87.03 %	-	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	750.333.000						74 Satuan Pendidikan	-	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama				623 Siswa	750.333.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	623 Siswa	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				44 Orang							44 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						897.076.000							877.483.200	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	897.076.000						87.03 %	877.483.200	
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	897.076.000						5 Satuan Pendidikan	877.483.200	
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				0 Satuan Pendidikan	897.076.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	877.483.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Non Formal				311 Siswa							311 Siswa		
						JumlahTenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				22 Orang							22 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						981.408.000							957.945.600	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	981.408.000						87.03 %	957.945.600	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	981.408.000						5 Satuan Pendidikan	957.945.600	
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				0 Satuan Pendidikan	981.408.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	957.945.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Non Formal				500 Siswa							500 Siswa		
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				30 Orang							30 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						993.284.000							966.808.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	993.284.000						87.03 %	966.808.800	
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	993.284.000						5 Satuan Pendidikan	966.808.800	
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				0 Satuan Pendidikan	993.284.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	966.808.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Non Formal				482 Siswa							482 Siswa		
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				23 Orang							23 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.180.222.000							1.152.400.400	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	1.180.222.000						87.03 %	1.152.400.400	
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	1.180.222.000						5 Satuan Pendidikan	1.152.400.400	
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						1.180.222.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0		1.152.400.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						613.994.000							591.510.800	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	613.994.000						87.03 %	591.510.800	
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	613.994.000						5 Satuan Pendidikan	591.510.800	
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				0 Satuan Pendidikan	613.994.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Satuan Pendidikan	591.510.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Non Formal				277 Siswa							277 Siswa		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				22 Orang							22 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						233.672.000							208.910.400	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	233.672.000						87.03 %	208.910.400	
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta		Peserta	11857 Peserta	233.672.000						11857 Peserta	208.910.400	
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah siswa yang menerima BOP				90 Siswa	233.672.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	90 Siswa	208.910.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				9 Orang							9 Orang		
										TOTAL	584.000.000.000							783.057.158.855	

DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						250.472.416.464							346.525.155.172	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						82.700.918.000							84.250.000.000	
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						73.000.000.000							73.150.000.000	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN				26 Dokumen	73.000.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		26 Dokumen	73.150.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						300.000.000							400.000.000	
1	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						300.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			400.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.750.000.000							1.530.000.000	
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		5 Paket	5.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	270.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		10 Paket	-	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						25.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			30.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						350.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			600.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						280.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			300.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						30.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			35.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu						30.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			40.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	750.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 Laporan	500.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						10.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			20.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2.195.000.000							3.350.000.000	
1	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						575.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			-	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						700.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel						-		PENDAPATAN ASLI		Mewujudkan Birokrasi			1.000.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
													DAERAH		Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
1	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			750.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						670.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			300.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						250.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			300.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.980.918.000							2.000.000.000	
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						750.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			800.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.230.918.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.200.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.475.000.000							3.820.000.000	
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						75.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			220.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara				243 Unit	2.500.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		243 Unit	2.200.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						150.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			200.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			600.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						500.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			300.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			300.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		Nilai	81 Nilai	161.429.503.464						81 Nilai	248.770.155.172	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementrian kesehatan	%		%	65 %	55.333.451.314						65 %	122.585.155.172	
1	2	2	2.01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	25.000.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan	1 Unit	71.810.155.172	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas						10.700.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan		22.000.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
															unggul, sehat dan berdaya saing				
1	2	2	2.01	6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan	1 Unit	10.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan		2.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						1.000.000.000				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan		1.200.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas Pembantu Yang di Rehab				3 Unit	1.350.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan	3 Unit	1.000.000.000	DINAS KESEHATAN
												Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang							
												Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati							
1	2	2	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan						1.380.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan		1.200.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	1.700.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan	3 Unit	700.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan						1.000.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan		1.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						1.525.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan		3.000.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
															saing				
1	2	2	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						275.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan		500.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin						3.700.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan		7.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai						6.278.451.314		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan		-	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan						225.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan		275.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan						575.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan		275.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						625.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan		625.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	%		%	100 %	104.563.552.150						100 %	122.555.000.000	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						350.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		450.000.000	DINAS KESEHATAN
													PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						260.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Masyarakat Kota Balikpapan		400.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
														Yang Berkualitas dan Berkeadilan	unggul, sehat dan berdaya saing				
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						265.308.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		400.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						360.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		450.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						500.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		550.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						310.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		350.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						359.999.950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan		100.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				175805 Orang	155.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	175805 Orang	-	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17263 Orang	155.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	17263 Orang	200.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan						130.000.000		PENDAPATAN ASLI	Memperkuat Ketahanan	Meningkatkan Pemerataan	Masyarakat Kota Balikpapan		200.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Gangguan Jiwa Berat								DAERAH	Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				14315 Orang	500.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	14315 Orang	450.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				15750 Orang	360.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	15750 Orang	450.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						560.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		600.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						155.000.100		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		250.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	750.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	0 Dokumen	1.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						255.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		300.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						550.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		600.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
														Berkeadilan					
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Indikator Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dikampanyekan dan dilaksanakan				65 %	1.000.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	65 %	6.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						75.000.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		255.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						329.999.850		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		500.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						150.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		400.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						125.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		250.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				7 Dokumen	1.584.822.400		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	7 Dokumen	10.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan						76.999.850		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		100.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	1.500.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Masyarakat Kota Balikpapan	5 Dokumen	2.000.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
														Yang Berkualitas dan Berkeadilan	unggul, sehat dan berdaya saing				
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Premi Iuran BPJS Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah kota dan dibayarkan sesuai hasil rekonsiliasi data				100 Persen	88.700.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	100 Persen	90.000.000.000	DINAS KESEHATAN
															Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	448.222.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen	550.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				7 Dokumen	1.873.200.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	7 Dokumen	2.000.000.000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah jenis layanan fasilitas kesehatan lainnya				1 Jenis							1 Jenis		
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				10 Unit	1.425.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	10 Unit	1.500.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1.100.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Unit	1.250.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				8 Tatanan	200.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	8 Tatanan	1.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Penerapan Sistem	%		%	61.54 %	1.035.000.000						61.54 %	850.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Secara Terintegrasi	Informasi Kesehatan Terintegrasi														
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah data dan informasi yang dikelola				350 Data	350.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	UPTD Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	350 Data	400.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah SIK yang dikelola				20 SIK	435.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	UPTD Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	20 SIK	450.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan				5 Unit	250.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	UPTD Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	5 Unit	-	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin RS Kelas C, D yang diterbitkan	%		%	100 %	497.500.000						100 %	2.780.000.000	
1	2	2	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya						75.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Rumah Sakit di Balikpapan		120.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.04	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Rumah Sakit di Balikpapan		60.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				27 Unit	300.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Rumah Sakit di Balikpapan	27 Unit	1.200.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan						72.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Rumah Sakit di Balikpapan		1.400.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan Berijin	%		%	84 %	1.131.995.000						84 %	1.530.000.000	
1	2	3	2.01		Pemberian Izin Praktik	Persentase	%		%	84 %	300.000.000						84 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Balikpapan yang di terbitkan (Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan/jumlah rekomendasi yang diusulkan)												350.000.000	
1	2	3	2.01	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						80.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Tenaga Kesehatan		100.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	3	2.01	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						220.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Tenaga Kesehatan		250.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						171.995.000							180.000.000	
1	2	3	2.02	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan						70.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			60.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						14.995.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			20.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	3	2.02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						87.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			100.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	3	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK yang berkualitas (Jumlah SDMK yang berkualitas/Jumlah SDMK Keseluruhan)	%		%	74 %	660.000.000						74 %	1.000.000.000	
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						660.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya	0		1.000.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
															saing				
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum yang diterbitkan	Presentase		Presentase	100 Presentase	960.000.000						100 Presentase	1.700.000.000	
1	2	4	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang diajukan	%		%	100 %	450.000.000						100 %	600.000.000	
1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						150.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		200.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	4	2.01	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						150.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		200.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	4	2.01	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						150.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		200.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	4	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga						-							400.000.000	
1	2	4	2.02	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			200.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	4	2.02	2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			200.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	4	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat						250.000.000							275.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
1	2	4	2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						250.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			275.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	4	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						100.000.000							150.000.000	
1	2	4	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			150.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	4	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						50.000.000							100.000.000	
1	2	4	2.05	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			100.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	4	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						110.000.000							175.000.000	
1	2	4	2.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						110.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			125.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	4	2.06	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			50.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%		%	84 %	4.250.000.000							84 %	10.275.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kelurahan yang cakupan Posyandu aktif	%		%	82 %	3.000.000.000						82 %	5.000.000.000	
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				3 Dokumen	3.000.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	3 Dokumen	5.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	5	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang menerapkan Kebijakan GERMAS	%		%	100 %	1.000.000.000						100 %	5.000.000.000	
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah jenis kegiatan Promkes dan GERMAS				2 Jenis	1.000.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	2 Jenis	5.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya	$`		$`	100 $`	250.000.000						100 $`	275.000.000	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						250.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		275.000.000	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						450.000.000							450.000.000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		Nilai	81 Nilai	450.000.000						81 Nilai	450.000.000	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	%		%	100 %	450.000.000						100 %	450.000.000	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas						450.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0		450.000.000	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						475.000.000							-	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						475.000.000							-	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan						475.000.000								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													-	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	475.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1 Dokumen	-	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						550.000.000							1.210.000.000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		Nilai	81 Nilai	550.000.000						81 Nilai	1.210.000.000	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Sapras memnuhi Standar Kesehatan	%		%	95.66 %	-						95.66 %	605.000.000	
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pelaksanaan di Puskesmas Lamaru				12 bulan	-	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	UPTD dan Rumah Sakit di Balikpapan	12 bulan	605.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						550.000.000							605.000.000	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya Pelayanan Puskesmas Lamaru				12 Bulan	550.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		12 Bulan	605.000.000	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.150.000.000							-	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2.150.000.000							-	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2.150.000.000							-	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2.150.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 Dokumen	-	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Jenis Layanan Puskesmas				17 Layanan							17 Layanan		
						Terlaksananya Pembayaran Air, Listrik, Telepon dan Internet serta Belanja Operasional lainnya di				12 Bulan							12 Bulan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Puskesmas Manggar Baru														
						Terlaksananya Pembayaran Honorarium Non PNS				13 Bulan							13 Bulan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.250.000.000							-		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	%		%	81 %	2.250.000.000						81 %	-	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Layanan Puskesmas	Layanan		Layanan	18 Layanan	2.250.000.000						18 Layanan	-	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Jenis Layanan Puskesmas				18 Layanan	2.250.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat - Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	18 Layanan	-	DINAS KESEHATAN
						Terlaksananya Pembayaran Air, Listrik, Telpon, dan Internet, serta belanja operasional lainnya di Puskesmas Sepinggan Baru				12 Bulan							12 Bulan		
						Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non ASN				13 Bulan							13 Bulan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						525.000.000							525.000.000		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						525.000.000							525.000.000		
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						525.000.000							525.000.000		
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	525.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	525.000.000	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						500.000.000							500.000.000		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	%		%	100 %	500.000.000						100 %	500.000.000		
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sub Kegiatan Operasional	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	500.000.000						1 Sub Kegiatan	500.000.000		
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	500.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat	Masyarakat, Sekolah,Posyandu dan Tempat-tempat umum,Pegawai Puskesmas dan	1 Dokumen	500.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
															dan berdaya saing	Kader			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.150.000.000							-	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2.150.000.000							-	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2.150.000.000							-	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Persen	2.150.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		84 Persen	-	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen							1 Dokumen		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						435.000.000							-	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	%		%	100 %	435.000.000						100 %	-	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Layanan Puskesmas	Layanan		Layanan	17 Layanan	435.000.000						17 Layanan	-	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat				90 persen	435.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	90 persen	-	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen							1 Dokumen		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						474.999.850							-	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						474.999.850							-	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						474.999.850							-	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	474.999.850	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1 Dokumen	-	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						425.000.000							-	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN						425.000.000							-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						425.000.000							-	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	425.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 Dokumen	-	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						400.000.000							-	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						400.000.000							-	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						400.000.000							-	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	400.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0 Dokumen	-	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.000.000.000							2.200.000.000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2.000.000.000							2.200.000.000	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2.000.000.000							2.200.000.000	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas						2.000.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.200.000.000	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						650.000.000							682.500.000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	%		%	81 %	650.000.000						81 %	682.500.000	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	650.000.000						1 Dokumen	682.500.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas														
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	650.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	1 Dokumen	682.500.000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Layanan di Puskesmas				17 Layanan							17 Layanan		
						Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS				13 OB							13 OB		
						Terlaksananya Pembayaran Sumber Daya Air, Listrik, Telepon/Internet				12 Bulan							12 Bulan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						425.000.000							488.750.000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						425.000.000							488.750.000	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						425.000.000							488.750.000	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar				100 Persen	425.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		100 Persen	488.750.000	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						400.000.000							-	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						400.000.000							-	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						400.000.000							-	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Persen	400.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		84 Persen	-	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen							1 Dokumen		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						453.664.500							-	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						453.664.500							-	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						453.664.500							-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar				17 Layanan	453.664.500	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	PENDAPATAN ASLI DAERAH				17 Layanan	-	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						525.000.000							-	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						525.000.000							-	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						525.000.000							-	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	525.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0 Dokumen	-	DINAS KESEHATAN
												Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						425.000.000							467.500.000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						425.000.000							467.500.000	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						425.000.000							467.500.000	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	425.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1 Dokumen	467.500.000	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						500.019.200							500.000.000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						500.019.200							500.000.000	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						500.019.200							500.000.000	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	500.019.200	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		0 Dokumen	500.000.000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen							1 Dokumen		
						Jumlah Jenis Layanan Puskesmas				17 Layanan							17 Layanan		
						Terlaksananya Pembayaran Air,				12 bulan							12 bulan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Listrik, Telepon dan Internet serta Belanja Operasional lainnya di Puskesmas Graha Indah														
						Terlaksananya Pembayaran Honorarium Non PNS				13 bulan							13 bulan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.150.000.000							2.150.000.000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2.150.000.000							2.150.000.000	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2.150.000.000							2.150.000.000	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Persen	2.150.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		84 Persen	2.150.000.000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen							1 Dokumen		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.950.000.000							1.950.000.000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1.950.000.000							1.950.000.000	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.950.000.000							1.950.000.000	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Dilayani				4861 Peserta	1.950.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		4861 Peserta	1.950.000.000	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						550.000.000							600.000.000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						550.000.000							600.000.000	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						550.000.000							600.000.000	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	550.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang		1 Dokumen	600.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
															unggul, sehat dan berdaya saing				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						430.000.000								430.000.000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						430.000.000								430.000.000	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						430.000.000								430.000.000	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas						430.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				430.000.000	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						449.999.986								495.000.000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						449.999.986								495.000.000	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						449.999.986								495.000.000	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	449.999.986	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 Dokumen	495.000.000	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.003.900.000								2.000.000.000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2.003.900.000								2.000.000.000	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2.003.900.000								2.000.000.000	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas						2.003.900.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				2.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						400.000.000									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
																		-	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						400.000.000							-	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						400.000.000							-	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat				81 %	400.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		81 %	-	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen							1 Dokumen		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.900.000.000							-	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1.900.000.000							-	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.900.000.000							-	
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1.900.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 Dokumen	-	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Kunjungan Orang Pada Pelayanan Fasilitas Kesehatan				9495 Orang							9495 Orang		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						530.000.000							-	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						530.000.000							-	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						530.000.000							-	
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	530.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 Dokumen	-	DINAS KESEHATAN
										TOTAL	277.000.000.000							361.173.905.172	

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub	Target Akhir	Realisasi Capaian	Prakiraan Capaian	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab

					Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kegiatan	Periode RPJMD	RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						102.999.992.000							111.600.000.000	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						90.500.000.000							90.500.000.000	
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						15.500.000.000							15.500.000.000	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						15.500.000.000		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			15.500.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						75.000.000.000							75.000.000.000	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						75.000.000.000		Pendapatan dari BLUD		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			75.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						12.499.992.000							21.100.000.000	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						-							8.100.000.000	
1	2	2	2.01	5	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang dilakukan pengembangan				1 Unit	-		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1 Unit	3.300.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	-		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		3 Unit	3.300.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN
															Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin						-		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.500.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN
													LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						12.499.992.000							13.000.000.000	
1	2	2	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						12.499.992.000		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			13.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN
										TOTAL	102.999.992.000							111.600.000.000	

RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						23.400.000.000								30.275.000.000	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal	persen		persen	84.20 persen	20.500.000.000						84.20 persen	20.275.000.000	
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	10.000.000.000						14 Dokumen	9.300.000.000	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	10.000.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Pegawai ASN RSIA Sayang Ibu Balikpapan	80 Orang/bulan	9.300.000.000	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU
1	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	umlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	stel		stel	70 stel	-						70 stel	-	
1	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 stel	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Pegawai RSIA Sayang Ibu Balikpapan	70 stel	-	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	jenis		jenis	6 jenis	-						6 jenis	275.000.000	
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 jenis	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Seluruh Pegawai RSIA Sayang Ibu Balikpapan	2 jenis	55.000.000	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Pegawai RSIA Sayang Ibu Balikpapan	100 Laporan	220.000.000	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja		unit kerja	1 unit kerja	10.500.000.000						1 unit kerja	10.700.000.000	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	10.500.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Masyarakat & Pegawai RSIA Sayang Ibu Balikpapan	1 Unit Kerja	10.700.000.000	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM Eksternal	persen		persen	84 persen	2.900.000.000						84 persen	10.000.000.000	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	dokumen		dokumen	4 dokumen	2.900.000.000						4 dokumen	10.000.000.000	
1	2	2	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4 Dokumen	2.900.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Pegawai Non ASN RSIA Sayang Ibu Balikpapan	4 Dokumen	10.000.000.000	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU
										TOTAL	23.400.000.000							30.275.000.000	

DINAS PEKERJAAN UMUM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						286.113.543.102							406.287.165.600	
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	82	Nilai		Nilai	82 Nilai	19.713.284.100						82 Nilai	22.214.165.600	
1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85.80	Nilai		Nilai	85.8 Nilai	10.066.665.600						85.8 Nilai	10.316.665.600	
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Dokumen	10.066.665.600		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai ASN pada DInas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	26 Dokumen	10.316.665.600	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.55	Nilai		Nilai	83.55 Nilai	194.000.000						83.55 Nilai	200.000.000	
1	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Orang	50.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	ASN Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	70 Orang	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	144.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	ASN Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	70 Orang	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.55	Nilai		Nilai	85.55 Nilai	2.899.968.000						85.55 Nilai	2.109.500.000	
1	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Jenis	24.999.500		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	9 Jenis	25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Jenis	860.500.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	5 Jenis	650.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Jenis	-		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	5 Jenis	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				59 Jenis	721.617.500		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	59 Jenis	435.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Jenis	127.851.000				Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	7 Jenis	127.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman Fasilitasi Kunjungan Tamu				300 Porsi	15.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	300 Porsi	15.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah				100 Kali	1.150.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	100 Kali	357.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.05	Nilai		Nilai	82.05 Nilai	2.695.500.000						82.05 Nilai	5.700.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	3	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	-		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	2 Unit	1.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	1	2.07	3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1.347.750.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	1 Unit	4.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	-		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	25 Unit	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	1.347.750.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	25 Unit	-	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.5	Nilai		Nilai	85.5 Nilai	2.142.150.500						85.5 Nilai	2.083.000.000	
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Rekening	364.880.500		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	48 Rekening	408.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Non PNS				42 Orang	1.777.270.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	42 Orang	1.675.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Jumlah Tenaga Profesional				3 Orang							3 Orang		
						Luasan Gedung Kantor yang dilayani				2004.8 m2							2004.8 m2		
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.1	Nilai		Nilai	81.1 Nilai	1.715.000.000						81.1 Nilai	1.805.000.000	
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	200.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	6 Unit	250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				58 Unit	510.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	58 Unit	450.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				6 Unit	380.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	6 Unit	450.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Jenis	325.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	8 Jenis	310.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	1 Unit	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Jenis	100.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	2 Jenis	145.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	61.76	%		%	61.76 %	12.000.000.000						61.76 %	164.000.000.000	
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	87.50	%		%	87.5 %	12.000.000.000						87.5 %	164.000.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
1	3	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				5 Dokumen	1.000.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	5 Dokumen	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	2	2.01	7	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				1 Titik	-		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Titik	1.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	2	2.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang dibangun				1 Unit	5.000.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Unit	151.600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun				0 Unit							0 Unit		
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah sungai yang dinormalisasi/restorasi				20 Titik	6.000.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	20 Titik	10.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0 KM							0 KM		
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	98.54	%		%	98.54 %	14.836.375.000						98.54 %	19.700.000.000	
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	82.05	%		%	82.05 %	14.836.375.000						82.05 %	19.700.000.000	
1	3	3	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				1 Dokumen	346.875.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah Tangga yang belum mendapatkan akses air minum perpipaan (PDAM)	1 Dokumen	700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	3	2.01	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM				1 Dokumen	595.750.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah Tangga yang belum mendapatkan akses air minum perpipaan (PDAM)	1 Dokumen	600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	3	2.01	3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun				8.34 Liter/Detik	-		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah Tangga yang belum mendapatkan akses air minum perpipaan (PDAM)	8.34 Liter/Detik	12.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	3	2.01	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				400 SR	13.893.750.000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah Tangga yang belum mendapatkan akses air minum perpipaan (PDAM)	400 SR	6.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	97.82	%		%	97.82 %	2.773.875.000						97.82 %	7.400.000.000	
1	3	4	2.01		Pengembangan Sistem dan	48.88	%		%	48.88 %							48.88 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						2.773.875.000							7.400.000.000		
1	3	4	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	493.750.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	1 Dokumen	-	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	4	2.01	2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	96.875.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	1 Dokumen	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	4	2.01	3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				7140 Rumah Tangga	1.993.750.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	7140 Rumah Tangga	7.100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	4	2.01	4	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi				20 Unit	93.750.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	20 Unit	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	4	2.01	5	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				2000 Rumah Tangga	95.750.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	2000 Rumah Tangga	-	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	97.10	%		%	97.10 %	2.931.115.002						97.10 %	2.750.000.000	
1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	92.29	%		%	92.29 %	2.931.115.002						92.29 %	2.750.000.000	
1	3	5	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	1.043.750.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah Tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	2 Dokumen	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	5	2.01	5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman				70 Rumah Tangga	396.875.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah Tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	70 Rumah Tangga	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	5	2.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik				150 Rumah Tangga	993.615.002		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah Tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	150 Rumah Tangga	800.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	5	2.01	8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik				200 Orang	-		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah Tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	200 Orang	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	5	2.01	9	Pengembangan SDM dan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM				10 Orang			Pajak Daerah		Mewujudkan	Rumah	10 Orang		DINAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik					150.000.000				Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak		100.000.000	PEKERJAAN UMUM
1	3	5	2.01	11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman				3 Dokumen	346.875.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah Tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	3 Dokumen	350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	5	2.01	16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Sarana dan Prasarana IPLT yang di Rehab/ditingkatkan				20 M3/Hari	-		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah Tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	20 M3/Hari	-	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	5	2.01	17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT				1 Dokumen	-		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah Tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	1 Dokumen	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	53.09	%		%	53.09 %	90.977.500.000						53.09 %	117.273.000.000	
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.56	%		%	70.56 %	90.977.500.000						70.56 %	117.273.000.000	
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokuman Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun				1 Dokumen	210.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun				0 Dokumen							0 Dokumen		
1	3	6	2.01	3	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Supervisi				1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen	20.805.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				0 Dokumen							0 Dokumen		
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase yang Dibangun				2100 M	56.487.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	2100 M	56.487.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				0 M							0 M		
1	3	6	2.01	6	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Drainase yang ditingkatkan				1000 M	23.160.000.000				Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang	Masyarakat Kota Balikpapan	1000 M	23.160.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				0 M							0 M		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
															berkualitas				
1	3	6	2.01	7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang direhab				1000 0	2.800.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1000 0	-	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi				0 M							0 M		
1	3	6	2.01	10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Supervisi				1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen	2.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	6	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Drainase yang dibangun				1000 M	4.160.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1000 M	4.160.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				0 M							0 M		
1	3	6	2.01	13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Drainase yang ditingkatkan				1000 M	4.160.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1000 M	4.160.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				0 M							0 M		
1	3	6	2.01	16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan				1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen	5.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	76.36	%		%	76.36 %	54.000.000.000						76.36 %	-	
1	3	7	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	57.42	%		%	57.42 %	54.000.000.000						57.42 %	-	
1	3	7	2.01	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				15000 Sistem Jaringan	50.000.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	15000 Sistem Jaringan	-	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	7	2.01	2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1125 Sistem Jaringan	4.000.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	1125 Sistem Jaringan	-	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	7	2.01	3	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				10 Sistem Jaringan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	10 Sistem Jaringan	-	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	7	2.01	4	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				10 Orang	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	10 Orang	-	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	93.39	%		%	93.39 %	30.750.334.600						93.39 %	71.500.000.000	
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	96.11	%		%	96.11 %	30.750.334.600						96.11 %	71.500.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				1000 Dokumen	420.005.300		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Bangunan di Kota Balikpapan	1000 Dokumen	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	10.093.765.300		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Bangunan di Kota Balikpapan	3 Dokumen	38.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	8	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai				5 Unit	16.239.689.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Bangunan di Kota Balikpapan	5 Unit	24.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	8	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan				40 Unit	3.996.875.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Bangunan di Kota Balikpapan	40 Unit	8.800.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	87.36	%		%	87.36 %	56.791.684.400						87.36 %	-	
						Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	%		%	87.36 %							87.36 %		
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	72.19	%		%	72.19 %	56.791.684.400						72.19 %	-	
						85.00	%		%	72.19 %							72.19 %		
						Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin	Meter		Meter	5900 Meter							5900 Meter		
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				7 Dokumen	6.584.375.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di kota balikpapan	7 Dokumen	-	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	10	2.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				2 Dokumen	637.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di kota balikpapan	2 Dokumen	-	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				2 KM	2.222.934.400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di kota balikpapan	2 KM	-	DINAS PEKERJAAN UMUM
													Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi						
1	3	10	2.01	6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar				1.4 KM	11.884.375.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di kota balikpapan	1.4 KM	-	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	10	2.01	8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				1 KM	4.684.375.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di kota balikpapan	1 KM	-	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				3 KM	6.500.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di kota balikpapan	3 KM	-	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				4000 KM	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di	4000 KM	-	DINAS PEKERJAAN UMUM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
															berkualitas	kota balikpapan			
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				500 M	15.034.375.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di kota balikpapan	500 M	-	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian				8 M	6.984.375.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di kota balikpapan	8 M	-	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				1 M	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di kota balikpapan	1 M	-	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	10	2.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di kota balikpapan		-	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				10 Dokumen	2.259.375.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di kota balikpapan	10 Dokumen	-	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	100	%		%	100 %	1.339.375.000						100 %	1.450.000.000	
1	3	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	7.62	%		%	7.62 %	1.141.875.000						7.62 %	1.250.000.000	
1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				300 Orang	895.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Jasa Konstruksi (Penyedia Jasa Konstruksi dan Tenaga Terampil Konstruksi)	300 Orang	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	11	2.01	7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				100 Orang	246.875.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Jasa Konstruksi (Penyedia Jasa Konstruksi dan Tenaga Terampil Konstruksi)	100 Orang	250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	40	%		%	40 %	197.500.000						40 %	200.000.000	
1	3	11	2.02	9	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi				2 Dokumen	197.500.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Data dan Informasi Jasa Konstruksi yang tersedia	2 Dokumen	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						13.886.450.000							22.750.000.000	
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	61.76	%		%	61.76 %	1.960.695.000						61.76 %	2.250.000.000	
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	87.50	%		%	87.5 %	1.960.695.000						87.5 %	2.250.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
1	3	2	2.01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara				6 Unit	1.960.695.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	6 Unit	2.250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						11.925.755.000							20.500.000.000	
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						11.925.755.000							20.500.000.000	
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				83000 M	11.925.755.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		83000 M	20.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						6.500.000.000							6.000.000.000	
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	persen		persen	87,36 persen	6.500.000.000						87,36 persen	6.000.000.000	
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin	meter		meter	5900 meter	6.500.000.000						5900 meter	6.000.000.000	
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				5900 KM	6.000.000.000		Pajak Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Pengguna Jalan dan Jembatan di Kota Balikpapan	5900 KM	5.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				40 Buah	500.000.000		Pajak Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Pengguna Jalan dan Jembatan di Kota Balikpapan	40 Buah	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
										TOTAL	306.499.993.102							435.037.165.600	

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						19.499.999.815							29.094.769.177	
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	75 Nilai	9.843.949.815						75 Nilai	9.647.769.177	
1	4	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen		dokumen	2 dokumen	-						2 dokumen	30.000.000	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	laporan		laporan	1 laporan							1 laporan		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan		laporan	2 laporan							2 laporan		
1	4	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Dinas Perumahan dan Permukiman	2 dokumen	10.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Dinas Perumahan dan Permukiman	1 Laporan	10.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Dinas Perumahan dan Permukiman	2 Laporan	10.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ikm Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	75 Nilai	6.567.351.597						75 Nilai	6.926.769.177	
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen		dokumen	2 dokumen							2 dokumen		
						Jumlah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang		orang	26 orang							26 orang		
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	laporan		laporan	1 laporan							1 laporan		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan		laporan	2 laporan							2 laporan		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan		laporan	1 laporan							1 laporan		
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	6.567.351.597		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Tenaga ASN Dinas Perumahan dan Permukiman	26 Orang/bulan	6.916.769.177	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Tenaga ASN Dinas Perumahan dan Permukiman	1 Laporan	10.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang		orang	0 orang	-						0 orang	-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket		paket	0 paket							0 paket		
1	4	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 paket	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	0 paket	-	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 orang	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	0 orang	-	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	75 Nilai	1.409.038.850						75 Nilai	695.000.000	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen		dokumen	0 dokumen							0 dokumen		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		laporan	40 laporan							40 laporan		
						jumlah makanan dan minuman fasilitasi kunjungan tamu	makanan/minuman		makanan/minuman	0 makanan/minuman							0 makanan/minuman		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket		paket	4 paket							4 paket		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket		paket	2 paket							2 paket		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket		paket	1 paket							1 paket		
1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.975.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	1 Paket	20.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	611.520.200		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	4 Paket	305.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	179.543.650		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	2 Paket	105.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan	0 dokumen	-	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
														Dasar		Permukiman			
1	4	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	0 laporan	15.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	603.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	40 Laporan	250.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket		paket	0 paket	163.842.000						0 paket	250.000.000	
						Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas aOperasional atau Lapangan	pengadaan		pengadaan	0 pengadaan							0 pengadaan		
						Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	pengadaan		pengadaan	0 pengadaan							0 pengadaan		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit		unit	6 unit							6 unit		
1	4	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan				0 pengadaan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Sarana dan Prasarana di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	0 pengadaan	-	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas aOperasional atau Lapangan				0 Unit	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Sarana dan Prasarana di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	0 Unit	-	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Sarana dan Prasarana di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	3 Paket	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	163.842.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Sarana dan Prasarana di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	5 Unit	200.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan		laporan	4 laporan	953.717.368						4 laporan	981.000.000	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan		laporan	12 laporan							12 laporan		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan		laporan	4 laporan							4 laporan		
1	4	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	5.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman	4 Laporan	6.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
														Pelayanan Dasar					
1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman	4 Laporan	200.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	848.717.368		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman	12 Laporan	775.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		unit	1 unit	750.000.000						1 unit	765.000.000	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		unit	2 unit							2 unit		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit		unit	33 unit							33 unit		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		unit	11 unit							11 unit		
1	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				33 Unit	360.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Barang Milik Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman	33 Unit	350.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Barang Milik Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman	2 Unit	120.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				111 Unit	90.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Barang Milik Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman	111 Unit	95.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Barang Milik Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman	1 Unit	200.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%		%	0.59 %	5.517.200.000						0.59 %	11.220.000.000	
1	4	2	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	dokumen		dokumen	0 dokumen	25.000.000						0 dokumen	425.000.000	
						Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena	dokumen		dokumen	2 dokumen							2 dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Relokasi Program Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	dokumen		dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
						Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	dokumen		dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
1	4	2	2.01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				2 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat calon penerima bantuan terdampak bencana dan relokasi program	2 Dokumen	150.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
														Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas					
1	4	2	2.01	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				2 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat calon penerima bantuan terdampak bencana dan relokasi program	2 Dokumen	75.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	2	2.01	5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				0 dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat calon penerima bantuan terdampak bencana dan relokasi program	0 dokumen	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	2	2.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	25.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat calon penerima bantuan terdampak bencana dan relokasi program	1 Dokumen	150.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	2	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	1 dokumen	126.650.000						1 dokumen	385.000.000	
						Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	orang		orang	0 orang							0 orang		
						Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang		orang	100 orang							100 orang		
						Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	orang		orang	50 orang							50 orang		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	orang		orang	0 orang							0 orang		
1	4	2	2.02	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				100 Orang	59.700.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat calon penerima bantuan terdampak bencana	100 Orang	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
														Pelayanan Dasar					
1	4	2	2.02	2	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan				0 Orang	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat calon penerima bantuan terdampak bencana	0 Orang	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	2	2.02	3	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP				50 Orang	66.950.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat calon penerima bantuan terdampak bencana	50 Orang	75.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	2	2.02	4	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				0 orang	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat calon penerima bantuan terdampak bencana	0 orang	150.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	2	2.02	5	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat calon penerima bantuan terdampak bencana	1 Dokumen	60.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	2	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Rumah		Rumah	10 Rumah	955.000.000						10 Rumah	2.200.000.000	
						Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Rumah		Rumah	0 Rumah							0 Rumah		
						Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Rumah		Rumah	5 Rumah							5 Rumah		
						Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	DED		DED	1 DED							1 DED		
						Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Lahan		Lahan	0 Lahan							0 Lahan		
1	4	2	2.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				5 Unit Rumah	125.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat di lokasi rawan bencana atau terelokasi program	5 Unit Rumah	800.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	2	2.03	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 dokumen	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat di lokasi rawan bencana atau terelokasi	1 dokumen	400.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
														Pelayanan Dasar		program			
1	4	2	2.03	3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota				1 Ha	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat di lokasi rawan bencana atau terelokasi program	1 Ha	-	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	2	2.03	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				10 Unit Rumah	730.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat di lokasi rawan bencana atau terelokasi program	10 Unit Rumah	1.000.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	2	2.03	5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun				0 Unit Rumah	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat di lokasi rawan bencana atau terelokasi program	0 Unit Rumah	-	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	2	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	dokumen		dokumen	1 dokumen	4.070.000.000						1 dokumen	5.560.000.000	
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	laporan		laporan	1 laporan							1 laporan		
1	4	2	2.05	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				1 Laporan	2.370.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat di Rusunawa, Rusunami	1 Laporan	3.560.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	2	2.05	2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	1.700.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat di Rusunawa, Rusunami	1 Dokumen	2.000.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	2	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen		dokumen	7 dokumen	330.000.000						7 dokumen	2.600.000.000	
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	laporan		laporan	1 laporan							1 laporan		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	laporan		laporan	1 laporan							1 laporan		
1	4	2	2.06	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				7 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pengembang Perumahan	7 Dokumen	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Terintegrasi Secara Elektronik													
1	4	2	2.06	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	300.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pengembang Perumahan	1 Laporan	2.500.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	2	2.06	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum				1 Laporan	30.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pengembang Perumahan	1 Laporan	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	2	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	laporan		laporan	1 laporan	10.550.000						1 laporan	50.000.000	
1	4	2	2.07	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)				1 Laporan	10.550.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Stakeholders Perumahan	1 Laporan	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan Kumuh	ha		ha	74,40 ha	3.535.350.000						74,40 ha	4.915.000.000	
1	4	3	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	dokumen		dokumen	0 dokumen	-						0 dokumen	475.000.000	
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	laporan		laporan	1 laporan							1 laporan		
1	4	3	2.01	2	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi				0 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan permukiman kota Balikpapan	0 Dokumen	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				1 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan permukiman kota Balikpapan	1 Laporan	375.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	3	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang tersusun/tereview/terlegalisasi PKP yang disusun	dokumen		dokumen	0 dokumen	226.400.000						0 dokumen	470.000.000	
						Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	dokumen		dokumen	2 dokumen							2 dokumen		
						Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	dokumen		dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	laporan		laporan	0 laporan							0 laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah														
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	laporan		laporan	0 laporan							0 laporan		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	laporan		laporan	0 laporan							0 laporan		
						Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	laporan		laporan	6 laporan							6 laporan		
1	4	3	2.02	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan permukiman kumuh di kota Balikpapan	1 Dokumen	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	3	2.02	2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh				2 Dokumen	134.150.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan permukiman kumuh di kota Balikpapan	2 Dokumen	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	3	2.02	3	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh				6 Laporan	42.250.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan permukiman kumuh di kota Balikpapan	6 Laporan	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	3	2.02	4	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				0 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan permukiman kumuh di kota Balikpapan	0 Laporan	120.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	3	2.02	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				0 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan permukiman kumuh di kota Balikpapan	0 Laporan	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	3	2.02	8	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				0 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan permukiman kumuh di kota Balikpapan	0 Dokumen	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	3	2.02	9	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran				0 Keluarga	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan permukiman kumuh di kota Balikpapan	0 Keluarga	-	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Hukum Tentang Kepemilikan Rumah								Ekonomi Dan Pelayanan Dasar					
1	4	3	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	dokumen		dokumen	1 dokumen	3.308.950.000						1 dokumen	3.970.000.000	
						Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	dokumen		dokumen	0 dokumen							0 dokumen		
						Jumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	laporan		laporan	0 laporan							0 laporan		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	laporan		laporan	0 laporan							0 laporan		
						Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	DED		DED	1 DED							1 DED		
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Rumah		Rumah	100 Rumah							100 Rumah		
						Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar Kumuh	ha		ha	3.99 ha							3.99 ha		
1	4	3	2.03	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh				1 Dokumen	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	1 Dokumen	300.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				100 Unit Rumah	2.168.950.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	100 Unit Rumah	3.450.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	3	2.03	3	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				0 dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	0 dokumen	25.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	3	2.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				0 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	0 Laporan	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	3	2.03	5	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh				0 dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	0 dokumen	45.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
														Dasar					
1	4	3	2.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar Kumuh				3.99 Ha	1.000.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	3.99 Ha	-	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	3	2.03	7	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	40.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	1 Dokumen	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tangga diluar sk kumuh yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	%		%	0.01 %	-						0.01 %	1.662.000.000	
1	4	4	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	dokumen		dokumen	0 dokumen	-						0 dokumen	1.662.000.000	
						Jumlah kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Rumah		Rumah	0 Rumah							0 Rumah		
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	Rumah		Rumah	0 Rumah							0 Rumah		
1	4	4	2.01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				0 unit	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan	0 unit	1.592.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	4	2.01	2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	jumlah kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha				0 Rumah	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan	0 Rumah	25.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	4	2.01	3	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				0 dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan	0 dokumen	45.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	%		%	2.14 %	603.500.000						2.14 %	1.650.000.000	
1	4	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	dokumen		dokumen	1 dokumen	603.500.000						1 dokumen	1.650.000.000	
						Jumlah Laporan Hasil	laporan		laporan	1 laporan							1 laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan														
						Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	lokasi		lokasi	3 lokasi							3 lokasi		
1	4	5	2.01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	90.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	PSU perumahan	1 Dokumen	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				3 Lokasi	510.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	PSU perumahan	3 Lokasi	1.500.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	3.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	PSU perumahan	1 Laporan	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						-							2.000.000.000	
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%		%	0.59 %	-						0.59 %	2.000.000.000	
1	4	2	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase hunian rusun milik pemerintah kota yang terkelola	%		%	70.83 %	-						70.83 %	2.000.000.000	
1	4	2	2.05	2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Penghuni Rusunawa Kota Balikpapan	1 Dokumen	2.000.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
										TOTAL	19.499.999.815							31.094.769.177	

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						33.514.000.000							46.885.000.000	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	72 Nilai	26.494.100.000						72 Nilai	35.020.000.000	
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	71 Nilai	10.000.000						71 Nilai	10.000.000	
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	10.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	1 Dokumen	10.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	1 Dokumen	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	1 Dokumen	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	1 Dokumen	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	1 Dokumen	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	6 Laporan	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	1 Laporan	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	100 Nilai	20.000.000.000						100 Nilai	21.000.000.000	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				170 Dokumen	20.000.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	170 Dokumen	21.000.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				170 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	170 Dokumen	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Dokumen	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				100 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Dokumen	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan				1 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Keuangan Akhir Tahun SKPD													
1	5	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	18 Laporan	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	95 Nilai	-						95 Nilai	-	
1	5	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				150 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	150 Laporan	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				30 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	30 Laporan	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				150 Laporan	-					0	150 Laporan	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Penatausahaan BMD				1 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Pemanfaatan BMD				95 Dokumen	-					0	95 Dokumen	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	92 Nilai	-						92 Nilai	-	
1	5	1	2.04	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kajian Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Daerah				1 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.04	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				0 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Dokumen	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Obyek Retribusi Kewenangan Perangkat Daerah				1 Jenis							1 Jenis		
1	5	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian	IKM Layanan Administrasi	Nilai		Nilai	100 Nilai	540.000.000						100 Nilai	1.800.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Perangkat Daerah	Kepegawaian Perangkat Daerah													
1	5	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Unit	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya				330 Orang	350.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	330 Orang	600.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				330 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	330 Dokumen	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				325 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	325 Laporan	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				325 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	325 Dokumen	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	40.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Orang	600.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat				150 Orang							150 Orang		
1	5	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan Sosialisasi				2 Kegiatan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2 Kegiatan	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek				20 Orang	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	20 Orang	400.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	100 Nilai	2.550.071.800						100 Nilai	3.485.000.000	
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15 Jenis	15.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	15 Jenis	60.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Jumlah Perlengkapan Kantor				25 Jenis	45.092.500		PENDAPATAN ASLI			0	25 Jenis	500.000.000	BADAN PENANGGULANGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
													DAERAH (PAD)						N BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga				15 Jenis	14.980.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	15 Jenis	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan Logistik Kantor				15 Jenis	1.999.999.300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	15 Jenis	2.100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan				15 Jenis	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	15 Jenis	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				20 Jenis	25.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	20 Jenis	25.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material				15 Jenis	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	15 Jenis	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman				500 Porsi	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	500 Porsi	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah				1 Kali	250.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Kali	400.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	15 Laporan	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan PeJumlah Dokumen Pelaporan Dukungan Pelaksanaan SPBE				0 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Dokumen	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai		Nilai	95 Nilai	49.932.200						95 Nilai	4.000.000.000	
1	5	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2 Unit	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Unit	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4 Unit	-					0	4 Unit	3.500.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.07	3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar				1 Unit	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Unit	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.07	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				4 Unit	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Unit	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel				5 Jenis	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Jenis	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya				0 Jenis	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Jenis	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	5	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya				0 Unit	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Unit	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit							0 Unit		
1	5	1	2.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud				3 Unit	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Unit	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas Bangunan				0 m2	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 m2	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0 Jenis	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Jenis	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6 Jenis	49.932.200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	6 Jenis	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	699.996.000						100 %	1.350.000.000	
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa Surat-Menyurat				10 Jenis	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Jenis	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4 Rekening	599.996.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Rekening	400.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10 Jenis	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Jenis	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Laporan	900.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Tenaga Non PNS				150 Orang							150 Orang		
						Jumlah Tenaga Profesional				150 Orang							150 Orang		
						Luasan Gedung Kantor yang dilayani				600 m2							600 m2		
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai		Nilai	100 Nilai	2.644.100.000						100 Nilai	3.375.000.000	
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara				35 Unit	500.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	35 Unit	700.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara				46 Unit	1.900.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	46 Unit	2.000.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Berat yang Terpelihara				0 Unit	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Unit	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.09	4	Penyediaan Jasa	Jumlah Alat Angkutan Darat				0 Unit			PENDAPATA			0	0 Unit		BADAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tak Bermotor yang dipelihara					-		N ASLI DAERAH (PAD)					-	PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				0 Unit						0 Unit		
1	5	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel				5 Jenis	34.100.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Jenis	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit							0 Unit		
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				5 Jenis	30.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Jenis	25.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset yang Terpelihara				0 Jenis	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Jenis	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan				5 Kali	80.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Kali	350.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				11 Unit	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	11 Unit	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Paket	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Lahan yang dipelihara/direhabilitasi				0 Ha	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Ha	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	%		%	87,5 %	1.317.500.000						87,5 %	2.945.000.000	
1	5	3	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%		%	100 %	100.000.000						100 %	200.000.000	
1	5	3	2.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi				0 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	0 Dokumen	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				250 Orang	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	250 Orang	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%		%	100 %	622.500.000						100 %	1.505.000.000	
1	5	3	2.02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana						350.000.000		PENDAPATAN ASLI	Membangun Lingkungan	Mewujudkan Pemerataan	0		-	BADAN PENANGGULANGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Kabupaten/Kota								DAERAH (PAD)	Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur yang berkualitas				N BENCANA DAERAH
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				250 Orang	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	250 Orang	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				10 Dokumen	80.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	10 Dokumen	60.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				150 Unit	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	150 Unit	20.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.02	5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana				10 Dokumen	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	10 Dokumen	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
															Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas				
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				2 Kawasan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	2 Kawasan	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				10 Orang	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	10 Orang	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.02	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				0 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	0 Dokumen	600.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				500 Orang	92.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup,	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber	0	500 Orang	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
													(PAD)	Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				DAERAH
1	5	3	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi				1 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	1 Dokumen	25.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				34 Keluarga	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	34 Keluarga	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%		%	100 %	245.000.000						100 %	340.000.000	
1	5	3	2.03	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				100 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	100 Laporan	10.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				100 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	100 Dokumen	5.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				100 Orang	100.000.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	100 Orang	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				10 Orang	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	10 Orang	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.03	5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				100 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	100 Laporan	5.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.03	6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang				100 Dokumen	45.000.000		PENDAPATAN ASLI	Membangun Lingkungan	Meningkatkan Pemerataan	0	100 Dokumen	20.000.000	BADAN PENANGGULANGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Penyakit	Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu							DAERAH (PAD)	Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				N BENCANA DAERAH
1	5	3	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%		%	70 %	350.000.000						70 %	900.000.000	
1	5	3	2.04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	1 Dokumen	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.04	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				2 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	2 Dokumen	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.04	3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				4 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Dokumen	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.04	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				6 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	6 Dokumen	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.04	5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				310 Laporan	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	310 Laporan	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.04	6	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				20 Dokumen	250.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	20 Dokumen	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	%		%	87,5 %	5.702.400.000						87,5 %	8.920.000.000	
						Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	%		%	87,5 %							87,5 %		
1	5	4	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran	%		%	96 %	5.127.400.000						96 %	7.740.000.000	
1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				150 Dokumen	4.500.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	150 Dokumen	6.000.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				100 Laporan	300.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	100 Laporan	320.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	5	4	2.01	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				100 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	100 Dokumen	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	4	2.01	4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				100 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	100 Dokumen	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	4	2.01	5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				3 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	3 Dokumen	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	4	2.01	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						327.400.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0		1.000.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	4	2.01	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				10 Orang	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	10 Orang	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	4	2.01	8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0		-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	4	2.01	9	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				3 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	3 Dokumen	20.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	4	2.01	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0		-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
													PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
1	5	4	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	%		%	80 %	100.000.000						80 %	200.000.000	
1	5	4	2.02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi				317 Dokumen	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembanga	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	317 Dokumen	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Kebakaran								n Ekonomi Dan Pelayanan Dasar					
1	5	4	2.02	2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				5 Dokumen	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	5 Dokumen	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	4	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Jumlah Investigasi Kebakaran terhadap Jumlah Kejadian Kebakaran	%		%	100 %	50.000.000						100 %	50.000.000	
1	5	4	2.03	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				10 Dokumen	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	10 Dokumen	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	4	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	%		%	73 %	320.000.000						73 %	450.000.000	
1	5	4	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				250 Orang	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	250 Orang	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	4	2.04	2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				2 Desa/Kelurahan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2 Desa/Kelurahan	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	4	2.04	3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				10 Dokumen	220.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	10 Dokumen	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	4	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Cakupan Penyelengaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	%		%	100 %	105.000.000						100 %	480.000.000	
1	5	4	2.05	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				50 Laporan	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	50 Laporan	160.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	4	2.05	2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar				100 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	100 Dokumen	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	4	2.05	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan				10 Unit	5.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	10 Unit	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Evakuasi	Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis													
1	5	4	2.05	4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				12 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	12 Laporan	120.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TOTAL											33.514.000.000							46.885.000.000	

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						29.877.257.980							30.178.902.208	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	80 %	25.346.741.980						80 %	24.838.387.208	
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	80 %	22.726.138.784						80 %	22.648.915.212	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						22.726.138.784		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			22.648.915.212	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	80 %	-						80 %	-	
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	tahun		tahun	1 tahun	581.180.200						1 tahun	495.443.600	
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						24.878.800		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0		19.987.200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						24.893.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0		19.958.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						294.838.500				Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0		255.498.400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						86.569.900		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0		50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						150.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0		150.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	30.000.000						100 %	19.854.000	
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			19.854.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						651.922.996							599.924.396	
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						200.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			199.998.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						451.922.996		PENDAPATAN ASLI		Meningkatkan Kualitas Kota yang			399.926.396	SATUAN POLISI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
													DAERAH		Berwawasan Lingkungan				PAMONG PRAJA
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	1.357.500.000						100 %	1.074.250.000	
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.232.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			949.250.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						75.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			75.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	(Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan / (Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat + yang teridentifikasi Satpol PP) x 100%	%		%	100 %	4.530.516.000						100 %	5.340.515.000	
1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	(Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan / (Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat + yang teridentifikasi Satpol PP) x 100%	%		%	100 %	4.227.516.000						100 %	4.603.940.000	
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah KasuJumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,				365 Hari	647.575.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		365 Hari	647.575.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Pengamanan, dan Pengawalans Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan													
						Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				0 Kasus							0 Kasus		
1	5	2	2.01	2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				365 Kasus	1.635.476.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		365 Kasus	1.635.590.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				0 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		0 Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan								PENDAPATAN		Meningkatkan Kualitas Kota yang				SATUAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						1.740.750.000		ASLI DAERAH		Berwawasan Lingkungan			2.030.075.000	POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia						203.715.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			240.700.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	2.01	6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	2.01	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			25.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	2.01	8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat						-							25.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	2.01	9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				0 Laporan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		0 Laporan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						273.000.000							722.575.000	
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota						30.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			647.575.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	2.02	2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota						168.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	2.02	3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota						75.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH					75.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						30.000.000							14.000.000	
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman				1 Laporan	30.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		0	1 Laporan	14.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada														
TOTAL											29.877.257.980							30.178.902.208	

DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						13.992.941.078								15.401.287.430	
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	nilai		nilai	71 nilai	8.434.218.200							71 nilai	8.889.967.280	
1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	nilai		nilai	50 nilai	6.000.000.000							50 nilai	6.100.000.000	
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				50 Paket	6.000.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50 Paket	6.100.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	nilai		nilai	75 nilai	15.000.000							75 nilai	40.000.000	
1	6	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3 Unit	15.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Unit	40.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	nilai		nilai	75 nilai	751.762.200							75 nilai	1.096.872.254	
1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	19.993.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Paket	56.872.254	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	31.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Paket	100.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 jenis	27.643.000				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 jenis	50.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	199.997.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Paket	200.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	40.080.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Paket	50.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	9.198.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Dokumen	40.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	23.850.000	Semua Kab/Kota, Semua			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan	100.000.000	DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kecamatan, Semua Kelurahan			yang unggul, sehat dan berdaya saing				
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	400.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan	500.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai		nilai	79 nilai	33.370.000						79 nilai	40.000.000	
1	6	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	33.370.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Unit	40.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai		nilai	75 nilai	1.062.086.000						75 nilai	1.040.500.000	
1	6	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	500.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	140.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	140.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 laporan	921.586.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	900.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai		nilai	75 nilai	572.000.000						75 nilai	572.595.026	
1	6	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	272.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21 Unit	342.595.026	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Unit	40.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				15 Unit	100.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit	140.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	50.000.000	DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan	%		%	86.66 %	1.398.999.850						86.66 %	1.589.821.335	
1	6	2	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan UGB dan PUB yang termonitor	%		%	100 %	549.999.950						100 %	793.001.335	
1	6	2	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				12 Dokumen	549.999.950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Persentase pelaksanaan UGB dan PUB yang termonitor	12 Dokumen	793.001.335	DINAS SOSIAL
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Mendapatkan Pembinaan	%		%	70 %	848.999.900						70 %	796.820.000	
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				34 Orang	734.100.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase PSKS yang Mendapatkan Pembinaan	34 Orang	667.820.000	DINAS SOSIAL
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota				6 orang	97.900.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase PSKS yang Mendapatkan Pembinaan	6 orang	108.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota				30 orang	16.999.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase PSKS yang Mendapatkan Pembinaan	30 orang	21.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase layanan rehabilitas sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi	%		%	78.94 %	1.582.078.178						78.94 %	1.644.059.177	
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%		%	61.06 %	746.442.353						61.06 %	984.485.000	
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai denga standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota				80 Orang	559.425.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	80 Orang	584.060.000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	76.250.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	25 Orang	57.845.000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	80.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	10 Orang	171.680.000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan				6 Orang			PENDAPATAN	Meningkatkan	Meningkatkan	Persentase penyandang	6 Orang	170.900.000	DINAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota					30.767.353		ASLI DAERAH	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti			SOSIAL
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%		%	91.63 %	835.635.825						91.63 %	659.574.177	
1	6	4	2.02	3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				220 Orang	200.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	220 Orang	245.600.000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.02	4	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	17.998.425		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	20 Orang	18.400.000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				270 Orang	17.637.400		PENDAPATAN ASLI DAERAH			Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	270 Orang	16.574.177	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.02	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	25.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	30 Orang	44.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	425.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	30 Orang	200.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				27 Orang	20.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH			Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	27 Orang	21.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				85 Orang	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	85 Orang	84.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				10 Dokumen	30.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	10 Dokumen	30.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%		%	85.36 %	1.554.249.950						85.36 %	1.662.481.868	
1	6	5	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang Dijangkau, Dirujuk, dan Dipantau Pemeliharaannya	%		%	20.68 %	-						20.68 %	60.000.000	
1	6	5	2.01	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	jumlah anak - anak terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten / Kota				6 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase Anak Terlantar yang Dijangkau, Dirujuk, dan Dipantau Pemeliharaannya	6 Orang	20.000.000	DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	6	5	2.01	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak - anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota				6 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase Anak Terlantar yang Dijangkau, Dirujuk, dan Dipantau Pemeliharaannya	6 Orang	20.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	5	2.01	3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara Kewenangan Kabupaten / Kota				6 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase Anak Terlantar yang Dijangkau, Dirujuk, dan Dipantau Pemeliharaannya	6 Orang	20.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Miskin terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	%		%	95 %	1.554.249.950						95 %	1.602.481.868	
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				30000 Keluarga	1.251.125.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase Keluarga Miskin terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	30000 Keluarga	1.150.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota				6273 KPM	303.124.950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase Keluarga Miskin terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	6273 KPM	452.481.868	DINAS SOSIAL
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%		%	82 %	783.394.900						82 %	981.000.000	
1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten / kota	%		%	82 %	538.590.800						82 %	620.000.000	
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota				14049 Orang	348.774.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten / kota	14049 Orang	415.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				14049 Orang	144.816.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten / kota	14049 Orang	150.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	6	2.01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				57 Unit	45.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat	57 Unit	55.000.000	DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
															Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	bencana bagi korban bencana daerah kabupaten / kota			
1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat yang tanggap terhadap bencana	%		%	62 %	244.804.100						62 %	361.000.000	
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota				3 KSB	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat yang tanggap terhadap bencana	3 KSB	70.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota				104 Orang	244.804.100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat yang tanggap terhadap bencana	104 Orang	291.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%		%	80 %	240.000.000						80 %	633.957.770	
1	6	7	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota yang terpelihara	%		%	55 %	240.000.000						55 %	633.957.770	
1	6	7	2.01	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam pahlawan Nasional Kabupaten / Kota				2 Dokumen	50.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota yang terpelihara	2 Dokumen	70.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota				1 Makam	190.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota yang terpelihara	1 Makam	563.957.770	DINAS SOSIAL
											TOTAL	13.992.941.078						15.401.287.430	

DINAS KETENAGAKERJAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						10.000.000.000								11.498.230.550	
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	%		%	83.5 %	7.490.236.425						83.5 %	8.653.641.107	
2	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	83.77 %	5.445.243.375						83.77 %	6.258.218.211	
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					14 Bulan	5.445.243.375	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Disnaker	14 Bulan	6.258.218.211	DINAS KETENAGAKERJAAN
						Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang							29 Orang		
2	7	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	82.15 %	320.770.000						82.15 %	368.549.461	
2	7	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				31 Paket	34.850.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	31 Paket	40.225.500	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan				31 Orang	285.920.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	31 Orang	328.323.961	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	81.93 %	871.944.750						81.93 %	948.142.618	
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				1 Paket	5.215.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	1 Paket	5.998.771	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan				2 Paket	26.091.700	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	2 Paket	29.993.857	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	23.282.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	5 Paket	41.991.399	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan				3 Paket	456.435.800	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	3 Paket	362.029.500	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	1	2.0	5	Penyediaan Barang	Jumlah Paket Barang				20 Paket		Kota	PENDAPATAN		Mewujudkan Birokrasi	Pegawai	20 Paket		DINAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
			6		Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan					44.846.250	Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Disnaker		42.112.651	KETENAGAKERJAAN
2	7	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	8.574.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	4 Dokumen	9.857.546	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				226 Laporan	307.500.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	226 Laporan	456.158.894	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	79.62 %	311.508.800						79.62 %	456.658.228	
2	7	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	150.008.800	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	2 Unit	200.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan				16 Unit	161.500.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	16 Unit	256.658.228	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	83.15 %	208.380.000						83.15 %	256.147.536	
2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.650.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	1 Laporan	4.199.140	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan				6 Laporan	44.432.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	6 Laporan	41.991.399	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan				13 Laporan	160.298.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	13 Laporan	209.956.997	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemIKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daeraherintahan Daerah	%		%	79.3 %	332.389.500						79.3 %	365.925.053	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						234.877.500		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker		269.944.711	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan Yang Dipelihara				9 Paket	97.512.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	9 Paket	95.980.342	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	%		%	3.3 %	114.994.800						3.3 %	135.440.100	
2	7	2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	114.994.800						1 Dokumen	135.440.100	
2	7	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro				43 Perusahaan	114.994.800	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Tenaga Kerja	43 Perusahaan	135.440.100	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	%		%	55 %	1.561.767.755						55 %	1.578.819.955	
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikasi Kelulusan	%		%	100 %	1.458.292.755						100 %	1.459.292.755	
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n				111 Orang	1.458.292.755	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pencari Kerja	111 Orang	1.459.292.755	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi	%		%	15 %	51.775.000						15 %	59.763.600	
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasia				25 LPK	51.775.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pencari Kerja	25 LPK	59.763.600	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	3	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	51.700.000						1 Dokumen	59.763.600	
2	7	3	2.04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas				25 Perusahaan	51.700.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pencari Kerja	25 Perusahaan	59.763.600	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN	Persentase Pencari	%		%	23,5 %							23,5 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					TENAGA KERJA	Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan					372.182.900							512.455.939	
2	7	4	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	%		%	23.5 %	191.589.900						23.5 %	299.490.341	
2	7	4	2.01	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				0 Orang	94.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pencari Kerja	0 Orang	179.963.141	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	4	2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Yang Mendapat Sosialisasi Bimbingan Jabatan				6 SMK	51.339.900	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pencari Kerja	6 SMK	59.763.600	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	4	2.01	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				1 Unit	46.250.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pencari Kerja	1 Unit	59.763.600	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker	%		%	5 %	138.610.500						5 %	167.965.598	
2	7	4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Aplikasi Yang Dipelihara				3 Aplikasi	62.600.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pencari Kerja	3 Aplikasi	71.985.256	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				250 Orang	76.010.500	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pencari Kerja	250 Orang	95.980.342	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	4	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilayani	%		%	100 %	41.982.500						100 %	45.000.000	
2	7	4	2.04	2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Persentase Jumlah Calon PMI Yang Terlayani				1 Unit	41.982.500	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pencari Kerja	1 Unit	45.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	%		%	69 %	460.818.120						69 %	617.873.449	
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan	%		%	80 %	-						80 %	47.990.171	
2	7	5	2.01	2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				100 Perusahaan	-	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Tenaga Kerja	100 Perusahaan	17.996.314	DINAS KETENAGAKERJAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Ulu							
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				25 Laporan	-	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Tenaga Kerja	25 Laporan	29.993.857	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	%		%	80 %	460.818.120						80 %	569.883.278	
2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				2 Perkara	96.874.560	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pekerja	2 Perkara	119.975.427	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				50 Perkara	89.996.500	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pekerja	50 Perkara	119.975.427	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				3 Asosiasi&SP	101.264.560	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pekerja	3 Asosiasi&SP	119.975.427	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				4 Lembaga	172.682.500	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pekerja	4 Lembaga	209.956.997	DINAS KETENAGAKERJAAN
										TOTAL	10.000.000.000							11.498.230.550	

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						12.016.543.788								8.060.144.803	
2	8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Nilai		Nilai	76 Nilai	8.825.692.738						76 Nilai	3.163.784.803	
2	8	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		Orang/Bulan	37 Orang/Bulan	6.666.350.675						37 Orang/Bulan	-	
2	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	6.666.350.675	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	37 Orang/bulan	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	75 Nilai	952.972.063						75 Nilai	1.017.784.803	
2	8	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	376.598.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2 Paket	400.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
															Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
2	8	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	272.749.200		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2 Paket	285.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	90.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	3 Paket	90.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	10.983.200		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Paket	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				49 Laporan	202.641.663		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	49 Laporan	202.784.803	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai		Nilai	75 Nilai	300.000.000						75 Nilai	850.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	8	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	300.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	4 Unit	850.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai		Nilai	75 Nilai	411.211.200						75 Nilai	526.000.000	
2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	12 Laporan	176.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	361.211.200		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	13 Laporan	350.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai		Nilai	75 Nilai	495.158.800						75 Nilai	770.000.000	
2	8	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				62 Unit	430.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	62 Unit	525.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Jenis	65.158.800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	7 Jenis	70.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Unit	175.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase jumlah OPD yang telah melakukan penyusunan anggaran yang Responsif Gender (Jumlah OPD yang telah menyusun Anggaran Responsif Gender/Seluruh OPD x 100)	%		%	88,24 %	450.000.000						88,24 %	935.000.000	
2	8	2	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	300.000.000						1 Dokumen	605.000.000	
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan				10 Perangkat Daerah	150.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	10 Perangkat Daerah	313.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Kabupaten/Kota													
															Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing					
2	8	2	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				34 Perangkat Daerah	150.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	34 Perangkat Daerah	291.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
															Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing					
															Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing					
															Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing					
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Industri Rumahan yang Dibina	Industri Rumahan		Industri Rumahan	20 Industri Rumahan	150.000.000						20 Industri Rumahan	330.000.000	
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	220.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	2	2.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Organisasi	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	3 Organisasi	110.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO per 100.000 Penduduk Perempuan	%		%	8.50 %	325.000.000						8.50 %	726.000.000	
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Cakupan RT Terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan	%		%	13.33 %	250.000.000						13.33 %	550.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	250.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	550.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan	Lembaga		Lembaga	5 Lembaga	75.000.000						5 Lembaga	176.000.000	
						Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang		Orang	40 Orang							40 Orang		
2	8	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				40 Orang	75.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	40 Orang	176.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga	%		%	71,43 %	700.000.000						71,43 %	1.138.500.000	
2	8	4	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	dokumen		dokumen	6 dokumen	700.000.000						6 dokumen	1.138.500.000	
						Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen						6 Dokumen		
						Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia.	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen						6 Dokumen		
						Prosentase keluarga yang mendapatkan pelayanan PUSPAGA	%		%	1.2 %						1.2 %		
2	8	4	2.01	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				6 Dokumen	700.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	6 Dokumen	1.138.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase OPD yang Memiliki Data Terpilah	%		%	33,33 %	200.000.000						33,33 %	365.860.000	
2	8	5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di	Jumlah opd Terlatih Penyediaan Data Terpilah	OPD		OPD	12 OPD	200.000.000						12 OPD	365.860.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	200.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	365.860.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	%		%	32 %	559.999.750						32 %	971.000.000	
2	8	6	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai tindak lanjut dari hasil Evaluasi KLA oleh Kementerian PPPA yang disusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	260.000.000						1 Dokumen	496.000.000	
2	8	6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				25 Organisasi	260.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	25 Organisasi	496.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dibina	Lembaga		Lembaga	21 Lembaga	299.999.750						21 Lembaga	475.000.000	
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	299.999.750		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak	1 Dokumen	475.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA (jumlah klien UPTD PPA yang sudah tuntas penanganannya dibagi jumlah klien yang ditangani UPTD PPA dikalikan 100)	%		%	67 %	955.851.300						67 %	760.000.000	
2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak	%		%	2.13 %	200.000.000						2.13 %	460.000.000	
2	8	7	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Perangkat Daerah	200.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	15 Perangkat Daerah	460.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Orang		Orang	81 Orang	650.000.000						81 Orang	-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	8	7	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota				81 Orang	650.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	81 Orang	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Terbina	Lembaga		Lembaga	10 Lembaga	105.851.300						10 Lembaga	300.000.000	
2	8	7	2.03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	105.851.300		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Lembaga Penyedia Layanan Bagi AMPK	1 Dokumen	300.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						3.679.289.479							5.658.170.910	
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai Dengan Regulasi	%		%	11,76 %	589.289.479						11,76 %	1.158.170.910	
2	13	4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	589.289.479						2 Dokumen	1.158.170.910	
2	13	4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				1 Dokumen	314.289.479	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kelurahan di Kota Balikpapan	1 Dokumen	550.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	4	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				2 Dokumen	275.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kelurahan di Kota Balikpapan	2 Dokumen	608.170.910	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Nilai swadaya masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	Rupiah		Rupiah	83.950.000.000 Rupiah	3.090.000.000						83.950.000.000 Rupiah	4.500.000.000	
2	13	5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen		Dokumen	35 Dokumen	3.090.000.000						35 Dokumen	4.500.000.000	
						2. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	Lembaga		Lembaga	10 Lembaga							10 Lembaga		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya														
						3. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan		Laporan	3 Laporan							3 Laporan		
						4. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan		Laporan	4 Laporan							4 Laporan		
						5.Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen							5 Dokumen		
2	13	5	2.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				35 Dokumen	490.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Lembaga Masyarakat di Kota Balikpapan	35 Dokumen	550.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	400.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Lembaga Masyarakat di Kota Balikpapan	10 Lembaga	1.650.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				3 Laporan	450.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Lembaga Masyarakat di Kota Balikpapan	3 Laporan	350.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	5	2.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				4 Laporan	150.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Lembaga Masyarakat di Kota Balikpapan	4 Laporan	350.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				5 Dokumen	1.600.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Lembaga Masyarakat di Kota Balikpapan	5 Dokumen	1.600.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						2.166.003.733								3.390.527.890	
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Prosentase tindak lanjut rekomendasi kebijakan terkait pengendalian penduduk	%		%	64 %	707.600.300						64 %		978.203.395	
2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah	SD/MI	%		%	15.63 %							15.63 %		
						SLTP/MTs	%		%	12.05 %	107.600.000						12.05 %		328.203.395	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk															
2	14	2	2.01	9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS				40 Satuan Pendidikan	107.600.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	1. SD/MI 2. SLTP/MTs	40 Satuan Pendidikan	328.203.395	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kajian Grand Desain Pengendalian Penduduk yang disusun	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	600.000.300						12 Dokumen	650.000.000	
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia				14 Dokumen	600.000.300		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	14 Dokumen	650.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%		%	13,40 %	600.528.433						13,40 %	954.207.726	
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	105.000.000						1 Dokumen	115.000.000	
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
						Jumlah PUS Peserta KB Aktif	PUS		PUS	77100 PUS							77100 PUS		
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	75.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	85.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	30.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Laporan	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kelompok IMP yang terbina	Kelompok IMP		Kelompok IMP	34 Kelompok IMP	208.065.900						34 Kelompok IMP	369.207.726	
						Jumlah laporan hasil penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) untuk PKB/PLKB	Laporan		Laporan	1 Laporan						1 Laporan		
						Jumlah Organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan	Organisasi		Organisasi	34 Organisasi						34 Organisasi		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB														
2	14	3	2.02	1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				34 Organisasi	67.991.800		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	34 Organisasi	139.207.726	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.02	3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah laporan hasil penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)				1 Laporan	140.074.100		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Laporan	230.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah faskes terbina regulasi tentang standar layanan KB	Faskes		Faskes	300 Faskes	167.462.533						300 Faskes	350.000.000	
						Jumlah tenaga kesehatan pemberi layanan KB yang terlatih	Orang		Orang	30 Orang							30 Orang		
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	167.462.533		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	1. Tenaga Kesehatan 2. Faskes 3. Pasangan Usia Subur (PUS)	1 Laporan	350.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Intervensi pada Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas)	intervensi		intervensi	34 intervensi	120.000.000						34 intervensi	120.000.000	
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
2	14	3	2.04	4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				1 Laporan	120.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Laporan	120.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/poktan	Persen		Persen	12,75 Persen	857.875.000						12,75 Persen	1.458.116.769	
						Persentase Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan/Poktan	%		%	12.75 %							12.75 %		
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terbentuknya Kelompok kegiatan baru : Bina Keluarga Balita (BKB)	Kelompok		Kelompok	34 Kelompok	857.875.000						34 Kelompok	1.458.116.769	
						Terbentuknya Kelompok Kegiatan Baru : Bina Keluarga Lansia	Kelompok		Kelompok	34 Kelompok							34 Kelompok		
						Terbentuknya Kelompok Kegiatan Baru : Bina	Kelompok		Kelompok	34 Kelompok							34 Kelompok		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Keluarga Remaja													
						Terbentuknya Kelompok Kegiatan Baru PIK-Remaja	KIelompok		KIelompok	34 KIelompok							34 KIelompok		
						Terbentuknya Kelompok Kegiatan Baru UPPKA	Kelompok		Kelompok	34 Kelompok							34 Kelompok		
2	14	4	2.01	1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Terbentuknya kelompok kegiatan BKB				34 Kelompok	82.875.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	34 Kelompok	178.116.769	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
						Terbentuknya kelompok kegiatan BKL				34 Kelompok							34 Kelompok		
						Terbentuknya kelompok kegiatan BKR				34 Kelompok							34 Kelompok		
						Terbentuknya kelompok kegiatan PIK Remaja				34 Kelompok							34 Kelompok		
						Terbentuknya kelompok kegiatan UPPKA				34 Kelompok							34 Kelompok		
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				16 Unit	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	16 Unit	70.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4	2.01	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya orientasi dan pelatihan pelaksana Teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB				34 Kelompok	175.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	34 Kelompok	210.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
						Terlaksananya orientasi dan pelatihan pelaksana Teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKL				34 Kelompok							34 Kelompok		
						Terlaksananya orientasi dan pelatihan pelaksana Teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKR				34 Kelompok							34 Kelompok		
						Terlaksananya orientasi dan pelatihan pelaksana Teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga PIK-Remaja				34 Kelompok							34 Kelompok		
						Terlaksananya orientasi dan pelatihan pelaksana Teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga UPPKA				10 Kelompok							10 Kelompok		
2	14	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB)				68 Orang	150.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	68 Orang	300.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
						Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKL)				68 Orang							68 Orang		
						Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR)				68 Orang							68 Orang		
						Jumlah Kader yang				40 Orang							40 Orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Guru BK)														
						Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Kader UPPKA)				30 Orang							30 Orang		
						Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (PS/KS)				68 Orang							68 Orang		
2	14	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pembinaan Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				6 Kegiatan	350.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	6 Kegiatan	500.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
						Rangkaian Peringatan Hari Keluarga Nasional				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
2	14	4	2.01	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Pembinaan Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan				4 Kegiatan	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	4 Kegiatan	200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
									TOTAL		17.861.837.000							17.108.843.603	

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						16.599.270.400							23.145.000.000	
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kesesuaian pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan	%		%	22 %	15.108.163.500						22 %	21.180.000.000	
1	3	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	4 dokumen	15.108.163.500						4 dokumen	21.180.000.000	
						Jumlah penataan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	kawasan		kawasan	2 kawasan							2 kawasan		
1	3	9	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota				4 Dokumen	2.350.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	4 Dokumen	1.800.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1	3	9	2.01	2	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				2 Kawasan	330.625.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	2 Kawasan	330.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1	3	9	2.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				2 Kawasan	10.124.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	2 Kawasan	16.000.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1	3	9	2.01	4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				2 Kawasan	2.148.563.500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	2 Kawasan	2.600.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1	3	9	2.01	5	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan				300 Orang	145.600.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	300 Orang	400.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1	3	9	2.01	6	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan				1 Dokumen	9.375.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	1 Dokumen	50.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
												Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan							
1	3	#			PROGRAM	Indeks penyelenggaraan	nilai		nilai	0.15 nilai							0.15 nilai		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	penataan ruang					1.491.106.900							1.965.000.000	
1	3	#	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	1 dokumen	381.913.000						1 dokumen	-	
1	3	#	2.01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	381.913.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	1 Dokumen	-	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1	3	#	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	6 dokumen	382.254.900						6 dokumen	1.000.000.000	
						Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	6 dokumen							6 dokumen		
1	3		2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				6 Dokumen	57.930.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	6 Dokumen	200.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1	3		2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				6 Dokumen	184.324.900	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	6 Dokumen	400.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1	3		2.02	3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				6 Dokumen	140.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	6 Dokumen	400.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1	3		2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	dokumen		dokumen	250 dokumen	406.448.000						250 dokumen	570.000.000	
1	3		2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				250 Dokumen	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	250 Dokumen	70.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1	3		2.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				1 Dokumen	406.448.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	1 Dokumen	500.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1	3		2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian	dokumen		dokumen	265 dokumen	320.491.000						265 dokumen	395.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang														
1	3		2.04	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	165.491.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pengawasan dan penertiban lahan/bangunan di Balikpapan yang tidak sesuai dengan tata ruang	1 Dokumen	100.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1	3		2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				265 Dokumen	155.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pengawasan dan penertiban lahan/bangunan di Balikpapan yang tidak sesuai dengan tata ruang	265 Dokumen	295.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						106.900.729.600								56.065.000.000	
2	10	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	nilai		nilai	81 nilai	12.067.784.300						81 nilai	12.695.000.000	
2	10	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	-						3 Dokumen	15.000.000	
2	10	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Dokumen rancangan kerja dan evaluasi kerja DPPR Kota Balikpapan	3 Dokumen	15.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang		orang	45 orang	7.500.000.000						45 orang	7.750.000.000	
2	10	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 orang	7.500.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai ASN DPPR Kota Balikpapan	45 orang	7.750.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang		orang	15 orang	361.000.000						15 orang	320.000.000	
						Jumlah unit peningkatan sarpras disiplin pegawai	unit		unit	2 unit							2 unit		
2	10	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	25.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai ASN DPPR Kota Balikpapan	2 Unit	20.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Semua Kelurahan							RUANG
2	10	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	150.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai ASN DPPR Kota Balikpapan	15 Orang	150.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	186.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai ASN DPPR Kota Balikpapan	20 Orang	150.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket		paket	6 paket	2.287.986.300						6 paket	2.265.000.000	
2	10	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.998.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	1 Paket	15.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	400.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	6 Paket	300.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	1 Paket	40.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	783.079.800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	6 Paket	690.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	71.911.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	1 Paket	82.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	6.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	2 Dokumen	30.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	7.997.500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	12 Laporan	8.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Semua Kelurahan							RUANG
2	10	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130 Laporan	1.000.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	130 Laporan	1.100.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket mebel yang disediakan	paket		paket	3 paket	515.000.000						3 paket	830.000.000	
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit		unit	5 unit							5 unit		
2	10	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	460.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	5 Unit	500.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 paket	52.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	3 paket	30.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	1	2.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				3 Unit	3.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	3 Unit	50.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	1 Unit	250.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan		laporan	12 laporan	778.798.000						12 laporan	905.000.000	
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan		laporan	36 laporan							36 laporan		
2	10	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	44.935.500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	1 Laporan	70.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Laporan	30.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	1 Laporan	35.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						yang Disediakan						Semua Kelurahan							RUANG
															Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan				
2	10	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	703.862.500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	36 Laporan	800.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/ lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	unit		unit	9 unit	625.000.000						9 unit	610.000.000	
						Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit		unit	17 unit							17 unit		
2	10	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	390.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	17 Unit	375.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	175.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	9 Unit	175.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	60.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	30 Unit	60.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	2			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase luas pemanfaatan ijin lokasi yang diterbitkan	%		%	72 %	-						72 %	150.000.000	
2	10	2	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saran teknis yang diberikan pada permohonan ijin lokasi	%		%	84 %	-						84 %	150.000.000	
2	10	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan	Jumlah dokumen koordinasi dalam pemberian izin lokasi				1 dokumen	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Bangunan di Kota Balikpapan	1 dokumen	150.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Berusaha														
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase fasilitasi penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi	%		%	40 %	60.000.000						40 %	70.000.000	
2	10	4	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	5 dokumen	60.000.000						5 dokumen	70.000.000	
						jumlah data sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	12 dokumen							12 dokumen		
2	10	4	2.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pemohon fasilitasi sengketa IMTN Kota Balikpapan	12 Dokumen	10.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	4	2.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Berita Acara	60.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pemohon fasilitasi sengketa IMTN Kota Balikpapan	5 Berita Acara	60.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Luas Tanah yang diberikan ganti rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	%		%	69.49 %	94.651.765.300						69.49 %	42.800.000.000	
2	10	5	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	dokumen		dokumen	3 dokumen	94.651.765.300						3 dokumen	42.800.000.000	
2	10	5	2.01	1	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				3 Dokumen	382.900.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Tanah yang akan dibebaskan oleh DPPR	3 Dokumen	800.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh				1 Dokumen	94.268.865.300	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Tanah yang akan dibebaskan oleh DPPR	1 Dokumen	42.000.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
2	10	9			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase luas tanah yang sudah dimanfaatkan	%		%	89 %	121.180.000						89 %	350.000.000	
2	10	9	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pemberian izin membuka tanah	dokumen		dokumen	240 dokumen	121.180.000						240 dokumen	350.000.000	
						Jumlah dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara	dokumen		dokumen	12 dokumen							12 dokumen		
2	10	9	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah				240 Dokumen	114.930.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Permohonan IMTN Kota Balikpapan	240 Dokumen	250.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	9	2.01	2	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara				12 Dokumen	6.250.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Permohonan IMTN Kota Balikpapan	12 Dokumen	100.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
										TOTAL	123.500.000.000							79.210.000.000	

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						103.999.783.700								163.498.000.000	
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	77,66 Nilai	17.959.788.000							77,66 Nilai	19.768.000.000	
2	11	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja	Laporan		Laporan	2 Laporan	14.975.000							2 Laporan	35.000.000	
						Jumlah Dokumen SAKIP	Laporan		Laporan	1 Laporan								1 Laporan		
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP				1 Laporan	5.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Laporan	10.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja				2 Laporan	9.975.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	2 Laporan	25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	orang/ Bulan		orang/Bulan	75 orang/Bulan	12.220.342.000							75 orang/Bulan	12.835.500.000	
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN				75 Orang/bulan	12.220.342.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	75 Orang/bulan	12.835.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah pegawai pendataan dan pendaftaran retribusi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000							1 Dokumen	1.700.000.000	
2	11	1	2.04	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	jumlah pegawai pendataan dan pendaftaran retribusi				1 Dokumen	1.500.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Dokumen	1.700.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	Orang		Orang	20 Orang	50.000.000							20 Orang	250.000.000	
2	11	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	20 Orang	250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Frekuensi rapat, Korrdinasi dan Koordinasi dalam daerah dan luar daerah	Laporan		Laporan	140 Laporan	722.945.000							140 Laporan	1.160.000.000	
						Jumlah Dokumen Pelaporan Dukungan Pelaksanaan SPBE	ok		ok	1 ok								1 ok		
						Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen								6 Dokumen		
						Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Paket		Paket	4 Paket								4 Paket		
						Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket		Paket	5 Paket								5 Paket		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Jumlah jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket		Paket	8 Paket								8 Paket		
2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5 Paket	8.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	5 Paket	10.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8 Paket	99.950.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	8 Paket	200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor				6 Dokumen	219.995.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	6 Dokumen	250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan				4 Paket	45.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	4 Paket	50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat, Korrdinasi dan Koordinasi dalam daerah dan luar daerah				140 Laporan	300.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	140 Laporan	500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Dukungan Pelaksanaan SPBE				1 Dokumen	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Dokumen	150.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah jenis mebel	Unit		Unit	10 Unit	99.890.000						10 Unit	175.000.000	
						Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit		Unit	2 Unit							2 Unit		
2	11	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	jumlah jenis mebel				10 Unit	49.890.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	10 Unit	75.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2 Unit	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	2 Unit	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan		Laporan	6 Laporan	1.739.996.000						6 Laporan	1.862.500.000	
						jumlah jenis jasa surat menyurat	Laporan		Laporan	2 Laporan							2 Laporan		
						Luasan Gedung Kantor yang dilayani	Laporan		Laporan	8 Laporan							8 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jenis jasa surat menyurat				2 Laporan	10.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		2 Laporan	12.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				6 Laporan	499.996.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		6 Laporan	600.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dilayani				8 Laporan	1.230.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		8 Laporan	1.250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Pemeliharaan	Unit		Unit	1 Unit	1.611.640.000						1 Unit	1.750.000.000	
						Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Unit		Unit	71 Unit							71 Unit		
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit		Unit	100 Unit							100 Unit		
2	11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara				71 Unit	1.441.640.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		71 Unit	1.500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				100 Unit	70.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		100 Unit	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan				1 Unit	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		1 Unit	150.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data dokumen perencanaan	%		%	50 %	604.998.700						50 %	630.000.000	
2	11	2	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	104.998.700						1 Dokumen	200.000.000	
2	11	2	2.01	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	104.998.700	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat, Instansi lainnya serta OPD Pemerintah Kota Balikpapan pengampu urusan yang terkait dengan kinerja pengelolaan lingkungan hidup,ketahanan	1 Dokumen	200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
																terhadap bencana dan perubahan iklim.			
2	11	2	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	500.000.000						1 Dokumen	430.000.000	
2	11	2	2.02	3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun				1 Dokumen	500.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	1 Dokumen	430.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	1.559.999.550						100 Persen	2.175.000.000	
2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Kegiatan		Kegiatan	23 Kegiatan	399.999.700						23 Kegiatan	800.000.000	
						Jumlah kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang dilaksanakan	Dokumen		Dokumen	20 Dokumen							20 Dokumen		
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim yang dilaksanakan	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen							3 Dokumen		
						Jumlah Pengujian Sampel	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				20 Dokumen	99.999.950		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerintah, Swasta dan Masyarakat	20 Dokumen	150.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
															Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan				
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim yang dilaksanakan				3 Dokumen	99.999.750		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerintah, Swasta dan Masyarakat	3 Dokumen	150.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Unit Instalasi Pemanenan Air Hujan				1 Unit							1 Unit		
2	11	3	2.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian Sampel				1 Dokumen	200.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerintah, Swasta dan Masyarakat	1 Dokumen	500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/ Data Informasi	Laporan		Laporan	6 Laporan	1.000.000.000						6 Laporan	1.050.000.000	
						Jumlah Informasi Lingkungan	Laporan		Laporan	6 Laporan							6 Laporan		
						Jumlah Usaha dan Sarana guna Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Titik		Titik	3 Titik							3 Titik		
2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Dokumen / Data Informasi				6 Laporan	950.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Jumlah Upaya Penanggulangan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	6 Laporan	950.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	2.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				3 Titik	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Jumlah Upaya Penanggulangan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	3 Titik	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan	Jumlah kegiatan Koordinasi dan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	159.999.850						2 Dokumen	325.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran														
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen							2 Dokumen		
						Jumlah upaya pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan							4 Kegiatan		
2	11	3	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				2 Dokumen	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat	2 Dokumen	75.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	2.03	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				2 Dokumen	109.999.850		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat	2 Dokumen	250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	Persen		Persen	10,59 Persen	25.700.000.000						10,59 Persen	58.400.000.000	
2	11	4	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	25.700.000.000						1 Dokumen	58.400.000.000	
						Jumlah Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang		Orang	15 Orang							15 Orang		
						Jumlah RTH/Taman	Ha		Ha	390.46 Ha							390.46 Ha		
						Luas Kebun Raya	Ha		Ha	309.22 Ha							309.22 Ha		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota													
2	11	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	300.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Dokumen	250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						25.300.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0		58.000.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	4	2.01	6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				15 Orang	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	15 Orang	150.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang melaporkan limbahnya	Persen		Persen	44,74 Persen	580.000.000						44,74 Persen	650.000.000	
2	11	5	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen		Dokumen	20 Dokumen	55.000.000						20 Dokumen	100.000.000	
2	11	5	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				20 Dokumen	55.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		20 Dokumen	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	5	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provisnis dalam rangka Pengangkutan,	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	525.000.000						3 Dokumen	550.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Pengolahan dan/atau penimbunan													
2	11	5	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				3 Dokumen	525.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerintah, Swasta dan Masyarakat	3 Dokumen	550.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	persen		persen	29,27 persen	225.000.000						29,27 persen	475.000.000	
2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin lingkungan dan PPLH yang difasilitasi pemenuhan ketentuannya dan kewajibannya	Dokumen		Dokumen	85 Dokumen	225.000.000						85 Dokumen	475.000.000	
						Jumlah Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Orang		Orang	4 Orang							4 Orang		
						Jumlah Usaha yang diawasi	Laporan		Laporan	35 Laporan							35 Laporan		
2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Izin Lingkungan dan PPLH yang Difasilitasi Pemenuhan Ketentuannya dan				85 Dokumen	100.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	85 Dokumen	175.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Kewajibannya								Perubahan Iklim					
2	11	6	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				4 Orang	25.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	4 Orang	50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				35 Laporan	100.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	35 Laporan	250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	persen		persen	100 persen	369.997.700						100 persen	1.075.000.000	
2	11	8	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kampanye Lingkungan yang diadakan	Orang		Orang	150 Orang	369.997.700						150 Orang	1.075.000.000	
						Jumlah Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dokumen		Dokumen	30 Dokumen							30 Dokumen		
						Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga		Lembaga	32 Lembaga							32 Lembaga		
2	11	8	2.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH				32 Lembaga	109.999.800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		32 Lembaga	250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup				30 Dokumen	109.999.700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		30 Dokumen	450.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						yang Dilaksanakan													
2	11	8	2.01	3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				150 Orang	149.998.200		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		150 Orang	375.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang terselenggara	persen		persen	100 persen	250.000.000						100 persen	400.000.000	
2	11	9	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Entitas		Entitas	4 Entitas	250.000.000						4 Entitas	400.000.000	
2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				4 Entitas	250.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		4 Entitas	400.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan yang terselesaikan	persen		persen	100 persen	149.999.750						100 persen	250.000.000	
2	11		2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan	Dokumen		Dokumen	30 Dokumen	149.999.750						30 Dokumen	250.000.000	
2	11		2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				30 Dokumen	149.999.750		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		30 Dokumen	250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan	Persen		Persen	99 Persen	56.600.000.000						99 Persen	79.675.000.000	
2	11		2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	56.600.000.000						5 Dokumen	79.440.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Jumlah Kegiatan Pengurangan Sampah	Laporan		Laporan	4 Laporan							4 Laporan		
2	11		2.01	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota						300.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			450.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11		2.01	2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			400.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11		2.01	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				0 Ton	54.450.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		0 Ton	73.200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11		2.01	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						450.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11		2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			80.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11		2.01	6	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			60.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11		2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						1.400.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			5.000.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11		2.02		Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Jumlah Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	-						1 Dokumen	30.000.000	
2	11		2.02	1	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11		2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis	Laporan		Laporan	4 Laporan	-						4 Laporan	205.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Pengelolaan Sampah													
						Jumlah monev yang memenuhi target	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
						Jumlah Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Unit		Unit	4 Unit							4 Unit		
2	11		2.03	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11		2.03	2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			125.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11		2.03	3	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						3.500.000.000							1	
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	Persen		Persen	10,59 Persen	3.500.000.000						10,59 Persen	1	
2	11	4	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Hektar		Hektar	309.22 Hektar	3.500.000.000						309.22 Hektar	1	
2	11	4	2.01	3	Pengelolaan Kebun Raya	Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan				48.17 %	3.500.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		48.17 %	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						10.999.980.356							12.500.000.000	
2	11				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan	persen		persen	99 persen	10.999.980.356						99 persen	12.500.000.000	
2	11		2.01		Pengelolaan Sampah						10.999.980.356							12.500.000.000	
2	11		2.01	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				0 Ton	10.999.980.356		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		0 Ton	12.500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TOTAL																			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
							118.499.764.056							175.998.000.001	

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						14.879.873.000								17.360.284.400	
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	79 Nilai	13.977.523.000							79 Nilai	15.529.359.400	
2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		Orang/Bulan	43 Orang/Bulan	7.000.000.000							43 Orang/Bulan	7.000.000.000	
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	7.000.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	43 Orang/bulan	7.000.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	Paket		Paket	1 Paket	20.350.000							1 Paket	36.550.000	
2	12	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	20.350.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Paket	36.550.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai		Nilai	81 Nilai	4.579.085.800							81 Nilai	5.900.009.400	
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Paket	15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	856.280.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	10 Paket	900.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	2.295.612.700	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	8 Paket	3.300.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	1.071.545.400	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Paket	1.320.009.400	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	12.500.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Laporan	15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				37 Laporan	338.147.700	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	37 Laporan	350.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit		Unit	5 Unit	447.800.000						5 Unit	402.800.000	
2	12	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	262.800.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Unit	262.800.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				32 Unit	145.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	32 Unit	70.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	40.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Unit	70.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	##	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai		Nilai	81 Nilai	1.405.562.200						81 Nilai	1.570.000.000	
2	12	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	80.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional	0	2 Laporan	120.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Semua Kelurahan		Transformasi Pelayanan Publik	dan Berorientasi Pelayanan Publik				SIPIL
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	222.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 Laporan	250.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	1.103.562.200	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Laporan	1.200.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	##	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periziniannya	Nilai		Nilai	81 Nilai	524.725.000						81 Nilai	620.000.000	
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	409.725.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	26 Unit	450.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				36 Unit	15.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	36 Unit	20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	100.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	41 Unit	150.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	##	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen		Persen	89.78 Persen	87.100.000						89.78 Persen	100.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	##	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen		Dokumen	3440 Dokumen	87.100.000						3440 Dokumen	100.000.000	
2	12	2	2.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				3440 Dokumen	87.100.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3440 Dokumen	100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	##	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	Persen		Persen	96.53 Persen	50.925.000						96.53 Persen	100.000.000	
2	##	3	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan		Laporan	1 Laporan	50.925.000						1 Laporan	100.000.000	
2	12	3	2.02	8	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	50.925.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	##	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Secara Elektronik	Persen		Persen	100 Persen	764.325.000						100 Persen	1.630.925.000	
2	##	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Laporan		Laporan	2 Laporan	442.325.000						2 Laporan	1.280.925.000	
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				5 Dokumen	67.500.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Dokumen	906.100.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	4	2.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan				6 Dokumen	374.825.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional	0	6 Dokumen	374.825.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Data Kependudukan						Semua Kelurahan		Transformasi Pelayanan Publik	dan Berorientasi Pelayanan Publik				SIPIL
2	##	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		Laporan	3 Laporan	322.000.000						3 Laporan	350.000.000	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
2	12	4	2.03	3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				3 Laporan	322.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Laporan	350.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
										TOTAL	14.879.873.000							17.360.284.400	

DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						78.200.000.000								83.146.614.153	
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	77 Nilai	28.956.304.723						77 Nilai	23.931.954.153	
2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	87 Nilai	16.301.744.550						87 Nilai	17	
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN				14 Dokumen	16.301.744.550		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	14 Dokumen	17	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				117 orang/bulan							117 orang/bulan		
2	15	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0		-	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	0 Nilai	-						0 Nilai	7.854.921.666	
2	15	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0		7.854.921.666	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	87 Nilai	1.014.000.000						87 Nilai	1.327.200.000	
2	15	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan				155 paket	864.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	155 paket	1.036.800.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				155 Orang							155 Orang		
2	15	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yangmengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 orang	150.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	5 orang	290.400.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah pegawai yang mengikuti diklat				5 Orang							5 Orang		
2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	87 Nilai	2.062.856.000						87 Nilai	1.735.440.000	
2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor				19 Jenis	100.800.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	19 Jenis	120.960.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				19 paket							19 paket		
2	15	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				8 paket	458.807.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	8 paket	345.600.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				74 paket	668.349.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	74 paket	656.640.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				31 paket	576.900.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	31 paket	354.240.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan				4 Jenis	18.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	4 Jenis	18.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				4 paket							4 paket		
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat dan koordinasi luar dan dalam daerah				110 Kali	240.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	110 Kali	240.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110 laporan							110 laporan		
2	15	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai		Nilai	0 Nilai	-						0 Nilai	-	
2	15	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0		-	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai		Nilai	87 Nilai	5.736.989.000						87 Nilai	9.372.632.470	
2	15	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat				2 Jenis	5.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	2 Jenis	5.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 laporan							2 laporan		
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				4 Rekening	1.943.998.000				Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	4 Rekening	2.332.800.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				4 laporan							4 laporan		
2	15	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa sewa komputer				5 Unit	-				Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	5 Unit	1.338.480.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jasa sewa mobil				7 Unit							7 Unit		
						Jasa sewa printer				30 Unit							30 Unit		
						Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				8 paket							8 paket		
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				15 laporan	3.787.991.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	15 laporan	5.696.352.470	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai		Nilai	82 Nilai	3.840.715.173						82 Nilai	3.641.760.000	
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara				119 Unit	2.361.600.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	119 Unit	2.500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah kendaraan dinsa operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				119 unit							119 unit		
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Frekuensi pemeliharaan				7 Kali	1.479.115.173		PENDAPATAN ASLI		Mewujudkan Pemerataan	0	7 Kali	1.141.760.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Lainnya								DAERAH (PAD)		Infrastruktur yang berkualitas				
						Interior ruang				1 Paket							1 Paket		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				8 unit							8 unit		
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase load faktor angkutan orang umum	%		%	47 %	48.357.695.277						47 %	55.739.660.000	
2	15	2	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kesesuaian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	%		%	31 %	20.000.000						31 %	80.000.000	
2	15	2	2.01	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				300 dokumen	20.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	300 dokumen	80.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				300 orang							300 orang		
						Rencana induk LLAJ kota yang disahkan				0 dokumen							0 dokumen		
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	%		%	50 %	32.524.502.477						50 %	36.507.160.000	
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				26 unit	824.963.012		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	26 unit	1.225.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Alat Penerangan Jalan				206 Unit	2.720.600.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	206 Unit	3.517.340.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Penyediaan Alat Pengendali Pengguna Jalan				50 Unit							50 Unit		
						Jumlah Penyediaan Cermin Tikungan				20 Unit							20 Unit		
						Jumlah Penyediaan Marka Jalan				1000 m2							1000 m2		
						Jumlah Penyediaan Pagar Pengaman Jalan (guardrail)				100 Meter							100 Meter		
						Jumlah Penyediaan Pita Penggaduh				1955 m2							1955 m2		
						Jumlah Penyediaan Rambu Lalu Lintas				242 Unit							242 Unit		
						Jumlah Penyediaan Tanda Patok Tikungan/delineator				30 Unit							30 Unit		
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 paket							1 paket		
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				3603 unit							3603 unit		
2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah APILL terpelihara				16 Lokasi	1.128.464.265		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	16 Lokasi	1.278.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Kamera terpelihara				96 Unit							96 Unit		
						Jumlah Pos Pantau terpelihara				3 Lokasi							3 Lokasi		
						Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan				117 unit							117 unit		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Terpelihara													
						Jumlah Sistem Lalu Lintas terpelihara				1 Sistem							1 Sistem		
						Jumlah Taman Lalu Lintas terpelihara				1 Lokasi							1 Lokasi		
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Alat Penerangan Jalan dipelihara				16320 Unit	27.850.475.200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	16320 Unit	30.486.320.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah bulan pembayaran rekening Listrik PJU				12 Bulan							12 Bulan		
						Jumlah Marka Jalan dipelihara				2000 m2							2000 m2		
						Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				19332 unit							19332 unit		
						Jumlah Rambu Lalu Lintas dipelihara				1000 Unit							1000 Unit		
2	15	2	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	%		%	40 %	800.000.000						40 %	700.000.000	
2	15	2	2.03	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Terminal				1 dokumen	500.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	1 dokumen	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				1 dokumen							1 dokumen		
2	15	2	2.03	2	Pembangunan Gedung Terminal						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0		-	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara				2 unit	300.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	2 unit	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Terminal yang terpelihara				2 lokasi							2 lokasi		
2	15	2	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase lokasi parkir yang dilakukan pembinaan	%		%	71 %	4.350.000.000						71 %	5.582.500.000	
2	15	2	2.04	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0		137.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 laporan	4.350.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	1 laporan	5.445.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah lokasi parkir yang dikelola				1 lokasi							1 lokasi		
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan	%		%	69 %	4.375.000.000						69 %	5.750.000.000	
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				10 unit	2.150.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	10 unit	2.500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Terminal yang terpelihara				10 jenis							10 jenis		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	2	2.05	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah orang yang mengikuti diklat PKB				7 Orang	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	7 Orang	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 orang							7 orang		
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Tanda Lulus Pengujian Kendaraan Bermotor yag tersedia				35000 kartu	650.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	35000 kartu	1.125.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				35000 dokumen							35000 dokumen		
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemeliharaan sarana dan Prasarana PKB yang dipelihara				3 jenis	1.350.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	3 jenis	1.750.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				3 unit							3 unit		
2	15	2	2.05	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2 laporan	125.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	2 laporan	175.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah pelaksanaan koordinasi				2 kegiatan							2 kegiatan		
2	15	2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan MRLL untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%		%	42 %	1.746.000.000						42 %	1.940.000.000	
2	15	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Analisa Kebutuhan				1 dokumen	605.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	1 dokumen	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Dokumen LHR yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
						Jumlah Dokumen MRLL atau Andalalin Kawasan yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
						Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				3 laporan							3 laporan		
2	15	2	2.06	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah lokasi penyediaan perlengkapan jalan dalam rangka MRLL				10 lokasi	991.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	10 lokasi	1.210.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah lokasi ZOSS yang dibangun				5 lokasi							5 lokasi		
						Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				2406 unit							2406 unit		
						Panjang jalur sepeda yang dibangun				2400 meter							2400 meter		
2	15	2	2.06	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0		20.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.06	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan rapat Forum LLAJ				4 kegiatan	150.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur	0	4 kegiatan	210.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
													(PAD)		yang berkualitas				
						Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4 laporan							4 laporan		
2	15	2	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan	%		%	11 %	2.952.192.800						11 %	3.160.000.000	
2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Posko Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan				2 kegiatan	359.999.800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	2 kegiatan	360.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				16 laporan							16 laporan		
						Jumlah pelaksanaan lomba pelopor dan sosialisasi keselamatan lalu lintas				14 kegiatan							14 kegiatan		
2	15	2	2.08	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				227 Laporan	2.592.193.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	227 Laporan	2.800.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%		%	21 %	1.480.000.000						21 %	1.900.000.000	
2	15	2	2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum Massal yang di pelihara dan dioperasionalkan				6 unit	1.480.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	6 unit	1.900.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				62 unit							62 unit		
						Jumlah dokumen hasil survey load faktor				1 dokumen							1 dokumen		
						Jumlah Halte Angkutan Umum yang dipelihara				45 halte							45 halte		
						Jumlah Halte Angkutan yang dibangun				10 halte							10 halte		
2	15	2	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	52 %	60.000.000						52 %	70.000.000	
2	15	2	2.10	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 dokumen	60.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	12 dokumen	70.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan angkutan perkotaan				12 kegiatan							12 kegiatan		
2	15	2	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas	Presentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas	%		%	52 %	50.000.000						52 %	50.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
2	15	2	2.14	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 laporan	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	1 laporan	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah sistem informasi manajemen angkutan yang dikelola				1 aplikasi							1 aplikasi		
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelayanan kepelabuhanan	%		%	64 %	886.000.000						64 %	3.475.000.000	
2	15	3	2.04		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan	%		%	82 %	-						82 %	50.000.000	
2	15	3	2.04	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	0 Dokumen	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan	%		%	82 %	886.000.000						82 %	3.425.000.000	
2	15	3	2.12	2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal						-				Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0		-	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	2.12	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				1 unit	486.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	1 unit	3.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	2.12	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah kendaraan operasional pengawasan pelabuhan pengumpan lokal				2 Lokasi	400.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	2 Lokasi	425.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				2 laporan							2 laporan		
2	15	3	2.19		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase TUKS yang dilakukan pengawasan	%		%	0 %	-						0 %	-	
2	15	3	2.19	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0		-	DINAS PERHUBUNGAN
									TOTAL		78.200.000.000							83.146.614.153	

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						17.045.797.500							17.940.361.721		
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	nilai		nilai	85 nilai	7.146.731.000						85 nilai	7.397.864.667	
2	16	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	dokumen		dokumen	1 dokumen	-						1 dokumen	-	
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	nilai		nilai	85 nilai	5.500.000.000						85 nilai	5.500.000.000	
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	laporan		laporan	1 laporan							1 laporan		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan		laporan	1 laporan							1 laporan		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	laporan		laporan	12 laporan							12 laporan		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang		orang	25 orang							25 orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	5.500.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	25 Orang/bulan	5.500.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	-				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Laporan	-				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	-				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	nilai		nilai	85 nilai	-						85 nilai	-	
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan		laporan	1 laporan							1 laporan		
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen		dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
2	16	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	-				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	-				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen		dokumen	1 dokumen	40.000.000						1 dokumen	-	
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen		dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
2	16	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	-				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	-				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	40.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	0 Orang	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	nilai		nilai	85 nilai	839.231.000						85 nilai	807.500.000	
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan		laporan	1 laporan							1 laporan		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		laporan	40 laporan							40 laporan		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	paket		paket	3 paket							3 paket		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket		paket	2 paket							2 paket		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	paket		paket	1 paket							1 paket		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Disediakan													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket		paket	2 paket							2 paket		
2	16	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Paket	9.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	162.800.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Paket	260.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	300.070.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Paket	180.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	26.486.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Paket	27.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0		1.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0		25.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	29.875.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	25.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	300.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	40 Laporan	280.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai		nilai	85 nilai	-						85 nilai	382.500.000	
						Jumlah Paket mebel Yang Disediakan	paket		paket	0 paket							0 paket		
2	16	1	2.07	5	Pengadaan Mebel						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0		82.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0		300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai		nilai	85 nilai	437.500.000						85 nilai	307.864.667	
						Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	laporan		laporan	12 laporan							12 laporan		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan		laporan	12 laporan							12 laporan		
						Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan		laporan	1 laporan							1 laporan		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	laporan		laporan	1 laporan							1 laporan		
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	2.800.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa				12 Laporan			PENDAPATAN		Mewujudkan Birokrasi	0	12 Laporan		DINAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					200.000.000		ASLI DAERAH		Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			90.064.667	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	15.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	220.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	gedung kantor		gedung kantor	1 gedung kantor	330.000.000						1 gedung kantor	400.000.000	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya	unit		unit	5 unit							5 unit		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit		unit	5 unit							5 unit		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		unit	33 unit							33 unit		
						Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		unit	1 unit							1 unit		
2	16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	120.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Unit	165.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	130.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Unit	160.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	30.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	33 Unit	25.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 gedung kantor	25.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 gedung kantor	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Unit	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%		%	80 %	2.752.431.400						80 %	3.028.253.393	
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	2.752.431.400						1 dokumen	3.028.253.393	
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	dokumen		dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen	dokumen		dokumen	1 dokumen							1 dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Komunikasi Krisis													
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	dokumen		dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	dokumen		dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	dokumen		dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	dokumen		dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
						Jumlah Layanan Hubungan Media	layanan		layanan	3 layanan							3 layanan		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	unit		unit	23 unit							23 unit		
						Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	orang		orang	72 orang							72 orang		
						Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%		%	80 %							80 %		
2	16	2	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				1 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	82.136.250	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				1 Dokumen	383.348.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	250.267.391	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	2.01	3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	113.408.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	109.515.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	417.094.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	315.403.200	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1.248.426.400		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	1.095.150.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	53.275.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	109.515.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	2.01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				3 Layanan	41.280.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Layanan	76.660.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	2.01	9	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis				1 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	55.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				72 Orang	52.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	72 Orang	54.757.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	2	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				23 Unit	443.600.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	23 Unit	829.848.552	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara	%		%	80 %	7.146.635.100						80 %	7.514.243.661	
2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	1 dokumen	4.048.858.200						1 dokumen	4.516.000.000	
						Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	domain		domain	1 domain							1 domain		
						Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	unit		unit	1 unit							1 unit		
						Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	%		%	90 %							90 %		
2	16	3	2.01	1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Domain	1.025.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Domain	1.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	2.01	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1 Unit	4.048.755.700		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Unit	4.500.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	unit		unit	10 unit	3.097.776.900						10 unit	2.998.243.661	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	dokumen		dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	dokumen		dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ekosistem SPBE	dokumen		dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information	dokumen		dokumen	1 dokumen							1 dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Officer (GCIO)													
						Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	dokumen		dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
						Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	layanan		layanan	4 layanan							4 layanan		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	PD		PD	6 PD							6 PD		
						Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola (unit)	unit		unit	1 unit							1 unit		
						Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah	%		%	80 %							80 %		
2	16	3	2.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	104.840.500		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	398.243.661	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	2.02	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				1 Dokumen	46.194.500		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	2.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	350.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Unit	450.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	2.02	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				1 Dokumen	9.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	2.02	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				6 Perangkat Daerah	40.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 Perangkat Daerah	80.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				10 Unit	913.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	10 Unit	1.050.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	2.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				4 Layanan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Layanan	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	1.385.354.500		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)				1 Dokumen	30.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	119.387.400		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	290.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	#				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						203.652.500							326.341.095	
2	#	2			PROGRAM	Persentase Perangkat Daerah	%		%	80 %							80 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	(PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					203.652.500							326.341.095	
2	#	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun	dokumen		dokumen	1 dokumen	203.652.500						1 dokumen	326.341.095	
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen		dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
						Jumlah Infrastruktur Statistik	unit		unit	1 unit							1 unit		
						Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	PD		PD	37 PD							37 PD		
						Persentase PD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data	%		%	50 %							50 %		
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	87.907.500		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	126.341.095	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	2	2.01	2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				0 Orang	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	0 Orang	140.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	2	2.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				0 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	0 Dokumen	60.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	2	2.01	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				37 Perangkat Daerah	75.020.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	37 Perangkat Daerah	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	2	2.01	5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik				1 Unit	25.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Unit	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	2	2.01	6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	15.725.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						350.550.000							599.891.718	
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah	%		%	80 %	350.550.000						80 %	599.891.718	
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang ditetapkan	dokumen		dokumen	1 dokumen	350.550.000						1 dokumen	549.891.718	
						Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	laporan		laporan	1 laporan							1 laporan		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan		laporan	1 laporan							1 laporan		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan	PD		PD	22 PD							22 PD		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Keamanan Informasi													
						Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian	%		%	80 %								80 %		
2	21	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	29.200.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	2	2.01	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	24.225.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	147.125.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	180.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	2	2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				22 Perangkat Daerah	150.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	22 Perangkat Daerah	269.891.718	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	2	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Jaringan Komunikasi Sandi	PD		PD	8 PD	-						8 PD	50.000.000	
						Persentase sumber daya pola hubungan komunikasi sandi	%		%	80 %							80 %		
2	21	2	2.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				8 Perangkat Daerah	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	8 Perangkat Daerah	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
										TOTAL	17.600.000.000							18.866.594.534	

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						13.889.602.361							14.984.336.236	
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	70.00 Nilai	8.925.703.400						70.00 Nilai	9.934.336.236	
2	17	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	-						1 Dokumen	-	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Laporan	2 Laporan							2 Laporan		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan							5 Laporan		
						Nilai SAKIP OPD	nilai		nilai	78.9 nilai							78.9 nilai		
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	-			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	1 Dokumen	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	"Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah"				1 Dokumen	-			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	1 Dokumen	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	-			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	1 Dokumen	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	-			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	1 Dokumen	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
														Berkualitas dan Berkeadilan					
2	17	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	-			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	1 Dokumen	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	"Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD"				2 Laporan	-			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	2 Laporan	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"				5 Laporan	-			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	5 Laporan	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	nilai		nilai	78 nilai	6.518.703.400						78 nilai	6.518.703.400	
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen							4 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen							2 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		Dokumen	248 Dokumen							248 Dokumen		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		Laporan	24 Laporan							24 Laporan		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		Orang/bulan	34 Orang/bulan							34 Orang/bulan		
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	6.518.703.400		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	34 Orang/bulan	6.518.703.400	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	"Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD "				248 Dokumen	-				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	248 Dokumen	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	-				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	4 Dokumen	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan				1 Laporan	-				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang	Pegawai DKUMKMP	1 Laporan	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					SKPD	Keuangan Akhir Tahun SKPD									Berbasis Keunggulan Lokal				
2	17	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	"Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD"				24 Laporan	-				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	24 Laporan	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	-				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	2 Dokumen	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	nilai		nilai	70 nilai	-						70 nilai	-	
						Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen							2 Dokumen		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	2 Laporan							2 Laporan		
						"Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD "	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan							12 Laporan		
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	2 Laporan							2 Laporan		
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen							4 Dokumen		
2	17	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	-				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	4 Dokumen	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	"Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD "				2 Dokumen	-				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	2 Dokumen	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	-				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	1 Laporan	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	-				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	2 Laporan	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	-				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	2 Laporan	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	-				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	12 Laporan	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	-				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	1 Dokumen	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	nilai		nilai	70 nilai	-						70 nilai	315.000.000	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen							2 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen							12 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen							3 Dokumen		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		Orang	40 Orang							40 Orang		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	60 Paket							60 Paket		
2	17	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	-			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pegawai DKUMKMP	60 Paket	65.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	-			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	3 Dokumen	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	-			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	2 Dokumen	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	-			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	12 Dokumen	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	-			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pegawai DKUMKMP	40 Orang	250.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	nilai		nilai	70 nilai	839.500.000						70 nilai	1.040.632.836	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen							2 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen							6 Dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen							6 Dokumen		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		Laporan	36 Laporan							36 Laporan		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	24 Laporan							24 Laporan		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	3 Paket							3 Paket		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket							1 Paket		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket	3 Paket							3 Paket		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket							1 Paket		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	5 Paket							5 Paket		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket							1 Paket		
2	17	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	1 Paket	20.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai DKUMKMP	5 Paket	120.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai DKUMKMP	1 Paket	7.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	207.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai DKUMKMP	3 Paket	240.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	105.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai DKUMKMP	3 Paket	125.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai DKUMKMP	2 Dokumen	55.632.836	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	-				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	1 Paket	12.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				36 Laporan	22.500.000				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	36 Laporan	100.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	330.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	24 Laporan	360.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6 Dokumen	-				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang	Pegawai DKUMKMP	6 Dokumen	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
															Berbasis Keunggulan Lokal				DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6 Dokumen	-				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	6 Dokumen	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai		Nilai	70 Nilai	50.000.000						70 Nilai	150.000.000	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		Unit	5 Unit							5 Unit		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		Unit	2 Unit							2 Unit		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	10 Unit							10 Unit		
2	17	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	-				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	2 Unit	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	-				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	5 Unit	75.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai DKUMKMP	10 Unit	75.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai		nilai	70 nilai	1.037.500.000						70 nilai	1.265.000.000	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	4 Laporan							4 Laporan		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	5 Laporan							5 Laporan		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
2	17	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	1 Laporan	10.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	200.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai DKUMKMP	4 Laporan	230.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	827.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	5 Laporan	1.025.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai		Nilai	70 Nilai	480.000.000						70 Nilai	645.000.000	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit							1 Unit		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Unit	22 Unit							22 Unit		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		Unit	34 Unit							34 Unit		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit		Unit	12 Unit							12 Unit		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						yang Dipelihara													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	7 Unit							7 Unit		
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakny				22 Unit	300.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	22 Unit	320.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				34 Unit	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	34 Unit	20.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	130.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Unit	130.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 Unit	125.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	7 Unit	50.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang telah memiliki izin usaha simpan pinjam	persen		persen	5.65 persen	50.000.000						5.65 persen	100.000.000	
2	17	2	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha		Unit Usaha	27 Unit Usaha	50.000.000						27 Unit Usaha	100.000.000	
						persentase verifikasi izin usaha simpan pinjam yang masuk dinas terkait	persen		persen	100 persen							100 persen		
2	17	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit Usaha	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Koperasi di Kota Balikpapan	0 Unit Usaha	100.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
						Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				27 Unit Usaha							27 Unit Usaha		
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	persen		persen	20.92 persen	268.117.350						20.92 persen	350.000.000	
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha		Unit Usaha	10 Unit Usaha	268.117.350						10 Unit Usaha	350.000.000	
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian,	"Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan,				10 Unit Usaha	83.124.700		PENDAPATAN ASLI	Memperkuat Ketahanan	Mewujudkan Ekonomi	Koperasi di Kota	10 Unit Usaha	150.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota"							DAERAH (PAD)	Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Balikpapan			KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	3	2.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja				110 Unit Usaha	184.992.650		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Koperasi di Kota Balikpapan	110 Unit Usaha	200.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya	Persen		Persen	51.85 Persen	49.999.998						51.85 Persen	100.000.000	
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit Usaha		Unit Usaha	4 Unit Usaha	49.999.998						4 Unit Usaha	100.000.000	
						Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha		Unit Usaha	8 Unit Usaha							8 Unit Usaha		
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				8 Unit Usaha	-				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Koperasi di Kota Balikpapan	8 Unit Usaha	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	4	2.01	2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan				4 Unit Usaha	49.999.998		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Koperasi di Kota Balikpapan	4 Unit Usaha	100.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	Persen		Persen	30.68 Persen	-						30.68 Persen	150.000.000	
2	17	5	2.03		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti Pelatihan	Orang		Orang	70 Orang	-						70 Orang	150.000.000	
						Persentase Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti pelatihan	Persen		Persen	0.76 Persen							0.76 Persen		
2	17	5	2.03	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti Pelatihan				0 70 Orang	-				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Usaha mikro anggota koperasi atau calon anggota koperasi	0 70 Orang	150.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase koperasi sehat	Persen		Persen	5.02 Persen	50.000.000						5.02 Persen	100.000.000	
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga		Keluarga	25 Keluarga	50.000.000						25 Keluarga	100.000.000	
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang		Orang	25 Orang							25 Orang		
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				25 Orang	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Koperasi di Kota Balikpapan	25 Orang	100.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
2	17	6	2.01	2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				25 Keluarga	-				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Koperasi di Kota Balikpapan	25 Keluarga	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen		Persen	83.3 Persen	1.265.700.000						83.3 Persen	1.450.000.000	
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang		Orang	30 Orang	1.265.700.000						30 Orang	1.450.000.000	
						Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang		Orang	15 Orang							15 Orang		
						Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha		Unit Usaha	48 Unit Usaha							48 Unit Usaha		
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha		Unit Usaha	50 Unit Usaha							50 Unit Usaha		
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha		Unit Usaha	100 Unit Usaha							100 Unit Usaha		
						Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha		Unit Usaha	90 Unit Usaha							90 Unit Usaha		
						persentase Usaha mikro yang memiliki izin	Persen		Persen	1.05 Persen							1.05 Persen		
2	17	7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				0 Dokumen	560.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Usaha Mikro di Kota Balikpapan	0 Dokumen	250.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
						Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				48 Unit Usaha						48 Unit Usaha		
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				50 Unit Usaha	125.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Usaha Mikro di Kota Balikpapan	50 Unit Usaha	250.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	7	2.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				90 Unit Usaha	-			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Usaha Mikro di Kota Balikpapan	90 Unit Usaha	100.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
														dan Berkeadilan					
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				100 Unit Usaha	380.200.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Usaha Mikro di Kota Balikpapan	100 Unit Usaha	500.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				15 Orang	200.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Usaha Mikro di Kota Balikpapan	15 Orang	350.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	7	2.01	6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				30 Orang	-			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Usaha Mikro di Kota Balikpapan	30 Orang	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	Persen		Persen	5.25 Persen	3.280.081.613						5.25 Persen	2.800.000.000	
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha		Unit Usaha	65 Unit Usaha	3.280.081.613						65 Unit Usaha	2.800.000.000	
						Persentase usaha mikro yang mendapatkan Fasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persen		Persen	0.24 Persen							0.24 Persen		
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				65 Unit Usaha	3.280.081.613		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Usaha Mikro di Kota Balikpapan	65 Unit Usaha	2.800.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						600.000.000							24.536.597.136	
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persen		Persen	1.31 Persen	350.000.000						1.31 Persen	24.211.597.136	
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	350.000.000						1 Dokumen	24.211.597.136	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen							3 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen							5 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen							4 Dokumen		
						"umlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen							2 Dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Serta Masyarakat													
3	31	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				4 Dokumen	200.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan	4 Dokumen	350.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				5 Dokumen	150.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan	5 Dokumen	500.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				0 Dokumen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan	0 Dokumen	911.597.136	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2 Dokumen	-				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan	2 Dokumen	22.350.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3	31	2	2.01	6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	-				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan	1 Dokumen	100.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase hasil pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen		Persen	12.96 Persen	100.000.000						12.96 Persen	115.000.000	
3	31	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	100.000.000						1 Dokumen	115.000.000	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
						persentase verifikasi izin usaha industri yang masuk dinas terkait	Persen		Persen	70 Persen							70 Persen		
3	31	3	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS				1 Dokumen	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan	1 Dokumen	115.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS				0 Dokumen							0 Dokumen		
3	31	3	2.01	2	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi				1 Dokumen					Mewujudkan	Industri di	1 Dokumen		DINAS KOPERASI,

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota					-				Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Kota Balikpapan		-	USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase penyediaan informasi industri yang lengkap dan terkini	Persen		Persen	58.33 Persen	150.000.000						58.33 Persen	210.000.000	
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	150.000.000						3 Dokumen	210.000.000	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan Industri di kabupaten/kota	Persen		Persen	10.64 Persen							10.64 Persen		
3	31	4	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan	1 Dokumen	50.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3	31	4	2.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				3 Dokumen	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan	3 Dokumen	110.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3	31	4	2.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan	1 Dokumen	50.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1.310.397.187							2.000.000.000	
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persen		Persen	1.31 Persen	1.310.397.187						1.31 Persen	2.000.000.000	
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK	persen		persen	57.7 persen	1.310.397.187						57.7 persen	2.000.000.000	
3	31	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				3 Dokumen	1.310.397.187		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis		3 Dokumen	2.000.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Penyebaran dan Perwilayahan Industri										Keunggulan Lokal					PERINDUSTRIAN
TOTAL											15.799.999.548							41.520.933.372	

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						16.680.000.000								17.403.883.000	
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Skor		Skor	79 Skor	13.077.281.000						79 Skor	13.699.474.000	
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang	60 Orang	8.875.431.000						60 Orang	9.512.474.000	
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.875.431.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPT Kota Balikpapan		9.512.474.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		Laporan	1 Laporan	1.349.129.000						1 Laporan	1.027.000.000	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	65 Laporan							65 Laporan		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	3 Paket							3 Paket		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket	3 Paket							3 Paket		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket							1 Paket		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	13 Paket							13 Paket		
2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	39.993.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPT Kota Balikpapan	9 Paket	50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	199.927.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPT Kota Balikpapan	13 Paket	250.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	536.625.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPT Kota Balikpapan	3 Paket	312.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	74.999.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPT Kota Balikpapan	3 Paket	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
2	18	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	27.585.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPT Kota Balikpapan	1 Laporan	15.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65 Laporan	470.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan	Pegawai DPMPT Kota Balikpapan	65 Laporan	300.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kelurahan		Berkeadilan	Lokal				
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	4 Laporan	2.252.721.000						4 Laporan	2.510.000.000	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	3 Laporan							3 Laporan		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 Laporan	10.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	550.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	12 Laporan	700.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	1.692.721.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	3 Laporan	1.800.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Unit	24 Unit	600.000.000						24 Unit	650.000.000	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Unit	8 Unit							8 Unit		
2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	350.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	25 Unit	400.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
2	18	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	250.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	8 Unit	250.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang mendapat manfaat insentif bidang penanaman modal	Persen		Persen	5 Persen	163.500.000						5 Persen	325.250.000	
2	18	2	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	-						1 Dokumen	100.000.000	
2	18	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat dunia usaha	1 Dokumen	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	163.500.000						1 Dokumen	225.250.000	
						Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
2	18	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	88.500.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis	Pelaku Usaha	1 Dokumen	140.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Semua Kelurahan			Keunggulan Lokal				TERPADU
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen	75.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku Usaha	1 Dokumen	85.250.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Persen		Persen	85 Persen	2.500.000.000						85 Persen	915.409.000	
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	2.500.000.000						5 Dokumen	915.409.000	
						Jumlah Peraturan daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
2	18	3	2.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat dunia usaha	1 Dokumen	215.409.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				5 Dokumen	2.500.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat dunia usaha	5 Dokumen	700.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Persen		Persen	68 Persen	341.939.000						68 Persen	1.215.000.000	
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha		Kegiatan Usaha	96 Kegiatan Usaha	341.939.000						96 Kegiatan Usaha	1.215.000.000	
						Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang		Orang	10000 Orang						10000 Orang		
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	1500 Pelaku Usaha						1500 Pelaku Usaha		
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1500 Pelaku Usaha	154.300.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pemohon dan Obyek Perizinan	1500 Pelaku Usaha	835.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				96 Kegiatan Usaha	39.550.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pemohon dan Obyek Perizinan	96 Kegiatan Usaha	150.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				10000 Orang	148.089.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pemohon dan Obyek Perizinan	10000 Orang	230.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	226.960.000						100 Persen	540.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	permasalahan penanaman modalnya													
2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha		Kegiatan Usaha	6 Kegiatan Usaha	226.960.000						6 Kegiatan Usaha	540.000.000	
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha							100 Pelaku Usaha		
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				4 Kegiatan Usaha.	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	PMA dan PMDN Kota Balikpapan	4 Kegiatan Usaha.	120.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				100 Pelaku Usaha	106.448.000				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	PMA dan PMDN Kota Balikpapan	100 Pelaku Usaha	270.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				6 Kegiatan Usaha	120.512.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	PMA dan PMDN Kota Balikpapan	6 Kegiatan Usaha	150.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang berlaku efektif	Persen		Persen	85 Persen	370.320.000						85 Persen	708.750.000	
2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	370.320.000						1 Dokumen	708.750.000	
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	370.320.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku Usaha Investasi dan Kegiatan Penanaman Modal di Kota Balikpapan	1 Dokumen	708.750.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
									TOTAL	16.680.000.000							17.403.883.000	

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						28.105.608.000							50.243.439.000		
2	19	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Poin		Poin	72 Poin	10.139.792.400						72 Poin	13.363.439.000		
2	19	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang	38 Orang	6.512.833.092						38 Orang	7.724.239.000		
2	19	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	6.512.833.092		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DPOP kota Balikpapan	38 Orang/bulan	7.724.239.000		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Dokumen	3800 Dokumen	1.204.676.400						3800 Dokumen	1.454.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	100 Laporan							100 Laporan			
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	8 Paket							8 Paket			
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		Paket	4 Paket							4 Paket			
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket	3 Paket							3 Paket			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket							1 Paket			
2	19	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DPOP kota Balikpapan	1 Paket	67.000.000		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	427.887.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DPOP kota Balikpapan	8 Paket	481.000.000		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
															Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing					
2	19	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	175.800.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DPOP kota Balikpapan	3 Paket	356.000.000		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan				3800 Dokume			PENDAPAT		Meningkatkan	Pegawai DPOP	3800 Dokume			DINAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Peraturan Perundang-undangan	Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				n	15.000.000		AN ASLI DAERAH		Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	kota Balikpapan	n	25.000.000	PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	55.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DPOP kota Balikpapan	4 Paket	125.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	500.989.400		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DPOP kota Balikpapan	100 Laporan	400.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	6 Laporan	1.923.782.908						6 Laporan	3.014.500.000	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	35 Laporan							35 Laporan		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Laporan	2 Laporan							2 Laporan		
2	19	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	10.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DPOP kota Balikpapan	2 Laporan	13.500.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	830.182.908		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DPOP kota Balikpapan	6 Laporan	1.713.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				35 Laporan	1.083.600.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DPOP kota Balikpapan	35 Laporan	1.288.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit	498.500.000						1 Unit	1.170.700.000	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	25 Unit							25 Unit		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Unit	143 Unit							143 Unit		
2	19	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	333.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DPOP kota Balikpapan	25 Unit	360.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang				143 Unit	115.500.000		PENDAPATAN ASLI		Meningkatkan Pemerataan Kualitas	Pegawai DPOP kota Balikpapan	143 Unit	245.700.000	DINAS PEMUDA, OLAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Dipelihara							DAERAH		Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				RAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DPOP kota Balikpapan	1 Unit	565.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Yang Kreatif, Inovatif dan Mandiri	Persen		Persen	2.4 Persen	4.570.468.600						2.4 Persen	19.555.000.000	
2	19	2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	3.472.879.600						1 Dokumen	17.265.000.000	
						Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas daya Saingnya	Orang		Orang	68 Orang							68 Orang		
						Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Orang		Orang	43 Orang							43 Orang		
						Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang		Orang	35 Orang							35 Orang		
						Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang		Orang	400 Orang							400 Orang		
						Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Orang		Orang	250 Orang							250 Orang		
2	19	2	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				35 Orang	827.980.600		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pemuda Kota Balikpapan	35 Orang	5.755.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
															Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
2	19	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				400 Orang	350.175.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH			Pemuda Kota Balikpapan	400 Orang	-	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	2	2.01	5	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan				1 Dokumen	224.109.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH			Pemuda Kota Balikpapan	1 Dokumen	-	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota														
2	19	2	2.01	7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				250 Orang	89.615.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pemuda Kota Balikpapan	250 Orang	5.755.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	2	2.01	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				43 Orang	1.981.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pemuda Kota Balikpapan	43 Orang	5.755.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	2	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1.097.589.000						1 Dokumen	2.290.000.000	
2	19	2	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	1.097.589.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Pemuda Kota Balikpapan	1 Dokumen	2.290.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang berprestasi	Persen		Persen	7 Persen	12.718.532.000						7 Persen	16.175.000.000	
2	19	3	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	200.000.000						1 Dokumen	570.000.000	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit		Unit	1 Unit							1 Unit		
						Persentase atlet pelajar yang mendapatkan pembinaan	Persen		Persen	24 Persen							24 Persen		
2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Unit	200.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Atlet Pelajar	1 Unit	570.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	3	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	1.577.072.000						4 Dokumen	1.500.000.000	
2	19	3	2.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				4 Dokumen	977.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Atlit dan Pelatih Olahraga	4 Dokumen	1.500.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	3	2.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				150 Orang	599.572.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Atlit dan Pelatih Olahraga	150 Orang	-	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	3	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	5.060.640.000						1 Dokumen	5.055.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang		Orang	500 Orang							500 Orang		
						Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pelatda		Pelatda	1 Pelatda							1 Pelatda		
2	19	3	2.03	2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				1 Pelatda	554.545.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Atlit dan pelatih olahraga	1 Pelatda	-	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	3	2.03	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				500 Orang	4.481.095.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Atlit dan pelatih olahraga	500 Orang	5.000.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	3	2.03	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	25.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Atlit dan pelatih olahraga	1 Dokumen	55.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	3	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi		Organisasi	4 Organisasi	2.950.000.000						4 Organisasi	5.050.000.000	
2	19	3	2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				4 Organisasi	2.950.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Organisasi Olahraga	4 Organisasi	5.050.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	3	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2.930.820.000						2 Dokumen	4.000.000.000	
						Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Unit		Unit	3 Unit							3 Unit		
2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				2 Dokumen	975.820.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat/Peserta Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	1.000.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	3	2.05	3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				3 Unit	1.955.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat/Peserta Olahraga Rekreasi	3 Unit	3.000.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan aktif	%		%	100 %	676.815.000						100 %	1.150.000.000	
2	19	4	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase unit kerja Organisasi Kwarcab kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	%		%	100 %	676.815.000						100 %	1.150.000.000	
2	19	4	2.01	2	Peningkatan Kapasitas	Jumlah Organisasi				1 Organisasi		Semua	PENDAPAT		Meningkatkan	Organisasi	1 Organisasi		DINAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya					676.815.000	Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	AN ASLI DAERAH		Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Kepramukaan		1.150.000.000	PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	#				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						8.466.769.000								13.430.800.000	
3	#	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	Persen		Persen	4 Persen	4.017.731.000						4 Persen	6.745.000.000	
3	#	2	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	19 Laporan	3.692.606.000						19 Laporan	6.320.000.000	
						Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit		Unit	10 Unit							10 Unit		
						Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
3	26	2	2.02	2	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	118.750.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Wisatawan	1 Dokumen	175.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	2	2.02	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				10 Unit	3.248.856.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Wisatawan	10 Unit	5.819.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	2	2.02	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				19 Laporan	325.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Wisatawan	19 Laporan	326.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	#	2	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	2 Laporan	150.125.000						2 Laporan	200.000.000	
						Prosentase Destinasi Pariwisata yang dikelola	Persen		Persen	6.6 Persen							6.6 Persen		
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	150.125.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Kelompok Sadar Wisata	2 Laporan	200.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	#	2	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Laporan		Laporan	30 Laporan	175.000.000						30 Laporan	225.000.000	
3	26	2	2.04	3	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata				30 Laporan	175.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku Usaha Pariwisata	30 Laporan	225.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	#	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan	Persen		Persen	20 Persen	3.314.626.000						20 Persen	5.515.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Pariwisata													
3	#	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3.314.626.000						3 Dokumen	5.515.000.000	
						Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen							3 Dokumen		
						Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan		Laporan	10 Laporan							10 Laporan		
						Rata-rata tinggal wisatawan nusantara	Hari		Hari	1.7 Hari							1.7 Hari		
3	26	3	2.01	1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	350.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	wisatawan	3 Dokumen	400.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				10 Laporan	2.714.626.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	wisatawan	10 Laporan	4.800.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	3	2.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	250.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wisatawan	3 Dokumen	315.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	#	4			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektualnya	Persen		Persen	18 Persen	367.256.000						18 Persen	404.000.000	
3	#	4	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit		Unit	3 Unit	160.000.000						3 Unit	404.000.000	
3	26	4	2.01	1	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				3 Unit	160.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku Ekonomi Kreatif	3 Unit	404.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	#	4	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	207.256.000						1 Dokumen	-	
						Jumlah ruang kreasi yang dikelola	Unit		Unit	1 Unit							1 Unit		
3	26	4	2.02	5	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	207.256.000				Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	-	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	#	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Persen		Persen	12 Persen	767.156.000						12 Persen	766.800.000	
3	#	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi	Orang		Orang	100 Orang	767.156.000						100 Orang	766.800.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Tingkat Dasar	bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang		Orang	100 Orang							100 Orang		
						Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang		Orang	100 Orang							100 Orang		
3	26	5	2.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				100 Orang	337.156.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatfi	100 Orang	270.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	5	2.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				100 Orang	230.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatfi	100 Orang	260.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	5	2.01	4	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				100 Orang	200.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatfi	100 Orang	236.800.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	#				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						1.427.623.000							2.300.000.000		
3	#	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	Persen		Persen	3 Persen	1.427.623.000						3 Persen	2.300.000.000	
3	#	2	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	UPTD		UPTD	1 UPTD	1.427.623.000						1 UPTD	2.300.000.000	
						Prosentase Destinasi Pariwisata yang dikelola	Persen		Persen	6.6 Persen							6.6 Persen		
3	26	2	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				1 UPTD	1.427.623.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Wisatawan	1 UPTD	2.300.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
										TOTAL	38.000.000.000							65.974.239.000	

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						9.556.999.789								10.777.603.086	
2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	79 Nilai	8.875.157.791						79 Nilai	9.566.831.561	
2	23	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	84 Nilai	5.064.325.033						84 Nilai	4.920.000.000	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang	26 Orang							26 Orang		
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	5.064.325.033	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	26 Orang/bulan	4.920.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
															Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
2	23	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	77 Nilai	596.694.758						77 Nilai	653.651.561	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen						2 Dokumen		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		Laporan	10 Laporan						10 Laporan		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	55 Laporan						55 Laporan		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	7 Paket						7 Paket		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket						1 Paket		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket						1 Paket		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	5 Paket						5 Paket		
2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	39.116.808	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Paket	50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	228.200.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	14 Paket	118.402.670	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	156.639.100	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	7 Paket	228.110.891	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Paket	27.285.350	Kota Balikpapan,	PENDAPATAN ASLI		Meningkatkan Pemerataan Kualitas	0	1 Paket	51.300.000	DINAS PERPUSTAKAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Penggandaan	yang Disediakan						Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAERAH (PAD)		Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				DAN ARSIP
2	23	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	18.703.500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2 Dokumen	20.520.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	26.750.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	10 Laporan	35.318.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	55 Laporan	150.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai		Nilai	80 Nilai	2.494.458.000						80 Nilai	2.884.100.000	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan							12 Laporan		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan							12 Laporan		
2	23	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	625.264.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	12 Laporan	786.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.869.194.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	12 Laporan	2.097.600.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai		Nilai	77 Nilai	719.680.000						77 Nilai	1.109.080.000	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit							1 Unit		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	4 Unit							4 Unit		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Unit	9 Unit							9 Unit		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		Unit	5 Unit							5 Unit		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Unit	30 Unit							30 Unit		
2	23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	147.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	9 Unit	221.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan				4 Unit	122.680.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	4 Unit	152.600.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya							(PAD)		yang unggul, sehat dan berdaya saing				
2	23	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	30.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	5 Unit	100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	270.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	30 Unit	435.480.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Unit	200.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang memenuhi standar nasional	%		%	5 %	681.841.998						5 %	1.210.771.525	
2	23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar		Eksemplar	2000 Eksemplar	540.129.498						2000 Eksemplar	988.771.525	
						Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Layanan		Layanan	1 Layanan							1 Layanan		
						Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan		Layanan	2 Layanan							2 Layanan		
						Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan		Perpustakaan	5 Perpustakaan							5 Perpustakaan		
						Persentase Peningkatan Kunjungan di Perpustakaan Daerah	%		%	12 %							12 %		
2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				1 Layanan	20.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Layanan	55.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
															Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
															Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
															berdaya saing				
2	23	2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				5 Perpustakaan	36.040.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	5 Perpustakaan	75.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
															Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
															Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
2	23	2	2.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				2 Layanan	394.898.498	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2 Layanan	625.771.525	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
															Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				2000 Eksemplar	54.191.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2000 Eksemplar	200.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
															Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
2	23	2	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	35.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	33.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
															Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
2	23	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus		Lokus	4 Lokus	141.712.500						4 Lokus	222.000.000	
						Persentase pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah	%		%	12 %							12 %		
2	23	2	2.02	1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				4 Lokus	101.712.500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	4 Lokus	200.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
															Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				1 Perpustakaan	40.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Perpustakaan	22.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						443.000.000								463.965.350	
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip yang dikelola	%		%	70 %	338.000.000							70 %	330.000.000	
2	24	2	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip	Laporan		Laporan	1 Laporan	218.000.000							1 Laporan	200.000.000	
						Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas		Berkas	100 Berkas								100 Berkas		
						Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis	%		%	55 %								55 %		
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				100 Berkas	38.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	100 Berkas	50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	24	2	2.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	180.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Laporan	150.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	24	2	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip		Arsip	500 Arsip	40.000.000						500 Arsip	70.000.000	
						Presentase arsip statis yang dikelola	%		%	80 %							80 %		
2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				500 Arsip	40.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	500 Arsip	70.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	24	2	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	1 Laporan	80.000.000						1 Laporan	60.000.000	
						Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna		Pengguna	50 Pengguna							50 Pengguna		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/JIKN	%		%	100 %							100 %		
2	24	2	2.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				50 Pengguna	20.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	50 Pengguna	30.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
															Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
2	24	2	2.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	60.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Laporan	30.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
															Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan	%		%	65 %	90.000.000						65 %	111.965.350	
2	24	3	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip		Arsip	50 Arsip	14.500.000						50 Arsip	31.965.350	
						Presentase pencipta arsip yang melakukan pemusnahan arsip	%		%	8 %							8 %		
2	24	3	2.01	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				50 Arsip	14.500.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	50 Arsip	31.965.350	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
															Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
2	24	3	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip		Arsip	50 Arsip	10.500.000						50 Arsip	15.000.000	
						Persentase pencipta arsip yang mendapatkan penyuluhan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	%		%	20 %							20 %		
2	24	3	2.02	1	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				50 Arsip	10.500.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	50 Arsip	15.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
															Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
2	24	3	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan	Arsip		Arsip	20 Arsip	35.000.000						20 Arsip	25.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Kabupaten/Kota	Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan													
						Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang telah diautentikasi	%		%	30 %							30 %		
2	24	3	2.04	1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan				20 Arsip	35.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	20 Arsip	25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
															Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
2	24	3	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip		Arsip	5 Arsip	30.000.000						5 Arsip	40.000.000	
						Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang	%		%	10 %							10 %		
2	24	3	2.05	3	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman				5 Arsip	30.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	5 Arsip	40.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
															Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
2	24	4			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase perizinan penggunaan arsip	%		%	0 %	15.000.000						0 %	22.000.000	
2	24	4	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip		Arsip	50 Arsip	15.000.000						50 Arsip	22.000.000	
						Presentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%		%	20 %							20 %		
2	24	4	2.01	2	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				50 Arsip	15.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	50 Arsip	22.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
															Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
										TOTAL	9.999.999.789							11.241.568.436	

DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						17.950.634.100								21.315.000.000	
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	persen		persen	72 persen	17.426.389.100						72 persen	20.490.000.000	
2	9	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokuman DPA-SKPD	DPA		DPA	40 DPA	-						40 DPA	-	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen							6 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DPPA		DPPA	5 DPPA							5 DPPA		
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen							5 Dokumen		
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA		RKA	40 RKA							40 RKA		
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Peralisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan							4 Laporan		
2	9	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	-		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	6 Dokumen	-	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						-		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0		-	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						-		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0		-	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						-		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0		-	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						-		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0		-	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						-		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0		-	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja								Lain-lain		Mewujudkan	0			DINAS PANGAN,

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Perangkat Daerah						-		PAD Yang Sah		Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			-	PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (dokumen)	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	13.250.000.000						2 Dokumen	15.000.000.000	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen							13 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (dokumen)	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen							4 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (dokumen)	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen							12 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	Dokumen		Dokumen	360 Dokumen							360 Dokumen		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	Laporan		Laporan	12 Laporan							12 Laporan		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang bulan)	Orang/Bulan		Orang/Bulan	1120 Orang/Bulan							1120 Orang/Bulan		
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1120 Orang/bulan	13.250.000.000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1120 Orang/bulan	15.000.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						-		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0		-	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						-		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0		-	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						-		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0		-	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						-		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0		-	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						-		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0		-	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						-		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0		-	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	9	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	776.421.600						3 Dokumen	1.385.000.000	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Laporan		Laporan	100 Laporan							100 Laporan		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	Paket		Paket	2 Paket							2 Paket		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Paket		Paket	2 Paket							2 Paket		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Paket		Paket	1 Paket							1 Paket		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	Paket		Paket	5 Paket							5 Paket		
2	9	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	49.982.000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 paket	80.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket							3 Paket		
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	76.445.000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	5 Paket	450.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	299.998.600				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	2 Paket	350.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	50.000.000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	2 Paket	70.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	24.996.000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	2 Dokumen	35.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 dokumen							3 dokumen		
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	275.000.000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	100 Laporan	400.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (paket)	Paket		Paket	1 Paket	199.955.900						1 Paket	300.000.000	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	Unit		Unit	1 Unit							1 Unit		
2	9	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 paket	99.998.500		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 paket	200.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit							6 Unit		
2	9	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	99.957.400		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	5 Unit	100.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	9	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Laporan		Laporan	36 Laporan	2.035.011.600						36 Laporan	2.305.000.000	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	Laporan		Laporan	3 Laporan							3 Laporan		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	Lapor		Lapor	2 Lapor							2 Lapor		
2	9	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	-		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	2 Laporan	5.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	610.013.000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	36 Laporan	800.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	1.424.998.600		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	3 Laporan	1.500.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Unit		Unit	2 Unit	1.165.000.000						2 Unit	1.500.000.000	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Unit		Unit	99 Unit							99 Unit		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	Unit		Unit	9 Unit							9 Unit		
2	9	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				99 Unit	550.000.000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	99 Unit	700.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	90.000.000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	9 Unit	200.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	525.000.000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	2 Unit	600.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur yang tersedia	persen		persen	25 persen	-						25 persen	50.000.000	
2	9	2	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit		Unit	1 Unit	-						1 Unit	50.000.000	
2	9	2	2.01	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				1 Unit	-		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 Unit	50.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	3			PROGRAM	Persentase Ketersediaan	persen		persen	0.053 persen	283.250.000						0.053 persen	450.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)													
2	9	3	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (ton)	Ton		Ton	20 Ton	250.000.000						20 Ton	300.000.000	
2	9	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				20 Ton	250.000.000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	20 Ton	300.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (laporan)	Laporan		Laporan	4 Laporan	33.250.000						4 Laporan	150.000.000	
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				4 Laporan	33.250.000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	4 Laporan	150.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan Daerah Rawan Pangan	%		%	55 %	44.995.000						55 %	50.000.000	
2	9	4	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	44.995.000						1 Dokumen	50.000.000	
2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	44.995.000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen	50.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan Yang aman	%		%	89 %	196.000.000						89 %	275.000.000	
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	196.000.000						2 Dokumen	275.000.000	
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	196.000.000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	2 Dokumen	275.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	#				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						1.424.982.375							1.580.000.000	
3	#	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton		Ton	4300 Ton	200.000.000						4300 Ton	200.000.000	
3	#	3	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok		Kelompok	6 Kelompok	50.000.000						6 Kelompok	200.000.000	
						Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitasnya	Orang		Orang	50 Orang							50 Orang		
3	25	3	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	25.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	kelompok nelayan kecil	50 Orang	100.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kelurahan							
3	25	3	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				6 Kelompok	25.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	kelompok nelayan kecil	6 Kelompok	100.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	#	3	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (layanan)	Layanan		Layanan	2 Layanan	150.000.000						2 Layanan	-	
3	25	3	2.03	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				2 Layanan	150.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pengguna TPI	2 Layanan	-	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	#	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton		Ton	297 Ton	1.224.982.375						297 Ton	1.380.000.000	
3	#	4	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok		Kelompok	5 Kelompok	150.000.000						5 Kelompok	175.000.000	
						Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan	Kelompok		Kelompok	2 Kelompok							2 Kelompok		
3	25	4	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				5 Kelompok	25.000.000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	masyarakat pembudidaya ikan	5 Kelompok	50.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	25	4	2.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				2 Kelompok	125.000.000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	masyarakat pembudidaya ikan	2 Kelompok	125.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	#	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	1.074.982.375						12 Dokumen	1.205.000.000	
						Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (	Orang		Orang	120 Orang							120 Orang		
						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit		Unit	2 Unit							2 Unit		
						Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Ha		Ha	1.8 Ha							1.8 Ha		
3	25	4	2.04	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	50.000.000		Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuh	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat pembudidaya ikan	12 Dokumen	55.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
														an Yang Berkualitas dan Berkeadilan					
3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	949.982.375		Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat pembudidaya ikan	2 Unit	1.100.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	25	4	2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				120 Orang	-		Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat pembudidaya ikan	120 Orang	50.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	25	4	2.04	6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi				1.8 Ha	75.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat pembudidaya ikan	1.8 Ha	-	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	#				URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG PERTANIAN					1.468.584.200							2.365.000.000	
3	#	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	Persen		Persen	20 Persen	356.000.000						20 Persen	1.000.000.000	
3	#	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)	Laporan		Laporan	3 Laporan	300.000.000						3 Laporan	850.000.000	
						Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (laporan)	Laporan		Laporan	3 Laporan							3 Laporan		
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				3 Laporan	250.000.000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	3 Laporan	700.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				3 Laporan	50.000.000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	3 Laporan	150.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	#	2	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (laporan)	Laporan		Laporan	2 Laporan	56.000.000						2 Laporan	150.000.000	
3	27	2	2.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				2 Laporan	56.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	2 Laporan	150.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	#	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	Persen		Persen	75 Persen	375.000.000						75 Persen	180.000.000	
3	#	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (dokumen)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	75.000.000						1 Dokumen	180.000.000	
3	27	3	2.01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola				1 Dokumen	75.000.000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 Dokumen	180.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	#	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	Unit		Unit	1 Unit	300.000.000						1 Unit	-	
3	27	3	2.02	8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	300.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 Unit	-	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	#	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang terlayani	Persen		Persen	70 Persen	387.656.200						70 Persen	700.000.000	
3	#	4	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (laporan)	Laporan		Laporan	4 Laporan	293.656.200						4 Laporan	500.000.000	
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				4 Laporan	293.656.200	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	4 Laporan	500.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	#	4	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (laporan)	Laporan		Laporan	4 Laporan	94.000.000						4 Laporan	200.000.000	
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				4 Laporan	94.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	4 Laporan	200.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	#	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas kelompok tani	Persen		Persen	45 Persen	349.928.000						45 Persen	485.000.000	
3	#	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit		Unit	6 Unit	349.928.000						6 Unit	485.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						(unit)													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (unit)	Unit		Unit	2 Unit							2 Unit		
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Unit	74.928.000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	6 Unit	150.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				2 Unit	275.000.000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	2 Unit	335.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	#				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						805.729.996							950.000.000	
3	#	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	Persen		Persen	75 Persen	805.729.996						75 Persen	950.000.000	
3	#	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	Unit		Unit	1 Unit	805.729.996						1 Unit	950.000.000	
3	27	3	2.02	7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	805.729.996	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 Unit	950.000.000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
										TOTAL	21.649.930.671							26.210.000.000	

DINAS PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	#				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						28.456.528.542							32.937.614.050	
3	#	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						15.723.534.870							16.176.685.000	
3	#	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						-							-	
3	30	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		1 Dokumen	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		1 Dokumen	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		1 Dokumen	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		1 Dokumen	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		1 Laporan	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		2 Laporan	-	DINAS PERDAGANGAN
3	#	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	nilai		nilai	82 nilai	11.350.000.000						82 nilai	11.600.000.000	
3	30	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				66 orang/bulan	11.350.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	66 orang/bulan	11.600.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 Dokumen	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.02	3	Pelaksanaan	Jumlah Dokumen				12 Dokumen		Kota			Mewujudkan	0	12 Dokumen		DINAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					-	Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal				-	PERDAGANGAN
3	30	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	4 Dokumen	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 Laporan	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	2 Dokumen	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				24 Laporan	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	24 Laporan	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				13 Dokumen	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	13 Dokumen	-	DINAS PERDAGANGAN
3	#	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengamanan Barang milik daerah SKPD	Nilai		Nilai	72 Nilai	54.000.000						72 Nilai	-	
3	30	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	2 Dokumen	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	54.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 Dokumen	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 Laporan	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	14 Laporan	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada				2 Laporan	-	Kota Balikpapan, Semua			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis	0	2 Laporan	-	DINAS PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					pada SKPD	SKPD						Kecamatan, Semua Kelurahan			Keunggulan Lokal				
3	30	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	2 Laporan	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 Dokumen	-	DINAS PERDAGANGAN
3	#	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	nilai		nilai	77 nilai	78.500.000						77 nilai	25.000.000	
3	30	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai				1 unit	20.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 unit	25.000.000	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit							0 Unit		
3	30	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapan				1 paket	58.500.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 paket	-	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket							0 Paket		
3	30	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 Dokumen	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 Dokumen	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 Dokumen	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	0 Orang	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	0 Orang	-	DINAS PERDAGANGAN
3	#	1	2.06		Administrasi Umum	IKM layanan administrasi	nilai		nilai	82 nilai	1.434.604.000						82 nilai	1.262.500.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Perangkat Daerah	umum perangkat daerah														
3	30	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				1 paket	54.908.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 paket	55.000.000	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
3	30	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				4 paket	484.868.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	4 paket	210.000.000	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
3	30	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	0 Paket	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				6 paket	299.999.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	6 paket	320.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				3 paket	189.985.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	3 paket	210.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				1 Dokumen	24.849.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 Dokumen	30.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu				1 laporan	29.995.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 laporan	37.500.000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD				30 laporan	350.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	30 laporan	400.000.000	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
3	30	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 Dokumen	-	DINAS PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	1	2.06	1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 Dokumen	-	DINAS PERDAGANGAN
3	#	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai		nilai	72 nilai	287.920.000						72 nilai	333.000.000	
3	30	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	0 Unit	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan				4 unit	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	4 unit	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan				8 unit	187.920.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	8 unit	83.000.000	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit							0 Unit		
3	30	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	0 Unit	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						-				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0		-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan				1 unit	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 unit	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.07	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan				2 unit	100.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	2 unit	50.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3	#	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	nilai		nilai	82 nilai	1.538.694.870						82 nilai	1.570.000.000	
3	30	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				1 laporan	8.700.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 laporan	10.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan				1 laporan	759.999.500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 laporan	780.000.000	DINAS PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kelurahan							
3	30	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				2 laporan	769.995.370	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	2 laporan	780.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3	#	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai		nilai	72 nilai	979.816.000						72 nilai	1.386.185.000	
3	30	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				23 unit	344.169.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	23 unit	320.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional dan Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				9 unit	208.647.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	9 unit	220.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara				10 unit	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	10 unit	61.185.000	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit							0 Unit		
3	30	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				137 unit	140.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	137 unit	160.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				6 unit	187.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	6 unit	450.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				2 unit	100.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	2 unit	175.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3	#	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	persentase pelaku usaha yang telah diverifikasi dan memperoleh rekomendasi	%		%	60 %	375.159.780						60 %	300.000.000	
3	#	2	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase rekomendasi Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	%		%	60 %	285.000.000						60 %	150.000.000	
3	30	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan				10 Dokumen	285.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	10 Dokumen	150.000.000	DINAS PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal					
3	#	2	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase gudang yang mempunyai TDG	%		%	48 %	50.000.000						48 %	100.000.000	
3	30	2	2.02	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				3 Dokumen	50.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	3 Dokumen	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN
															Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal				
3	#	2	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	persentase rekomendasi dan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C sesuai dengan ketentuan	%		%	100 %	40.159.780						100 %	50.000.000	
3	30	2	2.05	1	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				5 Dokumen	40.159.780	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	5 Dokumen	50.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3	#	2	2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	%		%	100 %	-						100 %	-	
3	30	2	2.07	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA						-				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0		-	DINAS PERDAGANGAN
3	#	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	%		%	80 %	11.280.824.000						80 %	15.112.495.050	
3	#	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%		%	66 %	5.714.196.000						66 %	8.612.495.050	
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola				2 unit	5.714.196.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	2 unit	8.612.495.050	DINAS PERDAGANGAN
3	#	3	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dikendalikan	%		%	100 %	5.566.628.000						100 %	6.500.000.000	
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana				4 Dokumen	5.079.628.000	Kota Balikpapan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis	0	4 Dokumen	5.700.000.000	DINAS PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Perdagangan	Distribusi Perdagangan						Kecamatan, Semua Kelurahan	(PAD)		Keunggulan Lokal				
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				0 Dokumen	487.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	0 Dokumen	800.000.000	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian sarana distribusi perdagangan				2 dokumen							2 dokumen		
3	#	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	persentase penurunan koefisien variasi harga antar waktu	%		%	5,6 %	538.181.000						5,6 %	748.125.000	
3	#	4	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	laporan		laporan	12 laporan	195.200.000						12 laporan	458.125.000	
3	30	4	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Dokumen	195.200.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	12 Dokumen	370.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	4	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	12 Laporan	13.125.000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	4	2.01	3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	12 Laporan	75.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3	#	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						342.981.000							265.000.000	
3	30	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	342.981.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		12 Laporan	265.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan operasi pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kab/Kota				4 laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		4 laporan	-	DINAS PERDAGANGAN
3	#	4	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pupuk bersubsidi yang tersalurkan	%		%	28 %	-						28 %	25.000.000	
3	30	4	2.03	1	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				1 Dokumen	-	Kota Balikpapan,	PENDAPATAN ASLI		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan	0	1 Dokumen	25.000.000	DINAS PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Dokumen Perizinan							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAERAH (PAD)		yang Berbasis Keunggulan Lokal				
3	30	4	2.03	2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi				12 laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	12 laporan	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	4	2.03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi						-				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0		-	DINAS PERDAGANGAN
3	#	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor bersih non migas	juta dollar		juta dollar	1350 juta dollar	318.967.092						1350 juta dollar	232.809.000	
3	#	5	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dagang melalui pameran dagang, misi dagang dan peningkatan citra produk	%		%	40 %	318.967.092						40 %	232.809.000	
3	30	5	2.01	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha Produk ekspor unggulan yang dibina				4 pelaku usaha	192.590.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	4 pelaku usaha	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	5	2.01	2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				2 Pelaku Usaha	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	2 Pelaku Usaha	-	DINAS PERDAGANGAN
															Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal				
3	30	5	2.01	3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				2 Pelaku Usaha	-			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	2 Pelaku Usaha	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	5	2.01	4	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk ekspor unggulan				2 pelaku usaha	126.377.092	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	2 pelaku usaha	132.809.000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	5	2.01	5	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				1 Produk	-			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 Produk	-	DINAS PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
														n Yang Berkualitas dan Berkeadilan					
3	30	5	2.01	6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina				4 Pelaku Usaha	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	4 Pelaku Usaha	-	DINAS PERDAGANGAN
3	#	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%		%	71 %	119.861.800						71 %	167.500.000	
3	#	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	%		%	71 %	119.861.800						71 %	167.500.000	
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang Metrologi Legal yang dibina				80 orang	119.861.800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	80 orang	167.500.000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	6	2.01	3	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				0 Unit	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	0 Unit	-	DINAS PERDAGANGAN
3	#	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku binaan yang meningkat omsetnya	%		%	60 %	100.000.000						60 %	200.000.000	
3	#	7	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku binaan yang difasilitasi promosi dan pemasaran	%		%	40 %	100.000.000						40 %	200.000.000	
3	30	7	2.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kab/Kota				4 umkm	100.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	4 umkm	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	7	2.01	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi				4 UMKM	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	4 UMKM	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	7	2.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan				0 Dokumen	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	0 Dokumen	-	DINAS PERDAGANGAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	#				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						189.999.948							205.000.000	
3	#	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	%		%	80 %	189.999.948						80 %	205.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					PERDAGANGAN														
3	#	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%		%	66 %	189.999.948						66 %	205.000.000	
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				5 Unit	189.999.948	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	5 Unit	205.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	#				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						175.000.190							190.000.000	
3	#	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	%		%	80 %	175.000.190						80 %	190.000.000	
3	#	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%		%	66 %	175.000.190						66 %	190.000.000	
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	175.000.190	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 Unit	190.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	#				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						159.938.188							172.000.000	
3	#	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	%		%	80 %	159.938.188						80 %	172.000.000	
3	#	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%		%	66 %	159.938.188						66 %	172.000.000	
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				4 Unit	159.938.188	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	4 Unit	172.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	#				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						125.000.000							133.000.000	
3	#	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	%		%	80 %	125.000.000						80 %	133.000.000	
3	#	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%		%	66 %	125.000.000						66 %	133.000.000	
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	125.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	2 Unit	133.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	#				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						393.494.532							515.000.000	
3	#	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						393.494.532							515.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	#	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						393.494.532							515.000.000	
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				3500 Unit	393.494.532	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		3500 Unit	515.000.000	DINAS PERDAGANGAN
										TOTAL	29.499.961.400							34.152.614.050	

SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						164.993.552.050								154.304.831.990	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	Poin		Poin	79 Poin	131.880.416.416						79 Poin	123.846.458.483	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokuem DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	116.000.000						3 Dokumen	127.600.000	
						Jumlah Dokuem RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen							3 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen							2 Dokumen		
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	30.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	33.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
4	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	18.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Dokumen	19.800.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	18.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Dokumen	19.800.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	50.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	55.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		Dokumen	2250 Dokumen	28.630.338.975						2250 Dokumen	31.493.372.873	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		Laporan	60 Laporan							60 Laporan		
						Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan		orang/bulan	148 orang/bulan							148 orang/bulan		
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				148 Orang/bulan	28.405.338.975		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	148 Orang/bulan	31.245.872.873	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2250 Dokumen	175.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2250 Dokumen	192.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	22.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				60 Laporan	30.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	60 Laporan	33.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket		paket	8 paket	1.460.000.000						8 paket	1.416.500.000	
						Jumlah Unit Peningkatan Saranan dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit		Unit	2 Unit							2 Unit		
4	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	15.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Unit	16.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				8 Paket	1.445.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	8 Paket	1.400.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Dokumen	60 Dokumen	42.250.000.000						60 Dokumen	39.475.000.000	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		Laporan	12 Laporan							12 Laporan		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		laporan	750 laporan							750 laporan		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket		Paket	4 Paket							4 Paket		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket		Paket	3 Paket							3 Paket		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket		Paket	3 Paket							3 Paket		
						Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket		Paket	10 Paket							10 Paket		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket		Paket	3 Paket							3 Paket		
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	500.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Paket	550.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang				10 Paket	2.200.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih,	0	10 Paket	1.300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Disediakan									Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	2.550.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Paket	550.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	14.800.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Paket	13.750.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	750.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Paket	825.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				60 Dokumen	450.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	60 Dokumen	500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12.000.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	12.100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				750 Laporan	9.000.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	750 Laporan	9.900.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		Unit	50 Unit	16.679.880.000						50 Unit	7.095.000.000	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit							1 Unit		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		Unit	4 Unit							4 Unit		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	50 Unit							50 Unit		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	3 Unit							3 Unit		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	3 Unit							3 Unit		
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	749.880.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Unit	825.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	4.280.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Unit	550.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	650.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	50 Unit	550.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	7.000.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	50 Unit	770.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	1.000.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Unit	3.300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3 Unit	3.000.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi	0	3 Unit	1.100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Bangunan Lainnya	yang Disediakan									Pelayanan Publik				
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	36 Laporan	23.232.045.741						36 Laporan	24.982.120.000	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan							12 Laporan		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan		laporan	4 laporan							4 laporan		
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	12.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Laporan	12.120.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	2.700.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	36 Laporan	2.970.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	20.520.045.741		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	22.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit		Unit	2 Unit	11.675.000.000						2 Unit	12.842.500.000	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	3 Unit							3 Unit		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	150 Unit							150 Unit		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Unit	20 Unit							20 Unit		
						Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit		Unit	50 Unit							50 Unit		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Unit	500 Unit							500 Unit		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	3 Unit							3 Unit		
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	2.000.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	20 Unit	2.200.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				150 Unit	4.000.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	150 Unit	4.400.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	150.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	50 Unit	165.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				500 Unit	1.000.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	500 Unit	1.100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	25.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Unit	27.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	2.500.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi	0	3 Unit	2.750.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
															Pelayanan Publik				
4	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	2.000.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Unit	2.200.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang/bulan		orang/bulan	2 orang/bulan	1.692.909.000						2 orang/bulan	1.863.000.000	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang/bulan		orang/bulan	2 orang/bulan							2 orang/bulan		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket							1 Paket		
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	242.909.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Orang/Bulan	268.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket pakaian dinas dan kelengkapan atribut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan				1 Paket	300.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Paket	330.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	1.150.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Orang/Bulan	1.265.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket		Paket	7 Paket	3.120.000.000						7 Paket	1.562.000.000	
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket							1 Paket		
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket		Paket	7 Paket							7 Paket		
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				7 Paket	2.000.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	7 Paket	880.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				7 Paket	1.000.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	7 Paket	550.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	120.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Paket	132.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	812.595.300						1 Dokumen	893.865.610	
						Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	140.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi	0	1 Dokumen	154.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
															Pelayanan Publik				
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	278.999.800		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	306.900.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	74.999.700	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	82.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
													PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	181.990.700		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	200.200.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	136.605.100	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	150.265.610	SEKRETARIAT DAERAH
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan		Laporan	1 Laporan	2.211.647.400						1 Laporan	2.095.500.000	
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	670.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	737.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	704.999.400		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	720.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	836.648.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	638.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama	persen		persen	100 persen	30.573.990.334						100 persen	27.635.812.357	
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	32.241.891.450						3 Dokumen	13.000.532.600	
						Jumlah dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen							5 Dokumen		
						Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen							4 Dokumen		
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				5 Dokumen	27.500.279.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Dokumen	14.303.300	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				4 Dokumen	854.213.350		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Dokumen	918.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	3.887.399.100		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Dokumen	12.068.229.300	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	16.128.929.434						3 Dokumen	9.491.822.377	
						Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen		
						Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen		Dokumen	21 Dokumen						21 Dokumen		
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				3 Dokumen	14.733.929.434		Pajak Daerah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	3 Dokumen	7.957.322.377	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				21 Dokumen	1.295.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	21 Dokumen	1.424.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	100.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 Dokumen	110.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	kasus		kasus	16 kasus	1.954.144.850						16 kasus	2.073.457.380	
						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen		Dokumen	393 Dokumen							393 Dokumen		
						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen		Dokumen	393 Dokumen							393 Dokumen		
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				393 Dokumen	392.070.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	393 Dokumen	431.277.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				16 Kasus	788.345.800		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	16 Kasus	867.180.380	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				393 Dokumen	773.729.050		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	393 Dokumen	775.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen							2 Dokumen	3.070.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Daerah	Kerja Sama Dalam Negeri					3.749.024.600								
						Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				2 Dokumen	3.499.024.750		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	2.805.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.04	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	249.999.850		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	265.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	persen		persen	100 persen	2.539.145.300						100 persen	2.822.561.150	
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	499.998.800						12 Dokumen	860.000.000	
						Jumlah dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen							12 Dokumen		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan		Laporan	12 Laporan							12 Laporan		
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				12 Dokumen	200.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Dokumen	550.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				12 Laporan	99.998.800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	110.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				12 Dokumen	200.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Dokumen	200.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1.064.146.500						1 Dokumen	1.115.561.150	
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan		Laporan	12 Laporan							12 Laporan		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan		Laporan	2 Laporan							2 Laporan		
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	42.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	55.176.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				2 Laporan	676.466.500		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Laporan	764.705.150	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	345.680.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	295.680.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen		Dokumen	36 Dokumen	975.000.000						36 Dokumen	847.000.000	
						Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen		Dokumen	337 Dokumen							337 Dokumen		
						Jumlah Pembinaan kepada Pelaku Pengadaan	Orang		Orang	100 Orang							100 Orang		
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				337 Dokumen	300.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	337 Dokumen	269.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				36 Dokumen	375.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	36 Dokumen	374.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan kepada Pelaku Pengadaan				100 Orang	300.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	100 Orang	203.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
									TOTAL		188.493.552.050							154.304.831.990	

SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	2				SEKRETARIAT DPRD						198.070.220.721							-	
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	70 Nilai	148.039.778.492						70 Nilai	-	
4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	5.446.070.100						13 Dokumen	-	
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	5.446.070.100				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	30 Orang/bulan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Paket		Paket	28 Paket	445.660.000						28 Paket	-	
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				31 Paket	85.960.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	31 Paket	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				36 Orang	359.700.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	36 Orang	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	31.605.270.648						4 Dokumen	-	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		Laporan	295 Laporan							295 Laporan		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	3 Laporan							3 Laporan		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket		Paket	5 Paket							5 Paket		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket		Paket	2 Paket							2 Paket		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	23 Paket							23 Paket		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	5 Paket							5 Paket		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket		Paket	5 Paket							5 Paket		
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	181.139.800				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Paket	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1.596.104.800				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Paket	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	1.199.925.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Paket	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.409.222.596				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Paket	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	549.999.800				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Paket	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	449.992.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.323.772.400				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0		-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan				3 Laporan					Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan	0	3 Laporan		SEKRETARIAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					21.895.114.252				yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			-	DPRD
4	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	5 Unit	824.999.994						5 Unit	-	
4	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	824.999.994				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Unit	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	3 Laporan	7.401.780.000						3 Laporan	-	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	3 Laporan							3 Laporan		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	5 Laporan							5 Laporan		
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	880.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	1.649.800.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4.871.980.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	4 Unit	54.150.000.000						4 Unit	-	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Unit	29 Unit							29 Unit		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	2 Unit							2 Unit		
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				29 Unit	1.100.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	29 Unit	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	47.550.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Unit	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	5.500.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Unit	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan		Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	39.795.827.000						45 Orang/Bulan	-	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang		Orang	45 Orang							45 Orang		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket		Paket	45 Paket							45 Paket		
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/Bulan	38.449.867.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	45 Orang/Bulan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				45 Paket	849.960.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	45 Paket	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	496.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	45 Orang	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	8.370.170.750						10 Dokumen	-	
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan		Laporan	6 Laporan							6 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan		Laporan	270 Laporan							270 Laporan		
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket		Paket	4 Paket							4 Paket		
4	2	1	2.16	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				10 Dokumen	1.040.172.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	10 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Jenis Sasrana dan Prasarana Fraksi DPRD				6 Laporan	649.998.750				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				6 Laporan							6 Laporan		
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				270 Laporan	4.180.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	270 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				4 Paket	2.500.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Paket	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi	Persentase		Persentase	74 Persentase	50.030.442.229						74 Persentase	-	
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen		Dokumen	40 Dokumen	9.782.999.750						40 Dokumen	-	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen							5 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen							4 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen							4 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				5 Dokumen	32.999.750				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				40 Dokumen	3.500.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	40 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				4 Dokumen	2.750.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				4 Dokumen	2.750.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.01	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	750.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	3.800.000.000						1 Dokumen	-	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen							2 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
4	2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	800.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						800.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0		-	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD						800.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0		-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	800.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02	5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				2 Dokumen	300.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						300.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0		-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Laporan		Laporan	1 Laporan	5.099.997.500						1 Laporan	-	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan		Laporan	24 Laporan							24 Laporan		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan		Laporan	48 Laporan							48 Laporan		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan		Laporan	48 Laporan							48 Laporan		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan		Laporan	24 Laporan							24 Laporan		
						Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan		Laporan	48 Laporan							48 Laporan		
						Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
4	2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				48 Laporan	750.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	48 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				24 Laporan	750.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	24 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				48 Laporan	750.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	48 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				48 Laporan	750.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	48 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				24 Laporan	750.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	24 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	749.999.500				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	299.999.050				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	299.998.950				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen		Dokumen	90 Dokumen	10.660.448.179						90 Dokumen	-	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan	Dokumen		Dokumen	48 Dokumen							48 Dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Masyarakat													
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen							5 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen		Dokumen	23 Dokumen							23 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang		Orang	6 Orang							6 Orang		
						Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang		Orang	6 Orang							6 Orang		
4	2	2	2.04	1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				5 Dokumen	165.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				90 Dokumen	2.500.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	90 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				47 Dokumen	6.413.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	47 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				6 Orang	709.368.279				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 Orang	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	508.080.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 Orang	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				48 Dokumen	199.999.900				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	48 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	165.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	5.700.000.000						3 Dokumen	-	
						Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	2.700.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3.000.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1.099.498.250						1 Dokumen	-	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
4	2	2	2.06	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	449.999.250				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	649.499.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	399.999.800						2 Dokumen	-	
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen							2 Dokumen		
4	2	2	2.07	1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				2 Dokumen	249.999.900				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.07	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				2 Dokumen	149.999.900				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen		Dokumen	16 Dokumen	13.487.498.750						16 Dokumen	-	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen							5 Dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Tugas Pimpinan DPRD													
						Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
4	2	2	2.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	357.499.750				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				16 Dokumen	2.500.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	16 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	8.379.999.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.08	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				5 Dokumen	2.250.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
										TOTAL	198.070.220.721							-	

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	1				PERENCANAAN						11.936.734.000							15.788.267.000	
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	nilai		nilai	85.55 nilai	9.381.734.000						85.55 nilai	12.138.267.000	
5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang		orang	35 orang	7.250.000.000						35 orang	8.700.000.000	
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	7.250.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	35 Orang/bulan	8.700.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	nilai		nilai	83.55 nilai	235.000.000						83.55 nilai	640.000.000	
5	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	35 Paket	90.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				35 orang	235.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	35 orang	550.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	nilai		nilai	85.55 nilai	1.001.959.100						85.55 nilai	1.680.267.000	
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	10.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	1 paket	10.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 paket	133.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	10 paket	400.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 paket	371.019.100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	3 paket	367.767.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 paket	76.216.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	2 paket	125.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1.740.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	2 Dokumen	2.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan				10 Laporan	9.984.000		PENDAPATAN ASLI		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih,	Aparatur	10 Laporan	30.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Tamu							DAERAH (PAD)		Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 laporan	400.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	70 laporan	745.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						512.774.900							678.000.000	
5	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 laporan	4.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		4 laporan	3.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	24.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		12 laporan	35.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 laporan	29.240.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		4 laporan	40.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 laporan	455.534.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		12 laporan	600.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai		nilai	81.1 nilai	382.000.000						81.1 nilai	440.000.000	
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 unit	196.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		10 unit	120.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 unit	68.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		12 unit	120.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 unit	10.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		3 unit	30.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 unit	58.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		9 unit	70.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas				1 gedung	50.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 gedung	100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						i						Semua Kelurahan							
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Nilai		Nilai	32,769 Nilai	2.555.000.000						32,769 Nilai	3.650.000.000	
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tes	Nilai		Nilai	1 Nilai	600.000.000						1 Nilai	1.300.000.000	
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	1.000.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	2 Berita Acara	1.300.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						1.605.000.000							1.750.000.000	
5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				43 masukan	1.520.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		43 masukan	1.550.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	2	2.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 buku	85.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 buku	200.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						350.000.000							600.000.000	
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 laporan	350.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	4 laporan	600.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						2.420.000.000							1.875.000.000	
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	2.420.000.000						100 persen	1.875.000.000	
5	5	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	230.000.000						100 persen	200.000.000	
5	5	2	2.01	3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi,				1 laporan	80.000.000	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih,	Aparatur	1 laporan	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAERAH (PAD)		Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	2.01	4	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				1 laporan	150.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	1 laporan	100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				13 data	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	13 data	100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	530.000.000						100 persen	400.000.000	
5	5	2	2.02	3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 dokumen	100.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	2.02	5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	150.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	2.02	6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				3 dokumen	280.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	3 dokumen	400.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	1.160.000.000						100 persen	450.000.000	
5	5	2	2.03	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 dokumen	420.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	150.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	2.03	7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 dokumen	120.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	2.03	9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				2 dokumen	470.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	2 dokumen	300.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan				1 Dokumen	150.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Aparatur	1 Dokumen	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Informatika						Semua Kelurahan							
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang di fasilitasi	dokumen		dokumen	4 dokumen	500.000.000						4 dokumen	825.000.000	
5	5	2	2.04	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	125.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	200.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	2.04	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 laporan	125.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	1 laporan	200.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	2.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 laporan	150.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	1 laporan	250.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	2.04	5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 laporan	100.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	1 laporan	175.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
										TOTAL	14.756.734.000							17.663.267.000	

BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	2				KEUANGAN						41.799.983.616							38.386.599.288	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	83 Nilai	33.893.594.986						83 Nilai	31.954.100.908	
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan		Orang/bulan	105 Orang/bulan	30.601.511.276						105 Orang/bulan	28.285.280.958	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/bulan	30.601.511.276	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	105 Orang/bulan	28.285.280.958	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		Orang	25 Orang	25.000.000						25 Orang	25.000.000	
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	25 Orang	25.000.000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah LAporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasu dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	1.296.754.710						1 Laporan	1.521.819.950	
						Jumlah Paket Barang Cetakkan dan Pengandaan	Paket		Paket	2 Paket							2 Paket		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket							1 Paket		
						Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	2 Paket							2 Paket		
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	149.996.210	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 Paket	150.000.000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	399.998.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2 Paket	400.000.000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	471.760.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2 Paket	471.819.950	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat				1 Laporan	275.000.000	Semua Kab/Kota,	Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang	Badan Pengelola Pajak Daerah	1 Laporan	500.000.000	BADAN PENGELOLA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	dan Retribusi Daerah			PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	3 Laporan	1.022.759.000						3 Laporan	1.060.000.000	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	4 Laporan							4 Laporan		
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	249.995.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	3 Laporan	260.000.000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	772.764.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	4 Laporan	800.000.000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	74 Unit	947.570.000						74 Unit	1.062.000.000	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Unit	100 Unit							100 Unit		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit							1 Unit		
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				74 Unit	602.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	74 Unit	612.000.000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	150.570.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	100 Unit	200.000.000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	195.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	1 Unit	250.000.000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	Milyar		Milyar	852.37 Milyar	7.906.388.630						852.37 Milyar	6.432.498.380	
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	7.906.388.630						2 Dokumen	6.432.498.380	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan	Dokumen		Dokumen	18112 Dokumen							18112 Dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Pajak Daerah													
						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen							2 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen		Dokumen	550 Dokumen							550 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen		Dokumen	200000 Dokumen							200000 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan							2 Laporan		
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
						Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
						Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
						Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan		Layanan	11 Layanan							11 Layanan		
						Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak		Objek Pajak	15000 Objek Pajak							15000 Objek Pajak		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit		Unit	3 Unit							3 Unit		
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	200.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen	250.000.000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	1.700.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	2 Dokumen	250.000.000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				8 Laporan	625.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	8 Laporan	335.000.000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Unit	380.000.000	Semua Kab/Kota, Semua	Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan	Masyarakat Kota Balikpapan	3 Unit	300.000.000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kecamatan, Semua Kelurahan			Berorientasi Pelayanan Publik				DAN RETRIBUSI DAERAH
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	300.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Laporan	250.000.000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1.390.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Laporan	1.400.000.000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				15000 Obyek Pajak	2.000.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	15000 Obyek Pajak	900.000.000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				200000 Dokumen	199.999.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	200000 Dokumen	250.000.000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				11 Layanan	74.999.700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	11 Layanan	75.000.000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	99.996.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen	100.000.000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				18112 Dokumen	150.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	18112 Dokumen	160.000.000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				550 Dokumen	80.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	550 Dokumen	100.000.000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Dokumen	99.999.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	2 Dokumen	100.000.000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	456.392.940	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	2 Laporan	1.762.498.380	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5	2	4	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	149.999.790	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Laporan	200.000.000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
					TOTAL		41.799.983.616							38.386.599.288	

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	2				KEUANGAN						17.500.000.000								19.250.000.000	
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase peningkatan BMD yang terkelola	%		%	100 %	17.500.000.000							100 %	19.250.000.000	
5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan		laporan	11 laporan	17.500.000.000							11 laporan	19.250.000.000	
5	2	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				11 Laporan	17.500.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	11 Laporan	19.250.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	2				KEUANGAN						63.799.394.450								95.172.427.900	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	poin		poin	76 poin	30.362.249.250							76 poin	40.303.503.900	
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen		dokumen	12 dokumen	373.000.000							12 dokumen	410.300.000	
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	30.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Laporan SAKIP	12 Dokumen	33.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	50.000.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Laporan SAKIP	1 Laporan	55.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	293.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Laporan SAKIP	4 Laporan	322.300.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	24.568.510.950							100 %	33.208.503.900	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan		orang/bulan	55 orang/bulan								55 orang/bulan		
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	24.433.927.950		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55 Orang/bulan	33.045.153.900	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan	Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		30.250.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
															Publik				
5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	82.588.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	90.750.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	30.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Laporan	18.150.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				36 Laporan	21.995.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36 Laporan	24.200.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen		dokumen	2 dokumen	19.980.000						2 dokumen	22.000.000	
5	2	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	19.980.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	22.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	55.499.550						100 %	60.500.000	
						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	laporan		laporan	12 laporan							12 laporan		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen		dokumen	5 dokumen							5 dokumen		
5	2	1	2.04	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		24.200.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				5 Dokumen	55.499.550				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5 Dokumen	36.300.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	315.000.000						100 %	566.500.000	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		Orang	80 Orang							80 Orang		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	80 Paket							80 Paket		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	20 Orang							20 Orang		
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	65.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 Paket	71.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan				20 Orang			PENDAPATAN	Memperkuat	Mewujudkan Birokrasi	Layanan	20 Orang		BADAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					100.000.000		ASLI DAERAH	Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		165.000.000	PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				80 Orang	150.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 Orang	330.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	2.199.262.250						100 %	2.695.000.000	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		Laporan	2 Laporan							2 Laporan		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	80 Laporan							80 Laporan		
						Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Dokumen	4000 Dokumen							4000 Dokumen		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	7 Paket							7 Paket		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket							1 Paket		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	3 Paket							3 Paket		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	10 Paket							10 Paket		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		Paket	2 Paket							2 Paket		
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	49.999.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Paket	55.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	749.287.500		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Paket	1.045.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	49.995.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Paket	55.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	349.999.750		PENDAPATAN ASLI	Memperkuat Infrastruktur	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang	Layanan Administrasi	7 Paket	440.000.000	BADAN PENGELOLA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
													DAERAH	Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Umum Perangkat Daerah			KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	34.981.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	38.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4000 Dokumen	45.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4000 Dokumen	49.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	25.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan	27.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	850.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 Laporan	935.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	45.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	49.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	870.000.000						100 %	1.018.600.000	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	7 Unit							7 Unit		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit							1 Unit		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	5 Unit							5 Unit		
5	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	210.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	242.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	460.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	556.600.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	200.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	220.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	979.996.500						100 %	1.133.000.000	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	3 Laporan							3 Laporan		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	3 Laporan							3 Laporan		
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	80.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	88.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	899.996.500		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13 Laporan	1.045.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	981.000.000						100 %	1.189.100.000	
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit		Unit	1 Unit							1 Unit		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit							1 Unit		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	30 Unit							30 Unit		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Unit	2 Unit							2 Unit		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	2 Unit							2 Unit		
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	500.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30 Unit	660.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
														Dasar					
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	154.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit	169.400.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	22.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Unit	24.200.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	195.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	214.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	110.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit	121.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tahapan penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta realisaasi APBD yang tepat waktu	%		%	100 %	28.233.145.200						100 %	49.363.424.000	
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	dokumen		dokumen	2 dokumen	2.560.000.000						2 dokumen	2.998.074.000	
						Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	dokumen		dokumen	2 dokumen							2 dokumen		
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	220.000.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	2 Dokumen	240.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	165.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	2 Dokumen	181.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				464 Dokumen	250.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	464 Dokumen	302.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				464 Dokumen	220.000.000		PENDAPATAN ASLI	Memperkuat Infrastruktur	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang	Perangkat Daerah di Lingkungan	464 Dokumen	242.000.000	BADAN PENGELOLA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
													DAERAH (PAD)	Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Balikpapan			KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				464 Dokumen	250.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	464 Dokumen	302.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	260.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	2 Dokumen	302.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				0 Dokumen	320.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	0 Dokumen	363.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
						Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen							2 Dokumen		
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				0 Dokumen	165.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	0 Dokumen	181.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				11 Dokumen							11 Dokumen		
5	2	2	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				6 Laporan	110.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	6 Laporan	121.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				2 Dokumen	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	2 Dokumen	55.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				2 Dokumen	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	2 Dokumen	55.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				600 Orang	500.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	600 Orang	651.574.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
														Pelayanan Dasar					
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	dokumen		dokumen	13 dokumen	1.750.000.000						13 dokumen	1.980.000.000	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	dokumen		dokumen	144 dokumen							144 dokumen		
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				13 Dokumen	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	13 Dokumen	110.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				144 Dokumen	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	144 Dokumen	110.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
5	2	2	2.02	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan				23000 Dokumen	500.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	23000 Dokumen	550.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				0 Dokumen							0 Dokumen		
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				4 Dokumen	110.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Dokumen	121.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				2 Dokumen	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	55.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				0 Dokumen							0 Dokumen		
5	2	2	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				2 Laporan	165.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Laporan	181.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	50.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	55.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan				2 Dokumen	150.000.000		PENDAPATAN ASLI		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang	0	2 Dokumen	165.000.000	BADAN PENGELOLA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait							DAERAH (PAD)		Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				4 Dokumen	75.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Dokumen	82.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				384 Orang	450.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	384 Orang	550.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	capaian kinerja pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	%		%	100 %	3.018.145.200						100 %	3.398.350.000	
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	dokumen		dokumen	13 dokumen							13 dokumen		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan	dokumen		dokumen	24 dokumen							24 dokumen		
5	2	2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				24 Dokumen	165.000.000		Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	- 36 OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan - PPK dan Bendahara OPD, PPK, Bendahara BLUD, Staff bidang Akuntansi dan Pelaporan yang menangani pengelolaan Keuangan Daerah - RS dan Puskesmas yang telah menerapkan PPK BLUD - Pengelola Keuangan di Sekolah negeri yang menerima dana BOS PUSAT	24 Dokumen	181.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				13 Dokumen	110.000.000		Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		- 36 OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan - PPK dan Bendahara OPD, PPK, Bendahara BLUD, Staff bidang Akuntansi dan Pelaporan yang menangani pengelolaan Keuangan Daerah - RS dan Puskesmas yang telah menerapkan PPK BLUD - Pengelola Keuangan di Sekolah negeri	13 Dokumen	121.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
																yang menerima dana BOS PUSAT			
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				13 Laporan	115.000.000		Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	- 36 OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan - PPK dan Bendahara OPD, PPK, Bendahara BLUD, Staff bidang Akuntansi dan Pelaporan yang menangani pengelolaan Keuangan Daerah - RS dan Puskesmas yang telah menerapkan PPK BLUD - Pengelola Keuangan di Sekolah negeri yang menerima dana BOS PUSAT	13 Laporan	181.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	550.000.000		Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	- 36 OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan - PPK dan Bendahara OPD, PPK, Bendahara BLUD, Staff bidang Akuntansi dan Pelaporan yang menangani pengelolaan Keuangan Daerah - RS dan Puskesmas yang telah menerapkan PPK BLUD - Pengelola Keuangan di Sekolah negeri yang menerima dana BOS PUSAT	1 Laporan	605.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	165.000.000		Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	- 36 OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan - PPK dan Bendahara OPD, PPK, Bendahara BLUD, Staff bidang Akuntansi dan Pelaporan yang menangani pengelolaan Keuangan Daerah - RS dan Puskesmas yang telah menerapkan PPK BLUD - Pengelola Keuangan di Sekolah negeri yang menerima dana BOS PUSAT	2 Dokumen	181.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.03	6	Penyusunan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen			Pajak Daerah	Meningkatkan	Mewujudkan Birokrasi	- 36 OPD di	1 Dokumen		BADAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					82.500.000			Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan - PPK dan Bendahara OPD, PPK, Bendahara BLUD, Staff bidang Akuntansi dan Pelaporan yang menangani pengelolaan Keuangan Daerah - RS dan Puskesmas yang telah menerapkan PPK BLUD - Pengelola Keuangan di Sekolah negeri yang menerima dana BOS PUSAT		90.750.000	PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	149.945.200		Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	- 36 OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan - PPK dan Bendahara OPD, PPK, Bendahara BLUD, Staff bidang Akuntansi dan Pelaporan yang menangani pengelolaan Keuangan Daerah - RS dan Puskesmas yang telah menerapkan PPK BLUD - Pengelola Keuangan di Sekolah negeri yang menerima dana BOS PUSAT	1 Dokumen	242.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	110.000.000		Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	- 36 OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan - PPK dan Bendahara OPD, PPK, Bendahara BLUD, Staff bidang Akuntansi dan Pelaporan yang menangani pengelolaan Keuangan Daerah - RS dan Puskesmas yang telah menerapkan PPK BLUD - Pengelola Keuangan di Sekolah negeri yang menerima dana BOS PUSAT	1 Dokumen	121.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	82.500.000		Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan	- 36 OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan - PPK	1 Dokumen	90.750.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
														Dan Berdaya Saing	Publik	dan Bendahara OPD, PPK, Bendahara BLUD, Staff bidang Akuntansi dan Pelaporan yang menangani pengelolaan Keuangan Daerah - RS dan Puskesmas yang telah menerapkan PPK BLUD - Pengelola Keuangan di Sekolah negeri yang menerima dana BOS PUSAT			
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				105 Orang	1.138.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	- 36 OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan - PPK dan Bendahara OPD, PPK, Bendahara BLUD, Staff bidang Akuntansi dan Pelaporan yang menangani pengelolaan Keuangan Daerah - RS dan Puskesmas yang telah menerapkan PPK BLUD - Pengelola Keuangan di Sekolah negeri yang menerima dana BOS PUSAT	105 Orang	1.183.350.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				28 Lembaga	350.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	- 36 OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan - PPK dan Bendahara OPD, PPK, Bendahara BLUD, Staff bidang Akuntansi dan Pelaporan yang menangani pengelolaan Keuangan Daerah - RS dan Puskesmas yang telah menerapkan PPK BLUD - Pengelola Keuangan di Sekolah negeri yang menerima dana BOS PUSAT	28 Lembaga	400.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisiss Investasi Pemerintah	laporan		laporan	3 laporan	20.300.000.000						3 laporan	40.330.000.000	
						Jumlah laporan hasil pengelolaan Dana Darurat Mendesak	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
5	2	2	2.04	2	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				3 Laporan	300.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan	0	3 Laporan	330.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
															Berorientasi Pelayanan Publik				DAERAH
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	20.000.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	40.000.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah yang terselenggara	%		%	100 %	605.000.000						100 %	657.000.000	
5	2	2	2.05	1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				70 %	110.000.000		Pajak Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	70 %	121.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	385.000.000		Pajak Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	1 Dokumen	415.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.05	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Orang	110.000.000		Pajak Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	10 Orang	121.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase peningkatan BMD yang terkelola	%		%	100 %	5.204.000.000						100 %	5.505.500.000	
5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	dokumen		dokumen	2 dokumen	5.204.000.000						2 dokumen	5.505.500.000	
						Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
						Jumlah Standar Harga yang Disusun	dokumen		dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	350.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	302.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
5	2	3	2.01	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan				1 Dokumen	129.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang	0	1 Dokumen	181.500.000	BADAN PENGELOLA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah									Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					KEUANGAN DAERAH
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	250.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	275.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
5	2	3	2.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	150.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Dokumen	165.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	630.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Laporan	495.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				36 Laporan	165.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	36 Laporan	181.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				50 Laporan	1.950.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	50 Laporan	2.145.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				3 Laporan	550.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Laporan	605.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				15 Dokumen	500.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	15 Dokumen	550.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	165.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Laporan	181.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	165.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan	0	1 Laporan	181.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
															Publik				
5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				72 Orang	200.000.000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	72 Orang	242.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TOTAL											81.299.394.450							114.422.427.900	

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	3				KEPEGAWAIAN						15.091.911.900							19.837.249.200	
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	81 Nilai	10.244.530.250						81 Nilai	11.643.168.500	
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN "	orang		orang	48 orang	8.200.000.000						48 orang	9.355.684.500	
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	8.200.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDM Kota Balikpapan	48 Orang/bulan	9.355.684.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen		dokumen	2 dokumen	1.492.670.250						2 dokumen	1.751.128.400	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		laporan	88 laporan							88 laporan		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket		paket	13 paket							13 paket		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket		paket	3 paket							3 paket		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	paket		paket	9 paket							9 paket		
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	800.327.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDM Kota Balikpapan	9 Paket	903.204.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				13 Paket	289.999.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDM Kota Balikpapan	13 Paket	371.450.400	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	44.999.750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDM Kota Balikpapan	3 Paket	87.287.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	7.344.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDM Kota Balikpapan	2 Dokumen	7.286.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan				88 Laporan	350.000.000	Semua	PENDAPATA	Memperkuat	Mewujudkan Birokrasi	ASN di	88 Laporan		BADAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	N ASLI DAERAH	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Lingkungan BKPSDM Kota Balikpapan		381.900.000	KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan		laporan	12 laporan	168.460.000						12 laporan	170.380.600	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan		laporan	12 laporan							12 laporan		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan		laporan	12 laporan							12 laporan		
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	11.760.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDM Kota Balikpapan	12 Laporan	15.200.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	133.812.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDM Kota Balikpapan	12 Laporan	134.130.600	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	22.888.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	ASN di Lingkungan BKPSDM Kota Balikpapan	12 Laporan	21.050.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		unit	14 unit	383.400.000						14 unit	365.975.000	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	1 Unit							1 Unit		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Unit	175 Unit							175 Unit		
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	225.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDM Kota Balikpapan	14 Unit	199.475.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	56.900.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDM Kota Balikpapan	1 Unit	65.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				175 Unit	101.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan	ASN di Lingkungan BKPSDM Kota Balikpapan	175 Unit	101.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												, Semua Kelurahan			Publik				N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase sistem informasi ASN yang terintegrasi	%		%	40 %	4.847.381.650						40 %	8.194.080.700	
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	dokumen		dokumen	1 dokumen	1.762.978.950						1 dokumen	3.499.198.400	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen		dokumen	2 dokumen							2 dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	dokumen		dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	dokumen		dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen		dokumen	12 dokumen							12 dokumen		
						Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	lembaga		lembaga	1 lembaga							1 lembaga		
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	14.999.850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	1 Dokumen	99.360.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	769.997.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	1 Dokumen	1.151.074.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	28.999.300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	1 Dokumen	50.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	538.999.700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	1 Lembaga	1.504.944.400	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	217.495.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	2 Dokumen	389.285.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	3	2	2.01	1 2	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Laporan	192.487.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	12 Laporan	304.535.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	dokumen		dokumen	16 dokumen	520.000.000						16 dokumen	711.876.500	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	dokumen		dokumen	4 dokumen							4 dokumen		
						Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	dokumen		dokumen	725 dokumen							725 dokumen		
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				16 Dokumen	50.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	16 Dokumen	88.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				725 Dokumen	20.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	725 Dokumen	81.983.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				4 Dokumen	450.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	4 Dokumen	541.893.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	orang		orang	237 orang	2.313.403.000						237 orang	2.980.055.900	
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	orang		orang	19 orang							19 orang		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	dokumen		dokumen	6 dokumen							6 dokumen		
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				6 Dokumen	419.916.100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	6 Dokumen	931.806.900	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				19 Orang	1.696.399.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	19 Orang	2.000.766.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.03	1 3	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				237 Orang	197.087.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	237 Orang	47.483.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	orang		orang	36 orang	250.999.700						36 orang	1.002.949.900	
						Jumlah ASN yang	orang		orang	325 orang							325 orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Diberikan Tanda Jasa													
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	orang		orang	250 orang							250 orang		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	dokumen		dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
						Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	dokumen		dokumen	20 dokumen							20 dokumen		
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	laporan		laporan	17 laporan							17 laporan		
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	50.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	1 Dokumen	348.084.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				36 Orang	70.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	36 Orang	230.850.400	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				325 Orang	15.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	325 Orang	68.246.400	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				250 Orang	35.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	250 Orang	153.516.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				17 Laporan	45.999.700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	17 Laporan	106.566.400	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				20 Dokumen	35.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	20 Dokumen	95.686.700	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						4.695.001.550							8.161.940.250	
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi	%		%	14.91 %	4.695.001.550						14.91 %	8.161.940.250	
5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	orang		orang	627 orang	2.051.517.450						627 orang	2.993.593.200	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis	dokumen		dokumen	2 dokumen							2 dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum													
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				627 Orang	2.037.489.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	627 Orang	2.948.207.200	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	2.01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				2 Dokumen	14.028.250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	2 Dokumen	45.386.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	laporan		laporan	7 laporan	2.643.484.100						7 laporan	5.168.347.050	
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				7 Laporan	2.643.484.100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	7 Laporan	5.168.347.050	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
										TOTAL	19.786.913.450							27.999.189.450	

INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	1				INSPEKTORAT DAERAH						13.720.729.730								16.805.100.426	
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	%		%	84 %	12.469.712.230							84 %	15.045.636.194	
6	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang		orang	52 orang	9.119.436.355							52 orang	10.643.292.000	
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	9.119.436.355		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	52 Orang/bulan	10.643.292.000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	orang		orang	52 orang	750.000.000							52 orang	1.517.654.600	
						Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang		orang	29 orang								29 orang		
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				29 Orang	375.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	29 Orang	693.784.960	INSPEKTORAT
6	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				52 Orang	375.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	52 Orang	823.869.640	INSPEKTORAT
6	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket		paket	2 paket	892.765.500							2 paket	1.078.483.522	
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	10.634.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2 Paket	12.453.010	INSPEKTORAT
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	311.560.000					Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	4 Paket	420.288.019	INSPEKTORAT
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	207.336.500				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	6 Paket	223.029.996	INSPEKTORAT
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	98.795.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3 Paket	115.105.232	INSPEKTORAT
6	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1688 Eksemplar	8.440.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1688 Eksemplar	9.496.540	INSPEKTORAT
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	256.000.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	36 Laporan	298.110.725	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
															Publik				
6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit		unit	5 unit	49.080.875						5 unit	-	
6	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	49.080.875		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	5 Unit	-	INSPEKTORAT
6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan		laporan	4 laporan	800.329.500						4 laporan	934.540.167	
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	3.980.000					Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	4 Laporan	3.449.215	INSPEKTORAT
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	192.950.500				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	12 Laporan	226.465.602	INSPEKTORAT
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	603.399.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	12 Laporan	704.625.350	INSPEKTORAT
6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit		unit	31 unit	858.100.000						31 unit	871.665.905	
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				31 Unit	607.250.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	31 Unit	578.975.375	INSPEKTORAT
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	102.100.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	12 Unit	119.244.290	INSPEKTORAT
6	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	148.750.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1 Unit	173.446.240	INSPEKTORAT
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	%		%	85.33 %	565.825.000						85.33 %	824.709.358	
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	laporan		laporan	7 laporan	183.225.000						7 laporan	105.826.028	
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				7 Laporan	-				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	7 Laporan	-	INSPEKTORAT
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				62 Laporan	91.200.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	62 Laporan	-	INSPEKTORAT
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				37 Laporan	-				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	37 Laporan	-	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				3 Laporan	-				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	3 Laporan	-	INSPEKTORAT
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	92.025.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	4 Dokumen	105.826.028	INSPEKTORAT
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	laporan		laporan	6 laporan	382.600.000						6 laporan	718.883.330	
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				6 Laporan	109.350.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	6 Laporan	174.539.200	INSPEKTORAT
6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				22 Laporan	273.250.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	22 Laporan	544.344.130	INSPEKTORAT
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase hasil capaian kinerja tata laksana pengawasan	%		%	63.33 %	685.192.500						63.33 %	934.754.874	
6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	rekomendasi		rekomendasi	4 rekomendasi	58.767.500						4 rekomendasi	67.541.580	
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				4 Rekomendasi	58.767.500		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	4 Rekomendasi	67.541.580	INSPEKTORAT
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingna dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	626.425.000						3 Perangkat Daerah	867.213.294	
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				3 perangkat daerah	224.725.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	3 perangkat daerah	280.976.940	INSPEKTORAT
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				4 perangkat daerah	75.850.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	4 perangkat daerah	87.179.220	INSPEKTORAT
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 Kegiatan	38.825.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	2 Kegiatan	44.659.762	INSPEKTORAT
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				2 perangkat daerah	287.025.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	2 perangkat daerah	454.397.372	INSPEKTORAT
									TOTAL		13.720.729.730							16.805.100.426	

KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						16.294.809.652							2.023.727.500	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin		Poin	71 Poin	14.970.224.812						71 Poin	1.918.727.500	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		Orang/Bulan	66 Orang/Bulan	10.906.109.364						66 Orang/Bulan	-	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				66 Orang/bulan	10.906.109.364	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	66 Orang/bulan	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	2 Paket	73.100.000						2 Paket	-	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	73.100.000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Paket	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit		Unit	2 Unit	1.297.239.100						2 Unit	18.480.000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	26.955.800	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan				0	2 Paket	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	262.744.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	9 Paket	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	430.796.600	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	8 Paket	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	74.990.700	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Paket	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				26572 Dokumen	153.452.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	26572 Dokumen	18.480.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				100 Laporan	6.300.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	100 Laporan	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	342.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	80 Laporan	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	2 Unit	68.800.000						2 Unit	-	
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	68.800.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Unit	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	1.905.136.348						12 Laporan	1.200.247.500	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	1.200.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat,			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih,	0	3 Laporan	-	KECAMATAN BALIKPAPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Semua Kelurahan			Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				BARAT
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	349.573.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.554.363.348	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	1.200.247.500	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Unit	35 Unit	719.840.000						35 Unit	700.000.000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				35 Unit	520.300.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	35 Unit	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	25.400.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Unit	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	114.140.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	11 Unit	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	60.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Unit	700.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	266.691.450						100 Persen	-	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		Laporan	2 Laporan	176.704.000						2 Laporan	-	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	129.421.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Laporan	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	47.283.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	19.987.700						1 Dokumen	-	
7	1	2	2.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	9.987.700	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan				2 Laporan	10.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat,			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih,	0	2 Laporan	-	KECAMATAN BALIKPAPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						Semua Kelurahan			Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					BARAT
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen		Dokumen	250 Dokumen	69.999.750						250 Dokumen	-	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				250 Dokumen	69.999.750	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	250 Dokumen	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		Persen	17 Persen	789.563.990						17 Persen	105.000.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga		Lembaga	7 Lembaga	92.499.950						7 Lembaga	-	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga	19.999.950	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	7 Lembaga	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Pokmas / Ormas	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	72.500.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Laporan	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	2 Lembaga	697.064.040						2 Lembaga	105.000.000	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga	574.108.750	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Lembaga	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						-	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0		105.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	96.999.290	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Laporan	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	3	2.03	5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				2 Laporan	25.956.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Laporan	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di kecamatan yang optimal	persen		persen	100 persen	268.329.400						100 persen	-	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Laporan		Laporan	12 Laporan	268.329.400						12 Laporan	-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Wilayah Kecamatan														
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	268.329.400	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN						806.415.850								20.000.000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		Persen	17 Persen	806.415.850						17 Persen	20.000.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakanJumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Baru Ilir	Lembaga		Lembaga	5 Lembaga	141.418.000						5 Lembaga	20.000.000	
						Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan Baru Ilir yang terbangun	Unit		Unit	3 Unit							3 Unit		
						Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	persen		persen	100 persen							100 persen		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga	8.168.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Lembaga	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	133.250.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Unit	20.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	-	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Pokmas / Ormas	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	2 Lembaga	664.997.850						2 Lembaga	-	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga	664.997.850	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Lembaga	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN						706.463.100								-	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		Persen	17 Persen	706.463.100						17 Persen	-	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga		Lembaga	5 Lembaga	134.422.100						5 Lembaga	-	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan				5 Lembaga	9.422.100	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Lembaga	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan													
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	125.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Unit	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	-	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 Pokmas / Ormas	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	2 Lembaga	572.041.000						2 Lembaga	-	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga	572.041.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Lembaga	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						712.489.700							-	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		Persen	17 Persen	712.489.700						17 Persen	-	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga		Lembaga	5 Lembaga	160.335.050						5 Lembaga	-	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga	6.740.050	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Lembaga	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	139.995.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Unit	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	13.600.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Pokmas / Ormas	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	umlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	2 Lembaga	552.154.650						2 Lembaga	-	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga	552.154.650	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Lembaga	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						502.816.200							-	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		Persen	17 Persen	502.816.200						17 Persen	-	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Margasari	Lembaga		Lembaga	5 Lembaga	126.385.000						5 Lembaga	-	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Margasari				5 Lembaga	11.385.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Lembaga	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana	Jumlah Sarana dan				3 Unit		Kota Balikpapan,			Mewujudkan Birokrasi	0	3 Unit		KECAMATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					dan Prasarana Kelurahan	Prasarana Kelurahan yang Terbangun					100.000.000	Balikpapan Barat, Marga Sari			Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				-	BALIKPAPAN BARAT
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	15.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0	1 Pokmas / Ormas	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	2 Lembaga	376.431.200							2 Lembaga	-	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga	369.406.200	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0	2 Lembaga	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	3	2.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				6 Unit	7.025.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0	6 Unit	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN						703.089.750								-	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		Persen	17 Persen	703.089.750							17 Persen	-	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Lembaga		Lembaga	5 Lembaga	169.500.000							5 Lembaga	-	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga	9.500.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0	5 Lembaga	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	100.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0	4 Unit	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	60.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0	2 Pokmas / Ormas	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	2 Lembaga	533.589.750							2 Lembaga	-	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga	533.589.750	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0	2 Lembaga	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN						366.844.500								-	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		Persen	17 Persen	366.844.500							17 Persen	-	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga		Lembaga	5 Lembaga	167.998.800							5 Lembaga	-	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga	6.998.800	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0	5 Lembaga	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang				2 Unit	131.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat,			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih,		0	2 Unit	-	KECAMATAN BALIKPAPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Terbangun						Kariangau			Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				BARAT
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	30.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Pokmas / Ormas	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	2 Lembaga	198.845.700						2 Lembaga	-	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga	198.845.700	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Lembaga	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
									TOTAL		20.092.928.752							2.043.727.500	

KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						16.999.147.000							19.915.384.871	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	Poin		Poin	70.15 Poin	15.309.606.800						70.15 Poin	17.934.272.656	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin		Poin	70.15 Poin	10.519.553.200						70.15 Poin	11.920.000.000	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	10.519.553.200	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	54 Orang/bulan	11.920.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin		Poin	70.15 Poin	-						70.15 Poin	80.000.000	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	-	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	0 Paket	80.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin		Poin	70.15 Poin	1.334.467.600						70.15 Poin	1.554.780.000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	34.951.500	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	7 Paket	80.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	101.628.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	9 Paket	100.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	580.113.100	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	7 Paket	718.980.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	179.155.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	7 Paket	214.800.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				25920 Doukumen	131.420.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	25920 Doukumen	150.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	7.200.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Laporan	9.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	300.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	10 Laporan	282.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin		Poin	70.15 Poin	233.000.000						70.15 Poin	676.692.656	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	8.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	11 Unit	441.692.656	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang				1 Unit	225.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah,	PENDAPATAN ASLI		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih,	0	1 Unit	235.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Lainnya	Disediakan						Semua Kelurahan	DAERAH (PAD)		Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				TENGAH
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin		Poin	70.15 Poin	2.274.036.000						70.15 Poin	2.500.000.000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	426.840.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	490.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.847.196.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	2.010.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin		Poin	70.15 Poin	948.550.000						70.15 Poin	1.202.800.000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	277.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	17 Unit	320.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	224.750.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	25 Unit	389.300.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				200 Unit	246.800.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	200 Unit	293.500.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	200.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 Unit	200.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	%		%	100 %	446.493.600						100 %	1.046.271.795	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	313.043.600						100 %	874.000.000	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	146.288.900	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Laporan	694.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	166.754.700	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Dokumen	180.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	%		%	100 %	58.950.000						100 %	76.271.795	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	58.950.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Laporan	76.271.795	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	%		%	100 %	74.500.000						100 %	96.000.000	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				300 Dokumen	74.500.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	300 Dokumen	96.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	12.75 %	817.963.700						12.75 %	629.923.159	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	%		%	100 %	66.280.750						100 %	305.823.159	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						37.046.550	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0		40.751.205	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas/Ormas	-	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Pokmas/Ormas	180.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				4 Laporan	29.234.200	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Laporan	85.071.954	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%		%	100 %	751.682.950						100 %	324.100.000	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						563.234.150	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0		79.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						-	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0		89.700.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	159.217.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Laporan	134.700.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	3	2.03	5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	29.231.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	20.700.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	%		%	100 %	425.082.900						100 %	304.917.261	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	%		%	100 %	425.082.900						100 %	304.917.261	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				16 Laporan	425.082.900	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	16 Laporan	304.917.261	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN						561.727.800							654.722.600	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam	%		%	12.75 %	561.727.800						12.75 %	654.722.600	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	membangun kelurahan													
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	%		%	100 %	109.075.000						100 %	241.325.144	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						9.025.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0		12.075.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	85.050.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 Unit	150.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas/Ormas	15.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Pokmas/Ormas	79.250.144	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%		%	100 %	452.652.800						100 %	413.397.456	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						452.652.800	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0		413.397.456	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						835.661.950							968.613.400	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	12.75 %	835.661.950						12.75 %	968.613.400	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	%		%	100 %	111.750.950						100 %	274.633.096	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						11.750.950	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0		15.065.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	100.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	7 Unit	150.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas/Ormas	-	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	0 Pokmas/Ormas	109.568.096	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%		%	100 %	723.911.000						100 %	693.980.304	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						723.911.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0		693.980.304	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						1.033.682.650							1.172.043.200	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	12.75 %	1.033.682.650						12.75 %	1.172.043.200	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	%		%	100 %	115.052.500						100 %	297.688.208	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan						15.052.500	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi	0		18.630.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Pembangunan di Kelurahan								(PAD)		Pelayanan Publik					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	76.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Unit	150.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas/Ormas	24.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Pokmas/Ormas	129.058.208	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%		%	100 %	918.630.150						100 %	874.354.992	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						918.630.150	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0		874.354.992	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						514.309.200							576.522.400	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	12.75 %	514.309.200						12.75 %	576.522.400	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	%		%	100 %	116.210.000						100 %	233.270.656	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						16.210.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0		11.500.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	88.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	8 Unit	150.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas/Ormas	12.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Pokmas/Ormas	71.770.656	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%		%	100 %	398.099.200						100 %	343.251.744	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						398.099.200	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0		343.251.744	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						523.338.000							610.013.200	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	12.75 %	523.338.000						12.75 %	610.013.200	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	%		%	100 %	110.200.000						100 %	236.699.008	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						10.200.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0		11.730.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	90.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	7 Unit	150.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan				1 Pokmas/Ormas	10.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah,	PENDAPATAN ASLI		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih,	0	1 Pokmas/Ormas	74.969.008	KECAMATAN BALIKPAPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						Mekar Sari	DAERAH (PAD)		Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				TENGAH
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%		%	100 %	413.138.000						100 %	373.314.192	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Pokmas/Ormas	413.138.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Pokmas/Ormas	373.314.192	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						743.961.400							855.745.200	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	12.75 %	743.961.400						12.75 %	855.745.200	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	%		%	100 %	119.700.000						100 %	261.973.056	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						19.700.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0		13.225.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	85.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Unit	150.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas/Ormas	15.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Pokmas/Ormas	98.748.056	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%		%	100 %	624.261.400						100 %	593.772.144	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Pokmas/Ormas	624.261.400	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Pokmas/Ormas	593.772.144	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
										TOTAL	21.211.828.000							24.753.044.871	

KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						16.592.808.911							18.865.855.131	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin		Poin	79.40 Poin	15.232.310.086						79.40 Poin	16.399.616.679	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	19.998.300						3 Dokumen	30.000.000	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	19.998.300	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Dokumen	30.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		Orang/bulan	56 Orang/bulan	10.044.374.186						56 Orang/bulan	10.100.000.000	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	10.044.374.186	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	44 Orang/bulan	10.100.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	JUmlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	86 Paket	69.660.000						86 Paket	72.000.000	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				86 Paket	69.660.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	86 Paket	72.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Dokumen		Dokumen	20805 Dokumen	1.631.605.700						20805 Dokumen	1.651.655.679	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	10 Laporan							10 Laporan		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket		Paket	77 Paket							77 Paket		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket		Paket	21 Paket							21 Paket		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket		Paket	7 Paket							7 Paket		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket		Paket	12 Paket							12 Paket		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	28.765.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	7 Paket	50.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	366.488.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Paket	420.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				77 Paket	675.572.700	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	77 Paket	616.655.679	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan yang Disediakan				21 Paket	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	21 Paket	120.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20805 Dokumen	175.780.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	20805 Dokumen	145.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	285.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	10 Laporan	300.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	170.000.000						1 Unit	450.000.000	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit							1 Unit		
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	170.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Unit	300.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	-	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Unit	150.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	2.191.821.900						12 Laporan	3.022.236.000	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	26 Laporan							26 Laporan		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	-	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	12.500.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	448.735.500	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	518.736.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				26 Laporan	1.743.086.400	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	26 Laporan	2.491.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kelurahan							
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	6 Unit	1.104.850.000						6 Unit	1.073.725.000	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit		Unit	34 Unit							34 Unit		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Unit	34 Unit							34 Unit		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	6 Unit							6 Unit		
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				34 Unit	666.100.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	34 Unit	523.725.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	148.750.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	34 Unit	200.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	200.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 Unit	200.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	90.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 Unit	150.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	275.810.625						100 %	1.142.750.000	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		Laporan	4 Laporan	160.810.625						4 Laporan	865.000.000	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	160.810.625	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Laporan	765.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	-	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Dokumen	100.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	25.000.000						2 Dokumen	27.000.000	
						Jumlah Laporan Peningkatan	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
7	1	2	2.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				2 Dokumen	15.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	16.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	11.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen		Dokumen	200 Dokumen	90.000.000						200 Dokumen	250.750.000	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				200 Dokumen	90.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	200 Dokumen	95.750.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				700 Laporan	-	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	700 Laporan	155.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%		%	10 %	669.900.000						10 %	1.097.929.166	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						150.000.000							414.894.166	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						100.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0		23.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	-	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Unit	110.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	-	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Pokmas / Ormas	183.894.166	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	50.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Laporan	98.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						519.900.000							683.035.000	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						360.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0		170.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas							Kota	PENDAPATAN		Mewujudkan Birokrasi	0			KECAMATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Lembaga Kemasyarakatan						-	Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	ASLI DAERAH		Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			75.000.000	BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				1 Unit	-	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Unit	159.135.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
													PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	70.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	170.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2.03	5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	89.900.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	108.900.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	%		%	100 %	414.788.200						100 %	225.559.286	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		Laporan	4 Laporan	414.788.200						4 Laporan	225.559.286	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	414.788.200	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Laporan	225.559.286	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						594.839.400							660.000.000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						594.839.400							660.000.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						140.840.000							220.000.000	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						18.340.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			25.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				45 Unit	100.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		45 Unit	150.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				76 Pokmas / Ormas	22.500.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		76 Pokmas / Ormas	45.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga						453.999.400							440.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan														
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						453.999.400	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			440.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						816.700.000							840.000.000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						816.700.000							840.000.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						161.700.000							220.000.000	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						27.950.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			25.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun				23 Unit	100.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		23 Unit	150.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				80 Pokmas / Ormas	33.750.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		80 Pokmas / Ormas	45.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						655.000.000							620.000.000	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						655.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			620.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						586.598.300							615.000.000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						586.598.300							615.000.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						136.600.000							220.000.000	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						16.600.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			25.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	100.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		7 Unit	150.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				60 Pokmas / Ormas	20.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		60 Pokmas / Ormas	45.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat						449.998.300							395.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Kecamatan														
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						449.998.300	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			395.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						553.591.600							650.000.000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						553.591.600							650.000.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						136.596.000							220.000.000	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						16.597.500	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			25.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				46 Unit	99.998.500	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		46 Unit	150.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	20.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2 Pokmas / Ormas	45.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						416.995.600							430.000.000	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						416.995.600	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			430.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						647.239.900							690.000.000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						647.239.900							690.000.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						149.245.400							220.000.000	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						20.497.800		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			25.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				40 Unit	99.999.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		40 Unit	150.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				80 Pokmas / Ormas	28.748.600	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		80 Pokmas / Ormas	45.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						497.994.500							470.000.000	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						497.994.500	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			470.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
										TOTAL	19.791.778.111							22.320.855.131	

KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						17.115.992.706							20.183.216.853	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	Poin		Poin	72 Poin	15.240.802.756						72 Poin	17.393.423.992	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	34.995.000						1 Dokumen	44.000.000	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	12.495.500	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	16.500.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	10.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	11.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	12.499.500	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	16.500.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan		Orang / Bulan	62 Orang / Bulan	10.896.490.325						62 Orang / Bulan	12.369.534.067	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/bulan	10.896.490.325	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	62 Orang/bulan	12.369.534.067	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	1.191.331.691						2 Dokumen	1.332.405.362	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan							12 Laporan		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	2 Paket							2 Paket		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket	15 Paket							15 Paket		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket		Paket	8 Paket							8 Paket		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Bangunan Kantor yang Disediakan													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	20 Paket							20 Paket		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		Paket	10 Paket							10 Paket		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	30.999.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	8 Paket	31.100.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	169.999.841	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	20 Paket	280.225.059	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	50.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	10 Paket	57.500.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	426.993.100	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Paket	432.134.303	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	64.999.750	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	15 Paket	74.750.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	148.340.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	67.896.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	-	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Laporan	8.800.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	300.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	380.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		Unit	2 Unit	70.000.240						2 Unit	250.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	70.000.240	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Unit	250.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	2.436.935.500						12 Laporan	2.697.064.800	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan							12 Laporan		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	410.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	515.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.026.935.500	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	2.182.064.800	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	7 Unit	611.050.000						7 Unit	700.419.763	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Unit	38 Unit							38 Unit		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Unit	100 Unit							100 Unit		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				38 Unit	392.050.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	38 Unit	473.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	150.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	100 Unit	166.925.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	69.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	7 Unit	60.494.763	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	561.407.550						100 %	1.266.538.187	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	397.782.900						3 Dokumen	1.066.538.187	
						Jumlah Laporan	Laporan		Laporan	2 Laporan							2 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	322.785.700	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Laporan	946.538.187	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	74.997.200	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Laporan	120.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	65.624.850						3 Dokumen	100.000.000	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		Laporan	3 Laporan							3 Laporan		
7	1	2	2.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				3 Dokumen	5.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Dokumen	60.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	60.624.850	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Laporan	40.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen		Dokumen	800 Dokumen	97.999.800						800 Dokumen	100.000.000	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				800 Dokumen	97.999.800	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	800 Dokumen	100.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	16 %	820.652.400						16 %	1.089.323.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan		Laporan	6 Laporan	88.684.250						6 Laporan	394.409.100	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Lembaga		Lembaga	5 Lembaga							5 Lembaga		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum				5 Lembaga	14.549.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan	0	5 Lembaga	22.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Pembangunan di Kelurahan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							(PAD)		yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas/Ormas	-	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Pokmas/Ormas	240.409.100	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				6 Laporan	74.135.250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 Laporan	132.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan		Laporan	1 Laporan	731.968.150						1 Laporan	694.913.900	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan		Laporan	6 Laporan							6 Laporan		
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	2 Lembaga							2 Lembaga		
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga	597.378.400	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Lembaga	387.800.950	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	-	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Lembaga	89.853.750	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6 Laporan	99.990.750	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 Laporan	171.259.200	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	3	2.03	5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	34.599.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	46.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	%		%	100 %	493.130.000						100 %	433.931.674	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Laporan		Laporan	15 Laporan	493.130.000						15 Laporan	433.931.674	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Ketertiban Umum	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				15 Laporan	493.130.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	15 Laporan	433.931.674	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						583.703.500								637.201.600	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	16 %	583.703.500						16 %	637.201.600	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga		Lembaga	5 Lembaga	196.996.500						5 Lembaga	259.650.000	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas		Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas							1 Pokmas/Ormas		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		Unit	4 Unit							4 Unit		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga	11.996.800	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Lembaga	18.150.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	164.999.700	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Unit	181.500.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas/Ormas	20.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Pokmas/Ormas	60.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	1 Lembaga	386.707.000						1 Lembaga	377.551.600	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga	386.707.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Lembaga	377.551.600	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						862.160.000								909.196.400	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	16 %	862.160.000						16 %	909.196.400	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	Lembaga		Lembaga	5 Lembaga	200.000.000						5 Lembaga	266.650.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas		Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas							1 Pokmas/Ormas		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		Unit	4 Unit							4 Unit		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga	15.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Lembaga	18.150.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	165.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Unit	181.500.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas/Ormas	20.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Pokmas/Ormas	67.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	1 Lembaga	662.160.000						1 Lembaga	642.546.400	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga	662.160.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Lembaga	642.546.400	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						938.928.850							985.909.200	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	16 %	938.928.850						16 %	985.909.200	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga		Lembaga	5 Lembaga	199.999.900						5 Lembaga	267.650.000	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas		Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas							1 Pokmas/Ormas		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		Unit	4 Unit							4 Unit		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum				5 Lembaga	14.999.900	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan	0	5 Lembaga	18.150.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Pembangunan di Kelurahan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							(PAD)		yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	185.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Unit	181.500.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas/Ormas	-	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Pokmas/Ormas	68.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	1 Lembaga	738.928.950						1 Lembaga	718.259.200	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga	738.928.950	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Lembaga	718.259.200	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						815.040.000							860.375.900	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	15 %	815.040.000						15 %	860.375.900	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga		Lembaga	5 Lembaga	200.000.000						5 Lembaga	264.650.000	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas		Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas							1 Pokmas/Ormas		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		Unit	3 Unit							3 Unit		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga	15.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Lembaga	18.150.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	165.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Unit	181.500.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas/Ormas	20.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Pokmas/Ormas	65.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Lembaga	Lembaga		Lembaga	1 Lembaga	615.040.000						1 Lembaga	595.725.900	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kemasyarakatan yang Diselenggarakan														
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga	615.040.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Lembaga	595.725.900	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN						1.091.551.800								1.141.334.800	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	16 %	1.091.551.800						16 %	1.141.334.800	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga		Lembaga	5 Lembaga	200.000.000						5 Lembaga	269.650.000	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas		Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas							1 Pokmas/Ormas		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		Unit	4 Unit							4 Unit		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga	15.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Lembaga	18.150.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	165.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Unit	181.500.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas/Ormas	20.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Pokmas/Ormas	70.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	1 Lembaga	891.551.800						1 Lembaga	871.684.800	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga	891.551.800	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Lembaga	871.684.800	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
															yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						986.398.900							1.026.729.700	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	16 %	986.398.900						16 %	1.026.729.700	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga		Lembaga	5 Lembaga	199.739.900						5 Lembaga	269.650.000	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas		Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas							1 Pokmas/Ormas		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		Unit	4 Unit							4 Unit		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga	14.953.400	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Lembaga	18.150.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	164.786.500	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Unit	181.500.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit							4 Unit		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas/Ormas	20.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Pokmas/Ormas	70.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	1 Lembaga	786.659.000						1 Lembaga	757.079.700	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga	786.659.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Lembaga	757.079.700	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
										TOTAL	22.393.775.756							25.743.964.453	

KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						19.186.063.900							22.626.195.810	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	Persen		Persen	72 Persen	17.526.150.800						72 Persen	20.074.367.854	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin		Poin	70 Poin	10.000.000						70 Poin	-	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan		-	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin		Poin	72 Poin	12.565.556.480						72 Poin	13.782.367.854	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.565.556.480		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan		13.782.367.854	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin		Poin	72 Poin	25.600.000						72 Poin	90.000.000	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						25.600.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan		90.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan		-	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin		Poin	72 Poin	1.472.677.100						72 Poin	1.912.000.000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						135.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan		150.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						299.596.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan		300.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan		-	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						550.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan		707.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						133.081.100		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan		170.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						135.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan		135.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu						20.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan		50.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat								PENDAPATAN	Meningkatkan Sumber	Mewujudkan Birokrasi	Aparatur			KECAMATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200.000.000		N ASLI DAERAH	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kecamatan Balikpapan Selatan		400.000.000	BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin		Poin	72 Poin	205.950.000						72 Poin	375.000.000	
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan		-	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel						5.950.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan		125.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan		-	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan		-	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						200.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan		250.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin		Poin	72 Poin	2.340.000.000						72 Poin	2.690.000.000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan		5.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	490.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan	12 Laporan	775.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	1.845.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan	3 Laporan	1.910.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin		Poin	72 Poin	906.367.220						72 Poin	1.225.000.000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						470.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan		475.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						15.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan		25.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan		25.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan								PENDAPATA	Meningkatkan Sumber	Mewujudkan Birokrasi	Aparatur			KECAMATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Mesin Lainnya						180.000.000		N ASLI DAERAH	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kecamatan Balikpapan Selatan		325.000.000	BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						241.367.220		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan		375.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan		-	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	454.999.750						100 Persen	1.125.396.863	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	291.754.450						100 Persen	470.000.000	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	200.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Selatan	7 Laporan	270.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7 Dokumen	91.754.450		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Selatan	7 Dokumen	200.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	Persen		Persen	100 Persen	100.000.000						100 Persen	355.396.863	
7	1	2	2.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				4 Dokumen	9.072.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan	4 Dokumen	260.396.863	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						90.928.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan		95.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	Persen		Persen	100 Persen	63.245.300						100 Persen	300.000.000	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						63.245.300		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Selatan		300.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		Persen	8.25 Persen	693.491.750						8.25 Persen	1.005.307.107	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Persen		Persen	100 Persen	88.523.250						100 Persen	305.307.107	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Kelurahan yang terlaksana														
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						14.998.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Balikpapan Selatan		15.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Balikpapan Selatan		200.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan						73.525.250		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Balikpapan Selatan		90.307.107	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	604.968.500						100 Persen	700.000.000	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						535.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan		600.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan		-	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						34.987.400		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan		50.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2.03	5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						34.981.100		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan		50.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	Persen		Persen	100 Persen	511.421.600						100 Persen	421.123.986	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	Persen		Persen	100 Persen	511.421.600						100 Persen	421.123.986	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	511.421.600		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	1. Aparatur Kecamatan dan Kelurahan 2. Danramil, Kapolsek, Babinsa, Babinpotdirga dan Babinkamtibmas 3. Lembaga Kemasyarakatan Kec. Balikpapan Selatan 3.	8 Laporan	421.123.986	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN														

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	1				KECAMATAN						739.183.200								514.000.000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan Damai Bahagia	Persen		Persen	8.25 Persen	739.183.200						8.25 Persen	514.000.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Damai Bahagia yang terlaksana	Persen		Persen	100 Persen	302.000.000						100 Persen	87.000.000	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						12.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kelompok Masyarakat di Kelurahan Damai Bahagia		12.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	240.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kelompok Masyarakat di Kelurahan Damai Bahagia	10 Unit	-	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	50.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kelompok Masyarakat di Kelurahan Damai Bahagia	3 Pokmas / Ormas	75.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	437.183.200						100 Persen	427.000.000	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						437.183.200	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Damai Bahagia		427.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						675.499.700								705.500.000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		Persen	8.25 Persen	675.499.700						8.25 Persen	705.500.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggan Raya yang terlaksana	Persen		Persen	100 Persen	301.999.900						100 Persen	342.000.000	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						11.999.900	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sepinggan Raya		12.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	240.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sepinggan Raya	10 Unit	255.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	50.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sepinggan Raya	3 Pokmas / Ormas	75.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga	Persentase keaktifan	Persen		Persen	100 Persen	373.499.800						100 Persen	363.500.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	lembaga kemasyarakatan di kecamatan													
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						373.499.800	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			363.500.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						568.000.000							433.000.000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		Persen	8.25 Persen	568.000.000						8.25 Persen	433.000.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Damai Baru yang terlaksana	Persen		Persen	100 Persen	302.000.000						100 Persen	177.000.000	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						12.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Damai Baru		12.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	240.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Damai Baru	5 Unit	90.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	50.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Damai Baru	3 Pokmas / Ormas	75.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	266.000.000						100 Persen	256.000.000	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						266.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Damai Baru		256.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						937.493.350							968.000.000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	100		100	8.25 100	937.493.350						8.25 100	968.000.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggan Baruyang terlaksana	Persen		Persen	100 Persen	301.507.350						100 Persen	342.000.000	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						11.968.350	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sepinggan Baru		12.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	239.539.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sepinggan Baru	10 Unit	255.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Baru							
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sepinggan Baru		75.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	635.986.000						100 Persen	626.000.000	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						635.986.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sepinggan Baru		626.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						910.000.000							928.000.000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		Persen	8.25 Persen	910.000.000						8.25 Persen	928.000.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Persen		Persen	100 Persen	302.000.000						100 Persen	330.000.000	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						12.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			-	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	240.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		10 Unit	255.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	50.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		3 Pokmas / Ormas	75.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	608.000.000						100 Persen	598.000.000	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						608.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Gunung Bahagia		598.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						1.028.997.500							1.049.000.000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		Persen	8.25 Persen	1.028.997.500						8.25 Persen	1.049.000.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggan yang terlaksana	Persen		Persen	100 Persen	302.000.000						100 Persen	342.000.000	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi							Kota	PENDAPATA		Mewujudkan Birokrasi	Masyarakat di			KECAMATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						12.000.000	Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	N ASLI DAERAH		Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	wilayah Kelurahan Sepinggan		12.000.000	BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	240.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di wilayah Kelurahan Sepinggan	10 Unit	255.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	50.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di wilayah Kelurahan Sepinggan	3 Pokmas / Ormas	75.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	726.997.500						100 Persen	707.000.000	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						726.997.500		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			707.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						819.900.350							850.000.000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan Sungai Nangka	Persen		Persen	8.25 Persen	819.900.350						8.25 Persen	850.000.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Nangka yang terlaksana	Persen		Persen	100 Persen	301.900.350						100 Persen	342.000.000	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						12.000.450	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sungai Nangka		12.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	239.999.900	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sungai Nangka	10 Unit	255.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	49.900.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sungai Nangka	3 Pokmas / Ormas	75.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	518.000.000						100 Persen	508.000.000	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						518.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sungai Nangka		508.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
										TOTAL	24.865.138.000							28.073.695.810	

KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						16.088.445.050							15.705.326.474	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	poin		poin	79.5 poin	12.564.387.600						79.5 poin	12.706.000.000	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	dokumen		dokumen	4 dokumen	30.000.000						4 dokumen	29.000.000	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	30.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur	4 Dokumen	29.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlahorang yang menerima gaji	Orang		Orang	61 Orang	8.719.272.000						61 Orang	9.000.000.000	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang/bulan	8.719.272.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Balikpapan Timur	61 Orang/bulan	9.000.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	Orang		Orang	61 Orang	84.410.000						61 Orang	88.000.000	
7	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				5 Unit	-	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan alikpapan TImur	5 Unit	26.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				61 Pegawai	84.410.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan alikpapan TImur	61 Pegawai	62.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	kali		kali	12 kali	1.081.265.000						12 kali	1.112.000.000	
						IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	poin		poin	79.5 poin							79.5 poin		
						Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jenis		jenis	1 jenis							1 jenis		
						Jumlah Jenis bahan logistik kantor	jenis		jenis	2 jenis							2 jenis		
						Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	jenis		jenis	12 jenis							12 jenis		
						Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis		jenis	13 jenis							13 jenis		
						Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	jenis		jenis	19 jenis							19 jenis		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13 jenis	22.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	13 jenis	23.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				19 jenis	269.315.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	19 jenis	278.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 jenis	423.450.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 jenis	436.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 jenis	60.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 jenis	62.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1 jenis	90.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 jenis	93.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah				12 Kali	216.500.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Kali	220.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	poin		poin	79.5 poin	1.718.890.600						79.5 poin	1.771.000.000	
						Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jenis		jenis	4 jenis							4 jenis		
						Jumlah jenis Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	jenis laporan		jenis laporan	3 jenis laporan							3 jenis laporan		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				4 Jenis	233.868.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Jenis	258.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 jenis laporan	1.485.022.600	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 jenis laporan	1.513.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Pemeliharaan	Kali		Kali	11 Kali	930.550.000						11 Kali	706.000.000	
						IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	poin		poin	79.5 poin							79.5 poin		
						Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jenis Pemeliharaan		Jenis Pemeliharaan	3 Jenis Pemeliharaan							3 Jenis Pemeliharaan		
						Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	Unit Pemeliharaan		Unit Pemeliharaan	2 Unit Pemeliharaan							2 Unit Pemeliharaan		
						Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Unit Pemeliharaa		Unit Pemeliharaa	25 Unit Pemeliharaan							25 Unit Pemeliharaan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
							n		n										
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit pemeliharaan	558.550.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	25 Unit pemeliharaan	382.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit pemeliharaan	25.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Unit pemeliharaan	26.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				3 jenis pemeliharaan	102.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 jenis pemeliharaan	93.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan				11 kali	245.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	11 kali	205.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit							2 Unit		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit							10 Unit		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	892.077.450						100 %	502.226.474	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		Laporan	8 Laporan	597.523.710						8 Laporan	375.950.000	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				8 Laporan	399.999.810		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	8 Laporan	206.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan terselesaikan				3 Dokumen	197.523.900	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Dokumen	169.950.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Laporan							4 Laporan		
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan	dokumen		dokumen	3 dokumen	142.640.940						3 dokumen	51.750.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan terselesaikan													
						Jumlah laporan penyelenggaraan pembinaan untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	laporan		laporan	4 laporan							4 laporan		
7	1	2	2.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				3 Dokumen	46.640.940		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Dokumen	25.750.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	96.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Laporan	26.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Izin		Izin	2300 Izin	151.912.800						2300 Izin	74.526.474	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Izin non usaha yang diterbitkan				2300 Izin	151.912.800	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2300 Izin	74.526.474	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	16,45 %	1.996.980.000						16,45 %	1.897.600.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	%		%	100 %	137.000.000						100 %	126.000.000	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						37.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur		23.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	100.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur	3 Laporan	103.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%		%	100 %	1.859.980.000						100 %	1.771.600.000	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						1.659.980.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0		1.606.800.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	150.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Laporan	123.600.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	3	2.03	5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				2 Laporan	50.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Laporan	41.200.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	%		%	100 %	635.000.000						100 %	599.500.000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	%		%	100 %	635.000.000						100 %	599.500.000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	635.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur	12 Laporan	599.500.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						569.768.350							200.900.000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	16.45 %	569.768.350						16.45 %	200.900.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	%		%	100 %	200.599.850						100 %	197.000.000	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						20.599.850	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pokmas dan Ormas Kelurahan Lamaru		11.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Sapras	180.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pokmas dan Ormas Kelurahan Lamaru	4 Sapras	186.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	%		%	100 %	369.168.500						100 %	3.900.000	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						369.168.500	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				3.900.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						759.631.000							714.418.666	
7	1	3			PROGRAM	Persentase rata-rata	%		%	16.45 %	759.631.000						16.45 %	714.418.666	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan													
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	%		%	100 %	211.000.000						100 %	181.000.000	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						21.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0		12.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	130.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 Unit	134.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
													Lain-lain PAD Yang Sah						
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	60.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	7 Pokmas / Ormas	35.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	lembaga		lembaga	3 lembaga	548.631.000						3 lembaga	533.418.666	
						Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%		%	100 %							100 %		
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						548.631.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Manggar Baru		533.418.666	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						722.040.950							691.322.350	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	16.45 %	722.040.950						16.45 %	691.322.350	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Rakor Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga		Lembaga	11 Lembaga	210.997.450						11 Lembaga	208.000.000	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						20.997.500	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pokmas dan Ormas Kelurahan Teritip		12.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun				6 Sapras	189.999.950	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pokmas dan Ormas Kelurahan Teritip	6 Sapras	196.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	lembaga		lembaga	3 lembaga	511.043.500						3 lembaga	483.322.350	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						511.043.500	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0		483.322.350	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						1.235.400.000							1.239.168.462	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	16.45 %	1.235.400.000						16.45 %	1.239.168.462	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	%		%	100 %	229.299.600						100 %	235.500.000	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						35.200.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Manggar		14.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Sapras	178.099.600	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Manggar	11 Sapras	205.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
															Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						16.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Manggar		16.500.000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
													Lain-lain PAD Yang Sah						
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%		%	100 %	1.006.100.400						100 %	1.003.668.462	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						1.006.100.400	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.003.668.462	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
										TOTAL	19.375.285.350							18.551.135.952	

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						19.293.882.340							19.065.275.242	
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin		Poin	80 Poin	7.152.949.240						80 Poin	6.908.781.929	
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin		Poin	80.5 Poin	4.000.000.000						80.5 Poin	4.288.392.550	
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	4.000.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	25 Orang/bulan	4.288.392.550	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin		Poin	80.5 Poin	50.000.000						80.5 Poin	-	
8	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	10 Orang	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin		Poin	79.5 Poin	991.471.740						79.5 Poin	763.410.879	
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	24.996.500		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Paket	39.580.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	202.241.900		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	6 Paket	230.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	205.384.400		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	7 Paket	205.830.879	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	58.850.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	3 Paket	50.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				240 Dokumen	99.998.940		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	240 Dokumen	28.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	12 Laporan	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	300.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	40 Laporan	200.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin		Poin	80 Poin	647.640.000						80 Poin	690.000.000	
8	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	500.040.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Unit	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	137.600.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	4 Unit	70.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	10.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	20 Unit	20.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Unit	400.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				100 Unit	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	100 Unit	200.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin		Poin	81 Poin	613.837.500						81 Poin	560.978.500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				49 Laporan	61.704.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	49 Laporan	75.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	552.133.500		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	12 Laporan	485.978.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin		Poin	80 Poin	850.000.000						80 Poin	606.000.000	
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	10 Unit	287.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	420.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	11 Unit	15.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	5 Unit	15.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	90.000.000				Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	41 Unit	105.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	10.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Unit	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	280.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Unit	113.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	2 Unit	60.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat terhadap 4 Konsensus Nasional	%		%	62 %	1.027.741.700						62 %	1.408.838.660	
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	%		%	100 %	1.027.741.700						100 %	1.408.838.660	
8	1	2	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	9.999.300		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		1 Dokumen	25.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	269.999.700		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		1 Dokumen	290.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				350 Orang	137.744.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		350 Orang	358.838.660	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				300 Orang	286.999.700		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		300 Orang	390.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan				4 Laporan	64.999.100		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		4 Laporan	80.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					dan Sejarah Kebangsaan	Sejarah Kebangsaan														
8	1	2	2.01	6	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				2050 Keluarga	257.999.900		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		2050 Keluarga	265.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	%		%	100 %							100 %		
						Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	%		%	66,66 %	8.183.041.300						66,66 %	7.014.265.363	
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan	%		%	100 %	8.183.041.300						100 %	7.014.265.363	
8	1	3	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				5 Dokumen	9.834.800		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	5 Dokumen	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	4.373.115.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	2 Dokumen	2.729.265.363	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				150 Orang	67.600.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	150 Orang	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	35.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	100 Orang	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan				3 Laporan	3.697.491.500		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	3 Laporan	4.255.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Situasi Politik di Daerah														
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan yang Telah Melaporan pada Pemerintah Kota Balikpapan	%		%	84 %	619.920.000						84 %	1.263.789.933	
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	%		%	100 %	619.920.000						100 %	1.263.789.933	
8	1	4	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				5 Dokumen	12.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	5 Dokumen	15.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	4	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	25.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Dokumen	525.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				400 Orang	342.600.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	400 Orang	115.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	4	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	62.270.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	100 Orang	363.789.933	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	4	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	177.550.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Laporan	245.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemuda yang mengikuti sosialisasi konsep P4GN	%		%	86 %	686.132.000						86 %	719.870.062	
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN	%		%	100 %	686.132.000						100 %	719.870.062	
8	1	5	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	15.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		1 Dokumen	15.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	15.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		1 Dokumen	15.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				400 Orang	70.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		400 Orang	54.870.062	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				250 Orang	389.857.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		250 Orang	415.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Laporan	196.275.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		1 Laporan	220.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Monitoring Potensi Konflik	%		%	83 %	1.624.098.100						83 %	1.749.729.295	
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Presentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	%		%	100 %	1.624.098.100						100 %	1.749.729.295	
8	1	6	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	9.985.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Dokumen	50.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	259.994.300		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Dokumen	300.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				30 Orang	79.189.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	30 Orang	49.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				30 Orang	209.999.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	30 Orang	250.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				192 Laporan	114.930.800		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	192 Laporan	150.729.295	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				24 Dokumen	950.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	24 Dokumen	950.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
					TOTAL		19.293.882.340							19.065.275.242	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama.

Akuntabilitas kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang terkait berhasil atau tidaknya pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dalam hal akuntabilitas kinerja Kota Balikpapan adalah antara Wali Kota Balikpapan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Republik Indonesia. Perwujudan akuntabilitas kinerja tersebut melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturtan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Balikpapan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi. Dasar Perjanjian Kinerja tersebut mengacu pada hasil analisis antara target dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Akuntabilitas kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah dapat dinilai berdasarkan hasil capaian dari nilai AKIP yang diukur atas hasil evaluasi dari 5 (lima) komponen yang dinilai yaitu; 1) Komponen Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja; 4) Evaluasi Internal; dan 5) Capaian Kinerja.

Secara rinci Indikator Kinerja Utama Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 1 Indikator Kinerja Utama Kota Balikpapan Tahun 2023

No	Indikator Tujuan (T) dan Sasaran (S)	Target Tahun 2023	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026
T.1	Indeks Reformasi Birokrasi	68,7	70,04
S-1	Nilai SAKIP	75,52	75,58
S-2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80	83
S-3	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	41,42%	44,40%
S-4	Indeks SPBE	3.3	4.0
S-5	Maturitas SPIP	Level 3	Level 4
S-6	Indeks Sistem Merit	0,73	0,84
S-7	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,85	85,05
T.2	Indeks Pembangunan Manusia	80,31	80,91
S-1	Indeks Pendidikan	0,7506	0,7524
S-2	Indeks Kesehatan	0,8388	0,8397
S-3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11	12,5
S-4	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0,022	0,025
S-5	Indeks Warisan Budaya	0,4962	0,4975
S-6	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	25	60

No	Indikator Tujuan (T) dan Sasaran (S)	Target Tahun 2023	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026
T.3	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	82,5	84
S-1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	78,78	80,02
S-2	Persentase Permukiman Layak Huni	99,32	100
T.4	Indeks *Liveable City*	82,19	83,69
S-1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,70	68,51
S-2	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Peruntukkan	89,4	90
S-3	Indeks Resiko Bencana	105	99
S-4	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	0,8267	0,8794
T.5	Indeks Gini	0,3	0,3
S-1	Persentase Pertumbuhan UMKM	3,17	3,45
S-2	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,46	7,74
S-3	Tingkat Kemiskinan	2,39	2,36
T-6	Pertumbuhan Ekonomi	4,45	5,5
S-1	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	3,53	4,44
S-2	Skor Pola Pangan Harapan	87	90
S-3	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	1,5	3,4
S-4	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	2,42	3,22
S-5	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	3,97	5

6.2 Indikator Kinerja Kunci.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Periode 2021-2024 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Berikut Indikator Kinerja Kunci (IKK) menurut Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 :

Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Kunci Kota Balikpapan Tahun 2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	PDRB per kapita	Juta Rupiah	175,50	204,08	BAPPEDA LITBANG
2	Inflasi	%	3,5±1	3,5±1	BAPPEDA LITBANG
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	68,7	70,04	
4	Nilai SAKIP	Poin	75,52	75,58	INSKOT, SETDAKOT, BAPPEDA
5	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	80	83	BKAD
6	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	41,42	44,4	BPPDRD
7	Indeks SPBE	Poin	3.3	4.0	DISKOMINFO
8	Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 4	INSKOT
9	Indeks Sistem Merit	Poin	0,73	0,84	BKPSDM
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82,85	85,05	SETDA
11	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	81,00	80,91	
12	Indeks Pendidikan	Poin	0,7506	0,7524	DISDIKBUD
13	Indeks Kesehatan	Poin	0,8388	0,8397	DINKES
14	Indeks Pembangunan Literasi	Poin	11	12,5	DISPUSTAKAR

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Masyarakat				
15	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0,022	0,025	DPOP
16	Indeks Warisan Budaya	Poin	0,4962	0,4975	DISDIKBUD
17	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	25	60	DP3AKB
18	Indeks Liveable City	Poin	82,19	83,69	
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69.70	68,51	DLH
20	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Peruntukkan	%	89,4	90	DPPR
21	Indeks Resiko Bencana	Poin	105	99	BPBD
22	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0,8267	0,8794	SATPOL PP
23	Indeks Gini	Poin	0,30	0,3	
24	Presentase Pertumbuhan UMKM	%	3,17	3,45	DKUMKMP
25	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,46	7,74	DISNAKER
26	Tingkat Kemiskinan	%	2,39	2,36	DINSOS
27	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,60	5,5	
28	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	3,53	4,44	DPMPT
29	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	87	90	DP3
30	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	1,5	3,4	DPOP
31	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	2,42	3,22	DPOP
32	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	3,97	5	DISDAG
	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	82,5	84	DPU
2	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	78,78	80,02	DPU
3	Persentase Permukiman Layak Huni	%	99,32	100	DISPERKIM
	ASPEK PELAYANAN UMUM				
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1	Harapan lama sekolah	Tahun	14,17	14,2	DISDIKBUD
2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,71	10,74	DISDIKBUD
3	Nilai SAKIP OPD	Poin	78,37	84,37	DISDIKBUD
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28,75	34	DISDIKBUD
5	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)	Tahun	87,03	87,33	DISDIKBUD
6	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	%	77,78	100	DISDIKBUD
7	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi Minimal D-IV / S1	%	91,45	92,95	DISDIKBUD
8	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin (PAUD/SD/SMP)	%	99,03	99,18	DISDIKBUD
9	Persentase Peningkatan Karya, Bahasa dan Sastra yang Bercirikan Kearifan Lokal Balikpapan	%	11,11	77,78	DISDIKBUD
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	86,18	89,18	DISDIKBUD
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,52	74,58	DINKES
2	Nilai SAKIP OPD	Poin	85,39	85,72	DINKES

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28,75	34	DINKES
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	85	DINKES
5	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin	%	84	90	DINKES
6	Persentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum yang Diterbitkan	%	100	100	DINKES
7	Persentase UKBM Aktif	%	84	90	DINKES
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	84	84,15	DINKES, RSUD, RSIA
9	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	10.269	9.926	DINKES
10	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	9.965	9.622	DINKES
11	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	9.879	9.567	DINKES
12	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	27.563	31.907	DINKES
13	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	484.134	560.446	DINKES
14	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	25.880	35.190	DINKES
15	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	203.692	235.799	DINKES
16	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	14.992	17.355	DINKES
17	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Jiwa	779	902	DINKES
18	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa	14.315	14.315	DINKES
19	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	75	100	DINKES
20	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	94	97	DINKES
21	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	94	97	DINKES
22	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	DINKES
23	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	65	75	DINKES
24	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	DINKES
25	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	DINKES
26	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	40	60	DINKES
27	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	DINKES
28	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	DINKES
29	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standa	%	100	100	DINKES
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	Poin	84	87	DPU
2	Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air	%	57,48	62,56	DPU
3	Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	%	97,93	98,53	DPU
4	Persentase infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	81,25	84,91	DPU
5	Jumlah Bangunan yang memiliki SLF	%	65	125	DPU
6	Persentase pelayanan jasa kontruksi	%	30,72	37,9	DPU
7	Nilai SAKIP OPD	Poin	78	81	DPU
8	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28,75	34	DPU
9	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	%	89,4	90	DPPR
10	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	%	22	33	DPPR
11	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	%	61,76	70,59	DPU
12	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	53,09	54,26	DPU
13	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	%	97,1	97,53	DPU
14	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	%	98,54	99,29	DPU
15	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan	%	97,82	98,36	DPU
16	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	%	87,36	93,42	DPU
17	Persentase Pelayanan Jalan Lingkungan	%	76,36	81,82	DPU
18	Persentase Bangunan yang Memiliki Izin	%	93,39	94,91	DPU
19	Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	%	100	100	DPU
20	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	22	33	DPPR
21	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks	0,15	1	DPPR
22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	82	88	DPU
23	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	81	84	DPPR
24	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	98,54	99,29	DPU
25	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	97,1	97,53	DPU
26	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	%	98,54	99,29	DPU
27	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Liter/detik	1.720	2.770	DPU
28	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	%	78,51	78,59	DPU

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
29	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%	97,1	97,53	DPU
30	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	%	0,78	0,81	DPU
31	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	%	4,4	5,5	DPU
32	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kota	0	1	DPU
33	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan	Institusi / Lembaga	61	76	DPU
34	Panjang pembangunan jalan tol	km	33,12	33,12	DPU
35	Panjang pembangunan jalan kota (km)	km	511.070,0	511.077,50	DPU
36	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	53,47	55,36	DPU
37	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	73,9	-	DPU
38	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	92,29	92,98	DPU
49	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	93,39	94,91	DPU
40	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	7,62	17,2	DPU
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	0,01	0,04	DISPERKIM
2	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	%	16,8	16,95	DISPERKIM
3	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	%	51,47	100	DISPERKIM
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28,75	34	DISPERKIM
5	Nilai SAKIP OPD	Poin	75	80	DISPERKIM
6	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	%	0,71	2,84	DISPERKIM
7	Luasan Kawasan Kumuh (Ha)	Ha	74,4	0	DISPERKIM
8	Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	%	0,01	0,12	DISPERKIM
9	Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan	%	1,74	2,78	DISPERKIM
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	75	90	DISPERKIM
11	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0,71	2,84	DISPERKIM
12	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	0	DISPERKIM
13	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	%	2,57	2,01	DISPERKIM
14	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%	97,43	97,99	DISPERKIM
15	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	2,36	5,91	DISPERKIM

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
16	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	9,85	55,95	DISPERKIM
17	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	0	100	DISPERKIM
18	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	2,41	2,21	DISPERKIM
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	Persentase Penurunan Dampak Buruk Yang Diakibatkan Bencana	%	5	25	BPBD
2	Persentase Penurunan Angka Kebakaran per Tahun	%	5	25	BPBD
3	Nilai SAKIP OPD	Poin	72	78	BPBD
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28,75	34	BPBD
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satpol PP	Poin	77	83	SATPOL PP
6	Nilai SAKIP OPD	Poin	70,57	71,29	SATPOL PP
7	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28	31	SATPOL PP
8	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	%	13,5	12	SATPOL PP
9	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	%	87,5	94	BPBD
10	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	%	87,5	95	BPBD
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	72	78	BPBD
12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	78	81	SATPOL PP
13	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Layanan	192	840	SATPOL PP
14	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	91	94	SATPOL PP
15	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	97,8	98,5	SATPOL PP
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
1	Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	%	62	67	DINSOS
2	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola	%	80	87	DINSOS
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28	31	DINSOS
4	Nilai SAKIP OPD	Poin	70	80	DINSOS
5	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan	%	86,66	96,66	DINSOS
6	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi	%	78,94	81,81	DINSOS
7	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	85,36	92,68	DINSOS
8	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	82	85	DINSOS

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
9	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	80	87	DINSOS
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	71	74	DINSOS
11	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan	RTS	5.460	5.150	DINSOS
12	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	%	87,3	88	DINSOS
13	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	orang	55	70	DINSOS
14	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	%	49,37	57,44	DINSOS
15	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	61,06	64,18	DINSOS
16	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	82	85	DINSOS
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	64,7	67,4	DISNAKER
2	Nilai SAKIP OPD	Poin	65	75	DISNAKER
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	33,18	34	DISNAKER
4	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	%	3,3	3,6	DISNAKER
5	persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	%	55	58	DISNAKER
6	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	23,5	23,8	DISNAKER
7	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	70,4	75	DISNAKER
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	85	85	DISNAKER
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Prosentase RKA Responsif Gender	%	8	25	DP3AKB
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	27,3	28,4	DP3AKB
3	Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender	%	88,24	100	DP3AKB
4	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	%	8,5	8,01	DP3AKB
5	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	%	71,43	100	DP3AKB
6	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah	%	33,33	41,67	DP3AKB
7	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	%	32	50	DP3AKB
8	Persentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA	%	67	71,5	DP3AKB
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	76	79	DP3AKB
10	Jumlah kebijakan yang responsif	Poin	37	40	DP3AKB

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	gender mendukung pemberdayaan perempuan				
11	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	%	20	21	DP3AKB
12	Presentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	%	0,0031	0,0034	DP3AKB
13	Presentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di Lembaga Eksekutif (eselon II)	%	0,25	0,29	DP3AKB
14	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	%	0,026	0,023	DP3AKB
15	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan yang mendapat layanan komperehensif	%	84,1	84,7	DP3AKB
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
1	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	%	10	16	DP3
2	Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari)	%	94,5	95	DP3
3	Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari)	%	100	100	DP3
4	Persentase Keamanan Pangan	%	89	90	DP3
5	Nilai SAKIP OPD	Poin	81,2	82	DP3
6	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28	31	DP3
7	Persentase Infrastruktur yang Tersedia	%	25	40	DP3
8	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	0,053	0,143	DP3
9	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	55	70	DP3
10	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman	%	89	90	DP3
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	72	75	DP3
12	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Poin	87	90	DP3
13	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	0,053	0,143	DP3
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
1	Prosentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (IMTN dan Fasilitasi Sengketa Tanah)	%	89	92	DPPR
2	Prosentase luas tanah yang telah dibebaskan	%	69,49	80,24	DPPR
3	Nilai SAKIP OPD	Poin	65,95	66	DPPR
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28,5	30	DPPR
5	Persentase luas pemanfaatan ijin lokasi yang diterbitkan	%	72	78	DPPR
6	Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi	%	40	37,5	DPPR
7	Persentase Luas Tanah yang diberikan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	%	69,49	80,24	DPPR
8	Persentase Luas tanah yang Sudah	%	89	92	DPPR

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Dimanfaatkan				
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
1	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Poin	65,33	65,53	DLH
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	89,12	89,42	DLH
3	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	47,42	47,72	DLH
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	81,18	81,24	DLH
5	Nilai SAKIP OPD	Poin	72	75	DLH
6	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28,75	34	DLH
7	Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan	%	50	100	DLH
8	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan	%	100	100	DLH
9	Persentase RTH yang dikelola	%	10,59	10,65	DLH
10	Persentase Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 Yang Melaporkan Limbahnya	%	44,74	76,32	DLH
11	Persentase Usaha atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan	%	29,27	34,15	DLH
12	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	%	100	100	DLH
13	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang terselenggara	%	100	100	DLH
14	Persentase Penanganan Pengaduan yang tertangani	%	100	100	DLH
15	Persentase pengelolaan persampahan	%	99	100	DLH
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	77,66	79,16	DLH
17	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	%	88	94	DLH
18	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Ton	101.461	107.671	DLH
19	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton	34.130	45.428	DLH
20	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen	1	2	DLH
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk	Nilai	81,97	84,45	DISDUKCAPIL
2	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil	Nilai	84,94	87,51	DISDUKCAPIL
3	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Nilai	77,25	84,41	DISDUKCAPIL
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	35,35	35,5	DISDUKCAPIL
5	Nilai SAKIP OPD	Poin	79,07	80,57	DISDUKCAPIL
6	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	%	89,78	94,79	DISDUKCAPIL
7	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	%	96,53	96,6	DISDUKCAPIL
8	Persentase pengelolaan data administrasi kependudukan secara elektronik	%	100	100	DISDUKCAPIL
9	Persentase Dokumen Profil Kependudukan yang Tersusun	%	100	100	DISDUKCAPIL
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	79	83,5	DISDUKCAPIL

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
11	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	%	98,05	98,2	DISDUKCAPIL
12	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Poin	99,2	99,35	DISDUKCAPIL
13	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	%	98,05	98,2	DISDUKCAPIL
14	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	%	98,05	98,2	DISDUKCAPIL
15	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistic Register)	Keterangan	Ada	Ada	DISDUKCAPIL
16	Perekaman KTP elektronik	%	99,34	99,37	DISDUKCAPIL
17	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	70	85	DISDUKCAPIL
18	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	55,88	94,12	DISDUKCAPIL
G	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1	Persentase Kelurahan Kategori Bekembang	%	11,76	58,82	DP3AKB
2	Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	%	11,76	58,82	DP3AKB
3	Nilai Swadaya Masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	Rupiah	83.950.000.000	420.600.000.000	DP3AKB
H	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi	%	70,63	70,65	DP3AKB
2	Nilai SAKIP OPD	Poin	84,4	84,49	DP3AKB
3	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	%	64	70	DP3AKB
4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani / Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%)	%	13,4	11,2	DP3AKB
5	Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/ poktan	%	12,75	20,35	DP3AKB
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Poin	78,32	79,04	DISHUB
2	VC Ratio di Jalan Kota	Indeks	0,63	0,6	DISHUB
3	Persentase sarana dan prasarana kedermagaan yang dikelola	%	59	65	DISHUB
4	Nilai SAKIP OPD	Poin	77,25	80	DISHUB
5	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28,75	34	DISHUB
6	Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi.	%	87	93	DISHUB
7	Persentase load faktor angkutan orang umum.	%	47	62	DISHUB
8	Persentase pelayanan kepelabuhanan	%	64	70	DISHUB
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	77	80	DISHUB
10	Jumlah dermaga penyebrangan	lokasi	1	1	DISHUB
11	Jumlah pelabuhan strategis	lokasi	4	4	DISHUB
J	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Indeks Domain Kebijakan SPBE	Nilai	2,6	3,2	DISKOMINFO

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	3,7	3,9	DISKOMINFO
3	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	3,3	3,8	DISKOMINFO
4	Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	2,1	2,5	DISKOMINFO
5	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	88	90	DISKOMINFO
6	Nilai SAKIP OPD	Poin	65,5	67	DISKOMINFO
7	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	32	35	DISKOMINFO
8	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	80	80	DISKOMINFO
9	Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara	%	80	80	DISKOMINFO
10	Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegerasi	%	80	80	DISKOMINFO
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	85	85	DISKOMINFO
12	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telpon genggam	%	88	91	DISKOMINFO
13	Proporsi individu yang menggunakan internet	%	72	75	DISKOMINFO
K	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
1	Persentase Koperasi Berkualitas	Persen	20,92	24,06	DKUMKMP
2	Persentase Pertumbuhan Omset UMK	Persen	5,29	5,41	DKUMKMP
3	Nilai SAKIP OPD	Poin	78,9	80	DKUMKMP
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28,75	34	DKUMKMP
5	Persentase Koperasi yang Telah Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	%	5,65	6,28	DKUMKMP
6	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	%	20,92	24,06	DKUMKMP
7	Persentase Koperasi yang Meningkat Status Kesehatannya	%	51,85	56,67	DKUMKMP
8	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	%	30,68	55,09	DKUMKMP
9	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya (sumber dana : DAK non fisik)	%	32,78	59,34	DKUMKMP
10	Persentase Koperasi Sehat	%	5,02	15,06	DKUMKMP
11	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	%	83,32	88,41	DKUMKMP
12	Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	%	5,25	5,36	DKUMKMP
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	70	80	DKUMKMP
14	Persentase kredit UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) terhadap seluruh jumlah kredit di bank	%	32,56	34,06	DKUMKMP
L	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
1	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	%	100	100	DPMPT
2	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	%	0,11	0,11	DPMPT
3	Nilai SAKIP OPD	Poin	77,4	78	DPMPT
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	34,13	34,16	DPMPT
5	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang	%	5	25	DPMPT

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penanaman Modal				
6	Presentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	%	85	100	DPMPT
7	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	%	68	71	DPMPT
8	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya	%	100	100	DPMPT
9	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif	%	85	88	DPMPT
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	79	82	DPMPT
M	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi, kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	12	25	DPOP
2	Peningkatan prestasi olahraga	%	15,96	30,96	DPOP
3	Nilai SAKIP OPD	Poin	74	75	DPOP
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28,75	34	DPOP
5	Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri	%	2,4	2,7	DPOP
6	Persentase Atlet yang Berprestasi	%	7	26,2	DPOP
7	Persentase Organisasi Kepramukaan Aktif	%	100	100	DPOP
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	72	75	DPOP
N	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	80	90	DISKOMINFO
O	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
1	Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah	%	80	80	DISKOMINFO
2	Persentase perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan komunikasi sandi	%	80	80	DISKOMINFO
P	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
1	Nilai pemajuan kebudayaan	Nilai	0,43	1,37	DISDIKBUD
2	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	45	78,08	DISDIKBUD
3	Persentase Kelompok Sanggar Seni yang Terlibat dalam Festival Seni	%	27,36	39,8	DISDIKBUD
4	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	%	33,33	80	DISDIKBUD
5	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	95,59	100	DISDIKBUD
6	Persentase SDM Pengelola Permuseuman yang tersertifikasi	%	0	55,56	DISDIKBUD
Q	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
1	Persentase Peningkatan layanan Perpustakaan	%	10	10	DISPUSTAKAR
2	Nilai SAKIP OPD	Poin	72	78	DISPUSTAKAR
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28,75	34	DISPUSTAKAR
4	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional	%	5	8	DISPUSTAKAR

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	79	82	DISPUSTAKAR
6	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	55	70	DISPUSTAKAR
R	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
1	Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	90,2	90,5	DISPUSTAKAR
2	Persentase Arsip yang dikelola	%	70	100	DISPUSTAKAR
3	Persentase Arsip yang dilindungi dan terselamatkan	%	65	100	DISPUSTAKAR
4	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip	%	0	100	DISPUSTAKAR
6	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	DISPUSTAKAR
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	Total Produksi Sub Sektor Perikanan	Ton	4.597	23.521	DP3
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	4.300	22.000	DP3
3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Ton	297	1.521	DP3
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
1	Tingkat Hunian akomodasi	%	36	53	DPOP
2	Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi	%	26,92	46,15	DPOP
3	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	%	3	6	DPOP
4	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	%	20	26	DPOP
5	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektualnya	%	18	35	DPOP
6	Persentase peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	%	10	16	DPOP
7	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	%	N/A	N/A	DPOP
8	Jumlah wisatawan mancanegara	orang	23.235	55.231	DPOP
9	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	orang	1.476.765	3.344.769	DPOP
10	Jumlah kunjungan wisatawan kota Balikpapan	orang	1.500.000	3.400.000	DPOP
11	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	orang	6.800	7.400	DPOP
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
1	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan	Ton	17.800	89.300	DP3
2	Total Produksi Sub Sektor Hortikultura	Ton	126.600	667.100	DP3
3	Total Produksi Sub Sektor Perkebunan	Ton	10.193	52.505	DP3
4	Total Produksi sub sektor peternakan	Ton	20.600	103.500	DP3
5	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	%	45	60	DP3
6	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	%	20	35	DP3
7	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	%	75	90	DP3
8	Persentase Kesehatan Hewan dan	%	70	85	DP3

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani				
9	Persentase Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	%	45	60	DP3
10	Persentase Rekomendasi yang Diterbitkan (persen)	%	55	70	DP3
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
1	pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	6,52	6,55	DISDAG
2	persentase wajib tera yang melakukan tera / tera ulang	%	81	87	DISDAG
3	inflasi pangan bergejolak	%	03-May	03-May	DISDAG
4	persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun / ditingkatkan kapasitasnya / direvitalisasi	%	8,33	58,32	DISDAG
5	persentase pertumbuhan pelaku usaha yang telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	8,7	11	DISDAG
6	Nilai SAKIP OPD	Poin	70	80	DISDAG
7	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28,75	34	DISDAG
8	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Diverifikasi dan Memperoleh Rekomendasi	%	60	75	DISDAG
9	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	%	80	93	DISDAG
10	Persentase Penurunan Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	%	5,6	5	DISDAG
11	Nilai Ekspor Bersih Non Migas	Juta Dollar	1.350	2.050	DISDAG
12	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	71	76	DISDAG
13	Persentase Pelaku Binaan yang Meningkat Omsetnya	%	60	80	DISDAG
14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	78	84	DISDAG
15	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	28	31	DISDAG
16	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	71	76	DISDAG
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
1	Persentase Pertumbuhan Investasi IKM	Persen	0,03	0,22	DKUMKMP
2	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	1,31	2,6	DKUMKMP
3	Persentase Hasil Pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	%	12,96	15,69	DKUMKMP
4	Persentase Penyediaan Informasi Industri yang Lengkap dan Terkini	%	58,33	66,67	DKUMKMP
5	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	%	3,5	5	DKUMKMP
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		58,33	66,67	DKUMKMP
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
A	SEKRETARIAT DAERAH				
1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	32	32,3	SETDA
2	Persentase Kebijakan Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat,	%	98,03	98,69	SETDA

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Hukum dan Kerjasama yang ditetapkan dan ditindaklanjuti				
3	Persentase Kebijakan Bagian Perekonomian, adm. Pembangunan, pbj yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	%	100	100	SETDA
4	Nilai SAKIP OPD	Poin	78,5	80	SETDA
5	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama	%	100	100	SETDA
6	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	%	100	100	SETDA
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	79	82	SETDA
8	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Poin	100	100	SETDA
9	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	%	86	89	SETDA
B	SEKRETARIAT DPRD				
1	Nilai SAKIP OPD	Poin	68	74	SETWAN
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28,75	34	SETWAN
3	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	Nilai	72	78	SETWAN
4	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Funsgi DPRD yang terfasilitasi	%	100	100	SETWAN
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	72	78	SETWAN
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
A	PERENCANAAN				
1	Nilai SAKIP (Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja)	Poin	56,24	56,28	BAPPEDA LITBANG
2	Nilai SAKIP OPD	Poin	83,08	83,38	BAPPEDA LITBANG
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	33	36	BAPPEDA LITBANG
4	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Poin	32.769	32.796	BAPPEDA LITBANG
5	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Poin	23.466	23.484	BAPPEDA LITBANG
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	85,55	85,7	BAPPEDA LITBANG
7	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	Proyek	1	2	BAPPEDA LITBANG
8	Jumlah Alokasi Pemerintah Menyiapkan Proyek, Transaksi Proyek, dan dukungan Pemerintah Dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	Rp	100.000.000	500.000.000	BAPPEDA LITBANG
9	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	%	63	64,5	BAPPEDA LITBANG

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
10	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Nilai	3,28	3,31	BAPPEDA LITBANG
11	PDB per kapita	Nilai	156,3	156,33	BAPPEDA LITBANG
12	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Nilai	4,8	4,83	BAPPEDA LITBANG
B	KEUANGAN				
1	Nilai SAKIP OPD	Poin	60	75	BKAD
2	Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)		WTP	WTP	BKAD
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28,75	34	BKAD
4	Persentase Peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	35,57	83,31	BPPDRD
5	Nilai SAKIP OPD	Poin	69	75	BPPDRD
6	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28	32	BPPDRD
7	Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu	%	100	100	BKAD
8	Persentase Peningkatan BMD yang terkelola	%	100	100	BKAD
9	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	Milyar	852,37	1.321,97	BPPDRD
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	76	82,5	BKAD
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	83	86	BPPDRD
12	Proporsi Pengeluaran Utama Pemerintah Terhadap Anggaran yang Disetujui	%	95	95	BKAD
13	Persentase Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	%	100	100	BKAD
14	Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi terhadap PDB menurut Sumbernya	%	0,71	0,73	BPPDRD
15	Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB	%	0,52	0,57	BPPDRD
C	KEPEGAWAIAN				
1	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	57	62	BKPSDM
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	34,06	34,69	BKPSDM
3	Nilai SAKIP OPD	Poin	89,75	90,56	BKPSDM
4	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja	%	88,8	90,81	BKPSDM
5	Persentase sistem informasi ASN yang terintegrasi	%	40	100	BKPSDM
6	Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik	%	97,99	98,79	BKPSDM
7	Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	%	3,68	13,76	BKPSDM
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	81	84	BKPSDM
9	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	110,27	144,56	BKPSDM
10	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga	%	14,65	20,23	BKPSDM

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	kesehatan)				
11	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	93,29	111,18	BKPSDM
12	Indeks NSPK Manajemen ASN	Poin	70	100	BKPSDM
D	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
1	Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi Sesuai Rencana Pengembangan Kompetensi	%	14,91	100	BKPSDM
E	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
1	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	62	65	BAPPEDA LITBANG
2	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	BAPPEDA LITBANG
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
A	INSPEKTORAT DAERAH				
1	Kapabilitas APIP	Level	level 3	level 4	INSKOT
2	Nilai SAKIP Kota Komponen Evaluasi	Poin	7,42	7,43	INSKOT
3	Nilai SAKIP OPD	Poin	78,41	79,01	INSKOT
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28	31	INSKOT
5	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	%	85,33	91,33	INSKOT
6	Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan	%	63,33	98,33	INSKOT
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	84	90	INSKOT
VII	UNSUR KEWILAYAHAN				
A	KECAMATAN				
1	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	69	70,5	KEC BALBAR
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	80,46	80,61	KEC BALBAR
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	27,25	28,25	KEC BALBAR
4	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	69,45	69,75	KEC BALKOT
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	82,89	83,89	KEC BALKOT
6	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	27,25	28,25	KEC BALKOT
7	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	72	75	KEC BALSEL
8	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	81	83	KEC BALSEL
9	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	27,25	28	KEC BALSEL
10	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	70,43	71,18	KEC BALTENG
11	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	81	81,45	KEC BALTENG
12	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	27,25	28	KEC BALTENG
13	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	69,45	69,75	KEC BALTIM
14	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	78	78,3	KEC BALTIM
15	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	27,1	27,4	KEC BALTIM
16	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	74,5	75,25	KEC BALUT
17	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	81,3	81,45	KEC BALUT
18	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	27,25	28	KEC BALUT
19	Persentase Pengaduan Pelayanan	Poin	100	100	KEC BALBAR

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Administratif Yang Ditindaklanjuti				
20	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	17	20	KEC BALBAR
21	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	100	100	KEC BALBAR
22	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Poin	100	100	KEC BALSEL
23	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	8,25	9	KEC BALSEL
24	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	100	100	KEC BALSEL
25	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Poin	100	100	KEC BALKOT
26	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	10,2	10,8	KEC BALKOT
27	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	100	100	KEC BALKOT
28	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	Poin	100	100	KEC BALTIM
29	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	16,45	16,75	KEC BALTIM
30	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	100	100	KEC BALTIM
31	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Poin	100	100	KEC BALUT
32	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	16	19	KEC BALUT
33	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	100	100	KEC BALUT
34	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Poin	100	100	KEC BALTENG
35	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	12,75	12,75	KEC BALTENG
36	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	100	100	KEC BALTENG
37	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	71	72,5	KEC BALBAR
38	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	71	72,5	KEC BALKOT
39	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	72	75	KEC BALSEL
40	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	79,5	79,8	KEC BALTIM
41	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	72	75	KEC BALUT
42	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	70,15	70,6	KEC BALTENG
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
A	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
1	Nilai SAKIP OPD	Poin	63	70	BADAN KESBANGPOL
2	Persentase partisipasi lembaga politik dalam pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	%	80	67	BADAN KESBANGPOL
3	Presentase Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	%	83	89	BADAN KESBANGPOL
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28	30	BADAN KESBANGPOL
5	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4	%	62	68	BADAN KESBANGPOL

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Konsensus Nasional				
6	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	%	100	100	BADAN KESBANGPOL
7	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	%	84	89	BADAN KESBANGPOL
8	Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	%	86	98	BADAN KESBANGPOL
9	Persentase Potensi Konflik yang telah dilakukan monitoring	%	83	89	BADAN KESBANGPOL
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	82	88	BADAN KESBANGPOL

6.3 Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2023.

Kementerian Dalam Negeri telah melakukan sosialisasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2023. Kebijakan tersebut secara umum memberikan penekanan pada sinergi pembangunan nasional dan daerah. Terkait arah kebijakan pembangunan bidang urusan, pedoman penyusunan RKPD 2023 telah memuat kinerja, indikator, dan target di dalam urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Hal ini berpotensi menimbulkan kompleksitas perencanaan, jika daerah menganggap keterkaitan hanya secara eksplisit, terutama ketika indikator dan target kinerja yang diamanatkan pemerintah pusat tersebut tidak sesuai dengan RPJMD, RKPD, dan Renstra. Merespon hal tersebut, maka di dalam RKPD Kota Balikpapan perlu melakukan telaah kesesuaian dengan program beserta indikator dan target kinerja yang telah tercantum di dalam RPJMD dan RKPD. Telaah tersebut cukup dituangkan di dalam kertas kerja.

Tidak menutup kemungkinan akan terdapat indikator kinerja dan target di dalam pedoman RKPD 2023 yang tidak sama secara eksplisit dengan RPJMD dan RKPD. Namun hal tersebut, tidak mengurangi keterkaitan jika setiap bidang urusan yang dijalankan pemerintah daerah tetap berorientasi pada kinerja dan masing-masing Renstra dan Renja mampu mengimplementasikan amanat nasional melalui program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah disusun. Adapun kinerja yang diamanatkan di setiap bidang urusan di dalam pedoman penyusunan RKPD 2023, sebagai berikut:

Tabel 6. 3 Kinerja Bidang Urusan di dalam Pedoman Penyusunan RKPD 2023

NO	BIDANG URUSAN	KINERJA
1	Pendidikan	Terpenuhinya kebutuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan
2	Kesehatan	Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit rujukan
		Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan
		Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan
		Meningkatnya efektivitas dan cakupan pengawasan dan pembinaan dalam pemenuhan ketentuan perizinan pedagang besar farmasi (pbf) cabang, sarana pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) dan industri produk obat tradisional (usaha kecil obat meningkatnya efektivitas dan cakupan pengawasan dan pembinaan dalam pemenuhan ketentuan perizinan pedagang besar farmasi (pbf) cabang, sarana pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) dan industri produk obat tradisional (usaha kecil obat
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya akses air minum dan sanitasi layak dan aman
		Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) bidang pekerjaan umum
		Terlaksananya pengelolaan SDA terpadu
		Terwujudnya konektivitas jalan
		Terpeneuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang
		Terlakasananya pengendalian pemanfaatan ruang. Sasaran ini memiliki indikator

NO	BIDANG URUSAN	KINERJA
		kinerja pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah, dan Kota Balikpapan tercantum secara eksplisit sebagai lokus pencapaian sasaran.
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan rakyat
		Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani
		Meningkatnya jumlah rumah layak huni
		Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar
		Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana
		Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar
6	Sosial	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
		Terpenuhi kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
		Terpenuhinya kebutuhan dasar standar pelayanan minimal (spm) bidang sosial
		Tersedianya data fakir miskin
7	Tenaga Kerja	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
		Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan
		Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak – haknya
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
		Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
9	Pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri
		Meningkatnya pemanfaatan pangan yang berkualitas serta terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
10	Pertanahan	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah
11	Lingkungan Hidup	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup
		Meningkatnya penanggungjawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin pplh dan izin puulh yang diterbitkan
		Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien
		Berkembangnya status pembangunan desa
		Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana
		Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga
15	Perhubungan	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan
		Terwujudnya konektivitas nasional
		Meningkatnya keselamatan transportas
16	Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital
		Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital
		Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah
		Tersedianya Infrastruktur Digital
		Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk pertumbuhan ekonomi
17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern
		Mewujudkan UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang mampu Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Global
18	Penanaman Modal	Tercapainya target realisasi penanaman modal
19	Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Nasional dan Internasional
		Meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila
		Meningkatnya partisipasi organisasi Kepramukaan dalam pembangunan bangsa
20	Statistik	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
		Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN
21	Persandian	Menguatnya keamanan siber lingkungan Pemerintah Daerah
22	Kebudayaan	Pemajuan kebudayaan
		Kelestarian cagar budaya
23	Perpustakaan	Pembangunan literasi masyarakat meningkat
		Peningkatan kegemaran membaca masyarakat
24	Kearsipan	Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan loka
		Penerapan e-Arsip terintegrasi
		Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
		Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang Ditindaklanjuti
25	Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut
		Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing
		Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif

NO	BIDANG URUSAN	KINERJA
26	Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional
27	Pertanian	Meningkatnya produktivitas pertanian
		Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan
28	Perdagangan	Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial
		Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen
		Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk/pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu dan tempat
		Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi
		Terwujudnya iklim usaha yang kondusif
		Terwujudnya implementasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang
		Meningkatnya kesesuaian alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan terhadap ketentuan yang berlaku
		Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat
		Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan
29	Perindustrian	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas
		Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap pdb
		Meningkatnya tenaga kerja di keuangan daerah sektor industri pengolahan nonmigas
		Tercapainya pertumbuhan nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas
		Tercapainya pertumbuhan nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas
30	Transmigrasi	Meningkatnya Status Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi

Selain arah kebijakan bidang urusan, di dalam Pedoman Penyusunan RKPD 2023 juga memuat hal khususnya lainnya sebagai arahan prioritas pembangunan dari pemerintah pusat kepada daerah. Beberapa hal khusus tersebut memiliki kemendesakan untuk merespon isu strategis dan permasalahan aktual nasional maupun tindak lanjut kebijakan makro. Implementasi hal khusus tersebut membutuhkan sinergitas pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah daerah dalam hal ini perlu merespon dengan mengidentifikasi keterkaitan antara arahan khusus tersebut dengan sasaran pembangunan dan prioritas daerah; telaah keterkaitan dengan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah disusun di dalam RPJMD, RKPD dan Renstra serta menjadikan arahan khusus tersebut sebagai panduan, arah kebijakan, bahkan standar pelayanan dan operasional prosedur bagi perangkat daerah di dalam menjalankan program, kegiatan, dan subkegiatan yang terkait. Berikut tabel penyandingan implementasi hal khusus dalam Pedoman Penyusunan RKPD 2023 dengan dukungan program/kegiatan/sub kegiatan di RKPD Kota Balikpapan 2023:

Tabel 6. 4 Penyandingan Hal Khusus dalam Pedoman Penyusunan RKPD 2023 dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023

NO	HAL KHUSUS		DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DI RKPD KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023
	ARAHAN	RINCIAN	
1.	Pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah bersama mitra Pemerintah dalam hal ini Lembaga Kemasyarakatan	Penanganan stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait penanganan Gizi Buruk;	Masuk dalam Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Dukungan penguatan kelembagaan, pengelolaan dan pelaksanaan pada 10 Program Pokok PKK, yaitu Penghayatan dan pengamalan pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan ktrampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoprasi, kelestarian lingkungan hidup dan	Masuk dalam Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, PKK,Posyandu,LPM dan Karang taruna

NO	HAL KHUSUS		DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DI RKPD KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023
	ARAHAN	RINCIAN	
		perencanaan sehat sampai tingkat desa/kelurahan khususnya penuntasan dan penyelesaian stunting dan kegiatan lain yang berdampak langsung pada peningkatan angka kesehatan dan penurunan kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas;	
		Pembinaan dan penguatan kelembagaan serta program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan meliputi penguatan kapasitas kader serta dukungan alat kesehatan dasar seperti timbangan ibu/anak, oxymeter, tensimeter, insentif kader posyandu dan kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Melakukan program penguatan dan pengetahuan ketahanan keluarga kepada masyarakat melalui TP PPK, Kader PKK dan Posyandu dalam rangkamendukung Pemerintah terhadap pemberantasan bahaya Narkotika;	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		Mendorong perekonomian berbasis keluarga melalui pemanfaatan lahan/pekarangan dengan tanaman bernilai ekonomi dan produktif;	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Mendorong semangat kewiraswastaan di bidang industry kerajinan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta memperluas pangsa pasar hasil kerajinan;	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Memajukan dan mendorong perekonomian melalui Desa Wisata dan usaha yang dikelola oleh keluarga.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata
2.	Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang tahapanya sudah dimulai pada bulan Juni tahun 2022, Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 agar memasukkan program, kegiatan, sub kegiatan dukungan sukses pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 pada urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sebesar 79,50 persen pada tahun 2024 sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 serta memelihara stabilitas politik dalam negeri	Pendidikan politik bagi Partai Politik dan Masyarakat sesuai amanat Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		Alokasi belanja hibah bantuan keuangan partai politik termasuk kenaikan bantuan keuangan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota sesuai hasil pemilu 2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan kabupaten/kota periode 2019-2024.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Gerakan Kemitraan Bersama Organisasi Kemasyarakatan Sipil dan Perguruan Tinggi mensukseskan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Pembinaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan (FORKOPIMCAM)	Sub-Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
		Pembumian Nilai Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Penanganan potensi ancaman, hambatan dan gangguan di daerah melalui deteksi dini dan cegah dini melalui pembentukan Tim Kewaspadaan Dini dan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan temu cepat dan lapor cepat permasalahan/gangguan melalui pusat komunikasi	Masuk di dalam beberapa sub-kegiatan di kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
		Pembentukan dan Operasionalisasi Tim Pemantauan dan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan dan Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	Masuk di dalam beberapa sub-kegiatan di kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
		Penguatan Iklan Layanan Pendidikan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		Pembinaan Karya Seni dan Budaya Sebagai Perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberatasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN)	Masuk di dalam beberapa sub-kegiatan di kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Koordinasi dan monitoring tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024	Masuk di dalam beberapa sub-kegiatan di kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
3.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
			Program Pembinaan dan Pengembangan

NO	HAL KHUSUS		DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DI RKPD KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023
	ARAHAN	RINCIAN	
			Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		Penanganan konflik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
		Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi vertikal	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
3.	Peningkatan kualitas layanan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu diperhatikan pemberdayaan satuan kerja pengelola urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menjadi pengelola sentra layanan terpadu penanganan kekerasan seksual, serta pembentukan dan pemberdayaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).	Tidak ada rincian	Program Perlindungan Perempuan
			Program Perlindungan Khusus Anak
4.	Meningkatkan pelayanan Bidang Pendidikan	Meningkatkan pembinaan dan penguatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) baik pada lingkup provinsi maupun kab/kota	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
		Dukungan terhadap Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) melalui percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Dukungan terhadap Implementasi Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan mendorong percepatan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi pendidik, tenaga kependidikan, serta pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas pada satuan Pendidikan, dengan memperhatikan level PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin
		Penguatan Pendidikan karakter dan budaya antikorupsi pada satuan pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum
		Penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan (Inklusi)	Masuk sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
5.	Peningkatan kualitas layanan bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya paling sedikit: 1) KK; 2) KTP-el; 3) Akta Kelahiran; 4) Akta Perkawinan; 5) Akta Kematian; dan 6) Surat Keterangan Pindah.	Program Pendaftaran Penduduk
		Penertbitan dokumen kependudukan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Program Pendaftaran Penduduk
		Batas waktu penyelesaian dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

NO	HAL KHUSUS		DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DI RKPD KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023
	ARAHAN	RINCIAN	
		Fasilitas peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan paling sedikit: 1) Menyediakan layanan nomor telepon pengaduan (call center); 2) Menyediakan nomor telepon pengaduan; 3) Setiap hari mengumumkan semua dokumen yang sudah diterbitkan melalui situs web/papan pengumuman; dan 4) Setiap hari mengumumkan jumlah blanko KTP-el yang masih tersedia melalui papan pengumuman/tempat layanan.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Bupati/wali Kota wajib memfasilitasi Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
6.	Pemerintah Daerah pada tahun 2023 memulai penyusunan rancangan awal RPJPD tahun 2025- 2045 yang tercantum dalam RKPD 2023	Tidak ada rincian	Belum ada indikator yang spesifik tentang RPJPD, namun sudah ada wadahnya pada program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
7.	Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah bertugas untuk menetapkan Perkada tentang RKPD Tahun 2023.	Tidak ada rincian	Arahan
8.	Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksan a tugas kepala daerah bertugas untuk menetapkan Perkada tentang RKPD Tahun 2023	Tidak ada rincian	Arahan
9.	Pemerintah Daerah dalam menetapkan indikator makro dapat memperhatikan indikator makro yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 yaitu indeks pambangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan (indeks gini).	Tidak ada rincian	Arahan
	Pemerintah Daerah perlu melakukan penyelarasan indikator makro daerah antara lain: 1). Laju pertumbuhan ekonomi (%); 2). Tingkat kemiskinan (%); 3). Tingkat pengangguran terbuka (%); 4).Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 5). Rasio Gini; dan 6). Penurunan Emisi GRK (%).		
10.	Uraian dalam nomor ini untuk Pemerintah Provinsi	Rincian untuk Pemerintah Provinsi	-
11.	Peningkatan kualitas layanan Bidang Tenaga kerja	Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki hak memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja guna peningkatan kompetensinya dan Setiap Pekerja Migran Indonesia yang telah kembali ke Indonesia memiliki hak pelindungan setelah bekerja dilakukan melalui pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
		Pelaksanaan Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
		Gubernur dan Bupati/Walikota memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai Pemerintah Daerah dengan status Non Apatatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja beserta keluarganya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Arahan

BAB VII
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 merupakan dokumen yang akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dokumen ini disusun setelah melalui koordinasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan (stakeholder) melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan, khususnya sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan yang akan ditetapkan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 mengacu kepada Rancangan Akhir RKP Tahun 2023, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan timur Tahun 2023, RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 serta analisa permasalahan Tahun sebelumnya dan Isu Strategis yang sedang berkembang pada Tahun 2022.

Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Rancangan Akhir RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Rancangan Akhir RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja PD) untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan program dan kegiatan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsinya yang masih akan disempurnakan kembali ke dalam Rancangan Akhir RKPD tahun 2023
3. Seluruh *stakeholders* pembangunan (masyarakat dan dunia usaha) diharapkan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan berbagai program/kegiatan pembangunan tahun 2023. Masyarakat dapat berperan dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundangan-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pembangunan yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat luas juga dapat berperanserta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.

Rencana program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Balikpapan tahun 2023 yang telah dilaksanakan diharapkan dapat dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 secara tepat berdasarkan prinsip efektivitas,

efisiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar unit kerja, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi yang melekat pada struktur organisasi pemerintahan Kota Balikpapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, sehingga kinerja pembangunan semakin meningkat dan cita-cita pembangunan Kota Balikpapan dapat tercapai.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD